# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

## KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2021 - 2026









BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Klaten merupakan jalur strategis penghubung dan berada di tengah pusat ekonomi Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta sehingga memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan pembangunan;

b. bahwa agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh wilayah, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
22. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

## BAB II
## RPJMD
### Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, dan program pembangunan daerah.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
(4) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
    d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
    e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
    f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
    g. BAB VII : Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
    h. BAB VIII : Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    i. BAB IX : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI
### Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB IV
## PERUBAHAN RPJMD
### Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional; atau
    d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kerugian terhadap kepentingan daerah dan nasional.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Tahun 2021-2026 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 8 – 184 / 2021 )

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pada hakekatnya, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan kurun waktu lima tahun. RPJMD sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembanguan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya

berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat beberapa hal yaitu:

a. arah kebijakan keuangan daerah;
b. strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten. Oleh karena berbagai urgensitas tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada Pasal 268 sampai dengan Pasal 273 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud merugikan kepentingan daerah dan nasional adalah apabila dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 219

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**
**TAHUN 2021**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**DAFTAR TABEL** ..... **iv**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **I-1**
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-8
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-11
1.5. Sistematika Penulisan ..... I-11

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** ..... **II.1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-39
2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-67
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-183
2.5. Analisis Capaian Hasil Kinerja RPJMD Tahun 20216-2021 ..... II-208

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH** ..... **III-1**
3.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah ..... III-1
3.2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... III-5
3.3. Analisis Pendapatan Daerah ..... III-23
3.4. Kerangka Pendanaan ..... III-32

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH** ..... **4-1**
4.1. Permasalahan Pembangunan ..... IV-1
4.2. Isu-Isu Strategis ..... IV-12

**BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN** ..... **V-1**
5.1. Visi ..... V-1
5.2. Misi ..... V-2
5.3. Program Unggulan ..... V-2
5.4. Tujuan dan Sasarann ..... V-3

**BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... **VI-1**
6.1. Strategi Pembangunan Daerah ..... VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ..... VI-20
6.3. Penjabaran Implementasi Program Unggulan Daerah ..... VI-21

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII-1**

7.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... VII-6

7.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... VII-12

7.3 Urusan Pemerintahan Pilihan..... VII-21

7.4 Urusan Penunjang Pemerintahan ..... VII-24

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VIII-1**

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama..... VIII-1

8.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... VIII-5

**BAB IX PENUTUP ..... IX-1**

9.1. Pedoman Transisi ..... IX-1

9.2. Kaidah Pelaksanaan ..... . IX-1

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Klaten ..... | II-2 |
| Tabel 2.2 | Daftar Embung di Kabupaten Klaten ..... | II-7 |
| Tabel 2.3 | Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-9 |
| Tabel 2.4 | Penggunaan Lahan Di Kabupaten Klaten tahun 2020 ..... | II-11 |
| Tabel 2.5 | Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 20216-2020 ..... | II-12 |
| Tabel 2.6 | Potensi Kemampuan Lahan Di Kabupaten Klaten..... | II-13 |
| Tabel 2.7 | Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2016-2020 ..... | II-28 |
| Tabel 2.8 | Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-32 |
| Tabel 2.9 | Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020..... | II-34 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-35 |
| Tabel 2.11 | Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pndidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-37 |
| Tabel 2.12 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-42 |
| Tabel 2.13 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-43 |
| Tabel 2.14 | Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020..... | II-46 |
| Tabel 2.15 | Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020..... | II-46 |
| Tabel 2.16 | Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-67 |
| Tabel 2.17 | Capaian Indikator Lainnya pada Urusan Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-74 |
| Tabel 2.18 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-75 |
| Tabel 2.19 | Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-79 |

Tabel 2.20 Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.21 Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.22 Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.23 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-82
Tabel 2.24 Realisasi Indikator Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel 2.25 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.26 Persentase Dokter IGD RSUD Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kegawatdaruratan Sesuai Standar Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2.27 Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2.28 Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 ..... II-86
Tabel 2.29 Kondisi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2.30 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-88
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 ..... II-88
Tabel 2.32 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Peenataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2020 ..... II-90
Tabel 2.33 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-91
Tabel 2.34 Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Klaten tahun 2020 ..... II-92
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 ..... II-93
Tabel 2.36 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2020 ..... II-93
Tabel 2.37 Jumlah Linmas dan Penegakan Perda Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-94
Tabel 2.38 Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-95
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-95

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Sub-Urusan Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-96
Tabel 2.41 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020 ..... II-97
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2016-2020 ..... II-98
Tabel 2.43 Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2020 ..... II-99
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 ..... II-101
Tabel 2.45 Capaian Indikator Pembentuk IPG 2017-2020 ..... II-103
Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IDG 2017-2020 ..... II-104
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-106
Tabel 2.48 Ketersediaan Bahan Makanan di Kabupaten Klaten tahun 2020 ..... II-107
Tabel 2.49 Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016/2020 ..... II-109
Tabel 2.50 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-110
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2016-2020 ..... II-110
Tabel 2.52 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020 ..... II-111
Tabel 2.53 Capaian IKLH Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-112
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-113
Tabel 2.55 Capaian Kinerja Persampahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-115
Tabel 2.57 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-116
Tabel 2.58 Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel 2.59 Pelatihan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-119
Tabel 2.60 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-121

Tabel 2.61 Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Type C di Kabupaten Klaten Tahun 2021 ..... II-123
Tabel 2.62 Tabel Persandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ..... II-125
Tabel 2.63 Rute Trayek Bus Pedesaan di Kabupaten Klaten (sesuai Ijin)..... II-126
Tabel 2.64 Rute Trayek Angkutan Kota di Kabupaten Klaten ..... II-127
Tabel 2.65 Jaringan Perlintasan Kereta Api Kabupaten Klaten..... II-128
Tabel 2.66 Level Of Service Ruas Jalan di Kabupaten Klatan ..... II-135
Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... II-135
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020..... II-138
Tabel 2.69 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020..... II-140
Tabel 2.70 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020..... II-142
Tabel 2.71 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2016-2020 ..... II-143
Tabel 2.72 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2016-2020 ..... II-144
Tabel 2.73 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2016-2020 ..... II-145
Tabel 2.74 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020 ..... II-145
Tabel 2.75 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2.76 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kerasipan Tahun 2016-2020 ..... II-147
Tabel 2.77 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-149
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020 ..... II-150
Tabel 2.79 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... II-151
Tabel 2.80 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tembakau Rajangan dan Asepan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... II-151
Tabel 2.81 Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-152
Tabel 2.82 Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... II-152
Tabel 2.83 Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... II-153

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.84 | Pemberantasa Penyakit Ternak Menuurt Jenisnya (Vaksinasi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-153 |
| Tabel 2.85 | Banyaknya Darma Tirta dan Kelompok Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2019 | II-154 |
| Tabel 2.86 | Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2016-2020 | II-154 |
| Tabel 2.87 | Luasan Lahan Pengairan di Kabupaten Klaten (Hektar) Tahun 2016-2021 | II-155 |
| Tabel 2.88 | Luas Tambah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam Pada Tanaman Padi Sawah Menurut Jenis Organisme di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 | II-155 |
| Tabel 2.89 | Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020 | II-157 |
| Tabel 2.90 | Capaian Kinerja Pembangunan Urusan perdagangan Tahun 2016-2020 | II-158 |
| Tabel 2.91 | komoditas Ekspor Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-159 |
| Tabel 2.92 | Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-160 |
| Tabel 2.93 | Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020 | II-161 |
| Tabel 2.94 | Jumlah IKM Yang Dibina Tahun 2016 – 2020 | II-162 |
| Tabel 2.95 | Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020 | II-162 |
| Tabel 2.96 | Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-163 |
| Tabel 2.97 | Penebaran Benih Ikan Menurut Areal Objek Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-163 |
| Tabel 2.98 | Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-164 |
| Tabel 2.99 | Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-164 |
| Tabel 2.100 | Realisasi Kelompok Nelayan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-165 |
| Tabel 2.101 | Realisasi Peredaran Ikan Olahan dan Jenis Serta Harga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 | II-165 |
| Tabel 2.102 | Perkembangan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-166 |
| Tabel 2.103 | Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020 | II-167 |

Tabel 2.104 Opini BPK pada Laporan Keuangan Kabupaten Klaten ..... II-167
Tabel 2.105 Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-168
Tabel 2.106 Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-168
Tabel 2.107 Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-169
Tabel 2.108 ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-170
Tabel 2.109 Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-171
Tabel 2.110 Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-172
Tabel 2.111 Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 ..... II-172
Tabel 2.112 Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2019 ..... II-176
Tabel 2.113 Persentase, Jumlah, dan Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-178
Tabel 2.114 Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-178
Tabel 2.115 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Intern Reguler dan Khusus Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 ..... II-179
Tabel 2.116 Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-180
Tabel 2.117 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-181
Tabel 2.118 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-182
Tabel 2.119 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020 ..... II-183
Tabel 2.120 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut PDRB ADHBKabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-184
Tabel 2.121 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... II-185
Tabel 2.122 Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2020 ..... II-186
Tabel 2.123 Komoditas Pertanian Di Kabupaten Klaten ..... II-187

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.124 | Lanjutan Tabel Komoditas Pertanian di Kabupaten Klaten ..... | II-188 |
| Tabel 2.125 | Komoditas Peternakan Di Kabupaten Klaten ..... | II-190 |
| Tabel 2.126 | Penebaran Benih Ikan Menurut Areal Obyek Perikanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-191 |
| Tabel 2.127 | Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020..... | II-193 |
| Tabel 2.128 | Sumbangan Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-195 |
| Tabel 2.129 | Potensi Desa Wisata Kabupaten Klaten..... | II-197 |
| Tabel 2.130 | Desa Wisata Ber SK Bupati di Kabupaten Klaten..... | II-199 |
| Tabel 2.131 | Obyek Wisata Di Kabupaten Klaten ..... | II-199 |
| Tabel 2.132 | Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Hotel, Home Stay Dan Rumah Makan di Kabupaten Klaten Berdasarkan Kecamatan di Tahun 2020..... | II-200 |
| Tabel 2.133 | Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-201 |
| Tabel 2.134 | Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-201 |
| Tabel 2.135 | Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-202 |
| Tabel 2.136 | Jumlah Pasar Kios. Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-203 |
| Tabel 2.137 | Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan Tahun 2019 (dalam km) ..... | II-204 |
| Tabel 2.138 | Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-207 |
| Tabel 2.139 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-207 |
| Tabel 2.140 | Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021..... | II-209 |
| Tabel 3.1 | Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 ..... | III-10 |
| Tabel 3.2 | Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | III-16 |
| Tabel 3.3 | Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | III-18 |
| Tabel 3.4 | Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020..... | III-20 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 3.5 | Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 | III-22 |
| Tabel 3.6 | Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-29 |
| Tabel 3.7 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-30 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-31 |
| Tabel 3.9 | Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 | III-34 |
| Tabel 3.10 | Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-35 |
| Tabel 3.11 | Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab. Klaten | III-38 |
| Tabel 3.12 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten | III-39 |
| Tabel 3.13 | Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten | III-42 |
| Tabel 4.1 | Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 | IV-14 |
| Tabel 4.2 | Isu Prioritas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Klaten | IV-22 |
| Tabel 4.3 | Hasil Telaahan Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 | IV-30 |
| Tabel 4.4 | Hasil Telaahan Terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | IV-32 |
| Tabel 4.5 | Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Internasional dan Nasional | IV-55 |
| Tabel 4.6 | Perumusan Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Klaten | IV-56 |
| Tabel 5.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 | V-6 |
| Tabel 6.1 | Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 | VI-5 |
| Tabel 6.2 | Rencana Implementasi Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 | VI-25 |
| Tabel 6.3 | Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatof Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 | IV-44 |
| Tabel 7.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah | VII-3 |

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rancangan Akhir Rpjmd Kabupaten Klaten 2021-2026 ..... VII-29
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ..... VIII-3
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ..... VIII-6

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 | I-1 |
| Gambar 1.2 | Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten | I-2 |
| Gambar 1.3 | Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-8 |
| Gambar 1.4 | Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 | I-9 |
| Gambar 1.5 | Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | I-9 |
| Gambar 1.6 | Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Tahun 2005-2025 | I-10 |
| Gambar 2.1 | Peta Administrasi Kabupaten Klaten | II-3 |
| Gambar 2.2 | Peta Topografi Kabupaten Klaten | II-4 |
| Gambar 2.3 | Peta Kelerengan Kabupaten Klaten | II-5 |
| Gambar 2.4 | Peta Geologi Kabupaten Klaten | II-5 |
| Gambar 2.5 | Peta Jenis Tanah Kabupaten Klaten | II-6 |
| Gambar 2.6 | Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten | II-9 |
| Gambar 2.7 | Peta Klimatologi Kabupaten Klaten | II-10 |
| Gambar 2.8 | Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Klaten | II-14 |
| Gambar 2.9 | Peta Potensi Kemampuan Lahan Kabupaten Klaten | II-16 |
| Gambar 2.10 | Peta Daya Dukung Kemampuan Lahan Kabupaten Klaten | II-20 |
| Gambar 2.11 | Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten | II-27 |
| Gambar 2.12 | Peta Rawan Bencana Gemba Bumi Kabupaten Klaten | II-28 |
| Gambar 2.13 | Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Klaten | II-29 |
| Gambar 2.14 | Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Klaten | II-29 |
| Gambar 2.15 | Peta Rawan Bencana Gunung Api Kabupaten Klaten | II-30 |
| Gambar 2.16 | Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Klaten | II-31 |
| Gambar 2.17 | Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020 | II-36 |
| Gambar 2.18 | Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 | II-39 |
| Gambar 2.19 | Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2020 | II-40 |
| Gambar 2.20 | Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-40 |
| Gambar 2.21 | PDRB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019 | II-44 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.22 | Perkembangan Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ..... | II-45 |
| Gambar 2.23 | Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan) ..... | II-47 |
| Gambar 2.24 | Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan) ..... | II-47 |
| Gambar 2.25 | Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... | II-48 |
| Gambar 2.26 | Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-48 |
| Gambar 2.27 | Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020..... | II-49 |
| Gambar 2.28 | Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-49 |
| Gambar 2.29 | Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... | II-50 |
| Gambar 2.30 | Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-50 |
| Gambar 2.31 | Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020..... | II-51 |
| Gambar 2.32 | Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-51 |
| Gambar 2.33 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020..... | II-52 |
| Gambar 2.34 | Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-52 |
| Gambar 2.35 | Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2020..... | II-53 |
| Gambar 2.36 | Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-53 |
| Gambar 2.37 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020..... | II-54 |
| Gambar 2.38 | Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | II-54 |
| Gambar 2.39 | Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) ..... | II-55 |

Gambar 2.40 Posisi Relatif Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)..... II-56
Gambar 2.41 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020..... II-57
Gambar 2.42 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)..... II-57
Gambar 2.43 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) ..... II-58
Gambar 2.44 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun) ..... II-58
Gambar 2.45 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah) ..... II-59
Gambar 2.46 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ribu rupiah) ..... II-59
Gambar 2.47 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020 ..... II-60
Gambar 2.48 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2020..... II-60
Gambar 2.49 Umur Harapan Hidup (UHH) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 ..... II-61
Gambar 2.50 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020..... II-62
Gambar 2.51 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020..... II-62
Gambar 2.52 Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020..... II-63
Gambar 2.53 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-63
Gambar 2.54 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten tahun 2020..... II-64
Gambar 2.55 Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Klaten dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020..... II-64
Gambar 2.56 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2020..... II-65
Gambar 2.57 Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Klaten dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020 ..... II-65

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.58 | Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupten Klaten Tahun 2020 | II-66 |
| Gambar 2.59 | Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupten Klaten dibandingkan dengan Provinsi Jawa tengah dan Nasional tahun 2016-2020 | II-66 |
| Gambar 2.60 | Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2020 | II-67 |
| Gambar 2.61 | Grafik Perkembangan Jumlah Peserta Didik PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-68 |
| Gambar 2.62 | Grafik Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-68 |
| Gambar 2.63 | Grafik Perkembangan APK Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-69 |
| Gambar 2.64 | Grafik Perkembangan APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-70 |
| Gambar 2.65 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-70 |
| Gambar 2.66 | Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-71 |
| Gambar 2.67 | Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-72 |
| Gambar 2.68 | Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-72 |
| Gambar 2.69 | Perkembangan Akreditasi Minimal B Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-73 |
| Gambar 2.70 | Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-76 |
| Gambar 2.71 | Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-77 |
| Gambar 2.72 | Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-77 |
| Gambar 2.73 | Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-78 |
| Gambar 2.74 | Peta Kondisi Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2020 | II-86 |
| Gambar 2.75 | Grafik Capaian IPG Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 | II-102 |
| Gambar 2.76 | Perkembangan IDG Kab. Klaten 2017-2019 | II-103 |
| Gambar 2.77 | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-104 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.78 | Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | II-105 |
| Gambar 2.79 | Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-105 |
| Gambar 2.80 | Penerbitan Sertifikat Hak Tanah yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-111 |
| Gambar 2.81 | Jumlah lembaga ekonomi perdesaan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-117 |
| Gambar 2.82 | Cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-122 |
| Gambar 2.83 | Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-122 |
| Gambar 2.84 | Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-169 |
| Gambar 2.85 | Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | II-177 |
| Gambar 2.86 | Pengeluaran PerKapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Klaten Tahun 2020 | II-184 |
| Gambar 2.87 | Sebaran Komoditas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Dominan di Kabupaten Klaten | II-192 |
| Gambar 2.88 | Peta Potensi Pariwisata Unggulan di Kabupaten Klaten | II-197 |
| Gambar 2.89 | Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019 | II-205 |
| Gambar 2.90 | Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Keterampilan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019 | II-205 |
| Gambar 2.91 | Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Pemuda Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019 | II-206 |
| Gambar 2.92 | Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Kelompok Umur di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019 | II-206 |
| Gambar 2.93 | Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Tidak Ada Klasifikasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019 | II-207 |
| Gambar 3.1 | Perkembangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-6 |
| Gambar 3.2 | Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-7 |
| Gambar 3.3 | Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-7 |
| Gambar 3.4 | Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-8 |

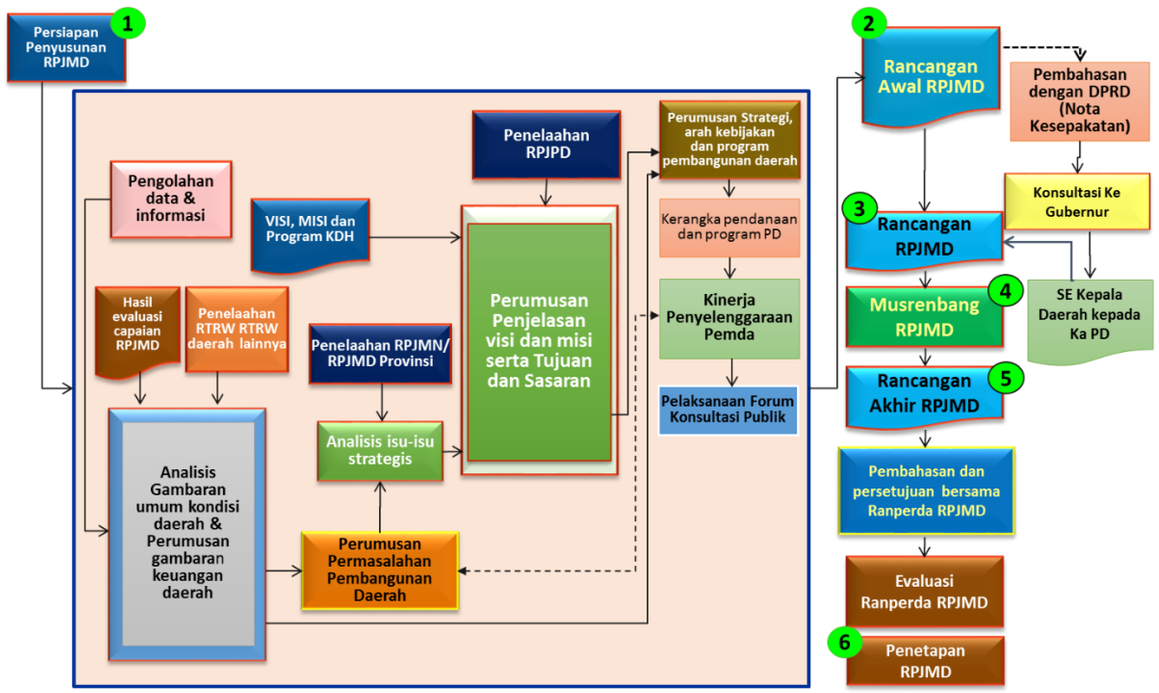
| | | |
|---|---|---|
| Gambar 3.5 | Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-8 |
| Gambar 3.6 | Grafik Kontribusi Unsur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-9 |
| Gambar 3.7 | Grafik Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-11 |
| Gambar 3.8 | Grafik Proporsi Unsur Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-12 |
| Gambar 3.9 | Grafik Proporsi Unsur Belanja Operasi Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-13 |
| Gambar 3.10 | Grafik Proporsi Unsur Belanja Modal Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-14 |
| Gambar 3.11 | Grafik Unsur Belanja Tidak Terduga Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-14 |
| Gambar 3.12 | Grafik Proporsi Unsur Belanja Transfer Kab. Klaten Tahun 2016-2020 | III-15 |
| Gambar 3.13 | Grafik Rasio Pajak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-24 |
| Gambar 3.14 | Grafik Pajak Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-25 |
| Gambar 3.15 | Grafik Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-26 |
| Gambar 3.16 | Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-27 |
| Gambar 3.17 | Rasio Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-28 |
| Gambar 3.18 | Rasio Belanja Modal Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 | III-29 |
| Gambar 4.1 | Tujuan SDGs | IV-13 |
| Gambar 4.2 | Visi dan Misi Presiden 2020-2024 | IV-26 |
| Gambar 4.3 | Strategi Pencapaian Visi 2045 | IV-27 |
| Gambar 4.4 | 7 Agenda Pembangunan Nasional | IV-28 |
| Gambar 4.5 | Sasaran makro Pembangunan Nasional 2020-2024 | IV-29 |
| Gambar 4.6 | Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten | IV-54 |
| Gambar 4.7 | Penentuan Isu Strategis Kabupaten Klaten | IV-54 |
| Gambar 4.8 | Rencana Jalan Tol Solo-Yogya | IV-60 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RPJMD menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.

Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa jabatan 2021-2026 (Sri Mulyani dan Yoga Hardaya) dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang penetapannya paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mencakup 6 (enam) tahapan yaitu persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD, sebagaimana tergambar pada skema berikut ini.

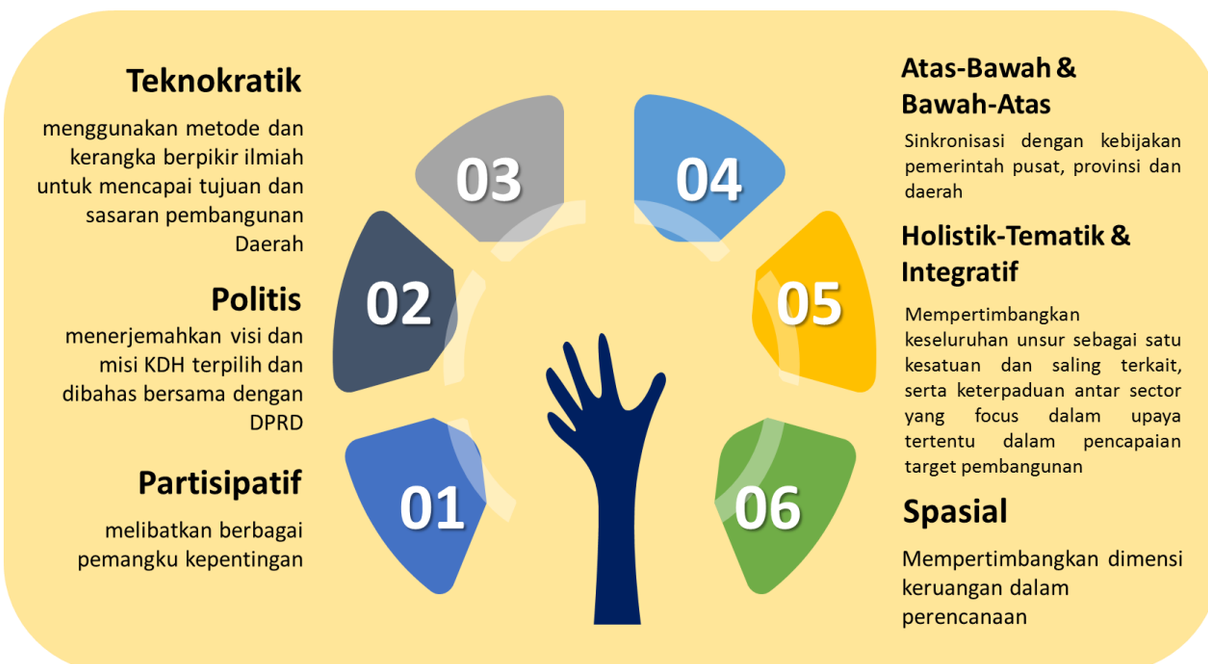



**Gambar 1.1**
**Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten**
**Tahun 2021-2026**

Penyusunan RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup: (1) pendekatan teknokratik, (2) pendekatan politik, (3) pendekatan partisipatif, dan (4) pendekatan *Buttom-up dan Top-down.* Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai

pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten. Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen RPJMD. Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaaan yang mengakodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD Klaten. Pendekatan *Buttom-up dan Top-down* dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan RPJMD yang memperhatikan kebijakan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan memperhatikan hasil konsultasi dan evaluasi Raperda RPJMD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan Integratif dan pendekatan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dalam RPJMD Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten. Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.




**Gambar 1.2**
**Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten**

Penyusunan RPJMD mengacu pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahapan periode keempat RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Perda Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009). RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

27. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
29. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

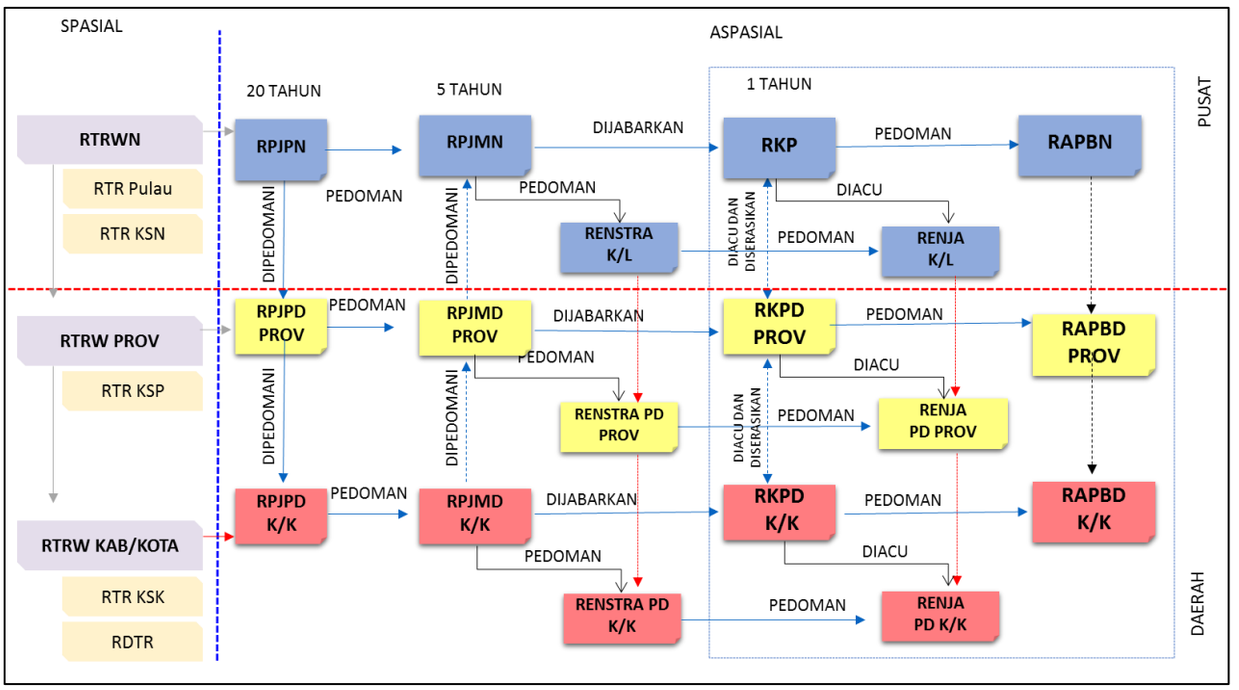
Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Klaten. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor.

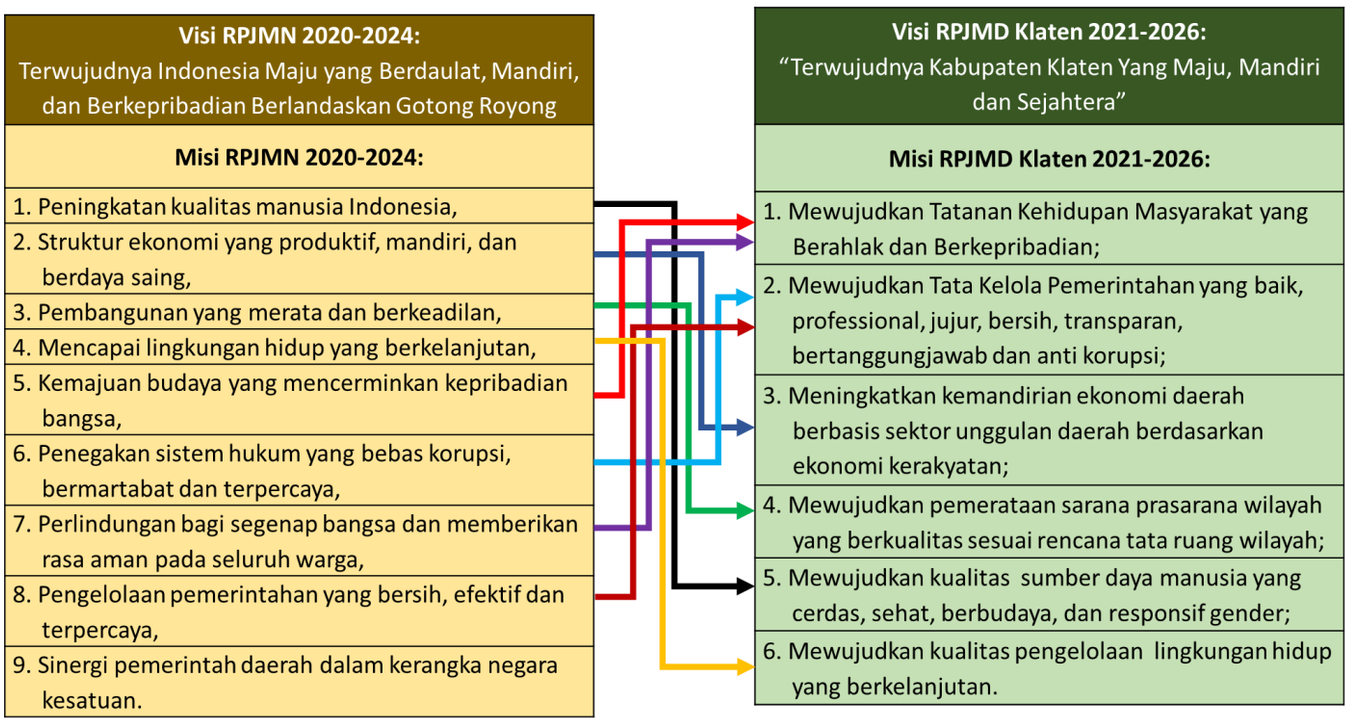



**Gambar 1.3**
**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penjelasan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Klaten dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

**A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJM Nasional tahun 2020-2024 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional.




**Gambar 1.4**
**Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024**

## B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

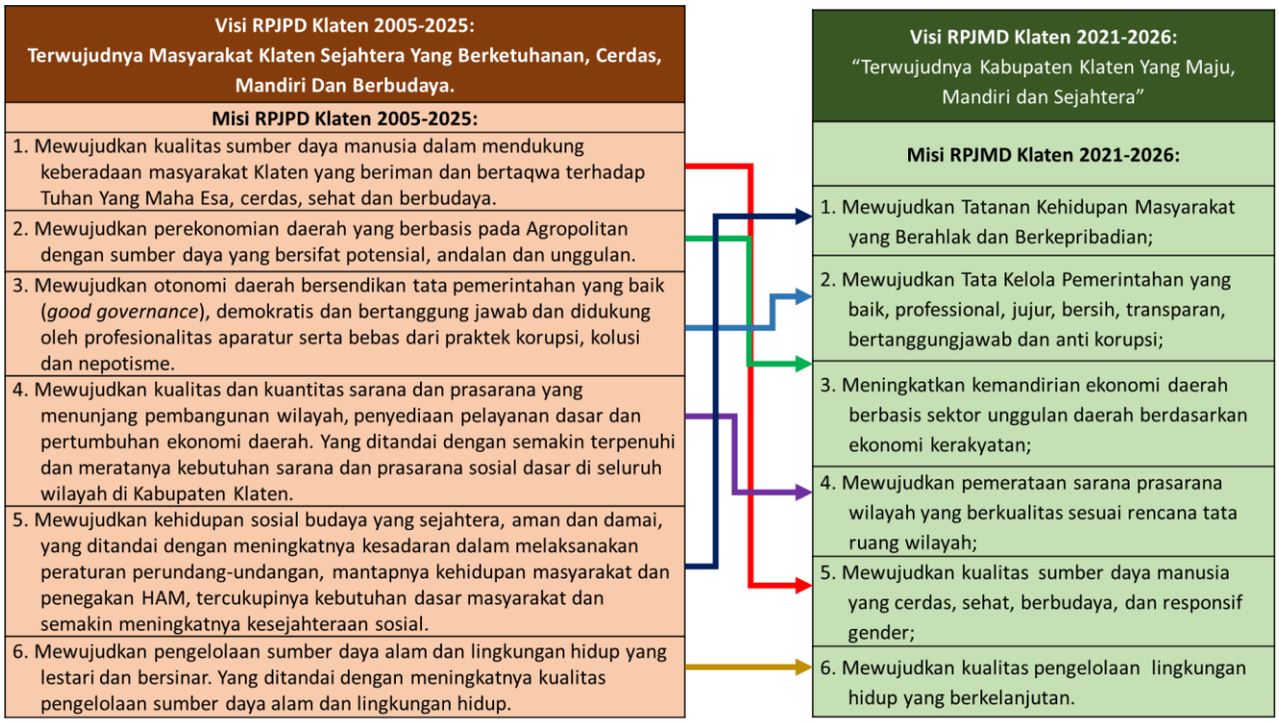
Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.




**Gambar 1.5**
**Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

## C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, khususnya pada RPJMD tahap ke-4.




**Gambar 1.6**
**Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Tahun 2005-2025**

## D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Klaten. Pada saat ini RTRW Kabupaten Klaten masih dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan RTRW, meskipun demikian draft perubahan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 sudah dapat menjadi acuan, RPJMD harus memperhatikan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. RPJMD berisi program pembangunan, sedangkan RTRW mengarahkan lokasi pelaksanaan program pembangunan tersebut. Penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

## E. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga harus mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

**F. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**

RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

**G. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

RPJMD Kabupaten Klaten setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan:

a. Menggambarkan kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
b. Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi visi, penjelasan unsur visi, misi, tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan, dan Program Pembangunan Daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara $7^0$32'19" LS sampai $7^0$48'33" LS dan antara $110^0$26'14" BT sampai $110^0$47'51" BT. Adapun batas administratif Kabupaten Klaten adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali;
Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo;
Sebelah Selatan : Kabupaten Gunungkidul (DI Yogyakarta); dan
Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta).

Kabupaten Klaten berada pada lokasi yang strategis, karena berada di simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dengan adanya jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surakarta-Yogyakarta, didukung dengan jaringan jalan tol Solo-Yogyakarta, tersedianya terminal tipe A yang sudah melayani angkutan umum antar provinsi dan angkutan umum dalam provinsi. Kabupaten Klaten berada pada jalur transportasi Yogyakarta-Solo-Semarang yang berkembang cukup pesat.

Dari segi posisi dalam sistem pergerakan nasional maupun provinsi, Kabupaten Klaten dilewati jalur strategis penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Surakarta, namun Kabupaten Klaten saat ini bukan sebagai simpul (hanya dilewati saja oleh jalur antar provinsi) serta hirarki pelayanan Kabupaten Klaten yang lebih rendah jika dibandingkan Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan pengembangan potensi kawasan kurang optimal. Sebagai kabupaten yang dalam tahap berkembang serta masih memiliki potensi lahan yang cukup luas, Kabupaten Klaten menjadi tujuan baru untuk pengembangan permukiman, industri pengolahan dan pariwisata yang sekaligus menangkap peluang *demand* dari kabupaten sekitar. Dampak dari pengembangan ini adalah munculnya simpul–simpul aktivitas baru yang mendorong perkembangan pemanfaatan ruang ke depannya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Klaten termasuk dalam wilayah pengembangan Subosukawonosraten, merupakan kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Wilayah pengembangan Subosukawonosraten didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pariwisata dan panas bumi.

Kabupaten Klaten merupakan lumbung padi Jawa Tengah serta termasuk dalam penyokong ketahanan pangan nasional. Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai *hinterland* dari Kota Surakarta serta Yogyakarta memberikan pengaruh dalam penyediaan pangan termasuk pendistribusian hasil pertanian, perdagangan dan jasa sepanjang koridor DI Yogyakarta-Surakarta serta termasuk dalam Kawasan Penyangga Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Kabupaten Klaten terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas, Trucuk, Kalikotes, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, Karangnongko, Ngawen, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, Jatinom, Kemalang, Klaten Selatan, Klaten Tengah dan Klaten Utara. Luas wilayah Kabupaten Klaten dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

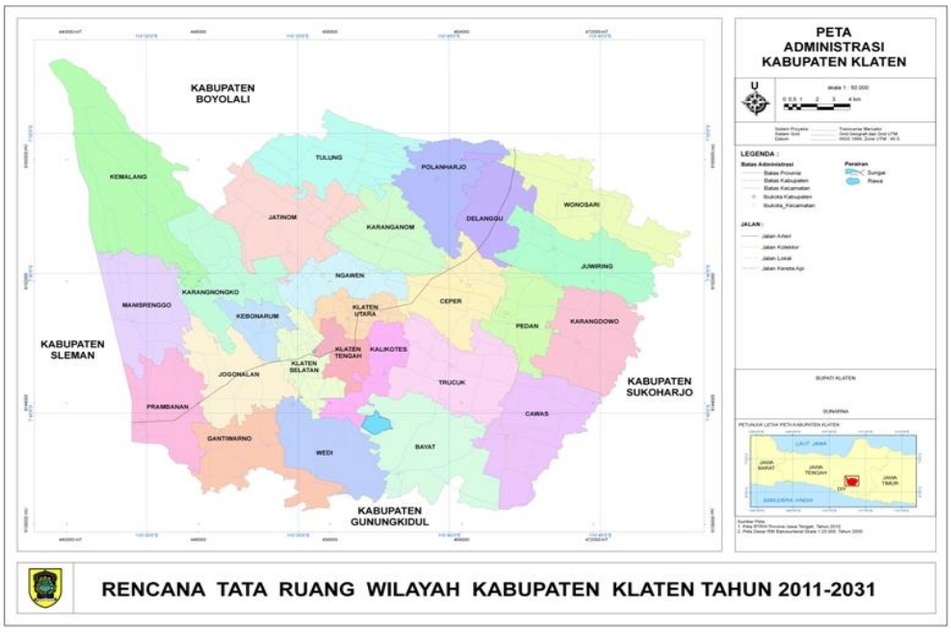
**Tabel 2.1**
**Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Klaten**

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| 1 | Prambanan | 2.609,46 | 3,72 |
| 2 | Gantiwarno | 2.644,45 | 3,77 |
| 3 | Wedi | 2.625,81 | 3,74 |
| 4 | Bayat | 4.209,70 | 6,00 |
| 5 | Cawas | 3.593,54 | 5,12 |
| 6 | Trucuk | 3.468,60 | 4,91 |
| 7 | Kalikotes | 1.410,87 | 2,01 |
| 8 | Kebonarum | 1.041,62 | 1,48 |
| 9 | Jogonalan | 2.759,33 | 3,93 |
| 10 | Manisrenggo | 3.060,27 | 4,36 |
| 11 | Karangnongko | 2.949,17 | 4,20 |
| 12 | Ngawen | 1.845,49 | 2,63 |
| 13 | Ceper | 2.576,67 | 3,67 |
| 14 | Pedan | 1.999,90 | 2,85 |
| 15 | Karangdowo | 3.080,17 | 4,39 |
| 16 | Juwiring | 3.090,11 | 4,40 |
| 17 | Wonosari | 3.340,06 | 4,76 |
| 18 | Delanggu | 2.003,01 | 2,86 |
| 19 | Polanharjo | 2.521,57 | 3,59 |
| 20 | Karanganom | 2.561,67 | 3,65 |
| 21 | Tulung | 3.444,00 | 4,91 |
| 22 | Jatinom | 3.710,97 | 5,29 |
| 23 | Kemalang | 6.019,13 | 8,58 |
| 24 | Klaten Selatan | 1.509,12 | 2,15 |
| 25 | Klaten Tengah | 959,45 | 1,37 |
| 26 | Klaten Utara | 1.117,36 | 1,59 |
| **Jumlah** | | **70.152,02** | **100** |

*Sumber : DPUPR Klaten, 2020*

Kecamatan Kemalang memiliki wilayah paling luas dibandingkan kecamatan lainnya (9%), kemudian Kecamatan Bayat (6%). Hal ini dapat menjadi potensi ketersediaan lahan, termasuk di dalamnya potensi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Kawasan perkotaan Klaten ditetapkan berada di Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah dan Klaten Utara. Jarak antara kawasan perkotaan Klaten dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain cukup jauh, karena wilayah Kabupaten Klaten yang cukup luas. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur wilayah. Pembangunan infrastruktur seringkali hanya terpusat di kawasan perkotaan, sehingga kecamatan yang jauh dari kawasan perkotaan kurang mendapatkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah tersebut dapat diminimalkan dengan

pemerataan pembangunan sarana dan prasarana, meningkatkan konektivitas ke seluruh wilayah kecamatan, dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan perkotaan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*

**Gambar 2.1.**
**Peta Administrasi Kabupaten Klaten**

### 2.1.2. Topografi Wilayah

Secara umum, wilayah Kabupaten Klaten berada pada ketinggian 100 hingga >2000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 3,72% wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara ketinggian 0-100 mdpl, sebanyak 83,52% wilayahnya terletak di antara ketinggian 100-500 mdpl, dan sisanya sebanyak 12,76% terletak di antara ketinggian 500-2.500 mdpl. Ketinggian Kabupaten Klaten secara terperinci yaitu:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari Kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.



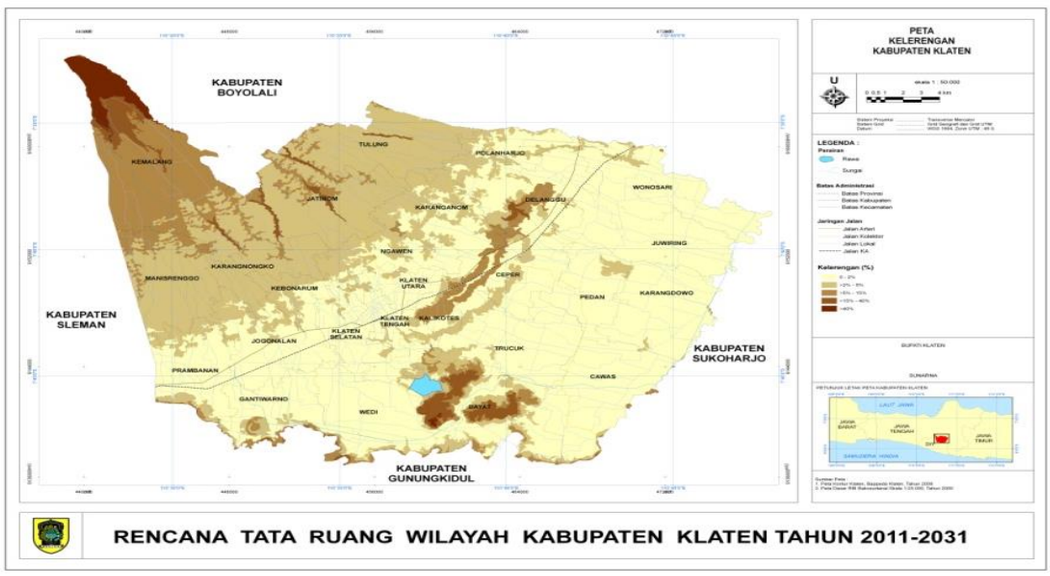

*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*

**Gambar 2.2.**
**Peta Topografi Kabupaten Klaten**

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Klaten terbagi:

1. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung;
2. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi yang meliputi wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo; dan
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas, dan sebagian Gantiwarno.

Jika dilihat dari kelerengannya, sebagian besar Kabupaten Klaten memiliki kelerengan 0-2% di wilayah bagian tengah ke selatan, kemudian kelerengan lebih dari 2-5%, dan semakin ke utara kelerengan semakin tinggi. Kelerengan lebih dari 40% terdapat di Kecamatan Kemalang karena merupakan Lereng Gunung Merapi. Kelerengan 0-2% dan 2-5% masuk dalam kategori datar dan memiliki daya dukung yang baik untuk lahan terbangun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten secara topografi memiliki daya dukung yang baik untuk kawasan budidaya. Wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah wilayah dengan kelerengan lebih dari 25% karena sudah masuk kategori curam, bahkan di beberapa tempat memiliki kerengan lebih dari 45% yang berarti sangat curam dan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun.

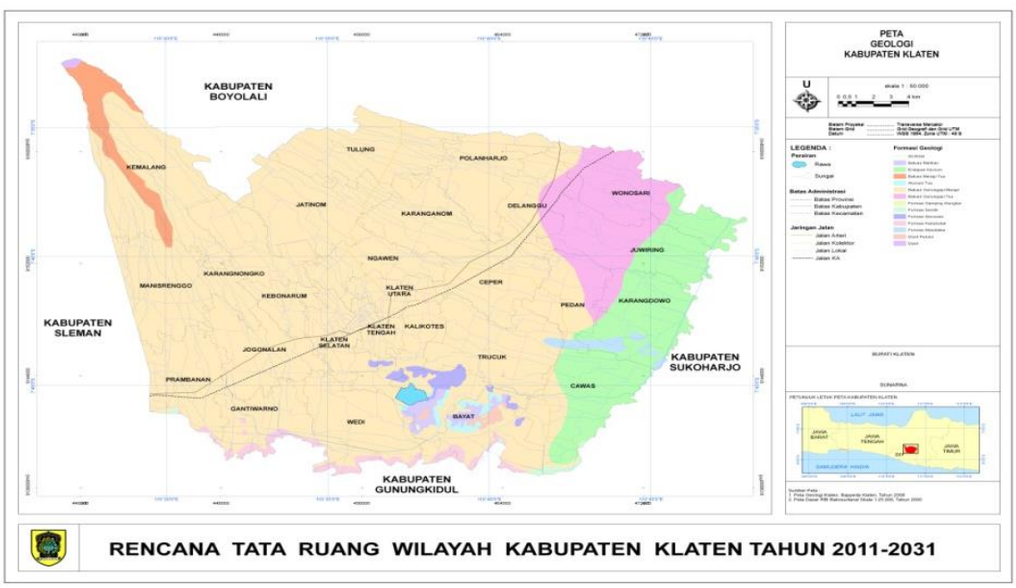



*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*

**Gambar 2.3.**
**Peta Kelerengan Kabupaten Klaten**

### 2.1.3. Geologi

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Keadaan geologi Kabupaten Klaten diketahui merupakan vulkanik kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa jenis batuan, meliputi: Aluvium Tua, Endapan Aluvium, Batuan Gunungapi Merapi, Batuan Gunungapi Tua, Batuan Malihan, Batuan Merapi Tua, Dasit, Pendul, Formasi Gamping Wungkal, Formasi Kebobutak, Formasi Semilir, dan Formasi Wonosari.



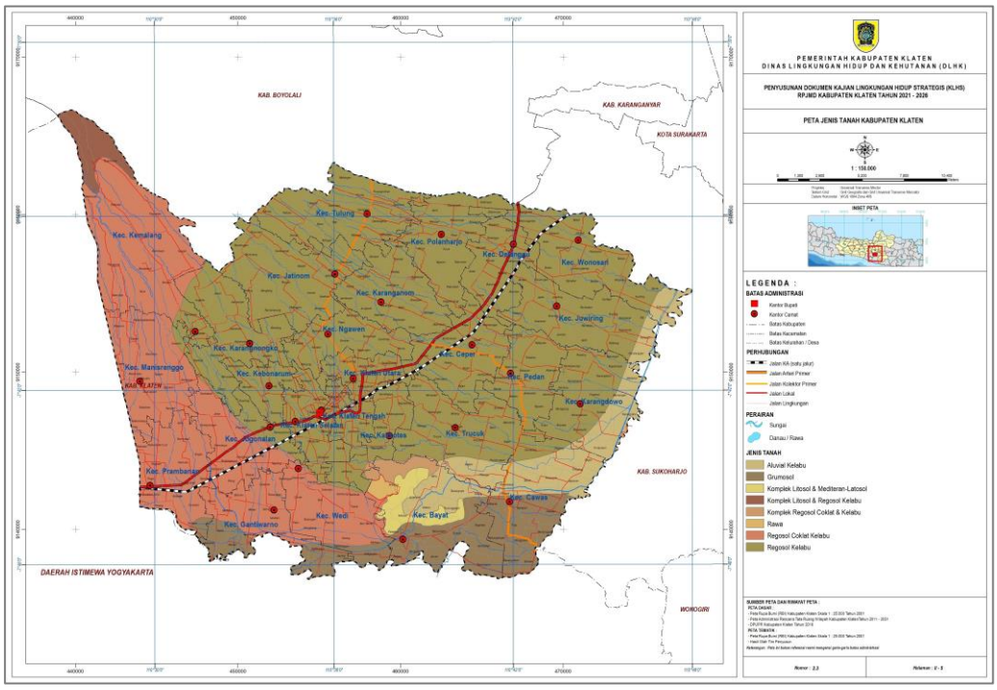

*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*

**Gambar 2.4.**
**Peta Geologi Kabupaten Klaten**

### 2.1.4. Litologi

Jenis tanah merupakan komponen cukup penting dalam menentukan kesesuaian fungsi kegiatan terkait dengan tingkat kepekaan masing-masing jenis tanah terhadap erosi. Kandungan mineral yang terdapat dalam tanah dapat untuk menduga kemampuan tanah dan kandungan unsur tanah. Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari:

1. Aluvial Kelabu: Bahan induk dari endapan lumpur dan pasir yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Terdapat di Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, dan Prambanan. Sifat tanah ini tidak peka terhadap erosi. Tanah aluvial secara umum bermorfologi datar dan teratur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian.
2. Litosol: Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.
3. Regosol Kelabu: Bahan induk abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Cawas, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, dan Jatinom. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.
4. Grumusol Kelabu Tua: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan. Sifat tanah ini peka terhadap erosi.
5. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua: Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.
6. Regosol Coklat Kekelabuan: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, dan Wedi. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.




*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026*

**Gambar 2.5.**
**Peta Jenis Tanah Kabupaten Klaten**

### 2.1.5. Hidrologi dan Geohidrologi

Kabupaten Klaten memiliki 2 karakteristik hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah seperti air sungai, air rawa, air irigasi, air danau, dan sebagainya. Sementara air tanah (*hidrogeologi*) mencakup mata air, air sumur dangkal dan sumur dalam. Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalam tanah yang dangkal atau sering disebut sebagai air tanah. Dalamnya lapisan air ini dari permukaan tanah berkisar 5 sampai dengan 15 meter dan berbeda kedalaman antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Wilayah Kabupaten Klaten masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Opak. Yang termasuk dalam DAS Bengawan Solo meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Klaten. Luas DAS Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Klaten mencapai ± 67.024,08 ha. Wilayah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam DAS Opak yaitu Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan. Luas DAS Opak yang ada di Kabupaten Klaten ± 3.074,27 ha. Berikut merupakan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Klaten dan banyak dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan.

Selain memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber air, wilayah Kabupaten Klaten juga memiliki sumber air berupa waduk, embung, mata air dan sumber lainnya. Waduk yang ada di Kabupaten Klaten berupa Waduk Rowo Jombor yang ada di Kecamatan Bayat. Waduk Rowo Jombor mempunyai luas 189 hektar. Waduk ini mempunyai kedalaman 4,5 m dan mampu menampung air 4.000.000 $m^3$. Tujuan utama pembuatan waduk Rowo Jombor adalah untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk lahan pertanian di sekelilingnya pada musim kemarau. Namun kemudian juga dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pariwisata dan perikanan. Untuk mata air yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 206 yang tersebar di 20 kecamatan, dimana 38 diantaranya berlokasi di Kecamatan Tulung. Dari 206 mata air tersebut 17 diantaranya dalam kondisi mati. Sumber air lainnya yaitu embung, di mana sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Klaten sudah terbangun 17 embung.

**Tabel 2.2**
**Daftar Embung di Kabupaten Klaten**

| No | Nama | Lokasi | |
|---|---|---|---|
| | | Desa | Kecamatan |
| 1 | Embung Tarubasan | Tarubasan | Karanganom |
| 2 | Embung Taskombang | Taskombang | Manisrenggo |
| 3 | Embung Pandes | Pandes | Wedi |
| 4 | Embung Krakitan I | Krakitan | Bayat |
| 5 | Embung Krakitan II | Krakitan | Bayat |
| 6 | Embung Kendalsari | Kendalsari | Kemalang |
| 7 | Embung Kluwih | Kecemen | Manisrenggo |
| 8 | Embung Panggang | Panggang | Kemalang |
| 9 | Embung Mranggen | Mranggen | Jatinom |
| 10 | Embung Madirdo | Tlogo | Prambanan |
| 11 | Embung Karangasem | Karangasem | Cawas |
| 12 | Embung Krikilan | Krikilan | Bayat |
| 13 | Embung Karangpakel | Karangpakel | Trucuk |
| 14 | Embung Tambong Wetan | Tambong wetan | Kalikotes |
| 15 | Embung Sidorejo | Sidorejo | Kemalang |

| No | Nama | Lokasi | |
|---|---|---|---|
| | | Desa | Kecamatan |
| 16 | Embung Tegalmulyo | Tegalmulyo | Kemalang |
| 17 | Embung Tijayan | Tijayan | Manisrenggo |

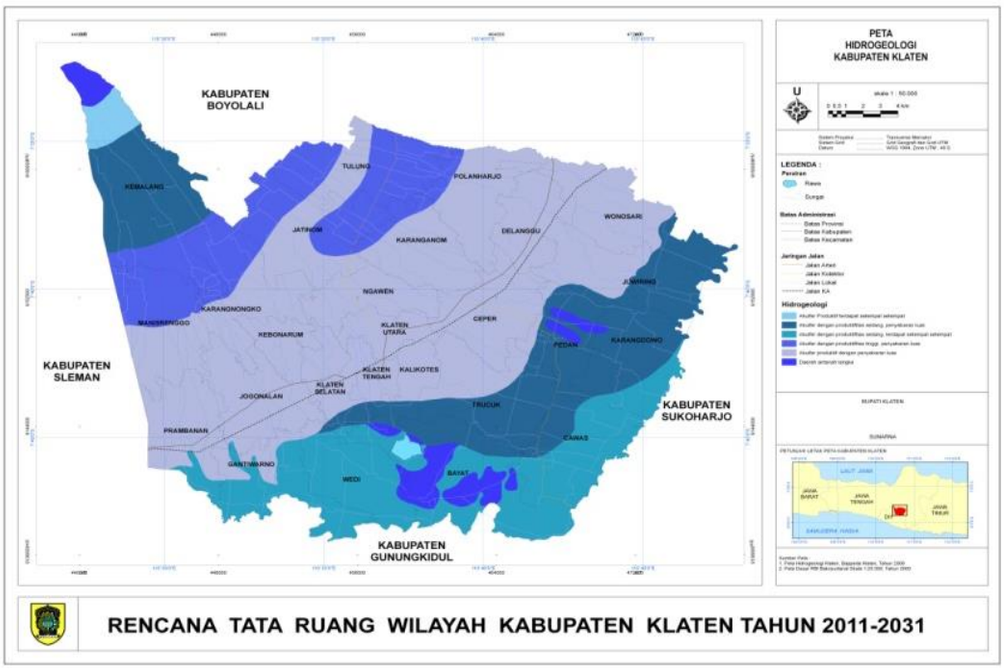
*Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten,2021*

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Berdasar pada tipe akuifernya, akuifer dan produktifitasnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) *akuifer* dengan aliran melalui pori antar butir, (2) *akuifer* dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, serta (3) *akuifer* celah dan pori dengan produktivitas kecil dan daerah air bawah tanah langka.

1. *Akuifer* dengan aliran melalui ruang antar butir
   a. *Akuifer* dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas.
      *Akuifer* berlapis banyak, keterusan sedang sampai tinggi, kedalaman muka air bawah tanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada di atas muka tanah, debit sumur umumnya lebih dari 10 l/dt.
   b. *Akuifer* produktif dengan penyebaran luas
      *Akuifer* berlapis banyak, keterusan sedang, kedalaman muka air bawah tanah cukup dangkal, debit sumur mencapai 5-10 l/dt, di beberapa tempat 20 l/dt.
   c. *Akuifer* produktif sedang dengan penyebaran luas
      *Akuifer* berlapis banyak, keterusan sedang sampai rendah, kedalaman *muka* air bawah tanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 l/dt.
   d. *Akuifer* berproduksi sedang dengan penyebaran setempat
      *Akuifer* dangkal, keterusan sedang sampai rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dt.
2. *Akuifer* dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir
   a. *Akuifer* produktif tinggi dengan penyebaran luas
      Akuifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air *bawah tanah* sangat beragam, debit umumnya lebih dari 5 l/dt, pemunculan mata air banyak dijumpai, beberapa debitnya mencapai lebih dari 500 l/dt, terutama yang muncul dari lava vesikuler.
   b. *Akuifer* produktif sedang dengan penyebaran luas
      *Akuifer* dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air *bawah* tanah umumnya dalam, debit umumnya kurang dari 5 l/dt, mata air umumnya berdebit sedang, muncul terutama pada daerah lekuk lereng
   c. *Akuifer* produktif dengan penyebaran setempat
      *Akuifer* dengan keterusan sangat beragam, umumnya air bawah tanah *yang tidak* dimanfaatkan karena dalam dan mempunyai penyebaran secara setempat.
3. *Akuifer* bercelah atau sarang produktifitas kecil dan daerah air bawah tanah langka
   a. *Akuifer* produktifitas kecil dengan penyebaran setempat
      Pada umumnya keterusan sangat rendah, setempat air bawah tanah dalam dan dapat ditemui pada bagian lembah, terdapat pada zona lapukan batuan padu.
   b. Air bawah tanah langka

Terdapat pada bukit-bukit atau daerah yang mempunyai kualitas air jelek. Hidrogeologi di wilayah Kabupaten Klaten dibedakan menjadi:

1. Akuifer produktif terdapat setempat;
2. Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas;
3. Akuifer dengan produktivitas sedang terdapat setempat;
4. Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas;
5. Akuifer produktif dengan penyebaran luas; dan
6. Daerah air tanah langka.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*

**Gambar 2.6.**
**Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten Klimatologi**

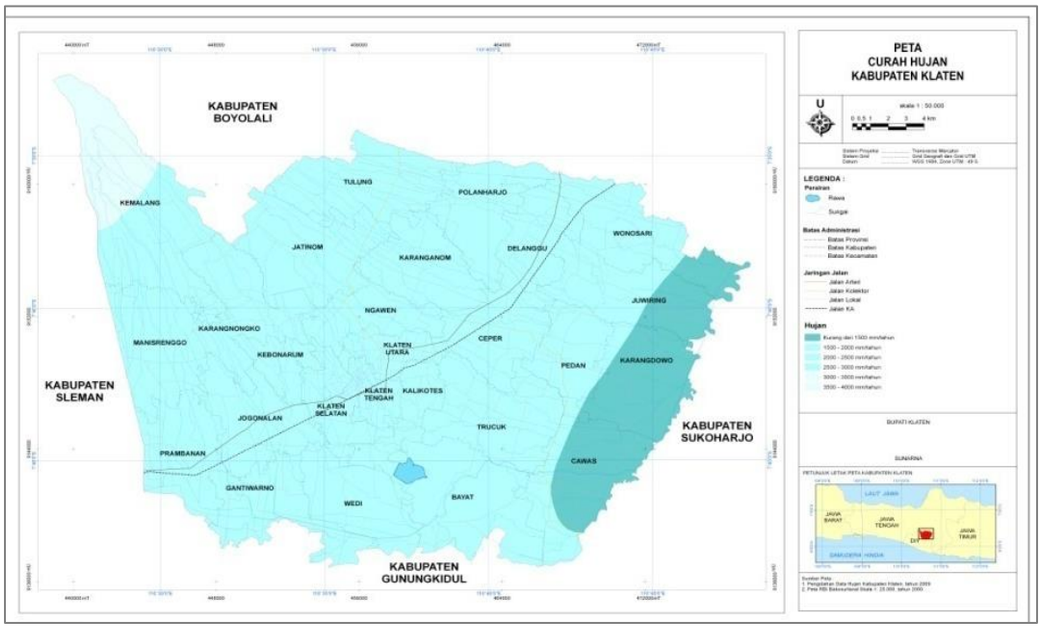
Menurut pengamatan iklim di stasiun KBB Klaten, Kecamatan Klaten Tengah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020, yaitu 492 mm dengan 16 hari hujan. Sedangkan curah hujan terendah yaitu pada Bulan Juli sebanyak 1 mm dalam 1 hari hujan.

**Tabel 2.3**
**Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| Bulan | Jumlah Curah Hujan | Jumlah Hari Hujan |
|---|---|---|
| Januari | 281 | 17 |
| Februari | 492 | 16 |
| Maret | 246 | 19 |
| April | 264 | 12 |
| Mei | 34 | 8 |
| Juni | 22 | 2 |
| Juli | 1 | 1 |
| Agustus | 45 | 1 |
| September | 45 | 3 |
| Oktober | 66 | 3 |
| November | 389 | 12 |
| Desember | 314 | 22 |

*Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2021*

Curah hujan yang tinggi dapat bermanfaat untuk menambah sumber air terutama untuk pertanian, namun di sisi lain dapat menjadi bencana jika kapasitas aliran air melebihi kapasitas saluran drainase yang ada.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.7.**
**Peta Klimatologi Kabupaten Klaten**

### 2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah pertanian di Kabupaten Klaten luasnya mencapai 34.469,31 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Untuk lahan non sawah di Kabupaten Klaten terdiri dari penggunaan lahan industri, perdagangan dan perkantoran, permukiman, hutan, ladang/tegalan dan perairan.

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2016-2020 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2016 sebesar 33.066 Ha, tahun 2017 sebesar 33.021 Ha, tahun 2018 sebesar 31.943 Ha, tahun 2019 menjadi 31.943 Ha dan tahun 2020 menjadi sebesar 34.628,71 Ha. Perubahan luas Kabupaten Klaten secara administrasi menjadi 70.152,02 Ha di tahun 2020, hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan lapangan dan peta administrasi yang mendapat persetujuan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta kesepakatan dengan Kementerian ATR/BPN. Sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Permukiman | Industri, Perdagangan dan Perkantoran | Hutan | Ladang/ Tegalan | Sawah | Perairan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prambanan | 1.074,74 | 38,23 | 0 | 16,29 | 1.447,78 | 32,42 | 2.609,45 |
| 2 | Gantiwarno | 707,22 | 0,00 | 0 | 73,63 | 1.841,83 | 21,76 | 2.644,44 |
| 3 | Wedi | 930,73 | 0,00 | 0 | 38,64 | 1.648,62 | 7,56 | 2.625,54 |
| 4 | Bayat | 1.860,02 | 0,00 | 631,17 | 341,52 | 1.189,55 | 187,70 | 4.209,96 |
| 5 | Cawas | 1.174,09 | 0,00 | 0 | 33,25 | 2.367,14 | 19,05 | 3.593,53 |
| 6 | Trucuk | 1.382,45 | 3,92 | 0 | 75,22 | 2.003,37 | 3,54 | 3.468,50 |
| 7 | Kalikotes | 598,36 | 1,74 | 17,55 | 15,48 | 767,88 | 9,75 | 1.410,76 |
| 8 | Kebonarum | 256,63 | 12,35 | 0 | 0,78 | 767,91 | 3,95 | 1.041,62 |
| 9 | Jogonalan | 1.058,27 | 27,40 | 0 | 8,30 | 1.640,93 | 25,02 | 2.759,92 |
| 10 | Manisrenggo | 1.168,64 | 0,00 | 0 | 239,80 | 1.612,47 | 39,36 | 3.060,27 |
| 11 | Karangnongko | 1.133,70 | 0,00 | 0 | 976,59 | 835,01 | 3,86 | 2.949,16 |
| 12 | Ngawen | 652,81 | 0,53 | 0 | 0,00 | 1.189,38 | 2,76 | 1.845,49 |
| 13 | Ceper | 866,14 | 173,89 | 0 | 132,84 | 1.402,36 | 1,44 | 2.576,67 |
| 14 | Pedan | 797,16 | 7,78 | 0 | 332,32 | 861,51 | 1,13 | 1.999,90 |
| 15 | Karangdowo | 844,79 | 0,00 | 0 | 42,04 | 2.183,60 | 10,28 | 3.080,70 |
| 16 | Juwiring | 940,46 | 19,85 | 0 | 55,45 | 2.063,39 | 10,86 | 3.090,02 |
| 17 | Wonosari | 931,84 | 8,76 | 0 | 91,10 | 2.291,19 | 17,17 | 3.340,05 |
| 18 | Delanggu | 601,90 | 26,42 | 0 | 103,10 | 1.269,80 | 1,78 | 2.003,01 |
| 19 | Polanharjo | 560,65 | 11,88 | 0 | 0,00 | 1.885,53 | 63,51 | 2.521,57 |
| 20 | Karanganom | 727,02 | 8,14 | 0 | 63,14 | 1.757,26 | 6,11 | 2.561,67 |
| 21 | Tulung | 1.007,36 | 4,01 | 0 | 691,01 | 1.717,66 | 23,95 | 3.443,99 |
| 22 | Jatinom | 1.361,19 | 0,00 | 0 | 1.799,43 | 549,67 | 0,68 | 3.710,97 |
| 23 | Kemalang | 2.376,44 | 0,00 | 901,22 | 2.583,03 | 53,80 | 104,43 | 6.018,93 |
| 24 | Klaten Selatan | 673,24 | 5,30 | 0 | 14,59 | 812,81 | 3,16 | 1.509,11 |
| 25 | Klaten Tengah | 606,04 | 26,54 | 0 | 35,88 | 289,15 | 1,83 | 959,45 |
| 26 | Klaten Utara | 742,94 | 52,48 | 0 | 88,10 | 233,10 | 0,73 | 1.117,35 |
| **Jumlah** | | **25.034,83** | **429,21** | **1.549,94** | **7.851,53** | **34.682,71** | **603,81** | **70.152,02** |

*Sumber : DPUPR, 2021*

Pada tahun 2016 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45.392 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 33.058 Ha; Industri 8.910 Ha; Perusahaan 0,113 Ha, dan Jasa 3.311 Ha. Tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,7611 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40.298 Ha; Industri 4.515 Ha, dan Jasa 0,948 Ha. Tahun 2018 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 63.381 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 48.897 Ha; Industri 13.744 Ha; dan Jasa 0,740 Ha. Tahun 2019 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 81.700 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 55.500 Ha; Industri 18.200 Ha; Perusahaan 0,500 Ha dan Jasa 7.500 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian mencapai 93.180 Ha, dengan rincian peruntukan: Perumahan 56.104 Ha; Industri 10.332 Ha; Perusahaan 25.516 Ha dan jasa 1.228 Ha. Luas perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**
**Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Tahun | Dari Sawah & Tegalan (Ha) | Peruntukan Bangunan Tanah (Ha) | | | | Jumlah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perumahan | Industri | Perusahaan | Jasa | |
| 2016 | 45.392 | 33.058 | 8.910 | 0,113 | 3.311 | 45.392 |
| 2017 | 45.761 | 40.298 | 4.515 | 0 | 0,948 | 45.761 |
| 2018 | 63.381 | 48.897 | 13.744 | 0 | 0,740 | 63.381 |
| 2019 | 81.700 | 55.500 | 18.200 | 0,500 | 7.500 | 81.700 |
| 2020 | 93.180 | 56.104 | 10.332 | 25.516 | 1.228 | 93.180 |

*Sumber* : *DPKPP Kab. Klaten, 2021*

### 2.1.7. Potensi Kemampuan Lahan

Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan (tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan) dalam dokumen KLHS RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan di Kabupaten Klaten menjadi 3 kelas, yaitu:

1. Tinggi
   Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik:
   a. Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan;
   b. Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam;
   c. Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah;
   d. Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur dan mudah diolah; dan
   e. Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi yang lebih singkat.

2. Sedang
   Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik:
   a. Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya terjadi pembatasan pemanfaatan lahan;
   b. Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar. Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu;
   c. Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini; dan
   d. Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.

3. Rendah

   Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik:

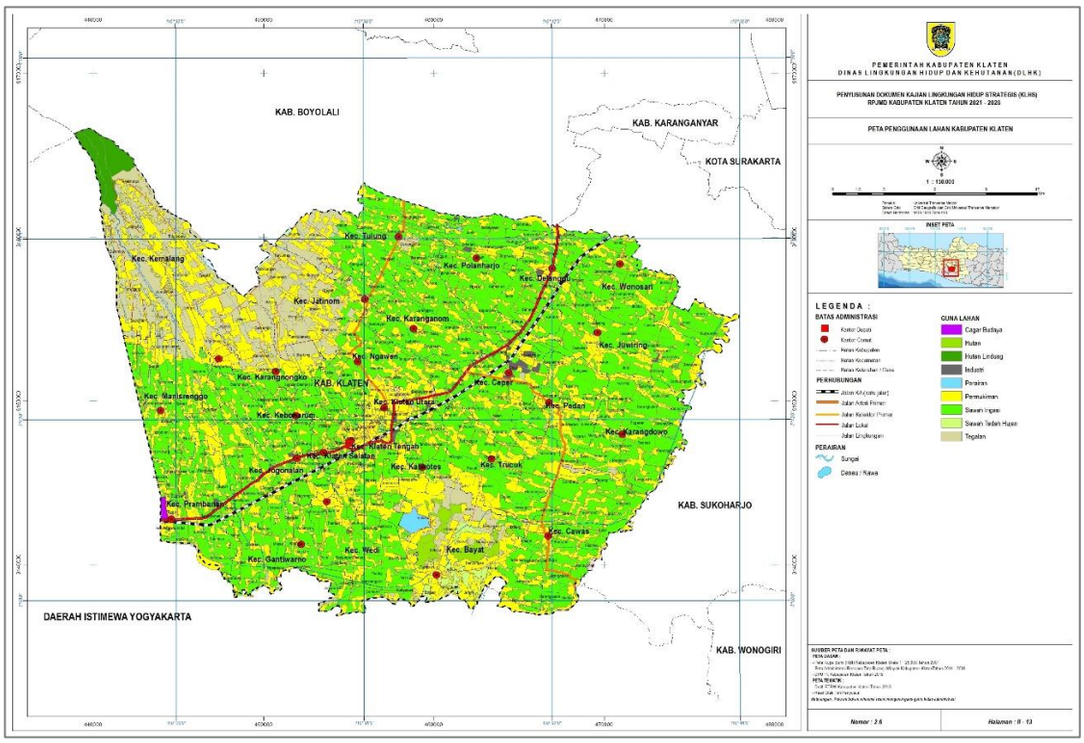
   a. Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan;
   b. Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadi mudah tandus; dan
   c. Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Klaten dapat dlihat pada Tabel Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.6**
**Potensi Kemampuan Lahan Di Kabupaten Klaten**

| No | Kecamatan | Potensi Kemampuan Lahan (Ha) | | | Jumlah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah | |
| 1 | Bayat | 3.030,4 | 1.207,6 | - | 4.238,0 |
| 2 | Cawas | 3.606,1 | 8,8 | - | 3.615,0 |
| 3 | Ceper | 2.566,7 | 8,1 | - | 2.574,8 |
| 4 | Delanggu | 1.977,7 | 26,2 | - | 2.003,9 |
| 5 | Gantiwarno | 2.433,2 | 228,6 | - | 2.661,8 |
| 6 | Jatinom | 3.498,0 | 152,5 | - | 3.650,5 |
| 7 | Jogonalan | 2.706,3 | - | - | 2.706,3 |
| 8 | Juwiring | 3.100,4 | - | - | 3.100,4 |
| 9 | Kalikotes | 1.391,6 | - | - | 1.391,6 |
| 10 | Karanganom | 2.559,0 | - | - | 2.559,0 |
| 11 | Karangdowo | 3.085,6 | - | - | 3.085,6 |
| 12 | Karangnongko | 2.916,9 | 65,4 | - | 2.982,3 |
| 13 | Kebonarum | 1.035,5 | - | - | 1.035,5 |
| 14 | Kemalang | 626,6 | 4.379,4 | 885,2 | 5.891,1 |
| 15 | Klaten Selatan | 1.525,6 | - | - | 1.525,6 |
| 16 | Klaten Tengah | 956,5 | - | - | 956,5 |
| 17 | Klaten Utara | 1.118,0 | - | - | 1.118,0 |
| 18 | Manisrenggo | 2.978,2 | 120,3 | - | 3.098,5 |
| 19 | Ngawen | 1.817,2 | - | - | 1.817,2 |
| 20 | Pedan | 1.998,6 | - | - | 1.998,6 |
| 21 | Polanharjo | 2.492,3 | 53,3 | - | 2.545,6 |
| 22 | Prambanan | 2.592,8 | 10,4 | - | 2.603,2 |
| 23 | Trucuk | 3.467,7 | 0,9 | - | 3.468,6 |
| 24 | Tulung | 3.367,7 | 63,6 | - | 3.431,3 |
| 25 | Wedi | 2.575,2 | 61,0 | - | 2.636,2 |
| 26 | Wonosari | 3.328,3 | - | - | 3.328,3 |

*Sumber : Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.8.**
**Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Klaten**

### 2.1.8. Kondisi Lingkungan Hidup

Kabupaten Klaten memiliki keanekearagaman spesies dan genetik yang menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih memiliki keanekaragaman hayati. Kabupaten Klaten memiliki 3 (tiga) jenis ekosistem berdasarkan kondisi geomorfologinya, yaitu lereng Gunung Merapi yang membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung; dataran rendah meliputi Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo; dan perbukitan/gunung kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas dan sebagian Gantiwarno.

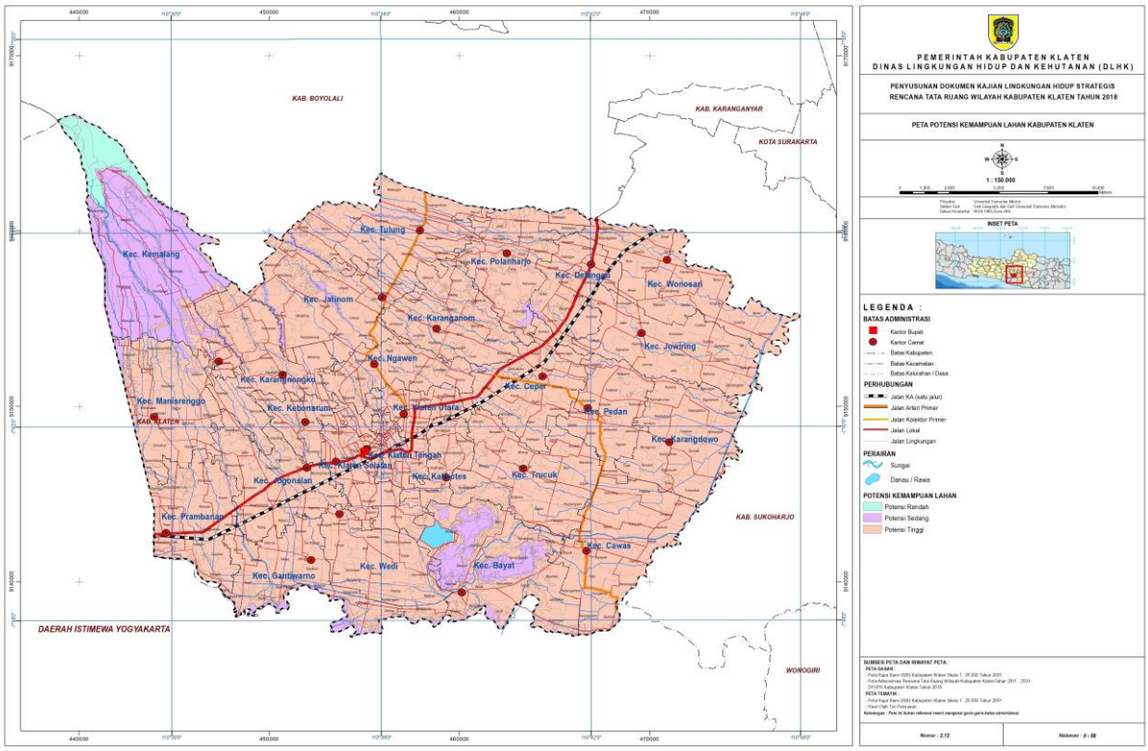
Upaya perlindungan dan pelestarian potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Klaten dilakukan melalui:

1. Lereng Gunung Merapi
   a. Penyusunan rencana tata ruang Kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya;
   b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya;
   c. Penyusunan rencana rinci kawasan resapan air;
   d. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan resapan air;
   e. Pembuatan sumur resapan;
   f. Pelestarian hutan dan reboisasi;
   g. Gerakan rehabilitasi lahan;
   h. Pengaturan penambangan pasir dan batu;
   i. Pendirian hunian tetap (huntap);
   j. Pembangunan jalur dan sarana evakuasi; dan
   k. Konservasi hayati dengan penangkaran dan perlindungan habitat.

2. Dataran rendah
    a. Mengarahkan pembangunan dan pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
    b. Menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
    c. Mengembangkan produktivitas pertanian;
    d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
    e. Konservasi hayati dengan penangkaran dan perlindungan habitat.
3. Perbukitan/pegunungan
    a. Pengolahan sistem terassering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air;
    b. Gerakan rehabilitasi lahan; dan
    c. Konservasi hayati dengan penangkaran dan perlindungan habitat.

Beberapa jenis-jenis spesies genetik yang teridentifikasi sebagai keanekaragaman hayati di Kabupaten Klaten diantaranya *(Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026):*

1. Jenis yang belum diperdagangkan, misalnya:
    a. Jenis tumbuhan palem raja, palem jawa, dan anggrek jiwa.
    b. Jenis satwa seperti kuntul bangau, burung hantu, dan ikan gabus.
2. Jenis yang sudah bernilai ekonomi, misalnya:
    a. Jenis tumbuhan kemuning, dan mindi.
    b. Jenis satwa: sriti, jalak bali, ikan nila, dan ikan lele.
3. Jenis keanekaragaman hayati di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Klaten (Kecamatan Kemalang), misalnya:
    a. Satwa liar yang dilindungi: elang alap cina, elang jawa, dan lutung jawa.
    b. Satwa liat tidak dilindungi: bajing, dan tikus.
4. Jenis yang sudah dibudidayakan, misalnya:
    a. Tanaman pangan: padi, jagung, dan kedelai.
    b. Perkebunan: kelapa dalam, dan cengkeh.
    c. Holtikultura: bawang merah, kubis, alpukat, dan belimbing.
    d. Pakan ternak: rumput gajah, dan lamtoro gung.
    e. Obat dan rempa: cengkeh, dan lada.
    f. Tanaman bahan baku industri: tebu, dan tembakau.
    g. Peternakan: sapi, dan kambing.
    h. Kehutanan: jati, dan mahoni.
    i. Perikanan: nila, dan tawes.
5. Pengetahuan tradisional
    Pengetahuan tradisional dimaksud sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh komunal atau masyarakat daerah dan tradisi yang sifatnya turun menurun. Jenis kearifan lingkungan yang diterapkan masyarakat antara lain pelestarian mata air, dan perlindungan sungai/waduk.




*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026*

**Gambar 2.9.**
**Peta Potensi Kemampuan Lahan Kabupaten Klaten**

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Klaten secara umum adalah sebagai berikut *(Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026).*

1. Kondisi Ekoregion
   a. Jenis ekoregion di Kabupaten Klaten diantaranya: Dataran Fluvio-vulkan Material Piroklastik, Perbukitan Solusional Karst Jiwobayat Batugamping Terumbu, Perbukitan Struktural Patahan Jiwobayat Batuan Gunungap Tua, Lerengkaki Perbukitan Struktural Patahan Baturagung Batuan Gunungapi Tua, Kerucut Gunungapi Merapi Material Piroklastik, Kaki Gunungapi Merapi Material Piroklastik dan Dataran Kaki Gunungapi Material Piroklastik.
   b. Jenis ekoregion yang mendominasi antara lain: Dataran Fluvio-vulkan Material Piroklastik yaitu seluas 50.726,93 Ha atau 72,44 % dari total ekoregion di Kabupaten Klaten.

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Potensi Ketersediaan Pangan | a. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Klaten selama tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif.<br>b. Produksi tanaman pangan tertinggi pada komoditas padi yang merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Klaten. |
| 3. | Potensi Ketersediaan Air | a. Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI)<br>b. Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten.<br>c. Sementara sumber air baku di Kabupaten Klaten berasal dari sumber mata air yang berjumlah 69 mata air, waduk, embung dan sungai sejumlah 80 aliran. |
| 4. | Kondisi pengelolaan sampah | Jumlah perkiraan timbulan sampah per hari tahun 2020 di Kabupaten Klaten sebesar 398.273,1 ton. |
| 5. | Indek Kualitas Lingkungan Hidup | |
| | a. Kualitas dan Mutu Air Sungai | Berdasarkan uji kualitas air pengambilan sampel dilakukan beberapa titik sungai antara lain: Soran, Pusur, Kroman, Merbung, Modin, Kacang Ijo, Dengkeng, Bengawan Solo, beberapa parameter air yang masih memenuhi baku mutu untuk semua sungai yang disampel di Kabupaten Klaten adalah: TDS, TSS, NO3-N*, As, Co, Boron, Cd*, Cr6, Pb, Zn, Klorida*, Sianida (CN), dan F. Kondisi sungai dengan kualitas air paling rendah yaitu Sungai Kacang Ijo, kondisi tersebut digambarkan sungai tersebut mempunyai parameter paling banyak yang tidak memenuhi baku mutu air berupa pH*, BOD*, COD*,DO*, Total Fosfat sbg P, Belerang sebagai H2S. dan Deterjen sebagai MBAS. |

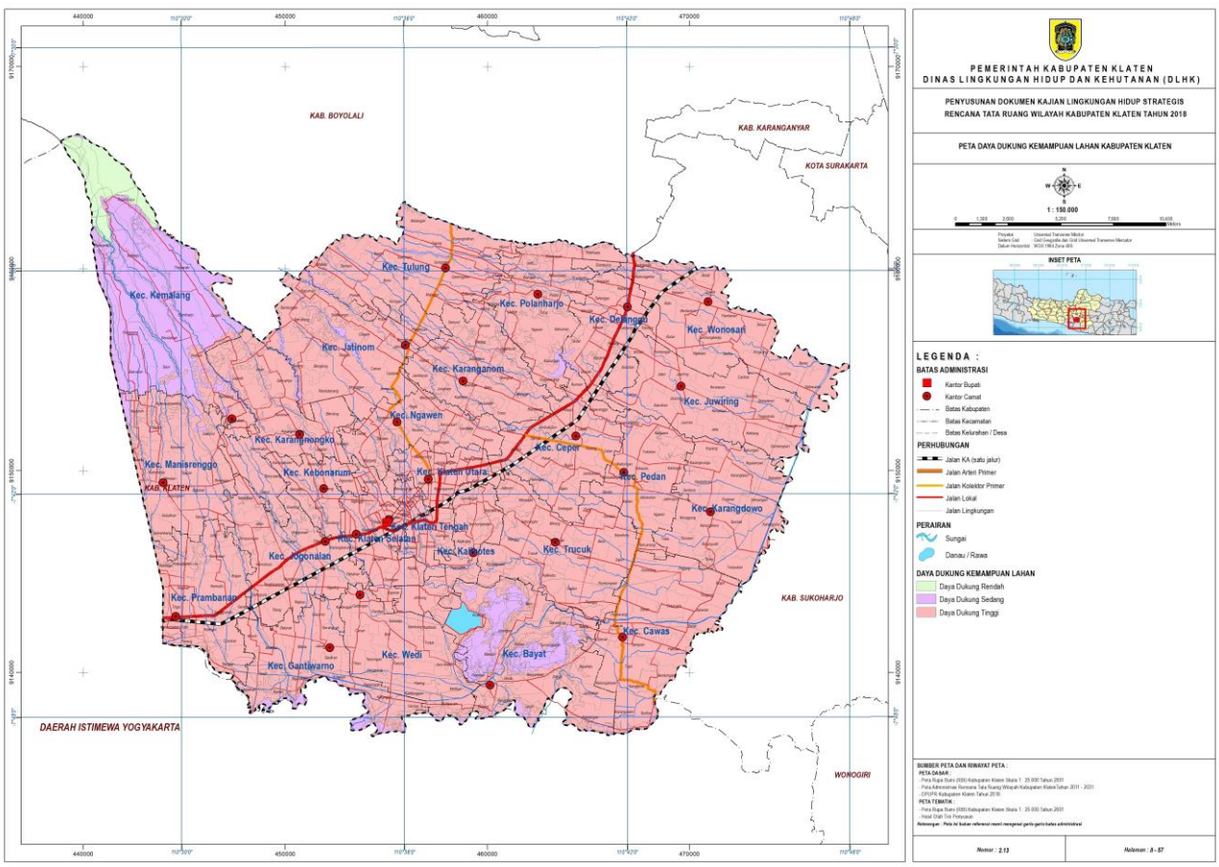
| | |
|---|---|
| b. Kualitas Udara | Untuk melihat kualitas udara di Kabupaten Klaten dapat digambarkan berdasarkan pengukuran udara yang dilakukan di 3 titik sampel yaitu Halaman depan Kantor Pemda Klaten, Taman Perumda Gergunung, Halaman Masjid Al Aqsha Klaten menunjukkan parameter $NO_2$ dan $O_3$, maupun $SO_2$ masih dalam kategori baik, sedangkan CO dalam kategori berbahaya karena rentang ISPU terhitung ialah di atas 500. Tingginya konsentrasi CO disebabkan oleh banyaknya jumlah dan kepadatan kendaraan serta kinerja lalu lintas di Kabupaten Klaten. |
| c. Tata guna lahan | • Kabupaten Klaten memiliki lahan kritis yang terletak di Kecamatan Kemalang, Jatinom, Karangnongko, dan Manisrenggo. Luas lahan kritis sebesar 133,01 Ha, lahan sedang/ agak kritis ± 80,34 Ha, sangat kritis ± 696,43 Ha, dan potensial kritis seluas ± 526 Ha<br>• Perubahan lahan yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2009 hingga 2017 sebesar 0,3% (dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian). |

6. Kajian Muatan KLHS

| | |
|---|---|
| a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | • Daya dukung lahan pada Tahun 2019 $S_L$ (328.063 Ha) > $D_L$, (301.450 Ha) dan tahun 2030 $S_L$ (169.307 Ha) > $D_L$, (164.614 Ha). Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan surplus daya dukung lahan masih dapat memenuhi kebutuhan.<br>• Ketersediaan air maksimal di Kabupaten Klaten tahun 2019 sebesar 875.095.074,88 $m^3$/tahun dengan kebutuhan air sebesar 325.470.283,88 $m^3$/tahun, sedangkan pada tahun 2030 ketersediaan air maksimal sebesar 804.593.793,12 $m^3$/tahun dengan kebutuhan air sebesar 328.806.846,19 $m^3$/tahun. Ketersediaan air lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air, sehingga daya dukung air di Kabupaten Klaten dinyatakan *surplus*.<br>• Daya dukung lahan sawah dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2030 daya dukung lahan sawah mempunyai nilai $\alpha>1$, yang berarti bahwa Kabupaten Klaten mampu swasembada pangan. |
| b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Terjadi peningkatan populasi penduduk yang menyebabkan produksi sampah yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan produksi sampah akan berdampak negative pada lingkungan hidup jika tidak disertai dengan upaya pengelolaan sampah yang baik. |

| | |
|---|---|
| c. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan Kabupaten Klaten antara lain:<br>• Efisiensi pemanfaatan yang dilakukan bersumber dari hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu;<br>• Pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang monitoring dan pengendalian bangunan, penyusunan rencana detail tata ruang, perencanaan dan koordinasi rencana tata ruang, survei dan pemetaan, penyusunan KLHS RDTR, penyusunan NSPK pemanfaatan ruang dan manual pemanfaatan ruang, pengawasan pemanfaatan ruang sehingga tercapai efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya;<br>• Pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui kearifan lokal;<br>• Pelaksanaan program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. |
| d. Kinerja layanan/jasa ekosistem | • Penyediaan air berbasis jasa ekosistem, sekitar 52% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang tinggi terhadap penyediaan air. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja jasa pelayanan ekosistem penyedia air cukup mampu dalam memenenuhi penyediaan air;<br>• Penyediaan pangan berbasis jasa ekosistem, sekitar 48% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang sangat tinggi terhadap penyediaan bahan pangan. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Klaten mampu dalam pemenuhan kebutuhan beras secara mandiri;<br>• Sekitar 50% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem sedang dan 22% luasan termasuk jasa ekosistem sangat rendah. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Klaten masih mampu menyediakan ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. |

| | |
|---|---|
| e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | Kabupaten Klaten berdasarkan data SIDIK sebanyak 311 desa termasuk pada indeks kerentanan rendah. Hal ini berarti bahwa kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Klaten dalam kondisi baik dengan adaptasi yang tinggi. |
| f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | Kabupaten Klaten memiliki keanekearagaman spesies dan genetik yang menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih memiliki keanekaragaman hayati.<br>Upaya perlindungan dan pelestarian potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Klaten dilakukan melalui:<br>• Lereng Gunung Merapi<br>• Dataran rendah<br>• Perbukitan/pegunungan |




*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026*

**Gambar 2.10.**
**Peta Daya Dukung Kemampuan Lahan Kabupaten Klaten**

### 2.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola

ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

**A. Kawasan Lindung terdiri atas:**

1. Badan Air
   Dengan luas kurang lebih 455 Ha, terdapat di Kecamatan Bayat; Kecamatan Cawas; Kecamatan Gantiwarno; Kcamatan Johonalan; Kecamatan Juwiring; Kecamatam Karangdowo; Kecamatan Kemalang; Kecamatan Manisrenggo; Kecamatan Prambanan; Kecamatan Trucuk; Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) haktar terdapat di Kecamatan Bayat.
3. Kawasan konservasi, berupa kawasan pelestarian alam, berupa taman nasional berupa taman nasional gunung merapi dengan luas kurang lebih 901 (sembilan ratus satu) hektar terdapat di Kecamatan Kemalang.
4. Kawasan lindung geologi, berupa kawasan cagar alam geologi, berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bayat. Kawasan cagar alam geologi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan cagar budaya, dengan luas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
   a. Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Lor/Candirejo, Candi Asu/Gana, Candi Plaosan Lor, Candi Plaosan Kidul, dan Candi Sojiwan, di Kecamatan Prambanan;
   b. Candi Karangnongko dan Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
   c. Kawasan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
   d. Kawasan Pesanggrahan Paku Buwono X;
   e. Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
   f. Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari;
   g. Makam Panembahan Romo di Kecamatan Klaten Selatan;
   h. Makam Kyai Melati di Kecamatan Klaten Tengah;
   i. Makam Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk; dan
   j. Makam Syeh Domba di Kecamatan Bayat.

**B. Kawasan Budidaya; terdiri atas:**

1. Badan jalan, dengan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Ceper; Kecamatan Delanggu; Kecamatan Jogonalan; Kecamatan Karanganom; Kecamatan Karangnongko; Kecamatan Kebonarum; Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Manisrenggo; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Polanharjo; dan Kecamatan Prambanan.
2. Kawasan hutan produksi, terdiri atas:
   a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dengan luas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Ha, terdapat di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi.
   b. Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes.
3. Kawasan Perkebunan Rakyat, dengan luas kurang lebih 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh) Ha terdapat di Kecamatan Bayat; Kecamatan

Karangnongko; Kecamatan Kemalang; dan Kecamatan Manisrenggo.

4. Kawasan pertanian, terdiri atas:
   a. Kawasan Tanaman Pangan, dengan luas kurang lebih 32.000 (tiga pulu dua ribu) hektar terdapat diseluruh kecamatan. Ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) hektare.
   b. Kawasan Peternakan, dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar terdapat di Kecamatan Bayat; Kecamatan Gantiwarno; Kecamatan Jatinom; Kecamatan Karangnongko; Kecamatan Kemalang; Kecamatan Manisrenggo; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Prambanan; dan Kecamatan Tulung.
5. Kawasan perikanan, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya, dengan luas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Ceper; Kecamatan Gantiwarno; Kecamatan Kalikotes; Kecamatan Karanganom; Kecamatan Karangnongko; Kecamatan Kebonarum; Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Manisrenggo; bKecamatan Ngawen; Kecamatan Polanharjo; Kecamatan Prambanan; dan Kecamatan Tulung.
6. Kawasan pertambangan dan energi, berupa Kawasan pertambangan mineral berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung.
7. Kawasan Peruntukan Industri
   Kawasan Peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Bayat; Kecamatan Cawas; Kecamatan Ceper; Kecamatan Delanggu; Kecamatan Gantiwarno; Kecamatan Jatinom; Kecamatan Jogonalan; Kecamatan Juwiring; Kecamatan Kalikotes; Kecamatan Karanganom; Kecamatan Karangdowo; Kecamatan Kebonarum; Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Tengah; Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Pedan; Kecamatan Polanharjo; Kecamatan Prambanan; Kecamatan Trucuk; Kecamatan Tulung; Kecamatan Wedi; dan Kecamatan Wonosari.
8. Kawasan Pariwisata, dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar terdiri atas:
   a. Kawasan pariwisata alam, terdapat di:
      1). Batu Putih di Kecamatan Bayat;
      2). Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
      3). Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;
      4). Bukit Sidoguro di Kecamatan Bayat;
      5). Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
      6). Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
      7). Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
      8). Kebon Asri di Kecamatan Bayat;
      9). Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
      10). Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
      11). Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganom;
      12). Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;
      13). Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
      14). Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
      15). Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;

16). Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
17). Girpasang di Kecamatan Kemalang;
18). Kalitalang di Kecamatan Kemalang;
19). Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
20). Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
21). Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
22). Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
23). Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
24). Umbul Sigedang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
25). Pusur Tubing di Kecamatan Polanharjo;
26). Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
27). Obyek Mata Air Cokro (OMAC) di Kecamatan Tulung;
28). Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
29). Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.
30). Batu Putih di Kecamatan Bayat;
31). Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
32). Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;
33). Bukit Sidoguro di Kecamatan Bayat;
34). Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
35). Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
36). Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
37). Kebon Asri di Kecamatan Bayat;
38). Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
39). Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
40). Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganom;
41). Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;
42). Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
43). Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
44). Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
45). Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
46). Girpasang di Kecamatan Kemalang;
47). Kalitalang di Kecamatan Kemalang;
48). Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
49). Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
50). Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
51). Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
52). Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
53). Umbul Sigedang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
54). Pusur Tubing di Kecamatan Polanharjo;
55). Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
56). Obyek Mata Air Cokro (OMAC) di Kecamatan Tulung;
57). Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
58). Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.

b. Kawasan pariwisata buatan terdapat di:
1). Museum Gula Jawa Tengah di Kecamatan Jogonalan;
2). Tirta Pelangi di Kecamatan Kalikotes;
3). Kolam Renang Tirta Indah di Kecamatan Klaten Selatan;
4). Kolam Renang Tirta Yudha Bakti di Kecamatan Klaten Selatan;
5). Kolam Renang Moon di Kecamatan Klaten Utara;
6). Prilon Park di Kecamatan Klaten Utara;
7). D'Wangen Ketjeh Resto di Kecamatan Polanharjo;

8). Kampung Dolanan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
9). Kawasan Wisata Siblarak di Kecamatan Polanharjo;
10). Kolam Renang Tirta Kamandanu di Kecamatan Polanharjo;
11). Pemancingan Omah Iwak di Kecamatan Polanharjo;
12). Kolam Renang Pancingan 47 di Kecamatan Tulung;
13). Kolam Renang Lumintu 1001 di Kecamatan Polanharjo;
14). Kolam Renang Sumber Mina di Kecamatan Polanharjo;
15). Pemancingan Janti di Kecamatan Polanharjo;
16). Ponggok Ciblon di Kecamatan Polanharjo;
17). Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo di Kecamatan Prambanan;
18). Kolam Renang Tirta Kencana Miri di Kecamatan Trucuk;
19). Aqua Regia di Kecamatan Tulung;
20). Kolam Renang Bale Tirta di Kecamatan Tulung;
21). Kolam Renang Pancingan 100 di Kecamatan Tulung;
22). Pesona Alam Tirta di Kecamatan Tulung;
23). Pemandian Lumban Tirto di Kecamatan Tulung;
24). Semego di Kecamatan Tulung;
25). Umbul Asri di Kecamatan Tulung; dan
26). pengembangan potensi wisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

c. Kawasan Pariwisata budaya, terdapat di:
1) Kampung Pecel Ngerangan di Kecamatan Bayat;
2) Makam Sunan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
3) Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
4) Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom;
5) Tugu Waseso dan Menoro Baskoro di Kecamatan Karanganom;
6) Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
7) Candi Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
8) Candi Asu/Gana di Kecamatan Prambanan;
9) Candi Bubrah di Kecamatan Prambanan;
10) Candi Lor/Candirejo di Kecamatan Prambanan;
11) Candi Lumbung di Kecamatan Prambanan;
12) Candi Plaosan Kidul di Kecamatan Prambanan;
13) Candi Plaosan Lor di Kecamatan Prambanan;
14) Candi Sewu di Kecamatan Prambanan;
15) Candi Sojiwan di Kecamatan Prambanan;
16) Makam Ronggo Warsito di Kecamatan Trucuk;
17) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari; dan
18) Keunikan lokal sebagai desa wisata terdapat di:
a) Desa Wisata Gununggajah di Kecamatan Bayat;
b) Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat;
c) Desa Wisata Jotangan di Kecamatan Bayat;
d) Desa Wisata Krakitan di Kecamatan Bayat;
e) Desa Wisata Ngerangan di Kecamatan Bayat;
f) Desa Wisata Paseban di Kecamatan Bayat;
g) Desa Wisata Tlingsing di Kecamatan Cawas;
h) Desa Wisata Pokak di Kecamatan Ceper;
i) Desa Wisata Glagah di Kecamatan Jatinom;
j) Desa Wisata Mranggen di Kecamatan Jatinom;
k) Desa Wisata Plawikan di Kecamatan Jogonalan;
l) Desa Wisata Tanjung di Kecamatan Juwiring;
m) Desa Wisata Jimbung di Kecamatan Kalikotes;
n) Desa Wisata Beku di Kecamatan Karanganom;
o) Desa Wisata Soropaten di Kecamatan Karanganom;
p) Desa Wisata Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;

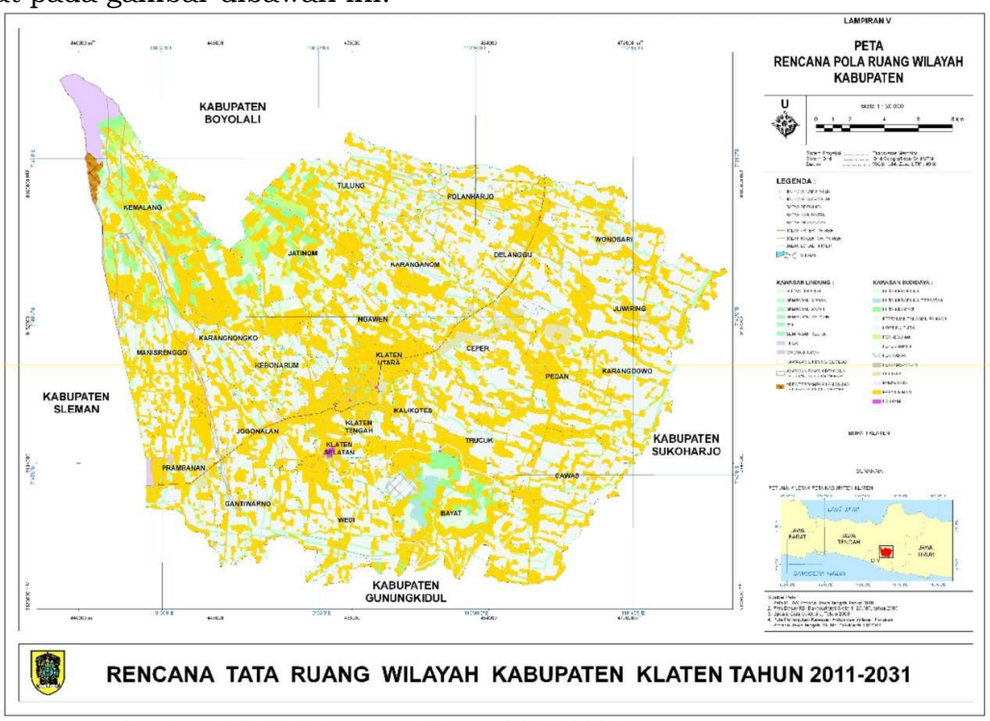
q) Desa Wisata Malangjiwan di Kecamatan Kebonarum;
r) Desa Wisata Ngrundul di Kecamatan Kebonarum;
s) Desa Wisata Pluneng di Kecamatan Kebonarum;
t) Desa Wisata Balerante di Kecamatan Kemalang;
u) Desa Wisata Panggang di Kecamatan Kemalang;
v) Desa Wisata Sidorejo di Kecamatan Kemalang;
w) Desa Wisata Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang;
x) Desa Wisata Tlogowatu di Kecamatan Kemalang;
y) Desa Wisata Danguran di Kecamatan Klaten Selatan;
z) Desa Wisata Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan;
aa) 2esa Wisata Jomboran Kecamatan Klaten Tengah;
bb) Desa Wisata Duwet di Kecamatan Ngawen;
cc) Desa Wisata Manjungan di Kecamatan Ngawen;
dd) Desa Wisata Nganjat di Kecamatan Polanharjo;
ee) Desa Wisata Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
ff) Desa Wisata Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
gg) Desa Wisata Brajan di Kecamatan Prambanan;
hh) Desa Wisata Bugisan di Kecamatan Prambanan;
ii) Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan;
jj) Desa Wisata Melikan di Kecamatan Wedi;
kk) Desa Wisata Pasung di Kecamatan Wedi; dan
ll) Desa Wisata Sidowarno di Kecamatan Wonosari.

9. Kawasan permukiman, terdiri atas:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan luas kurang lebih 10.438 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh delapan) hektar terdapat di seluruh kecamatan.
   b. Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan luas kurang lebih 20.774 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) hektar terdapat di:
      1). Kecamatan Bayat;
      2). Kecamatan Cawas;
      3). Kecamatan Ceper;
      4). Kecamatan Delanggu;
      5). Kecamatan Gantiwarno;
      6). Kecamatan Jatinom;
      7). Kecamatan Jogonalan;
      8). Kecamatan Juwiring;
      9). Kecamatan Kalikotes;
      10). Kecamatan Karanganom;
      11). Kecamatan Karangdowo;
      12). Kecamatan Karangnongko;
      13). Kecamatan Kebonarum;
      14). Kecamatan Kemalang;
      15). Kecamatan Manisrenggo;
      16). Kecamatan Ngawen;
      17). Kecamatan Pedan;
      18). Kecamatan Polanharjo;
      19). Kecamatan Prambanan;
      20). Kecamatan Trucuk;
      21). Kecamatan Tulung;
      22). Kecamatan Wedi; dan
      23). Kecamatan Wonosari.

10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
    a. Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Klaten Selatan;
    b. Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
    c. Kepolisian Resor (Polres) Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Utara;
    d. Lapangan tembak terdapat di Kecamatan Trucuk;
    e. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di:
        1). Komando Rayon Militer 01/Kota di Kecamatan Klaten Tengah;
        2). Komando Rayon Militer 02/Jogonalan Kecamatan Jogonalan;
        3). Komando Rayon Militer 03/Delanggu di Kecamatan Delanggu;
        4). Komando Rayon Militer 04/Pedan di Kecamatan Pedan;
        5). Komando Rayon Militer 05/Jatinom di Kecamatan Jatinom;
        6). Komando Rayon Militer 06/Kebonarum di Kecamatan Klaten Selatan;
        7). Komando Rayon Militer 07/Wedi di Kecamatan Wedi; dan
        8). Komando Rayon Militer 08/Ngawen di Kecamatan Ngawen;
        9). Komando Rayon Militer 09/Prambanan di Kecamatan Prambanan;
        10). Komando Rayon Militer 10/Gantiwarno di Kecamatan Gantiwarno;
        11). Komando Rayon Militer 11/Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
        12). Komando Rayon Militer 12/Manisrenggo di Kecamatan Manisrenggo;
        13). Komando Rayon Militer 13/Kemalang di Kecamatan Kemalang;
        14). Komando Rayon Militer 14/Karanganom di Kecamatan Karanganom;
        15). Komando Rayon Militer 15/Polanharjo di Kecamatan Polanharjo;
        16). Komando Rayon Militer 16/Tulung di Kecamatan Tulung;
        17). Komando Rayon Militer 17/Karangdowo di Kecamatan Karangdowo;
        18). Komando Rayon Militer 18/Bayat di Kecamatan Bayat;
        19). Komando Rayon Militer 19/Trucuk di Kecamatan Trucuk;
        20). Komando Rayon Militer 20/Cawas di Kecamatan Cawas;
        21). Komando Rayon Militer 21/Juwiring di Kecamatan Juwiring;
        22). Komando Rayon Militer 22/Wonosari di Kecamatan Wonosari.
        23). Komando Rayon Militer 23/Ceper di Kecamatan Ceper; dan
        24). Komando Rayon Militer 24/Klaten Utara di Kecamatan Klaten Utara.
    f. Kepolisian Sektor (Polsek) terdapat di:
        1). Kecamatan Bayat;
        2). Kecamatan Cawas;
        3). Kecamatan Ceper;
        4). Kecamatan Delanggu;
        5). Kecamatan Gantiwarno;
        6). Kecamatan Jatinom;
        7). Kecamatan Jogonalan;
        8). Kecamatan Juwiring;

9). Kecamatan Kalikotes;
10). Kecamatan Karanganom;
11). Kecamatan Karangdowo;
12). Kecamatan Karangnongko;
13). Kecamatan Kebonarum;
14). Kecamatan Kemalang;
15). Kecamatan Klaten Tengah;
16). Kecamatan Klaten Utara;
17). Kecamatan Manisrenggo;
18). Kecamatan Ngawen;
19). Kecamatan Pedan;
20). Kecamatan Polanharjo;
21). Kecamatan Prambanan;
22). Kecamatan Trucuk;
23). Kecamatan Tulung;
24). Kecamatan Wedi; dan
25). Kecamatan Wonosari.

Peta Pola Ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.11.**
**Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya**
**Kabupaten Klaten**

### 2.1.10. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana yang ada di Kabupaten Klaten berupa banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Rawan bencana ini terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Bencana ini terjadi karena beberapa faktor baik faktor alam maupun kelalaian manusia. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.7**
**Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2016-2020**

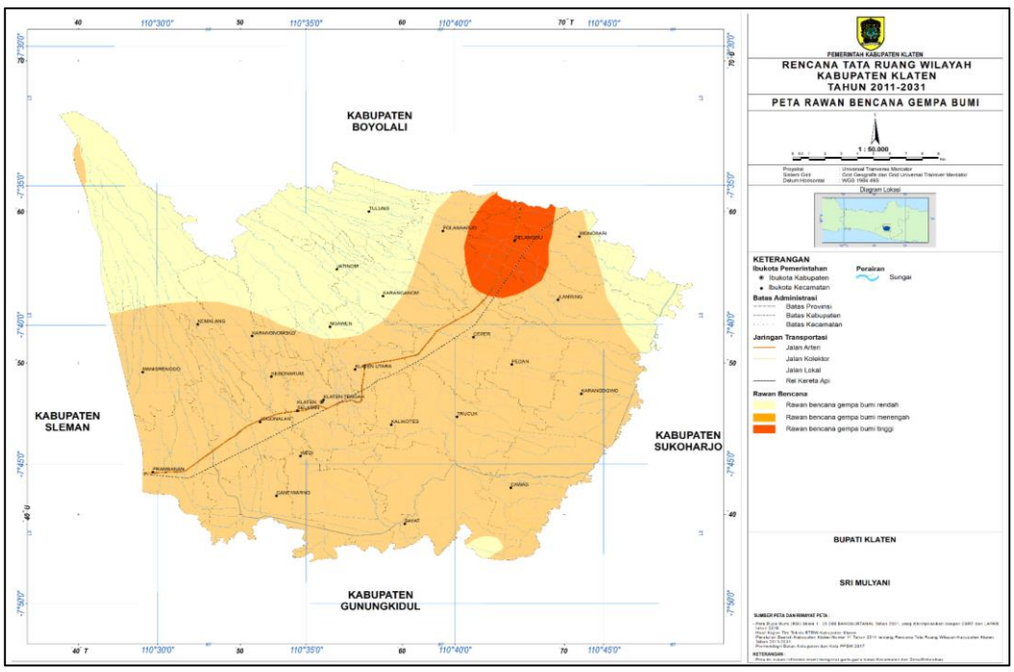
| Jenis Bencana | Tahun Ke | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Banjir | 4 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| Tanah longsor | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Puting beliung | 5 | 12 | 5 | 6 | 177 |
| Kekeringan | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 21 | 6 | 8 | 217 |

*Sumber:BPBD Kab. Klaten, tahun 2021*

Dari tabel tersebut terlihat bencana angin puting beliung terjadi setiap tahun di Kabupaten Klaten. Bencana tanah longsor dan banjir juga terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2020 kejadian bencana sebanyak 217 kali, dimana kejadian angin puting beliung terjadi 177 kali, banjir 32 kali dan tanah longsor 8 kali. Bencana banjir yang terjadi telah menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan) serta lahan pertanian.

Pada tahun 2020, Kecamatan Cawas dan Karangdowo merupakan wilayah yang paling sering terkena banjir. Wilayah di Kabupaten Klaten yang termasuk dalam daerah rawan banjir adalah wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Kalikotes, Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Pedan, Ceper dan Trucuk.

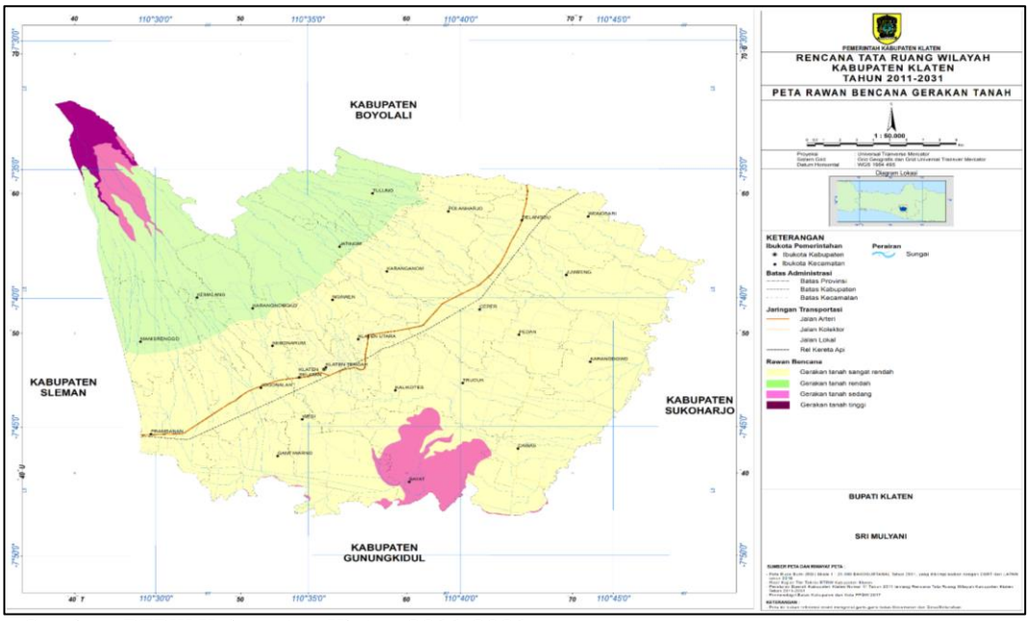
Rawan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Klaten adalah gempa bumi dan tanah longsor. Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk dalam klasifikasi rendah dan menengah. Sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.12.**
**Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Klaten**

Rawan bencana tanah longsor/gerakan tanah yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari gerakan tanah sangat rendah hingga tinggi. Gerakan tanah tinggi berada di Kecamatan Kemalang yang merupakan wilayah terdekat dengan Gunung Merapi. Sedangkan untuk gerakan tanah sedang berada di sebagian wilayah Kemalang, Bayat dan Gantiwarno.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.13.**
**Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Klaten**

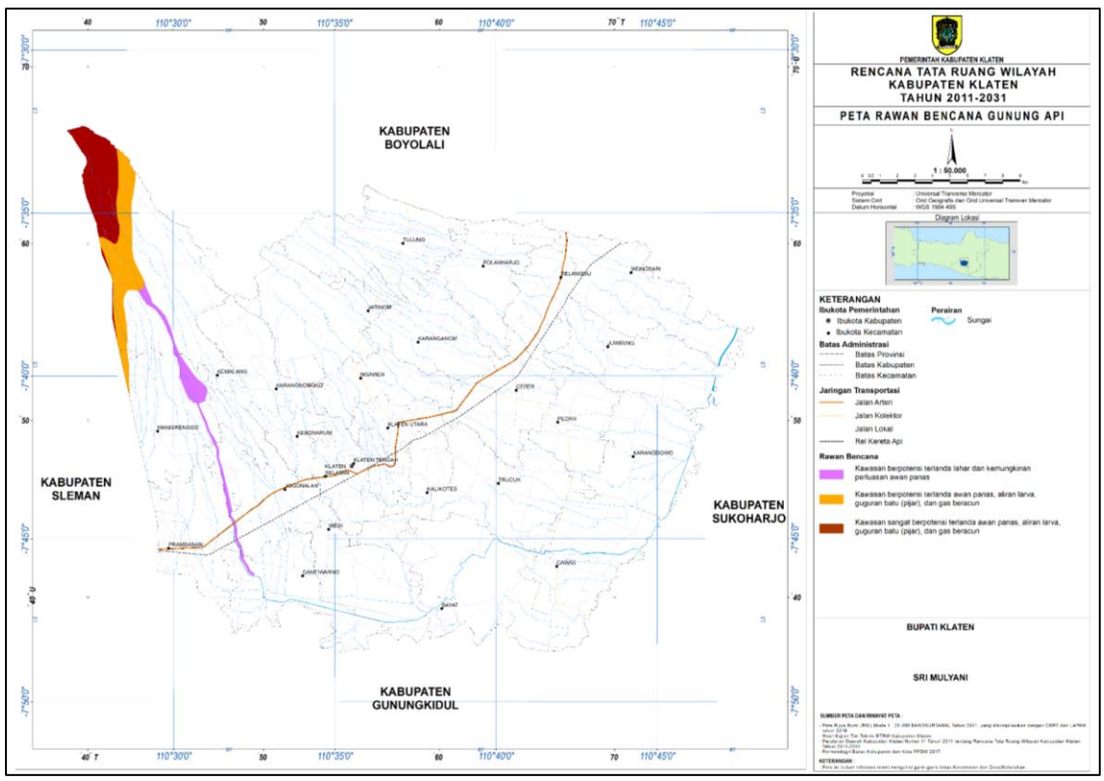
Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Wedi.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.14.**
**Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

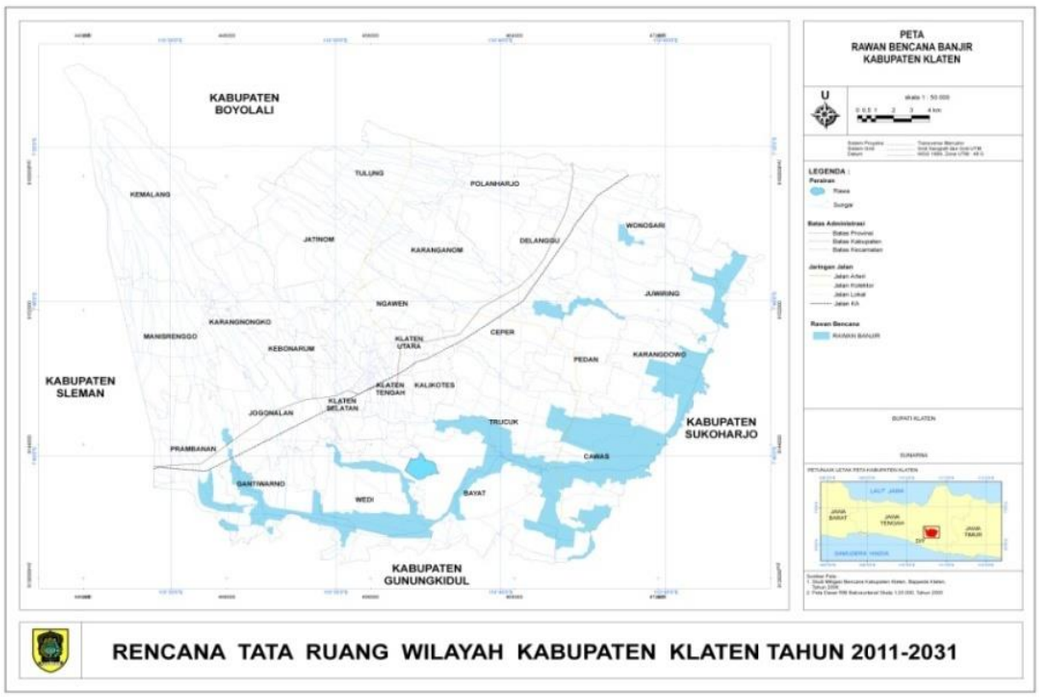
Selain kejadian bencana di atas, di Kabupaten Klaten juga terdapat wilayah yang berada di lereng gunung api yaitu Gunung Merapi. Beberapa wilayah di Kabupaten Klaten yang berada di sekitar lereng gunung api termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi gunung api. KRB III merupakan kawasan yang letaknya berdekatan dengan sumber bahaya Gunungapi Merapi. Jika Gunungapi Merapi mengalami erupsi maka pada kawasan ini sering dilanda awan panas, aliran lava, guguran batu, dan lontaran batu (pijar) sehingga kawasan ini memiliki ancaman resiko tinggi. KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda 2 hal, yaitu aliran massa berupa awan panas, aliran lava, dan lahar dan lontaran berupa jatuhan *piroklastik* lebat dan lontaran batu (pijar).




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.15.**
**Peta Rawan Bencana Gunung Api di Kabupaten Klaten**

Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi dan Wonosari.




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031*

**Gambar 2.16.**
**Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Klaten**

Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Klaten. Potensi ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dalam bidang: perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana.

### 2.1.11. Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 1.327.577 jiwa. Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Trucuk sebanyak 82.901 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kalikotes sebanyak 21.467 jiwa. Jika dilihat dari pertumbuhannya. Laju pertumbuhan penduduk (2019-2020) sebesar 0,54%.

**1. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Dengan luas wilayah mencapai 701,520 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.330.802 jiwa di tahun 2020 maka kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten mencapai 2.030 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kebonarum yaitu 6.603 jiwa/km², sedangkan untuk kepadatan terendah yaitu 718 jiwa/km² terdapat di Kecamatan Kemalang. Sebaran jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**
**Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Kecamatan | Penduduk (Jiwa) | | | | | Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) | | | | Luas wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | | |
| 1 | Prambanan | 51.861 | 52.112 | 52.662 | 52.824 | 54.667 | 0,48 | 1,06 | 0,31 | 3,49 | 26,09 | 2.238 |
| 2 | Gantiwarno | 40.618 | 41.060 | 40.609 | 40.696 | 44.262 | 1,09 | -1,10 | 0,21 | 8,76 | 26,44 | 1.726 |
| 3 | Wedi | 53.673 | 54.068 | 54.681 | 54.507 | 57.338 | 0,74 | 1,13 | -0,32 | 5,19 | 26,26 | 2.352 |
| 4 | Bayat | 64.399 | 64.680 | 65.148 | 65.649 | 69.554 | 0,44 | 0,72 | 0,77 | 5,95 | 42,09 | 1.764 |
| 5 | Cawas | 60.509 | 60.047 | 61.359 | 60.690 | 62.222 | -0,76 | 2,18 | -1,09 | 2,52 | 35,93 | 1.805 |
| 6 | Trucuk | 79.930 | 79.409 | 80.740 | 81.715 | 82.901 | -0,65 | 1,68 | 1,21 | 1,45 | 34,69 | 2.452 |
| 7 | Kalikotes | 37.465 | 20.532 | 20.910 | 20.935 | 21.467 | -45,20 | 1,84 | 0,12 | 2,54 | 14,11 | 1.654 |
| 8 | Kebonarum | 20.833 | 59.808 | 61.117 | 61.237 | 63.848 | 187,08 | 2,19 | 0,20 | 4,26 | 10,41 | 6.603 |
| 9 | Jogonalan | 59.725 | 43.245 | 44.181 | 44.373 | 45.378 | -27,59 | 2,16 | 0,43 | 2,26 | 27,59 | 1.700 |
| 10 | Manisrenggo | 43.521 | 37.371 | 38.247 | 38.096 | 39.087 | -14,13 | 2,34 | -0,39 | 2,60 | 30,60 | 1.450 |
| 11 | Karangnongko | 37.613 | 66.196 | 66.963 | 67.619 | 70.048 | 75,99 | 1,16 | 0,98 | 3,59 | 29,49 | 2.620 |
| 12 | Ngawen | 46.039 | 48.592 | 48.831 | 48.990 | 50.421 | 5,55 | 0,49 | 0,33 | 2,92 | 18,45 | 2.968 |
| 13 | Ceper | 65.587 | 46.144 | 45.176 | 45.256 | 47.089 | -29,64 | -2,10 | 0,18 | 4,05 | 25,77 | 1.927 |
| 14 | Pedan | 48.235 | 60.953 | 60.686 | 61.155 | 60.339 | 26,37 | -0,44 | 0,77 | -1,33 | 19,99 | 3.148 |
| 15 | Karangdowo | 45.617 | 64.494 | 64.760 | 64.770 | 62.900 | 41,38 | 0,41 | 0,02 | -2,89 | 30,81 | 2.152 |
| 16 | Juwiring | 60.211 | 43.917 | 43.248 | 43.661 | 42.267 | -27,06 | -1,52 | 0,95 | -3,19 | 30,90 | 1.419 |
| 17 | Wonosari | 64.846 | 42.886 | 42.783 | 42.969 | 41.146 | -33,86 | -0,24 | 0,43 | -4,24 | 33,40 | 1.321 |
| 18 | Delanggu | 43.354 | 47.102 | 47.585 | 47.602 | 46.270 | 8,65 | 1,03 | 0,04 | -2,80 | 20,03 | 2.465 |
| 19 | Polanharjo | 42.551 | 55.386 | 55.283 | 55.419 | 53.634 | 30,16 | -0,19 | 0,25 | -3,22 | 25,21 | 2.250 |
| 20 | Karanganom | 47.111 | 61.475 | 61.905 | 62.312 | 60.171 | 30,49 | 0,70 | 0,66 | -3,44 | 25,61 | 2.501 |
| 21 | Tulung | 54.401 | 39.467 | 39.721 | 40.064 | 39.299 | -27,45 | 0,64 | 0,86 | -1,91 | 34,44 | 1.228 |
| 22 | Jatinom | 60.262 | 46.697 | 46.697 | 47.368 | 45.860 | -22,51 | 0,00 | 1,44 | -3,18 | 37,10 | 1.291 |
| 23 | Kemalang | 38.502 | 37.877 | 37.943 | 38.116 | 37.083 | -1,62 | 0,17 | 0,46 | -2,71 | 60,19 | 718 |

| No | Kecamatan | Penduduk (Jiwa) | | | | | Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) | | | | Luas wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | | |
| 24 | Klaten Selatan | 44.474 | 48.315 | 48.416 | 49.265 | 48.023 | 8,64 | 0,21 | 1,75 | -2,52 | 15,09 | 3.328 |
| 25 | Klaten Tengah | 41.907 | 42.361 | 42.264 | 42.634 | 41.620 | 1,08 | -0,23 | 0,88 | -2,38 | 95,95 | 4.666 |
| 26 | Klaten Utara | 47.462 | 44.518 | 44.965 | 45.687 | 43.908 | -6,20 | 1,00 | 1,61 | -3,89 | 11,17 | 4.230 |
| **Jumlah** | | **1.300.706** | **1.308.712** | **1.316.880** | **1.323.609** | **1.330.802** | **0,62** | **1** | **0,51** | **0,54** | **701,520** | **2.030** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021*

## 2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas sebanyak 353.420 orang (26,55%), kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/mahasiswa sebanyak 253.046 jiwa (19,01%). Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan**
**Tahun 2020**

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang/Jiwa) | No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang/Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/tidak bekerja | 228.585 | 46 | Juru Masak | 48 |
| 2 | Mengurus rumah tangga | 135.612 | 47 | Promotor Acara | 1 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 253.046 | 48 | Anggota DPR-RI | 0 |
| 4 | Pensiunan | 14.039 | 49 | Anggota DPD | 0 |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 17.977 | 50 | Anggota BPK | 3 |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia | 1.714 | 51 | Presiden | 0 |
| 7 | Kepolisian RI | 1.687 | 52 | Wakil Presiden | 0 |
| 8 | Perdagangan | 11.741 | 53 | Anggota Mahkamah Konstitusi | 1 |
| 9 | Petani/Pekebun | 22.483 | 54 | Anggota Kabinet/Kementerian | 0 |
| 10 | Peternak | 747 | 55 | Duta Besar | 0 |
| 11 | Nelayan/Perikanan | 30 | 56 | Gubernur | 0 |
| 12 | Industri | 467 | 57 | Wakil Gubernur | 0 |
| 13 | Konstruksi | 288 | 58 | Bupati | 1 |
| 14 | Transportasi | 478 | 59 | Wakil Bupati | 0 |
| 15 | Karyawan Swasta | 123.979 | 60 | Walikota | 0 |
| 16 | Karyawan BUMN | 5.239 | 61 | Wakil Walikota | 0 |
| 17 | Karyawan BUMD | 496 | 62 | Anggota DPRD Provinsi | 3 |
| 18 | Karyawan Honorer | 4.092 | 63 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 51 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 353.420 | 64 | Dosen | 734 |
| 20 | Buruh Tani/Perkebunan | 32.542 | 65 | Guru | 10.389 |
| 21 | Buruh Nelayan/Perikanan | 97 | 66 | Pilot | 1 |
| 22 | Buruh Peternakan | 200 | 67 | Pengacara | 56 |
| 23 | Pembantu Rumah Tangga | 423 | 68 | Notaris | 60 |
| 24 | Tukang Cukur | 84 | 69 | Arsitek | 34 |
| 25 | Tukang Listrik | 94 | 70 | Akuntan | 13 |
| 26 | Tukang Batu | 2.135 | 71 | Konsultan | 79 |
| 27 | Tukang Kayu | 3.842 | 72 | Dokter | 531 |
| 28 | Tukang Sol Sepatu | 40 | 73 | Bidan | 711 |
| 29 | Tukang Las/Pandai Besi | 353 | 74 | Perawat | 1.525 |
| 30 | Tukang Jahit | 2.535 | 75 | Apoteker | 165 |
| 31 | Tukang Gigi | 20 | 76 | Psikiater/Psikolog | 11 |
| 32 | Penata Rias | 173 | 77 | Penyiar Televisi | 1 |
| 33 | Penata Busana | 27 | 78 | Penyiar Radio | 4 |
| 34 | Penata Rambut | 62 | 79 | Pelaut | 419 |
| 35 | Mekanik | 768 | 80 | Peneliti | 15 |
| 36 | Seniman | 311 | 81 | Sopir | 2.773 |

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang/Jiwa) | No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang/Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Tabib | 23 | 82 | Pialang | 5 |
| 38 | Paraji | 20 | 83 | Paranormal | 14 |
| 39 | Perancang Busana | 17 | 84 | Pedagang | 21.806 |
| 40 | Penterjemah | 7 | 85 | Perangkat Desa | 2.571 |
| 41 | Imam Mesjid | 12 | 86 | Kepala Desa | 388 |
| 42 | Pendeta | 121 | 87 | Biarawati | 30 |
| 43 | Pastor | 33 | 88 | Wiraswasta | 54.352 |
| 44 | Wartawan | 90 | 89 | Lainnya | 13.790 |
| 45 | Ustadz/Mubaligh | 68 | | | |
| **Jumlah Total** | | | | | **1.330.802** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021*

### 3. Penduduk Menurut Struktur Umur

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 918.244 jiwa, sedangkan penduduk yang belum produktif (<15 tahun) sebanyak 274.675 jiwa dan yang tidak produktif lagi (65 tahun keatas) sebanyak 137.883 jiwa. Sehingga rasio beban ketergantungan sebesar 44,93% yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44 orang usia tidak produktif.

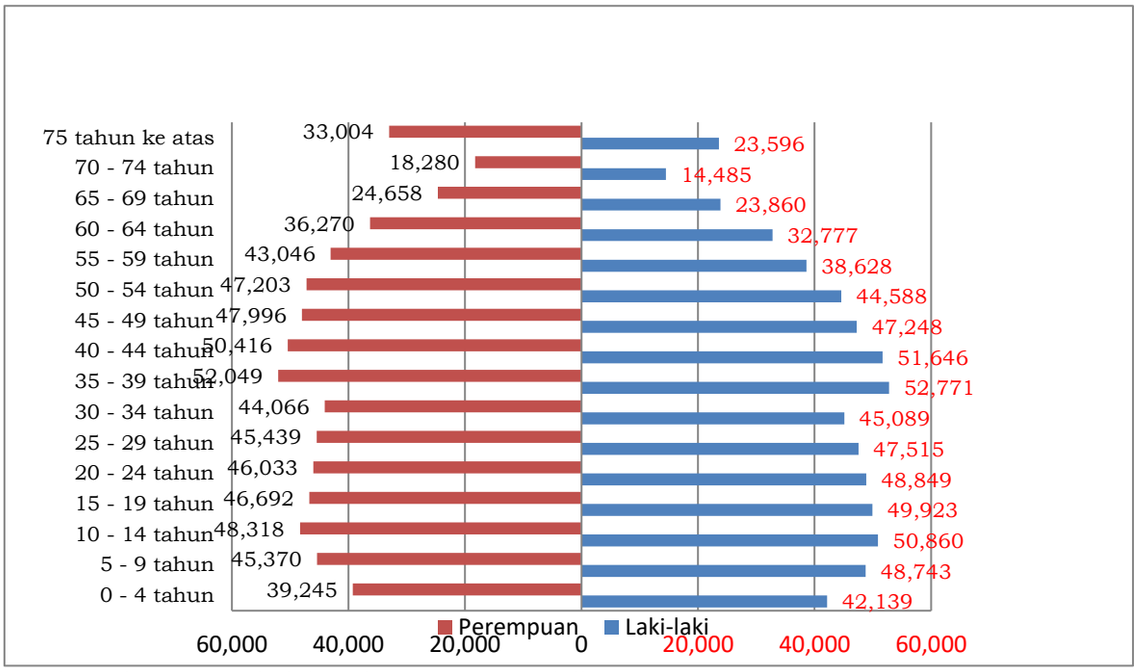
**Tabel 2.10**
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**
**Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| Kelompok Umur (tahun) | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 0 - 4 | 42.139 | 39.245 | 81.384 |
| 5 - 9 | 48.743 | 45.370 | 94.113 |
| 10 -14 | 50.860 | 48.318 | 99.178 |
| 15 - 19 | 49.923 | 46.692 | 96.615 |
| 20 - 24 | 48.849 | 46.033 | 94.882 |
| 25 - 29 | 47.515 | 45.439 | 92.954 |
| 30 - 34 | 45.089 | 44.066 | 89.155 |
| 35 - 39 | 52.771 | 52.049 | 104.820 |
| 40 - 44 | 51.646 | 50.416 | 102.062 |
| 45 - 49 | 47.248 | 47.996 | 95.244 |
| 50 - 54 | 44.588 | 47.203 | 91.791 |
| 55 - 59 | 38.628 | 43.046 | 81.674 |
| 60 - 64 | 32.777 | 36.270 | 69.047 |
| 65 - 69 | 23.860 | 24.658 | 48.518 |
| 70 - 74 | 14.485 | 18.280 | 32.765 |
| 75+ | 23.596 | 33.004 | 56.600 |
| **Jumlah** | **662.717** | **668.085** | **1.330.802** |

*Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021*

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan umur mempunyai pola yang sama, di mana posisi tertinggi berada pada golongan umur 15-64 tahun dan menurun kembali jumlahnya sampai pada golongan

umur 65-75+ tahun ke atas. Hal tersebut dapat digambarkan pada piramida penduduk Kabupaten Klaten tahun 2020 sebagai berikut.




*Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021*

**Gambar 2.17.**
**Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020**

**4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan tingkat pendidikan sangat beragam, tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas masyarakat itu sendiri. Tahun 2020, sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klaten adalah SLTA/sederajat sebanyak 365.119 orang (27,43%), jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD sebanyak 281.278 orang (21,13 %). Dengan identifikasi terhadap tingkat pendidikan masyarakat dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan, utamanya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selengkapnya, komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Kabupaten Klaten tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.11**
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pndidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| Kecamatan | Tidak/ Belum Sekolah | Belum Tamat SD/ Sederajat | Tamat SD/ Sederajat | SLTP/ Sederajat | SLTA/ Sederajat | Diploma I/ II | Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda | Diploma IV/ Strata I | Strata II | Strata III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prambanan | 9.584 | 5.741 | 9.875 | 8.385 | 16.729 | 323 | 1.151 | 2.716 | 157 | 6 | 54.667 |
| Gantiwarno | 7.713 | 4.988 | 9.032 | 6.287 | 13.524 | 262 | 734 | 1.640 | 77 | 5 | 44.262 |
| Wedi | 9.136 | 6.256 | 12.377 | 8.852 | 16.636 | 257 | 1.102 | 2.609 | 109 | 4 | 57.338 |
| Bayat | 13.864 | 6.403 | 19.853 | 10.839 | 15.482 | 238 | 776 | 2.017 | 76 | 6 | 69.554 |
| Cawas | 12.526 | 6.859 | 12.197 | 9.707 | 16.692 | 428 | 1.180 | 2.532 | 92 | 9 | 62.222 |
| Trucuk | 15.526 | 9.143 | 18.886 | 13.216 | 21.049 | 495 | 1.282 | 3.163 | 137 | 4 | 82.901 |
| Kebonarum | 3.336 | 2.961 | 3.276 | 3.377 | 6.772 | 195 | 436 | 1.071 | 40 | 3 | 21.467 |
| Jogonalan | 9.390 | 8.937 | 13.476 | 10.017 | 18.203 | 288 | 1.101 | 2.303 | 124 | 9 | 63.848 |
| Manis renggo | 8.934 | 5.254 | 10.137 | 7.302 | 11.778 | 227 | 559 | 1.124 | 53 | 10 | 45.378 |
| Karangnongko | 8.381 | 4.296 | 8.558 | 6.646 | 9.159 | 248 | 559 | 1.179 | 58 | 3 | 39.087 |
| Ceper | 11.437 | 6.677 | 13.509 | 11.001 | 21.951 | 466 | 1.335 | 3.482 | 173 | 17 | 70.048 |
| Pedan | 9.085 | 4.578 | 11.549 | 7.997 | 14.045 | 221 | 865 | 1.993 | 87 | 1 | 50.421 |
| Karangdowo | 8.701 | 4.985 | 10.844 | 7.830 | 11.611 | 284 | 943 | 1.801 | 85 | 5 | 47.089 |
| Juwiring | 9.608 | 6.586 | 13.752 | 11.087 | 15.631 | 367 | 1.006 | 2.227 | 73 | 2 | 60.339 |
| Wonosari | 10.886 | 6.867 | 12.695 | 11.817 | 16.508 | 316 | 1.228 | 2.462 | 117 | 4 | 62.900 |
| Delanggu | 6.645 | 4.253 | 6.748 | 6.637 | 13.922 | 307 | 1.206 | 2.413 | 130 | 6 | 42.267 |
| Polanharjo | 7.374 | 4.255 | 6.903 | 6.372 | 12.629 | 354 | 990 | 2.152 | 116 | 1 | 41.146 |
| Karanganom | 7.743 | 4.783 | 9.128 | 7.440 | 13.548 | 344 | 962 | 2.205 | 112 | 5 | 46.270 |
| Tulung | 9.503 | 6.110 | 12.242 | 8.879 | 13.876 | 366 | 764 | 1.820 | 71 | 3 | 53.634 |
| Jatinom | 11.525 | 6.546 | 16.294 | 9.723 | 13.246 | 304 | 780 | 1.680 | 69 | 4 | 60.171 |

| Kecamatan | Tidak/ Belum Sekolah | Belum Tamat SD/ Sederajat | Tamat SD/ Sederajat | SLTP/ Sederajat | SLTA/ Sederajat | Diploma I/ II | Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda | Diploma IV/ Strata I | Strata II | Strata III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemalang | 8.857 | 4.048 | 13.738 | 6.529 | 5.276 | 87 | 232 | 513 | 16 | 3 | 39.299 |
| Ngawen | 7.438 | 4.588 | 8.335 | 7.175 | 14.278 | 381 | 952 | 2.561 | 142 | 10 | 45.860 |
| Kalikotes | 6.400 | 4.210 | 7.906 | 5.800 | 10.385 | 223 | 664 | 1.416 | 74 | 5 | 37.083 |
| Klaten Utara | 7.508 | 4.657 | 6.840 | 6.477 | 14.851 | 493 | 1.702 | 4.958 | 517 | 20 | 48.023 |
| Klaten Tengah | 6.131 | 4.148 | 6.495 | 6.087 | 13.243 | 324 | 1.448 | 3.477 | 254 | 13 | 41.620 |
| Klaten Selatan | 6.671 | 4.387 | 6.633 | 6.514 | 14.095 | 332 | 1.549 | 3.445 | 273 | 9 | 43.908 |
| **Jumlah** | **233.902** | **142.516** | **281.278** | **211.993** | **365.119** | **8.130** | **25.506** | **58.959** | **3.232** | **167** | **1.330.802** |

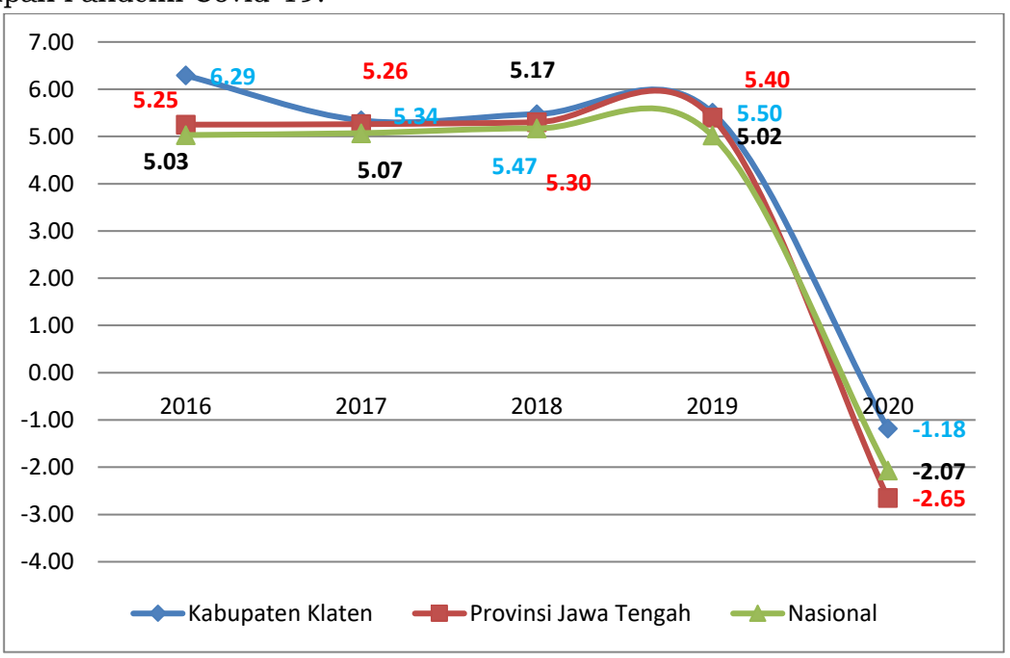
*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021*

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur tingkat kemamkmuran atau kesejahteraan masyarakat di daerah.

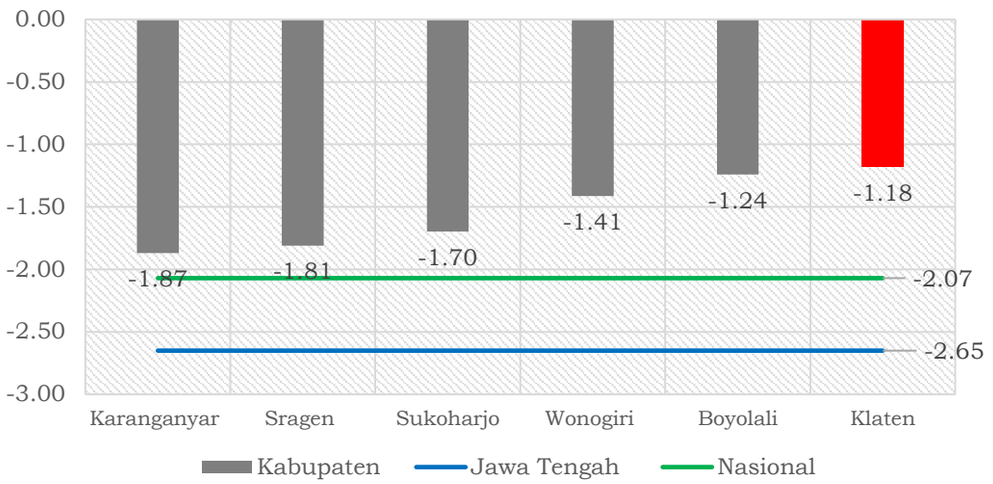
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2019 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 sebesar 5,50%. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten mengalami kontraksi sebesar minus 1,18%. Demikian juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga sama di tahun 2020 menunjukan adanya kontraksi yang cukup dalam akibat dampak Pandemi Covid-19.




*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.18.**
**Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali kabupaten/kota di Jawa Tengah. Perekonomian di Kabupaten Klaten untuk pertama kalinya di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,18%. Apabila dibandingkan dengan level nasional/provinsi/daerah lain, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten mengalami kontraksi lebih kecil atau pertumbuhan ekonominya lebih baik dari kabupaten sekitar, serta masih lebih baik pula dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di tingat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

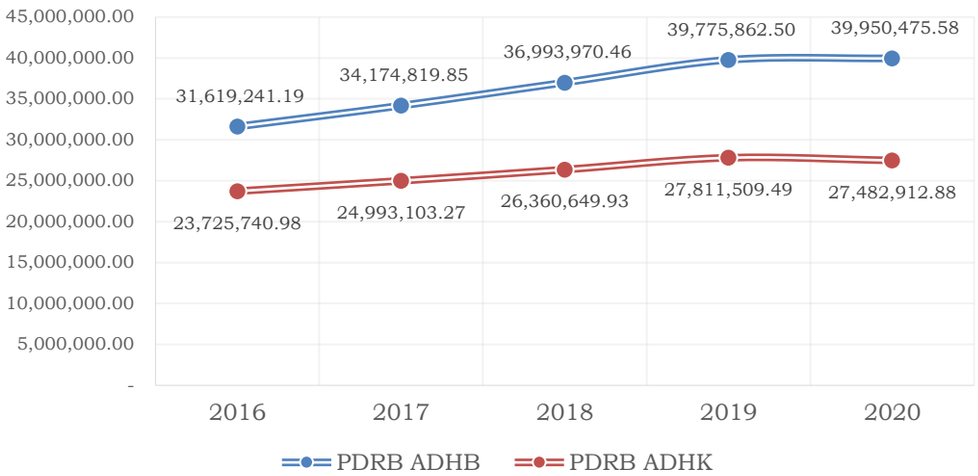



*Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.19.**
**Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2020**

### 2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, maka digunakan indikator perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Pertumbuhan PDRB ADBH maupan ADHK 2010 kabupaten Klaten meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB pada tahun 2016 sebesar Rp31.619.241,19, dan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp39.950.475,58. Untuk PDRB ADHK 2010 tahun 2016 sebesar Rp23.725.740,98, meningkat menjadi sebesar Rp27.482.912,88, yang secara jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.20.**
**Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari Rp31.619.241,19 menjadi Rp39.775.862,50. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 nilai PDRB ADHB sebesar Rp

39.950.475,58. Pada tahun 2020 Sektor Industri Pengolahan masih penyumbang tertinggi sebesar Rp14.936.275,20 ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, dan juga ditunjang dengan menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah. Kemudian untuk Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp6.145.077,58 meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasinya mempunyai peluang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Sementara Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp4.371.379,48, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12**
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Kategori | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.810.348,98 | 3.880.677,98 | 4.085.964,24 | 4.181.908,12 | 4.371.379,48 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1.030.613,84 | 1.112.144,57 | 1.177.376,22 | 1.245.553,58 | 1.253.648,24 |
| C | Industri Pengolahan | 11.381.482,63 | 12.446.837,51 | 13.611.869,50 | 14.727.480,24 | 14.936.275,20 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 44.053,13 | 50.784,96 | 55.741,58 | 58.861,29 | 61.152,53 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13.246,78 | 14.143,63 | 14.964,95 | 16.371,66 | 17.009,23 |
| F | Konstruksi | 1.914.709,83 | 2.094.601,40 | 2.333.361,55 | 2.552.697,54 | 2.520.283,15 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5.292.431,30 | 5.631.766,56 | 6.000.014,15 | 6.430.015,48 | 6.145.077,58 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 645.183,06 | 690.596,13 | 729.681,82 | 779.971,91 | 572.539,83 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.091.254,92 | 1.180.067,24 | 1.284.456,54 | 1.404.195,46 | 1.357.399,84 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 948.913,65 | 1.119.938,75 | 1.252.092,63 | 1.419.789,34 | 1.674.713,98 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.081.527,12 | 1.175.828,75 | 1.259.961,03 | 1.321.513,91 | 1.366.776,47 |
| L | Real Estate | 409.338,03 | 444.310,49 | 477.618,78 | 509.514,95 | 510.799,94 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 102.585,38 | 115.088,85 | 126.797,73 | 139.716,72 | 132.489,52 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 792.119,46 | 844.376,28 | 882.410,22 | 908.656,78 | 910.583,18 |
| P | Jasa Pendidikan | 2.160.832,68 | 2.379.643,26 | 2.606.214,15 | 2.881.198,28 | 2.898.739,98 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 372.019,69 | 409.870,96 | 452.676,88 | 495.228,51 | 550.782,80 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 528.580,71 | 584.142,53 | 642.768,49 | 703.188,73 | 670.824,63 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | | **31.619.241,19** | **34.174.819,85** | **36.993.970,46** | **39.775.862,50** | **39.950.475,58** |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS** | | **31.619.241,19** | **34.174.819,85** | **36.993.970,46** | **39.775.862,50** | **39.950.475,58** |
| **PDRB NON PEMERINTAHAN** | | **30.827.121,73** | **33.330.443,57** | **36.111.560,24** | **38.867.205,72** | **39.039.892,40** |

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

Demikian juga dengan nilai PDRB ADHK Kabupaten Klaten pada periode yang sama dari 2016-2019 meningkat dari Rp23.725.740,98 menjadi Rp27.811.509,49. Sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp27.482.912,88.

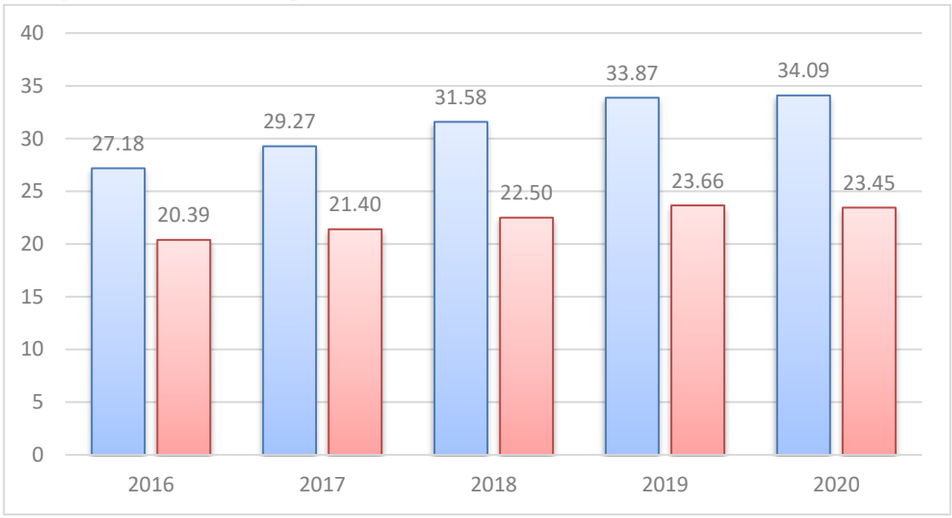
**Tabel 2.13**
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Kategori | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.814.072,15 | 2.845.097,06 | 2.908.070,61 | 2.925.616,92 | 2.987.750,18 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 635.553,28 | 664.166,20 | 685.313,55 | 706.900,93 | 705.045,28 |
| C | Industri Pengolahan | 8.004.239,75 | 8.504.714,04 | 9.013.718,21 | 9.601.710,72 | 9.485.050,46 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 41.588,12 | 44.249,82 | 47.094,12 | 49.644,40 | 51.883,91 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 12.047,34 | 12.826,81 | 13.532,60 | 14.308,02 | 14.735,75 |
| F | Konstruksi | 1.435.985,49 | 1.531.575,76 | 1.635.233,26 | 1.745.775,03 | 1.711.576,48 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4.362.061,18 | 4.531.078,43 | 4.719.954,10 | 4.923.412,16 | 4.687.427,19 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 566.772,32 | 597.101,45 | 625.692,51 | 656.720,86 | 468.118,98 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 883.680,17 | 944.707,06 | 1.018.074,62 | 1.098.344,48 | 1.043.075,16 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 908.551,37 | 1.026.807,26 | 1.147.054,83 | 1.282.866,12 | 1.511.722,42 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 821.907,83 | 857.588,05 | 887.591,04 | 915.313,03 | 947.598,17 |
| L | Real Estate | 361.069,45 | 382.324,67 | 401.354,47 | 420.057,59 | 419.048,02 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 77.484,45 | 83.734,52 | 90.076,27 | 96.931,07 | 90.106,90 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 591.863,52 | 610.862,34 | 631.265,14 | 641.455,60 | 633.375,54 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.520.064,74 | 1.607.474,21 | 1.720.401,03 | 1.842.721,54 | 1.839.363,29 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 260.226,42 | 282.328,51 | 307.894,68 | 336.313,36 | 364.377,77 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 428.573,40 | 466.467,08 | 508.328,89 | 553.417,66 | 522.657,38 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | | **23.725.740,98** | **24.993.103,27** | **26.360.649,93** | **27.811.509,49** | **27.482.912,88** |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS** | | **23.725.740,98** | **24.993.103,27** | **26.360.649,93** | **27.811.509,49** | **27.482.912,88** |
| **PDRB NON PEMERINTAHAN** | | **23.133.877,46** | **24.382.240,93** | **25.729.384,79** | **27.170.053,89** | **26.849.537,34** |

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

### 2.2.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Klaten rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Perkembangan PDRB perkapita di Klaten Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB perkapita Kabupaten Klaten sebesar 27,18 juta rupiah, naik di tahun 2020 menjadi 34,09 juta rupiah. Berikut perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

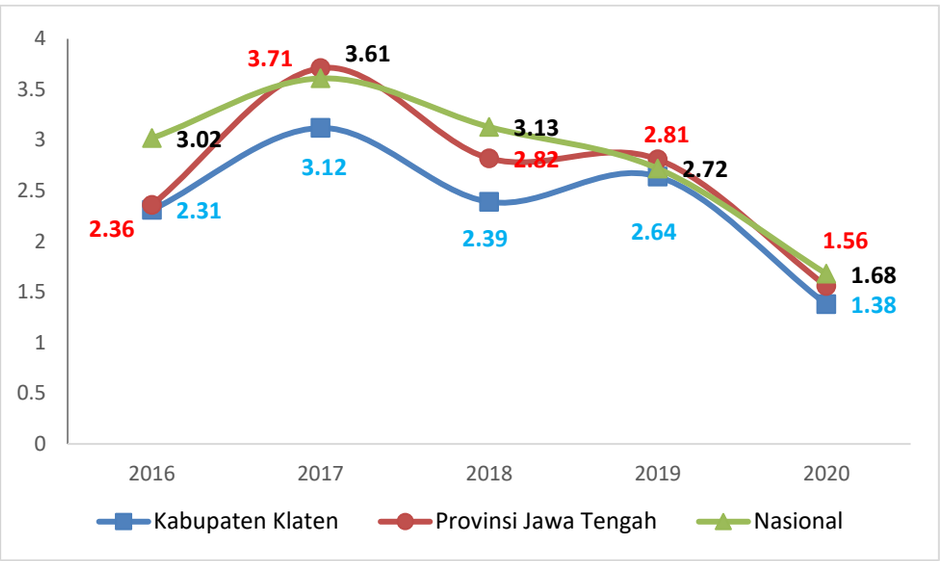



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.21.**
**PDRB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

### 2.2.4. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif cukup baik dan terkendali di angka rata-rata 2±1%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Klaten lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 2,31% turun di tahun 2020 menjadi sebesar 1,38%. Sedangkan pada tahun 2017, tingkat inflasi naik menjadi sebesar 3,12%. Kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi pada tahun 2017 yaitu kelompok transpotasi, komunikasi dan jasa keuangan (sebesar 7,59%) selanjutnya diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (sebesar 4,74%), dan kelompok kesehatan (sebesar 3,08%). Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi terendah adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,03%. (*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*).




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.22.**
**Perkembangan Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

### 2.2.5. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut:

1. **Komoditi Makanan**

   Pada September 2020, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK hampir sama di perkotaan maupun di perdesaan. Beras memberi sumbangan sebesar 16,59% di perkotaan dan 18,61% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (13,95% di perkotaan dan 10,66% di perdesaan). Komoditi lainnya antara lain telur ayam ras (4,04% di perkotaan dan 4,34% di perdesaan), daging ayam ras (3,74% di perkotaan dan 3,65% di perdesaan), gula pasir (3,00% di perkotaan dan 2,90% di perdesaan).

**Tabel 2.14**
**Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020**

| Komoditi | Kota (%) | Komoditi | Desa (%) |
|---|---|---|---|
| **Makanan** | **73,56** | **Makanan** | **75,44** |
| **Beras** | **16,59** | **Beras** | **18,61** |
| **Rokok kretek filter** | **13,95** | **Rokok kretek filter** | **10,66** |
| **Telur ayam ras** | **4,04** | **Telur ayam ras** | **4,34** |
| Daging ayam ras | 3,74 | Daging ayam ras | 3,65 |
| Gula pasir | 3,00 | Gula pasir | 2,90 |
| Tempe | 2,33 | Tempe | 2,81 |
| Kue basah | 2,25 | Cabe rawit | 2,72 |
| Mie instan | 2,18 | Kue basah | 2,39 |
| Cabe rawit | 2,17 | Mie instan | 2,37 |
| Tahu | 2,96 | Tahu | 2,26 |
| Komoditi makanan lainnya | 21,35 | Komoditi makanan lainnya | 22,74 |

*Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021*

**2. Komoditi Bukan Makanan**

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan, meliputi: Perumahan, yang memberikan sumbangan sebesar 6,85% di perkotaan maupun pedesaan. Bensin, memberikan sumbangan 4,03 di perkotaan dan 3,25 di pedesaan. Listrik, 2,61% di perkotaan dan 1,65% di perdesaan, serta Komoditi Non Makanan Lainnya, 9,69 % di perkotaan dan 10,23 di pedesaan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pada Tabel dibawah ini.

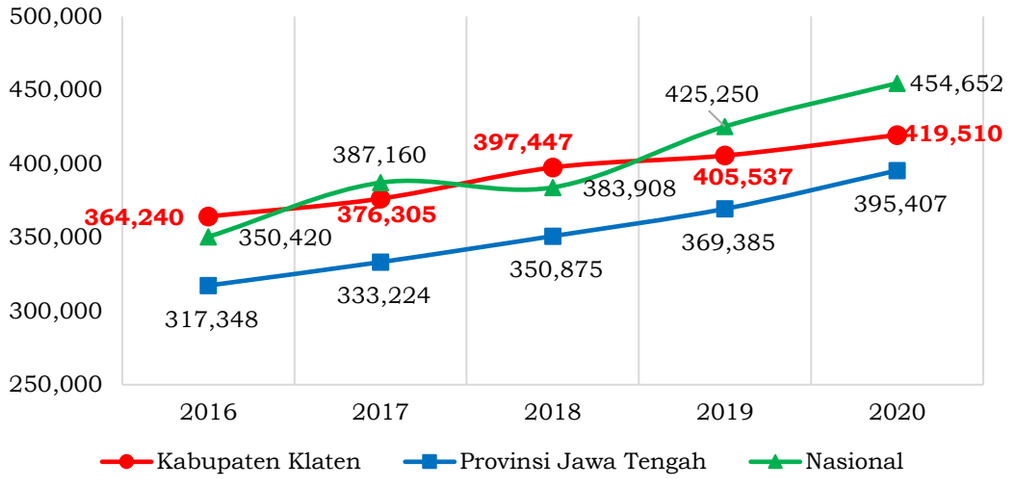
**Tabel 2.15**
**Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020**

| Komoditi | Kota (%) | Komoditi | Desa (%) |
|---|---|---|---|
| **Bukan Makanan** | **26,44** | **Bukan Makanan** | **24,56** |
| **Perumahan** | **6,85** | **Perumahan** | **6,85** |
| **Bensin** | **4,03** | **Bensin** | **3,25** |
| **Listrik** | **2,61** | **Listrik** | **1,65** |
| Pendidikan | 1,80 | Pendidikan | 1,35 |
| Perlengkapan mandi | 1,46 | Kesehatan | 1,23 |
| Komoditi non makanan lainnya | 9,69 | Komoditi non makanan lainnya | 10,23 |

*Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021*

Garis Kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan. Garis kemiskinan naik dari Rp364.240,00/kapita/bulan di tahun 2016 menjadi Rp419.510,00/kapita/bulan di tahun 2020. Kenaikan garis kemiskinan setiap tahunnya berkisar antara 2 sampai 6 persen. Kenaikan tertinggi sebesar 5,62% yang terjadi pada tahun 2018. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,04%. Kondisi tersebut sama halnya

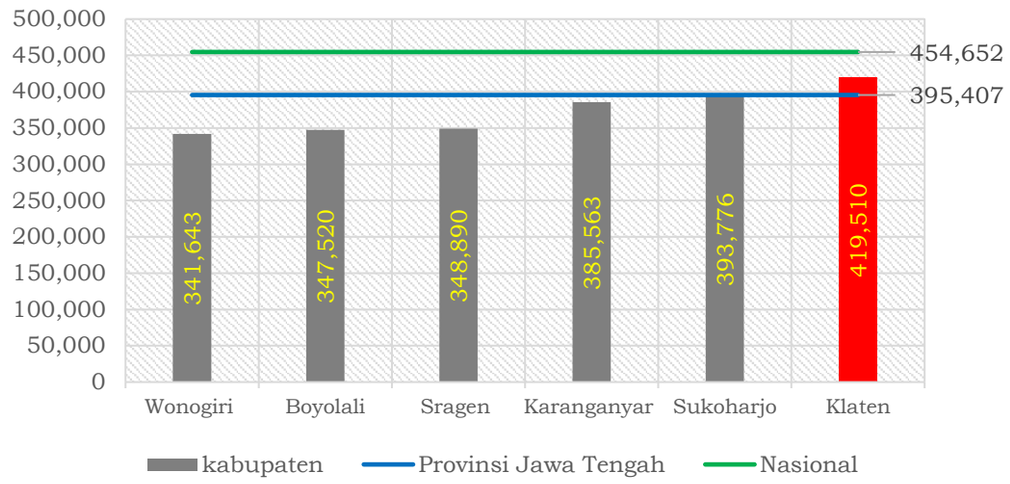
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.23.**
**Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

Dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi sebesar Rp395.407,00/kapita/bulan dan Nasional sebesar Rp454.652,00/kapita/bulan pada tahun 2020, Kabupaten Klaten dengan capaian sebesar Rp419.510,00/kapita/bulan berada di atas Provinsi dan di bawah Nasional serta menempati urutan tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.



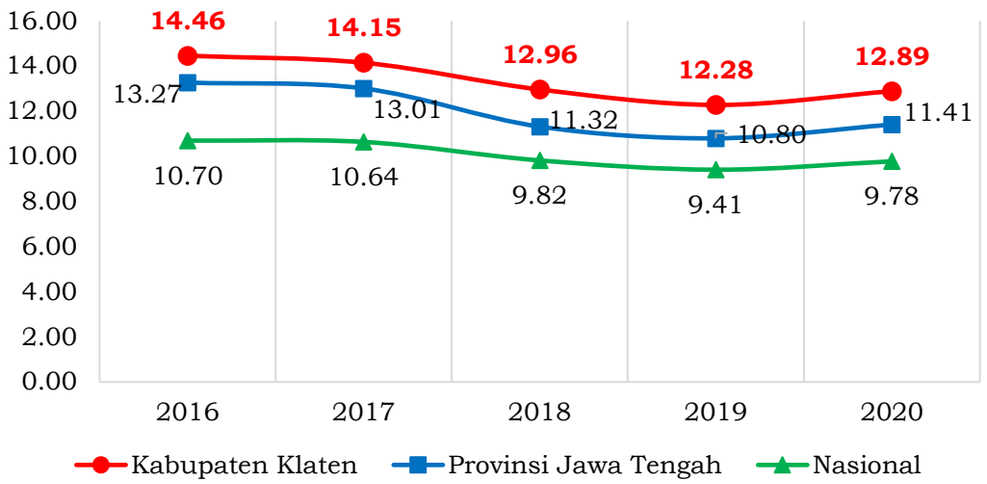

*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.24.**
**Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

### 2.2.6. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten periode 2016-2020 terus mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada periode 2016-2020 persentase penduduk miskin cenderung menurun dari 14,46% di tahun 2016 menjadi 12,28% di tahun 2019. Namun pada tahun 2020

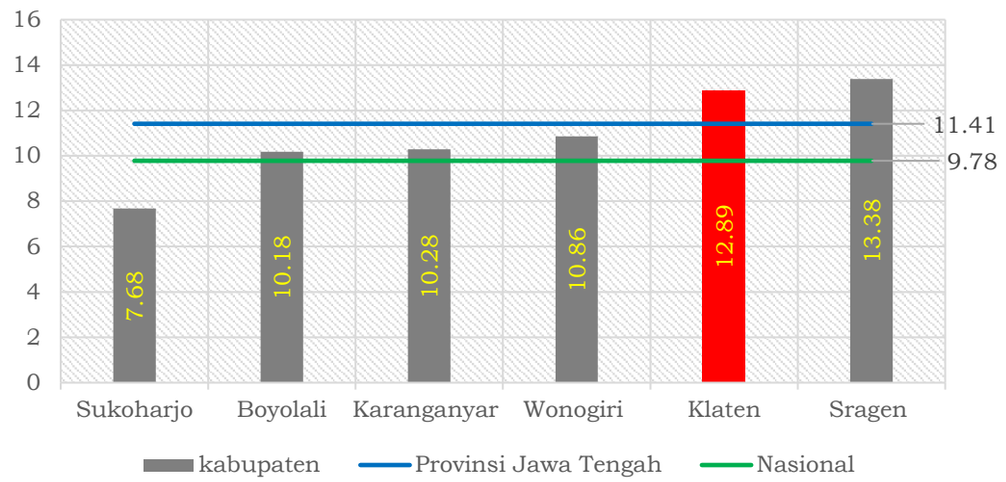
meningkat menjadi 12,89%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin.




*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.25.**
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 12,89% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41% dan Nasional sebesar 9,78%, serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sragen sebesar 12,89% dibandingkan kabupaten sekitarnya, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

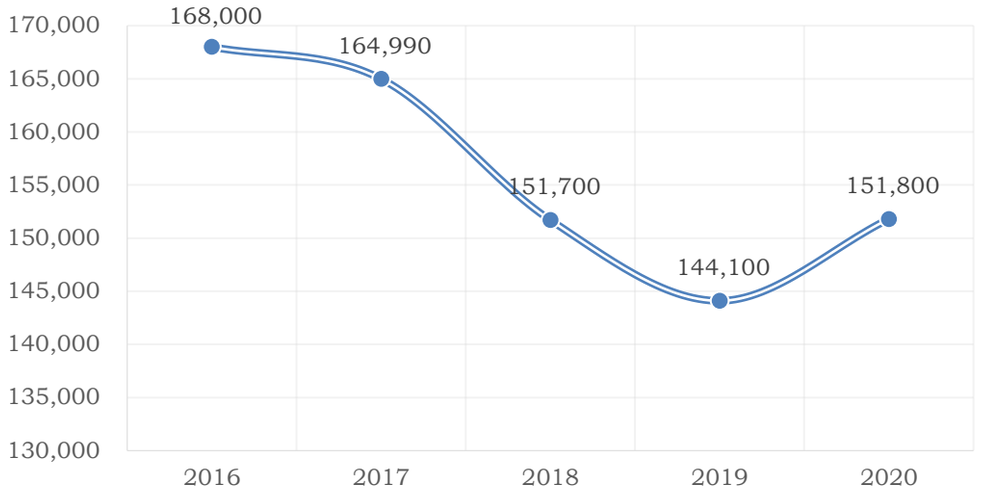



*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.26.**
**Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020**

### 2.2.7. Jumlah Penduduk Miskin

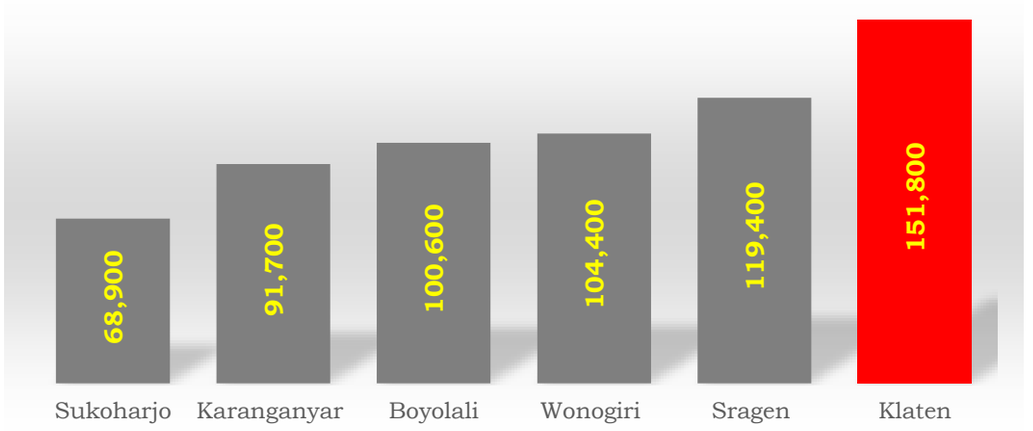
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten kurun waktu 2016-2019 cenderung menurun dari 168.000 jiwa menjadi 144.100 jiwa. Namun pada periode tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 151.800 jiwa.




*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.27.**
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

Dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2020 mencapai sebesar 151.800 jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Sragen. Grafik selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

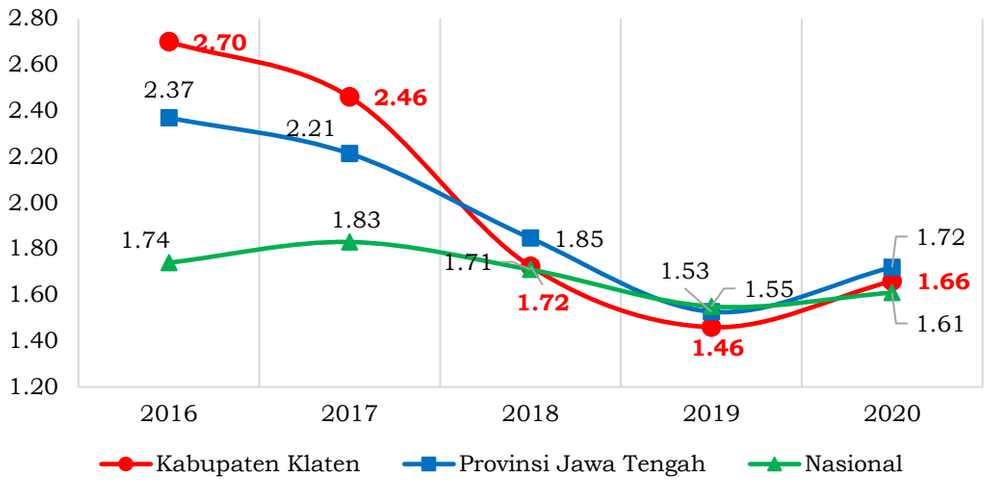



*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.28.**
**Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020**

### 2.2.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

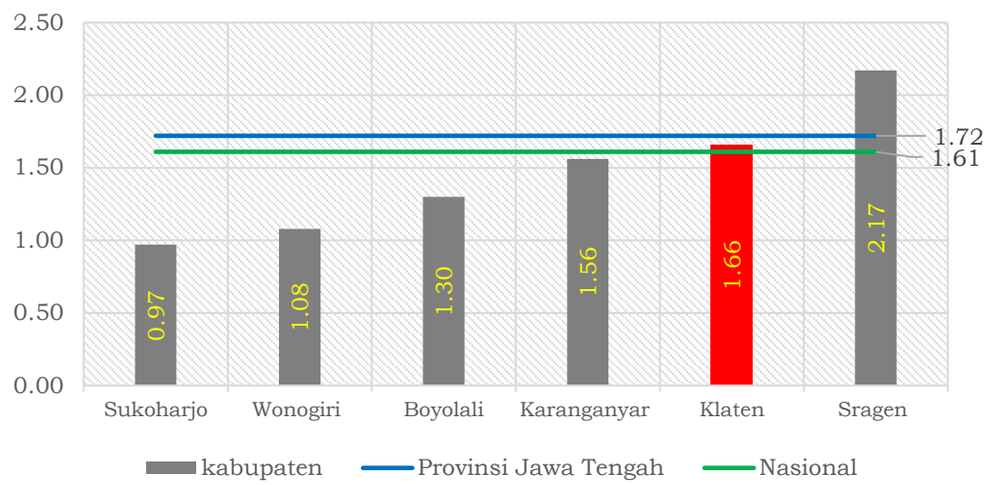
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2016-2019 mengalami penurunan dari sebesar 2,70 menjadi 1,46, namun meningkat di tahun 2020 menjadi 1,66. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.29.**
**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 1,66, lebih rendah dibandingkan dengan nilai provinsi dan di atas rata-rata nasional. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, kenaikan P1 terbesar kedua setelah Kabupaten Sragen, di mana secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

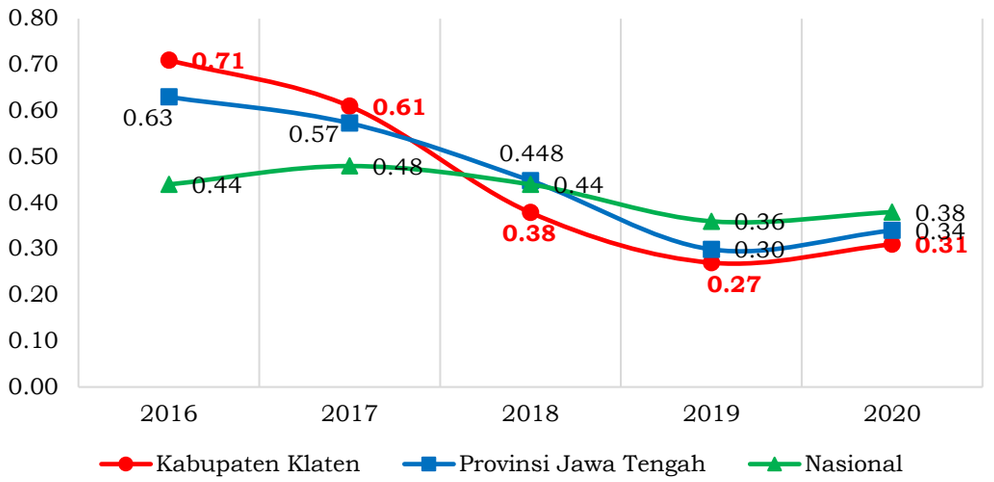



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.30.**
**Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten Tahun 2020**

### 2.2.9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

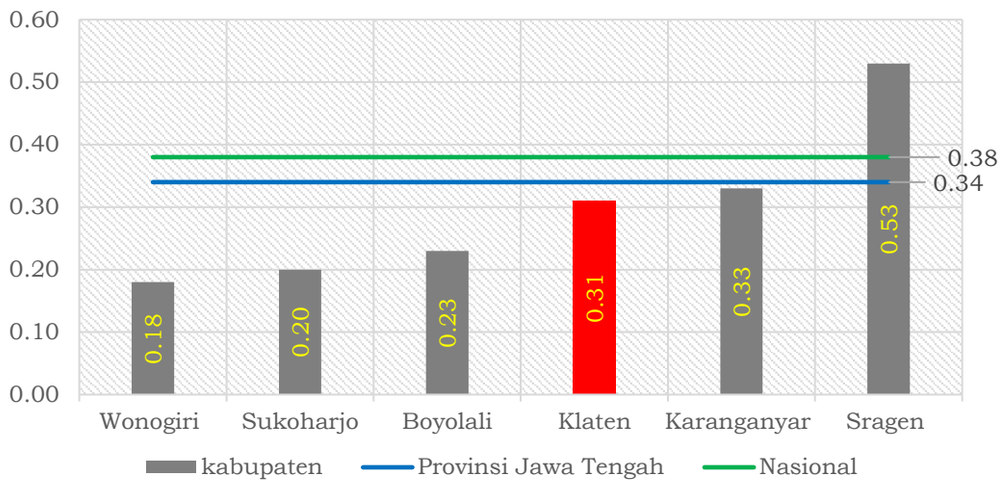
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2016-2019, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten menurun, yaitu turun dari 0,71 menjadi 0,27, namun di tahun 2020 naik menjadi 0,31. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.




*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.31.**
**Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020**

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 0,13 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,34 dan Nasional sebesar 0,38. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, kenaikan Kabupaten Klaten merupakan terbesar ketika setelah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Grafik selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

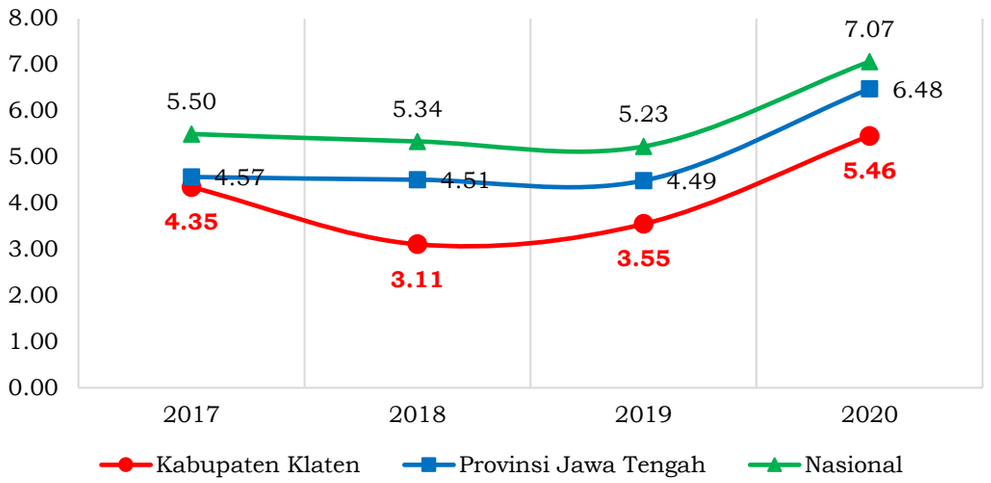



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.32.**
**Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Tahun 2020**

### 2.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

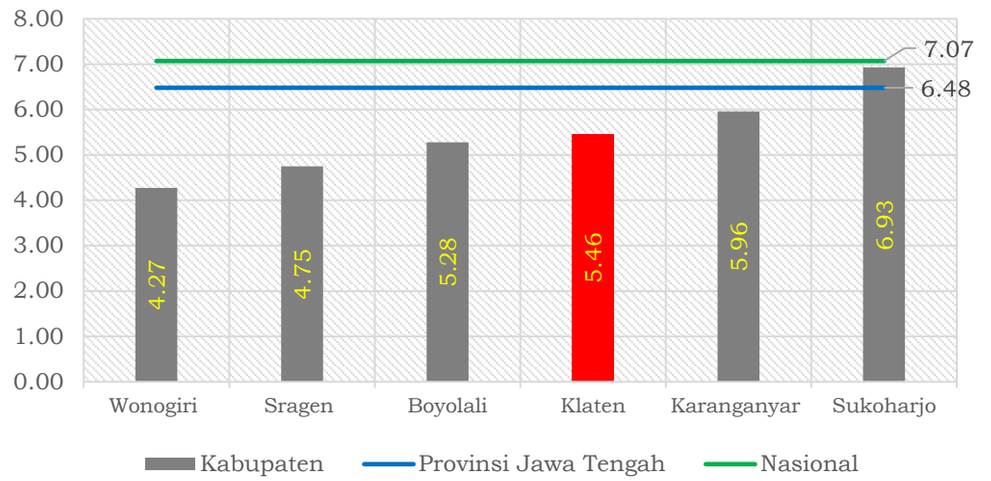
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2017-2019 turun dari 4,35% menjadi 3,55% di tahun 2019. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,46%. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode tahun 2020 merupakan dampak terjadinya Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.33.**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020**

TPT Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 5,46% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa tengah (6,48%) dan Nasional (7,07%) serta dibandingkan dengan Kabupaten sekitar menempati urutan ke-3 tertinggi setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Grafik selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

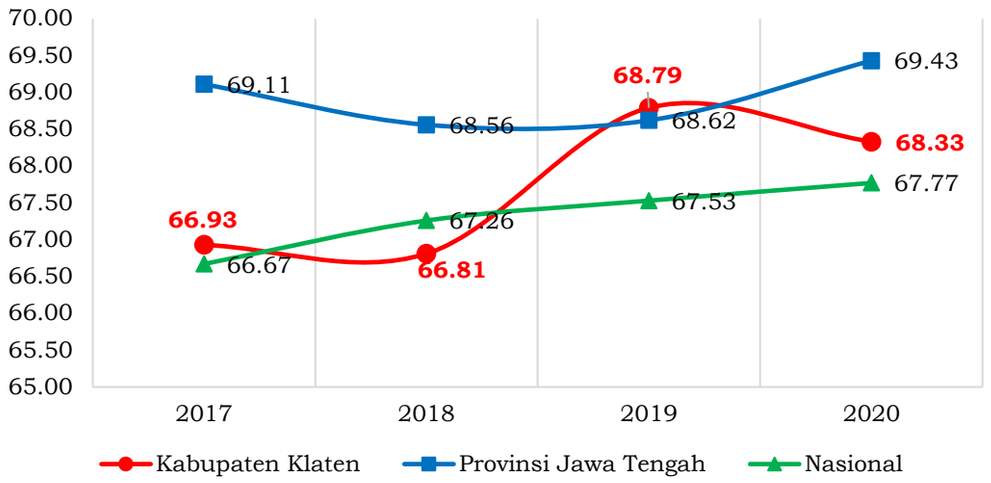



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.34.**
**Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klaten Tahun 2020**

### 2.2.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

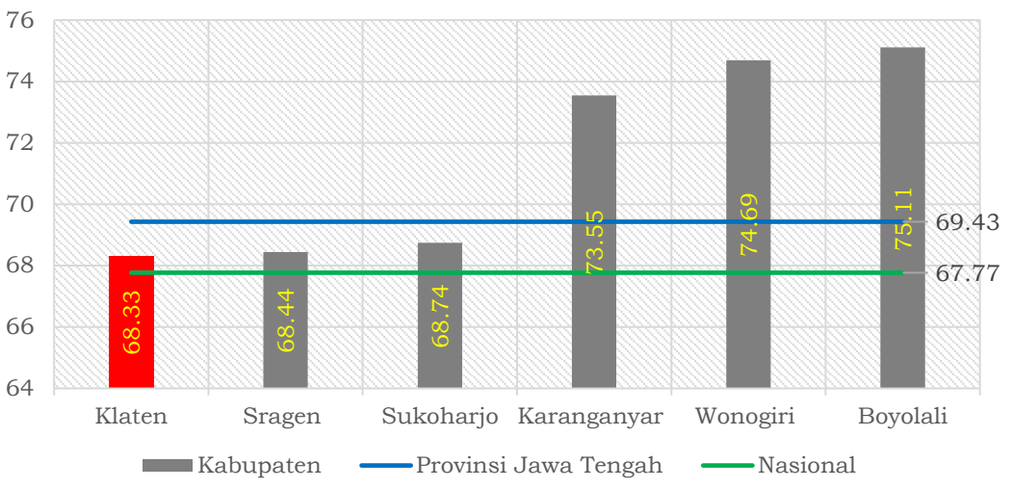
Perkembangan TPAK Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 cenderung fluktuatif dari 66,93% di tahun 2017 menjadi 66,81% di tahun 2018 dan mengalami peningkatan 68,79% di tahun 2019, selanjutnya turun di tahun 2020 sebesar 68,33%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan di periode tahun 2020. Grafik selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.35.**
**Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2020**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 68,33% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional, serta dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya menempati urutan terendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



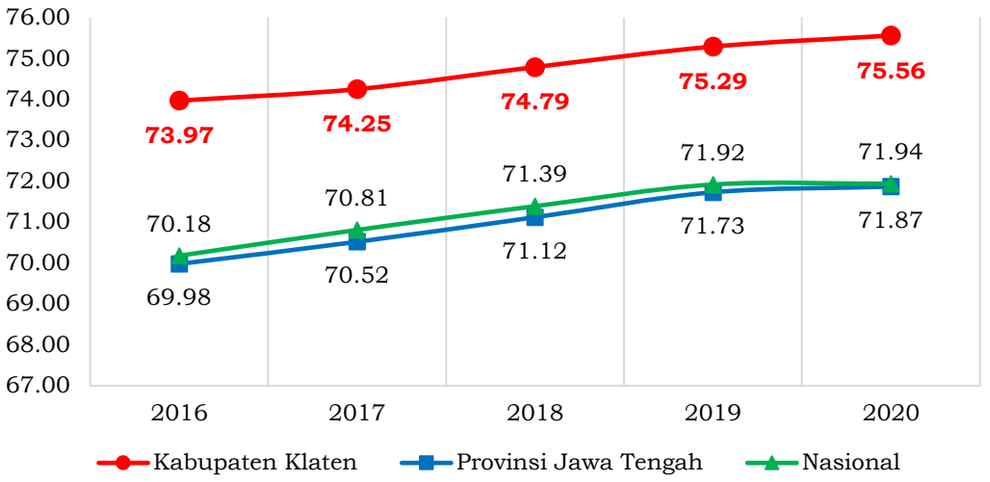

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.36.**
**Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten Tahun 2020**

### 2.2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*; (2) Pengetahuan *(*knowledge*)*; (3) Standar hidup layak *(decent standard of living)*. Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

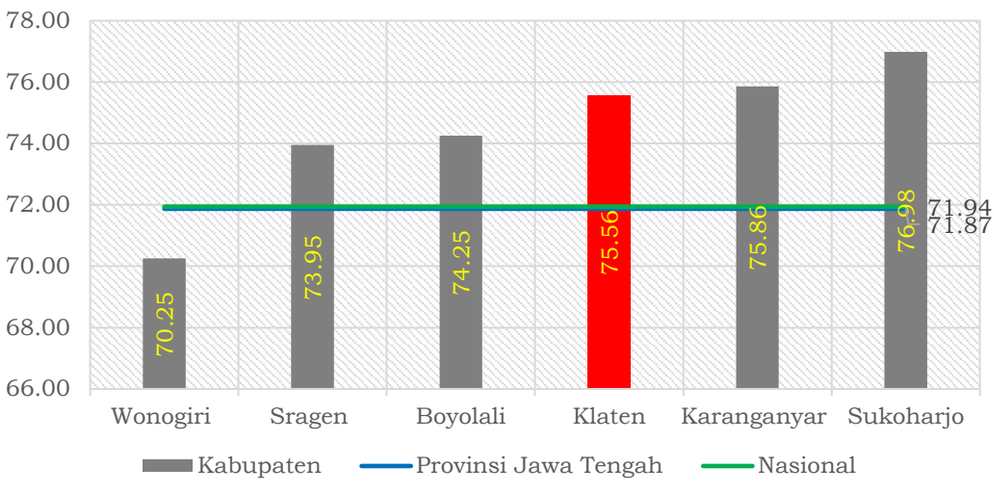
Perkembangan IPM Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 73,97 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 75,56. Kondisi IPM Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Jawa tengah dan IPM Nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.37.**
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Posisi relatif IPM Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 75,56 berada di atas Provinsi (71,87) dan Nasional (71,94) serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

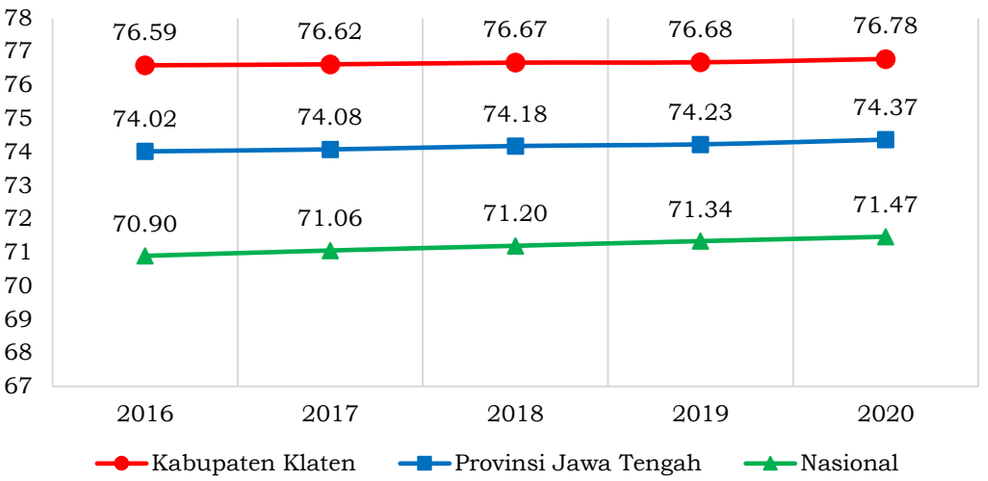
**Gambar 2.38.**
**Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
**Tahun 2020**

Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Klaten terdiri dari Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:

**1. Usia Harapan Hidup (UHH)**

Indikator Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

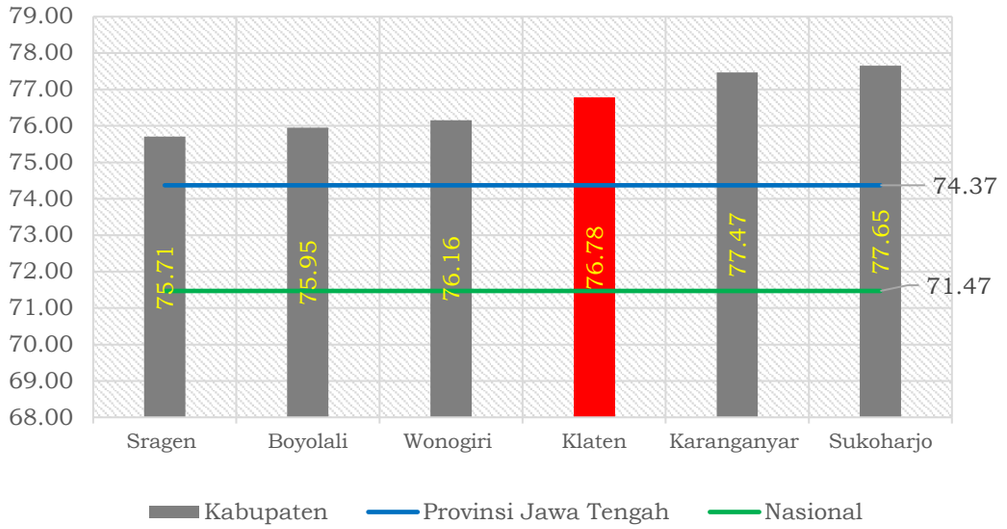
Perkembangan UHH Kabupten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 76,59 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 76,78 tahun. Kondisi UHH Kabupten Klaten sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah dan UHH Nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.39.**
**Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)**

Posisi relatif UHH Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 76,78 tahun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,37 tahun) dan Nasional (71,47 tahun), serta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



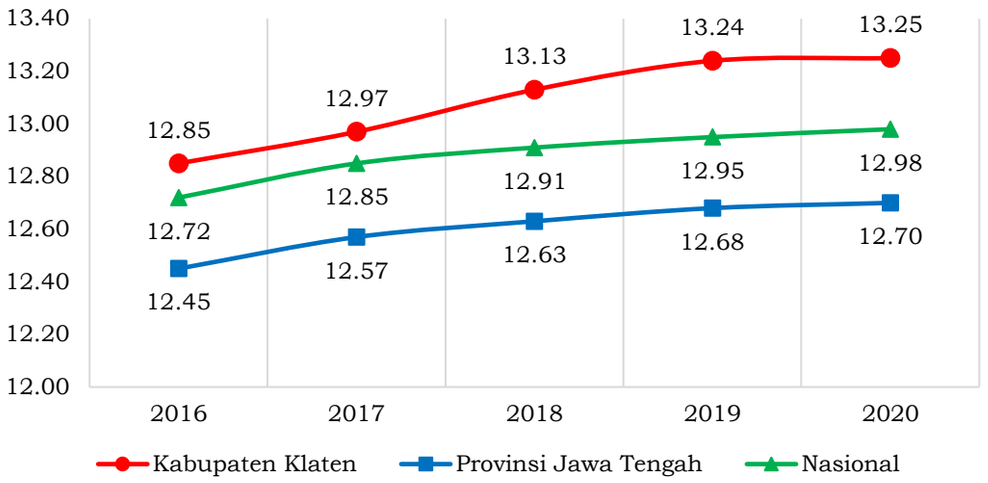

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.40.**
**Posisi Relatif Usia Harapan Hidup**
**Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)**

**2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian *(stock)* dan penambahan *(flow)* sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

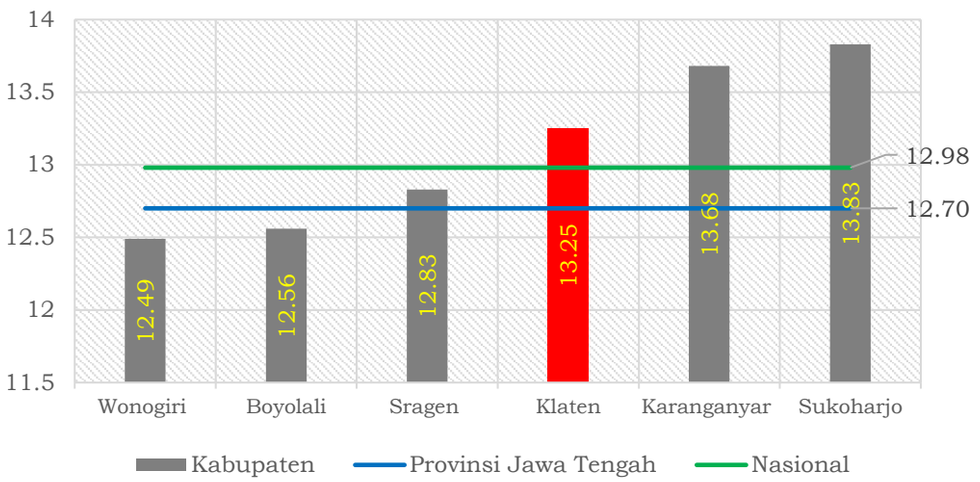
Perkembangan HLS Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dari 12,85 tahun menjadi 13,25 tahun di tahun 2020. Kondisi sama halnya dengan perkembangan HLS Provinsi Jawa Tengah dan HLS Nasional yang mengalami perubahan kinerja positif setiap tahunnya, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.41.**
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

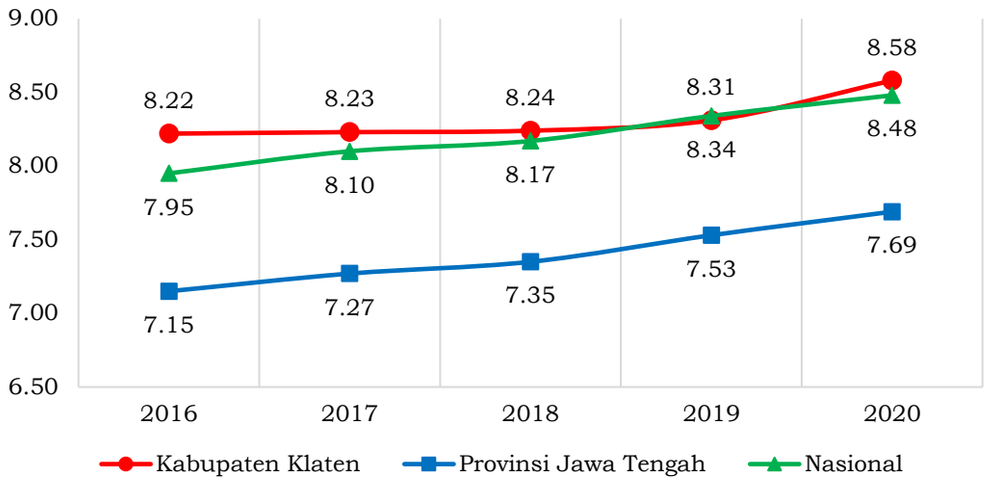
Posisi relatif HLS Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 13,25 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah (12,70 tahun) dan Nasional (12,98 tahun) serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.42.**
**Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)**

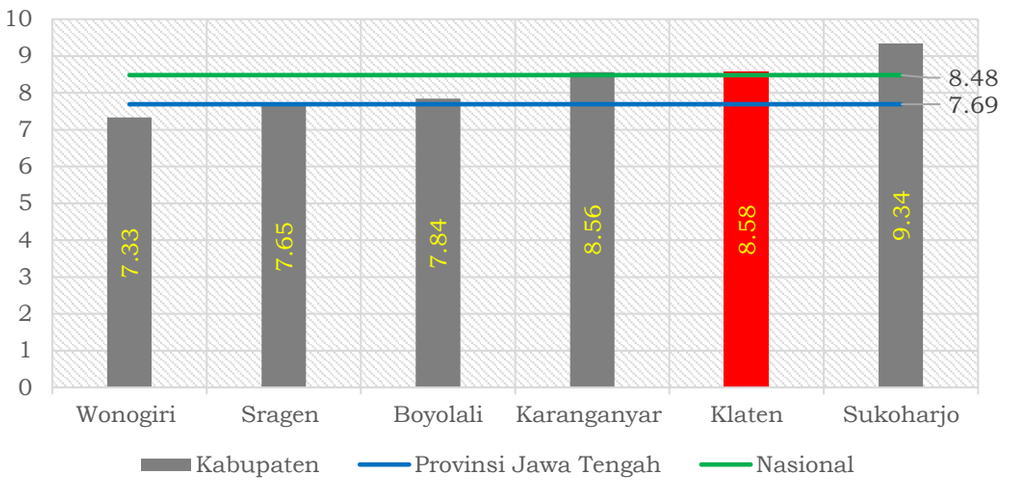
Perkembangan RLS Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, dari sebesar 8,22 tahun menjadi sebesar 8,58 tahun ditahun 2020. Kondisi RLS Kabupaten Klaten relevan dengan perkembangan RLS Provinsi Jawa Tengah dan RLS Nasional, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.43.**
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)**

Posisi relatif RLS Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 8,58 tahun berada di atas Provinsi Jawa tengah (7,69 tahun) dan Nasional (8,48 tahun) serta berada menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sukoharjo, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

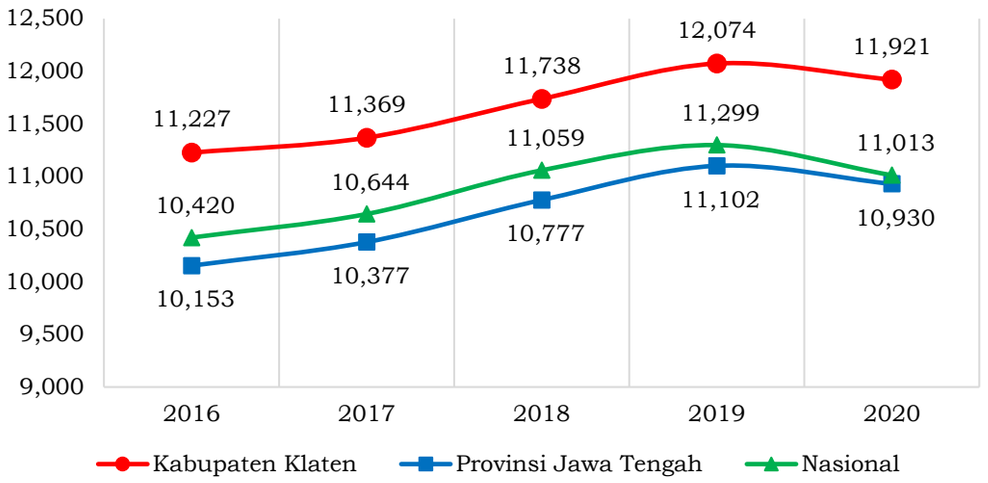



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.44.**
**Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)**

### 3. Pengeluaran Per Kapita

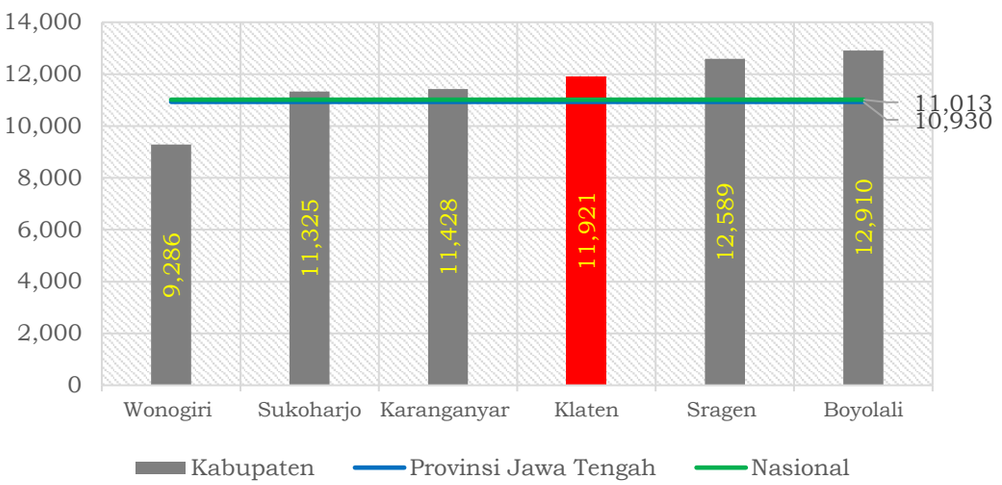
Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp11.227 ribu dan naik menjadi sebesar Rp12.074 ribu di tahun 2019, namun di tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi Rp11.921. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.45.**
**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)**

Posisi relatif pendapatan per kapita Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar Rp11.921 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp10.930) dan Nasional (Rp11.013), serta menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

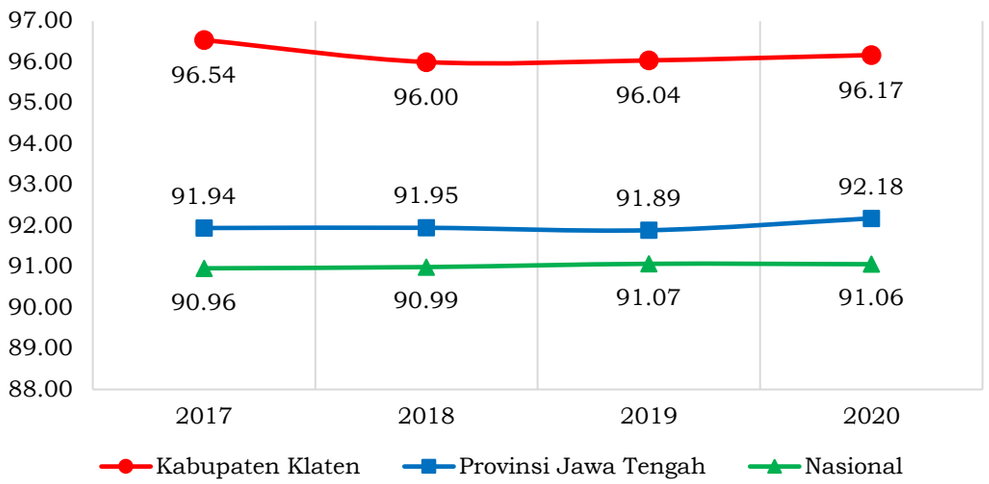
**Gambar 2.46.**
**Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ribu rupiah)**

### 2.2.13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Usia Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

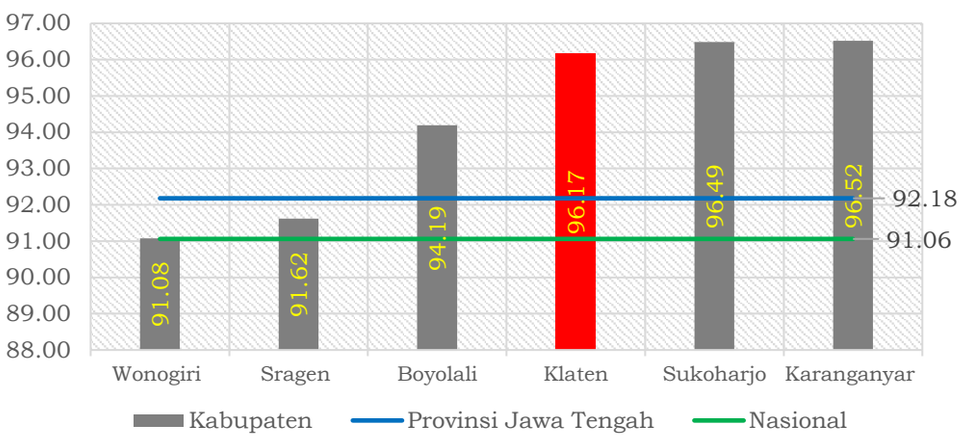
Perkembangan IPG Kabupaten Klaten dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, dari sebesar 96,54 menjadi 96,17 ditahun 2020. Kodisi tersebut sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di periode tahun 2020, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.47.**
**Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020**

Posisi relatif IPG Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 96,17 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan Nasional (91,06) dan menempati posisi tertinggi di urutan ketiga setelah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



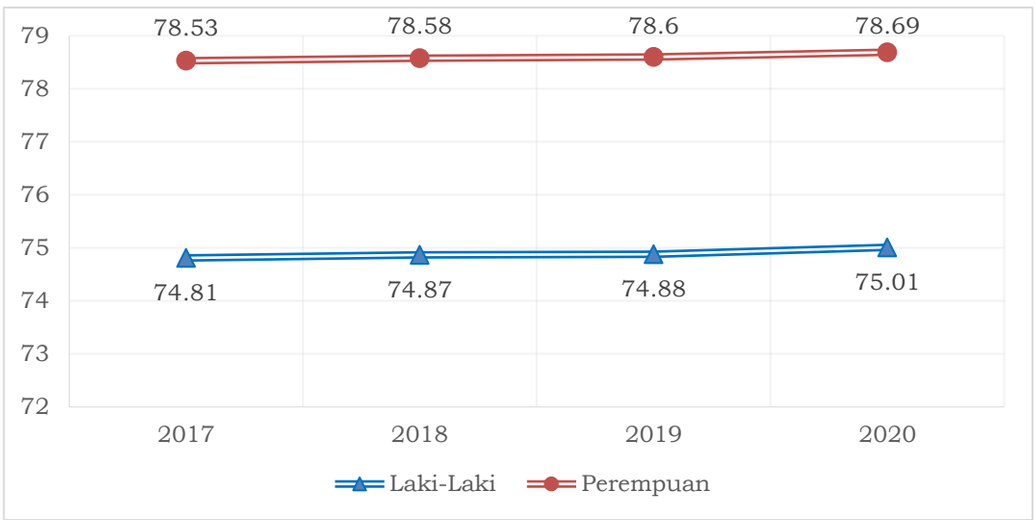

*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.48.**
**Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2020**

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari: Usia Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin, yang secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

**1. Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2017 hingga tahun 2020 Kabupaten Klaten mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan mencapai sebesar 78,69 tahun dan UHH laki-laki sebesar 75,01 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

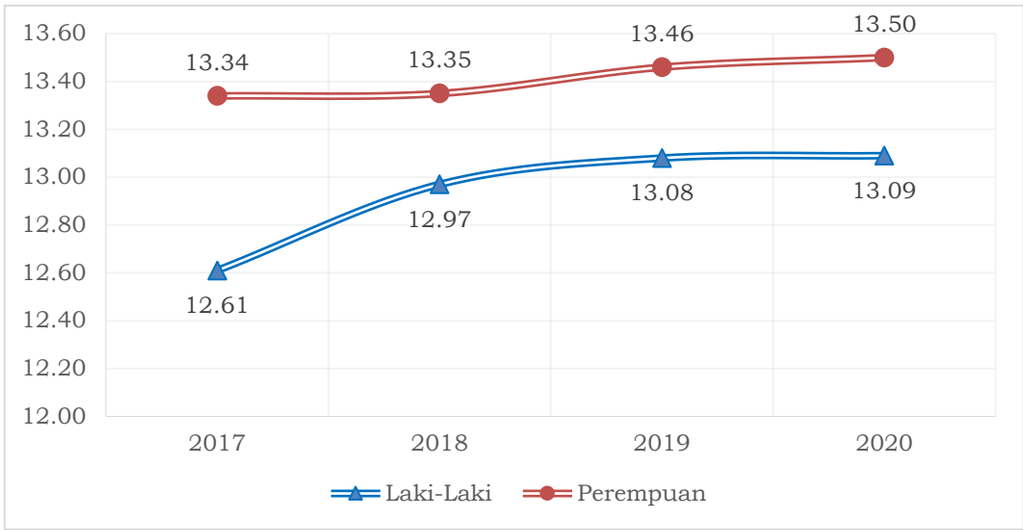



*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.49.**
**Usia Harapan Hidup (UHH) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

**2. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. HLS laki-laki lebih rendah dibandingkan HLS perempuan tiap tahunnya. Di tahun 2020 HLS laki-laki sebesar 13,09 tahun dan untuk HLS Perempuan sebesar 13,50 tahun, yang secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.

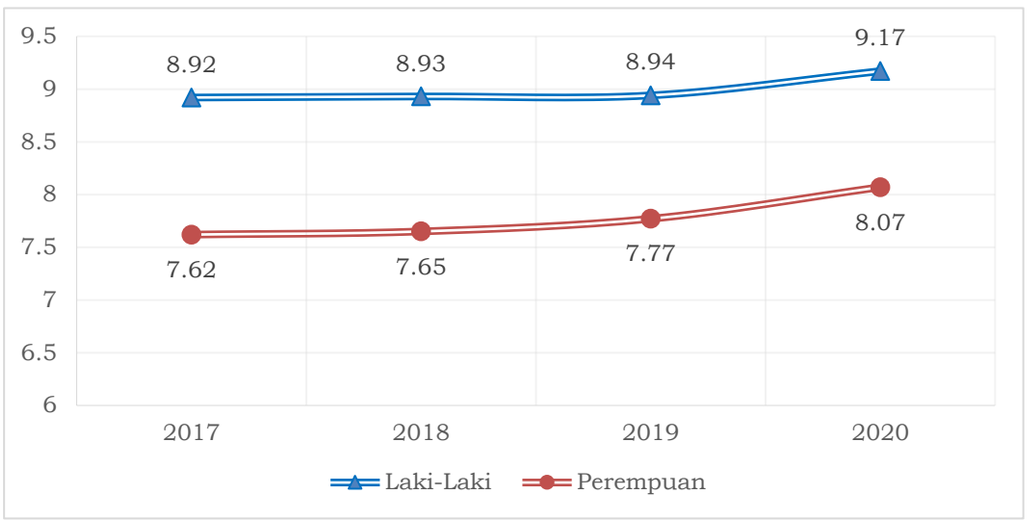



*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.50.**
**Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

**3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata Lama Sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, RLS laki-laki sebesar 9,17 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 8,07 tahun, yang scara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.

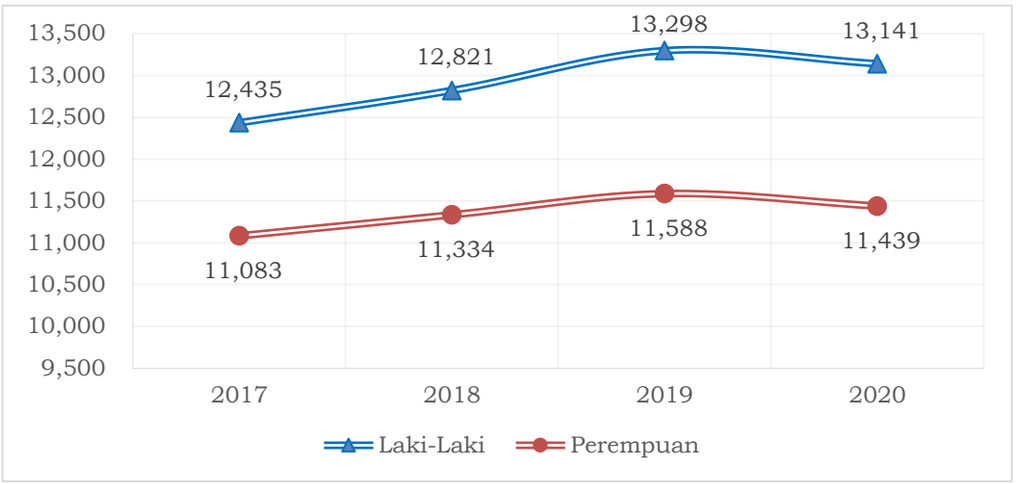



*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.51.**
**Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

**4. Pengeluaran Per kapita**

Pengeluaran per kapita kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp13.141 lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp11.439, yang secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



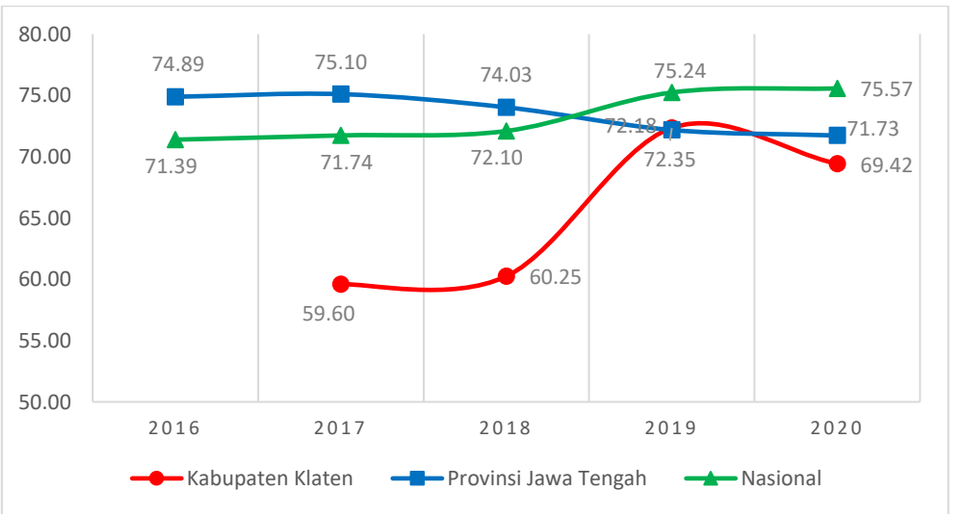

*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.52.**
**Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

### 2.2.14. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

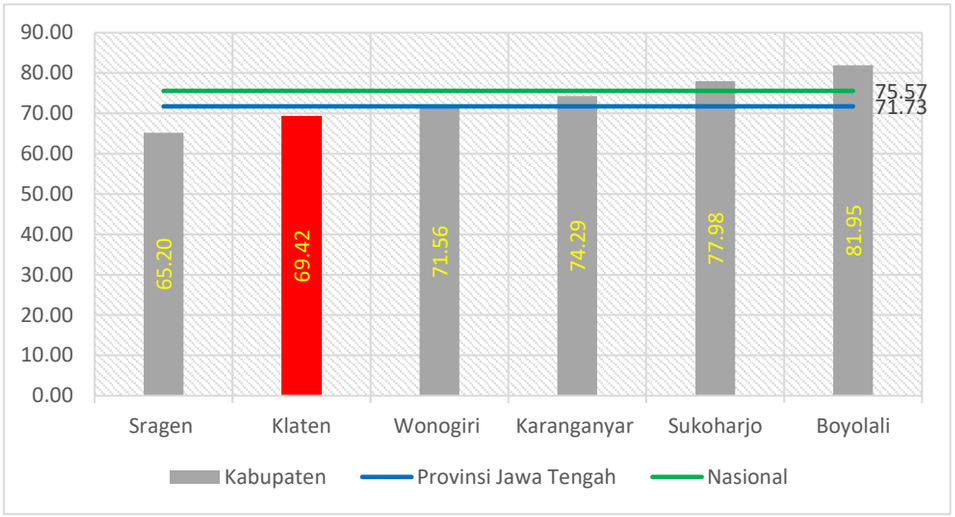
IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Perkembangan IDG pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 59,60 naik menjadi sebesar 72,35 ditahun 2019, tetapi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,93 sehingga menjadi 69,42. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan Provinsi Jawa Tengah yang juga menurun pada tahun 2020, akan tetapi nasional menunjukkan peningkatan di tahun 2020, yang secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.53.**
**Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Capaian IDG Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 69,42 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57; serta menempati posisi terendah kedua apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



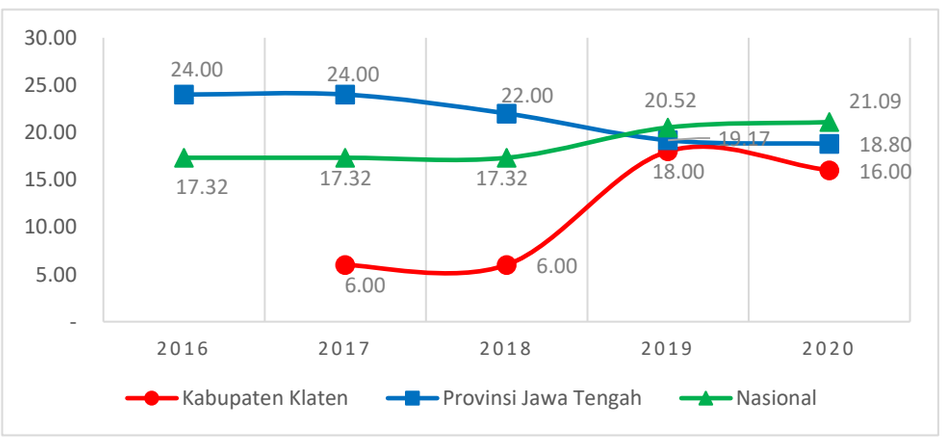

*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.54.**
**Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2020**

Gambaran komponen pembentuk IDG Kabupaten Klaten, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan sebagai berikut.

**1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

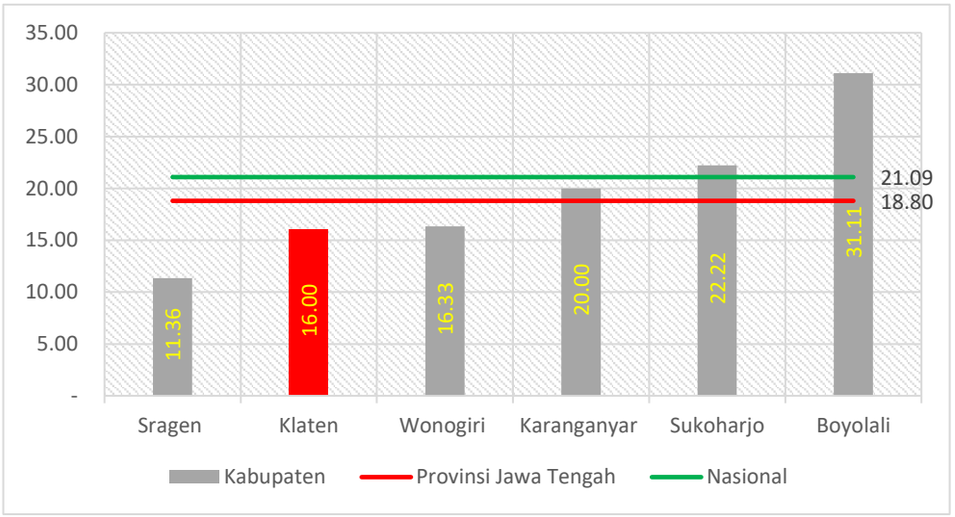
Keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu dari sebesar 6,00% menjadi 18,00% ditahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,00% menjadi 16,00%. Kondisi relevan terhadap perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Jawa Tengah dimana periode tahun 2020 mengalami penurunan, sementara Nasional menunjukkan peningkatan. Grafik selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.55.**
**Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Klaten dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Posisi relatif keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 16,00% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (18,80%) dan rata-rata Nasional (21,09%), serta menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Sragen, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

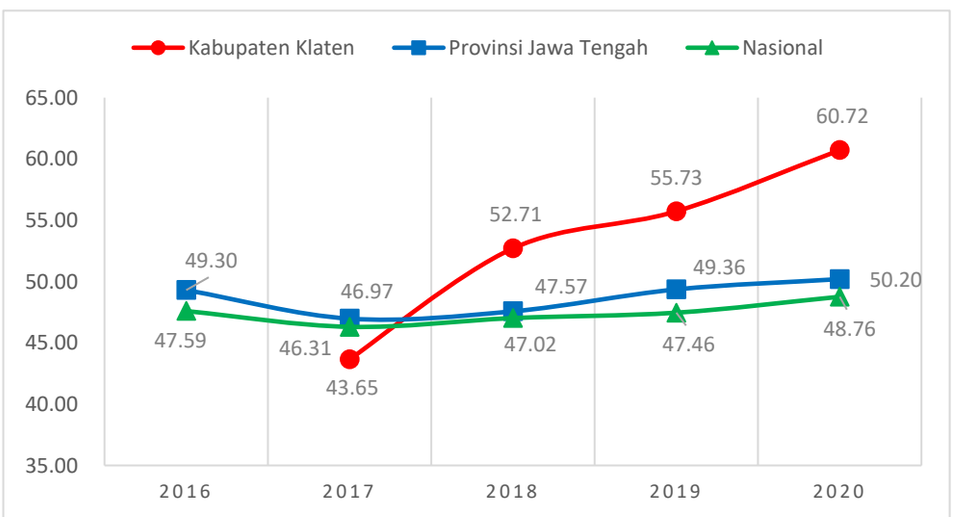



*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.56.**
**Posisi Relatif Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2020**

**2. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi**

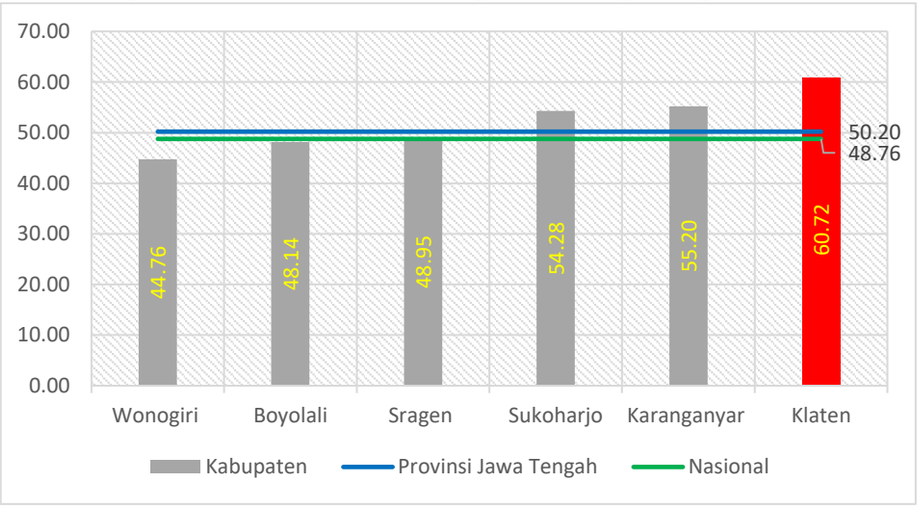
Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Klaten pada tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan, dari sebesar 43,65% menjadi 60,72% di tahun 2020. Kondisi tersebut sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami peningkatan di periode tahun 2020, yang secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.57.**
**Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Kabupaten Klaten Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Posisi relatif perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 60,72% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (50,20%) dan Nasional (48,76%), serta menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya. Grafik secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

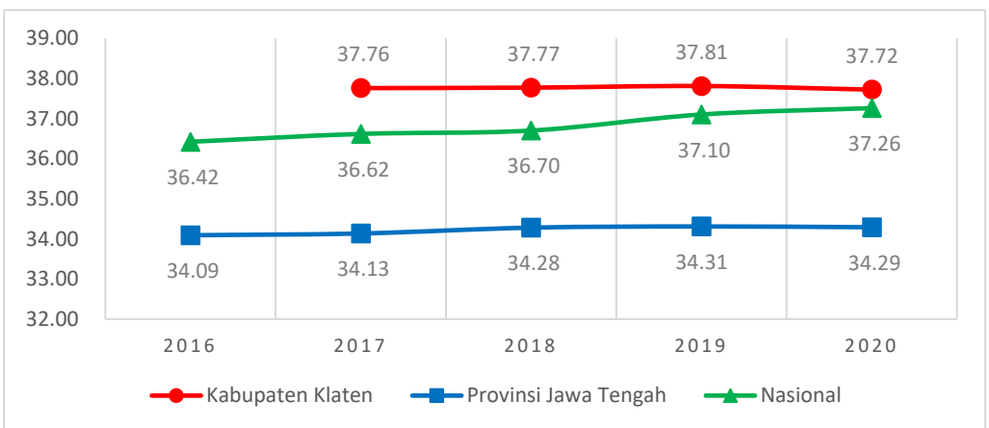



*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.58.**
**Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupten Klaten Tahun 2020**

### 3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Klaten pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan, dari sebesar 37,76% menjadi 37,81% di tahun 2019, tetapi di tahun 2020 menurun menjadi 37,72%. Kondisi tersebut tidak relevan terhadap perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan peningkatan, dan Nasional yang sedikit mengalami penurunan, di mana secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

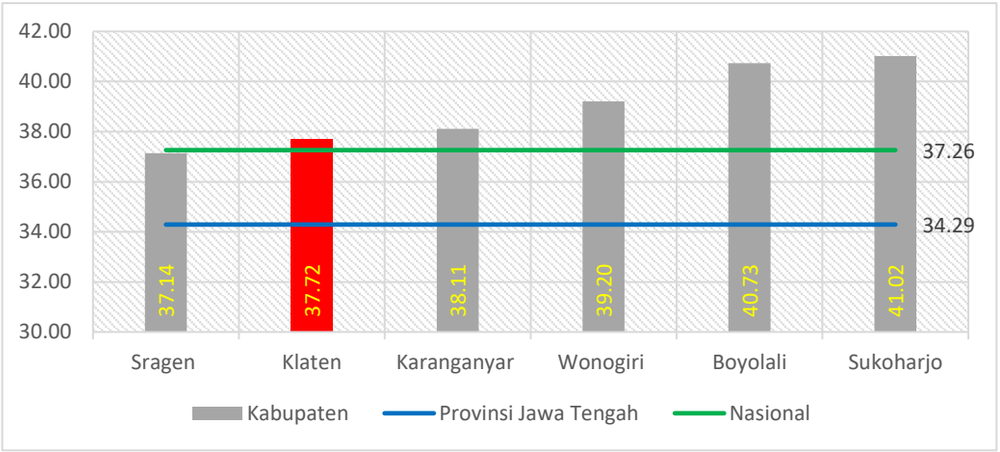



*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.59.**
**Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kab. Klaten dibandingkan dengan Provinsi Jawa tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Posisi relatif sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 37,72% berada di atas rata-rata Provinsi (34,29%) dan Nasional (37,26%), serta menempati posisi terendah

kedua setelah Kabupaten Sragen, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.60.**
**Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupat Klaten Tahun 2020**

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

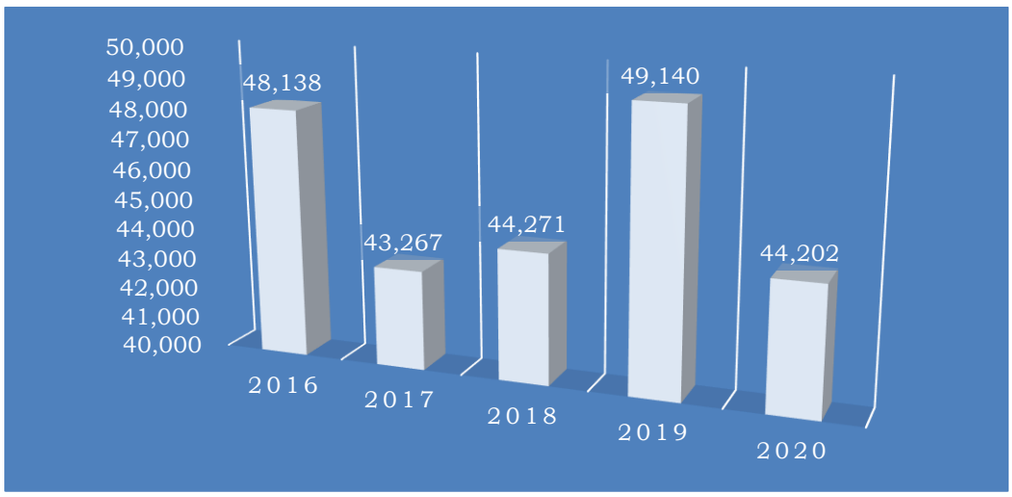
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar. Berikut data jumlah Lembaga, Peserta Didik dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

**Tabel 2.16**
**Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Uraian | Lembaga | Pendidik | Peserta Didik | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | p | |
| **PAUD** | | **1.521** | **3.788** | **22.656** | **21.546** | 44.202 |
| 1 | Satuan PAUD sejenis | 125 | 274 | 1.314 | 1.379 | 2.693 |
| 2 | Taman Penitipan Anak | 30 | 74 | 243 | 219 | 462 |
| 3 | Kelompok Bermain | 428 | 1.055 | 4.119 | 4.068 | 8.187 |
| 4 | RA/ BA | 358 | 888 | 7.667 | 7.180 | 14.847 |
| 5 | TK | 580 | 1.497 | 9.313 | 8.700 | 18.013 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten. 2020*

Perkembangan jumlah peserta didik PAUD selama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Klaten fluktuatif dan menunjukan peningkatan, yaitu jumlah peserta didik PAUD pada tahun 2016 sebanyak 48.138 orang pada tahun 2020, menurun menjadi 44.202 orang pada tahun 2020, sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut.




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah*

**Gambar 2.61.**
**Grafik Perkembangan Jumlah Peserta Didik PAUD**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang menempuh Pendidikan pada jenjang PAUD. Selama kurun waktu 2016-2020, APK PAUD fluktuatif dan cenderung menurun, di mana pada tahun 2016 APK PAUD sebesar 92,37% dan tahun 2020 menurun menjadi 80,60%.

Salah satu penyebab menurunnya APK PAUD adalah masih rendahnya kesadaran orang tua/wali anak usia 4-6 tahun untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD dengan berbagai alasan, seperti masih dalam pengasuhan orang tua/wali dan/atau belum tega melepaskan anak usia 4-6 tahun untuk bersekolah. Selengkapnya APK PAUD di Kabupaten selama lima tahun 2016-2020 ditampilkan pada gambar berikut.



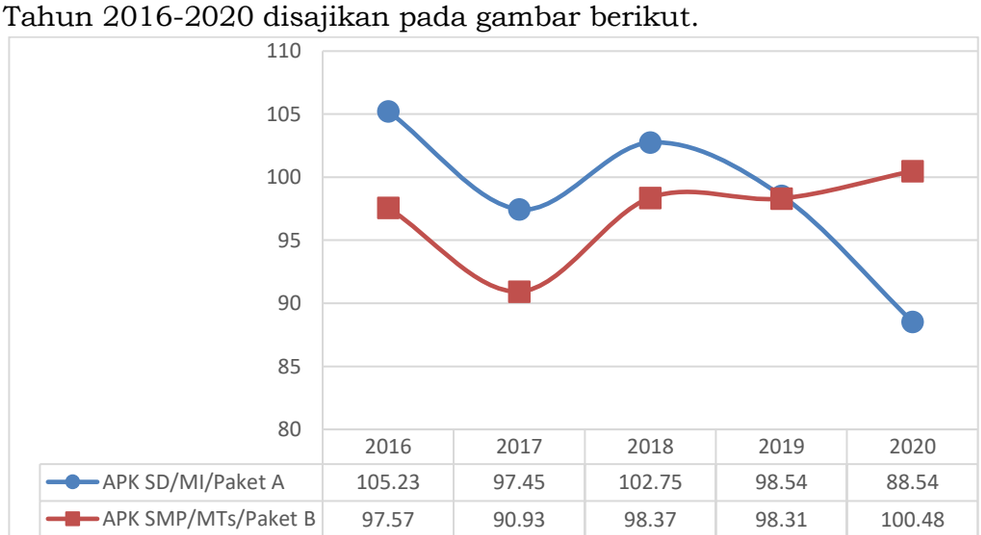

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah*

**Gambar 2.62.**
**Grafik Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

**b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar selama Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Namun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun capaian APK SD/MI/Paket A mengalami kecenderungan menurun, sedangkan APK SMP/MTs/Paket B cenderung meningkat.

APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Klaten tahun 2020 menunjukkan penurunan. Kondisi ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman orang tua/wali mengenai penerapan aturan/juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di satuan pendidikan, belum meratanya sarana pendidikan pada wilayah perbatasan, serta tidak ada pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pandangan sebagian orang tua/wali untuk menunda sesaat pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Secara rinci perkembangan APK SD/MI/Paket dan APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| APK SD/MI/Paket A | 105.23 | 97.45 | 102.75 | 98.54 | 88.54 |
| APK SMP/MTs/Paket B | 97.57 | 90.93 | 98.37 | 98.31 | 100.48 |

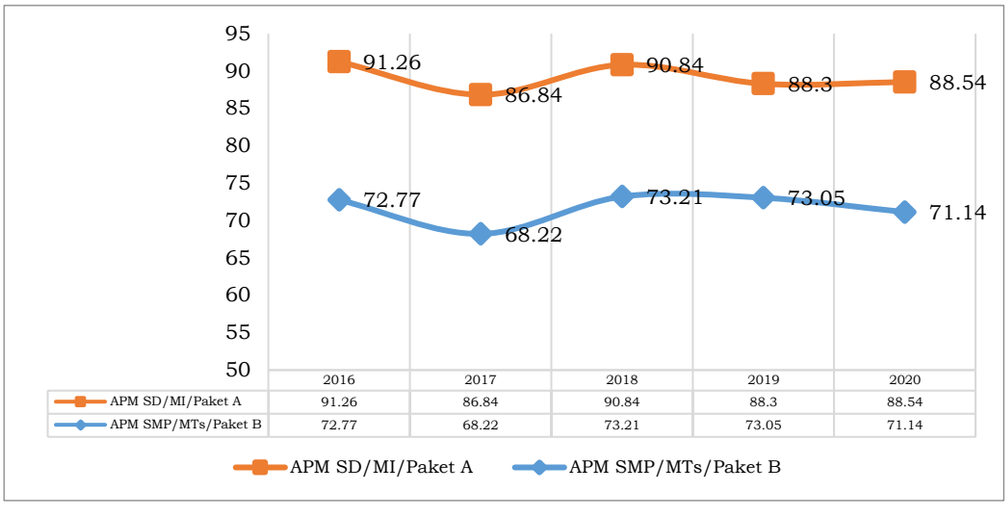
*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah*

**Gambar 2.63.**
**Grafik Perkembangan APK Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

**c. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan kecenderungan menurun baik jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Pada tahun 2020, APM SD/MI/Paket A sebesar 88,54% dan APM SMP/MTs/Paket B mencapai sebesar 71,14%. Kondisi tersebut harus dilakukan peningkatan APM dengan mendorong agar orang tua menyekolahkan anaknya di jenjang SD pada usia 7 tahun.

Perkembangan APM jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut:



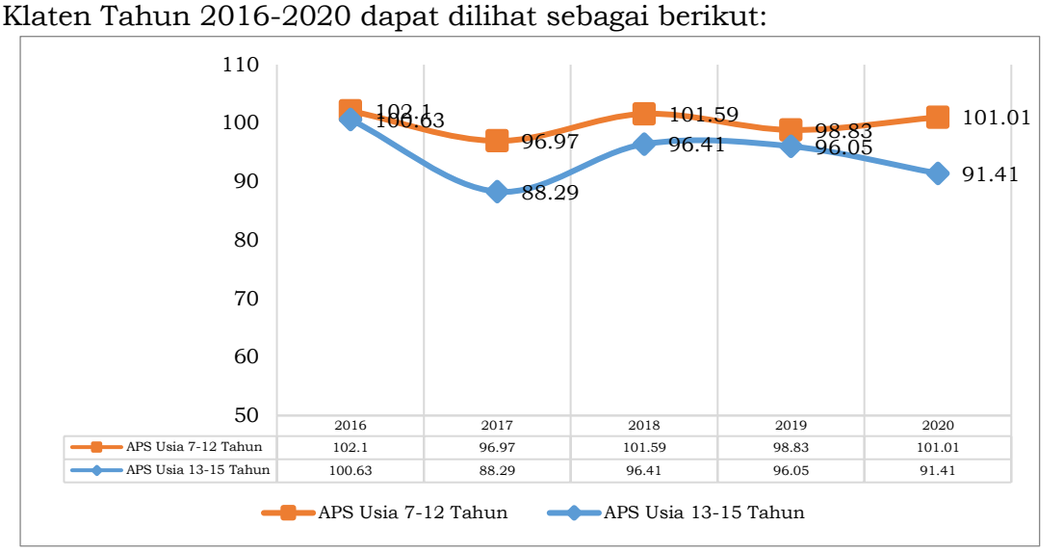

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah*

**Gambar 2.64.**
**Grafik Perkembangan APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

**d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Selama tahun 2016-2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun terjadi fluktuasi, di mana pada tahun 2020 mencapai sebesar 101,01%, sedangkan APS penduduk usia 13-15 tahun cenderung menurun, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 91,41%. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:



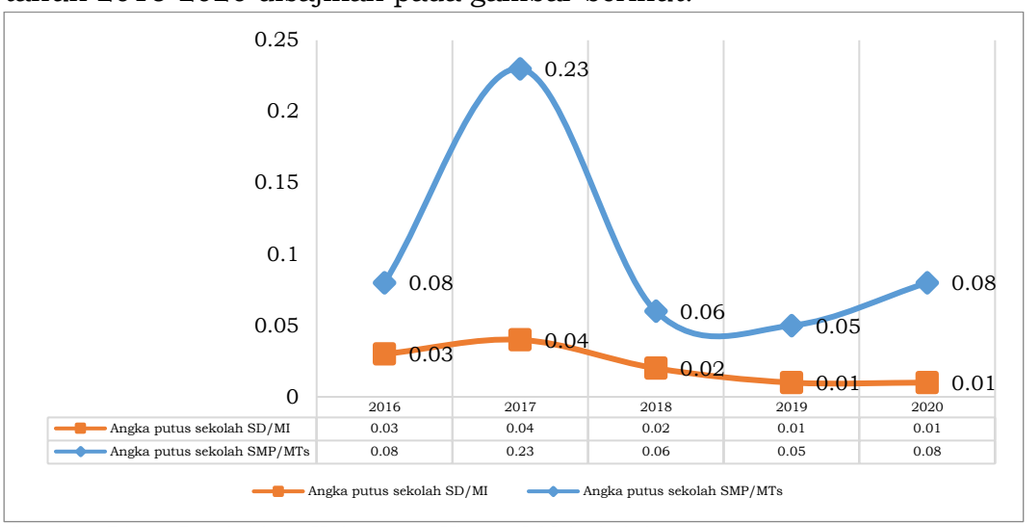

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**Gambar 2.65.**
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

**e. Angka Putus Sekolah**

Perkembangan Angka Putus Sekolah selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, terutama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,01%. Angka tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar 0,2%. Sementara angka putus sekolah tingkat SMP/MTs menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 0,05% di tahun 2019 menjadi 0,08% di tahun 2020.

Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut:




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah*

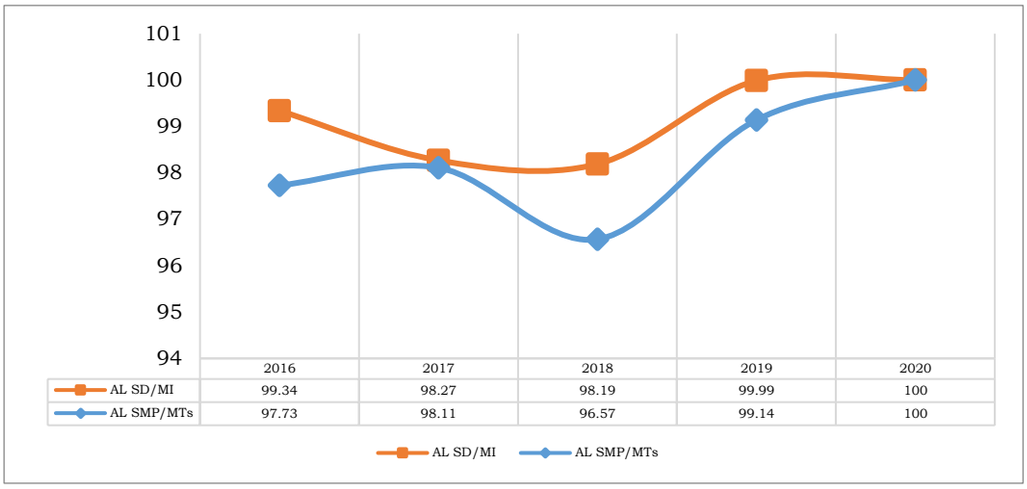
**Gambar 2.66.**
**Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

**f. Angka Kelulusan (AL)**

Kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 cenderung meningkat mencapai angka 100%. Angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dari 99,99% menjadi 100% yang berarti bahwa semua peserta didik sekolah SD/MI dan SMP/MTs lulus.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peniadaan Ujian Nasional Dikarenakan Penyebaran Virus Covid-19 yang Semakin Meningkat, Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan, tetapi syarat kelulusan berdasarkan nilai raport.

Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

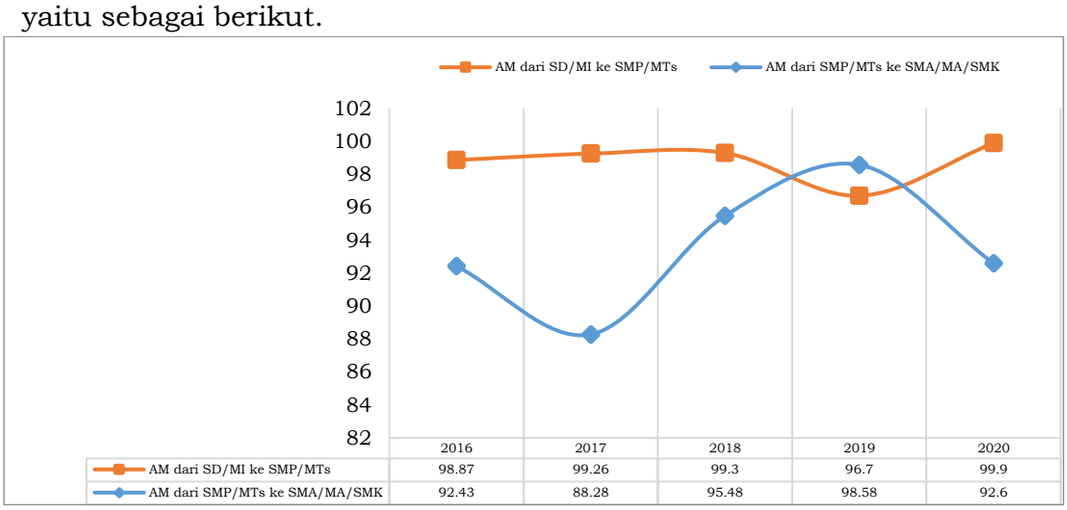
**Gambar 2.67.**
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

**g. Angka Melanjutkan (AM)**

Indikator Angka Melanjutkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa besar lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan SMP/MTs maupun seberapa besar lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA. Peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2016-2020 terjadi fluktuatif. Capaian angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami kenaikan dari 98,87% di tahun 2016 meningkat menjadi 99,90% di tahun 2020.

Capaian angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 92,43% di tahun 2016 meningkat menjadi 98,58% di tahun 2019, kemudian mengalami penurun di tahun 2020 menjadi 92,6%. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut.




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020*

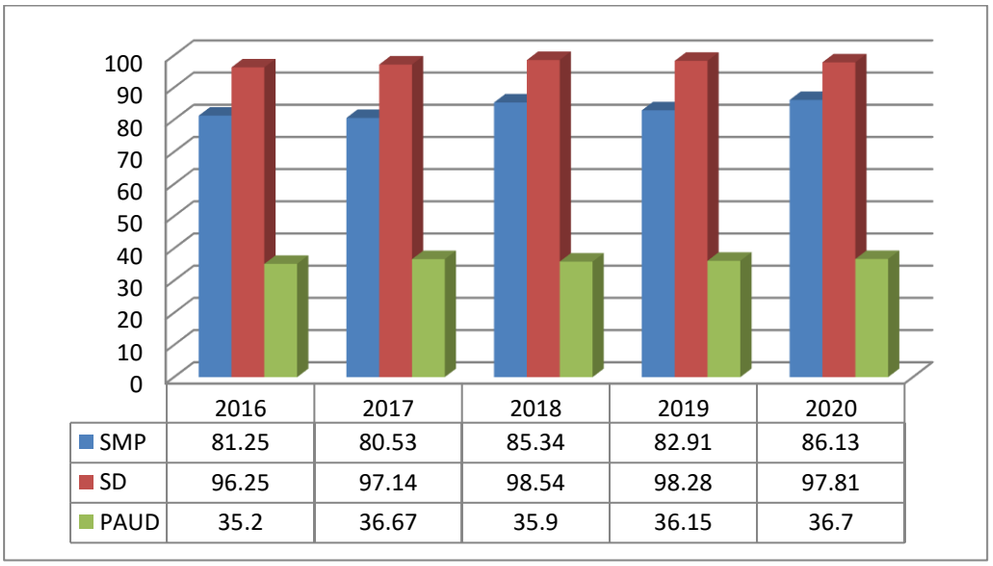
**Gambar 2.68.**
**Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

**h. Akreditasi**

Indikator akreditasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas satuan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan, yang merupakan penilaian terhadap 8 (delapan) standar. Capaian akreditasi minimal B jenjang SMP mengalami kenaikan dari 81,25% di tahun 2016 meningkat menjadi 86,13% di tahun 2020.

Capaian akreditasi minimal B jenjang SD dari 92,43% di tahun 2016 meningkat menjadi 97,81% di tahun 2020. Sedangkan akreditasi minimal B jenjang PAUD di tahun 2016 sebesar 35,20% meningkat menjadi 36,70% di tahun 2020. Secara umum capaian akredit minimal B jenjang PAUD, SD dan SMP selama 5 (lima) tahun meningkat, namun dari tahun ke tahun perkembangannya fluktuatif. Hal itu disebabkan karena berdirinya sekolah baru yang diselenggarakan masyarakat dan belum dilakukan akreditasi.

Di samping itu, akreditasi jenjang PAUD masing rendah sehingga perlu adanya usaha yang masif agar lembaga PAUD yang terakreditasi bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan capaian akreditasi minimal B jenjang PAUD, SD dan SMP adalah sebagai berikut.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 81.25 | 80.53 | 85.34 | 82.91 | 86.13 |
| SD | 96.25 | 97.14 | 98.54 | 98.28 | 97.81 |
| PAUD | 35.2 | 36.67 | 35.9 | 36.15 | 36.7 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020*

**Gambar 2.69.**
**Perkembangan Akreditasi Minimal B Satuan Pendidikan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

**i. Capaian Indikator Lain pada Urusan Pendidikan**

Gambaran capaian indikator kinerja urusan Pendidikan meliputi kondisi sarana prasarana, rasio ketersediaan sekolah, rasio ketersediaan guru, proporsi dan partisipasi penduduk. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting guna menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam satu kesatuan lembaga pendidikan. Kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten untuk jenjang pendidikan SD/MI, sekolah dengan kondisi baik meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 68,87%. Sedangkan untuk jenjang

pendidikan SMP/MTs, sekolah dengan bangunan kondisi baik pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 74,35%.

Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru serta proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Hal tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Secara rinci capaian indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.17**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan**
**di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **SARANA PRASANA** | | | | | | |
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 71,09 | 81,00 | 79,00 | 67,18 | 68,87 |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | % | 85,11 | 96,30 | 80,00 | 87,37 | 74,35 |
| **RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH DAN GURU** | | | | | | |
| Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar | % | 1 : 79 | 1 : 74 | 1 : 78 | 1 : 74 | 1 : 71 |
| Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | % | 1 : 25 | 1 : 22 | 1 : 25 | 1 : 26 | 1 : 25 |
| Rasio guru/murid SD/MI dasar | Rasio | 1 : 15 | 1 : 13 | 1 : 13 | 1 : 14 | 1 : 14 |
| Rasio guru terhadap murid SMP/MTs | Rasio | 1 : 10 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 12 | 1 : 15 |
| Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI | Rasio | 1 : 32 | 1 : 30 | 1 : 28 | 1 : 28 | 1 : 28 |
| Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs | Rasio | 1 : 30 | 1 : 30 | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 |
| **PROPORSI & PARTISIPASI PENDUDUK** | | | | | | |
| Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | % | 91,52 | 96,13 | 96,11 | 96,58 | 100 |
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 87,83 | 76,97 | 84,45 | 87,07 | 87,97 |
| Penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | % | 90,86 | 92,31 | 91,98 | 92,74 | 94,10 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota sebagaimana sesuai dengan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdiri atas a) pendidikan anak usia dini; b) pendidikan dasar; dan c) pendidikan kesetaraan. Berdasarkan data di bawah ini, 3 indikator sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100% sebagaimana target

yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018.

**Tabel 2.18**
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | % | 75,79 | 61,74 | 67,36 | 73,15 | 66,92 |
| 2 | Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | % | 93,27 | 87,93 | 93,18 | 91,32 | 91,71 |
| 3 | Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan | % | - | - | - | 1,44 | 5,79 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

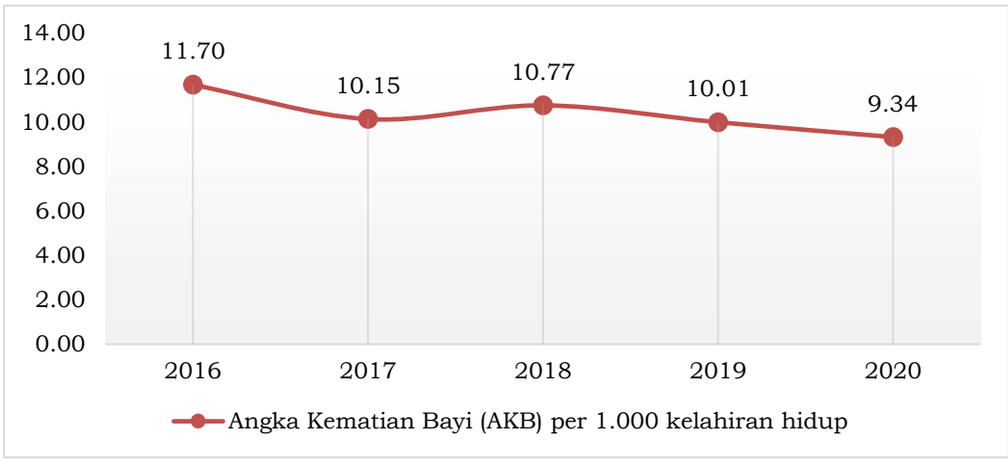
**2. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Urusan kesehatan memiliki sumbangan dalam meningkatnya UHH yaitu dengan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian karena kesakitan.

**a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi, yaitu 11,7 per 1.000 KH (tahun 2016) menjadi 9,34 per 1.000 KH (tahun 2020). Kondisi AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten apabila dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH, meskipun demikian angka ini masih tergolong cukup tinggi. Upaya penurunan AKB di masa Pandemi Covid-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mengoptimalkan bidan desa untuk tetap melakukan kunjungan neonatus (bayi) dan untuk diketahui apa penyebab terbesar kematian bayi baru lahir yaitu asfiksia, prematur atau sepsis. Perkembangan Angka Kematian Bayi di kabupaten klaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



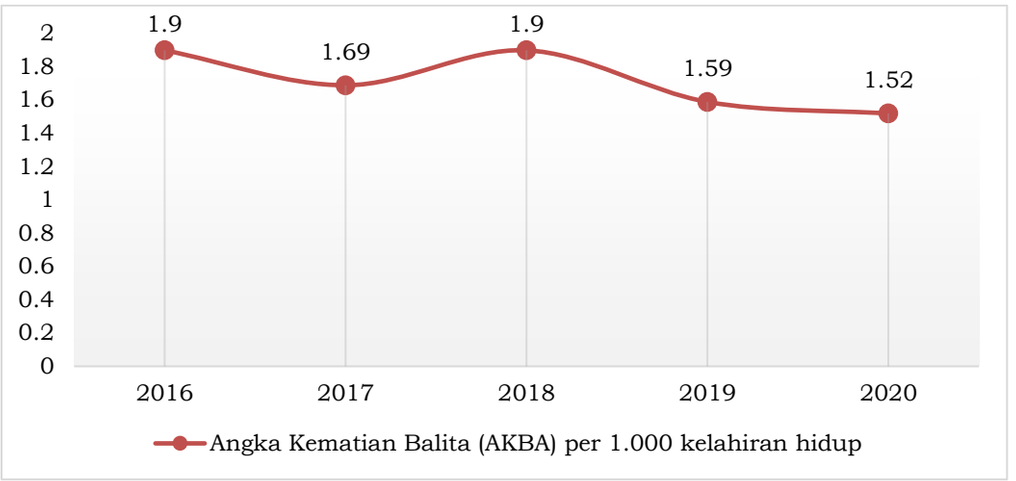

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2021, diolah*

**Gambar 2.70.**
**Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

**b. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Balita (AKBA) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBA Kabupaten Klaten mengalami penurunan cukup signifikan dari 1,90 per 1.000 KH di tahun 2016 menjadi 1,52 per 1.000 KH di tahun 2020.

Di masa pandemi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita masih berjalan walaupun tidak optimal. Kematian balita tetap terjadi akibat adanya penyakit penyerta seperti kelainan jantung, dan lain-lain. Penurunan AKBA tahun 2020 disebabkan sudah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin. Perkembangan Angka Kematian Balita selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



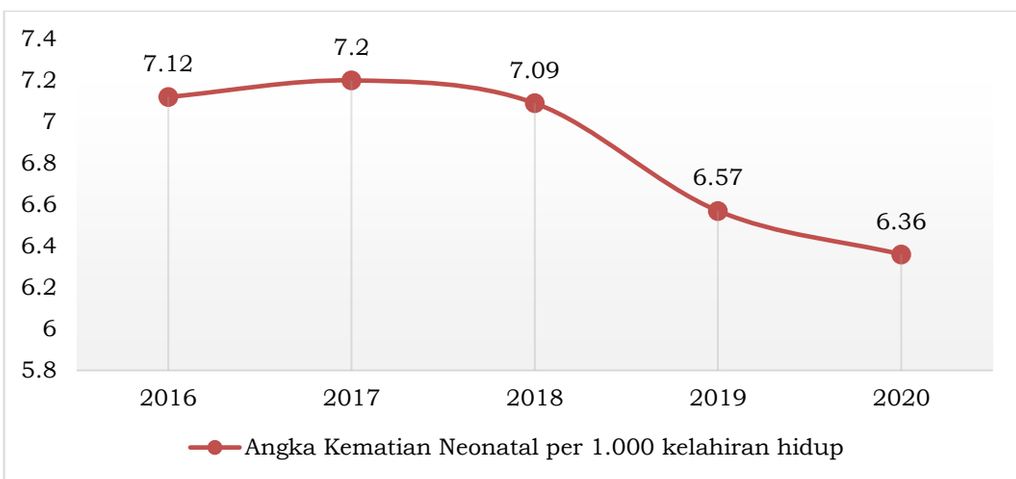

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**Gambar 2.71.**
**Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

**c. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup**

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 cendering menurun, dari 7,12 per 1.000 KH (tahun 2016), menjadi 6,36 per 1.000 KH (tahun 2020). Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup menurun karena sudah dilakukan upaya, seperti: 1) Melakukan revitalisasi Posyandu, 2) Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu, 3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA, 4) Menguatkan kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus, dan 6) Pemantauan di Posyandu. Berikut perkembangan angka kematian neonatal Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**Gambar 2.72.**
**Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

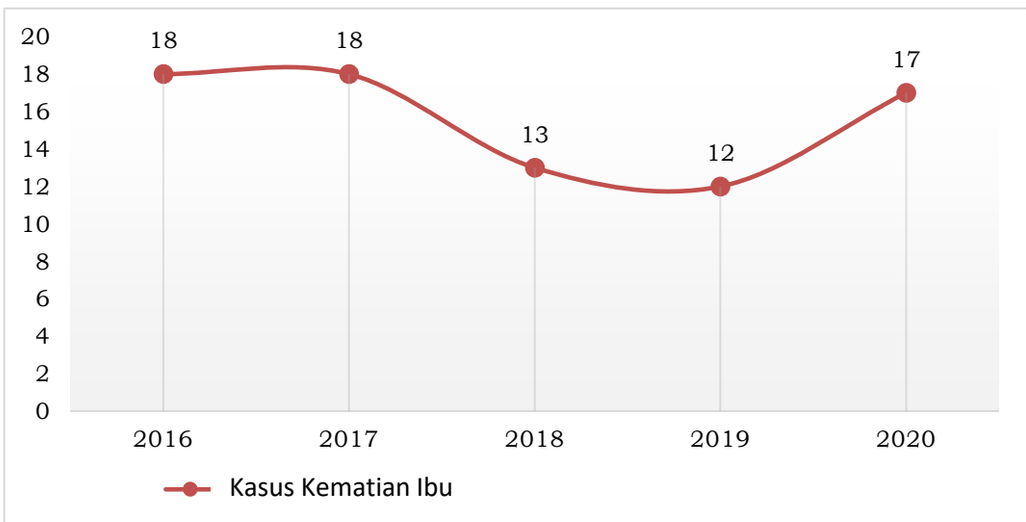
**d. Kasus Kematian Ibu**

Kasus Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin menurun kasusnya, namun pada tahun 2020 ini meningkat kembali dengan adanya 17 kasus. Menurunnya kasus di tahun 2016-2019 tersebut tak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti : 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil.

Sedangkan meningkatnya kasus kematian ibu di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19, ada beberapa ibu hamil yang akan menjalani persalinan namun takut ke fasilitas pelayanan kesehatan, sudah ada faktor resiko sebelum hamil di masa pandemi dan mempunyai comorbid (penyakit penyerta) dan kurang optimalnya pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) yang hanya lewat telepon dan tidak seperti jika bisa memeriksa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Berikut perkembangan kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**Gambar 2.73.**
**Perkembangan Kasus Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

**e. Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis**

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga medis di Kabupaten Klaten sebagai salah satu alat/indikator untuk mengetahui ketersediaan dalam pelayanan kesehatan kepada penduduk khususnya Kabupaten Klaten.

Berdasarkan data Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita pada setiap

tahunnya meningkat. Sedangkan rasio puskesmas, Rumah Sakit, dokter, dan tenaga medis di Kabupaten Klaten masih diperlukan peningkatan. Berikut perkembangan data rasio ketersediaan sarana dan prasarana tenaga medis di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020, di mana sebagai catatan, data tahun 2020 diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), sedangkan pada tahun 2016-2019 data diambil secara manual sehingga terjadi perbedaan data yang cukup signifikan.

**Tabel 2.19**
**Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rasio posyandu per satuan balita | Rasio | 26,16 | 26,88 | 27,63 | 27,99 | 28,00 |
| Rasio puskesmas | Rasio | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Rasio Pustu per satuan penduduk | Rasio | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | Rasio | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Rasio dokter per satuan penduduk | Rasio | 1,302 | 0,896 | 0,896 | 0,237 | 0,026 |
| Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Rasio | 0,349 | 0,253 | 0,253 | 0,074 | 0,05 |
| Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase pelayanan laboratorium klinis dan laboratorium air | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase sistem informasi kesehatan | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar | % | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**f. Cakupan Kebidanan**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani serta cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukaan penurunan. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan.

Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.20**
**Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 97,88 | 101,58 | 89,01 | 83,28 | 84,40 |
| Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 100 | 100 | 99,98 | 99,99 | 99,99 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**g. Cakupan Penanganan Gizi**

Cakupan desa/kelurahan universal *child immunization* dan cakupan penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020 sudah mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.21**
**Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**h. Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk**

Cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten secara keseluruhan menunjukkan penurunan. Dilihat dari beberapa indikator seperti cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari 51,0% di tahun 2016 menurun menjadi 29,98% di tahun 2020. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) juga mengalami penurunan menjadi 46,04 per 100.000 penduduk di tahun 2020. Angka kejadian Malaria per 100.000 penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,0033 di tahun 2020. Selengkapnya perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.22**
**Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
| Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | % | 99,6 | 99,5 | 101,3 | 99,8 | 88,4 |
| Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | % | 140 | 160 | 120 | 320 | 83,33 |
| Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 83,3 | 72,6 | 54,1 | 47,0 | 29,33 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 51,0 | 45,9 | 41,0 | 36,5 | 29,98 |
| Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Per 100.000 penduduk | 72,3 | 128,4 | 169,6 | 109,7 | 46,04 |
| Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Per 100.000 penduduk | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 6,7 | 1,96 |
| Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 51,0 | 45,9 | 41,0 | 36,5 | 31,44 |
| Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | % | 74,8 | 66,7 | 72,7 | 74,7 | 71,63 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penderita diare yang ditangani | % | 7,4 | 13,2 | 11,6 | 9,8 | 4,4 |
| Angka kejadian Malaria | Per 100.000 penduduk | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,0033 |
| Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | % | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,011 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020*
*Keterangan: *) Data hingga Bulan Desember*

**i. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang memiliki 12 indikator SMP yang harus dipenuhi. Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

**Tabel 2.23**
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil | % | 92,84 | 92,85 | 92,51 | 93,27 | 93,44 |
| 2 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 100 | 100 | 99,98 | 99,99 | 99,99 |
| 3 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 97,59 | 97,57 | 98,05 | 97,79 | 96,70 |
| 4 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 94 | 95,25 | 96,17 | 95,77 | 92,71 |
| 5 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 31,13 |
| 6 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | NA | 32 | 49 | 89 | 73,26 |
| 7 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 67,33 | 85,9 | 80,51 | 91,22 | 73,14 |
| 8 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 60 | 63 | 68 | 49 | 32,38 |
| 9 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 30 | 37 | 51 | 100 | 90,76 |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 70 | 81 | 98,24 | 93,14 | 88,32 |
| 11 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | NA | 99,65 | 98,92 | 49,22 | 29,28 |
| 12 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | NA | 64,81 | 81,72 | 90,45 | 86,08 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021*

Capaian indikator SPM persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 adalah nol (0) karena pada tahun tersebut tidak ada pembelajaran tatap muka. Kabupaten Klaten termasuk kategori Kabupaten belum mencapai strata Kabupaten Sehat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Keluarga Sehat yang baru memperoleh nilai 0,252. Kondisi ini diperkuat dengan masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak

menular. Sementara itu indikator preventif dan promotif belum mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari cakupan STBM, dan Rumah tangga ber PHBS. Gambaran secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.24**
**Realisasi Indikator Kesehatan Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Per 100.000 penduduk | 140 | 160 | 120 | 320 | 83,33 |
| 3 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 83,3 | 72,6 | 54,1 | 47 | 29,33 |
| 4 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Penderita diare yang ditangani | % | 7,4 | 13,2 | 11,6 | 9,8 | 6 |
| 6 | Angka kejadian Malaria | Per 100.000 penduduk | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,77 |
| 7 | Indeks Keluarga Sehat | Indeks | NA | NA | 0,25 | 0,25 | 0,252 |
| 8 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | % | 5,73 | 5,4 | 4,55 | 6,26 | 10,61 |
| 9 | Cakupan STBM | % | 0 | 0 | 0 | 2,74 | 24,9 |
| 10 | Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Penduduk Memiliki JKN | % | 62,51 | 65,71 | 85,71 | 90,17 | 89,00 |
| 12 | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | % | 92,82 | 88,69 | 89,74 | 94,35 | 96,26 |
| 15 | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,6 |
| 16 | Angka Kejadian HIV | /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV | NA | NA | NA | NA | 0,14 |
| 17 | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | % | 72,30 | 128,44 | 169,62 | 109,70 | 24,26 |
| 18 | Angka Kejadian DBD | /100.000 | 60,44 | 8,6 | 1,71 | 27,32 | 33,45 |
| | Persentase Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis) | % | 4,8 | 10,7 | 6,7 | 5,4 | 29,4 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021*

Terdapat penurunan persentase penduduk memiliki JKN dari 90,17 menjadi 89,00 karena rumus perhitungannya beda. Perhitungan lama menggunakan data peserta yang sudah terdaftar baik yang aktif maupun yang tidak aktif, namun di perhitungan yang sekarang yang dihitung hanya yang aktif.

**j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk**

Pada tahun 2020, akibat adanya Pandemi Covid-19, mengakibatkan pelayanan kesehatan terganggu. Sebab sebagian besar pelayanan dan termasuk anggaran difokuskan untuk pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19. Dari beberapa indikator yang ada pada cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2020 hampir semua mengalami penurunan. Sehingga untuk ke depan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.25**
**Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | % | 9,10 | 8,49 | 9,67 | 11 | 9,09 |
| Cakupan kunjungan bayi | % | 96,04 | 99,67 | 98,36 | 98,07 | 96,89 |
| Cakupan puskesmas | % | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Cakupan pembantu puskesmas | % | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 92,84 | 92,85 | 92,51 | 93,27 | 93,33 |
| Cakupan pelayanan nifas | % | 96,98 | 97,2 | 97,54 | 97,55 | 96,92 |
| Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 54,92 | 57,05 | 53,47 | 56,03 | 55,63 |
| Cakupan pelayanan anak balita | % | 94 | 95,25 | 96,17 | 95,77 | 92,71 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021*

**k. Persentase Dokter IGD RSUD Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kegawatdaruratan Sesuai Standar**

Pelatihan kegawatdaruratan adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat melakukan diagnosa secara tepat dan akurat terhadap pasien trauma, dapat mengerjakan pertolongan secara benar dan sistematis serta mampu menstabilkan pasien untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh dokter yang bekerja di IGD dengan dibuktikan memiliki sertifikat pelatihan dengan masa berlaku 5 tahun. Sejak tahun 2016, dokter yang ditempatkan di IGD

sudah memiliki sertifikat pelatihan yang masih berlaku. Namun pada tahun 2020 ada dokter yang masa berlaku pelatihan telah habis dan belum bisa melakukan perpanjangan dikarenakan kondisi pandemi, sehingga capaiannya hanya 84,6%.

**Tabel 2.26**
**Persentase Dokter IGD RSUD Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kegawatdaruratan Sesuai Standar Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 84,6 |

*Sumber: RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten, 2021*

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

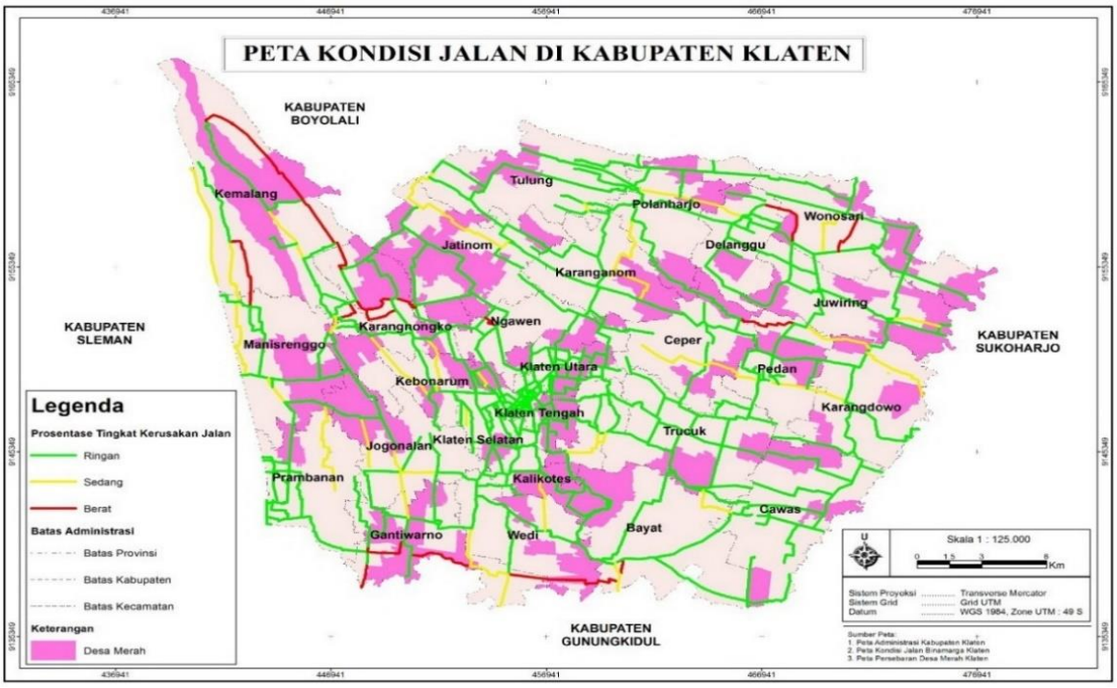
#### a. Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari data proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2016 sebesar 61,3% meningkat menjadi 66,25% di tahun 2020. Sementara itu untuk jalan kondisi mantap (baik dan sedang) sampai dengan tahun 2020 mencapai 90,08%. Meskipun kondisi jalan mantap meningkat namun masih terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang perlu ditangani sebesar 33,75%, serta 24,55% jalan dalam kondisi sedang yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

**Tabel 2.27**
**Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Keadaan | | Status Jalan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jalan Negara | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten | | | | |
| | | 2020 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I | Jenis Permukaan | | | | | | | |
| | a. Aspal/Hotmix/ Lapen/sandsheet | 33,52 | 41,360 | 753,94 | 725,29 | 725,29 | 689,66 | 605,19 |
| | b. Berbatu/ Macadam | – | – | 3,16 | – | – | – | - |
| | c. Hotmix | – | – | – | – | – | – | - |
| | d. Kerikil | – | – | – | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 11,55 |
| | e. Tanah/Jalan Belum Tembus | – | – | 12,53 | – | – | – | – |
| | f. Beton | – | – | – | 41,44 | 41,44 | 77,87 | 99,14 |
| Jumlah – I | | 33.52 | 41,360 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 715.89 |
| II | Kondisi Jalan | | | | | | | |
| | a. Baik | 3,9 | 25,76 | 432,91 | 470,61 | 517,27 | 533,56 | 474,26 |
| | b. Sedang | 29,62 | 15,61 | 190,92 | 169,03 | 140,34 | 128,47 | 170,64 |
| | c. Rusak | – | – | 63,51 | 62,9 | 56,86 | 52,04 | 59,44 |
| | d. Rusak Berat | – | – | 82,29 | 67,09 | 55,16 | 55,56 | 11,55 |
| Jumlah – II | | 33.52 | 41,37 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 715,89 |
| III | Kelas Jalan | | | | | | | |
| | a.Kelas I | – | – | – | – | – | – | – |
| | b.Kelas II | – | – | – | – | – | – | – |
| | c.Kelas III | – | 41360 | – | – | – | – | – |
| | d.Kelas IIIA | 33,52 | – | – | – | – | – | – |
| | e.Kelas IIIB | – | – | – | – | – | – | – |
| | f.Kelas IIIC | – | – | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 715,89 |
| | g.Kelas IV | – | – | – | – | – | – | – |
| | h.Kelas Tidak Dirinci | – | – | – | – | – | – | – |
| Jumlah – III | | 33.52 | 41,36 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 769,63 | 715,89 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021*




*Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*

**Gambar 2.74.**
**Peta Kondisi Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2020**

Total jembatan yang ada di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2020 tercatat sebanyak 313 unit jembatan, di mana jembatan dalam kondisi baik sebanyak 200 unit (63,90%), jembatan kondisi sedang dan ringan sebanyak 113 unit (36,10%), untuk jembatan rusak berat tidak ada. Kondisi jembatan di Kabupaten sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.28**
**Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

| No | Kondisi Jembatan | Satuan | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| a. | Baik | Unit | 308 | 308 | 311 | 200 |
| | | % | 90,59 | 90,59 | 91,47 | 63,90 |
| b. | Sedang dan Ringan | Unit | 29 | 29 | 29 | 113 |
| | | % | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 36,10 |
| d. | Rusak Berat | Unit | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | % | 0,89 | 0,89 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | **340** | **340** | **340** | **313** |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021*

Indikator jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang cukup signifikan, pada tahun 2020 persentase jembatan dalam kondisi baik menurun menjadi 63,90% dikarenakan adanya perubahan SK Bupati terkait jalan kabupaten dan perubahan kriteria jembatan, di mana jembatan yang memiliki panjang kurang dari 3 meter dianggap sebagai gorong-gorong.

**b. Prasarana Sumber Daya Air**

Berdasarkan Permen PU PR No. 14 tahun 2015 bahwa luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 29.713 ha yang tercakup

dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka anggaran pengelolaan irigasi bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Persentase irigasi kondisi baik di Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan, dari sebesar 22,34% (6.636 Ha) meningkat menjadi 36,17% (10.747 Ha) di tahun 2020. Kondisi Daerah Irigasi (DI) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel diberikut ini.

**Tabel 2.29**
**Kondisi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Kondisi Daerah Irigasi (DI) | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Baik | 6.636 | 22,34 | 7.208 | 24,26 | 9.499 | 31,97 | 9.945 | 33,47 | 10.747 | 36,17 |
| Rusak sedang | 15.476 | 52,08 | 15.303 | 51,50 | 14.019 | 47,18 | 13.822 | 46,52 | 15.261 | 51,36 |
| Rusak berat | 7.601 | 25,58 | 7.202 | 24,24 | 6.195 | 20,85 | 5.946 | 20,01 | 3.705 | 12,47 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021*

Selain untuk kepentingan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air juga diarahkan untuk penanganan banjir di Kabupaten Klaten. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten yang meliput Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabiltasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Penguatan talud/tebing sungai, juga dilakukan sesuai dengan kewenangan kabupaten.

**c. Drainase**

Kondisi drainase di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 menunjukan peningkatan, saluran drainase ini merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Capaian kinerja indikator drainase baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2016 sebesar 60,52% meningkat menjadi 61,44% tahun 2020.

**d. Akses Air Minum dan Sanitasi**

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan yang cukup *signifikan*. Capaian tahun 2016 sebesar 87,20% meningkat menjadi 91,77% ditahun 2020 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 95,06% dan wilayah perdesan sebesar 89,81%. Upaya pemenuhan target akses air minum dan sanitasi dilakukan

melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa, CSR, DAK, hibah air minum maupun program berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, Program KOTAKU, SANIMAS, USRI, dan program lainnya.

Capaian akses sanitasi di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 telah mencapai angka 100% di perkotaan maupun perdesaan. Untuk peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman ada beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran. Selengkapnya cakupan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.30**
**Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| NO | SEKTOR | SKALA | Capaian Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Air Minum | Kabupaten | 1.290.796 | 1.168.413 | 1.193.028 | 1.195.297 | 1.218.317 |
| | | % | 87,2 | 87,31 | 89,15 | 91,14 | 91,77 |
| | | Perkotaan | 531.477 | 464.778 | 464.778 | 483.169 | 487.910 |
| | | % | 90,02 | 90,15 | 92,48 | 95,03 | 95,06 |
| | | Perdesaan | 759.319 | 703.635 | 728.250 | 719.495 | 731.327 |
| | | % | 84,38 | 84,47 | 87,15 | 88,71 | 89,81 |
| 2 | Sanitasi | Kabupaten | 1.286.924 | 1.227.771 | 1.282.234 | 1.339.762 | 1.327.577 |
| | | % | 88,22 | 91,75 | 95,82 | 100 | 100 |
| | | Perkotaan | 487.035 | 466.889 | 485.515 | 502.572 | 513.253 |
| | | % | 89,01 | 92,9 | 96,61 | 100 | 100 |
| | | Perdesaan | 822.189 | 757.052 | 796.719 | 839.925 | 814.324 |
| | | % | 87,43 | 90,6 | 95,35 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappeda Kabupaten Klaten, 2021*

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.31**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase jalan dalam kondisi mantap | % | 81,06 | 83,11 | 85,43 | 86,02 | 90,08 |
| Persentase jalan kondisi baik | % | 56,25 | 61,15 | 67,20 | 69,33 | 66,25 |
| Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik | % | 61,3 | 61,75 | 62,25 | 81,03 | 63,90 |
| Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | % | 0,00055 | 0,000549 | 0,000546 | 0,000544 | 0,000541 |
| Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | % | 56,25 | 61,15 | 67,20 | 69,33 | 69,33 |

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | % | 5,12 | 5,55 | 5,84 | 5,92 | 5,92 |
| **Jaringan Irigasi** | | | | | | |
| Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 0,53 | 0,46 | 0,30 | 0,32 | 0,21 |
| Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 22,34 | 24,26 | 31,97 | 33,47 | 36,17 |
| Baik | ha | 6.636 | 7.208 | 9.499 | 9.945 | 10.474 |
| Rusak sedang | ha | 15.476 | 15.303 | 14.019 | 13.822 | 15.261 |
| Rusak berat | ha | 7.601 | 7.202 | 6.195 | 5.946 | 3.705 |
| **Drainase** | | | | | | |
| Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 60,52 | 60,75 | 60,98 | 61,21 | 61,44 |
| **Air Minum** | | | | | | |
| Persentase penduduk berakses air minum | % | 87,20 | 87,31 | 89,15 | 91,14 | 91,77 |
| **Sanitasi** | | | | | | |
| Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 88,22 | 91,75 | 95,82 | 100 | 100 |
| **Bangunan Gedung** | | | | | | |
| Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan | % | 4,76 | 4,87 | 4,94 | 5,03 | 11 |
| **Penataan Ruang** | | | | | | |
| Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang | % | 78,98 | 78,98 | 78,98 | 88 | 88 |
| Persentase ketidakkesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang | % | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 12 | 12 |
| Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan | % | NA | NA | 3 | 3 | 3 |
| Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun | % | NA | NA | 4 | 28 | 28 |
| Persentase pengendalian pemanfaatan ruang | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021*

Pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 91,77% sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sudah mencapai 100%.

**Tabel 2.32**
**Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Peenataan Ruang**
**Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kinerja (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari–hari. | 100 | 91,77 | 91,77 |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. | 100 | 100 | 100 |
| **RATA-RATA CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | 95,88 |

*Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota*

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggungjawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu unsur utama kesejahteraan masyarakat disamping pangan dan sandang.

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi capaian sampai dengan tahun 2020 sudah 100%. Seperti diketahui kedua indikator tersebut merupakan indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 tahun terakhir capaiannya mengalami peningkatan, dari 92,58% di tahun 2016 menjadi 98,57% di tahun 2020, ini berarti bahwa terdapat 98,57% rumah tangga di Kabupaten Klaten menempati rumah layak huni. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu dengan berbagai program yang penganggarannya baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menangani sebesar 17,19% rumah tidak layak huni.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten di tahun 2016 sebanyak 23.884 unit menjadi 20.608 unit di tahun 2018 atau 6,18% dari 333.567 unit total rumah di Kabupaten Klaten (BPS 2017) tahun 2020 jumlah rumah tidak layak huni masih menyisakan sebesar 15.204 unit. sebaran rumah tidak layak huni Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.33**
**Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2108 | 2019 | 2020 |
| 1 | Bayat | 4.309 | 4.261 | 4.157 | 4.037 | 3.903 |
| 2 | Cawas | 1.299 | 1.263 | 1.159 | 986 | 685 |
| 3 | Ceper | 348 | 295 | 188 | 104 | 30 |
| 4 | Delanggu | 207 | 190 | 103 | 103 | 32 |
| 5 | Gantiwarno | 461 | 427 | 318 | 189 | 99 |
| 6 | Jatinom | 1.947 | 1.890 | 1.789 | 1.679 | 1.299 |
| 7 | Jogonalan | 453 | 418 | 321 | 242 | 199 |
| 8 | Juwiring | 741 | 698 | 576 | 447 | 369 |
| 9 | Kalikotes | 386 | 379 | 316 | 265 | 28 |
| 10 | Karanganom | 518 | 474 | 346 | 230 | 197 |
| 11 | Karangdowo | 1.075 | 1.038 | 950 | 808 | 734 |
| 12 | Karangnongko | 1.232 | 1.201 | 1.121 | 1.058 | 942 |
| 13 | Kebonarum | 167 | 154 | 111 | 75 | 49 |
| 14 | Kemalang | 1.341 | 1.314 | 1.197 | 1.132 | 1.029 |
| 15 | Klaten Selatan | 159 | 141 | 64 | 64 | 42 |
| 16 | Klaten Tengah | 369 | 360 | 325 | 295 | 260 |
| 17 | Klaten Utara | 195 | 184 | 122 | 68 | 48 |
| 18 | Manisrenggo | 1.013 | 975 | 858 | 757 | 684 |
| 19 | Ngawen | 514 | 492 | 405 | 322 | 291 |
| 20 | Pedan | 414 | 400 | 288 | 213 | 32 |
| 21 | Polanharjo | 143 | 119 | 36 | 35 | 10 |
| 22 | Prambanan | 719 | 695 | 607 | 549 | 332 |
| 23 | Trucuk | 2.842 | 2.803 | 2.649 | 2.461 | 2.243 |
| 24 | Tulung | 1.051 | 1.013 | 903 | 770 | 701 |
| 25 | Wedi | 1.248 | 1.214 | 1.101 | 1.011 | 662 |
| 26 | Wonosari | 733 | 710 | 598 | 462 | 369 |
| **Total RTLH** | | **23.884** | **23.108** | **20.608** | **18.362** | **15.204** |
| **Total RTLH Tertangani** | | **890** | **776** | **2.500** | **2.246** | **3.158** |
| **Persentase RTLH Tertangani** | | **3,59** | **3,25** | **10,82** | **10,90** | **17,19** |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, 2021*

Kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat setiap tahunnya terus meningkat, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh privat sektor dan intervensi pemerintah. Kebutuhan rumah yang tidak dapat terpenuhi disebut dengan *backlog*. Penyebab tingginya angka *backlog* perumahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain semakin banyaknya populasi sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga ikut meningkat. Sampai dengan tahun 2020 jumlah KK di Kabupaten Klaten sebanyak 389.674, sedangkan jumlah rumah sebanyak 309.951 unit sehingga total *backlog*

rumah di Kabupaten Klaten sebanyak 77.419 unit. Selengkapnya data *backlog* rumah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.34**
**Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Klaten tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Jumlah Rumah | Backlog Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayat | 65.255 | 21.138 | 18.253 | 2.375 |
| 2 | Cawas | 47.674 | 15.651 | 12.550 | 1.533 |
| 3 | Ceper | 66.603 | 22.253 | 16.086 | 5.712 |
| 4 | Delanggu | 40.533 | 13.893 | 10.934 | 3.659 |
| 5 | Gantiwarno | 38.512 | 13.210 | 10.982 | 2.133 |
| 6 | Jatinom | 56.180 | 18.630 | 14.881 | 3.488 |
| 7 | Jogonalan | 60.486 | 20.805 | 17.397 | 3.336 |
| 8 | Juwiring | 61.992 | 20.189 | 15.898 | 4.291 |
| 9 | Kalikotes | 8.280 | 2.879 | 2.281 | 598 |
| 10 | Karanganom | 42.227 | 14.443 | 11.641 | 2.802 |
| 11 | Karangdowo | 39.550 | 13.800 | 10.298 | 3.502 |
| 12 | Karangnongko | 38.454 | 12.586 | 8.841 | 3.727 |
| 13 | Kebonarum | 21.440 | 7.246 | 5.347 | 1.899 |
| 14 | Kemalang | 33.710 | 10.989 | 9.499 | 1.490 |
| 15 | Klaten Selatan | 47.899 | 15.765 | 13.994 | 1.854 |
| 16 | Klaten Tengah | 43.071 | 14.388 | 12.527 | 1.861 |
| 17 | Klaten Utara | 48.436 | 15.810 | 12.169 | 4.023 |
| 18 | Manisrenggo | 29.766 | 11.562 | 8.886 | 2.677 |
| 19 | Ngawen | 46.808 | 15.425 | 12.383 | 3.042 |
| 20 | Pedan | 34.046 | 11.395 | 8.733 | 2.662 |
| 21 | Polanharjo | 41.843 | 14.810 | 11.208 | 3.359 |
| 22 | Prambanan | 40.181 | 13.318 | 11.859 | 2.509 |
| 23 | Trucuk | 58.368 | 19.684 | 14.977 | 4.590 |
| 24 | Tulung | 54.627 | 17.510 | 13.874 | 3.636 |
| 25 | Wedi | 35.472 | 12.602 | 9.065 | 2.356 |
| 26 | Wonosari | 58.779 | 19.693 | 15.388 | 4.305 |
| **Total** | | **1.160.192** | **389.674** | **309.951** | **77.419** |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, 2021*

Berdasarkan SK Bupati Nomor 050/373/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten jumlah luas kawasan kumuh sebesar 236,50 ha. Pemerintah Kabupaten Klaten telah berhasil menata dan menangani kawasan kumuh melalui program KOTAKU dan anggaran yang bersumber dari APBD.

Sampai dengan tahun 2019, areal kumuh di Kabupaten Klaten masih sekitar 0,14% atau masih tersisa 41,65 Ha dari total wilayah kawasan kumuh, di mana capaian tahun 2020 tetap sebesar 01,4%. Hal ini diakibatkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengalihkan anggaran penanganan kawasan kumuh ke penanganan Covid-19. Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Satuan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | NA | NA | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | % | NA | NA | 100 | 100 | 100 |
| Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prosentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan | % | 0,73 | 0,39 | 0,46 | 0,14 | 0,14 |
| Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani | % | 3,59 | 3,25 | 10,82 | 10,90 | 17,19 |
| Persentase areal kawasan kumuh | % | 0,74 | 0,31 | 0,46 | 0,14 | 0,14 |
| Rasio rumah layak huni | % | 92,58 | 93,91 | 95,07 | 97,04 | 98,57 |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, 2021*

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2020 adalah 0, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir ini tidak menangani penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota maupun fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

**Tabel 2.36**
**Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kinerja (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. | Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian ha katas penggunaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni | 100 | 0 | 0 |
| **RATA – RATA CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | 0 |

*Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota*

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

### 1. Jumlah Linmas dan Penegakan Perda

Capaian kinerja pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari tahun 2016-2020 bersifat tetap sebanyak 31 orang. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan juga mengalami peningkatan dari sebesar 31% ditahun 2016 menjadi sebesar 41,5% di tahun 2020.

Indikator persentase Penegakan PERDA meningkat dari 91,00% ditahun 2016 menjadi sebesar 92,00% di tahun 2020. Sementara Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2020 dan prosentase ketentraman dan ketertiban umum yang terkondisikan juga sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukan setiap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi bisa diselesaikan dan terkondisikan dengan baik. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.37**
**Jumlah Linmas dan Penegakan Perda Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Prosentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkondisikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Penegakan PERDA | % | 91,00 | 91,25 | 91,5 | 91,6 | 92,00 |
| 3 | persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | orang | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5 | Persentase Satlinmas yang teerlatih dan di kukuhkan | % | 31,0 | 32,2 | 37,4 | 39,4 | 41,5 |

*Sumber: Satpol PP Kabupaten Klaten, 2021*

### 2. Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)

Pelanggaran K3 di Kabupaten Klaten sangat beragam, pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat antara lain terkait dengan ijin reklame, perijinan usaha, ijin menara telekomunikasi, PKL, dan bangunan liar. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan, dari 90,00% di tahun 2016 menjadi sebesar 92,00% di tahun 2020. Indikator persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan meningkat dari sebesar 91% di tahun 2016 menjadi 91,6% di tahun 2020. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.38**
**Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 91 | 91,25 | 91,5 | 91 | 92,00 |
| 3 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 91 | 91 | 91,25 | 91,5 | 91,6 |

*Sumber: Satpol PP Kabupaten Klaten, 2021*

**3. Kebakaran**

Cakupan pelayanan kebakaran sebesar 1,1% selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Untuk indikator Tingkat Waktu tanggap *(response time rate)* cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 66,60% menjadi 65,00% di tahun 2020. Kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten masih cukup tinggi, utamanya di wilayah manajemen kebakaran sehingga tidak terpenuhi layanan kebarakan dalam waktu tanggap oleh petugas pemadam kebakaran. Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 13 menit menjadi 15,0 menit ditahun 2020. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.39**
**Capaian Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 66,6 | 64,20 | 70,10 | 67,63 | 65,00 |
| 3. | Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran | menit | 13,0 | 13,8 | 15,1 | 15,9 | 15,0 |

*Sumber: Satpol PP Kab Klaten, 2021*

**4. Bencana**

Kabupaten Klaten merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana yang cukup tinggi mulai dari erupsi gunung merapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kabupaten Klaten telah mengukur Indeks Ketahanan Daerah sejak tahun 2019, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Berdasarkan data IKD tersebut maka setiap Kabupaten/Kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan resiko.

Capaian IKD Kabupaten Klaten tahun 2019 sebesar 0,12 mengalami peningkatan menjadi 0,92 di tahun 2020. Hal ini berarti resiko bencana di Kabupaten Klaten meningkat.

Capaian kinerja yang mewakili indikator SPM yaitu, Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2020 sebesar 5,05%. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sudah mencapai 100%. Capaian indikator kelompok-kelompok relawan bencana yang aktif bersifat tetap selama kurun waktu 2016-2021 yaitu sebesar 40,00%, di mana gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.40**
**Capaian Kinerja Sub-Urusan Bencana di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Indeks | NA | NA | NA | 0,12 | 0,92 |
| 2. | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| 3. | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase kelompok relawan bencana yang aktif | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

*Sumber: BPBD Kab Klaten, 2021*

Realisasi pencapaian SPM ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2019-2020 capaiannya sudah mencapai 100%. Indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada pada tahun 2019 tercatat sebesar 91,69%, selanjutnya capaian tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 92%. Terkait dengan capaian indikator SPM kebencanaan, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2020 tercatat sebesar 70,12%; dan capaian indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana masing-masing sudah mencapai 100% ditahun 2020.

Berikut realisasi capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban umum sebagai berikut.

**Tabel 2.41**
**Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
**Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Jenis pelayanan dasar | indikator | Satuan | Realisasi Capaian SPM Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 |
| 1. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 |
| 2. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada | % | 91,69 | 92 |
| 3. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | 70,00 | 70,12 |
| 4. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | 100 |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 |

*Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab Klaten, 2021*

**6. Sosial**

Kinerja pembangunan urusan Sosial di tingkat kabupaten secara garis besar terkait dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, penanganan bencana serta penghormatan nilai-nilai kepahlawanan melalui pengelolaan taman makam pahlawan di tingkat kabupaten. Pemberdayaan sosial di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari beberapa indikator yang tersedia. Di antaranya yaitu persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas, di mana pada tahun 2020 mampu mencapai 96% dari total PSKS yang ada. Dengan peningkatan kapasitas ini diharapkan sumbangsih dan kinerja PSKS untuk berperan serta dalam upaya penanganan permasalahan sosial semakin baik. Selain itu upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan keberdayaan panti-panti sosial dan juga wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang ada di wilayahnya. Dari segi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 60%.

Upaya penanganan terhadap PMKS atau yang saat ini diubah istilahnya menjadi PPKS di Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), yakni dari 33,11% menjadi 90,32%. Selain itu penanganan PMKS juga diarahkan pada para PMKS yang menjadi sasaran pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial, di mana capaiannya rata-rata masih sebesar 80%, masih di bawah target SPM yang diharapkan yakni 100%. Sedangkan

untuk pemberian jaminan sosial kepada penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial capaiannya di tahun 2020 baru sebesar 27,13%.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin dan rentan. Pemutakhiran data dilakukan untuk mendorong Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan kegiatan pemutakhiran data lebih maksimal. Saat ini pemutakhiran data DTKS yang dilakukan pemerintah Desa belum optimal, sehingga mempengaruhi validitas data di lapangan. Pemutakhiran data ini menjadi sangat penting karena data tersebut akan dipakai dalam menentukan sasaran pemberian bantuan sosial, jangan sampai bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Dari tahun ke tahun proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah semakin meningkat, dari 33,11% di tahun 2016 menjadi 90,32% di tahun 2020. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi beban bagi masyarakat miskin dan rentan.

Untuk penanganan bencana, khususnya di masa tanggap darurat bencana, hal yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan sosial dan pengevakuasian korban bencana, dimana capaian kinerja untuk dua indikator yang mewakilinya sama-sama mencapai 100% di tiap tahunnya.

Kinerja penghormatan terhadap jasa para pahlawan di Kabupaten Klaten yang salah satunya diwujudkan dengan pengelolaan taman makam pahlawan juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari tahun 2016-2020, taman makam pahlawan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah terkelola sesuai dengan standar taman makam pahlawan yang ada.

Selengkapnya kinerja urusan Sosial Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 33,11 | 35,52 | 48,49 | 62,26 | 90,32 |
| 2. | Persentase PMKS yang tertangani | % | 33,11 | 35,52 | 48,49 | 62,26 | 90,32 |
| 3. | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 33,11 | 35,52 | 48,49 | 62,26 | 90,32 |
| 4. | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 0,06 | 0,18 | 0,31 | 0 | 0 |
| 5. | Persentase panti sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 65,95 | 72,73 | 72,73 | 76 | 76 |
| 6. | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | | | | | | |
| 7. | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 13,34 | 13,2 | 88,73 | 73,67 | 27,13 |
| 10 | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| 11 | Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti | % | 33,11 | 35,52 | 48,49 | 62,26 | 80 |
| 12 | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (% ) | % | 21,15 | 20,01 | 87,41 | 86,96 | 143,08 |
| 13 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, 2021*

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang diberikan amanat oleh pemerintah untuk memberikan layanan sesuai dengan Standart Pelayanan Masyarakat yang telah ditetapkan indikator kinerjanya. Capaian SPM urusan sosial Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**
**Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Program Rehabilitasi Sosial Dasar | Sasaran/ Indikator Kinerja | Indikator | Jumlah Sasaran | Jumlah Populasi | Penanganan PMKS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyandang Disabilitas Terlantar | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Persentase jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 300 | 6.131 | 250 | 83,3 |

| No | Program Rehabilitasi Sosial Dasar | Sasaran/ Indikator Kinerja | Indikator | Jumlah Sasaran | Jumlah Populasi | Penanganan PMKS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anak Terlantar | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | Persentase jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti | 654 | 654 | 84 | 12,8 |
| 3 | Lanjut Usia Terlantar | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | Persentase jumlah penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 1.971 | 4.132 | 2.468 | 125,2 |
| 4 | Gelandangan Pengemis | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | Persentase jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 151 | 98 | 68 | 45 |
| 5 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | | 42 | 42 | 100 |

*Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, 2020*

### 2.3.2. Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan secara umum di Kabupaten Klaten pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan dari 2,51% di tahun 2016 menjadi 4,35% di tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Klaten berhasil menurunkan TPT sebesar 0,80% sehingga tahun 2019 mencapai 3,55%. Namun karena adanya dampak Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan TPT Kabupaten Klaten naik lagi menjadi 5,46%. Capaian indikator rasio penduduk yang bekerja berbanding lurus dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 72,55% di tahun 2016 menjadi 68,12% di tahun 2020.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah mendorong pada perusahaan untuk memberikan hak-hak dasar pekerja/buruh dengan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jaminan tersebut berupa terdaftarnya pekerja ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan masuknya tenaga kerja ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi resiko atas pekerjaannya tersebut. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek pada

tahun 2020 sebesar 43,12%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana salah satu yang mempengaruhi terhadap turunnya peserta program Jamsostek adalah karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap Pemutusan hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh/pekerja.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja juga dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ada, hanya saja capaian kinerjanya masih sangat rendah. Di tahun 2020, persentase tenaga kerja di Kabupaten Klaten yang bersertifikat kompetensi baru sebesar 3,51%. Selain itu, penempatan pencari kerja terdaftar juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena capaiannya baru sebesar 21,11% di tahun 2020.

Dalam rangka membangun tenaga yang lebih berkualitas dan produktif maka perlu adanya perencanaan tenaga kerja daerah untuk lima tahun ke depan. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD). Sedangkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota tahun 2016 tercatat sebesar 35,15, dan kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 21,11%. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.44**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 20 | 6,38 | 4,47 | 10,06 | 11,98 |
| 2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 29,41 | 79 | 57,10 | 66,7 | 55,56 |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,51 | 4,35 | 3,11 | 3,55 | 5,46 |
| 4. | Rasio penduduk yang bekerja | % | 72,55 | 68,31 | 68,27 | 64,54 | 68,12 |
| 5. | Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan | % | 22,14 | 23,55 | 21,84 | 27,10 | 25,01 |
| 6. | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | - | - | - | 3,39 | 3,51 |
| 7. | Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | % | 35,15 | 22,19 | 20,56 | 17,27 | 21,11 |
| 9. | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota | % | 35,15 | 22,19 | 20,56 | 17,27 | 21,11 |

*Sumber: Disperinaker Kabupaten Klaten, 2020*

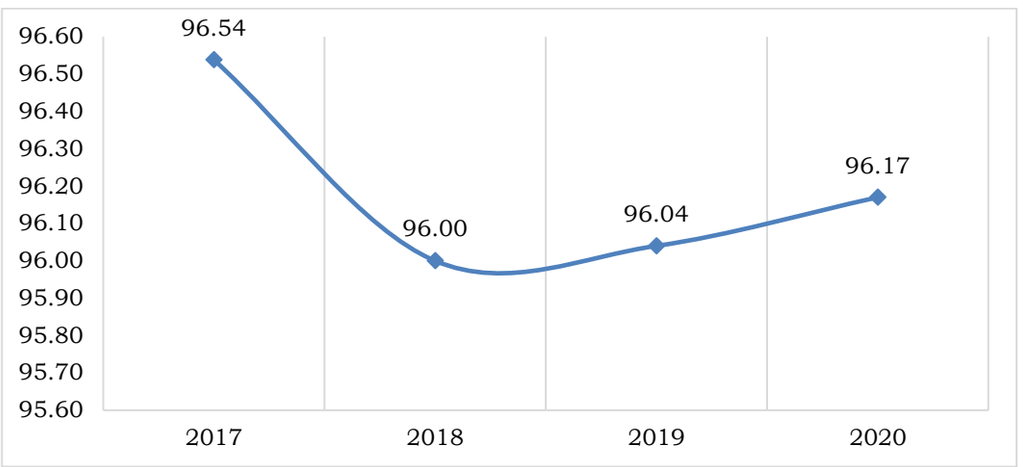
Dalam menghadapai era revolusi industri 4.0 sertifikasi tenaga kerja dan angkatan kerja perlu dititikberatkan pada kompetensi untuk peningkatan dan pembaharuan *skill* yang mendasarkan pada kebutuhan era revolusi industri yang mampu memenuhi tenaga kerja dan angkatan kerja sesuai dengan kompetensi dasar industri 4.0 agar bisa bertahan dan memiliki jiwa *entrepreneurship* pada era revolusi industri 4.0. Pada saat ini banyak lapangan pekerjaan yang mensyaratkan tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi, oleh karena itu kedepan perlu didorong sertifikasi tenaga kerja di berbagai bidang.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang mengemban amanah dalam hal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Urusan ini memberikan kontribusi penting dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

**a. Capaian IPG dan IDG**

Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Klaten cukup baik. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Klaten menempati urutan ke enam se-Jawa Tengah dengan capaian IPG 96,17. Capaian IPG ini menunjukan rendahnya kesenjangan gender serta semakin baiknya pembangunan responsif gender. Hal ini bisa ditunjukkan dari capaian IPM laki-laki sudah mencapai 77,46 dan perempuan 74,47. Perkembangan IPG tahun 2017-2020 semakin menurun, namun penurunannya sangat kecil. Capaian IPG tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.75.**
**Grafik Capaian IPG Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

Menurunnya capaian IPG ini dapat dilihat dari indikator pembentuk yaitu pengeluaran perkapita penduduk laki-laki menurun di tahun 2018 ke 2019 dan 2020, sementara untuk penduduk perempuan mengalami stagnasi perkembangan. Sementara itu kesenjangan gender terjadi pada laki-laki khususnya capaian angka harapan hidup dan harapan lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Kesenjangan gender yang dialami

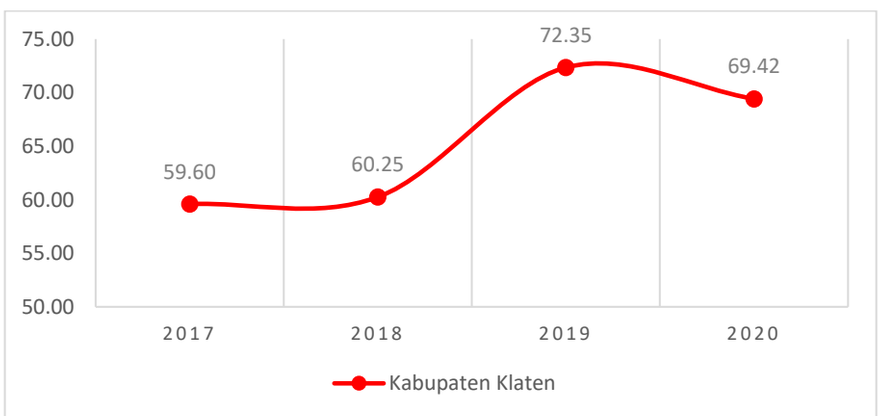
perempuan yaitu pada capaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang berada dibawah posisi penduduk laki-laki. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut.

**Tabel 2.45**
**Capaian Indikator Pembentuk IPG Tahun 2017-2020**

| Tahun | Jenis Kelamin | Harapan Lama Sekolah | Rata-Rata Lama Sekolah | Usia harapan hidup | Pengeluaran Perkapita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | laki-laki | 12,61 | 8,92 | 74,81 | 12.435 |
| | perempuan | 13,34 | 7,62 | 78,53 | 11.083 |
| 2018 | laki-laki | 12,97 | 8,93 | 74,87 | 12.281 |
| | perempuan | 13,35 | 7,65 | 78,58 | 11.334 |
| 2019 | laki-laki | 13,08 | 8,94 | 74,88 | 13.298 |
| | perempuan | 13,46 | 7,77 | 78,60 | 11.439 |
| 2020 | laki-laki | 13,09 | 9,17 | 75,01 | 13.141 |
| | perempuan | 13,50 | 8,07 | 78,69 | 11.439 |

*Sumber : https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3*
*Keterangan: Tahun 2016 BPS tidak menghitung IPG Kab/Kota*

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga mengamatkan pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diukur dari persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga professional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Perkembangan IDG menunjukan hasil yang positif, pada periode 2017-2019 terus menanjak hingga mencapai 72,35, namun di tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 69,42. Gambaran selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut.




*Sumber : https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3*

**Gambar 2.76.**
**Perkembangan IDG Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

Memperhatikan capaian IDG di Kabupaten Klaten menunjukkan kondisi yang semakin baik. Indikator keterlibatan perempuan di parlemen merangkak naik hingga ditahun 2019 mencapai 18,00% dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 6,00%, namun di tahun 2020 turun menjadi 16,00%. Pada indikator perempuan sebagai tenaga profesional juga menunjukkan peningkatan, dari 43,65% di tahun 2017 menjadi 60,72% di tahun 2020. Untuk

indikator sumbangan pendapatan perempuan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi dari 37,76% di tahun 2017 menjadi 37,72% di tahun 2020. Selengkapnya capaian indikator pembentuk IDG dapat dilihat pada tabel berikut.

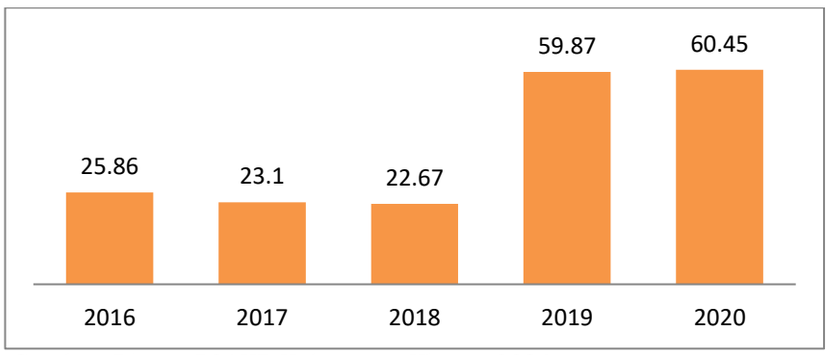
**Tabel 2.46**
**Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IDG**
**Tahun 2017-2020**

| Indikator Pembentuk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen) | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 16,00 |
| Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen) | 43,65 | 52,71 | 55,73 | 60,72 |
| Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen) | 37,76 | 37,77 | 37,81 | 37,72 |

*Sumber:https://jateng.bps.go.id/indicator/40/138/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html*

**b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 yaitu 25,86% menurun pada tahun 2018 menjadi 22,67%, meningkat di tahun 2019 menjadi 59,87% dan 2020 mencapai 60,45%. Capaian ini signifikan dengan indikator pembentuk IDG yaitu persentase perempuan profesional yang terus meningkat dari tahun 2016 ke 2020, yang gambaran selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut.



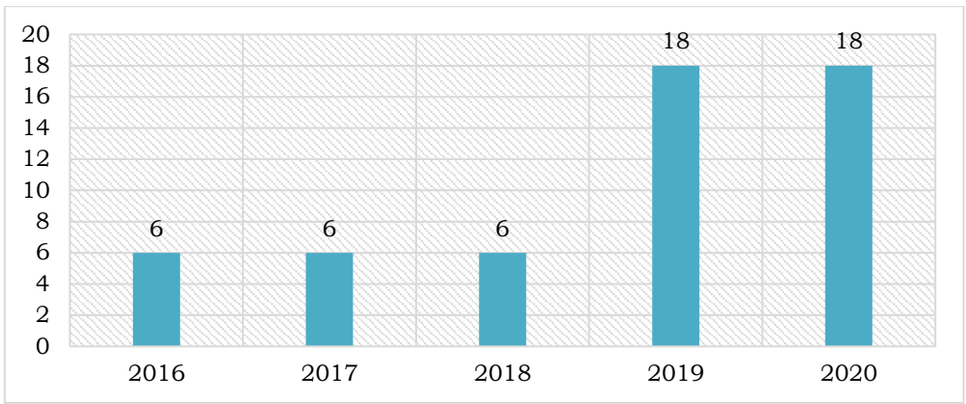

*Sumber: Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.77.**
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

**c. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD**

Undang-undang Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2011 hingga perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberi peluang perempuan sebanyak 30% menjadi wakil di parlemen baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota. Peluang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut bahkan diperluas termasuk penyelenggaraan pemilihan umum yang harus menempatkan perempuan sebanyak 30%. Meskipun pencapaian perempuan di legislatif belum memenuhi kuota yang

ditetapkan, namun upaya afirmasi ini telah membuahkan hasil, dan mendorong berbagai pihak untuk menempatkan perempuan sebagai bagian dari representasi wakil rakyat. Pencapaian indikator pembentuk IDG ini akan stabil dalam posisi lima tahunan sesuai siklus pemilu, jika capaiannya rendah maka dalam kurun waktu lima tahun posisi indikator akan berpengaruh pada capaian IDG. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 6% meningkat menjadi sebesar 18% ditahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan untuk berpartisipasi menjadi anggota DPRD semakin tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

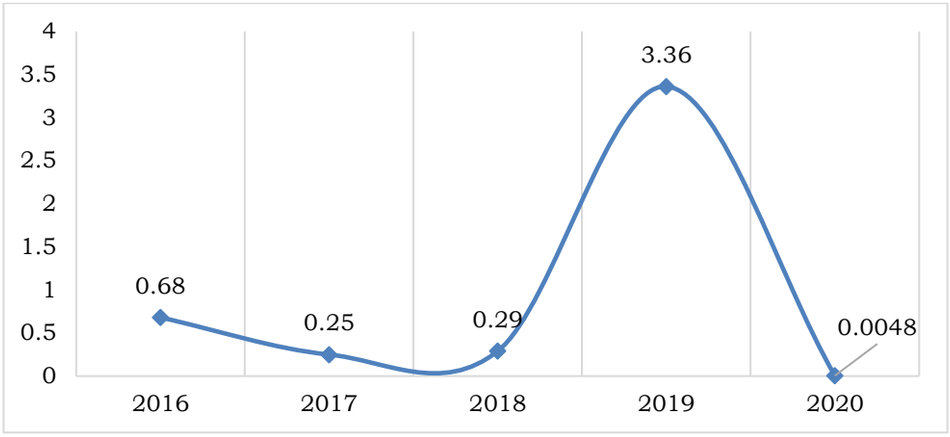



*Sumber: Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.78.**
**Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kab. Klaten Tahun 2016-2020**

**d. Rasio KDRT**

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Angka rasio KDRT di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 0,68 meningkat menjadi 3,36 pada tahun 2019, dan sebesar 0,0048 pada tahun 2020. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.79.**
**Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Selengkapnya capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini..

**Tabel 2.47**
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 25,86 | 23,1 | 22,67 | 59,87 | 60,45 |
| 2 | Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR | % | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 3 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | % | 74,14 | 59,99 | NA | NA | NA |
| 4 | Rasio KDRT | % | 0,68 | 0,25 | 0,29 | 3,36 | 0,0048 |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 73,97 | 96,54 | 96 | 96,04 | 96,17 |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 59,59 | 59,6 | 60,25 | 72,35 | NA |
| 7 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | NA | NA | NA | 0,7 | 0,2 |
| 8 | Skor Capaian KLA | Skor | NA | 630 | 670 | 690 | NA |
| 9 | Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran | % | 32,3 | 32,3 | 58,1 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak | % | 8,1 | 8,1 | 9,7 | 25,0 | 28,8 |
| 11 | Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Persentase desa/kelurahan layak anak | % | 3,2 | 3,2 | 18,0 | 62,8 | 65,1 |
| 14 | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar | % | 3,69 | 3,29 | 3,12 | 0,57 | 5,68 |

*Sumber: Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021*

### 3. Pangan

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, salah satunya mengamanatkan ketersediaan dan keamanan pangan, yang menugaskan kepada Kabuapten/Kota untuk selalu menjaga ketersediaan dan keamanan pangan. Berdasarkan KLHS RPJMD, perhitungan data dukung pangan menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Produksi Beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk dan jumlah produksi padi.

Total produksi padi tahun 2019 mencapai 435.689 ton, dengan konversi Gabah Kering Giling/GKG ke beras sebesar (1 Kg GKG = 0,6384

Kg Beras) maka diperkirakan produksi beras mencapai 278.144 ton. Sementara itu angka konsumsi beras (kg/orang/tahun) sebesar 124,86 maka kebutuhan pangan di Kabupaten Klaten adalah 165.305,53 ton. Nilai tingkat produktivitas tahun 2019 sebesar 0,21 ton/org/hari, menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten mengalami surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk. Perhitungan daya dukung lahan sawah 2019 (α) sebesar 2,96 menunjukkan bahwa α > 1 sehingga Kabupaten Klaten tersebut mampu swasembada pangan.

Ketersediaan beras merupakan aspek penting dalam pembangunan ketahanan pangan daerah, sehingga ketersediaannya perlu untuk diperhatikan. Selain menjadi bahan makanan, beras juga dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan daerah. Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang memiliki komoditas unggulan besar di samping mendapatkan predikat lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah. Produksi beras di Kabupaten Klaten berlimpah hingga pada tahun 2020 produksi padi surplus sebesar 141.068,17 ton. Total penyediaan padi pada tahun 2020 adalah sebesar 267.611,10 ton dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 126.542,93 ton.

Selain padi, salah satu komoditas utama yang memiliki total produksi berlimpah adalah jagung. Pada tahun 2020 penyediaan jagung di Kabupaten Klaten mencapai 76.923,09 ton dari total kebutuhan konsumsi jagung sebesar 1.055,62 ton. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Klaten memiliki surplus terhadap penyediaan jagung sebesar 75.867,46 ton pada tahun 2020. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh beberapa komoditas lainnya, seperti Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Daging, Telur, dan Susu serta Ikan. Secara rinci total ketersediaan bahan makanan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.48**
**Ketersediaan Bahan Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| Komoditi | Produksi | Penyediaan | Kebutuhan | +/- | Konsumsi Per Kapita | Faktor Konversi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (kg/kap/ tahun) | (100-angka susut) |
| Padi | 450.411,66 | 267.611,10 | 126.542,93 | 141.068,17 | 95,90 | 62,74% |
| Jagung | 86.430,44 | 76.923,09 | 1.055,62 | 75.867,46 | 0,80 | 89,00% |
| Kedelai | 1.282,34 | 1.213,87 | 13.195,30 | -11.981,43 | 10,00 | 94,66% |
| Kacang Tanah | 912,10 | 788,87 | 131,95 | 656,92 | 0,10 | 86,49% |
| Kacang Hijau | 810,36 | 753,63 | 263,91 | 489,73 | 0,20 | 93,00% |
| Ubi Kayu | 24.190,76 | 23.191,68 | 8.576,95 | 14.614,73 | 6,50 | 95,87% |
| Ubi Jalar | 520,04 | 457,64 | 1.319,53 | -861,89 | 1,00 | 88,00% |
| Gula | 3.195,97 | 3.164,65 | 5.827,92 | -2.663,27 | 4,42 | 99,02% |
| Daging | 10.222,91 | 9.711,76 | 8.313,04 | 1.398,73 | 6,30 | 95,00% |
| Telur | 10954,85 | 10.730,28 | 8.972,80 | 1.757,47 | 6,80 | 97,95% |
| Susu | 6.133,73 | 5.170,73 | 2.771,01 | 2.399,72 | 2,10 | 84,30% |
| Ikan | 28.415,34 | 27.562,88 | 20.584,67 | 6.978,22 | 15,60 | 97,00% |
| Cabai Merah | 516,17 | 500,69 | 3.853,03 | -3.352,34 | 2,92 | 97,00% |
| Cabai Rawit | 522,19 | 516,97 | 4.816,28 | -4.299,31 | 3,65 | 99,00% |
| Bawang Merah | 95,00 | 92,15 | 3.694,68 | -3.602,54 | 2,80 | 97,00% |

*Sumber: DPKPP Kabupaten Klaten, 2021*

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, dan protein per gram/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Klaten hingga tahun 2019 meningkat menjadi 92,75, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 84,80. Hal ini disebabkan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap keanekaragaman asupan bahan pangan bergizi berkurang. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Klaten ditunjukkan oleh ketersediaan beras dalam satuan ton per tahun. Kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang dinamis, yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 ketersediaan pangan utama mencapai 279.174,31 ton beras menurun menjadi 267.611,10 ton beras pada tahun 2020. Penurunan produksi padi ini diperkirakan terjadi akibat keterlambatan masa tanam pada tahun 2019 lalu akibat kemarau panjang. Keterlambatan masa tanam tersebut berdampak pada meningkatnya hama seperti tikus dan penyakit tanaman. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Klaten masih dalam batas yang optimal, mengingat kendati mengalami penurunan akan tetapi konsumsi masyarat masih dapat dipenuhi.

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, perbaikan jalan menuju sentra pertanian dan atau jalan yang menghubungkan antar sentra, serta penerapan sistem agribisnis. Dari sisi konsumsi pangan penduduk perlu ada diversifikasi pangan supaya masyarakat tidak hanya bergantung pada satu bahan pokok.

Namun demikian, ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 adalah sebesar 3.003 kkal/perkapita/hari. Kondisi tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 2.638 kkal/kapita/hari. Selain mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian ketersediaan energi per kapita di Kabupaten Klaten juga telah melewati standar yang ditetapkan dalam hasil WNPG VIII yaitu sebesar 2.200 kkal/perkapita/hari. Berbanding lurus dengan capaian tersebut, ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Klaten juga telah mengalami peningkatan secara signifikan serta telah

mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Nasional. Pada tahun 2020 ketersediaan protein mencapai 80,82 gram/kapita/hari atau mengalami surplus sebesar 23,87 gram/kapita/hari.

Lokasi pemanfaatan lahan pekarangan/rumah pangan lestari mengalami kenaikan pada Tahun 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan, dan makin sempitnya lahan pekarangan yang dimiliki serta adanya bantuan pengembangan rumah pangan lestari bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.49**
**Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Capaian | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Kelompok | 20 | 22 | 15 | 16 | 49 | 122 |
| 2. | Desa/Kelurahan | 20 | 22 | 15 | 16 | 49 | 122 |
| 3. | Kecamatan | 14 | 13 | 12 | 10 | 21 | 70 |

*Sumber: DPKPP Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

Namun demikian, di sisi lain untuk penguatan cadangan pangan meningkat signifikan dari 11.250 kg di tahun 2019 menjadi 36.000 kg di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang menganjurkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, tidak berkerumun atau melakukan aktivitas publik lainnya sehingga menurunkan keragaman maupun konsumsi pangan. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan daerah, pemerintah berupaya memberikan bantuan kebutuhan pangan kepada masyarakat sehingga dapat membantu menguatkan cadangan pangan masyarakat. Untuk mengatasi dan menangani kondisi rawan pangan di daerah di Kabupaten Klaten, pada tahun 2020 penanganannya dilakukan di 4 (empat) lokasi. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 1 (satu) lokasi. Periode 2016-2020 masih terdapat desa/wilayah rawan pangan akibat gagal panen, tahun 2020 terdapat 15 desa menjadi prioritas I, 20 desa menjadi prioritas II, dan 33 desa menjadi prioritas III penanganan desa/daerah rawan pangan.

Amanat tentang pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah untuk melakukan pengawasan guna menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Total pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020, walaupun telah mengalami peningkatan akan tetapi masih belum berjalan secara optimal. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 baru mencapai 78%. Hal ini berarti masih terdapat banyak produsen makanan yang belum diawasi sehingga berpotensi terhadap terjadinya masalah keamanan pangan di Kabupaten Klaten. Disamping itu, kondisi keamanan pangan di Kabupaten Klaten diprediksikan lebih buruk daripada data statistik yang telah tercantum karena adanya fakta *under reporting* atau fenomena gunung es dimana data kasus keracunan pangan ataupun penyakit karena pangan yang dilaporkan dan tercatat pada

lembaga resmi diperkirakan hanya kurang dari 1% dari kejadian yang sesungguhnya.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu meningkat. Namun angka tersebut masih di bawah Standar Mutu Nasional yang sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah secara garis besar diarahkan pada kegiatan: (1) koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar; dan (2) pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar. Persentase pengawasan pangan segar asal tumbuhan sampai dengan tahun 2020 tercatat sebesar 78%, dan ke depan menjadi tantangan tersendiri untuk terus ditingkatkan. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.50**
**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 57 | 60 | 65 | 73 | 78 |

*Sumber: DPKPP Kabupaten Klaten. 2021*

Secara rinci capaian kinerja Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.51**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | skor | 91,7 | 91,9 | 92,5 | 92,75 | 84,80 |
| 2. | Ketersediaan pangan utama (beras) | ton | 239.374,00 | 225.935,00 | 265.060,98 | 279.174,31 | 267.611,10 |
| 3. | Ketersediaan energi per kapita | kkal/ kapita/ hari | 2.638 | 2.717 | 2.798 | 2.881 | 3.003 |
| 4. | Ketersediaan protein per kapita | gram/ kapita/ hari | 71,38 | 73,52 | 75,72 | 77,99 | 80,87 |
| 5. | Penguatan cadangan pangan | Kg | 7.725 | 9.000 | 12.000 | 11.250 | 36.000 |
| 6. | Penanganan Daerah Rawan Pangan | lokasi | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | persen | 57 | 60 | 65 | 73 | 78 |

*Sumber: DPKPP Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**4. Pertanahan**

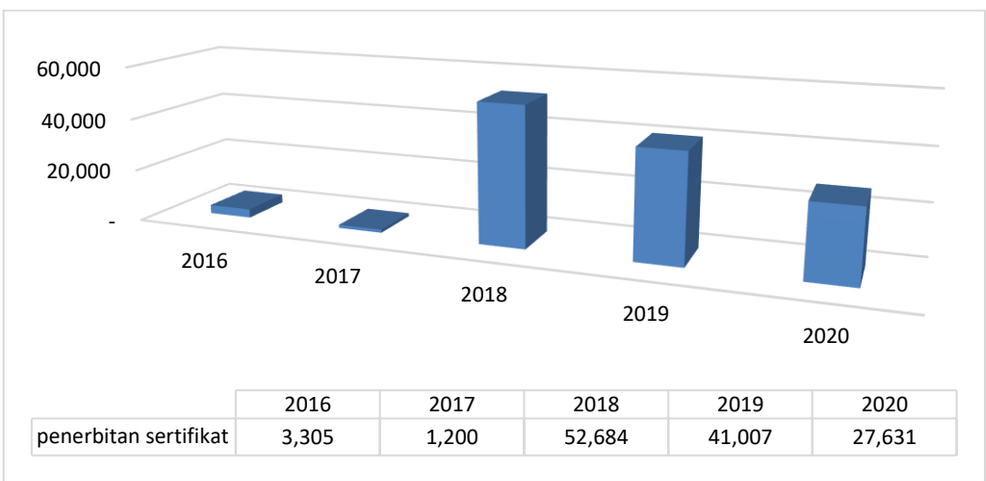
Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 menerbitkan 41.007 sertifikat sedangkan di Tahun 2020 hanya menerbitkan 25.611 sertifikat. Adapun gambaran penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.52**
**Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020**

| No | Detail Kegiatan (Bulan) | Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (bidang) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Januari | 1.456 | 1.010 | 2.703 | 2.851 | 1.102 |
| 2 | Februari | 1.099 | 577 | 2.529 | 2.999 | 1.730 |
| 3 | Maret | 1.006 | 590 | 3.097 | 4.667 | 6.148 |
| 4 | April | 907 | 1.565 | 3.653 | 5.588 | 5.667 |
| 5 | Mei | 2.539 | 1.195 | 4.545 | 6.232 | 3.444 |
| 6 | Juni | 1.691 | 1.450 | 3.202 | 4.927 | 420 |
| 7 | Juli | 875 | 2.491 | 5.040 | 2.495 | 1.194 |
| 8 | Agustus | 1.236 | 2.055 | 5.594 | 4.818 | 927 |
| 9 | September | 1.281 | 2.258 | 6.209 | 1.770 | 1.041 |
| 10 | Oktober | 843 | 11.236 | 7.556 | 1.754 | 1.342 |
| 11 | November | 1.189 | 5.485 | 3.786 | 1.226 | 1.286 |
| 12 | Desember | 669 | 4.365 | 4.770 | 1.680 | 1.310 |
| **TOTAL** | | **3.305** | **1.200** | **52.684** | **41.007** | **25.611** |

*Sumber: Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2020*

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018, dan tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan karena terdapat program pemutihan sertifikat dari Pemerintah Pusat.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| penerbitan sertifikat | 3,305 | 1,200 | 52,684 | 41,007 | 27,631 |

*Sumber: Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2020, diolah*

**Gambar 2.80.**
**Penerbitan Sertifikat Hak Tanah yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 2.042 bidang yang terdiri dari 672 bidang tanah, 338 ruas jalan kabupaten dan 1032 ruas jalan lingkungan. Dari total tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten, yang bersertifikat baru 583 bidang tanah dan 4 ruas jalan kabupaten, sedangkan yang lain masih proses sertifikasi *(Sumber: BPKD Kab Klaten, per 31 Maret 2021)".*

**5. Lingkungan Hidup**

**a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukan trend peningkatan, dari 39,74 di tahun 2016 menjadi 52,85. Hal ini menggambarkan status lingkungan yang kurang baik. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, di mana semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan semakin baik kondisi lingkungannya.

Perhitungan IKLH merupakan komponen dari 30% Indeks Kualitas Udara (IKU); 30% Indeks Kualitas Air (IKA) dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dalam peengujian kualitas air permukaan tahun 2020 dilakukan di 29 titik yang meliputi Rowo Jombor dan 8 Sungai (Woro, Soran, Modin, Kroman, Pusur, Modran, Kacang Ijo, dan Sungai Merbung) menunjukkan Indeks Pencemaran Air di Kabupaten Klaten sebesar 36,15 (cemar berat, menurut Permen LH Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air). Untuk kualitas udara, dari hasil pengukuran di 9 titik diketahui nilai indeks udara Kabupaten Klaten sebesar 76,82 (baik). Cakupan pemantauan terhadap kualitas udara, air dan tutupan lahan sudah dilakukan dengan capaian 100% setiap tahunnya. Selengkapnya, hasil pengukuran IKLH beserta kompositnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.53**
**Capaian IKLH Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Tahun | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Air | Indeks Tutupan Lahan | IKLH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 60,95 | 16 | 41,64 | 39,74 |
| 2 | 2017 | 83,3 | 18,28 | 42,54 | 47,49 |
| 3 | 2018 | 83,17 | 18,28 | 42,54 | 47,45 |
| 4 | 2019 | 82,29 | 28,46 | 42,54 | 50,24 |
| 5 | 2020 | 76,82 | 36,15 | 42,54 | 52,85 |

*Sumber: DLHK Kabupaten Klaten, 2021*

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 sebesar 35%, kemudian meningkat di 2019 menjadi 50%. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya juga sudah mencapai 100%, ini berarti bahwa semua pengaduan terkait

lingkungan hidup sudah ditindaklanjuti semua, di mana gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian indikator Ruang Terbuka Hijau yang terkelola dengan baik pada tahun 2016-2019 sebesar 100%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,66%. Penurunan capaian ini salah satunya disebabkan adanya recofusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Pemeritah Kabupaten Klaten juga telah melalukan rehabilitasi terhadap lahan kritis, terutama yang berada di lereng merapi akibat kegiatan pertambangan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 5,04% terhadap total lahan kritis.

**Tabel 2.54**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Cakupan pemantauan kualitas air | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cakupan pemantauan kualitas udara | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Presentase kampung iklim yang terbentuk | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 15.3.1.(a) | % | NA | NA | NA | 4,41 | 5,04 |
| Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,66 |
| Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 | % | 0 | 0 | 76 | 83 | 83 |
| Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | % | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 |
| Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase saka kalpataru yang dibina | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah / Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten | orang | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten | % | NA | NA | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: DLHK Kabupaten Klaten, 2020*

**b. Persampahan**

Penanganan sampah di Kabupaten Klaten dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui penanganan (pengolahan) dan pengurangan dari sumber sampah. Sampah yang tertangani di TPA selama kurun waktu 5 tahun terakhir capaiannya terus meningkat, dari 12,89% di tahun 2016 menjadi 50,66% di tahun 2020. Seiring dengan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, pengurangan terhadap timbulan sampah melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan setempat juga terus meningkat, dari 16% di tahun 2017 menjadi 52,73% di tahun 2020. Untuk penanganan sampah di perkotaan, capaian pada tahun 2020 sebesar 98,09%, di mana gambaran kinerja persampahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.55**
**Capaian Kinerja Persampahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase sampah yang tertangani di TPA | % | 12,89 | 14,72 | 16,16 | 23,8 | 50,66 |
| Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan setempat | % | NA | 16 | 29 | 48,02 | 52,73 |
| Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani | % | NA | NA | NA | 95,31 | 98,09 |

*Sumber: DLHK Kabupaten Klaten, 2021*

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas/administrasi kependudukan. Rasio penduduk ber-KTP di tahun 2020 mencapai 0,94 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pelayanan Pencatatan Sipil dilihat dari akte kematian pada tahun 2016 tercatat sebanyak 292 akte kematian yang diterbitkan, meningkat cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 10.072 akte kematian yang di terbitkan. Peningkatan tersebut dikarenakan masyarakat sudah memahami tentang pentingnya akte kematian. Pelayanan pencatatan sipil dilihat dari akte perkawinan yang diterbitkan selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016-2020), di mana tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 4.102 akte, sementara di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 2.698 akte. Kondisi tersebut dikarenakan tidak semua perkawinan non muslim langsung dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase OPD dalam pemanfaatan data sampai dengan tahun 2020 sebesar 13,73% dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Hal ini berarti bahwa baru 7 OPD yang sudah bekerja sama dan mendapatkan hak akses data kependudukan yang sudah di setujui oleh Dirjen Dukcapil.

Gambaran Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 2.56**
**Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | rasio | 0,88 | 0,9 | 0,89 | 0,89 | 0,94 |
| 2. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | sudah | sudah | sudah | sudah | sudah |
| 3. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 88,47 | 89,64 | 89,98 | 89,91 | 94,93 |
| 4. | Jumlah Pelayanan Akte | | | | | | |
| | a. Kelahiran | dok | 22.356 | 23.256 | 27.755 | 23.295 | 19.511 |
| | b. Kematian | dok | 292 | 1.374 | 2.098 | 8.431 | 10.072 |
| | c. Perkawinan | dok | 404 | 903 | 295 | 4.102 | 2.698 |
| | d. Perceraian | dok | 58 | 58 | 71 | 63 | 160 |
| 5. | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama | | - | - | - | - | 13,73 |
| 6. | Persentase perekaman KTP elektronik | % | 90,59 | 90,14 | 92,23 | 94,21 | 97,87 |
| 7. | Cakupan kepemilikan KK | % | 94 | 94,62 | 94,34 | 95,28 | 97,68 |
| 8. | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 24,61 | 29,6 | 36,81 | 42 | 46,84 |
| 9. | Cakupan penerbitan akta kematian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Cakupan penerbitan akta perceraian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Cakupan penerbitan akta pengesahan anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Cakupan penerbitan pengangkatan anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Persentase ketersediaan database kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2021*

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Jumlah LPMD di Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir (2016-2020) jumlahnya tetap yaitu sebanyak 291 LPMD. Pada setiap tahunnya, LPMD/LPMK dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu maupun program lainnya. Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.

LPMD di Kabupaten Klaten cukup berkembang dengan adanya peningkatan dari kelompok binaan PKK yang terus meningkat setiap tahunnya dari 26 kelompok di tahun 2016 menjadi 52 kelompok di tahun 2020. PKK aktif jumlahnya cenderung tetap selama lima tahun terakhir sebanyak 428 desa. Jumlah posyandu aktif selama lima tahun terakhir (2016-2020) jumlahnya meningkat dari sebanyak 2.262 unit menjadi 2.313

di tahun 2020 . Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena fungsi LPMD sendiri adalah membantu pemerintah desa dalam hal penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Berikut capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016 hingga tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57**
**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah kelompok binaan PKK | Kelompok | 26 | 39 | 52 | 52 | 52 |
| Jumlah LPMD | Lembaga | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Jumlah PKK aktif (Kelembagaan PKK ) | Desa | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Jumlah Posyandu aktif | Unit | 2.262 | 2.272 | 2.272 | 2.313 | 2.313 |
| Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa | desa | - | - | - | - | - |
| desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase PKK Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Posyandu Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Posyantek Aktif | % | - | - | 11,11 | 18,18 | 18,18 |

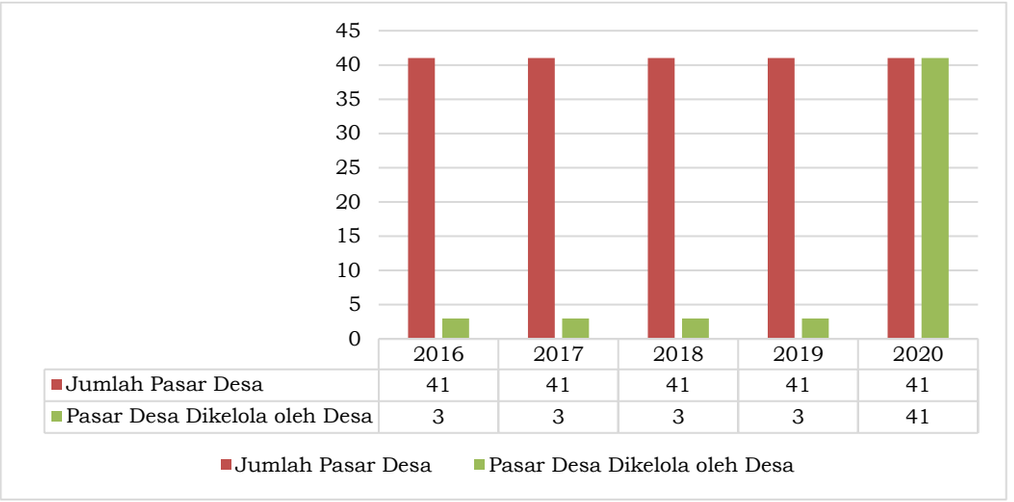
*Sumber: Dispermades Kab. Klaten, 2020*

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, karena belum optimalnya dukungan dana dan komitmen dari Pemerintah Desa. Dari 357 BUMDesa yang ada di Kabupaten Klaten saat ini diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. BUMDesa Dasar sejumlah 167;
2. BUM Desa Tumbuh sejumlah 159;
3. BUM Desa Berkembang sejumlah 21;
4. BUM Desa Maju sejumlah 10.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDesa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Jumlah BUMDes di Kabupaten Klaten sampai tahun 2020 sebanyak 357 BUMDes. Guna memperkuat kerjasama antar desa dan untuk mengantisipasi adanya kecemburuan antar desa diperlukan juga adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) berdasarkan pada potensi ataupun permasalahan yang sama.

Untuk jumlah pasar desa dari tahun ke tahun sama sebanyak 41 pasar desa yang mana dari tahun 2016-2019 hanya 3 pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Mulai tahun 2020 pengelolaan pasar desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa. Sedangkan jumlah kerja sama antar desa dari tahun 2016 sampai 2020 belum ada karena kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan di RPJMD tahun 2021-2026.




*Sumber: Dispermades Kab. Klaten, 2020, data diolah*

**Gambar 2.81.**
**Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

Pada tahun 2016 terdapat pembangunan kawasan pedesaan, yaitu pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pembangunan kawasan perdesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Penempatan lokasi tersebut di dasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada Tahun 2017-2018, Pembangunan kawasan perdesaan ada 9 Pembangunan kawasan pedesaan dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

1). Pembangunan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pembangunan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.
2). Pembangunan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pembangunan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
3). Pembangunan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nangsri di Kecamatan Manisrenggo. Pembangunan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
4). Pembangunan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pembangunan kawasan desa wisata wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi.
5). Pembangunan Kawasan Pertanian Organik meliputi Desa Gempol, Desa Jeblog, Desa Ngabeyan dan Desa Pondok Kecamatan Karanganom. Pembangunan kawasan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
6). Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu meliputi Desa Gondang, Desa Basin, Desa Pluneng, Desa Malang jiwan, Desa Karangduren, Desa Ngrundul, dan Desa Menden Kecamatan Kebonarum, Pembangunan

kawasan wisata terpadu tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

7). Pembangunan Kawasan Industri Rumah Tanggadan Pangan Lestari, meliputi Desa Kranggan, Desa Keprabon, dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo, Pembangunan kawasan industri rumah tangga dan pangan lestari tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

8). Pembangunan Kawasan Wisata Air dan Pertanian, meliputi Desa Janti, Desa Sidowayah, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo, Pembangunan kawasan wisata air dan pertanian tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

9). Pembangunan Kawasan Wisata Budaya meliputi Desa Taji, Desa Kemudo, Desa Bugisan, Desa Tlogo, Desa Pereng, dan Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan. Pembangunan kawasan wisata budaya tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

**Tabel 2.58**
**Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Tahun | Nama / Tema Kawasan | Lokasi | Tahap Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **2016** | Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan | Kecamatan Wedi : Ds, Kaligayam, Ds, Kadilanggon, Ds, Melikan | Sudah menyusun RPKP | SK Bupati No, 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kab, Klaten |
| **2017** | Kawasan Sentra Batik | Kecamatan Bayat : Ds, Jarum, Ds, Banyuripan, Ds, Beluk, Ds, Kebon | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten |
| | Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik | Kecamatan Cawas : Ds, Tlingsing, Ds, Mlese, Ds, Balak, Baran | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten |
| | Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi | Kecamatan Manisrenggo : Ds, Taskombang, Ds, Solodiran, Ds, Kranggan, Ds, Nangsri | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten |
| | Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi | Kecamatan Kemalang : Ds, Balerante, Ds, Sidorejo, Ds, Bumiharjo | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten |
| **2018** | Kawasan Wisata Budaya | Desa Taji, Desa Kemudo, Desa Bugisan, Desa Tlogo, Desa Pereng, dan Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentangLokasi Pembangunan Perdesaan di Kab, Klaten |
| | Kawasan Pertanian Organik | KecamatanKarangano m : Ds, Gempol, Ds, Jeblog, Ds, Ngabeyan, Ds, Pondok | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentangLokasi Pembangunan Perdesaan di KabupatenKlaten |
| | Kawasan Wisata Terpadu | KecamatanKebonaru m : Ds, Gondang, Ds, Basin, Ds, Pluneng, Ds, Malangjiwan, Ds, Karangduren, Ds, | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentangLokasi Pembangunan Perdesaan di KabupatenKlaten |

| Tahun | Nama / Tema Kawasan | Lokasi | Tahap Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Ngrundul, Dan Ds, Menden | | |
| | Kawasan IRT dan Pangan Lestari | KecamatanPolanharjo : Ds, Kranggan, Ds, Keprabon, Ds, Kebonharjo | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentangLokasi Pembangunan Perdesaan di KabupatenKlaten |
| | Kawasan Wisata Air dan Pertanian | KecamatanPolanharjo : Ds, Janti, Ds, Sidowayah, Ds, Sidoharjo | Proses penyusunan RPKP | SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentangLokasi Pembangunan Perdesaan di KabupatenKlaten |
| **2019** | Kawasan Peternakan Kambing | KecamatanNgawen: Ds, Gatak, Ds, Duwet, Ds, Manjung | Proses SK Bupati | |
| | Kawasan Wisata Air dan Perikanan | KecamatanTulung: Ds, Wunut, Ds, Cokro, Ds, Daleman, Ds, Dalangan | Proses Persetujuan KerjasamaantarDesa | |
| | Kawasan Pertanian Terpadu | KecamatanDelanggu: Ds, Dukuh, Ds, Jetis, Ds, Butuhan, Ds, Banaran, Ds, Bowan, Ds, Sribit, Ds, Mendak, Ds, Krecek, Ds, Karang, Ds, Sabrang, Ds, Tlobong, Ds, Gatak, Ds, Delanggu, Ds, Kepanjen, Ds, Segaran, Ds, Sidomulyo, | Proses Persetujuan KerjasamaantarDesa | |
| **2020** | – | – | – | – |

*Sumber: Dispermades Kab, Klaten, 2021*

Dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan pelatihan teknologi tepat guna kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan teknologi tepat guna.

**Tabel 2.59**
**Pelatihan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1, | Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan | 1,Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kecamatan Tulung | 1, Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang<br>2, Pelatihan Ternak Lele dengan metode *Bioflock* Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa | 1,Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Solodiran Kecamatan Manisrenggo<br>2,Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo | 1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom<br>2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Karangan Kecamatan Karanganom | – |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat<br>3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo | 3,Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo<br>4,Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo | 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Karanganom Kecamatan Karanganom<br>4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Jungkare Kecamatan Karanganom<br>5. Pelatihan pertanian hidroponik di Desa Kahuman Kecamatan Ngawen | |
| 2, | Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan | 1, Posyantek Kecamatan Kemalang<br>2, Posyantek Kecamatan Tulung | 1, Posyantek Kec, Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No, 414,4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten)<br>2, Posyantek Kecamatan Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No, 414,4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten) | 1,Posyantek antar desa TA 2018 di Kecamatan Cawas, Kecamatan Wedi<br>2,Posyantek antar desa TA 2018 di Kecamatan Wedi | 1, Posyantek antar desa Kecamatan Manisrenggo<br>2, Posyantek antar desa Kecamatan Trucuk | _ |

*Sumber: Dispermades Kab, Klaten, 2021*

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tujuan Pembangunan Penduduk dan Keluarga Berencana adalah melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk dan melakukan pengaturan jarak kehamilan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan kabupaten dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah melakukan

sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dari pemerintah pusat dan daerah, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan sub urusan Keluarga Berencana adalah pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal, peningkatan peran penyuluh KB, pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, dan peningkatan partisipasi penggunaan alat kontrasepsi. Kewenangan sub urusan Keluarga Sejahtera adalah pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,07% di tahun 2016 dapat ditekan menjadi 0,30% di tahun 2020. Untuk *Total Fertility Rate* capaiannya tetap selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) yaitu sebesar 2,1. Angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun menunjukkan kondisi cukup fluktuatif dari 78,7% di tahun 2016 menurun menjadi 69,7% di tahun 2018, kemudian meningkat dengan capaian di tahun 2020 sebesar 70,9%. Angka ini relatif cukup baik dibandingkan dengan target nasional (65%). Penurunan cakupan peserta KB aktif dikarenakan adanya pemutakhiran menggunakan nomor KK, di mana untuk indikator *unmet need* di tahun 2020 tercatat sebesar 16,95%, sedangkan untuk capaian indikator rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa atau kelurahan sudah mencapai 100% sejak tahun 2016-2020.

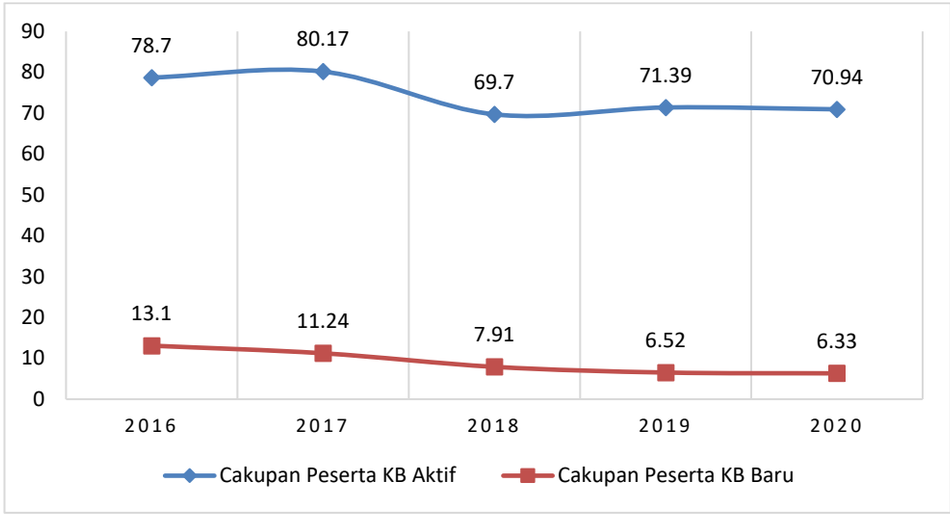
Berikut gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Klaten yang dapat dilihat dari beberapa indikator.

**Tabel 2.60**
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 1,07 | 1,03 | 0,46 | 0,20 | 0,30 |
| *Total Fertility Rate (TFR)* | Anak per usia subur | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | % | 78,7 | 64,93 | 69,7 | 71,39 | 70,9 |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)* | % | 10,13 | 9,3 | 27,3 | 15,91 | 16,95 |
| Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cakupan anggota BKB yang menjadi peserta KB | % | 79,3 | 77 | 74,7 | 78,9 | 79 |
| Cakupan anggota BKR yang menjadi peserta KB | % | 73,5 | 60,9 | 62,9 | 60,4 | 70,7 |
| Cakupan anggota BKL yang menjadi peserta KB | % | 73,3 | 69,2 | 72,4 | 71,1 | 73,9 |
| Cakupan anggota UPPKS yang menjadi peserta KB | % | 75,1 | 66,3 | 65,2 | 69,4 | 69,2 |

*Sumber: Dinas Sosial, P3AKB Kab, Klaten, 2020*

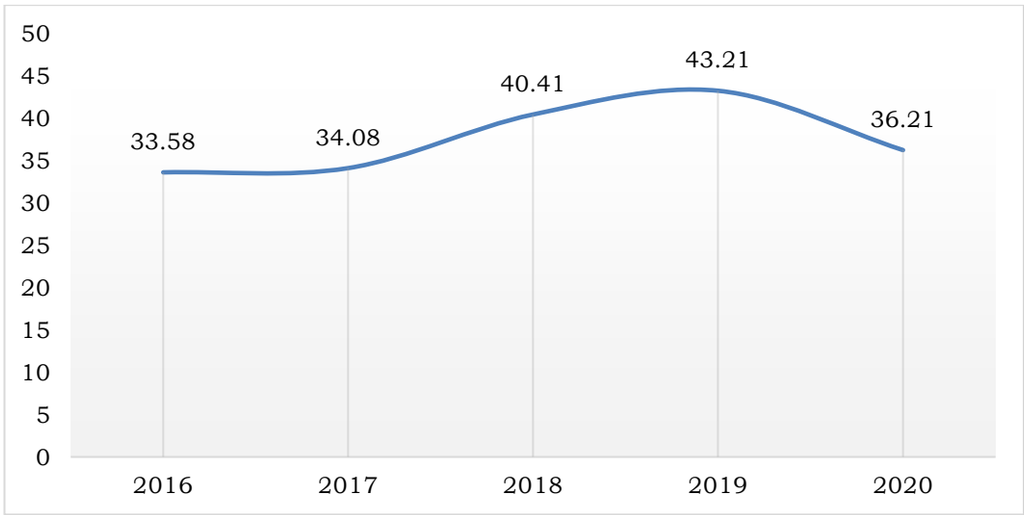
Untuk cakupan peserta KB baru juga mengalami penurunan, dari sebesar 13,1% di tahun 2016 menjadi 6,33% di tahun 2020. Kondisi ini menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan akseptor takut untuk datang ke faskes KB, selain itu mulai tahun 2020 tidak ada baksos pelayanan KB melalui safari KB.




*Sumber: Dinas Sosial, P3AKB Kab, Klaten, 2020, data diolah*

**Gambar 2.82.**
**Cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari 33,58% di tahun 2016 menjadi 43,21% di tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7%. Secara umum, jumlah keluarga pra sejahtera terus dapat ditekan, data tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, meskipun belum mencapai hasil yang optimal.




*Sumber: Dinas Sosial, P3AKB Kab, Klaten, 2020, data diolah*

**Gambar 2.83.**
**Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

**9. Perhubungan**

Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/ LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara dan perkeretaapian. Pemerintah Daerah hanya mempunyai kewenangan pada perhubungan darat dan laut, namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan fasilitasi untuk perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut maupun udara.

**a. Perhubungan Darat**

**1) Terminal Penumpang**

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Klaten menunjukan kondisi yang sangat baik, kondisi tersebut dilihat dari capaian indeks kepuasan layanan perhubungan yang mencapai 79,49% di tahun 2020. Kabupaten Klaten memiliki 7 terminal tipe C, di mana persentase terminal yang dikelola dengan baik menunjukan peningkatan dari 28,57% di tahun 2016, meningkat menjadi 42,86% di tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggaran terminal mencakup: (1) layanan keselamatan; (2) pelayanan keamanan; (3) pelayanan kehandalan/keteraturan; (4) pelayanan kenyamanan; (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan; (6) kesetaraan. Data terminal angkutan penumpang umum di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.61**
**Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Type C di Kabupaten Klaten Tahun 2021**

| No | Terminal | Alamat | Luas | Fasilitas | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penggung | Penggung, Ceper Klaten | 4.500 m² | 1 | Kantor pengawas | Pengelolaan oleh Dinas perhubungan |
| | | | | 2 | Loket/retribusi | |
| | | | | 3 | Kios/toko/warung makan | |
| | | | | 4 | Kamar mandi/WC | |
| | | | | 5 | Parkir antar jemput | |
| | | | | 6 | Taman/penghijauan | |
| | | | | 7 | Loket agen bus | |
| 2 | Cawas | Cawas, Klaten | 3.000 m² | 1 | Kantor pengawas | Pengelolaan oleh Dinas perhubungan |
| | | | | 2 | Loket/retribusi | |
| | | | | 3 | Kios/toko/warung makan | |
| | | | | 4 | Kamar mandi/WC | |
| | | | | 5 | Musholla | |
| | | | | 6 | Ruang tunggu penumpang | |
| 3 | Teloyo | Teloyo, Wonosari Klaten | 3.310 m² | 1 | Kantor pengawas | Pengelolaan oleh Dinas perhubungan |
| | | | | 2 | Loket/retribusi | |
| | | | | 3 | Kios/toko/warung makan | |
| | | | | 4 | Kamar mandi/WC | |
| | | | | 5 | Parkir antar jemput | |

| No | Terminal | Alamat | Luas | Fasilitas | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | Ruang tunggu penumpang | |
| 4 | Pasar Klaten | Klaten Tengah | 600 m² | 1 | Loket/retribusi | Pasar Klaten dalam proses renovasi (fasilitas sedang tidak ada) |
| | | | | 2 | Kios/toko/warung makan | |
| | | | | 3 | Ruang tunggu penumpang | |
| 5 | Bendogantungan | Bendogantungan, Klaten Selatan | 3.168 m² | 1 | Loket/retribusi | Pengelolaan oleh Dinas perhubungan |
| | | | | 2 | Kios/toko/warung makan | |
| | | | | 3 | Ruang tunggu penumpang | |
| 6 | Tulung | Tulung, Klaten | 400 m² | 1 | Loket/retribusi | Pengelolaan oleh Dinas perhubungan |
| | | | | 2 | Ruang tunggu penumpang | |
| 7 | Delanggu | Karang, Delanggu Klaten | 7.000 m² | 1 | Kantor pengawas | Pengelolaan oleh Dinas perhubungan |
| | | | | 2 | Loket/retribusi | |
| | | | | 3 | Kios/toko/warung makan | |
| | | | | 4 | Kamar mandi/WC | |
| | | | | 5 | Musholla | |
| | | | | 6 | Taman/penghijauan | |
| | | | | 7 | Ruang tunggu penumpang | |
| | | | | 8 | Loket agen bus | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021*

**2) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LAJ)**

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melengkapi jalan dengan fasilitas keselamatan lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas, persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, APILL dan PJU) menunjukan peningkatan dari 0,14% pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,25% pada tahun 2020. Persentase pemenuhan guardrail dan marka jalan juga menunjukan peningkatan dari 2,79% pada tahun 2016 yang meningkat menjadi 15,65% pada tahun 2020. Capaian indikator persentase layanan angkutan darat menunjukan penurunan dari 88,90% pada tahun 2016 menurun menjadi 84,33% pada tahun 2020.

Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas mengalami perkembangan fluktuaktif, yang meskipun menunjukan peningkatan namun capaian tersebut masih relatif rendah. Masih terdapat perlengkapan jalan yang belum terpasang sebesar 40,12%. Berikut tabel persandingan antara kebutuhan dan ketersediaan perlengkapan jalan sampai dengan tahun 2026.

Terkait dengan potensi parkir, pada tahun 2020 jumlah parkir yang sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan sebanyak 31 kapling/lahan atau 83,78 % dari total potensi lahan parkir yang ada sebanyak 27 kapling/lahan parkir.

**Tabel 2.62**
**Persandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| No | Jenis | Satuan | Kebutuhan s/d 2025 | Perlengkapan jalan terpasang tahun 2020 | Target Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun ke- | | | | | | Terpasang | Persentase | Sisa Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | Rambu lalu lintas biasa | buah | 4.570 | 3.435 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | | 4.570 | 100,00 | - |
| 2 | Rambu RPPJ | buah | 200 | 140 | | 12 | 12 | 12 | 12 | | 188 | 94,00 | 12 |
| 3 | Rambu tipe F | buah | 100 | 43 | | 11 | 11 | 12 | 12 | | 89 | 89,00 | 11 |
| 4 | Marka Jalan | m2 | 67.920 | 42.920 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 62.920 | 92,64 | 5.000 |
| 5 | Traffic Light | unit | 33 | 31 | | | 1 | | 1 | | 33 | 100,00 | - |
| 6 | Traffic Light ATCS | unit | 8 | 5 | | 2 | 1 | | | | 8 | 100,00 | - |
| 7 | Guardrail | m | 4.240 | 3.240 | | 200 | 200 | 200 | 200 | | 4.040 | 95,28 | 200 |
| 8 | Paku Marka / Mata Kucing | | 2.185 | 1.685 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2.085 | 95,42 | 100 |
| 9 | Traffic Cone | | 500 | 40 | | 92 | 92 | 92 | 92 | | 408 | 81,60 | 92 |
| 10 | Deliniator | | 500 | - | | 150 | 150 | 100 | 100 | | 500 | 100,00 | - |
| 11 | Cermin tikungan | buah | 210 | 85 | | 25 | 25 | 25 | 25 | | 185 | 88,10 | 25 |
| 12 | Zona Selamat Sekolah | | 30 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 25 | 83,33 | 5 |
| 13 | Lampu Kedip / Warning Light | | 26 | 11 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 23 | 88,46 | 3 |
| 14 | Rambu elektronik VMS | | 13 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 92,31 | 1 |
| 15 | Water Barrier | | 191 | 66 | | 25 | 25 | 25 | 25 | | 166 | 86,91 | 25 |
| 16 | PJU | | 15.393 | 8.756 | | 200 | 200 | 200 | 200 | | 9.556 | 62,08 | 5.837 |
| | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **1.449,13** | |
| | **Rata-rata** | | | **59,88** | | | | | | | | **90,57** | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021*

**3) Perijinan Trayek Angkutan Umum**

Rasio ijin trayek di Kabupaten Klaten juga menunjukan peningkatan dari 0,41% di tahun 2016 meningkat menjadi 1,92% di tahun 2020. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Klaten menunjukan perkembangan fluktuaktif di tahun 2016 sebesar 94% menurun menjadi 86,91% di tahun 2018. Pada tahun 2019 kepemilikan KIR angkutan umum menunjukan peningkatan mencapai 93,78%, namun tahun 2020 kembali menurun menjadi 85,53%. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang lulus uji KIR sebanyak 13.374 unit dengan total Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) sebanyak 8.567 unit (setahun 2 kali uji). Untuk akreditasi tempat uji di Kabupaten Klaten adalah B.

Rute trayek angkutan umum di Kabupaten Klaten dibedakan menjadi dua yaitu rute trayek bus pedesaan dan rute trayek angkutan kota. Untuk rute trayek pedesaan terdapat 16 trayek dengan total panjang trayek 377 km. Sejak Pandemi Covid-19, operasional semua armada angkutan pedesaan tidak menentu. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Berikut rute trayek bus pedesaan (sesuai ijin).

**Tabel 2.63**
**Rute Trayek Bus Pedesaan di Kabupaten Klaten**
**(sesuai Ijin)**

| No | Trayek | Panjang Trayek (km) |
|---|---|---|
| 1 | Klaten-Bendo-Wedi-Bayat-Cawas PP | 27 |
| 2 | Klaten-Bendo-Wedi-Bayat-Cawas-Kr.Dowo-Pakis-Delanggu PP | 63 |
| 3 | Bendo-Penggung-Nglajur-Pakis-Tegalgondo PP | 25 |
| 4 | Klaten-Penggung-Pedan-Cawas-Jentir PP | 30 |
| 5 | Klaten-Gondang-Kemalang-Sorowono PP | 25 |
| 6 | Prambanan-Bendogantungan-Jonggrangan PP | 16 |
| 7 | Klaten-Jatinom-Tulung PP | 14 |
| 8 | Penggung-Pedan-Cawas-Jentir PP | 24 |
| 9 | Prambanan-Bendogantungan-Penggung-Delanggu PP | 32 |
| 10 | Delanggu-Pakis-Wonosari-Daleman-Kr.Dowo PP | 23 |
| 11 | Delanggu-Pakis-Wonosari-Teloyo PP | 10 |
| 12 | Klaten-Prambanan-Kepurun PP | 18 |
| 13 | Bendogantungan-Wedi-Bayat PP | 12 |
| 14 | Delanggu-Pakis-Cokro-Tulung PP | 19 |
| 15 | Klaten-Gondang-Prambanan-Manisrenggo PP | 21 |
| 16 | Prambanan-Manisrenggo-Kepurun PP | 18 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021*

Untuk rute trayek angkutan kota terdapat 16 jalur trayek dengan total panjang trayek 403 km, saat ini armada angkutan kota sudah banyak yang tidak beroperasi, trayek yang masih berjalan adalah trayek Klaten-Jatinom-Penggung PP (1F) yang beroperasional 1 kali dalam seminggu dan trayek Klaten-Tegalyoso-Kraguman-Srowot PP (1A) yang beroperasional 2 hari sekali. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi online yang dirasa lebih praktis dan efisien. berikut data trayek angkutan kota di Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.64**
**Rute Trayek Angkutan Kota di Kabupaten Klaten**

| No | Kode Trayek | Trayek | Panjang Trayek (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | II C | Delanggu-Juwiring-Kaligawe-Pedan-Karangdowo PP | 17 |
| 2 | I F | Klaten-Jatinom-Penggung | 21 |
| 3 | I H | Klaten-Jimbung-Bayat-Karangasem PP | 20 |
| 4 | I D | Klaten-Kalikebo-Planggu-Talang-Bawak-Cawas PP | 24 |
| 5 | I J | Klaten-Gayamprit-Basin-Kadilajo-Dompyongan-Tg.mas PP | 24 |
| 6 | I L | Klaten-GOR-Mayungan-Jolotundo-Kayumas-Temuireng PP | 23 |
| 7 | V A | Pulowatu-Beteng-Gabus-Krajan-Ngangkruk PP | 46 |
| 8 | I A | Klaten-Tegalyoso-Kraguman-Srowot PP | 16 |
| 9 | II B | Delanggu-Cokro-Tulung-Maduhan PP | 51 |
| 10 | I B | Klaten-Ngabetan-Beteng | 22 |
| 11 | I E | Pasar Klaten-Ngalas-Depo-Wedi-Canan-Balong PP | 19 |
| 12 | I K | Klaten-Bendogantungan-SPK-Pandes-Wedi-Pasungan-Gempol PP | 22 |
| 13 | I G | klaten-Mireng-Sumber-Bendo-Pedan PP | 17 |
| 14 | I C | Klaten-Perumda-RSI-Karanganom PP | 18 |
| 15 | I I | Klaten-Gayamprit-Karangnongko-Pulowatu PP | 19 |
| 16 | II A | Delanggu-Kepoh-Juwiring-Tanjung-Serenan PP | 44 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021*

**b. Perkeretaapian**

Kabupaten Klaten dilewati oleh jalur kereta api sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang. Dengan adanya jalur kereta api diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas angkutan jalan. Jaringan kereta api di Kabupaten Klaten melewati: (1) Kecamatan Wonosari; (2) Kecamatan Delanggu; (3) Kecamatan Juwiring; (4) Kecamatan Ceper; (5) Kecamatan Klaten Utara; (6) Kecamatan Kalikotes; (7) Kecamatan Klaten Kota; (8) Kecamatan Klaten Selatan; (9) Kecamatan Jogonalan; dan (10) Kecamatan Prambanan. Berikut tabel jaringan perlintasan kereta api di Kabupaten Klaten.

## Tabel 2.65
## Jaringan Perlintasan Kereta Api Kabupaten Klaten

| JPL | Km | Koordinat | Jenis Perlintasan | Nama Jalan | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Status Jalan | Lebar Jalan (m) | Konst. Jalan | Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penjagaan | Frontage | FO/Underpass | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lampu | | Palang pintu | | STOP | | Andreas Cross | | Peringatan 2 | | Peringatan | | Peringatan 1 | | WL/Running text | | Marka | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | | | | |
| 113 | 119+310 | -7.59966, 110.73009 | Sebidang | Jalan Desa | Bolali | Wonosari | Kabupaten | 1,5 | Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 115 | 119+955 | -7.60303, 110.72535 | Sebidang | Raya Wonosari | Sukorejo | Wonosari | Kabupaten | 4 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu:SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 117 | 121+184 | -7.6095, 110.71621 | Sebidang | Pakis Dalem | Pakis | Wonosari | Kabupaten | 6 | Beton | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | J | v | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 118 | 121+839 | -7.61413, 110.71253 | Sebidang | Jalan Desa | Boto | Wonosari | Kabupaten | 4 | Aspal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | v | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 120 | 122+830 | -7.62144, 110.7073 | Sebidang | Timur Stasiun | Ngatak | Delanggu | Kabupaten | 5 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan: OPS Status Penutupan: |
| 122 | 123+710 | -7.62809, 110.70298 | Sebidang | Jalan Desa | Karang | Juwiring | Kabupaten | 1,5 | Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 123 | 124+447 | -7.63378, 110.69954 | Sebidang | - | Mrisen | Juwiring | Kabupaten | 5 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| | 124+9/0 | | | | Sakung | | Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 125+0/1 | | | | Sakung | | Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| JPL | Km | Koordinat | Jenis Perlintasan | Nama Jalan | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Status Jalan | Lebar Jalan (m) | Konst. Jalan | Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penjagaan | Frontage | FO/Underpass | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lampu | | Palang pintu | | STOP | | Andreas Cross | | Peringatan 2 | | Peringatan | | Peringatan 1 | | WL/Running text | | Marka | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | | | | |
| 124 | 125+040 | -7.63829, 110.69659 | Sebidang | Jalan Desa | Sakung | Dlanggo | Kabupaten | 1,5 | Beton | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | TJ | | | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 125 | 125+430 | -7.64126, 110.69465 | Sebidang | Kaliwingko | Banaran | Delanggu | Kabupaten | 4 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 241 | 126+866 | -7.65219, 110.68738 | Sebidang | Alternatif | Muru | Ceper | Kabupaten | 4 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 244 | 127+920 | -7.66018, 110.68215 | Sebidang | Jalan Desa | Ngawonggo | Ceper | Kabupaten | 5 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 245 | 128+284 | -7.66283, 110.6804 | Sebidang | Jalan Desa | Klepu | Ceper | Kabupaten | 1 | Beton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 247 | 129+035 | -7.66816, 110.67606 | Sebidang | Stasiun Ceper | Jambu Kulon | Ceper | Kabupaten | 6 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 250 | 130+118 | -7.67366, 110.66794 | Sebidang | Jalan Desa | Kwiran | Ceper | Kabupaten | 1,5 | Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan:S |
| 251 | 130+536 | -7.67579, 110.66484 | Sebidang | Karangwuni | Karangwuni | Ceper | Provinsi | 7,2 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | J | v | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan : |
| 254 | 131+944 | -7.68305, 110.65439 | Sebidang | Pokak - Jombar | Pokak | Ceper | Kabupaten | 4,8 | Aspal | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | v | - | Palang Pintu: MStatus Penjagaan: PemdaStatus Penutupan: |

| JPL | Km | Koordinat | Jenis Perlintasan | Nama Jalan | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Status Jalan | Lebar Jalan (m) | Konst. Jalan | Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penjagaan | Frontage | FO/Underpass | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lampu | | Palang pintu | | STOP | | Andreas Cross | | Peringatan 2 | | Peringatan | | Peringatan 1 | | WL/Running text | | Marka | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | | | | |
| 259 | 132+860 | -7.68771, 110.64741 | Sebidang | Jalan Desa | Mlese | Ceper | Kabupaten | 1,5 | Beton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: S |
| 261 | 133+263 | -7.68949, 110.64419 | Sebidang | Mkm. Ronggo W. | Jatipuro | Ceper | Kabupaten | 5,4 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 263 | 133+748 | -7.69164, 110.64036 | Sebidang | Sultan Agung | Ketandan | Klaten Utara | Kabupaten | 2,4 | Aspal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 266 | 134+672 | -7.69568, 110.63314 | Sebidang | Jalan Desa | Ketandan | Klaten Utara | Kabupaten | 6 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan: JJ Status Penutupan: |
| 268 | 135+195 | -7.69799, 110.62896 | Sebidang | Jalan Desa | Gemblegan | Kalikotes | Kabupaten | 2,4 | Aspal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 270 | 135+707 | -7.69934, 110.62458 | Sebidang | Jalan Desa | Gemblegan | Kalikotes | Kabupaten | 2 | Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: S |
| 272 | 136+103 | -7.70143, 110.62159 | Sebidang | Jalan Desa | Sendangan 1 | Klaten Kota | Kabupaten | 1,8 | Beton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: S |
| 273 | 136+415 | -7.70312, 110.61941 | Sebidang | Jalan Desa | Mojayan | Klaten Kota | Kabupaten | 2 | Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: S |
| 274 | 137+012 | -7.70592, 110.61474 | Sebidang | Jogja - Solo | Sragu | Klaten Kota | Nasional | 7,8 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | J | v | v | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 276 | 137+408 | -7.70765, 110.61166 | Sebidang | Jalan Desa | Sragu | | | 1 | Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TJ | | | Palang Pintu: Status Penjagaan: |

| JPL | Km | Koordinat | Jenis Perlintasan | Nama Jalan | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Status Jalan | Lebar Jalan (m) | Konst. Jalan | Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu | | | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penjagaan | Frontage | FO/Underpass | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lampu | | Palang pintu | | STOP | | Andreas Cross | | Peringatan 2 | | Peringatan | | Peringatan 1 | | WL/Running text | | Marka | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penutupan:S |
| 278 | 137+408 | | Sebidang | Jalan Desa | Sragu | Klaten Kota | Kabupaten | 1,8 | Beton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | v | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 279 | 137+858 | -7.70958, 110.60805 | Sebidang | Borobudur | Karangduwet | Klaten Kota | Kabupaten | 5,4 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan: JJ Status Penutupan: |
| 280 | 138+659 | -7.71326, 110.60172 | Sebidang | Soka | Tonggalan | Klaten Kota | Kabupaten | 6 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | v | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan: JJ Status Penutupan: |
| 281 | 138+862 | -7.71403, 110.60003 | Sebidang | Seruni | Tonggalan | Klaten Kota | Kabupaten | 4,2 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | v | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 283 | 139+472 | -7.7167, 110.59521 | Sebidang | Krapyak | Tonggalan | Klaten Kota | Nasional | 10,8 | Aspal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | J | - | v | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 284 | 139+950 | -7.71871, 110.59128 | Sebidang | Jalan Desa | Merbung 1 | Klaten Sltn. | Kabupaten | 4,2 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu : SO Status Penjagaan : Status Penutupan : |
| 285 | 140+163 | -7.71963, 110.5896 | Sebidang | Jalan Desa | Merbung 2 | Klaten Sltn. | Kabupaten | 4,2 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 287 | 140+696 | -7.7219, 110.58535 | Sebidang | Jalan Desa | Sumberejo | Klaten Sltn. | Kabupaten | 6,6 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu : SOStatus Penjagaan : JJStatus Penutupan : |

| JPL | Km | Koordinat | Jenis Perlintasan | Nama Jalan | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Status Jalan | Lebar Jalan (m) | Konst. Jalan | Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penjagaan | Frontage | FO/Underpass | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lampu | | Palang pintu | | STOP | | Andreas Cross | | Peringatan 2 | | Peringatan | | Peringatan 1 | | WL/Running text | | Marka | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | | | | |
| 289 | 141+190 | -7.72403, 110.58151 | Sebidang | Jalan Desa | Trunuh 1 | Klaten Sltn. | Kabupaten | 4,8 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 290 | 141+596 | -7.72576, 110.5783 | Sebidang | Jalan Desa | Trunuh 2 | Klaten Sltn. | Kabupaten | 5,4 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 293 | 142+384 | -7.73075, 110.56909 | | | Keringan | Klaten Sltn. | | 1,5 | Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TJ | | | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan:S |
| 294 | 143+070 | -7.73214, 110.56646 | Sebidang | Jalan Desa | Kutu 1 Sumyang | Jogonalan | Kabupaten | 4,2 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 295 | 143+313 | -7.73322, 110.56448 | Sebidang | Jalan Desa | Kutu 2 Sumyang | Jogonalan | Kabupaten | 5,4 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 297 | 144+032 | -7.7363, 110.55873 | Sebidang | Jalan Desa | Bakung 2 | Jogonalan | Kabupaten | 4,2 | Aspal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan : Status Penutupan : |
| 299 | 144+375 | -7.73775, 110.55595 | Underpass | Jalan Desa | Kergan Bakung | Jogonalan | Kabupaten | 4 | Aspal | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | TJ | | | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 301 | 145+385 | -7.74208, 110.54796 | Sebidang | Jalan Desa | Gondangan | Jogonalan | Kabupaten | 6 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan: OPS Status Penutupan: |
| 305 | 146+117 | -7.74542, 110.54178 | Sebidang | Jalan Desa | Ketitang | Jogonalan | Kabupaten | 3 | Aspal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |

| JPL | Km | Koordinat | Jenis Perlintasan | Nama Jalan | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Status Jalan | Lebar Jalan (m) | Konst. Jalan | Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penjagaan | Frontage | FO/Underpass | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lampu | | Palang pintu | | STOP | | Andreas Cross | | Peringatan 2 | | Peringatan | | Peringatan 1 | | WL/Running text | | Marka | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | | | | |
| 307 | 147+029 | -7.7492, 110.53478 | Sebidang | Jalan Desa | Simping | Prambanan | Kabupaten | 4 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu : SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 308 | 148+032 | -7.75356, 110.52673 | Sebidang | Jalan Desa | Geneng 1 | Prambanan | Kabupaten | 4 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan:JJ Status Penutupan: |
| 309 | 148+820 | -7.75693, 110.52041 | Sebidang | Jalan Desa | Cucukan | Prambanan | Kabupaten | 3 | Aspal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan:S |
| 310 | 148+835 | | Sebidang | Jalan Desa | Glonggong | Prambanan | Kabupaten | 2,5 | Aspal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan:S |
| 311 | 149+467 | | Sebidang | Jalan Desa | Kadisaran | Prambanan | Kabupaten | 1,5 | Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TJ | | | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 312 | 149+849 | -7.75771, 110.51139 | Sebidang | Jalan Desa | Kongklangan | Prambanan | Kabupaten | 2 | Beton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TJ | | | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 315 | 150+386 | -7.75725, 110.50655 | Sebidang | Jalan Desa | Taji | Prambanan | Kabupaten | 4 | Aspal | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | TJ | - | - | Palang Pintu: Status Penjagaan: Status Penutupan: |
| 316 | 151+225 | -7.75652, 110.49897 | Sebidang | Jalan Desa | Kebon Dalem 1 | Prambanan | Kabupaten | 4,3 | Aspal | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | Palang Pintu: SO Status Penjagaan: OPS Status Penutupan: |
| 317 | 151+743 | -7.75613, 110.49426 | Sebidang | Jalan Desa | Kebon Dalem 2 | Prambanan | Kabupaten | 4,3 | Aspal | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | J | | | Palang Pintu: SOStatus Penjagaan: JJStatus Penutupan: |

| JPL | Km | Koordinat | Jenis Perlintasan | Nama Jalan | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Status Jalan | Lebar Jalan (m) | Konst. Jalan | Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu | | | | | | | | | | | | | | | | Status Penjagaan | Frontage | FO/Underpass | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lampu | | Palang pintu | | STOP | | Andreas Cross | | Peringatan 2 | | Peringatan | | Peringatan 1 | | WL/Running text | | Marka | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | Ki | Ka | | | | |
| 318 | 152+046 | -7.75694, 110.49172 | Sebidang | Perbatasan | Kebon Dalem 3 | Prambanan | Kabupaten | 6,4 | Aspal | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | J | | | Palang Pintu: SO<br>Status Penjagaan: JJ<br>Status Penutupan: |

*Sumber: DAOP IV Jogjakarta*

Beberapa ruas jalan di Kabupaten telah dilakukan penghitungan terhadap Level of Service (LOS) atau tingkat pelayanan jalan, yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai mendekati 1. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas jalan (C) yang dapat dihitung dengan mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota.

Untuk ruas jalan dengan nilai LOS tinggi terdapat di Jl. Veteran dengan nilai 0,75, sedangkan nilai LOS terendah di Jl. Pramuka dengam nilai 0,23. Rata-rata nilai LOS ruas jalan di Kabupaten Klaten sebesar 0,52. Berikut data penilaian LOS di beberapa ruas jalan di Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.66**
**Level Of Service Ruas Jalan di Kabupaten Klatan**

| No | Ruas / Nama Jalan *) | Fungsi Jalan | Volume Lalu lintas (kend/jam) | Kapasitas (kend/jam) | V/C Ratio | Kecepatan (km/jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Perintis Kemerdekaan | Jalan Nasional | 1.760 | 3.571 | 0,49 | 37 |
| 2 | Jl. Ki Ageng Gribig | Jalan Provinsi | 1.046 | 1.958 | 0,53 | 38 |
| 2 | Jl. Veteran | Jalan Kabupaten | 1.390 | 1.855 | 0,75 | 33 |
| 3 | Jl. Pemuda | Jalan Kabupaten | 2.239 | 3.851 | 0,58 | 35 |
| 4 | Jl. Suraji Tirtonegoro | Jalan Nasional | 1.765 | 571 | 0,49 | 36 |
| 5 | Jl. Diponegoro | Jalan Nasional | 1.065 | 1.979 | 0,54 | 36 |
| 6 | Jl. KH Hasyim Asy'ari | Jalan Nasional | 1.054 | 1.850 | 0,57 | 35 |
| 7 | Jl. Kartini | Jalan Nasional | 892 | 1.850 | 0,48 | 37 |
| 8 | Jl. Dewi Sartika | Jalan Kabupaten | 857 | 1.466 | 0,58 | 35 |
| 9 | Jl. Merbabu | Jalan Kabupaten | 1.305 | 3.851 | 0,34 | 38 |
| 10 | Jl. Pramuka | Jalan Kabupaten | 341 | 1.466 | 0,23 | 40 |
| 11 | Jl. Mayor Kusmanto | Jalan Kabupaten | 1.179 | 1.958 | 0,60 | 35 |
| 12 | Jl. Mayor Sunaryo | Jalan Kabupaten | 1.217 | 1.958 | 0,62 | 35 |
| **Rata-rata** | | | **1.255** | **2.435** | **0,52** | |

*Sumber: Dinas Perhubungan dan BPS Kabupaten Klaten, 2020*

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan perhubungan secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.67**
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indeks kepuasan layanan perhubungan | Indeks | 78,762 | 78,762 | 78,953 | 79,016 | 79,490 |
| Persentase layanan angkutan darat | % | 88,90 | 86,79 | 86,36 | 85,88 | 84,33 |
| Pemasangan Rambu-rambu | unit | 100 | 100 | 118 | 227 | 221 |
| Persentase pemenuhan sarana dan prasarana | % | 0,14 | 0,27 | 0,14 | 0,27 | 0,25 |

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, APILL dan PJU) | | | | | | |
| Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (guardrail dan marka jalan) | % | 2,79 | 23,18 | 27,38 | 27,90 | 15,65 |
| Rasio ijin trayek | rasio | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,21 |
| Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | rasio | 0,039 | 0,048 | 0,046 | 0,046 | 0,071 |
| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Orang/ unit | 78.231 | 76.375 | 75.573 | 74.213 | 14.882 |
| Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun | Orang/ unit | 243.681 | 246.882 | 239.388 | 203.682 | 43.691 |
| Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik | % | 28,57 | 37,5 | 75 | 57,14 | 42,86 |
| Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | 94,00 | 87,15 | 86,91 | 93,78 | 85,53 |
| Persentase kendaraan wajib bermotor yang wajib uji yang lulus uji KIR | % | 84,74 | 80,80 | 81,00 | 84,03 | 78,06 |
| Jumlah uji kir angkutan umum | unit | 550 | 498 | 527 | 482 | 235 |
| Jumlah kendaraan melanggar (dimensi berat dan KIR mati | kendaraan | 1.890 | 1.764 | 371 | 295 | 60 |
| Jumlah kecelakaan lalulintas | kejadian | 770 | 643 | 917 | 986 | 1.003 |

*Sumber: Dinas Perhubungan dan BPS Kabupaten Klaten, 2020*

Dari tabel diatas teridentifikasi bahwa penyebab turunnya kondisi terminal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan terbatasnya anggaran pemeliharaan teutama pada tahun 2020, akibat adanya Pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap r*efocussing* anggaran di semua kegiatan. Selain itu semakin marak dan mudahnya akses terhadap angkutan berbasis aplikasi/online menyebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum, juga kemudahan akses untuk memiliki kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4 juga turut berdampak pada menurunnya penggunaan angkutan umum.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif, Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet. Semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi. TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses ke informasi dan belajar.

Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (*e-government*) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden tersebut, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki 1 website utama yaitu *www.klatenkab.go.id*. Namun keberadaan website tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat ketersediaan data tidak hanya diukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus terupdate. Kurangnya informasi yang disampaikan di website Kabupaten Klaten disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dan bidang komunikasi dan informasi. Maka perlu peningkatan dalam pengelolaan website yang harus terus terupdate dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal, dan juga mempermudah masyarakat memperoleh informasi, serta mempermudah pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital salah satunya melalui percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten masih tergolong rendah (berkisar 50-55%). Hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah yang minim akan akses internet, untuk itu perlu meningkatkan layanan berkualitas dan jangkauan luas dalam penyediaan akses telekomunikasi jaringan 4G serta internet berkecepatan tinggi.

Di era reformasi sekarang ini dibutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusannya. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan

tidak menutupi apa yang dilakukan. Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Klaten tahun 2020 mempunyai skor sebesar 95,7. Oleh karena itu perlu dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata tekola pemerintahan yang baik dan bersih dalam menyampaikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat.

Jaringan internet dan ruang publik merupakan dua komponen dunia teknologi yang sangat erat kaitannya. Keberadaan jaringan internet di ruang publik sangat membantu masyarakat dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan. Untuk mengurangi kesenjangan akses internet, pemerintah Kabupaten Klaten hingga tahun 2020 telah menambahkan akses internet di ruang publik Kabupaten hingga 70%, di mana secara umum capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.68**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | - | - | 61,5 | 73 | 75 |
| 2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | - | - | 52,2 | 53,6 | 56,5 |
| 3 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | % | - | - | - | 36 | 60 |
| 4 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Per Komisi Informasi 5 th 2016) | Indeks | 58,48 | 30 | 77,1 | 78,7 | 95,7 |
| 5 | Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat | % | 50 | 50 | 65 | 75 | 65 |
| 6 | Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo | % | 1,96 | 7,84 | 17,65 | 29,41 | 54,90 |
| 7 | Persentase penambahan akses internet di ruang publik | % | 3,33 | 13,33 | 33,33 | 50,00 | 70,00 |
| 8 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 3,70 | 9,26 | 16,67 | 27,78 | 40,74 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021*

**11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten diantaranya meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Kondisi umum Urusan Koperasi dan UMKM di kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator. Perkembangan kinerja koperasi ditunjukkan dengan koperasi aktif yang mengalami kenaikan dari 713 koperasi aktif di tahun 2019 meningkat menjadi 717 koperasi di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya

pembinaan yang lebih intens kepada pengurus koperasi. Persentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas, meningkat dari 6,2% pada tahun 2016 menjadi 14,45% pada tahun 2020. Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi dari tahun 2016 sebesar 2,84% menjadi 16,70% di tahun 2020. Persentase permohonan ijin pembukaan cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi sebesar 2,90% di tahun 2016 menjadi 6,30% di tahun 2020. Persentase koperasi yang berkualitas dari sebesar 38,94% di tahun 2016 menjadi 42,80% di tahun 2020. Persentase koperasi aktif dari sebesar 60,02% di tahun 2016 menjadi 66,94% di tahun 2020. Persentase koperasi yang patuh sebesar 18,94% di tahun 2016 menjadi 23,10% di tahun 2020. Persentase koperasi yang sehat sebesar 14,41% di tahun 2016 menjadi 19,78% di tahun 2020. Persentase pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebesar 10,84% di tahun 2019 menjadi 25,84% di tahun 2020. Persentase koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan dari 12,35% di tahun 2016 menjadi 17,80% pada tahun 2020. Terdapat satu indikator dengan capaian menurun, yaitu indikator persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya, sebesar 17,71% pada 2016 menjadi sebesar 9,34% pada 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian kesehatan koperasi hanya dapat dilakukan pada 9 KSP, sehingga menyebabkan persentase capaian berkurang.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan 7 (tujuh) produk unggulan daerah dengan Keputusan Bupati Nomor 050/84 Tahun 2016 yaitu batik, lurik, konveksi, mebel, logam, keramik dan tembakau (tembakau asepan dan tembakau rajangan). Di samping itu Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) klaster UMKM yaitu klaster batik, lurik, konveksi, keramik, mebel, logam, handycraft, makanan olahan, lereng merapi, desa wisata dan minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017.

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pola klaster dan penetapan produk unggulan daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya, selain itu juga diharapkan dapat menjadi *trademark* dan *brand image* bagi Kabupaten Klaten.

Kinerja usaha kecil dan menengah ditunjukkan dengan indikator jumlah usaha mikro/kecil pada tahun 2019 sebanyak 50.027 yang mengalami kenaikan menjadi 50.070 pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pendataan ulang pada tahun 2019, yang memunculkan *by name by address* untuk masing-masing pelaku usaha. Capaian indikator terkait usaha mikro/kecil selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) antara lain: pertumbuhan usaha mikro dari 0,062% menjadi sebesar 0,111%; persentase usaha mikro yang dibina dari sebesar 1,94% menjadi sebesar 3,86%; dan persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan sebesar 0,257% pada 2020. Persentase pelaku usaha mikro yang diberikan difasilitasi atau pendampingan pada kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2016 tercatat sebesar 0,017% menjadi 0,060% di tahun 2020.

Capaian kinerja indikator urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Klaten di tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.69**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM**
**Tahun 2016-2020**

| No, | Indikator | Satuan | Capain | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **A** | **Koperasi** | | | | | | |
| 1 | Koperasi | unit | 943 | 883 | 886 | 889 | 893 |
| 2 | KUD | unit | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3 | Koperasi Aktif | unit | 566 | 581 | 710 | 713 | 717 |
| 4 | Koperasi Tidak Aktif | unit | 377 | 302 | 176 | 176 | 176 |
| 5 | Koperasi Sehat | unit | 12 | 25 | 34 | 42 | 50 |
| 6 | Koperasi Cukup Sehat | unit | 554 | 567 | 347 | 346 | 352 |
| 7 | Persentase Koperasi berkualitas dan sangat berkualitas | % | 6,2 | 7,6 | 9,3 | 11,9 | 14,45 |
| 8 | Persentase permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh Rekomendasi | % | 2,84 | 5,55 | 9,70 | 13,10 | 16,70 |
| 9 | Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh Rekomendasi | % | 2,90 | 3,25 | 3,50 | 4,90 | 6,30 |
| 10 | Persentase Koperasi yang berkualitas | % | 38,94 | 39,68 | 41,01 | 41,85 | 42,80 |
| 11 | Persentase koperasi aktif | % | 60,02 | 63,80 | 65,14 | 66,25 | 66,94 |
| 12 | Persentase Koperasi yang patuh | % | 18,94 | 19,68 | 20,01 | 21,85 | 23,10 |
| 13 | Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya | % | 17,71 | 21,50 | 30,14 | 42,61 | 9,34 |
| 14 | Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan | % | 10,84 | 16,66 | 20,66 | 23,84 | 25,84 |
| 15 | Persentase Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan | % | 12,35 | 14,40 | 15,60 | 16,10 | 17,80 |
| 16 | Persentase Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan | % | 12,35 | 14,40 | 15,60 | 16,10 | 17,80 |
| **B** | **Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | |
| 1 | Jumlah Pengusaha | | | | | | |
| | Pengusaha Mikro/Kecil | Orang | 34.673 | 34.680 | 34.686 | 50.027 | 50.070 |
| | Pengusaha Menengah | Orang | 5.024 | 5.026 | 5.028 | 5.030 | 5.030 |
| 3 | Pertumbuhan usaha mikro | % | 0,062 | 0,072 | 0,077 | 0,098 | 0,111 |
| 4 | Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan | % | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,257 |
| 5 | Persentase usaha mikro yang dibina | % | 1,94 | 2,21 | 2,72 | 3,09 | 3,86 |
| 6 | Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ pendampingan | % | 0,017 | 0,049 | 0,058 | 0,046 | 0,060 |

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

**12. Penanaman Modal**

Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam pembangunan penanaman modal di Kabupaten Klaten. Nilai investasi PMDN Tahun 2020 sebesar Rp.698.896.464 milyar rupiah, di mana dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan pengaruh yang cukup

besar terhadap penanaman modal dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai realisasi PMDN tahun 2020 sebesar -64%.

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Klaten tahun 2016 tercatat sebesar US$ 6.373.000 yang mengalami peningkatan menjadi US$ 11.49.000 di tahun 2019. Tahun 2020 PMA menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 menjadi sebesar US$ 4.721.000. Tahun 2020 realisasi PMA menurun sebesar 59%, hal ini disebabkan oleh pengaruh Pandemi Covid-19. Pelaku usaha baik PMDN maupun PMA mengalami kendala dalam melaksanakan usahanya, baik dalam proses konstruksi maupun produksi. Pembatasan jam kerja karyawan dan pembatasan kegiatan ekspor impor membuat proses produksi terhambat sehingga realisasi investasipun menurun.

Untuk jumlah investor PMA di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebanyak 5 investor, di mana capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sejumlah 15 investor. Selain karena faktor kondisi Pandemi Covid-19, hal lain yang menyebabkan sedikitnya PMA yang berinvestasi di Kabupaten Klaten adalah calon investor PMA mengalami kendala terkait ketersediaan lahan industri. Namun berbeda dengan capaian jumlah investor PMDN, di mana capaian pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Di tahun 2019 jumlah investor PMDN sebanyak 870 investor/pelaku usaha menjadi 2.478 investor/pelaku usaha di tahun 2020. Kenaikan jumlah investor/pelaku usaha PMDN disebabkan karena banyaknya pelaku usaha di sektor UMKM.

Capaian rasio tenaga kerja baik PMA maupun PMDN mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena PMDN/PMA yang masuk ke Kabupaten Klaten cenderung pada industri yang padat modal dan berbasis mesin/digital, serta tenaga kerja yang dibutuhkan harus memenuhi kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga serapan tenaga kerja tergolong rendah.

Peningkatan investasi di Kabupaten Klaten masih mengalami beberapa kendala, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana khususnya dari sarana transportasi yang kurang mendukung, penyediaan sumber air, penyediaan sumberdaya listrik yang memadai, penetapan kawasan peruntukkan industri daerah, penyiapan profil investasi, promosi investasi dan pelayanan perijinan yang kurang optimal dan belum terintegrasinya antar OPD teknis. Penyederhanaan perizinan dan insentif bagi para investor dalam berinvestasi akan mendorong semakin bertambahnya investor yang akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Klaten.

Seperti dilihat pada capaian jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang sempat mengalami penurunan di tahun 2019, dari 3.091 izin di tahun 2018 menurun menjadi 2.987 di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena tahun 2019 merupakan masa transisi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan adanya sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang membuat para pelaku usaha harus melakukan penyesuaian dengan aturan baru tersebut, tetapi capaian di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7.885 izin. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan diterapkannya OSS membuat pelayanan perizinan semakin mudah.

Perkembangan kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 sebagai berikut.

**Tabel 2.70**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN) | investor | 21 | 41 | 67 | 870 | 4.743 |
| 2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) | Rp (dlm ribu) | 62.385.300 | 247.327.200 | 229.788.500 | 1.914.915.766 | 698.896.464 |
| 3. | Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN) | orang | 136 | 68 | 27 | 21 | 3 |
| 4. | Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN | % | 203 | 296 | -7 | 733 | -64 |
| 5. | Jumlah investor berskala nasional (PMA) | investor | 53 | 43 | 39 | 15 | 5 |
| 6. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) | US$ (dlm ribu) | 6.373 | 10.257 | 3.091 | 11.491 | 4.721 |
| 7. | Rasio daya serap tenaga kerja (PMA) | orang | 28 | 2 | 14 | 224 | 12 |
| 8. | Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA | % | 1.415 | 61 | -70 | 272 | -59 |
| 9. | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | dok | 3.865 | 2.154 | 3.056 | 2.987 | 7.885 |
| 10. | Jumlah Pelayanan Pengaduan yang tertangani | dok | 12 | 12 | 24 | 14 | 16 |

*Sumber: DPMPTSP Kab, Klaten, 2021*

**13. Kepemudaan dan Olah Raga**

Organisasi kepemudaan memegang peran penting dalam mengkokohkan fungsi pemuda sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial. Tahun 2020 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Klaten sebesar 76%, di mana kondisi ini semakin meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 69%.

Pelatihan wirausaha muda pemula bertujuan untuk mencetak pemuda yang berjiwa kewirausahaan secara masif sesuai dengan tujuan pembangunan kepemudaan. Persentase wirausaha muda pemula di tahun 2020 sebesar 19,76% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2019) sebesar 17,45%. Keberadaan wirausaha muda diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di tahun 2020 sebesar 1,02%, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,99%. Kenaikan tersebut lebih dikarenakan banyaknya pemutusan hubungan kerja, dampak Pandemi Covid-19 yang membuat mereka banting stir menjadi wirausaha muda *(online maupun offline)* demi mempertahankan keseimbangan ekonomi keluarga.

Tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan juga mengalami peningkatan di tahun 2020

sebesar 4,15% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,07%. Walaupun sedang dalam masa Pandemi Covid-19, pemuda masih tetep aktif di dalam organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Namun penghitungan persentase tersebut tidak memperhitungkan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan karena hanya memperhitungkan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan saja, yang merupakan tupoksi Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga. Cakupan pembinaan olahraga sampai dengan tahun 2020 sebanyak 36 cabang olahraga. Untuk pelatih yang bersertifikasi capaiannya meningkat dari 55 orang ditahun 2016 menjadi 80 orang di tahun 2020. Jumlah atlet berprestasi (KONI) capaian tahun 2020 menurun menjadi 100 orang apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang tercatat sebesar 175 orang. Untuk jumlah prestasi olahraga juga menurun, capaian tahun 2020 adalah Nol (0) dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 83 orang. Jumlah prestasi olahraga yang menurun di tahun 2020 dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak *event* Kepemudaan dan Olahraga ditiadakan. Untuk meningkatkan prestasi olahraga pemenuhan terhadap sarana dan prasarana keolahragaan harus diperhatikan oleh pemerintah, disamping juga harus di dukung oleh pelatih yang berkualitas (bersertifikat).

Peningkatan prestasi olahraga di tahun 2020 sebesar 35,4%, cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 37,87%. Penurunan capaian prestasi tersebut lebih disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19, yang diharuskan menghindari kerumunan, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan seleksi daerah maupun pengiriman atlit untuk mengikuti kejuaraan ke luar daerah. Capaian kinerja pada urusan kepemudaan dan olahraga selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.71**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
| 2. | Tingkat Partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan | % | 3,96 | 3,91 | 3,99 | 4,07 | 4,15 |
| 3. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 55 | 69 | 69 | 69 | 76 |
| 4. | Persentase wirausaha muda pemula | % | 11,24 | 13,16 | 15,36 | 17,45 | 19,76 |
| 5. | Peningkatan Prestasi Olahraga | % | 36,88 | 20 | 36,3 | 37,87 | 35,4 |
| 6. | Cakupan pembinaan olahraga | Cabor | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 7. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Orang | 55 | 57 | 60 | 67 | 80 |

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8. | Cakupan pembinaan atlet muda | Orang | 465 | 390 | 475 | 500 | 330 |
| 9. | Jumlah atlet berprestasi (Dinas) | Orang | 166 | 5 | 167 | 178 | 111 |
| 10. | Jumlah atlet berprestasi (KONI) | Orang | 150 | 165 | 188 | 175 | 100 |
| 11. | Jumlah prestasi olahraga | Orang | 103 | 32 | 120 | 83 | 0 |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020*

**14. Statistik**

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang, maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan *up to date* sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Klaten baru mencapai 25% di tahun 2020 dari total sektor yang diamanatkan. Kondisi ini juga diperparah dengan ketersediaan data yang sebagian masih belum tepat, akurat dan *up to date*, selain disebabkan oleh ketergantungan pada instansi vertikal penyedia data ketidaktepatan data juga disebabkan oleh *inkonsistensi* data, serta *dualisme* data.

**Tabel 2.72**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah | % | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021*

**15. Persandian**

Keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama, untuk melihat hasil kelengkapan dan kematangan keamanan informasi perlu dilakukan pengukuran Indeks KAMI. Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009, serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun ini belum pernah melakukan Evaluasi keamanan Indeks KAMI sehingga capaian nya masih 0 (nol). Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kelengkapan dan tingkat kematangan keamanan informasi di tahun tahun berikutnya.

Pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elekronik saat ini sangat dibutuhkan untuk bertransformasi menuju penerapan *e-government*. Capaian Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik di Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 38,00% meningkat 9,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.73**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik | % | 22 | 28 | 27 | 29 | 38 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021*

**16. Kebudayaan**

Capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya yang cenderung meningkat, pada tahun 2016 terdapat 30 *event* seni dan budaya yang terselenggara menjadi 40 event di tahun 2019. Namun karena adanya Pandemi Covid-19, *event* seni dan budaya di tahun 2020 hanya terlaksana sebanyak 7 *event.* Objek diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan mengalami peningkatan sebanyak 98 ODCB menjadi l32 ODCB di tahun 2020, dari 132 ODCB tersebut baru 13 objek sudah mendapatkan SK penetapan sebagai cagar budaya, sehingga masih terdapat 113 ODCB yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan direvitalisasi terhadap karya budaya yaitu 1 tarian (tari cangikan) dan telah mengelola cagar budaya secara terpadu yaitu candi plaosan, candi sojiwan, dan makam pandanaran.

**Tabel 2.74**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 30 | 31 | 31 | 40 | 7 |
| 2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Lokasi | 93 | 93 | 93 | 98 | 132 |
| 3. | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Cagar budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020*

**17. Perpustakaan**

Salah satu perpustakaan yang memiliki koleksi paling lengkap di Kabupaten Klaten adalah perpustakaan daerah. Perpustakaan ini pada tahun 2020 mendapatkan penambahan koleksi buku yang jumlahnya cukup besar. Pada tahun 2020 jumlah koleksi Pepustakaan Daerah sebanyak 49.786 eksemplar dengan koleksi judul mencapai 37.457 eksemplar. Adapun kunjungan perpustakaan pada tahun 2020 sejumlah 70.878 kunjungan. Koleksi dan judul buku pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan disebabkan oleh adanya pengalokasian ulang anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan anggaran penyediaan buku koleksi terpangkas dan tidak dilakukan pengadaan buku pada tahun tersebut.

Pada tahun 2019 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 83.511 orang, kondisi ini menurun di tahun 2020 menjadi 70.878 orang. Untuk capaian minat baca masyarakat juga mengalami penurunan dari 6,29% di

tahun 2019 menurun menjadi 5,34% di tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan perpustakaan. Walaupun mengalami penurunan jumlah kunjungan, kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan justru meningkat dari 70,25 pada tahun 2019 menjadi 77,92 pada tahun 2020. Gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.75**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | orang/ pengunjung | 40.003 | 41.225 | 68.346 | 83.511 | 70.878 |
| 2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | eks, | 43.979 | 44.687 | 45.362 | 49.786 | 49.786 |
| 3. | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | orang/ pengunjung | 53.667 | 60.793 | 60.793 | 60.793 | 60.793 |
| 4. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | eks | 35.535 | 35.561 | 35.898 | 37.457 | 37.457 |
| 5. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan kearsipan | indeks | 67,84 | 67,92 | 67,28 | 70,25 | 77,92 |
| 6. | Persentase budaya baca masyarakat | % | 3,01 | 3,11 | 5,15 | 6,29 | 5,34 |
| 7. | Persentase perpustakaan yang dibina | % | 11,25 | 11,51 | 11,51 | 13,55 | 21,99 |

*Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab, Klaten, 2021*

**18. Kearsipan**

Indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan pada tahun 2020 mencapai 77,92. Nilai indeks tersebut apabila dikonversi ke dalam status mutu layanan berada pada kategori B atau baik. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Arsip dan Perputakaan Kabupaten Klaten disebabkan oleh meningkatnya kualitas layanan yang diberikan sehingga berkontribusi terhadap kepuasan pengunjung maupun pengakses arsip.

Indeks Kearsipan adalah indeks atau angka yang diberikan oleh instansi vertikal/Disarpus Provinsi Jawa Tengah/ANRI kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang merupakan hasil monitoring pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah. Indeks Kearsipan dapat digunakan untuk melihat seberapa baik pengelolaan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, baik yang berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, maupun mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan arsip. Nilai Indeks Kearsipan pada tahun 2019 tercatat sebesar 89 dan pada tahun 2020 mencapai 95 atau berada pada kondisi yang baik serta meningkat setiap tahunnya. Salah satu indikator yang mendukung terhadap baiknya Indeks Kearsipan di Kabupaten Klaten adalah capaian persentase arsip yang diakuisisi telah mencapai 100%.

Berbanding terbalik dengan capaian 3 indikator di atas, capaian indikator pengawasan internal dan arsip yang dialihmediakan masih belum optimal. Pengawasan internal yang dilakukan baru 9,8% pada tahun 2020 sedangkan arsip yang dialihmediakan baru dilakukan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 25,85%.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten selaku Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai daftar arsip usul musnah sampai dengan tahun 2011 sebanyak 68.764 arsip. Arsip usul musnah yaitu arsip yang masa retensinya telah habis atau terlampaui sehingga dinyatakan musnah. Masa retensi arsip ini sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Hingga saat ini, pemusnahan arsip belum dilaksanakan kembali karena menunggu penetapan jadwal retensi arsip.

**Tabel 2.76**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kerasipan Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan kearsipan | Indeks | 67,84 | 67,92 | 67,28 | 70,25 | 77,92 |
| 2. | Indeks Kearsipan | Indeks | - | 31 | 63 | 89 | 95 |
| 3. | Persentase arsip yang diakuisisi | % | 62,03 | 65,14 | 72,77 | 81,91 | 100 |
| 4. | Persentase pengawasan kearsipan internal | % | 0 | 0 | 7,84 | 9,8 | 9,8 |
| 5. | Persentase arsip yang dialihmediakan | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,85 |

*Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab, Klaten, 2021*

### 2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali seni dan budaya tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut. Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antar lain dari produk wisata, Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

a. Jenis Kekayaan Wisata Alam
   Jenis kekayaan wisata alam di Kabupaten Klaten antara lain: Deles Indah, Gunung Watu Prau, Pegunungan Kidul, Kawasan Keunikan batuan dan fosil, Umbul Pelem dan Umbul Manten
b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya
   Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Gana, Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Masjid Al-Aqsho, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Sunan Pandanaran , Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng, Ronggowarsito, Makam Panembahan Romo, Makam Kyai Melati, Situs Kaliworo dan Situs Wonoboyo
c. Tempat Bersejarah
   Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula, Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles,
d. Jumlah Objek Wisata dan Pengunjung
   Jumlah pengunjung wisata ke Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan signifikan, namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi Covid 19 maka terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata karena banyak obyek wisata yang tidak beroperasi, selain itu untuk event-event pariwisata tingkat Kabupaten juga hanya diadakan secara terbatas di tingkat Desa/Kecamatan, Lama kunjungan wisata di Kabupaten Klaten rata-rata selama 1 (satu) hari, Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta, Kondisi ini mengakibatkan penurunan PAD sektor pariwisata tahun 2020.

Dengan ditetapkannya Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan program super prioritas nasional serta dengan adanya wabah Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, tenaga kerja dan jasa (perhotelan, restoran, transportasi dll), yang otomatis akan mempengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara, menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran bagi pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha, dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka tempat wisata maupun untuk berwisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pelatihan-pelatihan (pelatihan guide, managemen pariwisata, penguatan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dll), peningkatan promosi pariwisata, penataan kembali obyek wisata berbasis kawasan, penguatan kelembagaan kepariwisataan (Pokdarwis, ASITA, Travel Agent, pengembangan *Tourist Information Centre)*, menggelar event-event unggulan daerah yang spektakuler, perlu adanya

pemaketan pariwisata serta pengembangan desa wisata. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar kunjungan wisata meningkat dan lama kunjungan wisatawan bertambah, serta PAD sektor pariwisata meningkat.

Jumlah pengunjung wisata ke Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan signifikan, namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 maka terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata dari 4.066.583 orang di tahun 2019 menurun menjadi 1.421.366 orang di tahun 2020. Lama kunjungan wisata di Kabupaten Klaten rata-rata selama 1 hari, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar di tahun-tahun mendatang kunjungan dan lama tinggal wisatawan semakin meningkat. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut.

**Tabel 2.77**
**Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah Obyek Wisata | obyek | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 |
| 2. | Kunjungan wisata | orang | 377.781 | 2.414.980 | 2.706.218 | 4.066.583 | 1.421.366 |
| 3. | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | PAD (Pajak dan Retribusi daerah) | Rp | 5.490.059.624 | 6.895.508.782 | 8.668.908.216 | 12.648.036.829 | 8.530.240.217 |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab, Klaten, 2021*

Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata yang terkelola pada tahun 2016-2018 mengalami perkembangan yang stagnan, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dan pihak swasta belum maksimal dan masih beranggapan bahwa pariwisata belum bisa memberikan dampak terhadap perekonomian. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 60,4% jika dibanding pada tahun 2019 sebesar 49,4%.

Untuk memperkenalkan produk pariwisata di Kabupaten Klaten diperlukan adanya promosi guna memperkenalkan obyek wisata. Tanpa promosi yang efektif dan efisien, maka obyek wisata tidak dapat dikenal dan tingkat kunjungan wisatawan menjadi rendah. Tingkat intensitas promosi pariwisata pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dari 12,32% di tahun 2016 menjadi 81,3% di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 57,5%, hal ini dikarenakan ditutupnya objek wisata akibat dampak Pandemi Covid-19.

Persentase sumber daya manusia di bidang pariwisata yang berkompeten selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar 18,97% pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 sebesar 21,29%, meskipun begitu kapasitas sumber daya manusia pariwisata masih perlu ditingkatkan kembali. Sedangkan untuk persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HKI dari tahun 2016-2019 capaiannya 0, tahun 2020 terdapat 5 orang yang sudah difasilitasi GKI. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut.

**Tabel 2.78**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata**
**Tahun 2016-2021**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Prosentase Daya Tarik Wisata Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola | % | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 49,4 | 60,4 |
| 2. | Tingkat Intensitas Promosi Pariwisata Terupload di 3 Platfom media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) | % | 12,32 | 19,4 | 58,3 | 81,3 | 57,5 |
| 3. | Jumlah Pelaku Ekraf yang difasilitasi HKI | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | Prosentase SDM Pariwisata yang berkompeten | % | 18,97 | 19,43 | 19,68 | 20,93 | 21,29 |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab, Klaten, 2021*

## 2. Pertanian

Pengembangan pertanian di Kabupaten Klaten akan dipengaruhi oleh kapasitas daya dukung dan daya tampung, terutama perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Perhitungan antara ketersediaan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas. Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2019 sebesar 328.063 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk. Kebutuhan lahan di Kabupaten Klaten di tahun 2019 sebesar 301.450 Ha.

Penentuan status daya dukung lahan Kabupaten Klaten berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Berdasarkan KLHS RPJMD, hasil perhitungan tahun 2019 dapat diketahui SL (328.063 Ha) > DL (301.450 Ha). Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan pada tahun 2019 dinyatakan surplus. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan masih dapat memenuhi kebutuhan.

Tingkat produktivitas padi/bahan pangan utama lokal di Kabupaten Klaten semakin menurun, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya luas lahan pertanian ke non pertanian pada tahun 2020 sebesar 93,18 Ha serta adanya puso dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama wereng batang coklat (WBC), tikus, penggerek batang dan sundep. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi, produktivitas padi pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 karena implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Produksi dan produktifitas cabe selama 5 tahun cenderung fluktuatif dan belum optimal, faktor yang mempengaruhi antara lain cabe merupakan komoditas yang rentan dengan serangan hama penyakit tanaman dan harganya selalu fluktuatif di pasaran.

Perkembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura (cabe) Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.79**
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Komoditas | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produksi (Ton) | Provitas (Kwt/ha) | Produksi (Ton) | Provitas (Kwt/ha) | Produksi (Ton) | Provitas (Kwt/ha) | Produksi (Ton) | Provitas (Kwt/ha) | Produksi (Ton) | Provitas (Kwt/ha) |
| 1 | Padi | 426.028 | 57,87 | 380.268 | 51,41 | 459.044 | 62,19 | 469.873,51 | 67,16 | 449.093,28 | 63,33 |
| 2 | Jagung | 72.583 | 74,97 | 90.343 | 81,50 | 81.981 | 79,66 | 102.952,94 | 90,76 | 99.087,90 | 89,38 |
| 3 | Kedelai | 2.759 | 18,12 | 4.440 | 19,87 | 7.026 | 19,76 | 2.559,81 | 16,28 | 1.039,92 | 19,12 |
| 4 | Kacang Tanah | 1.784 | 14,58 | 1.527 | 16,79 | 1.816 | 14,01 | 1.495,21 | 14,42 | 1.157,73 | 13,21 |
| 5 | Kacang Hijau | 260 | 8,72 | 285 | 12,50 | 81 | 11,31 | 537,75 | 15,91 | 1.984,97 | 10,77 |
| 6 | Ubi Kayu | 32.224 | 392,11 | 9.778 | 224,99 | 9.370 | 261,80 | 21.078,17 | 291,13 | 27.296,04 | 273,81 |
| 7 | Ubi Jalar | 356 | 143,55 | 251 | 119,28 | 297 | 103,67 | 555,18 | 128,51 | 332,89 | 134,77 |
| 8 | Cabe | 1.698 | 4,53 | 1.459 | 4,57 | 948 | 9,43 | 2762 | 9,66 | 2463 | 8,92 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Komoditas andalan dan unggulan di Kabupaten Klaten adalah tembakau rajangan dan tembakau asepan, produksi tertinggi tembakau rajangan dicapai pada tahun 2019 sebesar 2.038,14 ton. Sedangkan untuk produksi tertinggi tembakau asepan dicapai pada tahun yang sama sebesar 1.487,05 ton. Dari sisi produktifitas tembakau rajangan cenderung menurun, dari sebesar 4,83 ton/Ha di tahun 2016 menurun menjadi 1,28 ton/Ha di tahun 2020. Sedangkan untuk produktifitas tembakau asepan cenderung meningkat dari 0,98 ton/Ha di tahun 2016 menjadi 1,03 ton/Ha di tahun 2020. Produktivitas komoditas tembakau rajangan dan asepan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.80**
**Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tembakau Rajangan**
**dan Asepan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Tahun | Rajangan | | | Asepan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ton/Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ton/Ha) |
| 1 | 2020 | 1.590,60 | 2.038,13 | 1,28 | 1.440,60 | 1.487,00 | 1,03 |
| 2 | 2019 | 1.684,31 | 2.038,14 | 1,21 | 1.516,42 | 1.487,05 | 0,98 |
| 3 | 2018 | 1.016,52 | 1.147,27 | 1,3 | 940,98 | 1.073,05 | 1,14 |
| 4 | 2017 | 1.073,50 | 1.233,53 | 1,15 | 958,00 | 1.070,72 | 1,12 |
| 5 | 2016 | 674,00 | 815,04 | 4,83 | 1.060,24 | 1.038,53 | 0,98 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah*

Kabupaten Klaten juga mempunyai produksi tanaman perkebunan selain tembakau asepan dan rajangan yang menjadi komoditas andalan dan unggulan di Kabupaten Klaten, seperti Tembakau Vorstenland, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Deres, Kopi Arabica, Kopi Robusta, Cengkeh, Lada, dan Tebu. Produksi tertinggi di tahun 2020 adalah Kelapa dengan total produksi 4.322,36 ton, sedangkan produksi terendah adalah kopi robusta dengan total produksi 12,94 ton. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.81**
**Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No. | JenisKomoditas | Produksi (Ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | TembakauVorstenland | 303.930 | 239.455 | 129.115 | 11.600 | 0 |
| 2. | Kelapa Dalam | 4.097,63 | 4.697,58 | 4.588,66 | 4.048,18 | 4.322,36 |
| 3. | Kelapa Hibrida | 45.510 | 45.600 | 44.133 | 29.340 | 29.940 |
| 4. | Kelapa Deres | 99.470 | 98.740 | 92.464 | 87.150 | 78.840 |
| 5. | Kopi Arabica | 105,25 | 81,32 | 81,52 | 43,32 | 162,20 |
| 6. | Kopi Robusta | 9,80 | 9,99 | 10,15 | 9,82 | 12,94 |
| 7. | Cengkeh | 44,22 | 45,63 | 47,04 | 36,50 | 49,75 |
| 8. | Lada | 13.150 | 12.110 | 13.150 | 11.400 | 17.700 |
| 9. | Tebu | 6.289,000 | 3.258,940 | 824.760 | 3.316,970 | 3.202,97 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah*

Populasi sapi potong selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 88.343 ekor di tahun 2016 menjadi 104.321 ekor di tahun 2020, sedangkan untuk populasi ternak ayam baik untuk ayam bukan ras, ayam pedaging dan ayam petelur pada tahun 2017 mengalami peningkatan dikarenakan adanya permintaan terhadap ayam di pasar domestik lebih menyukai daging ayam *(white meat)* dibanding dengan daging merah *(red meat)*, begitu juga dengan populasi ternak lainnya di Kabupaten Klaten yang rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan terhadap daging, susu, telur yang menyebabkan kenaikan jumlah populasi ternak di tiap tahunnya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan gizi, meningkatnya pertumbuhan penduduk setiap tahun, perkembangan teknologi dan informasi di bidang peternakan dan adanya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Untuk populasi ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil meliputi sapi potong, sapi perah, kambing dan domba periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 populasi ternak ruminansia besar dan kecil 220.970 ekor, meningkat menjadi 264.463 ekor di tahun 2020. Selengkapnya populasi ternak pada tahun 2016–2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.82**
**Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Ternak | Populasi Ternak (ekor) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*) |
| 1 | Sapi Potong | 88.343 | 88.850 | 100.259 | 102.431 | 104.312 |
| 2 | Sapi Perah | 5.795 | 6.098 | 6.784 | 6.443 | 6.807 |
| 3 | Kambing | 88.343 | 88.957 | 96.596 | 101.402 | 105.782 |
| 4 | Domba | 38.489 | 38.570 | 45.204 | 46.963 | 47.562 |
| 5 | Ayam Bukan Ras | 2.801.581 | 3.256.177 | 2.245.443 | 2.532.676 | 2.109.668 |
| 6 | Ayam Pedaging | 2.898.344 | 3.385.400 | 2.475.187 | 3.896.788 | 2.489.800 |
| 7 | Ayam Petelur | 867.822 | 930.234 | 746.422 | 832.764 | 900.342 |
| 8 | Itik | 395.436 | 575.100 | 425.473 | 430.329 | 397.012 |
| 9 | Burung Puyuh | 451.193 | 452.332 | 519.566 | 535.244 | 363.563 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah*

Perkembangan produksi susu, daging dan telur pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, Tahun 2017 produksi daging tinggi, disebabkan karena kenaikan konsumsi terhadap daging naik. Hal tersebut karena dipengaruhi berbagai kondisi diantaranya adalah:

1. Ternak yang dipotong tahun 2017 untuk ayam dan domba tinggi
2. Pertumbuhan ekonomi nasional
3. Isu politik,
4. Nilai tukar rupiah

Selengkapnya produksi peternakan tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.83**
**Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Jenis | Produksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*) |
| 1 | Susu (Liter) | 4.878,66 | 5.903.181 | 4.411.440 | 4.978.442 | 4.456.373 |
| 2 | Daging (ton) | 5.400 | 13.538 | 6.796 | 7.048 | 7.200 |
| 3 | Telur (kg)* | 15.931.010 | 13.323.579 | 12.773.977 | 17.745.666 | 15.038.594 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Pemberantasan penyakit ternak menurut jenisnya (vaksinasi) di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 perkembangannya stagnan yaitu sebanyak 6.000 ekor tiap tahunnya, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran. Selengkapnya untuk Pemberantasan penyakit ternak menurut jenisnya (vaksinasi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 sebagai berikut.

**Tabel 2.84**
**Pemberantasan Penyakit Ternak Menuurt Jenisnya (Vaksinasi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Tahun | Antrax | | Septicaemia Epizootica (Penyakit mulut dan Kuku) |
|---|---|---|---|---|
| | | Pakai Operasional | Non Operasional | |
| 1. | 2020 | 1.900 | 4.100 | 0 |
| 2. | 2019 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| 3. | 2018 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| 4. | 2017 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| 5. | 2016 | 2.000 | 4.000 | 0 |

*Sumber: DPKPP Kab Klaten, 2021, diolah*

Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah Kabupaten Klaten sudah memiliki beberapa kelompok tani dengan cakupan bina kelompok tani yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2016-2020 jumlah darma tirta sebanyak 316 kelompok dan kelompok tani sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.728 kelompok, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.85**
**Jumlah Darma Tirta dan Kelompok Tani di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Darma Tirta | Kelompok Tani |
|---|---|---|---|
| 1 | Prambanan | 16 | 35 |
| 2 | Gantiwarno | 14 | 36 |
| 3 | Wedi | 11 | 38 |
| 4 | Bayat | 5 | 36 |
| 5 | Cawas | 17 | 50 |
| 6 | Trucuk | 18 | 48 |
| 7 | Kalikotes | 7 | 40 |
| 8 | Kebonarum | 4 | 16 |
| 9 | Jogonalan | 16 | 48 |
| 10 | Manisrenggo | 16 | 49 |
| 11 | Karangnongko | 3 | 46 |
| 12 | Ngawen | 8 | 32 |
| 13 | Ceper | 18 | 49 |
| 14 | Pedan | 14 | 32 |
| 15 | Karangdowo | 18 | 48 |
| 16 | Juwiring | 19 | 49 |
| 17 | Wonosari | 18 | 48 |
| 18 | Delanggu | 16 | 48 |
| 19 | Polanharjo | 18 | 48 |
| 20 | Karanganom | 17 | 48 |
| 21 | Tulung | 12 | 48 |
| 22 | Jatinom | 8 | 57 |
| 23 | Kemalang | 0 | 53 |
| 24 | Klaten Selatan | 10 | 33 |
| 25 | Klaten Tengah | 5 | 17 |
| 26 | Klaten Utara | 8 | 16 |
| | **2020** | **316** | **1.728** |
| | **2019** | **316** | **1.068** |
| | **2018** | **316** | **1.068** |
| | **2017** | **316** | **1.068** |
| | **2016** | **316** | **1.036** |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah*

Jumlah kelompok tani yang terbentuk pada tahun 2016 sebanyak 1.036 kelompok dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1.728 kelompok yang terdiri dari kelompok tani pemula sebanyak 1.053 kelompok, kelompok tani Lanjut sebanyak 531 kelompok, kelompok tani Madya sebanyak 135 kelompok dan kelompok tani Utama sebanyak 9 kelompok, sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.86**
**Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Klasifikasi**
**Tahun 2016-2020**

| No | Kelas Poktan | tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pemula | 416 | 448 | 448 | 448 | 1.053 |
| 2 | Lanjut | 455 | 455 | 455 | 455 | 531 |
| 3 | Madya | 162 | 162 | 162 | 162 | 135 |
| 4 | Utama | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| | **Total** | **1.036** | **1.036** | **1.036** | **1.036** | **1.728** |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah*

Jumlah poktan yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2020 sejumlah 1.728 poktan yang tersebar di 401 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah penyuluh/petugas PPL (PNS dan P3K) ada 165 orang, sehingga 1 PPL rata-rata harus mengampu 10 poktan. Idealnya sesuai dengan program kementan adalah 1 desa 1 penyuluh dan sebaiknya 1 penyuluh membina 3 poktan. Ketersediaan prasarana pertanian meliputi infrastruktur irigasi untuk jaringan irigasi tersier dan kuarter dalam kondisi baik/fungsional tahun 2020 baru mencapai 3,22%, sedangkan ketersediaan prasarana penyuluhan untuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di kecamatan beserta sarana pendukungnya pada tahun 2020 tercatat sebesar 26%. Luasan lahan pengairan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.87**
**Luasa Lahan Pengairan di Kabupaten Klaten (Hektar) Tahun 2016-2021**

| No | Tahun | Pengairan Teknis | Pengairan ½ Teknis | Pengairan Sederhana | Tadah Hujan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | 18.590,7 | 9.602,9 | 1.981,0 | 1.596,4 | 31.771,1 |
| 2. | 2019 | 18.629 | 9.627 | 1.992 | 1.616 | 31.863 |
| 3. | 2018 | 18.649 | 9.661 | 2.002 | 1.631 | 31.943 |
| 4. | 2017 | 18.971 | 10.358 | 2.027 | 1.665 | 33.021 |
| 5. | 2016 | 18.993 | 10.380 | 2.028 | 1.665 | 33.066 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah*

Cakupan penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya selama periode 2016-2020 belum optimal, hal ini menjadi tantangan kedepan untuk terus ditingkatkan. Luasan cakupan penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian tahun 2020 mencapai 55%. Selengkapya luas tambah serang OPT dan bencana alam pada tanaman padi dan sawah menurut jenis organismenya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.88**
**Luas Tambah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam Pada Tanaman Padi Sawah Menurut Jenis Organisme di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Tahun | Pengerek Batang | Wereng Coklat | Tikus | Tungro | BLB/ Kresek | Blas | Puso | B. Alam | Luas tambah serangan Opt (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020** | 1.014 | 4 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 |
| **2019** | 1.014 | 4 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 |
| **2018** | 1.701 | 0 | 304 | 0 | 322 | 107 | 8 | 146 | 2.437 |
| **2017** | 1.454 | 682 | 27 | 56 | 380 | 56 | 746 | 3.006 | 2.667 |
| **2016** | 1.816 | 8 | 23 | 5 | 490 | 401 | 173 | 1.858 | 2.744 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah*

Program pengembangan agropolitan merupakan program yang sangat strategis, sehingga perlu dikembangkan dan diaplikasikan untuk pengembangan kawasan pertanian agropolitan secara umum di Kabupaten Klaten, mengingat potensi lokal yang ada, khususnya untuk pengembangan agropolitan di wilayah lereng merapi yang mempunyai berbagai macam potensi berupa tanaman hortikultura (lada, cengkeh, kopi, sayur-sayuran dan buah-buahan), makanan olahan (kopi petruk, kopi merapi, minuman rempah, berbagai macam keripik, sambal dll), batik lereng merapi, kerajinan bambu,

peternakan kambing dan potensi pariwisata (Deles Indah, Kalitalang, Pesanggrahan Pakubuwono, Embung Sidomulyo, Girpasang, Bendungan Kali Krakal, Tanaman Hidroponik, dll). Selain di daerah lereng merapi program tersebut perlu juga dikembangkan di kawasan lain guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan kawasan agropolitan program pengembangan pertanian terpadu memiliki peranan penting dalam mendukung kawasan tersebut, di dalam memadukan potensi-potensi agro yang ada kawasan lereng merapi. Sedangkan replikasi program pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi dilaksanakan di UBBT Humo Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah sebagai lokasi inti basisnya, dengan lahan seluas 7 Ha (4 Ha untuk pertanian, tanam padi) dan 3 Ha untuk sarana prasarana pendukung berupa gedung pelatihan, gedung pertemuan, showroom dan rumah dinas sudah dibangun, sedangkan untuk sarana dan pendukung untuk pengembangan hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, peternakan dan jalan setapak), gazebo-gazebo dan cafe bertingkat untuk memandang view merapi dan sarana prasarana lainnya, maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik PPL atau kelompok tani, diharapkan akan segera dibangun yang saat ini dalam proses perencanaan. Selanjutnya UBBT tersebut dapat dijadikan sebagai pusat Inkubasi Pertanian dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Pertanian Terpadu dan Agrowisata.

Program ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah kabupaten Klaten dengan Badan Tenaga Nuklir Republik Indonesia sejak tahun 2015 dan telah berakhir pada tahun 2019. Konsep pertanian terpadu ini menggabungkan berbagai teknik budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang bertujuan untuk saling mendukung dan mencakup berbagai fungsi pembibitan, informasi, komunikasi, pusat pangan, lumbung pangan, edukasi dan pariwisata.

Termasuk untuk program pemurnian varietas Padi Rojolele Srinar dan Srinuk yang merupakan kerjasama dengan BATAN, dan saat ini sudah melalui semua uji tahapan baik pada uji adaptasi (multi lokasi), uji hama penyakit, uji kualitas hasil dan uji rasa, serta pelepasan varietas dan saat ini sudah masuk pada tahapan pengusulan hak paten dan penyiapan kelembagaannya, untuk selanjutnya perlu adanya budidaya pengembangan varietas padi bagi kelompok tani serta membangun jejaring guna mempromosikan dan memasarkan hasil produk tersebut.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan juga produk unggulan bidang pertanian yang ada di Kabupaten Klaten (rojolele srinar dan srinuk serta perlu adanya penelitian bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll).

### 3. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Klaten yang tersedia pada tahun 2020 yaitu toko swalayan sebanyak 604, pasar umum atau rakyat sebanyak 85 unit, pasar hewan sbanyak 7 unit, pasar buah sebanyak 0 unit, pasar sepeda sebanyak 4 unit, pasar burung sebanyak 0 unit, serta pasar klitikan 1 unit. Total jumlah pasar menurut jenisnya sampai dengan tahun 2020 sebanyak 710 unit. Untuk jumlah pasar hewan pada tahun 2016-2019 sebanyak 12 (dua belas) unit, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7 (tujuh) unit

dikarenakan untuk pengelolaannya ada yang dikembalikan ke desa sebanyak 3 (tiga) unit dan yang sudah tidak operasional sebanyak 2 (dua) unit dikarenakan sudah tidak ada pedagangnya.

Menurut jenis pasar yang ada di Kabupaten Klaten, jumlah toko swalayan paling mendominasi sejak tahun 2016 dan terus bertambah setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan gaya hidup masyarakat serta kondisi iklim usaha yang kondusif di daerah. Disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mendirikan toko swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Dari sejumlah 85 unit pasar umum/ rakyat (pasar tradisional) milik pemerintah daerah masih banyak yang belum di revitalisasi, sampai dengan tahun 2017 baru 14 unit pasar yang direvitalisasi, sehingga masih menyisakan 37 unit pasar yang belum direvitalisasi. Jumla pasar tradisional tersebut terdiri dari 51 unit pasar rakyat/ umum, dan 34 unit merupakan pasar desa yang pengelolannya sudah diserahlan kepada pemerintah desa. Data jumlah pasar menurut jenis pasar dapat dilihat pada terlihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.89**
**Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016–2020**

| Jenis Pasar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toko swalayan | 398 | 417 | 556 | 573 | 604 |
| Pasar umum/rakyat | 55 | 57 | 85 | 85 | 85 |
| Pasar hewan | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
| Pasar buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pasar sepeda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lain-lain / pasar burung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pasar klitikan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | **472** | **493** | **660** | **676** | **701** |

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2021, diolah*

Cakupan bina kelompok usaha informal di tahun 2016 tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 9,77%, namun di tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya dampak Pandemi Covid-19 menjadi 8,26%. Dalam peningkatan potensi perdagangan di Kabupaten Klaten dilakukan penataan pasar dan penerbitan ijin usaha terhadap usaha perdagangan, dilihat dari persentase rekomendasi ijin usaha perdagangan yang diterbitkan dari tahun 2016-2020 menunjukkan trend meningkat, dari 83% pada tahun 2016 meningkat menjadi 98% pada tahun 2020 dengan persentase pasar yang di awasi telah mencapai 100%.

Selain itu sejalan dengan kebijakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pada tahun 2018 pelaksanaan metrologi legal diserahkan kewenangannya dari provinsi ke kabupaten. Dalam hal ini Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang yang akan melakukan Tera/Tera Ulang kepada wajib tera dalam rangka optimalisasi perlindungan konsumen demi terwujudnya usaha perdagangan yang aman tertib dan terkendali. Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang tahun 2020 baru sebesar 5% sehingga diperlukan

kesiapan penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia guna mendukung kelembagaan unit pengelola meteorologi.

Terkait penerimaan pendapatan yang berasal dari retribusi pasar, terdapat kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 417.923.199,00 atau sekitar 8% dari penerimaan retribusi pasar tahun 2019, hal ini disebabkan karena dilepasnya 40 unit pasar desa yang tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tetapi dikelola oleh pemerintah desa masing-masing, sehingga tidak dapat menarik retribusi pasar desa tersebut.

Capaian kinerja urusan bidang perdagangan tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.90**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan perdagangan**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Cakupan Bina Kelompok Usaha | persen | 9,77 | 5,9 | 7,34 | 7,38 | 8,26 |
| 2. | Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan | % | 83 | 93 | 84 | 86 | 98 |
| 3. | Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi | % | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 |
| 4. | Persentase PKL yang terbina | % | 0 | 0 | 8,5 | 17,1 | 25,7 |
| 5. | Jumlah pendapatan retribusi pasar | Rp | 3.839.844.430 | 4.157.526.799 | 4.685.207.764 | 5.034.789.532 | 4.616.866.333 |
| 6. | Persentase pasar yang diawasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting ) | % | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| 8. | Persentase Kinerja Pupuk | % | 97,78 | 94,63 | 98,56 | 97,07 | 95,89 |
| 9. | Nilai ekspor | U$ | 18.652.664 | 19.634.383 | 20.667.772 | 454.331.478 | 90.224.786 |
| 10. | Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang | % | 3,12 | 3,50 | 3,75 | 4,2 | 5 |
| 11. | Jumlah event promosi produk dalam negeri | % | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 12. | Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan | % | 3,63 | 3,87 | 4,14 | 4,31 | -4,79 |

*Sumber : Disdagkop dan UKM Kabupaten Klaten, 2021*

Potensi komoditas ekspor di Kabupaten Klaten meliputi 7 jenis komoditas antara lain produk textile, kayu, rempah, briket arang, plastik, perikanan dan perkebunan. Komoditas kayu merupakan salah satu komoditas ekspor yang mengalami perkembangan yang cukup baik, dengan produk olahanya berupa mebel dengan negara tujuan ke China, Netherland dan Jerman. Komoditas tersebut unggul pada ketersediaan bahan baku kayu yang sudah mempunyai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai syarat produk ekspor untuk mebel. Disamping itu juga ada komoditas tekstil

dengan negara tujuan Korea, Amerika, Perancis dan Jepang. Untuk komoditas perkebunan terdapat vanili yang memiliki banyak kegunaan, selain untuk membuat minuman juga bisa digunakan untuk menambah rasa pada makanan, dengan negara tujuan ke Belgia. Komoditas rempah diekspor ke Swedia, komoditas briket arang di ekspor ke Brazil dan Oman dan Komoditas perikanan ke negara tujuan Los Angeles.

Komoditas dengan jumlah terbanyak yang di ekspor yaitu berupa Kayu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sejumlah 8 (delapan) perusahaan yang melakukan ekspor dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 12 (dua belas) perusahaan. Sedangkan untuk komoditas rempah, plastik, perkebunan dan perikanan dari tahun ke tahun masih stagnan. Untuk mengetahui perkembangan komoditas ekport di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.91**
**Komoditas Ekspor Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Komoditas | Jumlah Perusahaan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kayu | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | Textile | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Rempah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Plastik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Perkebunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Briket Arang | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Perikanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Disperindag Prov. Jateng, 2021 data diolah*

**4. Perindustrian**

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, capaian tahun 2016 sebesar 0,59% mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,03%, kemudian di tahun 2020 meningkat cukup drastis menjadi 8,03%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) Meningkatnya koordinasi pembangunan industri dengan dinas/ lembaga lainnya; 2) Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 3) Perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan 4) Penguatan daya beli masyarakat.

Komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 34,50% (9.601.710,72 juta) pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 34,51% (Rp.9.486.050,46 juta). Basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan,

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi, industri besar dan

sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2016-2020 yang mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui pola klaster, Sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari: (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kemalang (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten Selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Sedangkan untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper. Perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja menurut kelompok usaha Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.92**
**Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Kelompok Industri | | | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (Jutaan Rp) | Nilai Produksi (Jutaan Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | INDUSTRI BESAR / MENENGAH | | | | | |
| 1 | Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA) | | 70 | 2.100 | 140.200 | 1.742.048.134 |
| 2 | Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan | | 262 | 21.000 | 2.223.100 | 1.157.048.530 |
| Sub Jumlah I | | 2020 | 332 | 23.100 | 2.363.300 | 7.124.233.890 |
| | | 2019 | 332 | 23.100 | 2.363.300 | 7.124.233.890 |
| | | 2018 | 137 | 12.832 | 588,25 | 2.896.201.908 |
| | | 2017 | 135 | 12.825 | 587,95 | 2.894.754.530 |
| | | 2016 | 134 | 12.818 | 627,64 | 2.893.307.876 |
| II | INDUSTRI KECIL | | | | | |
| 1 | Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA) | | 1.826 | 5.478 | 9.130 | 2.277.656 |
| 2 | Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan | | 6.177 | 18.531 | 30.885 | 1.861.496.473 |
| Sub Jumlah II | | 2020 | 8.003 | 24.009 | 40.015 | 994.378.670 |
| | | 2019 | 7.333 | 21.999 | 36.665 | 914.208.008 |
| | | 2018 | 34.686 | 141.210 | 991,81 | 4.138.094.610 |

| Kelompok Industri | | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (Jutaan Rp) | Nilai Produksi (Jutaan Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 34.680 | 141.182 | 991,61 | 4.137.639.268 |
| | 2016 | 34.666 | 141.125 | 991,21 | 4.135.984.709 |
| **Jumlah I + II** | **2020** | **8.335** | **47.109** | **2.403.315** | **8.118.612.560** |
| | **2019** | **7.665** | **45.099** | **2.399.965** | **8.038.441.898** |
| | **2018** | **34.823** | **154.042** | **1.580,06** | **7.034.296.518** |
| | **2017** | **34.815** | **154.007** | **1.579,56** | **7.032.393.798** |
| | **2016** | **34.800** | **153.943** | **1.618,85** | **7.029.292.585** |

*Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021, diolah*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan industri menengah dan besar pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan jumlah unit usaha maupun pengangguran dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah unit usaha kecil pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2015-2018 belum ada pendataan pasti (*by name*), sedangkan mulai tahun 2019 sudah ada data yang pasti (*by name*).

Untuk industri mebel dari sejumlah 1.322 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan tahun 2019 baru terdapat 276 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan didorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan eksport mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain dari 8.335 IKM yang memiliki daya saing pada Tahun 2020 yang sebesar 3,5% menurun jika dibandingkan tahun 2019 mencapai 3,9% sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

Capaian indikator urusan perindustrian Kabupaten Klaten dari Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.93**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Pertumbuhan Industri | % | 0,59 | 0,59 | 0,03 | 1,47 | 8,03 |
| 2. | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | % | 33,74 | 34,03 | 34,19 | 34,50 | 34,51 |
| 3. | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | % | 6,15 | 6,25 | 5,98 | 6,52 | -1,21 |

*Sumber: Disperinaker Kab, Klaten, 2021*

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten, baik industri kecil, menengah maupun industri besar dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Kinerja usaha kecil, menengah dan besar ditunjukkan dengan jumlah usaha mikro, di mana pada tahun 2016 sebanyak 34.673 IKM mengalami penurunan menjadi 8.335 IKM pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pendataan yang *memunculkan by name by address* bagi pelaku industri melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara online yang disediakan oleh

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2019 serta adanya dampak Pandemi Covid-19.

Cakupan bina kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten dipergunakan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pelatihan-pelatihan, sedangkan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana produksi kepada IKM belum bisa dilaksanakan karena kebijakan tentang pemberian hibah. Perkembangan cakupan bina kelompok IKM di Kabupaten Klaten menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok IKM sebesar 0,02% dan pada tahun 2019 sebasar 0,31%.

Untuk persentase cakupan bina kelompok industri pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,12% dikarenakan refocusing anggaran dampak adanya Pandemi Covid-19. Untuk tahun 2018 jumlah kelompok pengrajin menunjukkan jumlah yang menurun dari 34.686 IKM menjadi 7.665 IKM pada tahun 2019. Oleh karena dilaksanakan updating oleh bidang perindustrian dan bidang Koperasi dan UKM, sehingga jumlah data terbagi menjadi IKM dan UKM. Data rinci mengenai cakupan bina kelompok IKM terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.94**
**Jumlah IKM Yang Dibina Tahun 2016 - 2020**

| No | Tahun | Jumlah IKM | Jumlah IKM dibina | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | 34.673 | 785 | 0,02 |
| 2. | 2017 | 34.680 | 800 | 0,02 |
| 3. | 2018 | 34.686 | 1.095 | 0,03 |
| 4. | 2019 | 7.665 | 2.340 | 0,31 |
| 5. | 2020 | 8.335 | 1.020 | 0,12 |

*Sumber: Disperinaker Kab, Klaten, 2021*

## 5. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah fasilitasi pemberangkatan transmigran yang penentuan jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, pemenuhan kuota calon transmigran yang diberangkatkan mengalami penurunan khususnya di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 persentase pengiriman transmigran hanya 70% dari kuota yang ditetapkan, sedangkan tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 tidak ada pemberangkatan transmigran.

**Tabel 2.95**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi | % | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 |

*Sumber: Disperinaker Kab, Klaten, 2021*

**6. Kelautan dan Perikanan**

Sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten mendorong petani dan masyarakat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Areal objek perikanan di Kabupaten Klaten dikelompokan menjadi 6 jenis, yaitu kolam, sawah, keramba, waduk, sungai dan genangan air. Berikut luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.96**
**Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Tahun | Kolam | Sawah | Keramba | Waduk | Sungai | Genangan Air | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46,27 | 0 | 0,314 | 189 | 178,90 | 1.737,79 | 2.152,27 |
| 2019 | 46,27 | 0 | 0,314 | 180 | 178,90 | 1.737,79 | 2.143,27 |
| 2018 | 42,60 | 12,25 | 1,61 | 180 | 178,90 | 1.737,79 | 2.153,15 |
| 2017 | 39,06 | 2,60 | 1,56 | 180 | 178,90 | 1.737,79 | 2.139,91 |
| 2016 | 47,28 | 22,10 | 2,57 | 180 | 177,90 | 1.733,39 | 2.163,24 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Penebaran benih ikan pada kolam memiliki proporsi paling besar dibandingkan areal objek perikanan lainnya, tahun 2016 benih ikan yang disebar di kolam mencapai 393.831,41 ekor dan merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Untuk tahun 2020 benih ikan yang disebar sebanyak 108.572,68 ekor. Berikut penebaran benih menurut luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.97**
**Penebaran Benih Ikan Menurut Areal Objek Perikanan (ekor)**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Tahun | Kolam | Sawah | Keramba | Waduk | Sungai | Genangan Air | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 108.572,68 | - | 0 | 1,000 | 451,82 | - | 110.024,93 |
| 2019 | 137.655,7 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 138.655,7 |
| 2018 | 134.814,7 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | 135.984,7 |
| 2017 | 273.353,10 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 275.353,10 |
| 2016 | 393.831,41 | 1.255,00 | 4.975,38 | 0 | 1.540.000 | 0 | 1.940.061,79 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Penebaran benih ikan *(restocking)* di perairan umum selain untuk menjaga ekosistem guna menjaga keseimbangan alam serta memberikan mata pencaharian kepada nelayan tangkap yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan gizi keluarga. Tebar benih ikan dari tahun 2016-2020 berkembang secara fluktuatif, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1.540.000 ekor dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 481.000 ekor. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran akibat dampak Pandemi Covid-19.

**Tabel 2.98**
**Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Tahun | Jumlah Lokasi | Jenis Ikan | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lele | Nila | |
| 1 | 2016 | 10 | 665.003 | 875.000 | 1.540.003 |
| 2 | 2017 | 10 | 610.000 | 300.000 | 910.000 |
| 3 | 2018 | 0 | - | - | - |
| 4 | 2019 | 5 | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | 2020 | 1 | - | 481.000 | 481.000 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Produksi perikanan di Kabupaten Klaten mengalami kondisi yang fluktuatif, capaian di tahun 2016 sebesar 28.316,84 ton mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 26.680,87 ton, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 28.229,38 ton. Peningkatan produksi perikanan dipengaruhi oleh adanya bantuan benih ikan, sedangkan penurunan produksi, salah satu penyebab yaitu adanya bencana banjir yang melanda lahan pembudidaya.

Perkembangan tingkat konsumsi ikan masyarakat dari tahun ke tahun megalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 20,04 Kg/kapita/Tahun meningkat menjadi 20,28 Kg/kapita/Tahun di tahun 2020 dengan jumlah produk olahan ikan tahun 2020 mencapai 682.000 kilogram, namun demikian untuk tingkat konsumsi ikan masih perlu ditingkatkan. Berikut perkembangan produksi perikanan dan konsumsi ikan Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.99**
**Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produksi benih ikan | ekor | 133.000.780 | 131.106.900 | 132.814.750 | 137.635.312 | 109.000.000 |
| Produksi perikanan (budidaya) | ton | 28.316,54 | 25.029,97 | 26.680,87 | 28.229,38 | 27.603,83 |
| Produksi perikanan (tangkap) | ton | 496 | 506 | 516 | 153 | 184 |
| Konsumsi ikan | kg/kapita / tahun | 17,78 | 18,50 | 19,18 | 20,04 | 20,28 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Pemerintah Kabupaten Klaten menaruh perhatian besar terhadap tingkat kesejahteraan nelayan, cakupan bina kelompok nelayan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 299 pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan). Untuk produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 496,2 ton di tahun 2016 menjadi 184 ton di tahun 2020.

**Tabel 2.100**
**Realisasi Kelompok Nelayan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Cakupan bina kelompok nelayan | pokdakan | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Produksi perikanan kelompok nelayan | ton | 496,2 | 506,1 | 516,5 | 153 | 184 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Jumlah produk olahan ikan di Kabupaten Klaten terdiri dari berbagai berbagai jenis ikan yang diolah baik sebagai ikan asin maupun ikan olahan lainnya. Capaiannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 9.707.225 kg menjadi 15.260.368 kg pada tahun 2020. Selengkapnya untuk jumlah produk olahan ikan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.101**
**Realisasi Peredaran Ikan Olahan dan Jenis Serta Harga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

| Jenis Ikan | Volume (kg) | Harga Rata-rata (Rp) | Nilai (.000 Rp) |
|---|---|---|---|
| **I. IKAN ASIN** | | | |
| 01. Teri No.1 | 145.300 | 35.000 | 5.085.500 |
| 02. Teri No.2 | 136.850 | 25.000 | 3.421.250 |
| 03. Layur | 155.750 | 20.000 | 3.115.000 |
| 04. Balur | 130.650 | 20.000 | 2.613.000 |
| 05. Siam | 134.755 | 4.500 | 606.398 |
| 06. Kinanthi | 125.354 | 12.000 | 1.504.248 |
| 07. Petek | 169.690 | 12.000 | 2.036.280 |
| 08. Jlantir | 65.625 | 11.000 | 721.875 |
| 09. Krese | 254.295 | 25.000 | 6.357.375 |
| 10. Kelapan | 62.550 | 13.000 | 813.150 |
| 11. Tungkul | 65.809 | 11.000 | 723.899 |
| 12. Tongkol | 155.750 | 15.000 | 2.336.250 |
| **Jumlah I** | **1.602.378** | | **29.334.225** |
| | | | |
| **II. IKAN OLAHAN** | | | |
| 01. Pindang Bandeng | 1.025.200 | 30.000 | 30.756.000 |
| 02. Bandeng Presto | 958.550 | 32.000 | 30.673.600 |
| 03. Pindang Tongkol | 523.120 | 22.000 | 11.508.640 |
| 04. Pindang Belanak | 517.550 | 27.000 | 13.973.850 |
| 05. Terasi | 50.140 | 15.000 | 752.100 |
| 06. Ebi | 189.750 | 55.000 | 10.436.250 |
| 07. Kerupuk Udang | 952.700 | 25.000 | 23.817.500 |
| 08. Keripik Belut | 2.584.010 | 120.000 | 310.081.200 |
| 09. Nila Goreng | 3.915.020 | 50.000 | 195.751.000 |
| 10. Lele Goreng | 2.674.300 | 25.000 | 66.857.500 |
| 11.Wader Goreng | 267.650 | 40.000 | 10.706.000 |
| | | | |
| **Jumlah II** | **13.657.990** | | **705.313.640** |
| **Jumlah Total 2020** | **15.260.368** | | **734.647.865** |

| Jenis Ikan | Volume (kg) | Harga Rata-rata (Rp) | Nilai (.000 Rp) |
|---|---|---|---|
| **2019** | **14.186.418** | | **695.959.565** |
| **2018** | **11.335.298** | | **519.996.965** |
| **2017** | **10.962.090** | | **453.871.565** |
| **2016** | **9.707.225** | | **399.527.915** |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

### 2.3.4. Unsur Penunjang Pemerintahan

Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan, selain itu juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**1. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari pemerintah. Selain itu, perencanan pembangunan daerah Kabupaten Klaten harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.102**
**Perkembangan Bidang Perencanaan Pembangunan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 90 | 95 | 96,13 | 94,5 | 100 |
| 6. | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | % | 90 | 95 | 98 | 98,8 | 100 |
| 7. | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021*

Berdasarkan tabel tersebut di atas terkait ketersediaan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPKPD, dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA konsisten ada selama tahun 2016-2020. Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis urusan perencanaan terus meningkat, di mana pada tahun 2020 berhasil baik dengan capaian kriteria "Sangat Tinggi" (interval nilai realisasi kinerja100% ≤ 100%).

Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja ini di antaranya adalah:

1) Penetapan indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis Bappeda sudah berorientasi pada hasil (*outcome*) karena sudah dibuat cascading dari level atas sampai yang terendah;
2) Pengukuran indikator lebih jelas karena sudah disesuaikan dengan regulasi terkait sehingga mempunyai rumus penghitungan yang jelas juga;
3) Adanya komitmen bersama dalam peningkatan kinerja.

**Tabel 2.103**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan**
**Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | % | 90 | 90 | 88,37 | 94,5 | 100 |
| 2. | Tersedianya Dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | % | 90 | 95 | 95,83 | 98,8 | 100 |

*Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Klaten, 2021*

## 2. Keuangan

### a. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.104**
**Opini BPK pada Laporan Keuangan Kabupaten Klaten**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opini BPK pada Laporan Keuangan | opini | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |

*Sumber: BPKD Kab, Klaten, 2021*

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2020 hasil Opini BPK Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTP artinya laporan keuangan di Kabupaten Klaten dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, dan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

**b. Penetapan APBD**

Dalam melaksanakan penetapan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakannya secara konsisten dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah yang baik dan tertib. Berikut gambaran perkembangan penetapan APBD di Kabupaten Klaten:

**Tabel 2.105**
**Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penetapan APBD | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu |

*Sumber: BPKD Kab. Klaten, 2021*

**c. Capaian Indikator Keuangan Daerah Lainnya**

Capaian indikator keuangan daerah lainnya diukur melalui indikator persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah dengan capain tahun 2020 sebesar 83,38%, dengan sisa belanja sebesar 16,82% menjadi SILPA pada tahun berikutnya. Capaian penyerapan dana kurang dari 100% tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya penghematan atau sisa lelang karena penawaran yang diajukan oleh pihak ketiga dibawah harga PAGU.

Penyelesaian persertifikatan tanah milik pemerintah daerah mengalami peningkatan dari 51,6% ditahun 2016 menjadi 54,31% pada tahun 2020, Untuk rasio PAD mengalami kondisi fluktuatif tahun 2016 tercatat sebesar 9,93% naik menjadi 15,36% ditahun 2018 kemudian mengalami penurunan dengan capaian 13,37% di tahun 2020.

Penyusunan RKA-SKPD sejak adanya aplikasi penganggaran tidak mengalami kendala dalam hal penyusunannya, sehingga selalu tepat waktu sesuai dengan surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Sementara untuk penyusunan laporan keuangan SKPD, batas waktu penyusunan diasumsikan sama dengan batas waktu penyusunan laporan keuangan kabupaten. Namun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka menjadi jelas bahwa batas waktu penyusunan laporan keuangan SKPD adalah 2 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Capaian dalam kurun waktu tahun 2016-2020 selalu mencapai target dan tepat waktu. Gambaran capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.106**
**Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

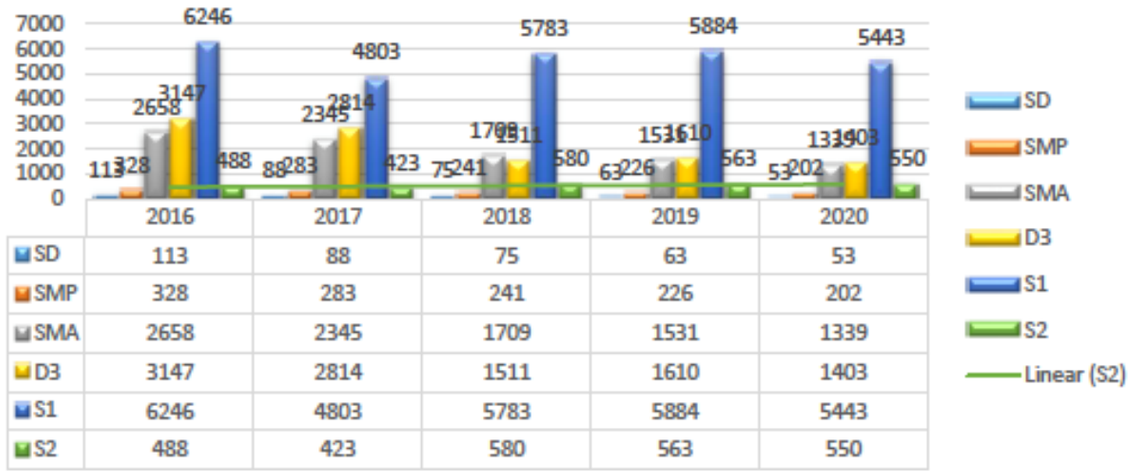
| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah | % | 85 | 81 | 87,82 | 86,7 | 83,38 |
| Persentase penyelesaiaan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah | % | 51,6 | 51,6 | 52,57 | 53,44 | 54,31 |
| Rasio PAD | % | 9,93 | 14,4 | 15,36 | 11,59 | 13,37 |
| Persentase OPD menyusun RKA-SKPD tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase OPD menyusun laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: BPKD Kab, Klaten, 2021*

### 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten, pada Tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 8.990 orang. Sebagian besar jenjang pendidikan para ASN adalah sarjana strata 1. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berikut profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 113 | 88 | 75 | 63 | 53 |
| SMP | 328 | 283 | 241 | 226 | 202 |
| SMA | 2658 | 2345 | 1709 | 1531 | 1339 |
| D3 | 3147 | 2814 | 1511 | 1610 | 1403 |
| S1 | 6246 | 4803 | 5783 | 5884 | 5443 |
| S2 | 488 | 423 | 580 | 563 | 550 |

*Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.84.**
**Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah di Kabupaten Klaten tahun 2020 menurun jika dibandingkan pada tahun 2019. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah tahun 2020 sebanyak 24 orang, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 2.517 orang, sedangkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah sebanyak 6.449 orang. Berikut perkembangan jabatan ASN di Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.107**
**Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | ASN | 22 | 21 | 27 | 26 | 24 |
| Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | ASN | 4.073 | 3.450 | 2.935 | 2.855 | 2.517 |
| Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | ASN | 8.833 | 7.179 | 6.963 | 6.940 | 6.449 |

*Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021*

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bersifat fluktuatif dan menurun tajam pada tahun 2020, dimana pada tahun 2016

tercatat sebesar 95,43% menurun drastis menjadi 11,26% pada tahun 2020. Untuk pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2020 tercatat sebesar 60,13%, hanya mengalami sedikit dibandingkan tahun sebelumnya (sebesar 60,25% pada tahun 2019). Penurunan tersebut dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mengubah pola kerja *work form office* menjadi *work form home*, serta meniadakan tatap muka secara langsung dengan jumlah peserta yang banyak.

Berikut data ASN dan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2016-2020.

**Tabel 2.108**
**ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 95,43 | 78,52 | 99 | 116 | 11,26 |
| Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 32,29 | 44,98 | 52,46 | 60,25 | 60,13 |

*Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021*

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 77,5 meningkat menjadi sebesar 78,06 di tahun 2020, di mana untuk indeks sistem merit Kabupaten Klaten tahun 2020 capaiannya sebesar 160,5. Indeks sistem merit merupakan angka pengukuran kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Persentase pembinaan disiplin ASN mengalami peningkatan dari 78% di tahun 2016 menjadi 100% di tahun 2020.

Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi tahun 2018 sebesar 101,29% dan 2020 sebesar 82,8%. Untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada penerimaan CPNS, sehingga pemenuhan kualifikasi CASN sesuai formasi tidak maksimal karena ada GAP yang cukup besar pada keputusan penetapan formasi dari Kementrian PAN RB dibandingkan usulan dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk indikator persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik baru diukur dari SKP tahunan dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Klaten, di mana capaian tahun 2016-2020 sebesar 99%.

Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan di tahun 2016 sebesar 78%, mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, di mana sampai dengan tahun 2020 capaiannya sebesar 100%. Data ini sudah mencakup data terkait penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan penyelesaian kasus perceraian PNS. Capaian indikator persentase mutasi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah tahun 2016 sebesar 100%, tapi tahun 2017-2019 mengalami penurunan dengan capaian di tahun 2019 sebesar 42%, kemudian di tahun 2020 kembali tercapai 100%. Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai permintaan OPD belum bisa terealisasi maksimal karena terbatasnya ASN yang ada.

Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2016 sebesar 95,43%, dan menurun di tahun 2020 menjadi 11,26%. Penurunan ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan serta mobilitas ASN. Data ini belum merangkum data peningkatan kapasitas dari seluruh OPD di Kabupaten Klaten yang penganggarannya di luar BKPPD Klaten. Berikut data manajemen pengelolaan ASN tahun 2016-2020.

**Tabel 2.109**
**Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indeks Profesionalitas ASN | indeks | N/a | 81,29 | 62 | 77,5 | 78,06 |
| Indeks Sistem Merit | indeks | N/a | N/a | N/a | N/a | 160,5 |
| Persentase ASN yang mengikuti diklat | % | 95,43 | 78,52 | 99 | 116 | 11,26 |
| Persentase layanan sumber daya aparatur | % | 76,74 | 93,66 | 93,75 | 95 | 90 |
| Persentase Pembinaan Disiplin ASN | % | 78 | 48 | 52 | 56 | 100 |
| Persentase informasi kepegawaian yang akurat | % | 98,73 | 94 | 90 | 80 | 54 |
| Persentase Pengembangan Aparatur | % | 66,04 | 76 | 83 | 96 | 70 |
| Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi | % | - | - | 101,29 | - | 82,8 |
| Peresentase penilaian kinerja ASN yang bernilai "baik" | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Persentase mutasi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah | % | 100 | 39,8 | 56 | 42 | 100 |

*Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021*

**4. Penelitian dan Pengembangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Implementasi terhadap penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klaten dilihat berdasarkan hasil kreatifitas masyarakat dan berbagai riset yang dimenangkan melalui krenova maupun dari kategori pemenang riset, Indikator tersebut menunjukkan ide dan kreasi masyarakat terhadap penemuan atau karya di bidang Iptek.

Persentase inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten 2020 sudah mencapai 85%. Jumlah peserta yang mengikuti krenova mengalami penurunan dari 20 peserta di tahun 2016 menjadi 5 orang peserta di tahun 2020. Sedangkan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah sudah terlaksana 34 inovasi dari target 19 inovasi(178%).

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

**Tabel 2.110**
**Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No, | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase inovasi yang diterapkan | % | 45,45 | 63,64 | 60,00 | 85,71 | 85,00 |
| 2. | Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova | Peserta | 20 | 22 | 31 | 36 | 5 |
| 3. | Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah | Jenis Inovasi | 10 | 14 | 16 | 21 | 34 |

*Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021*

Inovasi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.111**
**Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Nama Inovasi | Deskripsi Singkat Inovasi | Nama OPD |
|---|---|---|---|
| 1 | TITIP BANDAKU | Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana yang berbentuk data digital dan digital baik perorangan maupun lembaga, | Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten |
| 2 | SIMBAT (Sistem Informasi Manajemen Obat) | Sistem Informasi Management Obat Puskesmas digunakan untuk mempermudah penatausahaan persediaan obat di Puskesmas | Dinas Kesehatan |
| 3 | SIMPUS GIZKIA | Aplikasi di 34 puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan data-data pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak | Dinas Kesehatan |
| 4 | SIMPUS | Aplikasi di 34 puskesmas untuk manajemen pelayanan kesehatan dari pendaftaran sampai penerimaan obat | Puskesmas |
| 5 | Matur Dokter | Merupakan Inovasi Bupati Kepala Daerah Kab, Klaten di bidang Kesehatan Untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis, Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di launching oleh Bupati Katen pada Desember 2019 | Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten |
| | | Jenis-jenis layanan :<br>a. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam<br>b. Konsultasi kesehatan<br>c. Info Sehat<br>d. Tips Kesehatan<br>e. Berita Sehat<br>f. Forum Sehat<br>g. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS<br>h. Pelayanan Ambulance | |
| | | Pelaksana Kegiatan :<br>a. Tim Matur Dokter Dinas Kesehatan Kab, Klaten<br>b. Tim Matur Dokter 34 Puskesmas Kabupaten Klaten | |
| | | Sarana dan Prasarana<br>a. 15 Ambulance Matur Dokter (2 di Dinkes, 13 di Puskesmas)<br>b. 3 Motor Matur Dokter | |

| No | Nama Inovasi | Deskripsi Singkat Inovasi | Nama OPD |
|---|---|---|---|
| | | c. Aplikasi Matur Dokter dan Aplikasi khusus driver ambulance<br>d. Perangkat HT di Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas | |
| | | a. Aplikasi Matur Dokter : Diunduh dari Play Store Handphone Android<br>b. whatsapp : 0822 60000 910<br>c. Telepon : 0822 60000 910<br>(0272 3391 330)<br>email : maturdokter@gmail,com<br>instagram : maturdokterkabklaten<br>facebook : maturdokterkabklaten<br>Twitter : maturdokterkabklaten | |
| 6 | Apik (Ayo Piknik ke Klaten) | Sebuah aplikasi yang berbasis Internet yang menyajikan Obyek wisata, Kebudayaan dan Olahraga yang berada di Kabupaten Klaten yang menyajikan juga Informasi pendukung yang berkaitan dengan Obyek wisata tersebut | Disparbudpora |
| 7 | Aplikasi e-Awas Om (Eling Waspada Omo Penyakit) diganti Matur Tani | Aplikasi yang berbasis android untuk memudahkan masyarakat/petani di Kab, Klaten dalam memperoleh informasi mengenai OPT dan cara pengendalian berdasar prinsip PHT (pengendalian hama terpadu), | DPKPP |
| 8 | Alat Pemanen Air Hujan | Alat yang berfungsi menampung air hujan yang bisa dimanfaatkan sebagai cadangan air pada saat musim kemarau | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 9 | BIOGAS | Alat pengolah sampah organik menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi gas | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 10 | BIOPORI | Lubang lubang di sekitar lingkungan kantor yang berfungsi menyerap air hujan agar kembali ke tanah sekitar sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuatan kompos skala kecil | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 11 | sistaru,klatenkab ,go,id | Sistem pelayanan informasi tata ruang yang berbasis online yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi tentang tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabuapten Klaten Tahun 2011-2031 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 12 | Buku Matur Jujur | Pembentukan budaya baru dengan cara berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dengan sekolah sebagai lokomotif, Sebagai penghubung tri pusat pendidikan, dibutuhkan sarana yang mudah, murah, fleksibel, dengan anak difasilitasi media berani menulis/ mengungkapkan dengan ”matur jujur” terhadap apa yang dilihat, dilakukan/dikerja | Dinas Pendidikan |
| 13 | KARSA TANDING (KERJASAMA IMPLEMENTASI RUMAH SAKIT TANPA DINDING) | Model Pelaksanaan Promosi kesehatan melalui kerja sama stakeholder, mempercepat layanan informasi dan promosi, terjalinnya komunikasi dan kerjasama antara rumah sakit dan mitra fasilitas kesehatan, dan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam pembangunan kesehatan | RSD Bagas Waras Klaten |
| 14 | SI KREEASI (SISTEM KEUANGAN RUMAH SAKIT YANG EFISIEN, EFEKTIF, | Menyajikan data pendapatan Rumah Sakit Bagas Waras Kab, Klaten dengan cepat sehingga dapat diketahui secara cepat kondisi keuangan yang aman | RSD Bagas Waras Klaten |

| No | Nama Inovasi | Deskripsi Singkat Inovasi | Nama OPD |
|---|---|---|---|
| | AKUNTABEL DAN TERINTEGRASI) | | |
| 15 | ANJUNGAN MANDIRI ANTRIAN POLIKLINIK | Antrian pasien menuju ke poliklinik dengan tujuan agar pasien tertib dalam mengantri sehingga pasien datang awal mendapat nomor urutan awal, | RSD Bagas Waras Klaten |
| 16 | SISTEM ANTRIAN FARMASI | Waktu tunggu dalam kefarmasian yang bertujuan untuk mengetahui waktu pasien dalam menunggu racikan obat | RSD Bagas Waras Klaten |
| 17 | Aplikasi SAPA (SMS layanan Kepegawaian) | a. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis, Karsu, Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar;<br>b. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses;<br>c. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD | BKPPD |
| 18 | Aplikasi SIAP (sistem informasi Anjungan Layanan Kepegawaian) | a. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ;<br>b. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas (cek layanan kepegawaian spt : Karis, Karsu, ijin gelar , ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistisk kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat | BKPPD |
| 19 | Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (Computer Assisted Test) | Untuk menghilangkan parktek pungutan dalam mutasi masuk | BKPPD |
| 20 | Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS | Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun | BKPPD |
| 21 | Aplikasi BOS | Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah | BPKD |
| 22 | APL, SENSUS | verifikasi data sensus yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu, sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus, | BPKD |
| 23 | SIDIA | Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat, | BPKD |
| 24 | APL, REKONSILIASI | Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat | BPKD |
| 25 | e-PBB (pbb.klatenkab.go ,id) | Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (Cloud System) caranya cukup memasukkan NOP PBB | BPKD |
| 26 | e-BPHTB (bphtb.klatenkab. go.id) | Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online | BPKD |
| 27 | Pajak Online | Penambahan Loket pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes, di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia, Indomaret dan Go Pay | BPKD |
| 28 | NAS BPKD | NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share | BPKD |

| No | Nama Inovasi | Deskripsi Singkat Inovasi | Nama OPD |
|---|---|---|---|
| | | data, NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP | |
| 29 | Subsidi Bunga Bagi Pelaku Usaha Mikro | Program pinjaman bunga rendah dengan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dari APBD Kabupaten Klaten untuk membantu akses permodalan ke lembaga jasa keuangan formal, Pelaku usaha mikro yang layak menerima subsidi bunga adalah penduduk Kabupaten Klaten dan menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Klaten, memiliki IUMK, dengan jenis usaha ekonomi produktif, Plafon pinjaman maksimal Rp, 50,000,000,- bagi perorangan dan tidak untuk tujuan konsumtif, Besaran subsidi bunga adalah 80% dari bunga kredit per bulan dalam tahun anggaran berjalan, sesuai suku bunga yang berlaku pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Penyalur, LJK Penyalur yang ditunjuk untuk program subsidi bunga adalah PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dan PR BPR BKK Klaten (Perseroda) | Bag, Perekonomian |
| 30 | SMARD ON LINE | Pelayanan OnLine Disdukcapil ke Desa-desa meliputi : Ubdate Data,Pembetulan Data, Akta Kelahiran OnLine, Akta Kematian On Line | Disdukcapil |
| 31 | PELAUT BALA | Memberikan Pelayanan kepada kaum Divabel, Disabilitas, dan Berkebutuhan Khusus | Disdukcapil |
| 32 | BUAH HATI | Memberikan Pelayanan kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran secara Online lewat Program SIAK | Disdukcapil |
| 33 | Roadmap Pengembangan Usaha RojoLele Srinar, Srinuk dan Sriten (Penguatan Lumbung Padi Kabupaten) | • Sebagai bentuk upaya menindaklanjuti dimiliki aset khas Klaten yaitu Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar untuk perlu adanya pembuatan penyusunan Roadmap pengembangan usaha padi rojolele sebagai upaya langkah-langkah yang efektif berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Klaten,<br>• Pengembangan usaha padi rojolele merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan Klaten sebagai Lumbung Padi Nasional dengan kualitas dan kuantitas produksi pangan yang meningkat pesat yang mana juga menjadi prioritas Smart City Klaten, Upaya dalam penguatan lumbung padi di Kabupaten Klaten juga bertujuan untuk mewujudkan swasembada beras secara berkelanjutan, | Bappeda |
| 34 | Pelayanan izin Penelitian, Magang (PKL) dan KKN dengan Sistem Online | • Pelayanan izin Penelitian, Magang (Praktek Kerja Lapangan) dan Kuliah Kerja Nyata dengan Sistem Online, Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Pemohon izin dapat mengajukan izinnya dengan mengirim persyaratan ke email Bappeda, Kemudian pemohon izin akan mendapatkan konfirmasi dari Bappeda,<br>• Pertama apabila persyaratan sudah benar dan lengkap maka akan dilakukan proses pembuatan surat izin dan akan mengirimkan balik surat izin ke alamat email pemohon,<br>• Kedua, apabila persyaratannya ada yang salah atau masih kurang maka pemohon harus melengkapinya atau membenarkannya. | Bappeda |

*Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021*

### 2.3.5. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Salah satu unsur dalam rangka menuju sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasayarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 98 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021. Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 98 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2019, dan memperoleh nilai indeks reformasi birokrasi 57,5 (CC) yang dirilis tahun 2020. Berikut hasil penilaian komponen indeks reformasi birokrasi tahun 2020 .

**Tabel 2.112**
**Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi**
**Kabupaten Klaten Tahun 2020**

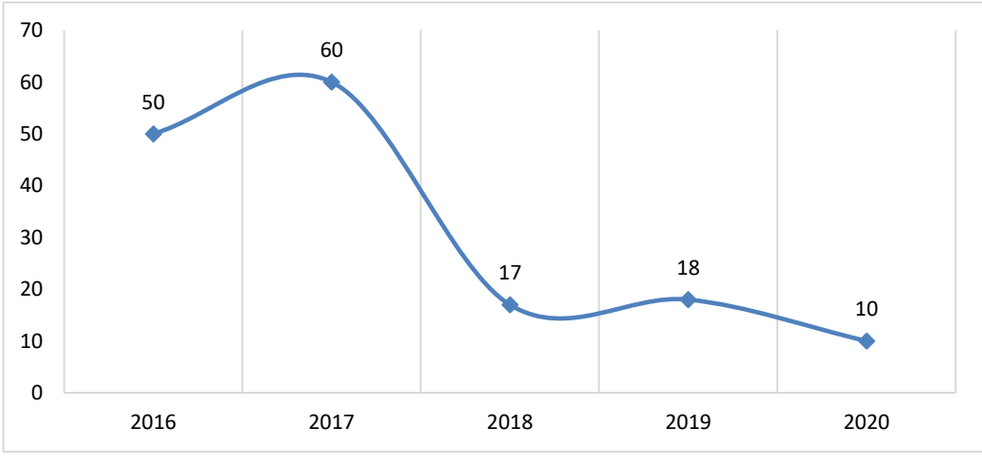
| No, | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|
| A, | Komponen Pengungkit | | |
| 1. | Manajemen Perubahan | 5,00 | 1,58 |
| 2. | Penataan Peraturan Perundangan | 5,00 | 1,54 |
| 3. | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6,00 | 1,05 |
| 4. | Penataan Tata Laksana | 5,00 | 2,22 |
| 5. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,00 | 9,92 |
| 6. | Penguatan Akuntabilitas | 6,00 | 2,07 |
| 7. | Penguatan Pengawasan | 12,00 | 4,36 |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00 | 2,78 |
| | Total Komponen Pengungkit (A) | 60,00 | 25,51 |
| B, | Komponen Hasil | | |
| 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 14,00 | 8,45 |
| 2. | Survei Internal Integritas Organisasi | 6,00 | 4,86 |
| 3. | Survei Eksternal Persepsi Korupsi | 7,00 | 6,63 |
| 4. | Opini BPK | 3,00 | 3,00 |
| 5. | Servei Eksternal Pelayanan Publik | 10,00 | 9,10 |
| | Total Komponen Hasil (B) | 40,00 | 32,04 |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) | 100,00 | 57,55 |

*Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Klaten, 2021*

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klaten antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Klaten. Kondisi pelaporan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Klaten mengalami kondisi yang baik mengingat opini BPK terhadap laporan keuangan sejak tahun 2018 berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain opini BPK, terdapat satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Indikator tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 dengan nilai 62,07 (B).

Tindak lanjut terhadap temuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 telah mencapai 100%. Adapun jumlah temuan BPK pada tahun 2020 sebanyak 6 temuan. Namun Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020 sebesar 83,61%, kondisi ini terus menurun sejak tahun 2016.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Klaten merupakan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal yang diimplementasikan, serta dilakukan evaluasi atas pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang semakin baik. Jumlah pelanggaran pegawai di Kabupaten Klaten semakin menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 hanya terjadi 10 kasus pelanggaran pegawai.




*Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.85.**
**Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

Dari hasil penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai di Kabupaten Klaten kasus tersebut meliputi :

a. Pelanggaran disiplin karena penyalahgunaan wewenang;
b. Pelanggaran disiplin karena pelanggaran kesusilaan;
c. Pelanggaran disiplin karena pelanggaran netralitas ASN.

Gambaran capaian urusan pengawasan meliputi indikator persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai, jumlah temuan BPK, dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.113**
**Persentase, Jumlah, dan Tindak Lanjut Temuan BPK**
**di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase tindak lanjut temuan | % | 70,50 | 71,70 | 75,98 | 84,36 | 100,00 |
| Jumlah temuan BPK | temuan | 16 | 18 | 18 | 17 | 6 |
| Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | % | 95,30 | 94,61 | 89,45 | 85,00 | 83,61 |

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dalam perkembangannya persentase tindak lanjut jumlah temuan semakin meningkat, namun jumlah temuan BPK semakin menurun. Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK selama tahun 2016-2020 cenderung menurun. Capaian indikator tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 83,61% di tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 95,30%. Temuan yang ditindaklanjuti merupakan akumulasi dari temuan mulai tahun 2009, sehingga sulit ditindaklanjuti karena pejabat sudah ganti/meninggal.

Inspektorat Kabupaten Klaten telah memenuhi kapabilitas level 3 *(integrated)* dengan karakteristik bahwa kebijakan, proses dan prosedur APIP telah ditetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi satu sama lain serta merupakan infrastruktur organisasi. Manajemen serta praktik profesionalisme APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan, serta APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat telah membuat program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko yang bertujuan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil Quality Assurance penilaian Maturitas Penyelenggaraaan SPIP di Kabupaten Klaten per tanggal 17 Januari 2020 nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten adalah 3 (terdefinisi).

Capaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP di Kabupaten klaten tahun 2016-2020 sebagaimana yang ada dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.114**
**Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kapabilitas APIP | Level | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Maturitas SPIP | Level | 1,12 | 2,29 | 2,29 | 3,00 | 3,00 |

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021*

Dalam pelaksanaan pegawasan baik yang berbentuk audit, reviu, evaluasi, verifikasi dan validasi, pendampingan dan asistensi serta konsultasi yang menjadi tugas Inspektorat, disusun program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko dengan tujuan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam kondisi

yang optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu menyelenggaraan kegiatan pengawasan intern dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil pelaksanaan pengawasan baik pengawasan intern reguler maupun pengawasan intern khusus yang terdiri dari pengawasan dengan tujuan tertentu maupun pengaduan dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.115**
**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Intern Reguler dan Khusus**
**Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | % Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase pelaksanaan pengawasan intern reguler | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pelaksanaan pengawasan intern khusus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021*

Untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Klaten, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dilaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini dilakukan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran Risiko Korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.

### 2.3.6. Unsur Pemerintahan Umum

#### 1. Sekretariat Daerah

Pemerintahan umum di daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Klaten yang sifatnya rutinitas terlaksana dengan baik. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan sudah dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada dalam target pimpinan di daerah. Segala bentuk pelaporan yang dibutuhkan sebagai bahan informasi pembangunan daerah mampu dipenuhi setiap tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan, antara lain penyampaian LPPD sudah tepat waktu. OPD pengampu SPM menyampaikan laporan capaian tepat waktu, dokumen administrasi kepala daerah dapat diterbitkan dan bentuk-bentuk kerjasama sudah ditindaklanjuti.

Penyelenggaraan koodinasi terhadap pengembangan kewilayahan juga sudah berjalan dengan baik. Berbagai dokumen administrasi kewilayahan sudah tersedia sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sudah dilaksanakan dan ditetapkan dalam peraturan bupati. Hal-hal lain seperti di bidang hukum, ekonomi dan sosial yang

berkaitan dengan tugas pemerintahan umum sudah berjalan dan memenuhi target. Namun yang masih perlu diperhatikan dengan kualitas pelayanannya, terutama yang berhubungan langsung di masyarakat. Kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum juga perlu dilaksanakan dengan baik, tidak terlepas dari upaya pengembangan organisasi dan manajemen perangkat daerah dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat daerah juga menerapkan standar pelayanan dengan baik melalui proses penyusunan, menetapkan, dan mempublikasikan hasilnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government).*

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dari Tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga perlu mendapatkan peringkat yang baik. Untuk meningkatkan kualitas dari SAKIP itu sendiri, perlu koordinasi yang ketat antar instansi sejak perencanaan, penetapan indikator, penerapan anggaran berbasis kinerja sampai pada evaluasi atas pelaksanaan kinerja. Nilai SAKIP di Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang cukup baik karena meningkat dari 47,99 menjadi 62,07 pada tahun 2020.

**Tabel 2.116**
**Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No, | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 16,63 | 17,60 | 19,94 | 20,79 | 20,79 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 | 9,19 | 11,74 | 14,83 | 15,16 | 15,16 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,12 | 9,34 | 9,43 | 10,21 | 10,34 |
| 4. | Evaluasi Eksternal | 10 | 4,39 | 4,66 | 5,74 | 5,03 | 5,29 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 8,66 | 9,68 | 10,39 | 10,14 | 10,49 |
| 6. | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 47,99 | 53,02 | 60,33 | 61,32 | 62,07 |
| 7. | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | CC | CC | B | B | B |

*Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Klaten, 2021*

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 menunjukkan nilai yang baik. Hal ini didukung dengan peningkatan nilai yang cukup tinggi pada komponen perencanaan kinerja. Peningkatan ini dikarenakan kerja keras perencana Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satunya dengan menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan pada hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dengan total ukuran sampel sebanyak 250

responden dapat ditarik kesimpulan skor IKM keseluruhan unit layanan sebesar 81,32. Nilai tersebut berada pada rentang skala 76,61- 88,30 sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menilai "Baik" terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sedangkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2019 dengan menggunaan variabel 9 unsur pelayanan yang telah dilaksanakan pada 85 unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,41. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada 46 Unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,5. Dibandingkan dengan IKM Kabupaten Klaten Tahun 2019, maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja pada urusan pemerintahan umum di Kabupaten Klaten dapat dilhat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.117**
**Capaian Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Peringkat Nilai SAKIP | Skor | 47,09 | 53,01 | 60,33 | 61,32 | 62,07 |
| SAKIP Aspek Pelaporan | % | 9,12 | 9,34 | 9,43 | 10,21 | NA |
| Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi | Skor | - | - | - | - | 31,2 |
| Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Skor | 3,1658 | 3,2138 | 3,0353 | 3,2109 | NA |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 79,14 | 79,94 | 81,08 | 81,31 | 81,88 |

*Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Klaten, 2021*

**2. Sekretaria DPRD**

Sekretariat DPRD berperan dalam dukungan tugas dan fungsi DPRD saat ini. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2019 berdasarkan fraksi dan jumlah anggota terdiri dari: 1). Fraksi PDIP Sebanyak 19 orang, 2). Fraksi Golkar 7 orang, 3). Fraksi Gerindra sebanyak 5 orang, 4). Fraksi PAN sebanyak 4 orang, 5). Fraksi Keadilan Sejahtera 5 orang, 6). Fraksi DPN (Demokrat Pembangunan Nasional) 6 orang, 7). Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebanyak 4 orang.

Berdasarkan struktur organisasi, DPRD Kabupaten Klaten berjumlah 50 orang, yang terbagi ke dalam: Pimpinan DPRD sebanyak 4 orang dan 4 komisi, Sedangkan komposisi Komisi, terdiri: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 13 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 11 orang.

Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian visi jangka menengah daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.118**
**Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Setwan DPRDKabupaten Klaten, 2021*

Dalam fungsi pembentukan Perda selama Tahun 2016–2020 telah menghasilkan Perda sejumlah 76 dari yang direncanakan sejumlah 80 Perda. Di samping itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD telah menghasilkan sebanyak 197 Keputusan DPRD; 50 keputusan Pimpinan DPRD; Keputusan Panitia Anggaran sebanyak 34 keputusan dan keputusan panitia musyawarah sebanyak 67 keputusan.

Berdasarkan data capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal fasilitasi penganggaran dan pengawasan sebagaimana tabel di atas, selama Tahun 2016-2020 dengan rerata 100%, artinya antara yang direncanakan dan terealisasi sama.

### 2.3.7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Capaian kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Klaten diukur berdasarkan indikator persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan sudah mencapai 100%. Capaian indikator Organisasi Kemasyarakatan yangg dibina dan mendapatkan pengawasan pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Untuk persentase potensi konflik SARA yang tertangani sudah mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dengan capaian 100% di tahun 2019. Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu baru mencapai 50%. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya pada pemilu/pilkada di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 tercatat sebesar 82,34% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 81%.

Berikut capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.119**
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020**

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan | % | - | - | - | 100 | 100 |
| 3. | Persentase potensi konflik SARA yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5. | Persentase penurunan kasus penyalahgunaan narkoba | % | 100 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| 6. | Persentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu | % | 100 | 100 | 100 | 240 | 216 |
| 7. | Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu | % | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada | % | - | - | 70,85 | 82,34 | 81,00 |

*Sumber: Kesbangpol Kab Klaten, 2021*

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, produktivitas pertanian, dan potensi pariwisata.

**1. Konsumsi Rumah Tangga perkapita**

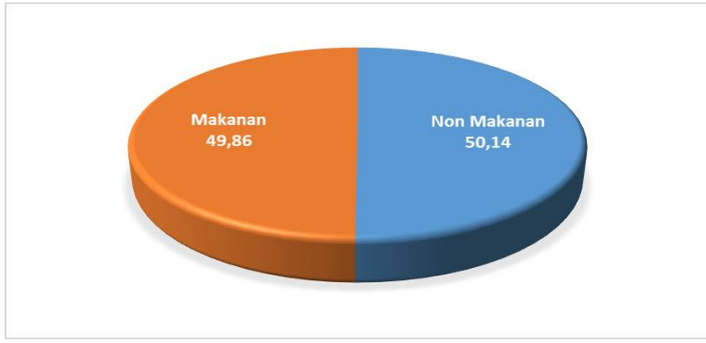
Konsumsi Rumah Tangga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipicu oleh adanya pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat maupun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan menggerakan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun perlu diwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi biasanya akan dibarengi dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB.

**Tabel 2.120**
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut PDRB ADHB**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No, | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Jumlah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Rupiah) | 23.853.927,63 | 26.006.334,03 | 27.992.971,91 | 30.070.348,53 | NA |
| 2, | Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB | 75,44 | 76,10 | 75,67 | 75,56 | NA |

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan, yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Klaten tahun 2020 tercatat sebesar Rp.955.532,00 per kapita per bulan, di mana sebesar 49,86% pengeluaran per kapita digunakan untuk kebutuhan makanan atau sebesar Rp476.383,00 sedangkan untuk kebutuhan non makanan sebesar 50,14% atau sebesar Rp.479.149,00.




*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021*

**Gambar 2.86.**
**Pengeluaran PerKapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas**
**di Kabupaten Klaten Tahun 2020**

**2. Produktivitas Pertanian**

Pada Tahun 2020 berdasarkan pemakaian lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 31.771 Ha dan untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 6.575 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 27.210 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 18.629 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.627 Ha, sistem pengairan sederhana seluas 1.992 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.616 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, serta perluasan kegiatan perekonomian, Jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten semakin menurun setiap tahunnya, lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan terbangun/lahan bukan pertanian. Dari luasan sawah yang ada, tingkat produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di

Kabupaten Klaten semakin meningkat hingga tahun 2019. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya.

Untuk mengatasi perubahan lahan dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian perlu dikembangkan pola pertanian terpadu yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan ke depan bisa menjadi Kawasan Agropolitan.

Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.121**
**Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian**
**Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| Kecamatan | Lahan Pertanian Sawah | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lahan Bukan Pertanian |
|---|---|---|---|
| Prambanan | 1.219,6 | 12,0 | 1.211,4 |
| Gantiwarno | 1.607,5 | 155,0 | 801,5 |
| Wedi | 1.540,8 | 18,0 | 879,2 |
| Bayat | 808,4 | 784,1 | 2.350,4 |
| Cawas | 2.135,7 | 46,0 | 1.265,3 |
| Trucuk | 1.870,3 | 2,0 | 1.508,7 |
| Kalikotes | 708,0 | 8,0 | 582,0 |
| Kebonarum | 702,3 | 2,0 | 262,7 |
| Jogonalan | 1.467,1 | 1,0 | 1.201,9 |
| Manisrenggo | 1.429,7 | 138,4 | 1.127,9 |
| Karangnongko | 722,9 | 850,5 | 1.100,6 |
| Ngawen | 1.019,1 | 8,0 | 669,9 |
| Ceper | 1,403,0 | 7,0 | 1.035,0 |
| Pedan | 836,2 | 444,3 | 636,5 |
| Karangdowo | 2.044,0 | 69,0 | 810,0 |
| Juwiring | 1.934,8 | 12,0 | 1.032,2 |
| Wonosari | 2.126,9 | 14,0 | 973,1 |
| Delanggu | 1.254,4 | 1,0 | 622,6 |
| Polanharjo | 1.732,9 | 92,0 | 559,1 |
| Karanganom | 1.624,5 | 11,0 | 770,5 |
| Tulung | 1.665,7 | 466,5 | 1.067,8 |
| Jatinom | 572,0 | 1,541,1 | 1.439,8 |
| Kemalang | 25,4 | 1,847,8 | 3.292,8 |
| Klaten Selatan | 766,5 | 2,9 | 673,6 |
| Klaten Tengah | 277,1 | 1,0 | 613,9 |
| Klaten Utara | 276,2 | 39,9 | 721,9 |
| **2020** | **31.771** | **6.575** | **27.210** |
| **2019** | **31.863** | **6.578** | **27.115** |
| **2018** | **32.943** | **6.579** | **27.034** |
| **2017** | **33.021** | **6.581** | **25.954** |
| **2016** | **33.066** | **6.581** | **25.909** |

*Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021*

Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2PB) di Kabupaten Klaten seluas 32.451 Ha sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan adanya LP2PB tersebut alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB. Luas perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian menurut kecamatan dan penggunaannya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.122**
**Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Tahun | Dari Sawah & Tegalan (Ha) | Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha) | | | | Jumlah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perumahan | Industri | Perusahaan | Jasa | |
| 2016 | 45.392 | 33.058 | 8.910 | 0,113 | 3.311 | 45.392 |
| 2017 | 45.761 | 40.298 | 4.515 | 0 | 0,948 | 45.761 |
| 2018 | 63.381 | 48.897 | 13.744 | 0 | 0,740 | 63.381 |
| 2019 | 81.600 | 55.500 | 18.200 | 0,500 | 7.500 | 81.600 |
| 2020 | 93.180 | 56.104 | 10.332 | 25.516 | 1.228 | 93.180 |

*Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021*

Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah bahkan Nasional, dengan luas pertanian mencapai 32 ribu hektar, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang di kembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Pembangunan pertanian di Kabupaten Klaten dikembangkan dengan sistem Pertanian Terpadu berbasis pada teknologi dengan konsep kawasan unggulan.

Salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, holtikultura, buah-buahan maupun tanaman perkebunan. Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, karena selama ini selalu surplus. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan seperti jagung, hortikultura, buah-buahan dan tanaman perkebunan. Sedangkan untuk kedelai masih perlu dilakukan penelitian dan pengembangan varietas unggul yang cocok.

Komoditas hasil pertanian yang ada di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

**Tabel 2.123**
**Komoditas Pertanian Di Kabupaten Klaten**

| No | Kecamatan | Padi | | Jagung (Produksi/ton) | Kedelai (Produksi /ton) | Produksi Tanaman Sayuran (ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas Panen (ha) | Produktivitas (ton/ha) | | | Bawang Merah | Cabai | Kubis | Petsai | Tomat |
| 1 | Prambanan | 2.079 | 7 | 7.387 | 57 | 1.240 | 1.523 | - | - | 6 |
| 2 | Gantiwarno | 2.613 | 6 | 2.981 | - | 290 | 149 | - | - | 45 |
| 3 | Wedi | 2.889 | 7 | 2.773 | 78 | - | 14 | - | - | 24 |
| 4 | Bayat | 1.099 | 6 | 7.607 | 48 | - | 129 | - | - | - |
| 5 | Cawas | 4.144 | 7 | 267 | 1.818 | - | - | - | - | - |
| 6 | Trucuk | 3.742 | 6 | 9.672 | 153 | 230 | 69 | - | - | - |
| 7 | Kalikotes | 1.235 | 7 | 4.308 | - | 329 | 152 | - | - | - |
| 8 | Kebonarum | 1.752 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jogonalan | 3.128 | 7 | 12.233 | 41 | 301 | 9.428 | - | 12 | 107 |
| 10 | Manisrenggo | 2.581 | 7 | 3.188 | - | 440 | 2.766 | - | 533 | 488 |
| 11 | Karangnongko | 2.180 | 7 | 1.526 | - | 240 | 1.438 | - | 32 | - |
| 12 | Ngawen | 3.085 | 7 | 2.808 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ceper | 2.759 | 7 | 7.138 | 22 | 356 | 2.271 | - | - | 222 |
| 14 | Pedan | 1.621 | 7 | 4.162 | 18 | - | 1.204 | - | 486 | 90 |
| 15 | Karangdowo | 4.479 | 7 | 1.037 | 293 | - | - | - | - | - |
| 16 | Juwiring | 4.824 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Wonosari | 5.567 | 7 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Delanggu | 3.915 | 7 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Polanharjo | 5.377 | 7 | 15 | 24 | - | 131 | - | - | 91 |
| 20 | Karanganom | 3.376 | 6 | 1.590 | - | - | 313 | - | - | 121 |
| 21 | Tulung | 2.743 | 6 | 23.113 | - | 250 | 1.024 | 40 | 341 | 265 |
| 22 | Jatinom | 1.141 | 7 | 9.612 | - | - | 5.627 | - | 148 | 572 |
| 23 | Kemalang | 100 | 6 | - | - | - | 42 | - | - | - |
| 24 | Klaten Selatan | 1.789 | 7 | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Klaten Tengah | 714 | 7 | 547 | 7 | - | - | - | - | - |
| 26 | Klaten Utara | 627 | 7 | 587 | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **69.559** | **175** | **102.956** | **2.559** | **3.676** | **26.280** | **40** | **1.552** | **2.031** |

*Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah*

**Tabel 2.124**
**Lanjutan Tabel Komoditas Pertanian di Kabupaten Klaten**

| No | Kecamatan | Produksi Tanaman Biofarmaka (kg) | | | | Produksi Buah-Buahan (ton) | | | | | | Produksi Tanaman Perkebuna (ton) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jahe | Lengkuas | Kencur | Kunyit | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Salak | Kelapa | Kopi | Tebu | Tembakau |
| 1 | Prambanan | - | - | - | - | 400 | 3 | - | 627 | 1.490 | - | 290 | - | 117 | 180 |
| 2 | Gantiwarno | - | - | - | - | 7.125 | - | 177 | 3.887 | 153 | - | 135 | - | 3.610 | 267 |
| 3 | Wedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | - | 2.023 | 5 |
| 4 | Bayat | 4.600 | 100 | 110 | 340 | 45.781 | 2 | - | 18.519 | 6.520 | - | 227 | - | 1.727 | 49 |
| 5 | Cawas | - | - | - | - | 73 | - | 73 | 3.075 | - | - | 58 | - | - | - |
| 6 | Trucuk | - | - | - | - | 205 | - | - | 333 | 168 | - | 120 | - | - | 570 |
| 7 | Kalikotes | - | - | - | - | 117 | - | - | 93 | 150 | - | 56 | - | 187 | 11 |
| 8 | Kebonarum | - | - | - | - | 383 | - | - | 70 | 61 | 2 | 80 | - | 85 | 21 |
| 9 | Jogonalan | - | - | - | - | 9.523 | 383 | 130 | 1.309 | 6.192 | - | 197 | - | 5.931 | 257 |
| 10 | Manisrenggo | - | - | - | - | 3.380 | 328 | - | 4.126 | 1.981 | 325 | 303 | 7 | 810 | 975 |
| 11 | Karangnongko | - | - | - | - | 999 | 2.414 | 2.249 | 1.410 | 1.472 | - | 429 | 2 | 962 | 33 |
| 12 | Ngawen | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 95 | - | 17 | - | 298 | 13 |
| 13 | Ceper | 64 | 136 | 27 | - | 72 | - | - | 101 | 38 | - | 168 | - | 2.006 | 268 |
| 14 | Pedan | - | - | - | - | 2.108 | - | - | 155 | 496 | - | 0 | - | 1.128 | 335 |
| 15 | Karangdowo | - | - | - | - | 6.022 | 182 | - | 950 | 2.677 | - | 5 | - | - | 56 |
| 16 | Juwiring | - | - | - | - | 1.529 | - | - | 7.434 | - | - | 408 | - | 2.138 | - |
| 17 | Wonosari | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 552 | - | 218 | - | 1.741 | - |
| 18 | Delanggu | - | - | - | - | 3.112 | 6 | - | 610 | 824 | - | 101 | - | - | - |
| 19 | Polanharjo | 200 | 110 | - | 20 | 642 | - | 51 | 5.033 | 563 | - | 13 | - | 179 | - |
| 20 | Karanganom | - | - | - | - | 1.053 | 10 | - | 137 | - | - | 137 | - | 1.313 | 6 |
| 21 | Tulung | 2 | - | - | - | 2.390 | 12.308 | 602 | 5.427 | 816 | - | 266 | 3 | 145 | 142 |
| 22 | Jatinom | - | - | - | - | 1.642 | 7.350 | 5.288 | 9.393 | 5.328 | - | 335 | 3 | 6.322 | 44 |
| 23 | Kemalang | - | - | - | - | 1.204 | 230.781 | - | 2.420 | 5.890 | - | 538 | 160 | - | 261 |
| 24 | Klaten Selatan | - | - | - | - | 672 | 5 | - | 146 | 99 | - | 18 | - | - | 41 |
| 25 | Klaten Tengah | - | - | - | - | 255 | - | - | 79 | - | - | 52 | - | 182 | - |
| 26 | Klaten Utara | - | - | - | - | 648 | - | - | 515 | 3.401 | - | 7 | - | 1.056 | 10 |
| **Jumlah** | | 4.866 | 346 | 137 | 360 | 89.335 | 253.772 | 8.570 | 66.310 | 38.966 | 327 | 4.518 | 175 | 31.960 | 3.544 |

*Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah*

Di Kabupaten Klaten juga terdapat potensi peternakan yang tersebar di seluruh wilayah. Ternak yang ada di Kabupaten Klaten meliputi sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, babi, kelinci, unggas dan lainnya, Hasil peternakan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.125**
**Komoditas Peternakan Di Kabupaten Klaten**

| No | Kecamatan | Sapi | Sapi Perah | Kerbau | Kuda | Itik | Ayam Buras | Ayam Pedaging | Ayam Petelur | Domba | Kambing | Babi | Entok | Angsa | Kelinci | Burung Puyuh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prambanan | 5.253 | - | 19 | 12 | 13.972 | 102.959 | 182.354 | 5.232 | 1.773 | 4.156 | 34 | 414 | 329 | 399 | 21.869 |
| 2 | Gantiwarno | 4.644 | - | 27 | 9 | 11.495 | 96.094 | 177.830 | 21.261 | 1.549 | 3.233 | - | 343 | - | 332 | 51.384 |
| 3 | Wedi | 4.382 | - | 21 | 7 | 12.422 | 95.540 | 134.080 | 26.894 | 1.340 | 2.833 | 54 | 523 | 303 | 281 | 16.385 |
| 4 | Bayat | 4.702 | - | 11 | - | 18.135 | 100.944 | 254.748 | 99.534 | 1.192 | 5.227 | - | 668 | 340 | 408 | 57.882 |
| 5 | Cawas | 3.368 | - | 16 | 8 | 13.514 | 102.316 | 105.362 | 19.806 | 994 | 4.029 | 56 | 775 | - | 280 | - |
| 6 | Trucuk | 4.025 | - | 14 | - | 16.198 | 100.567 | 114.391 | 29.416 | 1.963 | 4.586 | 65 | 713 | 42 | 305 | - |
| 7 | Kalikotes | 1.632 | - | 29 | 6 | 16.633 | 107.639 | 119.745 | 44.458 | 1.375 | 2.910 | - | 683 | 262 | 420 | 18.049 |
| 8 | Kebonarum | 1.861 | - | 33 | 11 | 12.852 | 106.554 | 87.617 | 34.898 | 1.450 | 2.610 | 74 | 671 | 125 | 352 | 6.408 |
| 9 | Jogonalan | 6.061 | - | 26 | 10 | 14.887 | 116.424 | 204.388 | 112.980 | 2.220 | 5.196 | 320 | 632 | 162 | 511 | 29.126 |
| 10 | Manisrenggo | 7.591 | 125 | 21 | 4 | 16.423 | 94.336 | 198.059 | 50.272 | 2.399 | 8.298 | - | 710 | 278 | 309 | 28.168 |
| 11 | Karangnongko | 8.726 | 223 | 30 | 9 | 14.976 | 115.662 | 136.682 | - | 1.806 | 7.724 | - | 709 | 289 | 480 | 11.014 |
| 12 | Ngawen | 2.050 | 27 | 19 | 10 | 14.391 | 111.319 | 94.427 | 42.245 | 2.471 | 2.337 | 97 | 534 | - | 278 | 22.076 |
| 13 | Ceper | 1.537 | - | 27 | 8 | 15.579 | 121.705 | 168.888 | 26.172 | 2.175 | 3.875 | - | 834 | 324 | 409 | 32.517 |
| 14 | Pedan | 2.431 | - | 28 | 9 | 13.668 | 121.495 | 88.635 | 22.888 | 1.667 | 3.692 | 171 | 787 | 298 | 903 | 7.510 |
| 15 | Karangdowo | 2.144 | - | 25 | 6 | 14.183 | 104.378 | 134.291 | 23.406 | 1.663 | 3.133 | 58 | 753 | 84 | 275 | - |
| 16 | Juwiring | 1.285 | - | 27 | 16 | 23.393 | 105.341 | 146.118 | 26.206 | 1.662 | 3.456 | - | 737 | 427 | 401 | 17.531 |
| 17 | Wonosari | 1.373 | - | 29 | 7 | 15.433 | 107.027 | 134.729 | - | 1.833 | 3.228 | 56 | 542 | 56 | 318 | 18.344 |
| 18 | Delanggu | 1.214 | - | 19 | 9 | 20.283 | 100.252 | 134.844 | 21.221 | 1.978 | 2.597 | 53 | 873 | 29 | 251 | 17.852 |
| 19 | Polanharjo | 1.164 | - | 22 | 13 | 44.662 | 80.489 | 114.893 | 30.832 | 2.122 | 2.536 | - | 914 | 261 | 270 | 31.236 |
| 20 | Karanganom | 1.715 | 78 | 34 | 9 | 16.927 | 84.303 | 152.552 | 42.754 | 3.117 | 2.412 | - | 838 | 262 | 298 | 15.607 |
| 21 | Tulung | 8.394 | 1.494 | 27 | 9 | 20.557 | 111.175 | 263.609 | 35.509 | 1.918 | 3.883 | 87 | 904 | 287 | 242 | 65.798 |
| 22 | Jatinom | 11.882 | 2.882 | 26 | 14 | 15.644 | 106.789 | 254.230 | 78.766 | 3.151 | 7.094 | - | 694 | 219 | 228 | 30.635 |
| 23 | Kemalang | 11.296 | 1.410 | 3 | 14 | 15.040 | 90.375 | 200.908 | 14.277 | 1.793 | 5.421 | - | 918 | 227 | 321 | - |
| 24 | Klaten Selatan | 1.303 | - | 33 | 7 | 13.994 | 41.974 | 122.481 | 11.064 | 964 | 2.234 | 30 | 617 | 161 | 243 | 14.076 |
| 25 | Klaten Tengah | 1.099 | - | 25 | 10 | 12.877 | 44.486 | 75.441 | - | 1.197 | 2.418 | 45 | 567 | 133 | 365 | - |
| 26 | Klaten Utara | 1.299 | - | 20 | 9 | 12.191 | 62.533 | 95.486 | 12.673 | 1.192 | 2.275 | 18 | 667 | 231 | 496 | 21.777 |
| **Jumlah** | | 102.431 | 6.239 | 611 | 226 | 430.329 | 2.532.676 | 3.896.788 | 832.764 | 46.964 | 101.393 | 1.218 | 18.020 | 5.129 | 9.375 | 535.244 |

*Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah*

Sektor perikanan juga merupakan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan di Kabupaten Klaten. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut berjenjang yang berkaitan dengan kegiatan agribisnis perikanan darat (kawasan minapolitan) sebagai suatu sistem yang secara ruang terdapat pada desa-desa di Kecamatan Karanganom, Kecamatan Tulung, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Klaten Selatan. Pengembangan perikanan di Kabupaten Klaten dapat dilakukan di kolam, sawah, keramba, waduk, dan sungai. Kecamatan Polanharjo merupakan wilayah yang memiliki hasil perikanan tertinggi di Kabupaten Klaten dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sebaran perikanan menurut areal obyek perikanan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

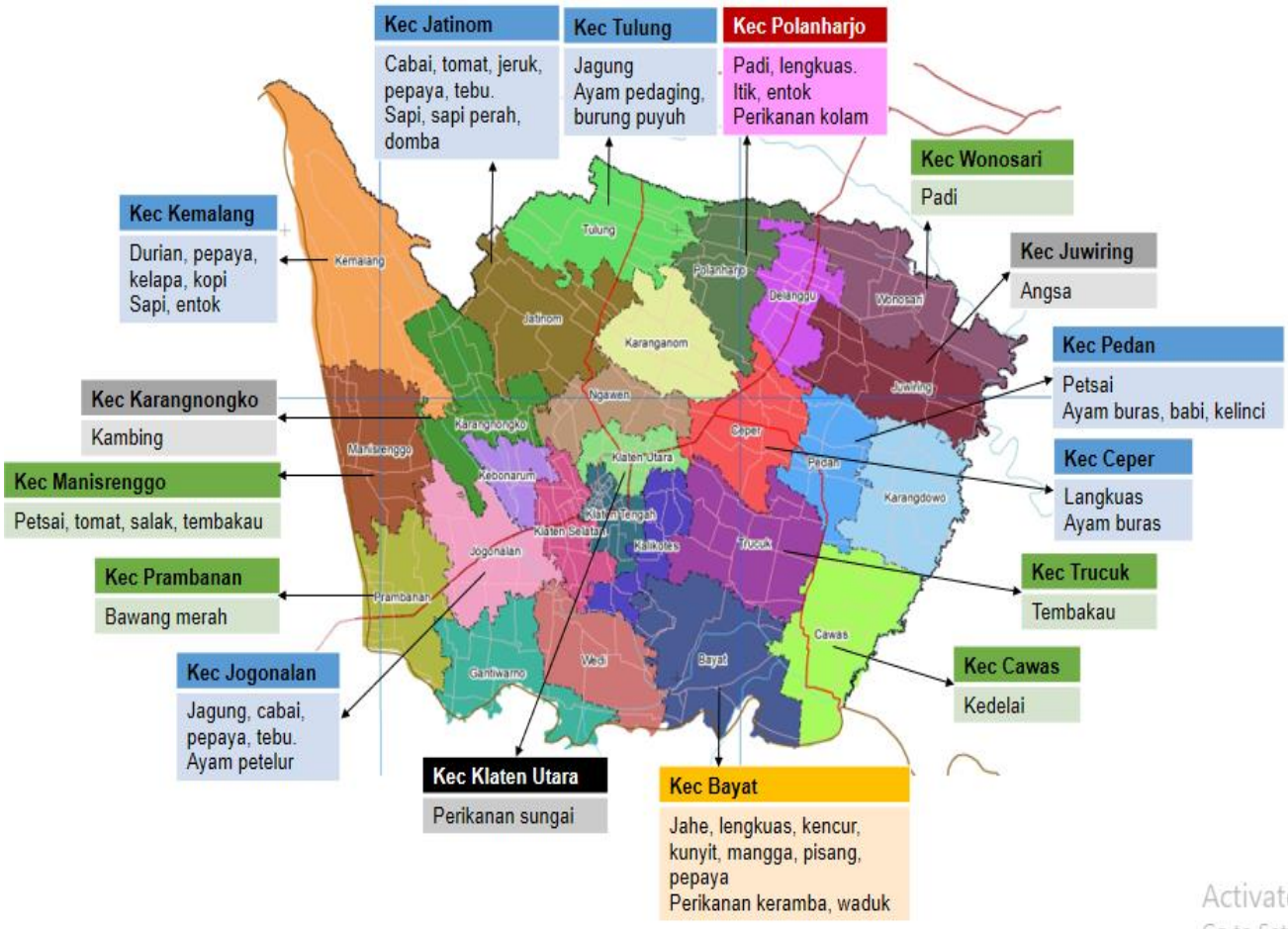
**Tabel 2.126**
**Penebaran Benih Ikan Menurut Areal Obyek Perikanan**
**di Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No, | Kecamatan | Kolam | Sawah | Karamba | Waduk/ Rawa | Sungai | Genangan air | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prambanan | 1.783.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783,55 |
| 2 | Gantiwarno | 2.297.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297,09 |
| 3 | Wedi | 627.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,07 |
| 4 | Bayat | - | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| 5 | Cawas | 18.862.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.862,17 |
| 6 | Trucuk | 764.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,34 |
| 7 | Kalikotes | 284.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,56 |
| 8 | Kebonarum | 2.537.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537,00 |
| 9 | Jogonalan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Manisrenggo | 5.422.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.422,64 |
| 11 | Karangnongko | 3.478.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478,35 |
| 12 | Ngawen | 6.870.901 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 7.322,72 |
| 13 | Ceper | 1.501.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501,92 |
| 14 | Pedan | 1.550.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550,42 |
| 15 | Karangdowo | 3.398.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398,10 |
| 16 | Juwiring | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180,00 |
| 17 | Wonosari | 1.360.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360,68 |
| 18 | Delanggu | 101.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,06 |
| 19 | Polanharjo | 17.272.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.272,70 |
| 20 | Karanganom | 530.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,88 |
| 21 | Tulung | 36.459.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.459,69 |
| 22 | Jatinom | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Kemalang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Klaten Selatan | 1.208.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208,78 |
| 25 | Klaten Tengah | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 26 | Klaten Utara | 1.020.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020,80 |

| No, | Kecamatan | Kolam | Sawah | Karamba | Waduk/ Rawa | Sungai | Genangan air | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah 2020 | | 108.572,68 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 451,82 | 0,00 | 11.024,49 |
| Jumlah 2019 | | 137.655,71 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.655,71 |
| Jumlah 2018 | | 134.814,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 135.984,75 |
| Jumlah 2017 | | 154.433,50 | 230,00 | 4.335,79 | 0,00 | 920.000,00 | 120.000,00 | 1.198.999,29 |
| Jumlah 2016 | | 393.831,39 | 1.255,00 | 4.975,37 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.940.061,76 |

*Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah*

Berdasarkan tabel di atas, dalam penebaran benih ikan tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan 2019, sehingga mempengaruhi produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap juga lebih rendah yaitu sebesar 27.603,83 ton dan 184 ton. Berikut ini dapat dilihat sebaran komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan yang dominan di Kabupaten Klaten.




*Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah*

**Gambar 2.87.**
**Sebaran Komoditas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Dominan di Kabupaten Klaten**

**3. Potensi Pariwisata**

Kabupaten Klaten memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut guna menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

**a. Jenis Kekayaan Wisata Alam**

Jenis kekayaan wisata alam di Kabupaten Klaten antara lain: Deles Indah, Gunung Watu Prau, Pegunungan Kidul, Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil, Umbul Pelem, Umbul brintik, Umbul Brondong, Umbul Manten dan sebagainya,

**b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya**

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Gana, Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syekh Domba, Makam Syekh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R, Ng, Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati,

**c. Tempat Bersejarah**

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten di antaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula, Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

**d. Jumlah Objek Wisata dan Pengunjung**

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.127**
**Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020**

| Tahun | Jumlah Objek Wisata (Objek) | Pengunjung (orang) | | Lama Tinggal (Hari) | | Rata-Rata Pengeluaran (Rp000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman | Wisnus | Wisman |
| **2016** | 82 | 377.409 | 372 | 1 | 1 | 750 | 1.500 |
| **2017** | 82 | 2.224.294 | 190.686 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| **2018** | 82 | 2.483.945 | 222.373 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| **2019** | 82 | 3.883.024 | 183.559 | 1 | 1 | 1.200 | 2.500 |
| **2020** | 82 | 1.399.167 | 22.199 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2020*

Sebagaimana tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit. Salah satu faktor kenaikan jumlah pengunjung disebabkan adanya penataan beberapa obyek wisata dan meningkatnya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan lokal seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu. Pada

tahun 2020 jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan, karena banyak objek wisata yang tidak beroperasi akibat dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, untuk event- event pariwisata tingkat kabupaten hanya diadakan secara terbatas di tingkat desa dan kecamatan.

Rata-rata lama tinggal wisatawan hanya satu hari baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, hal ini disebabkan karena wisatawan hanya singgah atau berkunjung di tempat obyek wisata yang di tuju dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Untuk rata-rata pengeluaran wisatawan di Kabupaten Klaten relatif belum begitu besar, wisatawan nusantara berkisar antara Rp750.000,00 sampai Rp1.200.000,00 dan wisatawan mancanegara berkisar Rp1.500.000,00 sampai Rp2.500.000,00.

Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.128**
**Sumbangan Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Objek Wisata Perayanan | Target (Rp000) | | | | | Realisasi (Rp000) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Perayaan Padusan | 52.500 | 52.500 | 57.500 | 63.250 | 0 | 52.500 | 57.500 | 58.000 | 64.005 | 0 |
| 2 | Perayaan Maleman | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.800 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.800 | 0 |
| 3 | Perayaan Syawalan | 51.700 | 51.700 | 53.000 | 58.300 | 0 | 51.700 | 52.500 | 53.000 | 58.500 | 0 |
| 4 | Perayaan Yaqowiyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deles Indah | 14.000 | 14.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 14.000 | 15.600 | 11.800 | 4.200 | 0 |
| 6 | OMAC | 600.000 | 600.000 | 1.680.500 | 1.730.500 | 450.000 | 609.976 | 739.919 | 953.500 | 1.689.580 | 265.788 |
| 7 | Jombor Permai | 65.000 | 65.000 | 68.000 | 74.800 | 400.000 | 65.495 | 68.050 | 71.750 | 67.175 | 423.235 |
| 8 | Makam Pandanaran | 134.000 | 114.000 | 180.000 | 180.000 | 65.600 | 143.300 | 144.500 | 143.700 | 161.700 | 100.400 |
| 9 | Makam Ronggowar-sito | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 0 | 1.890 | 2.000 | 2.050 | 2.435 | 0 |
| 10 | Pemandian Jolotundo | 24.200 | 24.200 | 77.000 | 84.700 | 45.765 | 24.200 | 50.170 | 81.820 | 120.065 | 45.765 |
| 11 | Candi Plaosan | 5.000 | 50.000 | 100.000 | 110.000 | 0 | 53.883 | 80.454 | 220.227 | 153.027 | 0 |
| 12 | Makam Ki Ageng Gribig | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.041 | 4.030 | 0 |
| 13 | Lain-lain | 21.350 | 21.350 | 21.350 | 21.350 | 10.000 | 23.850 | 13.450 | 10.980 | 28.880 | 207.629 |
| **Jumlah** | | **1.000.550** | **1.025.550** | **2.295.350** | **2.384.200** | **971.365** | **1.071.794** | **1.255.173** | **1.637.868** | **2.384.397** | **1.042.817** |

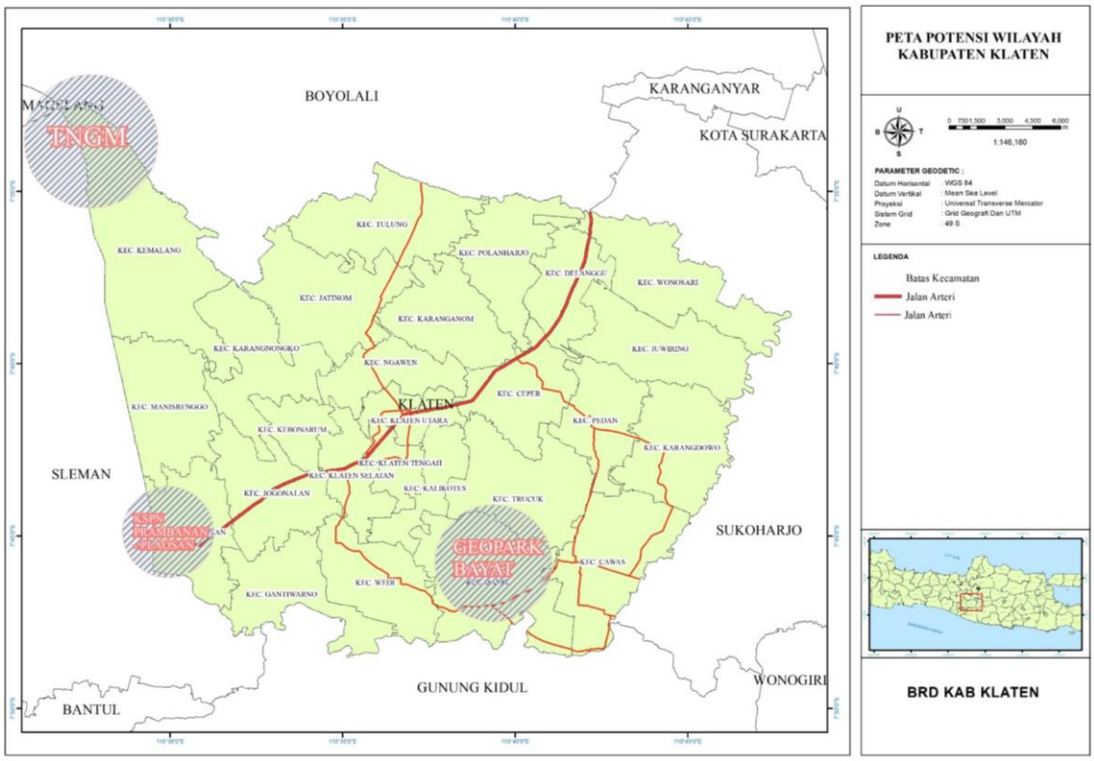
*Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2021*

Sebagaimana tabel tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi di mana realisasi pendapatan mencapai rata-rata di atas target, hanya pada tahun 2018 realisasi tidak memenuhi target. Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah isu pelestarian lingkungan belum menjadi perhatian dalam pembangunan destinasi, petugas pendamping/*guide* wisatawan belum optimal, serta dengan adanya wabah Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, tenaga kerja dan jasa (perhotelan, restoran, transportasi dll), yang otomatis akan mempengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara, menurunnya Pendapatan Asli Daerah maupun melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran bagi pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha, dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka tempat wisata maupun berwisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pelatihan-pelatihan (pelatihan *guide*, managemen pariwisata, penguatan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, dll), peningkatan promosi pariwisata, penataan kembali obyek wisata berbasis kawasan, penguatan kelembagaan kepariwisataan (Pokdarwis, ASITA, Travel agent, *Tourist Information Centre*), menggelar event-event unggulan daerah yang spektakuler, perlu adanya pemaketan pariwisata serta pengembangan desa wisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Klaten meliputi:

a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prambanan dan sekitarnya
b. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
c. Poros Budaya Kraton Yogyakarta dan Surakarta
d. Klaten Kota Seribu Umbul (mata air) Sabuk Mata Air Lereng Merapi, potensi pengembangan wisata air
e. Sumbu Alam Merapi Gunung Sewu (bagian dari Cagar Biosfer UNESCO Merbabu-Merapi-Gunung Sewu), Rowo Jombor Purba dan Geologi Bayat sebagai salah satu batuan dasar/basement Pulau Jawa.

Dalam rangka peletestarian (konservasi), edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, warisan Geologi Bayat diusulkan untuk ditetapkan sebagai taman bumi (Geopark), sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi (Geopark), Aspek Pendukung Pengembangan Geopark Bayat meliputi:

a. Keunikan Geologi Bayat,
b. Keindahan Alam Bayat,
c. Lokasi tidak terlalu jauh dari Kota (Yogyakarta maupun Solo),
d. Kampus Lapangan Geologi,
e. Sentra Batik di Bayat,
f. Sentra Kerajinan Keramik Wedi-Bayat,
g. Termasuk dalam Kawasan Strategis Klaten-Sukoharjo-Wonosari (Kesukosari),
h. Dekat dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Prambanan)
i. Rencana Revitalisasi Rowo Jombor (Perpres 79 Tahun 2019).




*Sumber: DRD Kab. Klaten, 2020*

**Gambar 2.88.**
**Peta Potensi Pariwisata Unggulan di Kabupaten Klaten**

Potensi desa wisata Kabupaten Klaten sebagaimana yang ada di tabel di bawah.

**Tabel 2.129**
**Potensi Desa Wisata Kabupaten Klaten**

| Kecamatan | Desa Wisata |
|---|---|
| Bayat | • Banyuripan: Wisata Budaya<br>• Gunung Gajah: Wisata Alam<br>• Jotangan: Wisata Alam<br>• Jarum: Wisata Budaya<br>• Kebon: Wisata Budaya<br>• Krakitan: Wisata Alam<br>• Ngerangan: Wisata Buatan<br>• Paseban: Wisata Religi |
| Cawas | Tlingsing: Wisata Budaya |
| Ceper | Pokak: Wisata Alam |
| Jatinom | • Jatinom: Wisata Budaya<br>• Socokangsi: Wisata Alam |
| Juwiring | Kenaiban: Wisata Buatan, Wisata Budaya |
| Kalikotes | Gemblegan: Wisata Buatan |
| Karanganom | • Beku: Wisata Alam<br>• Jambeyan: Wisata Alam<br>• Soropaten: Wisata Budaya |
| Karangnongko | Karangnongko: Wisata Budaya |
| Kebonarum | • Basin: Wisata Alam<br>• Malang Jiwan: Wisata Alam |

| Kecamatan | Desa Wisata |
|---|---|
| | • Pluneng: Wisata Alam |
| Kemalang | • Balerante: Wisata Alam<br>• Panggang: Wisata Alam<br>• Sidorejo: Wisata Alam<br>• Tegalmulyo: Wisata Buatan, Wisata Alam, Wisata Kuliner |
| Klaten Selatan | • Danguran: Wisata Budaya<br>• Nglinggi: Wisata Alam |
| Klaten Tengah | Jomboran: Wisata Alam |
| Ngawen | Soran: Wisata Alam |
| Polanharjo | • Kauman: Wisata Buatan<br>• Nganjat: Wisata Alam<br>• Ponggok: Wisata Alam<br>• Sidowayah: Wisata Alam, Wisata Buatan<br>• Wangen: Wisata Alam |
| Prambanan | • Brajan: Wisata Alam<br>• Bugisan: Wisata Budaya<br>• Kebondalem Kidul: Wisata Budaya<br>• Pereng: Wisata Alam |
| Tulung | • Bono: Wisata Buatan<br>• Wunut: Wisata Alam |
| Trucuk | Palar: Wisata Religi |
| Wedi | Melikan: Wisata Edukasi |
| Wonosari | Sidowarno: Wisata Budaya |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2021*

Kabupaten Klaten memiliki banyak potensi desa wisata, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, desa wisata ditetapkan dengan Ketetapan gubernur atau bupati/walikota dan diklasifikasikan menjadi desa wisata maju, berkembang atau rintisian berdasarkan penilaian tim penetapan desa wisata.

Desa wisata rintisan adalah desa wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi desa wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya. Desa wisata berkembang adalah desa wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan manusia menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tata kelola lembaga yang baik.

Desa wisata maju adalah desa wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Pariwisata, Kelembagaan, Produk). Berikut desa wisata di Kabupaten Klaten yang sudah di tetapkan dengan SK Bupati.

**Tabel 2.130**
**Desa Wisata Ber SK Bupati di Kabupaten Klaten**

| Kecamatan | Desa Wisata | No SK | Tanggal SK | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|
| Bayat | Desa Jarum | 556/254 | 22/09/2020 | Maju |
| | Desa Ngerangan | 556/249 | 11/09/2020 | Berkembang |
| | Desa Gununggajah | 556/336 | 25/11/2020 | Berkembang |
| | Desa Krakitan | 556/43 | 03/03/2021 | Rintisan |
| Ceper | Desa Pokak | 556/252 | 22/09/2020 | Rintisan |
| Jatinom | Desa Glagah | 556/45 | 03/03/2021 | Rintisan |
| Juwiring | Desa Tanjung | 556/44 | 03/03/2021 | Rintisan |
| Kalikotes | Desa Jimbung | 556/39 | 03/03/2021 | Rintisan |
| Karangnongko | Desa Karangnongko | 556/43 | 03/03/2021 | Rintisan |
| Kebonarum | Desa Ngrundul | 556/243 | 11/09/2020 | Berkembang |
| | Desa Malangjiwan | 556/335 | 25/11/2020 | Berkembang |
| Kemalang | Desa Tegalmulyo | 556/245 | 11/09/2020 | Rintisan |
| | Desa Tlogowatu | 556/246 | 11/09/2020 | Rintisan |
| Klaten Selatan | Desa Nglinggi | 556/40 | 03/03/2021 | Rintisan |
| Polanharjo | Desa Ponggok | 556/244 | 11/09/2020 | Maju |
| | Desa Sidowayah | 556/41 | 03/03/2021 | Berkembang |
| **Prambanan** | Desa Kebondalem Kidul | 556/247 | 11/09/2020 | Maju |
| | Desa Bugisan | 556/253 | 22/09/2020 | Maju |
| **Wedi** | Desa Melikan | 556/248 | 11/09/2020 | Rintisan |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020*

Desa wisata menjadi salah satu klaster pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang dikembangkan di Kabupaten Klaten bersama dengan 11 Klaster UMKM lainnya yaitu klaster lurik, batik, keramik, makanan olahan, klaster lereng merapi, minapolitan, klaster logam, klaster mebel, klaster konveksi, klaster handicraft dan klaster desa wisata.

Obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Klaten meliputi kolam renang, pemancingan, candi, makam, pemandangan alam, museum dan lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Obyek wisata kolam renang dan pemancingan yang paling banyak di Kabupaten Klaten sebanyak 58 obyek wisata dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Polanharjo yaitu 31 obyek wisata. Obyek wisata berupa candi paling banyak terdapat di Kecamatan Prambanan. Sebaran obyek wisata yang ada di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.131**
**Obyek Wisata Di Kabupaten Klaten**

| No | Kecamatan | Kolam Rng, Pemancingan | Candi Purbakala | Makam | Pemandangan Alam | Museum | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prambanan | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Gantiwarno | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Wedi | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Bayat | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Cawas | - | - | 2 | - | - | - |
| 6 | Trucuk | 2 | - | 5 | - | - | - |
| 7 | Kalikotes | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Kebonarum | 5 | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Jogonalan | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Manisrenggo | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Karangnongko | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | Ngawen | 2 | - | 5 | - | - | - |
| 13 | Ceper | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Pedan | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 15 | Karangdowo | - | - | - | - | - | - |

| No | Kecamatan | Kolam Rng, Pemancingan | Candi Purbakala | Makam | Pemandangan Alam | Museum | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Juwiring | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Wonosari | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Delanggu | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 19 | Polanharjo | 28 | - | 2 | - | - | 1 |
| 20 | Karanganom | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 21 | Tulung | 6 | - | 1 | - | - | - |
| 22 | Jatinom | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 23 | Kemalang | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 24 | Klaten Selatan | 2 | - | - | - | - | - |
| 25 | Klaten Tengah | - | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Klaten Utara | 3 | - | 2 | - | - | - |
| **Jumlah** | | **58** | **8** | **30** | **8** | **4** | **12** |

*Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah*

Potensi pariwisata yang cukup besar di Kabupaten Klaten menggerakkan masyarakat untuk berusaha pada sektor pariwisata dengan mengembangkan biro perjalanan, hotel, *home stay*, dan rumah makan. Sampai dengan tahun 2020 jumlah usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata di Kabupaten Klaten mencapai 371, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 2.132**
**Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Hotel, Home Stay Dan Rumah Makan di Kabupaten Klaten Berdasarkan Kecamatan di Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Biro Perjalanan Wisata | Hotel | Home Stay | Rumah Makan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prambanan | | 26 | 10 | 17 | 53 |
| 2 | Gantiwarno | | | | 3 | 3 |
| 3 | Wedi | 1 | | 5 | 6 | 12 |
| 4 | Bayat | 1 | | 37 | 21 | 59 |
| 5 | Cawas | | | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Trucuk | 3 | | | 3 | 6 |
| 7 | Kalikotes | | | | 2 | 2 |
| 8 | Kebonarum | 1 | | | 4 | 5 |
| 9 | Jogonalan | | 2 | | 6 | 8 |
| 10 | Manisrenggo | | | | 12 | 12 |
| 11 | Karangnongko | | | | 3 | 3 |
| 12 | Ngawen | 1 | | | 6 | 7 |
| 13 | Ceper | 3 | 3 | | 11 | 17 |
| 14 | Pedan | 1 | | | 9 | 10 |
| 15 | Karangdowo | | | | 2 | 2 |
| 16 | Juwiring | 1 | | | 2 | 3 |
| 17 | Wonosari | | 1 | | 4 | 5 |
| 18 | Delanggu | | 1 | | 10 | 11 |
| 19 | Polanharjo | | | 14 | 15 | 20 |
| 20 | Karanganom | | | | 5 | 5 |
| 21 | Tulung | | | | 6 | 6 |
| 22 | Jatinom | 1 | | | 9 | 10 |
| 23 | Kemalang | | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | Klaten Selatan | 5 | 2 | 2 | 11 | 20 |
| 25 | Klaten Tengah | 5 | 13 | | 18 | 36 |
| 26 | Klaten Utara | 8 | 3 | | 33 | 44 |
| **Jumlah** | | **31** | **53** | **74** | **225** | **371** |

*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020, diolah*

### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

**1. Perhubungan**

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan salah satunya dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri dari mobil barang, kendaraan khusus, dan angkutan publik.

**Tabel 2.133**
**Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Jenis Kendaraan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobil Barang | 10.657 | 9.622 | 9.001 | 8.553 | 8.072 |
| **Mobil Bus** | | | | | |
| Umum | 464 | 397 | 395 | 407 | 391 |
| Bus Besar | 44 | 65 | 79 | 63 | 91 |
| Bus Sedang | 131 | 261 | 211 | 224 | 215 |
| Bus Kecil | 289 | 71 | 105 | 120 | 85 |
| Bukan Umum | 137 | 105 | 114 | 116 | 97 |
| Kendaraan khusus/ Alat Berat | 9 | 6 | 6 | 32 | 7 |
| **Jumlah** | **11.731** | **10.527** | **9.911** | **9.108** | **8.567** |

*Sumber: Dinas Perubungan Kabupaten Klaten, 2021*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam pasal 2 menyebutkan: 1) jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan; 2) perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILLL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.134**
**Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan**
**Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Rambu | Kebutuhan | Satuan | Terpasang | | | | | Total | Persent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Rambu lalu lintas biasa | 3.979 | buah | 81 | 247 | 100 | 227 | 227 | 882 | 22,17 |
| 2 | Rambu RPPJ | 200 | buah | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 36 | 18,00 |
| 3 | Rambu Tipe F | 100 | buah | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 17,00 |
| 4 | Marka Jalan | 34.965 | m2 | 0 | 8.280 | 9.925 | 465 | 5.715 | 24.385 | 69,74 |
| 5 | Traffic Light | 40 | unit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,00 |
| 6 | Guardrail | 3.000 | m | 1.060 | 520 | 468 | 200 | 104 | 2.353 | 78,40 |
| 7 | Paku marka/ mata kucing | 97.125 | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Traffic cone | 500 | buah | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8,00 |

| No | Jenis Rambu | Kebutuhan | Satuan | Terpasang | | | | | Total | Persent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 9 | Deliniator | 10.000 | buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Cermin Tikungan | 50 | buah | 10 | 13 | 10 | 30 | 22 | 85 | 170,00 |
| 11 | Zona Selamat sekolah | 50 | unit | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10,00 |
| 12 | Lampu kedip | 20 | buah | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 55,00 |
| 13 | Rambu elektronik | 40 | unit | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20,00 |
| 14 | Water Barrier | 100 | buah | 0 | 0 | 26 | 20 | 20 | 66 | 66,00 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021*

Jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal di Kabupaten untuk mendukung transportasi darat sebanyak 8 lokasi, terdiri dari 1 terminal Tipe A yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 7 terminal Tipe C yang dikelola oleh pemerintah daerah. Data terminal angkutan penumpang umum pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.135**
**Data Terminal Angkutan Penumpang Umum**
**Kabupaten Klaten Tahun 2020**

| No | Nama Terminal | Alamat | Tipe | Luas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir Soekarno | Klaten Tengah | A | 32.760 m² |
| 2 | Penggung | Penggung, Ceper | C | 4.500 m² |
| 3 | Teloyo | Teloyo, Wonosari | C | 3.310 m² |
| 4 | Pasar Klaten | Klaten Tengah | C | 600 m² |
| 5 | Bendogantungan | Bendogantungan, Klaten Selatan | C | 3.168 m² |
| 6 | Tulung | Tulung | C | 400 m² |
| 7 | Manisrenggo | Manisrenggo | C | 1.785 m² |
| 8 | Delanggu | Karang | C | 7.000 m² |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021*

**2. Pasar**

Pasar merupakan sarana pendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana distribusi, penyeimbang harga dan promosi produk daerah, sedangkan fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya dapat dibedakan menjadi: 1) milik pemerintah; 2) milik desa, dan 3) milik perorangan. Perkembangan jumlah pasar kios, los dan pedagang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.136**
**Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan**
**Di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| Kecamatan | Pasar | | | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintahan | Desa | Perorangan | Kios | Los | Pedagang |
| 01 Prambanan | 2 | 1 | - | 101 | 9 | 169 |
| 02 Gantiwarno | 2 | 1 | - | 39 | 18 | 93 |
| 03 Wedi | 3 | 2 | - | 248 | 54 | 803 |
| 04 Bayat | 3 | 2 | - | 276 | 30 | 923 |
| 05 Cawas | 4 | 4 | - | 109 | 23 | 229 |
| 06 Trucuk | 2 | 3 | - | 118 | 80 | 384 |
| 07 Kalikotes | 1 | 2 | - | 20 | 8 | 109 |
| 08 Kebonarum | 1 | | - | 8 | - | 5 |
| 09 Jogonalan | 1 | 2 | - | 60 | 13 | 266 |
| 10 Manisrenggo | 1 | 2 | - | 74 | 5 | 106 |
| 11 Karangnongko | 1 | | - | 76 | 4 | 94 |
| 12 Ngawen | 1 | 2 | - | 20 | 6 | 114 |
| 13 Ceper | | 1 | 1 | 224 | 53 | 456 |
| 14 Pedan | 1 | 1 | - | 75 | 5 | 281 |
| 15 Karangdowo | 1 | 2 | - | 173 | 1 | 456 |
| 16 Juwiring | 3 | 1 | - | 174 | 6 | 283 |
| 17 Wonosari | 2 | 1 | - | 50 | 2 | 140 |
| 18 Delanggu | 1 | | - | 321 | 2 | 208 |
| 19 Polanharjo | - | 1 | - | 18 | 4 | 5 |
| 20 Karanganom | 3 | - | - | 91 | 8 | 396 |
| 21 Tulung | 2 | 5 | - | 51 | 9 | 122 |
| 22 Jatinom | 2 | 3 | - | 189 | 6 | 642 |
| 23 Kemalang | 2 | - | - | 2 | 71 | 1.032 |
| 24 Klaten Selatan | 1 | - | - | 36 | 2 | 138 |
| 25 Klaten Tengah | 7 | - | - | 634 | 16 | 1.987 |
| 26 Klaten Utara | 3 | - | - | 61 | 13 | 160 |
| **Jumlah 2020** | **50** | **36** | **1** | **3.248** | **448** | **9.601** |
| **2019** | **51** | **35** | **1** | **3.248** | **524** | **11.752** |
| **2018** | **49** | **33** | **2** | **2.163** | **922** | **10.532** |
| **2017** | **49** | **33** | **1** | **5.859** | **922** | **17.981** |
| **2016** | **50** | **41** | **2** | **2.993** | **791** | **11.293** |

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan Dispermasdes Kabupaten Klaten, 2020*

### 3. Jaringan Transportasi

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: 1) jalan provinsi; 2) jalan kabupaten; 3) jalan poros desa, dan (4) jalan lingkungan. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: 1) Kecamatan Cawas 8.100 km; 2) Kecamatan Pedan 6.100 km; 3) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta 4) Kecamatan Ceper 5.000 km, Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah 1) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; 2) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; 3) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan 4) Kecamatan Karangnongko 38.320 km.

**Tabel 2.137**
**Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan**
**Tahun 2019 (dalam km)**

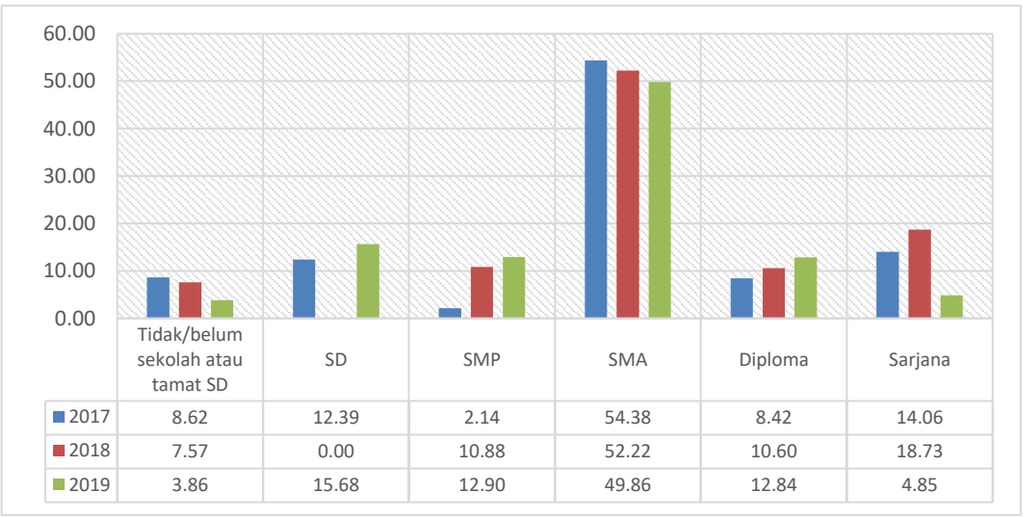
| No | Kecamatan | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten | Jalan Poros Desa | Jalan Lingkungan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prambanan | - | 39.140 | 78.580 | 43.350 |
| 2 | Gantiwarno | - | 47.540 | 136.950 | 27.900 |
| 3 | Wedi | - | 24.880 | 88.068 | 48.160 |
| 4 | Bayat | - | 25.630 | 87.815 | 93.130 |
| 5 | Cawas | 8.100 | 37.180 | 101.215 | 87.335 |
| 6 | Trucuk | 0,940 | 36.920 | 104.635 | 98.287 |
| 7 | Kalikotes | - | 20.580 | 84.688 | 74.373 |
| 8 | Kebonarum | - | 20.440 | 42.825 | 10.725 |
| 9 | Jogonalan | - | 25.970 | 81.141 | 65.710 |
| 10 | Manisrenggo | - | 28.430 | 105.840 | 51.050 |
| 11 | Karangnongko | - | 38.320 | 74.540 | 37.735 |
| 12 | Ngawen | 2.900 | 25.220 | 64.460 | 58.700 |
| 13 | Ceper | 5.000 | 16.370 | 81.570 | 77.255 |
| 14 | Pedan | 6.100 | 25.210 | 64.520 | 75.005 |
| 15 | Karangdowo | - | 22.140 | 107.315 | 37.319 |
| 16 | Juwiring | - | 31.190 | 121.645 | 83.074 |
| 17 | Wonosari | - | 31.020 | 54.810 | 57.820 |
| 18 | Delanggu | - | 20.920 | 57.543 | 57.415 |
| 19 | Polanharjo | - | 28.610 | 95.266 | 56.275 |
| 20 | Karanganom | - | 26.200 | 100.650 | 81.088 |
| 21 | Tulung | 6.000 | 37.370 | 107.330 | 79.390 |
| 22 | Jatinom | 4.400 | 33.060 | 83.550 | 98.780 |
| 23 | Kemalang | - | 35.810 | 137.450 | 26.100 |
| 24 | Klaten Selatan | - | 26.700 | 59.280 | 30.404 |
| 25 | Klaten Tengah | - | 42.880 | 24.850 | 13.460 |
| 26 | Klaten Utara | 1.400 | 29.230 | 24.500 | 24.770 |
| | JUMLAH | 34.840 | 776.960 | 2.171.006 | 1.494.610 |

*Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2019*

### 2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

**1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan**

Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Kabupaten Klaten di dominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SMA di tahun 2019 sebesar 49,86% sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai 54,38%. Porsi paling banyak kedua di tahun 2019 ditempati oleh penduduk yang memiki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 15,68%, kondisi tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 12,39%. Sedangkan persentase paling rendah dipegang oleh penduduk tingkat pendidikan tidak/belum sekolah atau tamat SD di tahun 2019 sebesar 3,86% turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,62%. Salah satu cara mengatasi dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

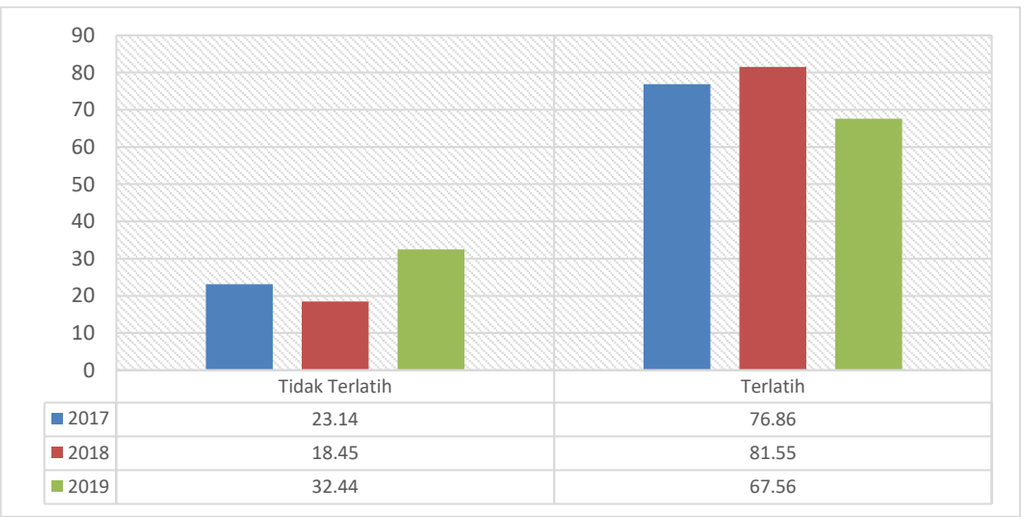



| | Tidak/belum sekolah atau tamat SD | SD | SMP | SMA | Diploma | Sarjana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8.62 | 12.39 | 2.14 | 54.38 | 8.42 | 14.06 |
| 2018 | 7.57 | 0.00 | 10.88 | 52.22 | 10.60 | 18.73 |
| 2019 | 3.86 | 15.68 | 12.90 | 49.86 | 12.84 | 4.85 |

*Sumber: Sakernas, 2021*

**Gambar 2.89.**
**Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019**

Persentase penduduk menganggur terbuka berdasarkan keterampilan di tahun 2019 yang terlatih sebanyak 67,56% menurun dibanding tahun 2018 sebanyak 81,55%. Sementara penduduk yang tidak mendapatkan pelatihan di tahun 2019 sebanyak 32,44% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 18,45%.

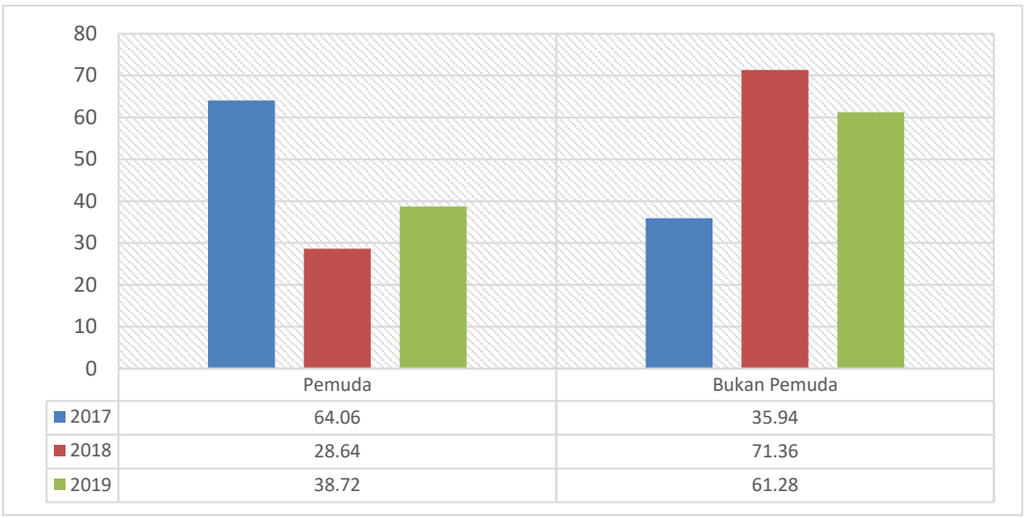



| | Tidak Terlatih | Terlatih |
|---|---|---|
| 2017 | 23.14 | 76.86 |
| 2018 | 18.45 | 81.55 |
| 2019 | 32.44 | 67.56 |

*Sumber: Sakernas, 2021*

**Gambar 2.90.**
**Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Keterampilan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019**

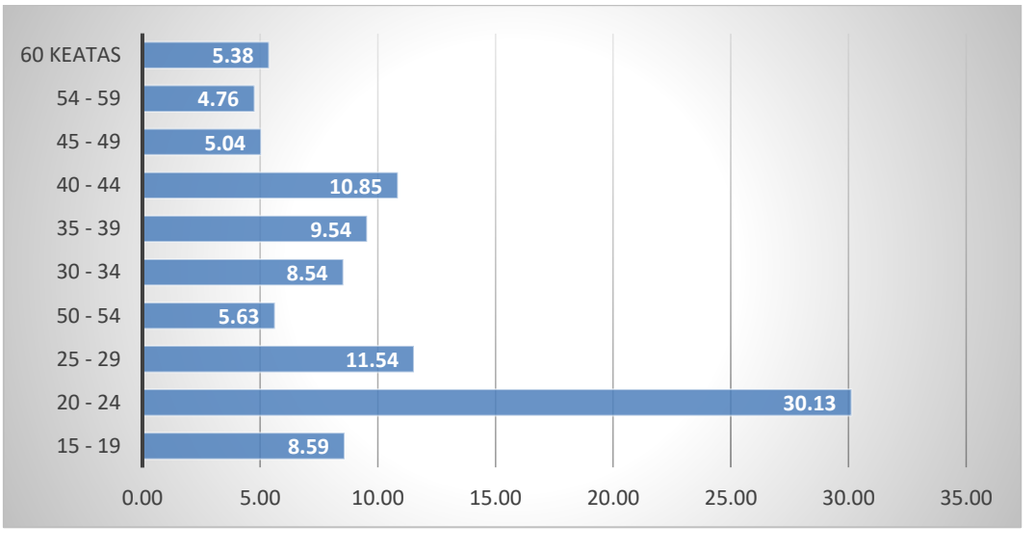
Berdasarkan klasifikasi pemuda, persentase penduduk menganggur terbuka, pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk pada rentang usia bukan pemuda (> 30 tahun) sebesar 61,28% menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,36%. Sementara penduduk menganggur terbuka berdasarkan klasifikasi pemuda (usia 16-30 tahun) di tahun 2019 tercatat sebesar 38,72% meningkat dibandingkan sebelumnya sebesar 28,64%.




*Sumber: Sakernas, 2021*

**Gambar 2.91.**
**Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Pemuda Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019**

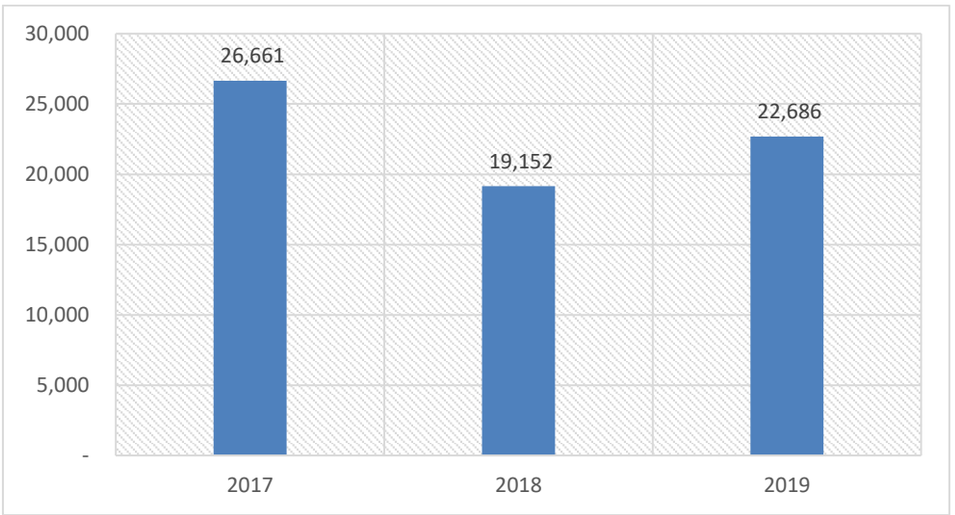
Persentase penduduk menganggur terbuka berdasarkan klasifikasi kelompok umur terbanyak di tahun 2019 berada di usia 20-24 tahun sebesar 30,13%, disusul kelompok usia 25-29 tahun sebesar 11,54%. Sementara untuk kelompok umur terendah di usia 54-49 tahun sebesar 4,76%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber: Sakernas, 2021*

**Gambar 2.92.**
**Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Kelompok Umur di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019**

Jumlah penduduk menganggur terbuka tidak ada klasifikasi di tahun 2019 sebanyak 22.686 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 19.152 jiwa.




*Sumber: Sakernas, 2021*

**Gambar 2.93.**
**Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Tidak Ada Klasifikasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019**

**2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)**

Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 mengalami pergeseran namum tidak signifikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 43,46% menjadi 45,49% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif paling tidak menanggung bebab 45 orang usia tidak produktif.

**Tabel 2.138**
**Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Tahun | Penduduk Kelompok Umur | | | Jumlah Penduduk | Persentase RBT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-14 | 15-64 | 65+ | | |
| 2016 | 267.469 | 906.650 | 126.587 | 1.300.706 | 43,46% |
| 2017 | 275.208 | 907.665 | 125.839 | 1.308.712 | 44,18% |
| 2018 | 263.474 | 911.174 | 142.232 | 1.316.880 | 44,53% |
| 2019 | 272.466 | 903.579 | 147.564 | 1.323.609 | 46,49% |
| 2020 | 269.329 | 912.459 | 145.789 | 1.327.577 | 45,49% |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2021*

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang semula sejumlah 457,224 KK pada Tahun 2019 menjadi 472,569 KK pada Tahun 2020 (atau bertambah sebanyak 15,345 KK). Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri).

**Tabel 2.139**
**Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| Tahun | Kepala Keluarga (KK) |
|---|---|
| 2016 | 420.819 |
| 2017 | 436.506 |
| 2018 | 431.153 |
| 2019 | 457.224 |
| 2020 | 472.569 |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2021*

## 2.5. Analisis Capaian Hasil Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2020 diperoleh bahwa jumlah program RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sejumlah 164 program dan jumlah program RKPD Tahun 2020 sejumlah 164 program. Dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 terdapat 164 (seratus enam puluh empat) program yang dijabarkan dalam 335 indikator program RPJMD 2016-2021. Adapun capaian indikator program dalam RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun anggaran 2020 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Tercapai, sejumlah 138 Indikator atau sebesar 40,84%;
b. Akan tercapai, sejumlah 51 indikator atau sebesar 15,08;
c. Perlu upaya keras, sejumlah 149 indikator atau sebesar 44,08.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 terdapat indikator yang belum tercapai dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional dan regional. Selain itu upaya pencapaian target yang tidak maksimal dikarenakan adanya recofusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan wabah Pandemi Covid-19. Secara lengkap hasil evaluasi terhadap capaian indikator program di RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 2.140
## Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **URUSAN PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD | 48.430 | 48.025 | 43.027 | 43.328 | 43.631 | 43.937 | 48.025 | 43.027 | 44.271 | 49.140 | 49.140 | 43.937 | 49.140 | 111,84 | Tercapai |
| | 2 | | | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 92,19 | 92,37 | 92,48 | 92,59 | 92,79 | 92,99 | 92,37 | 78,61 | 81,82 | 90 | 90,33 | 92,99 | 90,33 | 97,14 | Akan Tercapai |
| | 3 | 2) | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | 94,53 | 94,53 | 95,03 | 97,65 | 97,85 | 98,05 | 105,23 | 97,45 | 102,75 | 98,54 | 98,54 | 98,05 | 98,54 | 100,50 | Tercapai |
| | 4 | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 87,58 | 87,58 | 88,08 | 91,13 | 91,33 | 91,53 | 97,57 | 90,93 | 98,37 | 98,31 | 98,31 | 91,53 | 98,31 | 107,41 | Tercapai |
| | 5 | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 81,60 | 91,26 | 86,84 | 87,04 | 87,24 | 87,44 | 91,26 | 86,84 | 90,84 | 88,30 | 88,3 | 87,44 | 88,30 | 100,98 | Tercapai |
| | 6 | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 63,94 | 72,77 | 68,22 | 68,42 | 68,62 | 68,82 | 72,77 | 68,22 | 73,27 | 73,05 | 73,05 | 68,82 | 73,05 | 106,15 | Tercapai |
| | 7 | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 96,64 | 96,64 | 96,65 | 88,48 | 88,68 | 88,88 | 92,43 | 88,28 | 95,48 | 97,73 | 97,73 | 88,88 | 97,73 | 109,96 | Tercapai |
| | 8 | | | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 | Tercapai |
| | 9 | | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,10 | 0,1 | 0,1 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 62,50 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | | | Angka Kelulusan SD/MI | 97,78 | 97,78 | 97,79 | 98,47 | 98,27 | 98,87 | 99,34 | 98,27 | 98,19 | 99,99 | 99,99 | 98,87 | 99,99 | 101,13 | Tercapai |
| | 11 | | | Angka Kelulusan SMP/MTs | 95,55 | 95,55 | 95,65 | 98,13 | 98,15 | 98,17 | 97,73 | 98,11 | 96,57 | 99,14 | 99,14 | 98,17 | 99,14 | 100,99 | Tercapai |
| | 12 | 3) | Pendidikan Non Formal | Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,78 | 99,57 | 99,62 | 99,72 | 99,73 | 99,74 | 99,57 | 99,62 | 99,57 | 100 | 99,66 | 99,74 | 99,66 | 99,92 | Akan Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 13 | 4) | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 | 86,42 | 87,83 | 76,97 | 79,97 | 82,97 | 86 | 87,83 | 76,97 | 79,97 | 87 | 87,07 | 86,00 | 87,07 | 101,24 | Tercapai |
| | 14 | | | Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah | 98,08 | 98,76 | 98,27 | 98,47 | 98,67 | 98,87 | 98,76 | 98,27 | 99,00 | 99 | 99,17 | 98,87 | 99,17 | 100,30 | Tercapai |
| | 15 | | | Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah | 96,58 | 96,78 | 93,55 | 93,75 | 93,95 | 94,15 | 96,78 | 93,55 | 96,92 | 97 | 97,1 | 94,15 | 97,10 | 103,13 | Tercapai |
| | 16 | | | Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI | 1 : 12 | 1 : 13 | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1:13 | 1:14 | 01.13 | 0,05 | 0,05 | 1 : 15 | 0,05 | 98,67 | Akan Tercapai |
| | 17 | | | Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs | 1 : 11 | 1 : 12 | 1 : 14 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1:12 | 1:14 | 01.11 | 0,05 | 0,05 | 1 : 15 | 0,05 | 96,00 | Akan Tercapai |
| | 18 | 5) | Manajemen Pelayanan Pendidikan | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 96,64 | 92,43 | 88,28 | 88,78 | 89,28 | 89,78 | 92,43 | 88,28 | 95,48 | 98 | 97,73 | 89,78 | 97,73 | 108,85 | Tercapai |
| | 19 | 6) | Pengembangan budaya dan pembinaan perpustakaan | Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,78 | 99,57 | 99,62 | 99,72 | 98,73 | 98,74 | 99,57 | 99,62 | 99,57 | 100 | 99,65 | 98,74 | 99,65 | 100,92 | Tercapai |
| | 20 | 7) | Pengadaan bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP | Penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah | 144.988 | 143.598 | 144.998 | 143.929 | 145.256 | 146.656 | 143.598 | 144.998 | 143.929 | 141.263 | 138.459 | 146.656 | 138.459 | 94,41 | Akan Tercapai |
| **2** | **URUSAN KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4) | 91,72 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 92,84 | 92,85 | 92,51 | 93,27 | 57,37 | 99,00 | 57,37 | 57,95 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | | | Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3) | 96,3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 96,98 | 97,2 | 97,54 | 97,55 | 60,21 | 100,00 | 60,21 | 60,21 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3) | 95,72 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 97,59 | 97,57 | 98,05 | 97,79 | 60,99 | 100,00 | 60,99 | 60,99 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita | 90,79 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 94 | 95,25 | 96,17 | 95,77 | 55,08 | 98,00 | 55,08 | 56,20 | Perlu Upaya Keras |
| | 5 | | | Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | | | Cakupan Kunjungan Bayi | 98,96 | 90 | 99 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 96,04 | 99,67 | 98,36 | 98,07 | 62,37 | 99,60 | 62,37 | 62,62 | Perlu Upaya Keras |
| | 7 | | | Cakupan BBLR | 5,22 | 5,25 | 5,14 | 5,1 | 5,06 | 5,02 | 5,25 | 5,14 | 5,34 | 5,55 | 6,1 | 5,02 | 6,10 | 121,51 | Tercapai |
| | 8 | | | Cakupan Anemia Wanita Usia Subur | | 0 | 0 | 35 | 33 | 30 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | 2) | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn | - | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 20 | 30 | 49 | 89 | 47 | 90,00 | 47,00 | 52,22 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | | | Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia ( >= 60 th) | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 | 100 | 10 | 30 | 80,51 | 91,22 | 48,13 | 100,00 | 48,13 | 48,13 | Perlu Upaya Keras |
| | 11 | | | Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,88 | 99,65 | 99 | 95,3 | 8 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 12 | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi | 56,7 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 60 | 70 | 68 | 49,4 | 20 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 13 | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Diabetis mellitus | 76 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 30 | 40 | 51 | 126 | 81 | 90,00 | 81,00 | 90,00 | Akan Tercapai |
| | 14 | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Gangguan jiwa berat | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 70 | 80 | 98,24 | 89 | 62,27 | 100,00 | 62,27 | 62,27 | Perlu Upaya Keras |
| | 15 | | | Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 12 | 20 | 70 | 75 | 80 | 90 | 27,48 | 64,81 | 82,24 | 90 | 55,8 | 90,00 | 55,80 | 62,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 16 | | | Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 320 | 66,67 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | Perlu Upaya Keras |
| | 17 | | | Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 18 | | | Discharded Campak > 2/100.000 Penduduk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 183,3 | 100 | 70 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 19 | | | Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 20 | | | Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 21 | | | Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 22 | | | Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Imunisasi Dasar Lengkap | 90 | 90 | 92 | 92,5 | 93 | 95 | 98,7 | 95,05 | 100,5 | 88,27 | 72,7 | 95,00 | 72,70 | 76,53 | Perlu Upaya Keras |
| | 23 | | | Cakupan Bias C/DT/TD | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,8 | 98,72 | 98 | 98 | 0 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 24 | 3) | Obat dan Perbekalan Kesehatan | Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat | 95,83 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 96 | 97 | 95,99 | 99 | 98 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | Akan Tercapai |
| | 25 | 4) | Pengawasan Obat dan Makanan | Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 95 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | Akan Tercapai |
| | 26 | | | Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 27 | 5) | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan desa siaga aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70,5 | 100,00 | 70,50 | 70,50 | Perlu Upaya Keras |
| | 28 | | | Kebijakan Yang Dibuat | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9,00 | 10,00 | 111,11 | Tercapai |
| | 29 | | | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 74 | 75,2 | 75,4 | 75,5 | 75,7 | 80 | 75,2 | 75,4 | 89,7 | 80 | 94,35 | 80,00 | 94,35 | 117,94 | Tercapai |
| | 30 | | | Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk kesehatan | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 6 | 8 | 61,38 | 19 | 24 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 31 | | | Proporsi Posyandu Mandiri | 42 | 20 | 25 | 47 | 49 | 51 | 42 | 44 | 45,99 | 46 | 52,38 | 51,00 | 52,38 | 102,71 | Tercapai |
| | 32 | | | Persentase Desa Didampingi SMD MMD | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 33 | 6) | Perbaikan Gizi masyarakat | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 34 | | | Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif | 73,59 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,6 | 72 | 75,27 | 82,62 | 81,02 | 81,00 | 81,02 | 100,02 | Tercapai |
| | 35 | | | Cakupan Balita Stunting | 26,1 | 27,6 | 27,7 | 27,3 | 27 | 26,8 | 27,6 | 27,2 | 7,1 | 7 | 12,8 | 26,80 | 12,80 | 47,76 | Perlu Upaya Keras |
| | 36 | | | Cakupan Balita Wasting | 8,4 | 11 | 11 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 10,9 | 10,5 | 10,9 | 3,48 | 4,8 | 10,20 | 4,80 | 47,06 | Perlu Upaya Keras |
| | 37 | | | Cakupan Balita Underweight | 16,1 | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 18 | 19,1 | 18 | 5,3 | 6,4 | 10,2 | 18,00 | 10,20 | 56,67 | Perlu Upaya Keras |
| | 38 | | | Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes) | 1,69 | 5 | 4,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 1,38 | 1,13 | 2,22 | 4,03 | 1,5 | 2,30 | 1,50 | 65,22 | Perlu Upaya Keras |
| | 39 | | | Partisipasi Posyandu (D/S) | 8,14 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 81,4 | 81,6 | 82,35 | 82,41 | 81,3 | 85,00 | 81,30 | 95,65 | Akan Tercapai |
| | 40 | 7) | Pengembangan Lingkungan Sehat | Cakupan desa open defication free (ODF) | 14 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 19,95 | 32,92 | 79,55 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 41 | | | Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja | 20 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 0 | 26,342 | 94,05 | 97,8 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 42 | | | Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 43 | 8) | Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Akreditasi Puskesmas & RSUD | 20,59 | 20,59 | 47,06 | 32,35 | 20,59 | 47,06 | 20,59 | 47,06 | 100 | 20,59 | 100 | 47,06 | 100,00 | 212,49 | Tercapai |
| | 44 | 9) | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11,49 | 3,2 | 5,00 | 3,20 | 64,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 45 | 10) | Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya | Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 0,28 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 100,00 | Tercapai |
| | 46 | | | Rasio Pustu per satuan penduduk | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 100,00 | Tercapai |
| | 47 | 11) | Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata | Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1,38 | 1,64 | 1,78 | 1,38 | 1,78 | 128,99 | Tercapai |
| | 48 | 12) | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur | 14,7 | 50 | 55 | 62 | 65 | 70 | 52,55 | 42,04 | 49,1 | 69,3 | 56,4 | 70,00 | 56,40 | 80,57 | Perlu Upaya Keras |
| | 49 | 13) | Pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru paru/Rumah Sakit mata | Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95,38 | 96,59 | 100,00 | 96,59 | 96,59 | Akan Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Prosentase jembatan dalam kondisi baik | 60,90 | 61,30 | 61,75 | 62,25 | 81,32 | 81,90 | 61,30 | 61,75 | 81,12 | 81,32 | 81,32 | 81,90 | 81,32 | 99,29 | Akan Tercapai |
| | 2 | | | Prosentase jalan dalam kondisi baik | 49,51 | 55,26 | 56,92 | 58,68 | 61,49 | 64,41 | 56,25 | 61,15 | 67,2 | 69,33 | 66,25 | 83,17 | 66,25 | 79,66 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | 2) | Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong | Prosentase panjang talud jalan yang dibangun | 0 | 0 | 15,69 | 41,18 | 60,78 | 80,39 | 0 | 15,69 | 41,18 | 0 | 0 | 80,39 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | 3) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Prosentase volume jalan yang dipelihara (m) | 12,02 | 25,85 | 43,09 | 54,31 | 66,33 | 83,17 | 25,85 | 43,09 | 63,25 | 71 | 86 | 83,17 | 85,68 | 103,02 | Tercapai |
| | 5 | 4) | Penataan trotoar jalan | Prosentase rasio trotoar yang tertata | 54 | 54,50 | 55,50 | 56 | 57,58 | 59,16 | 54,5 | 55,50 | 1.555 | 57,58 | 0 | 59,16 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | 5) | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia | 60,38 | 60,38 | 92,45 | 92,45 | 100 | 100 | 60,38 | 92,45 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 7 | 6) | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | 20 | 22,2 | 24,26 | 26 | 28 | 30 | 22,20 | 24,26 | 31,97 | 28 | 69,67 | 30,00 | 69,67 | 232,23 | Tercapai |
| | 8 | 7) | Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik | 69,67 | 71,96 | 74,26 | 76,56 | 78,86 | 81,16 | 71,96 | 74,26 | 67,82 | 78,86 | 78,86 | 81,16 | 78,86 | 97,17 | Akan Tercapai |
| | 9 | 8) | Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan | Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang | 795 | 145 | 1028 | 250 | 250 | 250 | 145 | 1.028 | 776 | 776 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | 9) | Pembangunan Drainase /Gorong-Gorong | Prosentase layanan Drainase | 65 | 66 | 66,95 | 71 | 71,2 | 71,5 | 66,00 | 66,95 | 53,63 | 98,89 | 73,05 | 71,50 | 73,05 | 102,17 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 11 | 10) | Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah | Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih | 69,68 | 77,26 | 85 | 89 | 91,37 | 94,25 | 77,26 | 84,84 | 89,15 | 80,16 | 80,16 | 94,25 | 80,16 | 85,05 | Akan Tercapai |
| | 12 | | | Prosentase layanan Air Limbah | 60,52 | 70,29 | 80,26 | 92,5 | 94,37 | 96,25 | 70,39 | 80,26 | 95,92 | 100 | 100 | 96,25 | 100,00 | 103,90 | Tercapai |
| | 13 | 11) | Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung | Persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun /jumlah gedung pemerintah yang terbangun | 13,11 | 8 | 13 | 11 | 19 | 5 | 13,11 | 34,43 | 17 | 13 | 2 | 5,00 | 2,00 | 40,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 14 | 12) | Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan | Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | 0 | 0 | 0,73 | 0,,39 | 0,46 | 41,65 | 21,9 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 15 | 13) | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | 30 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 16 | | | Persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB) | 19,42 | 19,42 | 30,5 | 47,69 | 65,13 | 82,56 | 19,42 | 30,25 | 1,75 | 2,11 | 82,56 | 82,56 | 82,56 | 100,00 | Tercapai |
| | 17 | 14) | Perencanaan Tata Ruang | Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun | 12,5 | 12,25 | 25 | 43,75 | 62,5 | 81,25 | 12,5 | 25 | 43,75 | 62,5 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 100,00 | Tercapai |
| | 18 | 15) | Pemanfaatan Ruang | Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | Tercapai |
| **4** | **URUSAN SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan | 94 | 41,78 | 42,78 | 97 | 98 | 99 | 41,78 | 31,31 | 99,72 | 47,78 | 98,4 | 99,00 | 98,40 | 99,39 | Akan Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 2) | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 5,1 | 65,38 | 26 | 26 | 28 | 30 | 5,3 | 24 | 92,89 | 16,12 | 30 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 3 | | | Persentase kehadiran pengunjung makam yang bersejarah | - | 88,94 | 90,28 | 91 | 100 | 100 | 88,94 | 90,28 | 89,32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | 3) | Pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 88,73 | 30,50 | 28 | 28,00 | 28,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 5 | 4) | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30,50 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 6 | | | Prosentase Organisasi / lembaga yang terfasilitasi | - | 36,39 | 35,67 | 70 | 90 | 100 | 36,39 | 36,67 | 70 | 90 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 7 | 5) | Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit lainnya) | Cakupan penanganan PMKS | 40,78 | 41,78 | 42,78 | 43,78 | 44,78 | 99 | 33,16 | 35,52 | 70,66 | 62,26 | 90,32 | 99,00 | 90,32 | 91,23 | Akan Tercapai |
| | 8 | 6) | Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS | Persentase kehadiran peserta sosialisasi | 0 | 0 | 77,58 | 88 | 80 | 80 | 0 | 77,58 | 95,71 | 91,43 | 97,14 | 80,00 | 97,14 | 121,43 | Tercapai |
| | 9 | 7) | Peningkatan Keagamaan | Persentase kehadiran masyarakat | 64,29 | 64,29 | 74,34 | 85 | 90 | 90 | 64,29 | 74,34 | 85 | 90 | 90 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 10 | 8) | Penyelenggaran Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana desa | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 11 | | | Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225,00 | 225,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 12 | | | Sekolah Siaga Bencana Sekolah | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15,00 | 2,00 | 13,33 | Perlu Upaya Keras |
| | 13 | | | Sekolah Sungai | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1,00 | 33,33 | Perlu Upaya Keras |
| | 14 | 9) | Penanganan Darurat Bencana | Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 15 | | | Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 16 | | | Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 17 | 10) | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Paska Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,5 | 81,5 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 18 | 11) | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Cakupan kawasan rawan bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| 5 | **URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 1) | Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial | Prosentase Rumah Layak Huni | 92,58 | 93,82 | 95,05 | 96,29 | 97,53 | 98,76 | 93,82 | 95,05 | 96,29 | 95,57 | 98,36 | 98,76 | 98,36 | 99,59 | Akan Tercapai |
| | 2 | 2) | Pengembangan Perumahan | Jumlah pengembangan PSU (perumahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | Perlu Upaya Keras |
| **6** | **URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Prosentase tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik | Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | | | Prosentase Ormas aktif yang terbina | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 75 | 80 | 80 | 100 | 40 | 85,00 | 40,00 | 47,06 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | 3) | Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Prosentase Anggota korsik yang terlatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 5 | | | Prosentase pendataan dan pemetaan masalah ketahanan seni budaya, agama, ekonomi, dan kemasyarakatan | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | 4) | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 90 | 92 | 100 | 93,5 | 96 | 98,00 | 96,00 | 97,96 | Akan Tercapai |
| | 7 | | | Prosentase penyelesaian konflik sosial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | 5) | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Prosentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara | 15 | 100 | 100 | 20 | 49 | 49 | 15 | 15 | 94 | 75 | 100 | 49,00 | 100,00 | 204,08 | Tercapai |
| | 9 | | | Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | | | Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 11 | 6) | Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan | 91 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 3650 | 92 | 94 | 89,63 | 98 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 12 | | | Cakupan petugas perlindungan masyarakat (desa/kelurahan) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100 | 100 | 100 | 31,00 | 100,00 | 322,58 | Tercapai |
| | 13 | 7) | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten | 90,91 | 91 | 91 | 91,50 | 91,75 | 92,00 | 91 | 91,25 | 91,5 | 91,6 | 92 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 14 | | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 91 | 91 | 91,25 | 91,50 | 91,75 | 92,00 | 91 | 91,25 | 91,5 | 91 | 91 | 92,00 | 91,00 | 98,91 | Akan Tercapai |
| | 15 | 8) | Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran | Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12,00 | 3,00 | 25,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 16 | 9) | Penanganan Darurat Bencana | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 100 | - | 1.100 | 94 | 96 | 98 | 0 | 100 | 94 | 100 | 98 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 17 | | | Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah | 40 | 50 | 64 | 70 | 75 | 75 | 50 | 64 | 7 | 7 | 7 | 75,00 | 7,00 | 9,33 | Perlu Upaya Keras |
| | 18 | 10) | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase konsumen yang terlindungi | 70 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 | 69 | 70 | 71 | 71 | 74 | 75,00 | 74,00 | 98,67 | Akan Tercapai |
| | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **URUSAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rasio daya serap tenaga kerja | 1.754,45 | 1.754,45 | 1.774,50 | 0 | 0 | 0 | 1.997,14 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0! | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | | | Angka partisipasi angkatan kerja | 67,79 | 67,56 | 67,10 | 0 | 0 | 0 | 84,76 | 66,93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | | | Rasio penduduk yang bekerja | 0,97 | 1 | ,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | 60 | 0 | 0 | 56,67 | 59,26 | 50 | 60,00 | 50,00 | 83,33 | Perlu Upaya Keras |
| | 5 | 2) | Peningkatan Kesempatan Kerja | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 97,25 | 97 | 97,25 | 0 | 0 | 0 | 97,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | | | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 0 | 0 | 22 | 25,20 | 25,30 | 25,40 | 0 | 22,19 | 20,56 | 17,16 | 21,11 | 25,40 | 21,11 | 83,11 | Perlu Upaya Keras |
| | 7 | 3) | Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Keselamatan dan Perlindungan | 9,24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | | | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 0 | 0 | 78,95 | 79,50 | 80 | 80,50 | 0 | 78,95 | 57,10 | 66,67 | 55,56 | 80,50 | 55,56 | 69,02 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | | | Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun | 0 | 0 | 6,38 | 6,20 | 6,10 | 6,00 | 0 | 6,38 | 4,47 | 10,06 | 11,96 | 6,00 | 11,96 | 199,33 | Perlu Upaya Keras |
| **8** | **URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase OPD yang menerapkan PPRG | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 0 | 0 | 20 | 76,47 | 70 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 2 | 2) | Peningkatan Kualitas Hidup terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak | Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus | 5,21 | 5,21 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,80 | 3,69 | 3,29 | 3,12 | 0,57 | 3,22 | 4,80 | 3,22 | 67,08 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | | | Rasio perempuan korban kekerasan | 2,18 | 1,54 | 1,5 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,54 | 0,25 | 0,44 | 3,36 | 1,15 | 1,35 | 1,15 | 85,19 | Akan Tercapai |
| | 4 | 3) | Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan | 3,49 | 3,4 | 5,2 | 94,01 | 100 | 100 | 3,49 | 3,49 | 4,9 | 11,72 | 42,64 | 100,00 | 42,64 | 42,64 | Perlu Upaya Keras |
| 9 | **URUSAN PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan | 91,71 | 92,00 | 92,25 | 92,50 | 92,75 | 93 | 92 | 92,25 | 92,5 | 92,75 | 83 | 93,00 | 83,00 | 89,25 | Akan Tercapai |
| | 2 | 2) | Peningkatan ketahanan pangan | Alokasi pupuk bersubsidi | 59.750 | 57.530 | 54.350 | 63.450 | 88.035 | 88.035 | 57.530 | 54.350 | 58.125 | 53.363 | 40.306 | 88.035 | 40.306 | 45,78 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | | | Penerimaan pendapatan DBHCHT | 15.168.602.000 | 14.282.125.000 | 15.666.717.000 | 14.944.437.000 | 15.039.148.000 | 14.964.426.000 | 14.282.125.000 | 15.666.717.000 | 14.944.437.000 | 15.196.498.000 | 11.833.000.000 | 14.964.426.000 | 11.833.000.000 | 79,07 | Perlu Upaya Keras |
| **10** | **URUSAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL | 48 | 59 | 70 | 77 | 81 | 83 | 59 | 70 | 93,75 | 100 | 80 | 83,00 | 80,00 | 96,39 | Akan Tercapai |
| | 2 | | | Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | 70 | 71 | 80 | 82 | 85 | 88 | 71 | 80 | 78,5 | 100 | 88 | 88,00 | 88,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 3 | | | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 4 | | | Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 5 | 2) | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 5 | 9 | 100 | 35 | 20 | 36,00 | 20,00 | 55,56 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | | | Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 0 | 20 | 0 | 1,03 | 80 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 7 | 3) | Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH | Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100,00 | 85,00 | 85,00 | Akan Tercapai |
| | 8 | 4) | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100,00 | 63,00 | 63,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | 5) | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan | 13,93 | 12,89 | 14,49 | 15,20 | 16,63 | 17,21 | 12,89 | 14,49 | 80 | 45,38 | 50,66 | 17,21 | 50,66 | 294,36 | Tercapai |
| | 10 | | | Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 12,5 | 2,5 | 5 | 0 | 73,57 | 81,25 | 12,50 | 81,25 | 650,00 | Tercapai |
| | 11 | 6) | Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan | 294,58 | 0,000784 | 0,36 | 0,7 | 0,15 | 0,125 | 0,000784 | 0,36 | 0,36 | 0,15 | 0,125 | 0,13 | 0,13 | 100,00 | Tercapai |
| **11** | **URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Penataan administrasi kependudukan | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,9 | 0,9 | 0,91 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 103,30 | Tercapai |
| | 2 | | | Cakupan penerbitan KTP | 85,33 | 88,47 | 89,64 | 89,98 | 90,3 | 90,58 | 88,47 | 89,63 | 89,98 | 89,91 | 94,93 | 90,58 | 94,93 | 104,80 | Tercapai |
| | 3 | | | Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun | 86,24 | 77,75 | 80,84 | 89,53 | 92,81 | 92,18 | 89,73 | 89,18 | 89,53 | 91,2 | 91,6 | 92,18 | 91,60 | 99,37 | Akan Tercapai |
| | 4 | | | Keluarga mempunyai KK | 0 | 94 | 94,67 | 95,5 | 96,7 | 98 | 94 | 94,62 | 95,5 | 96,47 | 97,8 | 98,00 | 97,80 | 99,80 | Akan Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | | | Penduduk berakte kelahiran | 0 | 85,2 | 87,5 | 90 | 93,7 | 95,8 | 85,2 | 87,5 | 89,53 | 91,28 | 91,6 | 95,80 | 91,60 | 95,62 | Akan Tercapai |
| | 6 | | | Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non Muslim) | 0 | 226.797 | 238.546 | 250.500 | 263.150 | 295.850 | 226.797 | 238.546 | 250.500 | 251.123 | 253.671 | 295.850 | 253.671 | 85,74 | Akan Tercapai |
| | 7 | | | Penerbitan Akte kematian | | 366 | 1.031 | 1.731 | 2.400 | 2.950 | 356 | 1031 | 1731 | 1.800 | 243 | 2.950 | 243 | 8,24 | Perlu Upaya Keras |
| **12** | **URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan | Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | 13 | 13,00 | 35 | 47 | 77 | 89 | 13 | 35 | 37 | 75 | 75 | 89,00 | 75,00 | 84,27 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa | Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan | 15 | 15,00 | 31 | 46 | 72 | 87 | 15 | 31 | 48 | 59 | 77 | 87,00 | 77,00 | 88,51 | Akan Tercapai |
| | 3 | 3) | Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga) | Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD | 13 | 26,00 | 39 | 52 | 65 | 78 | 26 | 39 | 96,8 | 65 | 78 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 4 | 4) | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | Perlu Upaya Keras |
| | 5 | 5) | Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan | Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna | 7 | 7 | 29 | 46 | 64 | 82 | 7 | 29 | 46 | 63,64 | 64 | 82,00 | 64,00 | 78,05 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | 6) | Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes | 14 | 29 | 43 | 51 | 58 | 64 | 29 | 43 | 58 | 77 | 91 | 64,00 | 91,00 | 142,19 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 7) | Peningkatan partisispasi masyarakat dalam membangun desa | Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat | 7 | 7 | 7 | 17 | 33 | 67 | 7 | 7 | 17 | 33 | 1.337 | 67,00 | 1.337 | 1.995,52 | Tercapai |
| **13** | **URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Keluarga berencana | Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR) | 75,9 | 78,7 | 64,37 | 64,37 | 65,00 | 65,03 | 78,7 | 64,93 | 73,24 | 71,39 | 70,72 | 65,03 | 70,72 | 108,75 | Tercapai |
| | 2 | | | Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB | 5,5 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,10 | 4,98 | 6 | 3,9 | 4,99 | 9,05 | 24,29 | 4,98 | 24,29 | 487,75 | Tercapai |
| | 3 | | | Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need) | 14,3 | 10 | 9 | 9 | 8,97 | 8,94 | 10,13 | 9,3 | 17,4 | 15,91 | 17,01 | 8,94 | 17,01 | 190,27 | Tercapai |
| | 4 | 2) | Kesehatan Reproduksi Remaja | Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age spesific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old ) | 41 | 40 | 39 | 37 | 35,00 | 33 | 40 | 39 | 2,7 | 35,54 | 0,42 | 33,00 | 0,42 | 1,27 | Tercapai |
| | 5 | 3) | Peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera | Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 38,6 | 43,21 | 36,21 | 28,00 | 36,21 | 129,32 | Tercapai |
| | 6 | 4) | Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang Mandiri | Persentase peserta KB mandiri | 86,31 | 39,88 | 90 | 90 | 91,00 | 0 | 246.281 | 245.785 | 39,79 | 63,3 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 7 | 5) | Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) aktif | 66 | 70 | 75 | 0 | 75 | 0 | 70 | 75 | 88,21 | 72,43 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | | | Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif | 55 | 65 | 75 | 0 | 75 | 0 | 65 | 75 | 88,26 | 70,74 | 24,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | | | Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif | 70 | 75 | 80 | 0 | 80 | 0 | 75 | 80 | 91,65 | 74,84 | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | | | Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif | 45 | 50 | 60 | 0 | 65 | 0 | 50 | 60 | 124,7 | 72,73 | 58,7 | 0,00 | 58,70 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 11 | 6) | Pelayanan Kontrasepsi | DO KB | 18,95 | 18 | 14 | 16 | 15 | 0 | 18 | 14 | 4,99 | 9,05 | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 12 | | | Unmet Need | 10 | 17 | 15 | 9,5 | 9 | 0 | 17 | 13 | 17,4 | 15,91 | 17,01 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 13 | 7) | Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | Peserta KB Mandiri | 86,31 | 54,56 | | 89 | 90 | 0 | 54,56 | 0 | 39,79 | 63,3 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 14 | 8) | Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Persentase keluarga Pra sejahtera dan KS I | 38,8 | 33,58 | 34,06 | 32 | 30 | 0 | 33,58 | 34,08 | 38,5 | 43,21 | 42,69 | 0,00 | 42,69 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 15 | 9) | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) | 621 | 621 | 622 | 636 | 641 | 0 | 621 | 622 | 561 | 561 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 16 | | | Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) | 271 | 266 | 266 | 281 | 286 | 0 | 266 | 266 | 248 | 228 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 17 | | | Jumlah tenaga pendamping kelompok Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) | 469 | 464 | 464 | 479 | 484 | 0 | 464 | 464 | 439 | 408 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 18 | | | Jumlah tenaga pendamping kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | 581 | 576 | 558 | 591 | 596 | 0 | 576 | 558 | 737 | 495 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 19 | 10) | Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | Persentase anggota kelompok BKB, BKR dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 0 | 17 | 16 | 0 | 69,13 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| **14** | **URUSAN PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Prosentase dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersusun | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 97,84 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Prosentase perlengkapan jalan terpasang | 22,67 | 27,85 | 31,53 | 33,88 | 36,96 | 40,03 | 27,85 | 31,53 | 87,8 | 83,33 | 75,37 | 40,03 | 75,37 | 188,29 | Tercapai |
| | 3 | 3) | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ | Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik | 72 | 76 | 82 | 85 | 86 | 87 | 76 | 82 | 80,53 | 87 | 48,43 | 87,00 | 48,43 | 55,67 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | 4) | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Terpasang | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 88,33 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 88,33 | 77,78 | 88,06 | Akan Tercapai |
| | 5 | 5) | Peningkatan pelayanan angkutan | Indeks kepuasan layanan angkutan umum | 60 | 63,04 | 78,85 | 69,42 | 72,17 | 74,82 | 63,04 | 67,25 | 93 | 79,016 | 106 | 74,82 | 106,00 | 141,67 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | 6) | Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum | 87,83 | 87,83 | 87,83 | 87,84 | 87,85 | 87,86 | 87,83 | 87,83 | 90,56 | 60,8 | 89 | 87,86 | 89,00 | 101,30 | Tercapai |
| **15** | **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Kerjasama informasi dengan Mass Media | Persentase event Kabupaten Terpublikasi | 0 | - | - | 85 | 90 | 92 | 0 | 0 | 85 | 98 | 57 | 92,00 | 57,00 | 61,96 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | | | Persentase keterbukaan informasi publik terhadap Badan Publik | 0 | - | - | 54 | 60 | 65 | 0 | 0 | 77 | 74 | 95 | 65,00 | 95,00 | 146,15 | Tercapai |
| | 3 | | | Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah melalui Media Massa | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 85 | 95 | 96 | 98 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | | | Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah | 90 | 85 | 73 | 100 | 100 | 100 | 95 | 73 | 98 | 98 | 98,611 | 100,00 | 98,61 | 98,61 | Akan Tercapai |
| | 5 | | | Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah melalui Media Sosial | 90 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 96 | 98 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | | | Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah melalui penyuluhan dengan media papan ruang | 90 | 80 | 74 | 100 | 100 | 100 | 90 | 74 | 96 | 98 | 98 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | Akan Tercapai |
| | 7 | | | Persentase kegiatan Pemerintah melalui radio | 96 | 100 | 34 | 90 | 90 | 90 | 100 | 34 | 90 | 95 | 95 | 90,00 | 95,00 | 105,56 | Perlu Upaya Keras |
| | 8 | | | Penyebaran publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya | 0 | 70 | 93 | 95 | 95 | 95 | 70 | 93 | 95 | 95 | 0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | 2) | Pengembangan Komunikasi, informasi, dan Media Massa | Cakupan layanan telekomunikasi | 32,20 | 32,20 | 52,20 | 52,20 | 53,60 | 55,08 | 32,20 | 52,20 | 52,00 | 53,6 | 54 | 55,08 | 54,00 | 98,04 | Akan Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 10 | | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tk. Kecamatan | 15 | 30 | 46 | 61,50 | 73 | 84,60 | 30 | 46 | 61,50 | 73 | 83 | 84,60 | 83,00 | 98,11 | Akan Tercapai |
| | 11 | | | Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-goverment | 10,0 | 10 | 14 | 40 | 60 | 80 | 10 | 14 | 35 | 49 | 100 | 80,00 | 100,00 | 125,00 | Tercapai |
| | 12 | 3) | Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi yang terlatih | 0 | | | 0 | 33 | 66,67 | 0 | 0 | | 39 | 100 | 66,67 | 100,00 | 149,99 | Tercapai |
| **16** | **URUSAN KOPERASI DAN UMKM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Persentase pertumbuhan UMKM | 0,04550 | 0,09 | 0,18 | 0,27240 | 0,36 | 0 | 0,0910 | 0,1817 | 0,27 | 0,08 | 0,078 | 0,41 | 0,08 | 19,19 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | Persentase promosi produk UKM | 10 | 10,00 | 30,00 | 40 | 50 | 60 | 10 | 30 | 40 | 0,35 | 0,002 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | 3) | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase koperasi aktif | 72,20 | 70,58 | 80,07 | 80,20 | 80,18 | 80,59 | 70,58 | 80,07 | 80,2 | 80,20 | 77,91 | 80,59 | 77,91 | 96,67 | Akan Tercapai |
| | 4 | | | Persentase pertumbuhan koperasi | 0,012 | 0,027 | -0,068 | 0,012 | 0,028 | 0,037 | 0,027 | -0,059 | 0,01 | 0,034 | 0,031 | 0,04 | 0,03 | 83,78 | Perlu Upaya Keras |
| | 5 | | | Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi | 4,39 | 4,12 | **5,89** | 9,76 | 11,68 | 13,53 | 4,12 | 5,89 | 9,76 | 8,21 | 0 | 13,53 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| **17** | **URUSAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA): | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | | | PMDN (dlm ribu Rp) | 89.208.500 | 89.208.500 | 90.823.173 | 92.621.473 | 94.659.145 | 97.025.624 | 62.385.300 | 247.327.200 | 229.788.500 | 1.914.915.766 | 698.896.464 | 970.256.2372 | 698.896.464 | 89.208.500 | Tercapai |
| | 3 | | | PMA ( dlm ribu US$) | 11.278,00 | 11.278 | 11.549 | 11.832 | 12.128 | 12.437 | 6.372 | 10.257 | 3.091 | 11.490 | 4.721 | 12.437 | 4.721 | 37,96 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | | | Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 5 | | | PMDN | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 21 | 67 | 870 | 4.743 | 16,00 | 4.743 | 29.643,75 | Tercapai |
| | 6 | | | PMA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 43 | 39 | 15 | 5 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 7 | | | Peningkatan Pendapatan BUMD | 3.240.000.000 | 4.082.400.000 | 4.572.288.000 | 4.892.348.160 | 5.088.042.086 | 5.291.563.770 | 4.090.119.172 | 4.589.886.518 | 5.175.168.808 | 6.508.914.000 | 7.148.100.580 | 529.156.376.986 | 7.148.100.580 | 135,08 | Tercapai |
| | 8 | 2) | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Rasio daya serap tenaga kerja: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | | | PMDN | 189 | 238 | 397 | 417 | 438 | 460 | 136 | 68 | 27 | 21 | 3 | 460,00 | 3,00 | 0,65 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | | | PMA | 46 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 28 | 2 | 14 | 224 | 12 | 294,00 | 12,00 | 4,08 | Perlu Upaya Keras |
| | 11 | | | Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | Perlu Upaya Keras |
| | 12 | | | PMDN | 1,75 | 1,75 | 1,81 | 1,98 | 2,20 | 2,50 | 203 | 296 | -7 | 733,00 | -64 | 2,50 | -64,00 | -2.560 | Perlu Upaya Keras |
| | 13 | | | PMA | 0 | 2,25 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 1415 | 61 | -70 | 272,00 | -59 | 2,55 | -59,00 | -2.313 | Perlu Upaya Keras |
| | 14 | | | Lama Proses Perizinan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14,00 | 10,00 | 71,43 | Perlu Upaya Keras |
| | 15 | | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 84,50 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 80,00 | 80,52 | 78,3 | 81,86 | 80,00 | 81,86 | 102,33 | Tercapai |
| | 16 | | | Lamanya proses perijinan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | Tercapai |
| 18 | **URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 1) | Peningkatan Peran Serta kepemudaan | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 60 | 64 | 66 | 66 | 69 | 69 | 64 | 66,00 | 68,97 | 93,00 | 60 | 69,00 | 60,00 | 86,96 | Akan Tercapai |
| | 2 | 2) | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif | 2 | 2 | 15 | 0 | 25 | 20 | 2 | 15 | 11 | 11 | 11 | 20,00 | 11,00 | 55,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | 3) | Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Persentase Wirausaha Muda yang Dibina (Keluarga Miskin) | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 25 | 0 | 15 | 15 | 95 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | 4) | Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba | Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 82 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 5 | 5) | Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 80 | 80 | 82 | 95 | 45 | 83,00 | 45,00 | 54,22 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | 6) | Pembinaan pemuda dan olahraga | Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Besar Nasional | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 90 | 18 | 20,00 | 18,00 | 90,00 | Akan Tercapai |
| | 7 | | | Persentase Kehadiran Peserta | 0 | 87,14 | 93,33 | 90 | 90 | 90 | 87,14 | 93,33 | 90 | 90 | 70 | 90,00 | 70,00 | 77,78 | Perlu Upaya Keras |
| **19** | **URUSAN STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan data/informasi | Persentase dokumen profil daerah yang tersedia | 7,14 | 17 | 33 | 42,86 | 71,43 | 100 | 7,14 | 14,29 | 47 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| **20** | **URUSAN PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 1) | Peningkatan Persandian Daerah | Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi | 0 | - | - | 0 | 23,5 | 25 | 0 | - | - | 36 | 35 | 25,00 | 35,00 | 140,00 | Tercapai |
| **21** | **URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,125 | 23 | 6,00 | 23,00 | 383,33 | Tercapai |
| | 2 | 2) | Pengembangan Nilai Budaya | Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 14,3 | 9 | 12,00 | 9,00 | 75,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | 3) | Pengelolaan Keragaman Budaya | Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/Kelompok Kesenian yang Difasilitasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 1 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | 4) | Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | Persentase Fasilitasi Pementasan Budaya Daerah | 0 | 0 | 96 | 100 | 100 | 100,00 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| **22** | **URUSAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15,63 | 20 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | Tercapai |
| **23** | **URUSAN KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip | 68.700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11,16 | -66,98 | 5,00 | -66,98 | -1.339,54 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 2) | Peningkatan kualitas pelayanan informasi | Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8,72 | 10,00 | 8,72 | 87,20 | Akan Tercapai |
| | 3 | 3) | Perbaikan sistem administrasi kearsipan | Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | Tercapai |
| | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **URUSAN KELUATAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi Perikanan budidaya (ton) | 27.831 | 28.164 | 29.009 | 30.396 | 31.302 | 31.467 | 28.660 | 29.515 | 26.681 | 28123 | 20.003 | 31467,00 | 20003,00 | 63,57 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Pengembangan Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan tangkap (ton) | 486 | 496 | 506 | 516 | 526 | 537 | 469 | 506 | 561 | 153 | 86 | 537,00 | 85,95 | 16,01 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | 3) | Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) | 13 | 15,14 | 16,43 | 18,72 | 19,91 | 20,41 | 15,14 | 17,20 | 19,18 | 20,4 | 20,28 | 20,41 | 20,28 | 99,36 | Akan Tercapai |
| **25** | **URUSAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan Kemitraan | Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 13 | 94 | 1 | 12,00 | 1,00 | 8,33 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Rata-rata lama kunjungan wisatawan | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 3 | 3) | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Persentase destinasi wisata andalan | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 28 | 17 | 17 | 25 | 25 | 47 | 28,00 | 47,00 | 167,86 | Tercapai |
| **26** | **URUSAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan Kesejahteraan Petani | Persentase kelompok tani kelas utama | 4 | 29,3 | 30,2 | 31,19 | 31,19 | 32,50 | 4 | 5 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 32,50 | 31,19 | 95,97 | Akan Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 2) | Peningkatan Ketahanan Pangan | Produktifitas Padi (kwt/ha) | 63,97 | 63,98 | 63,99 | 63,99 | 64 | 64,01 | 63,98 | 63,99 | 62,59 | 67,32 | 64 | 64,01 | 63,53 | 99,25 | Akan Tercapai |
| | 3 | | | Produktifitas Jagung (kwt/ha) | 85,12 | 85,14 | 85,15 | 85,16 | 85,18 | 85,18 | 74,97 | 85,05 | 81,95 | 93,35 | 81 | 85,18 | 80,83 | 94,89 | Akan Tercapai |
| | 4 | | | Produktifitas Kedelai (kwt/ha) | 22,16 | 22,18 | 22,21 | 22,22 | 22,26 | 22,31 | 18,12 | 17,47 | 20,13 | 16,37 | 21 | 22,31 | 20,63 | 92,47 | Akan Tercapai |
| | 5 | 3) | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | Mengikuti agro ekspo Soropadan (kali) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 6 | 4) | Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | Fasilitasi operasional Penyuluh | 209 | 235 | 205 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 205 | 205 | 152 | 209,00 | 152,00 | 72,73 | Perlu Upaya Keras |
| | 7 | 5) | Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Produksi Tembakau Rajang (ton) | 815 | 1.972 | 1.037 | 1.087 | 1.091 | 1.092 | 815 | 1.037 | 1.744 | 1750 | 1.559 | 1092,00 | 1558,79 | 142,75 | Tercapai |
| | 8 | | | Produksi Tembakau Asepan (ton) | 1.164 | 1.165 | 808 | 952 | 1.167 | 946 | 1.038 | 808 | 1.514 | 2595 | 2.309 | 946 | 2.309 | 244,08 | Tercapai |
| | 9 | 6) | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Populasi sapi (ekor) | 99.438 | 106.399 | 97.954 | 104.450 | 108.628 | 112.973 | 93.788 | 97.954 | 100.259 | 102.431 | 91.706 | 112.973 | 91.706 | 81,18 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | 7) | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Produksi Daging Sapi (ton) | 2.140 | 2.289 | 2.450 | 2.621 | 2.805 | 3.001 | 2.289 | 2.450 | 2.154,6 | 2010 | 324 | 3.001 | 324 | 10,80 | Perlu Upaya Keras |
| | 11 | 8) | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Pembinaan usaha peternakan rakyat | 180 | 200 | 200 | 200 | 225 | 235 | 185 | 200 | 200 | 200 | 70 | 235,00 | 70,00 | 29,79 | Perlu Upaya Keras |
| **27** | **URUSAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 1) | Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPIPIRT dan halal | 0,318 | 0,364 | 0,407 | 0,458 | 0,521 | 0,584 | 0,634 | 0,407 | 0,458 | 0,38 | 0,19 | 0,58 | 0,19 | 32,53 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | | | Persentase cakupan pelayanan UTTP | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 15 | 2,95 | 3 | 3,1 | 3,2 | 14 | 15,00 | 14,00 | 93,33 | Akan Tercapai |
| | 3 | | | Inflasi tahunan | 3 | 3,5% (+1) | 3,5% (+1) | 3,5% (+1) | 3,5% (+1) | 3,5% (+1) | 2,00 | 3 | 2,39 | 2,6 | 1,46 | 3,5% (+1) | 1,46 | - | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | | | Persentase konsumen yang terlindungi | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 5 | 2) | Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi | 30,61 | 2,041 | 8,163 | 4,062 | 4,062 | 4.082 | 2,041 | 8,163 | 4,00 | 3,92 | 0 | 4082,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | 3) | Pembinaan pedagang kakilima dan asongan | Persentase PKL dan asongan yang terdaftar | 66,67 | 72,22 | 77,78 | 61,95 | 65,65 | 69,56 | 72,22 | 77,78 | 61,95 | 48,4 | 36,26 | 69,56 | 36,26 | 52,13 | Perlu Upaya Keras |
| **28** | **URUSAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan industri kecil dan menengah | Jumlah industri menengah dan besar | 0 | 132 | 135 | 0 | 0 | 0 | 132 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | | | Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI | 0 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | | | Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI | 0 | - | - | 6,2 | 6,6 | 7 | 0 | 0 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 7,00 | 6,70 | 95,71 | Akan Tercapai |
| | 4 | | | Debitur penerima KUR | 6.650 | - | - | 30.534 | 30.700 | 30.900 | 32.126 | 28.034 | 34.555 | 37.495 | 37.495 | 30900,00 | 37495,00 | 121,34 | Tercapai |
| | 5 | 2) | Peningkatan kemampuan teknologi industri | Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur | 63 | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | | | Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK | 0 | 171 | 231 | 0 | 0 | 0 | 180 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 7 | | | Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur | 0 | - | 0 | 3,60 | 3,80 | 4 | 0 | 0 | 3,6 | 3,85 | 3,85 | 4,00 | 3,85 | 96,25 | Akan Tercapai |
| | 8 | | | Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK | 0 | - | 0 | 11 | 11,5 | 12 | 0 | 0 | 11 | 9,59 | 9,59 | 12,00 | 9,59 | 79,92 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | 3) | Pengembangan sentra-sentra industri potensial | Laju pengembangan sentra industri | 0 | - | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| **29** | **URUSAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Pengembangan wilayah Trasmigrasi | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan | 7 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 19 | 4 | 7 | 14 | 0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Transmigrasi Lokal | Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi | 0 | 0 | 41,33 | 42 | 42,5 | 43 | 0 | 41,33 | 12,67 | 71,4 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | **URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **URUSAN PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Perencanaan pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100,000 | Tercapai |
| | 2 | | | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100,000 | Tercapai |
| | 3 | | | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100,000 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | | | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 90 | 95 | 96,13 | 94,5 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 5 | | | Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 90 | 95 | 98 | 98,8 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 6 | 2) | Perencanaan bidang ekonomi | Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 7 | | | Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100,00 | Tercapai |
| | 8 | | | Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembanguan daerah | 22,73 | 25,97 | 25,97 | 26,62 | 27,27 | 27,92 | 25,97 | 25,97 | 12,67 | 11 | 15 | 27,92 | 15,00 | 53,72 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | 3) | Perencanaan bidang sosial budaya | Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya | 79 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 10 | | | Persentase ketersedian data dasar dan informasi perencanaan bidang sosial budaya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 11 | 4) | Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100,00 | Tercapai |
| | 12 | | | Kesesuian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ada | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 13 | 5) | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| **31** | **URUSAN KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Kenaikan PAD | 7,14 | 17,61 | 50,3 | 7,24 | 7,34 | 7,44 | 17,61 | 50,30 | 7,61 | -21 | 6,33 | 7,44 | 6,33 | 85,08 | Akan Tercapai |
| | 2 | | | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 3,00 | 150,00 | Tercapai |
| | 3 | | | Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,00 | 6,00 | 120,00 | Tercapai |
| | 4 | | | Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan tepat waktu/tidak tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu | 100,00 | Tercapai |
| | 5 | | | Persentase tanah pemkab yang bersertifikat | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 52,5 | 53,00 | 53,5 | 51,6 | 51,6 | 53,09 | 54,85 | 55,13 | 53,50 | 55,13 | 103,05 | Tercapai |
| | 6 | | | Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 87,62 | 86,75 | 83,33 | 84,00 | 83,33 | 99,20 | Akan Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | | | Persentase tanah pemkab yang bersertifikat | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 52,5 | 53,00 | 53,5 | 51,6 | 51,6 | 53,09 | 54,85 | 55,13 | 53,50 | 55,13 | 103,05 | Tercapai |
| | 8 | | | Meningkatkan Pengelolaan aset daerah | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 9 | | | Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,67 | 0 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 10 | | | Persentase pendapatan pasar terhadap PAD | 1,5 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,71 | 1,12 | 1,54 | 1,63 | 0 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| **32** | **URUSAN KEPEGAWAIAN DIKLAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Prosentase ASN yang mengikuti diklat | 95 | 95 | 95 | 60 | 100 | 100 | 95,43 | 78,52 | 99 | 116 | 11,26 | 100,00 | 11,26 | 11,26 | Perlu Upaya Keras |
| | 2 | 2) | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase layanan sumber daya aparatur | 76 | 13 | 57,14 | 94 | 95 | 95 | 76,74 | 93,96 | 100 | 100 | 11,26 | 95,00 | 11,26 | 11,85 | Perlu Upaya Keras |
| | 3 | | | Prosentase Pembinaan Disiplin ASN | 0 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 78 | 48 | 100 | 56 | 95 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | Akan Tercapai |
| | 4 | | | Prosentase informasi kepegawaian yang akurat | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 98,73 | 94 | 100 | 100 | 98 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | Akan Tercapai |
| | 5 | | | Prosentase Pengembangan Aparatur | 0 | 42,3 | 76 | 80 | 100 | 100 | 66,04 | 76 | 83 | 87 | 77,74 | 100,00 | 77,74 | 77,74 | Perlu Upaya Keras |
| **33** | **URUSAN PENELITIAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Penelitian dan Pengembangan | Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova | 29 | 20 | 22 | 25 | 30 | 30 | 20 | 22 | 21 | 22 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | | | Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 10 | 14 | 19 | 21 | 34 | 19,00 | 34,00 | 178,95 | Tercapai |
| **34** | **URUSAN PENGAWASAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Persentase OPD yang memiliki maturitas level III | | 20 | 20 | 27 | 40 | 60 | 20 | 20 | 28 | 100 | 100 | 60,00 | 100 | 167 | Tercapai |
| | 2 | | | Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan | | 86 | 82 | 77 | 85 | 90 | 86 | 71,7 | 75,98 | 84,36 | 91,81 | 90,00 | 91,81 | 102,01 | Tercapai |
| | 3 | | | Persentase pengaduan masyarakat terselesaikan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71,67 | 100,00 | 100 | 71,67 | Perlu Upaya Keras |
| | 4 | 2) | Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat pengawasan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 5 | | | Persentase aparatur pengawasan yang telah dinilai angka kreditnya | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 6 | 3) | Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Persentase pemeriksaan program tahunan | 42 | 48 | 50 | 100 | 100 | 100 | 48 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| **35** | **URUSAN FUNGSI LAINNYA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1) | Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah | Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | | | Persentase Tersusun dan terintegrasinya program -program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 3 | | | Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 4 | | | Persentase produk Perda terbentuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,31 | 50 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 5 | | | Persentase produk pengawasan DPRD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,86 | 75 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 6 | | | Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,67 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | Perlu Upaya Keras |
| | 7 | 2) | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar | 50 | 53,02 | 90 | 90 | 90 | 92 | 50,11 | 90 | 29,41 | 29,41 | | 92,16 | 0,00 | 0,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 8 | 3) | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan | Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah | 60 | 84,54 | 81,71 | 83 | 85 | 87 | 80,84 | 81,71 | 19,61 | 83,33 | 66,67 | 87,00 | 66,67 | 76,63 | Perlu Upaya Keras |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 4) | Peningkatan pelayanan daerah/wakil kepala daerah | Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 10 | | | Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100,00 | 78,00 | 78,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 11 | | | Persentase Pendampingan Keprotokolan Kepala Daerah | 100 | 0 | 94 | 100 | 100 | 100 | 0 | 95 | 95 | 98 | 98 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | Akan Tercapai |
| | 12 | 5) | Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah | Persentase peningkatan kerjasama daerah | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 69 | 29,7 | 10 | 15,00 | 10,00 | 66,67 | Perlu Upaya Keras |
| | 13 | 6) | Pengembangan Wilayah Perbatasan | Kejelasan batas antar kabupaten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 25 | 50,00 | 25,00 | 50,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 14 | | | Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 22 | 50,00 | 22,00 | 44,00 | Perlu Upaya Keras |
| | 15 | 7) | Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan | Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik | 0 | 0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | 70 | 76 | 89,7 | 89,7 | 100,00 | 89,70 | 89,70 | Akan Tercapai |
| | 16 | 8) | Penataan peraturan perundang-undangan | Persentase raperda yang terselesaikan | 15 | 90 | 100 | 28 | 12 | 20 | 23 | 23 | 100 | 92,31 | 83,33 | 20,00 | 83,33 | 416,67 | Tercapai |
| | 17 | | | Persentase produk hukum yang terdigitalisasi | 100 | 90 | 100 | 113 | 77 | 90 | 113 | 108 | 100 | 64,94 | 85,25 | 90,00 | 85,25 | 94,72 | Akan Tercapai |
| | 18 | 9) | Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM | Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM | 2 | 100 | 100 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 90 | 4,00 | 90,00 | 2.250,00 | Tercapai |

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | | | | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | CAPAIAN KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD | | | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 19 | 10) | Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 20 | | | Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi waktu pelaksanaan) dengan kondisi capain lapangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39,95 | 100,00 | 39,95 | 39,95 | Perlu Upaya Keras |
| | 21 | | | Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 22 | 11) | Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa | Persentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang dan jasa | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 23 | | | Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| | 24 | 12) | Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat | Persentase aduan masyarakat yang tertangani | 12 | 0 | 60 | 70 | 72 | 74 | 0 | 60 | 73 | 92 | 100 | 74,00 | 100,00 | 135,14 | Tercapai |

*Sumber: LKJIP Kabupaten Klaten*

# BAB III
# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

### 3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat Pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah *(lower middle income countries),* setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas *(upper middle income countries)* pada tahun 2019.

Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah. Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRT, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru Virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 3,7 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing

perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke *Green Recovery*.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan resiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus modal keluar *(capital outflow)* dari emerging markets, termasuk salah satunya Indonesia.

### 3.1.2. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami perbaikan pada tahun 2020. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2020 tumbuh -3,34% (yoy), lebih baik dari pencapaian triwulan III 2020 sebesar -3,79% (yoy). Meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,19% (yoy) dan kawasan Jawa (-2,60%; yoy). Sementara itu, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah tumbuh -1,89% (qtq), tumbuh lebih rendah dibandingkan 4,79% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Kondisi perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong peningkatan aktivitas investasi dan ekspor luar negeri. Perbaikan kinerja investasi didorong pembangunan infrastruktur pemerintah. Sementara peningkatan permintaan mendorong perbaikan ekspor luar negeri non migas Jawa Tengah terutama komoditas kayu dan barang dari kayu. Meski Pandemi Covid-19 masih melanda global, permintaan produk furniture dari Jawa Tengah justru mengalami peningkatan. Selain dari pembeli yang lama, berbagai pelaku usaha mencatat adanya penambahan pembeli baru dari berbagai negara dari kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga Australia.

Berdasarkan lapangan usaha utama, perbaikan perekonomian pada tahun 2020 terjadi pada Pertanian, Industri, Konstruksi dan Perdagangan. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian meningkat cukup pesat yaitu sebesar 7,56% (yoy). Peningkatan sektor primer tersebut disebabkan adanya peningkatan luas panen pada tanaman pangan. Namun, pertumbuhan sub sektor peternakan masih belum membaik disebabkan permintaan hewan ternak yang masih rendah di tengah masih minimnya kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sektor industri pengolahan, meskipun masih mengalami kontraksi, juga tercatat membaik seiring menguatnya permintaan luar negeri terhadap komoditas garmen, kayu olahan, dan alas kaki. Perbaikan perekonomian juga didorong oleh sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa kesehatan yang mengalami peningkatan permintaan pada masa Pandemi Covid-19.

Dengan perkembangan hingga tahun 2020, perekonomian Jawa Tengah pada 2020 tumbuh -2,65% (yoy), atau lebih rendah dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,40% (yoy). Sebagaimana perkiraan sebelumnya, wabah Covid-19 telah membuat seluruh elemen perekonomian mengalami pelemahan. Dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar pelemahan tersebut bersumber dari investasi dan konsumsi rumah tangga. Momen peningkatan investasi yang telah direncanakan di 2020 terhalang oleh Pandemi Covid-19. Berbagai program strategis pemerintah yang dicanangkan di Jawa Tengah terpaksa ditunda dalam beberapa waktu. Investor pun menahan menanam modal ke Jawa Tengah tercermin dari penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh -70,88% (yoy) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh -33,12% (yoy) selama 2020. Relokasi pabrik tekstil dari wilayah lain ke Jawa Tengah yang direncanakan pada akhir triwulan II tahun 2020 tertunda hingga periode yang belum dapat ditentukan.

Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan tekanan inflasi dibandingkan tahun 2019. Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada 2020 tercatat sebesar 1,55% (yoy), melanjutkan tren penurunan yang telah berlangsung sejak triwulan I tahun 2020 (3,25%; yoy). Penurunan tekanan inflasi Jawa Tengah pada tahun 2020 mencerminkan penurunan permintaan konsumsi masyarakat, sejalan dengan kelesuan kinerja perekonomian pada masa pandemi.

Hal ini terutama berlangsung pada komoditas-komoditas pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Selanjutnya, Pemerintah juga berusaha menjaga ketahanan daya beli masyarakat melalui beberapa kebijakan tarif, khususnya tarif komoditas energi.

Secara umum perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik disertai masuknya hari besar keagamaan nasional. Sementara itu, peningkatan investasi sejalan prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Konsumsi diperkirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan ekspektasi masyarakat. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme tersedianya vaksin pada tahun 2021. Pemulihan investasi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut pada 2021. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Perbaikan kinerja ekspor mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Lapangan usaha terdampak Covid-19 diperkirakan membaik di tahun 2021.

Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama pemulihan ekonomi. Relokasi pabrik ke Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah. Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di tahun 2021. Meningkatnya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Sektor transportasi akan meningkat di 2021 seiiring pulihnya sektor pariwisata, konsumsi domestik, dan perjalanan bisnis.

Inflasi tahunan Jawa Tengah tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.

### 3.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Klaten

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 masing-masing sebesar 6,29% pada tahun 2016; 5,34% pada tahun 2017; 5,47% pada tahun 2018; 5,50% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (1,18 %) berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik tanggal 2 Juni 2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 6,29%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2020 lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu mengalami kontraksi sebesar (1,18%). Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga sama di tahun 2020 menunjukkan kontraksi. Akibat dampak Pandemi Covid-19, perekonomian di Kabupaten Klaten tahun 2020

mengalami kontraksi cukup dalam. Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi perekonomian Kabupaten Klaten untuk pertama kalinya di tahun 2020, yang mengalami kontraksi sebesar (1,18%).

Dari sisi pengeluaran, selama periode 2016-2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 75 %). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 32-39% produk Kabupaten Klaten diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar kabupaten maupun ke luar Indonesia. Demikian halnya dengan impor mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 38-46% permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 20-23%, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 6-8%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2016-2020 perdagangan di Kabupaten Klaten yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan di Kabupaten Klaten selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2±1%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Klaten lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 2,31% turun di tahun 2020 menjadi sebesar 1,38%.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 28,72%, jasa perusahaan sebesar 7,04%, jasa lainnya sebesar 5,56%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,03%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,79%.

Beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan ekonomi positif, diantaranya; informasi dan komunikasi sebesar 17,84%; jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,34%; pengadaan listrik dan gas sebesar 4,51%; jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,53%; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 2,99%; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,12%.

## 3.2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan RPJMD menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu dianalisis terhadap perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan daerah. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran daerah pada tahun 2016-2020, diperlukan suatu deskripsi ringkas mengenai pelaksanaan APBD secara agregatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal atau keuangan daerah Kabupaten Klaten. Deskripsi kinerja pelaksanaan APBD di antaranya adalah pendapatan daerah yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; serta Pembiayaan Daerah yang meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2016 hingga tahun 2019 secara umum menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar 8,64% dan belanja sebesar 9,79%. Dari sisi surplus/defisit dan pembiayaan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan surplus sebesar 433,34% dan pembiayaan netto sebesar 8,51%. Defisit yang terjadi pada tahun 2016 dan 2018, sebagian besar dibiayai oleh SiLPA tahun sebelumnya, sehingga resiko fiskal yang timbul dari defisit tersebut tidak signifikan. Proporsi SiLPA terhadap total Penerimaan Pembiayaan tahun 2016-2020, rata-rata sebesar 97,62%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

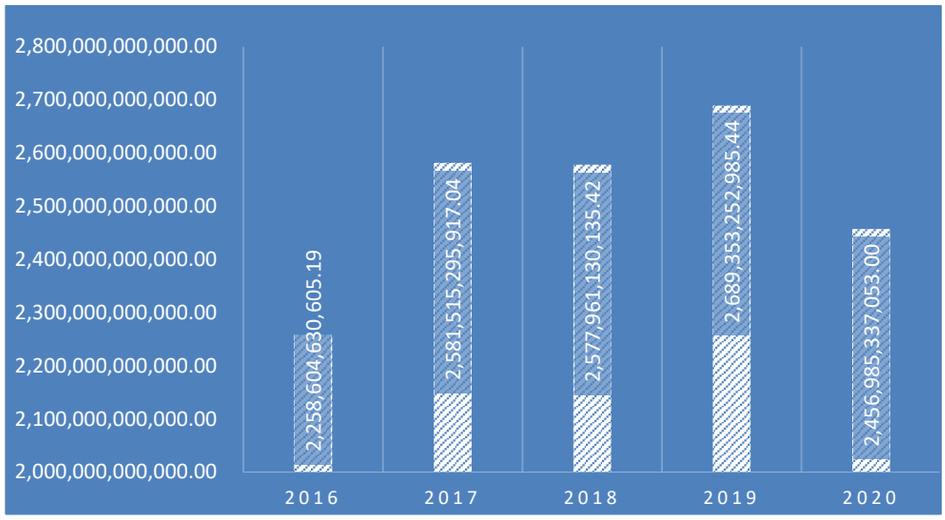



*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.1.**
**Perkembangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

### 3.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

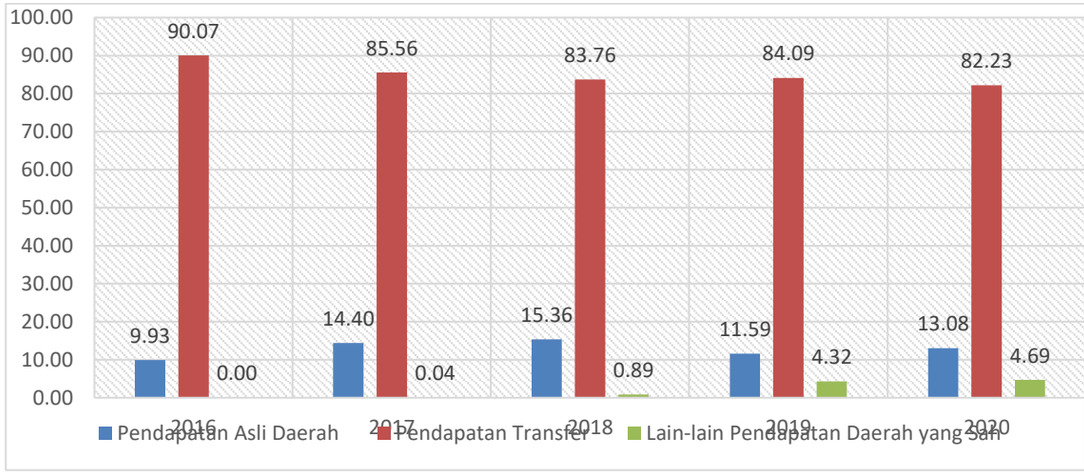
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber Pendapatan daerah Kabupaten Klaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2019 cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan 8,64%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.2.**
**Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

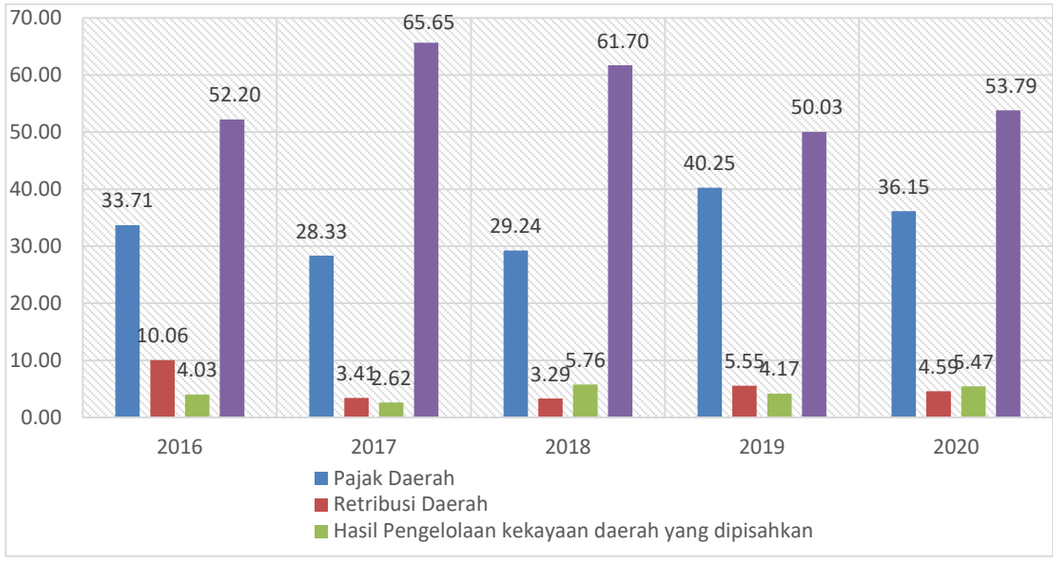
Proporsi Pendapatan Transfer masih mendominasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 yaitu sebesar di atas 70% atau dari total Pendapatan Daerah tiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dalam mendanai belanja daerahnya. Dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah masih rendah, terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 9,93% hingga 15,36%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.3.**
**Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

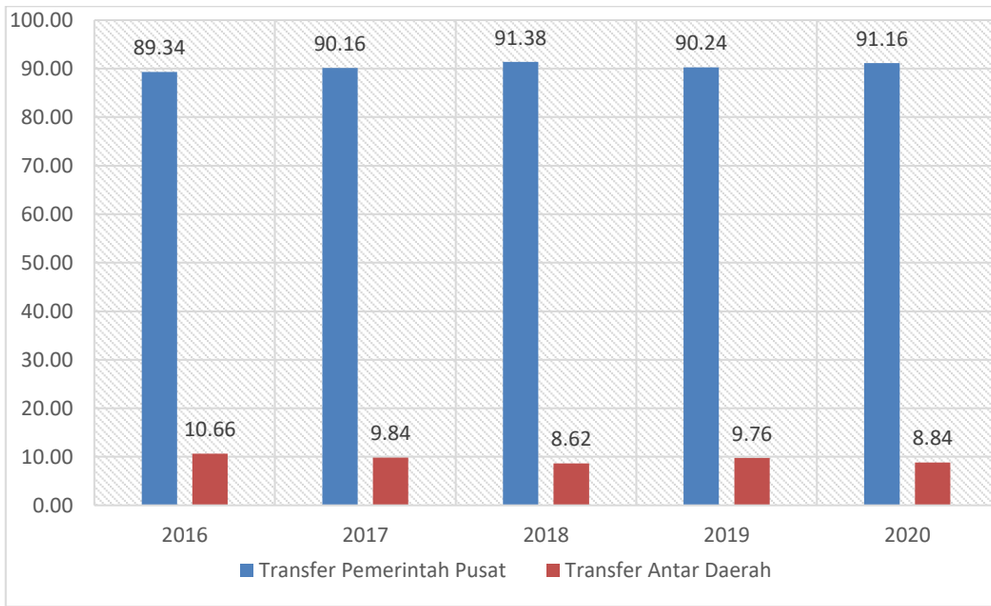
Pendapatan Daerah Rretribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.4.**
**Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi tertinggi dari total pendapatan transfer Kabupaten Klaten tahun 2016-2020, dengan proporsi terhadap total Pendapatan Transfer di atas 89% per tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.5.**
**Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah paling besar berasal dari Pendapatan Hibah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.6.**
**Grafik Kontribusi Unsur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah sebesar 16,84%. Angka tersebut dipengaruhi dari angka rata-rata pertumbuhan dari semua komponen pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Secara rinci Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.**
**Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020**

| KODE REKENING | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PENDAPATAN DAERAH** | **2.258.604.630.605,19** | **2.581.515.295.917,04** | **2.577.961.130.135,42** | **2.689.353.252.985,44** | **2.578.135.836.354,00** |
| 1.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **224.197.408.481,19** | **371.718.439.306,04** | **395.884.244.135,42** | **311.648.401.655,44** | **329.963.261.898,00** |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 75.574.747.729,00 | 105.290.677.595,00 | 115.771.908.527,00 | 125.444.617.676,00 | 116.132.536.269,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 22.559.038.217,00 | 12.668.781.932,00 | 13.030.982.654,00 | 17.296.912.453,00 | 14.760.621.483,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.025.861.668,00 | 9.742.870.570,00 | 22.811.147.630,00 | 12.988.398.308,00 | 17.577.664.499,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 117.037.760.867,19 | 244.016.109.209,04 | 244.270.205.324,42 | 155.918.473.218,44 | 181.492.439.647,00 |
| 1.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.034.407.222.124,00** | **2.208.854.116.720,00** | **2.159.179.984.888,00** | **2.261.406.993.817,00** | **2.133.001.834.456,00** |
| 1.2.1 | **Transfer Pemerintah Pusat** | 1.817.481.533.481,00 | 1.991.449.941.319,00 | 1.973.068.360.661,00 | 2.040.734.631.378,00 | 1.954.407.857.576,00 |
| 1.2.1.1 | Dana Perimbangan | 1.573.615.108.481,00 | 1.624.715.625.119,00 | 1.652.127.767.661,00 | 1.666.073.637.378,00 | 1.516.494.102.076,00 |
| 1.2.1.2 | Dana Insentif Daerah | 0,00 | 55.646.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.067.155.000,00 |
| 1.2.1.5 | Dana Desa | 243.866.425.000,00 | 311.087.446.200,00 | 320.940.593.000,00 | 374.660.994.000,00 | 380.846.600.500,00 |
| 1.2.2 | **Transfer Antar-Daerah** | 216.925.688.643,00 | 217.404.175.401,00 | 186.111.624.227,00 | 220.672.362.439,00 | 178.593.976.880,00 |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 143.325.208.643,00 | 171.067.103.920,00 | 175.902.080.227,00 | 188.228.865.439,00 | 163.789.663.880,00 |
| 1.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 73.600.480.000,00 | 46.337.071.481,00 | 10.209.544.000,00 | 32.443.497.000,00 | 14.804.313.000,00 |
| 1.3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0,00** | **942.739.891,00** | **22.896.901.112,00** | **116.297.857.513,00** | **115.170.740.000,00** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 942.739.891,00 | 22.157.277.976,00 | 116.297.857.513,00 | 115.170.740.000,00 |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perudang-undangan | 0,00 | 0.00 | 739.623.136,00 | 0,00 | 0,00 |

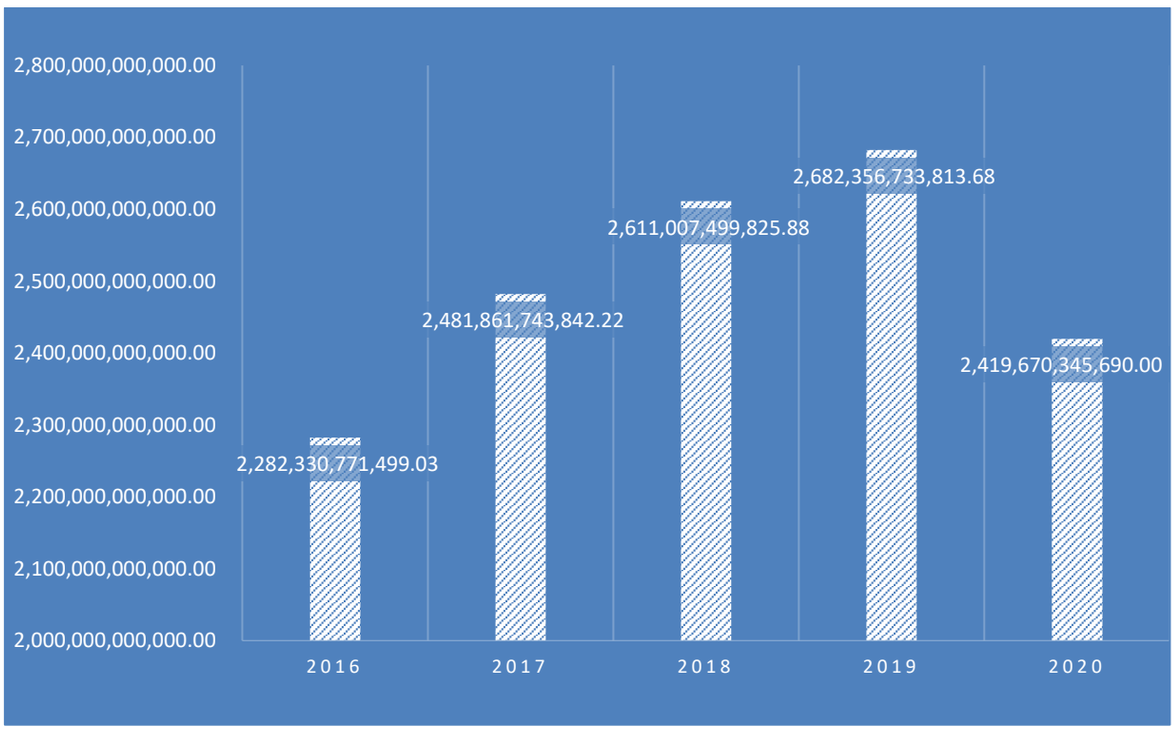
*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

### 3.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2020 menurun sebesar 9,79% dibandingkan pendapatan daerah tahun 2019. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

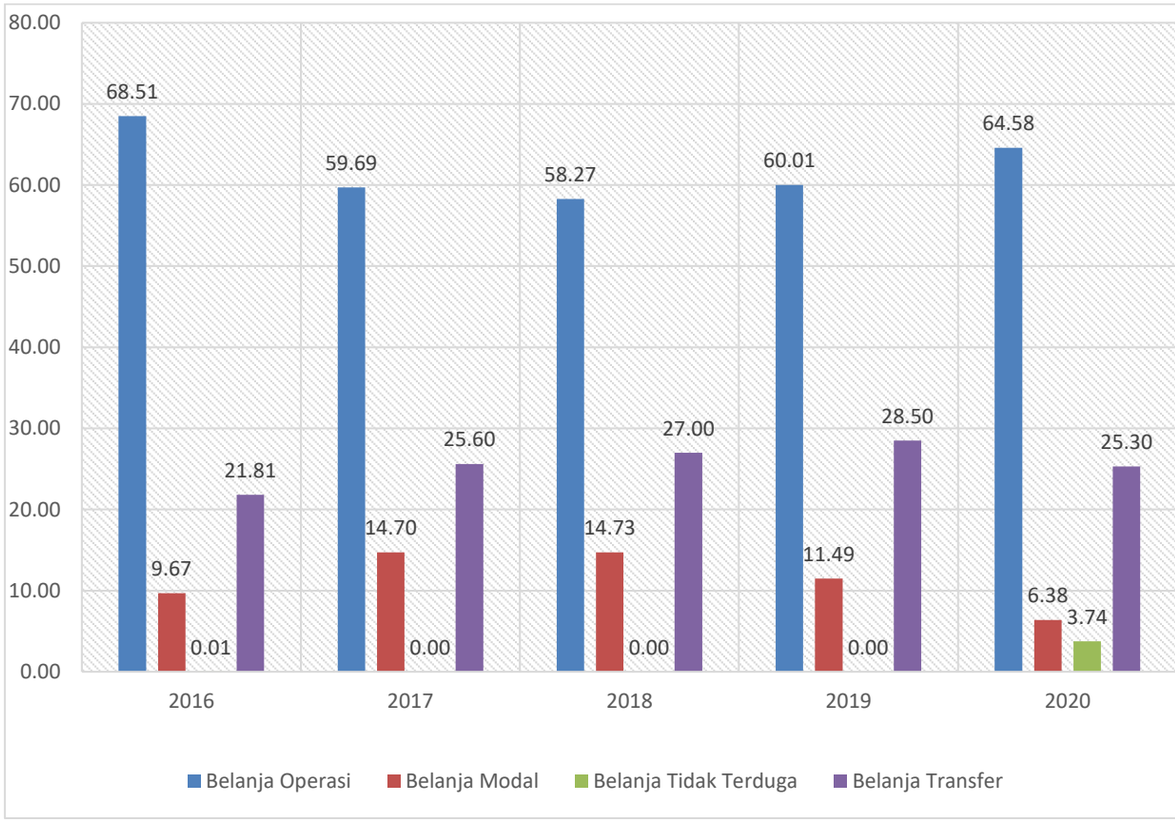



*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.7.**
**Grafik Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

Proporsi Belanja Operasi mendominasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 antara 58-68% dari total Belanja Daerah tiap tahunnya, diikuti Belanja Transfer dan Belanja Modal. Unsur Belanja Tak Terduga hanya ada pada tahun 2016 sebesar 0,01% dan tahun 2020 sebesar 3,74% dari total Belanja Daerah tahun berkenaan. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 besar karena adanya

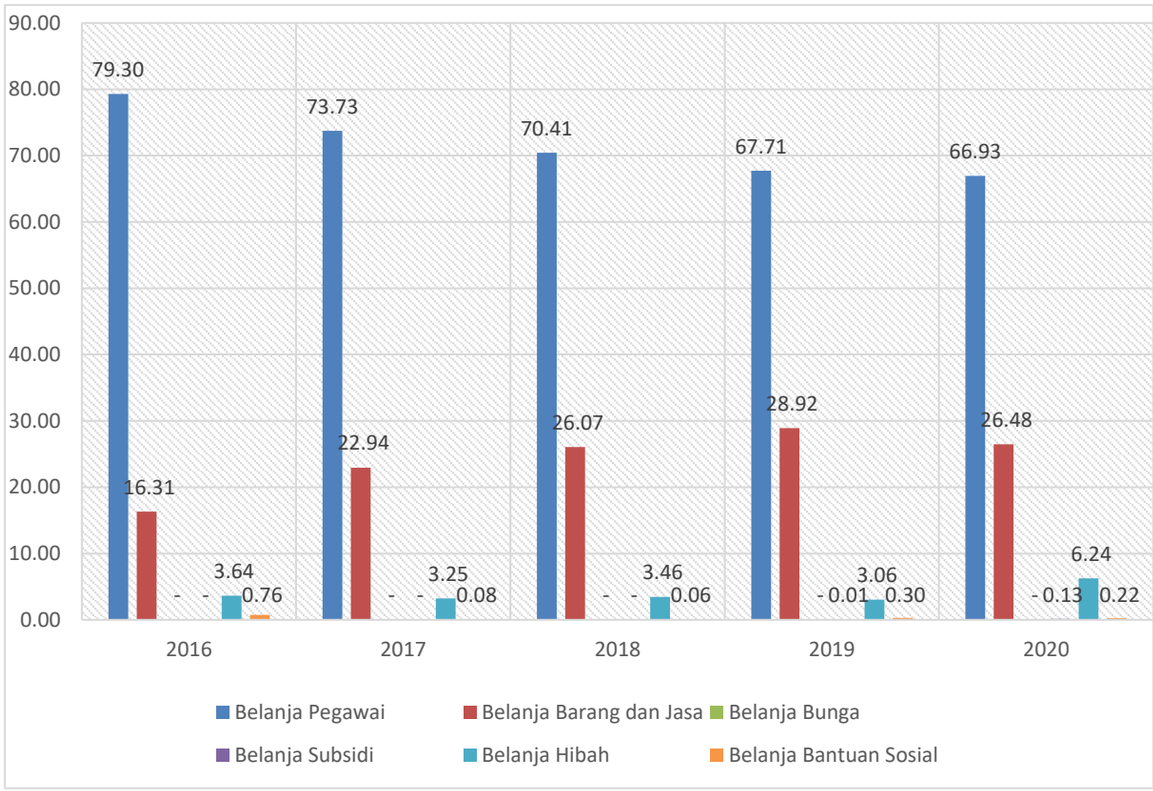
kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.8.**
**Grafik Proporsi Unsur Belanja Daerah Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

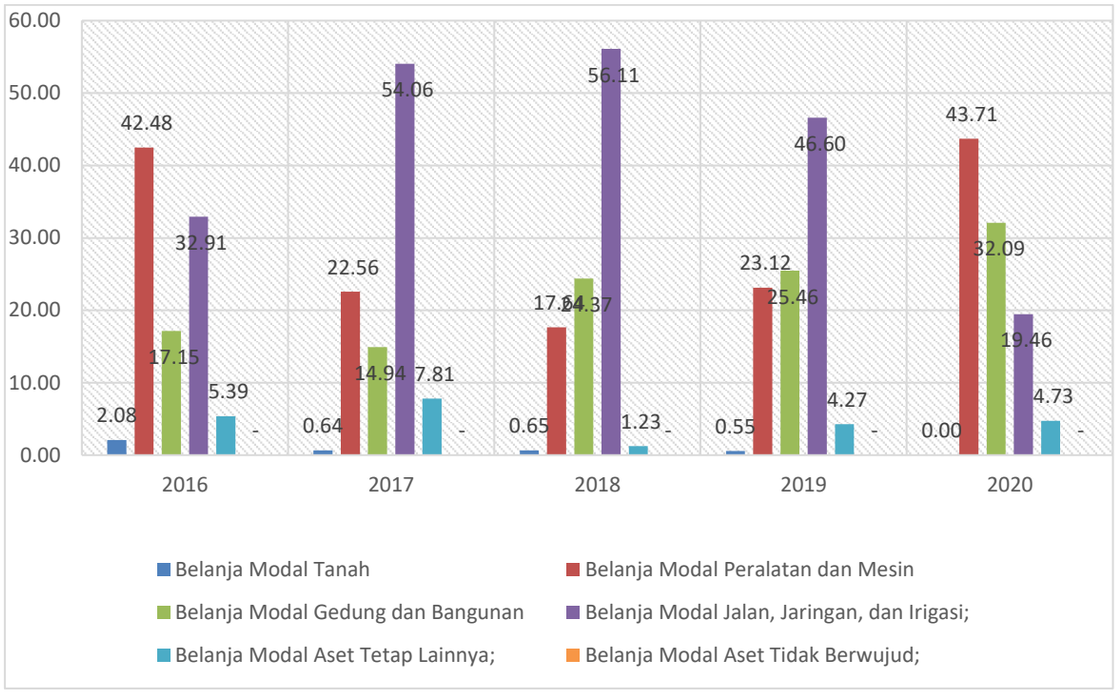
Proporsi Belanja Pegawai mendominasi Belanja Operasi Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 pada kisaran antara 66% hingga 79% dari total Belanja Operasi tiap tahunnya, diikuti Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Operasi mengalami penurunan dari 79,30% menjadi sebesar 66,93%. Sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa terhadap total Belanja Operasi mengalami kenaikan dari 16,31% menjadi sebesar 26,48%. Dibandingkan tahun 2019, proporsi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Operasi mengalami penurunan, sedangkan proporsi Belanja Hibah terhadap total Belanja Operasi mengalami kenaikan dari 3,06% menjadi sebesar 6,24%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.9.**
**Grafik Proporsi Unsur Belanja Operasi Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

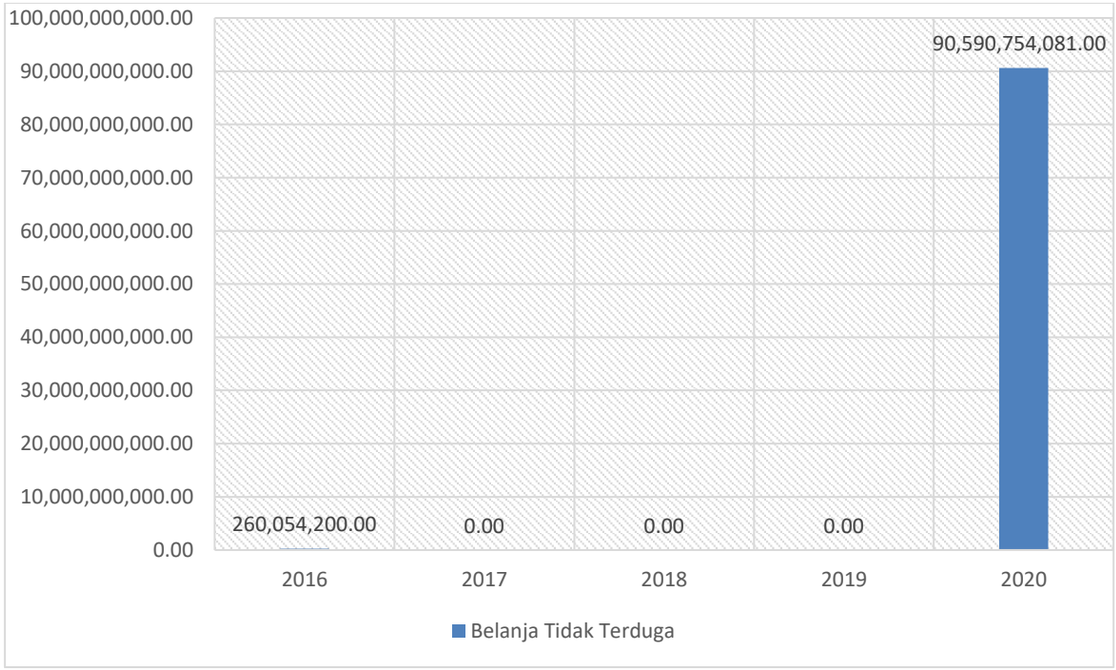
Proporsi unsur Belanja Modal terhadap total belanja modal, secara umum didominasi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal gedung dan bangunan. Unsur belanja modal dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2020, proporsi belanja modal peralatan dan mesin, proporsi belanja gedung dan bangunan, dan proporsi belanja modal aset tetap lainnya mengalami kenaikan terhadap total belanja modal, sedangkan proporsi belanja modal tanah dan proporsi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami penurunan terhadap total belanja modal. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.10.**
**Grafik Proporsi Unsur Belanja Modal Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

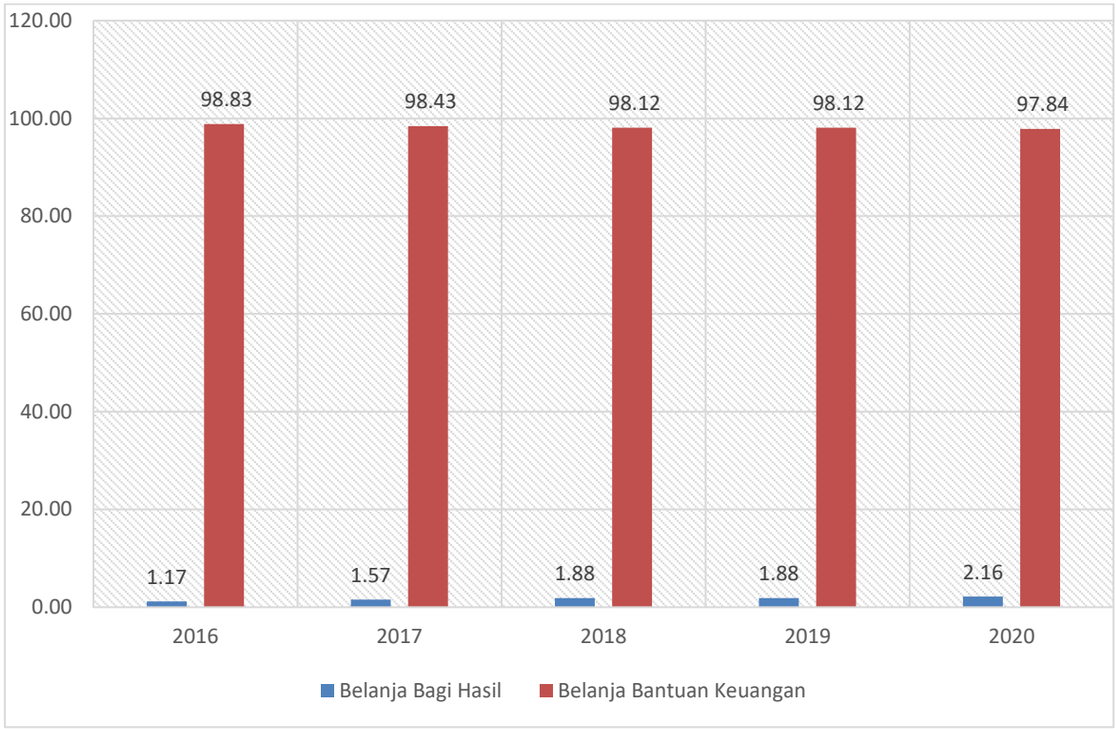
Belanja tidak terduga pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2016, sedangkan belanja tidak terduga pada tahun 2017 hingga tahun 2019 tidak ada. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.11.**
**Grafik Unsur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

Belanja bantuan keuangan mendominasi belanja transfer dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 seperti terlihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.12.**
**Grafik Proporsi Unsur Belanja Transfer Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

Secara rinci realisasi belanja daerah beserta rata-rata proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.**
**Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020*) (Rp) | Rata-rata Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Belanja Daerah** | **2.282.330.771.499,03** | **2.481.861.743.842,22** | **2.611.007.499.825,88** | **2.682.356.733.813,68** | **2.419.670.345.690,00** | **100,00** |
| **2.1.** | **Belanja Operasi** | **1.563.576.411.511,03** | **1.481.520.782.617** | **1.521.442.608.529,88** | **1.609.749.628.450,68** | **1.562.521.349.604,00** | **62,21** |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 1.239.843.399.717,00 | 1.092.314.834.122,40 | 1.071.242.466.613,00 | 1.089.951.573.950,00 | 1.045.730.394.418,00 | 71,61 |
| 2.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 255.081.046.746,03 | 339.931.253.564,82 | 396.683.616.799,88 | 465.549.491.950,68 | 413.743.112.529 | 24,15 |
| 2.1.3. | Belanja Bunga | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Belanja Subsidi | - | - | - | 122.478.000,00 | 1.988.515.348,00 | 0,03 |
| 2.1.5. | Belanja Hibah | 56.841.540.048,00 | 48.124.969.930,00 | 52.609.000.117,00 | 49.234.334.550,00 | 97.547.602.309,00 | 3,93 |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Sosial | 11.810.425.000,00 | 1.149.725.000,00 | 907.525.000,00 | 4.891.750.000,00 | 3.511.725.000,00 | 0,28 |
| | | | | | | | |
| **2.2.** | **Belanja Modal** | **220.759.237.283,00** | **364.937.481.638** | **384.574.980.960** | **308.145.403.976** | **154.300.411.712,00** | **11,39** |
| 2.2.1. | Belanja Modal Tanah | 4.601.391.750,00 | 2.327.070.670,00 | 2.513.931.353,00 | 1.708.996.625,00 | - | 0,79 |
| 2.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 93.767.955.597,00 | 82.340.073.312,00 | 67.824.005.481,00 | 71.235.825.711,00 | 67.444.068.728,00 | 29,90 |
| 2.2.3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 37.855.211.146,00 | 54.509.322.159,00 | 93.727.349.976,00 | 78.462.410.768,00 | 49.518.428.837,00 | 22,80 |
| 2.2.4. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; | 72.641.123.070,00 | 197.273.695.766,00 | 215.775.344.210,00 | 143.580.718.481,00 | 30.032.863.863,00 | 41,83 |
| 2.2.5. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; | 11.893.555.720,00 | 28.487.319.731,00 | 4.734.349.940,00 | 13.157.452.391,00 | 7.305.050.284,00 | 4,69 |
| 2.2.6. | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; | | - | | - | - | - |
| | | | | | | | |
| **2.3.** | **Belanja Tidak Terduga** | **260.054.200,00** | **-** | **-** | **-** | **90.590.754.081,00** | **0,75** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 260.054.200,00 | - | - | - | 90.590.754.081,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| **2.4.** | **Belanja Transfer** | **497.735.068.505,00** | **635.403.479.587** | **704.989.910.336,00** | **764.461.701.387,00** | **612.257.830.293,00** | **25,64** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 5.826.321.071,00 | 9.970.076.237 | 13.263.553.836,00 | 14.346.947.667,00 | 13.255.263.593,00 | 1,73 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 491.908.747.434,00 | 625.433.403.350 | 691.726.356.500,00 | 750.114.753.720,00 | 599.002.566.700,00 | 98,27 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2021, diolah*
*Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

### 3.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan Netto Kabupaten Klaten tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif. Pembiayaan Netto tahun 2020 mencapai sebesar Rp.407.728.125.477,28 dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.408.728.125.477,28 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.**
**Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020*) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** | **406.262.095.580,00** | **374.231.954.686,16** | **455.690.054.002,98** | **395.265.877.623,52** | **408.728.125.477,28** |
| 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 406.198.863.893,00 | 374.231.954.686,16 | 455.690.054.002,98 | 395.265.877.623,52 | 382.728.125.477,28 |
| 3.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | 26.000.000.000,00 |
| 3.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 63.231.687,00 | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| 3.1.5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| 3.1.6. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| **3.2.** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **8.304.000.000,00** | **18.200.000.000,00** | **27.249.000.000,00** | **19.500.000.000,00** | **1.000.000.000,00** |
| 3.2.1. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Penyertaan Modal Daerah | 5.304.000.000,00 | 13.200.000.000,00 | 19.249.000.000,00 | 9.500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 3.2.3. | Pembentukan Dana Cadangan | 3.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - |
| 3.2.4. | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | **Pembiayaan Netto** | **397.958.095.580,00** | **356.031.954.686,16** | **428.441.054.002,98** | **375.765.877.623,52** | **407.728.125.477,28** |
| | | | | | | |
| | **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan** | **374.231.954.686,16** | **455.685.506.760,98** | **395.394.684.312,52** | **382.762.396.795,28** | **445.043.116.840,28** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*
*Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

### 3.2.4. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca Daerah merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca daerah dapat memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan daerah. Neraca daerah dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif dan dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik *(good governance).* Kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2017-2020 yang telah diaudit dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4.**
**Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

| URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata2 Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | |
| **ASET LANCAR** | **554.188.344.902,01** | **535.978.337.508,06** | **530.020.197.774,62** | **667.032.607.795,67** | **7,15** |
| Kas | 455.698.293.160,98 | 396.452.845.568,30 | 383.026.986.445,28 | 449.078.121.320,28 | **0,29** |
| Piutang | 63.965.210.823,86 | 82.718.770.070,20 | 90.772.786.631,35 | 96.886.207.751,46 | **15,26** |
| Piutang Lain-lain | 3.782.438.614,00 | 3.645.388.614,00 | 3.645.388.614,00 | 3.580.925.026,00 | **-1,80** |
| Penyisihan Piutang | - 42.978.700.332,28 | -38.806.420.714,40 | -43.932.404.079,30 | -48.882.627.822,90 | **4,92** |
| Beban Dibayar Dimuka | 590.700.392,38 | 338.831.168,40 | 282.868.105,00 | 321.505.058,17 | **-15,17** |
| Persediaan | 73.130.402.243,07 | 91.628.922.801,56 | 96.224.572.058,29 | 166.048.476.462,66 | **34,29** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **133.715.351.862,86** | **160.632.633.734,00** | **177.259.457.618,00** | **178.945.272.695,00** | **10,48** |
| **ASET TETAP** | **2.958.585.555.502,37** | **3.247.115.789.661,39** | **3.288.202.270.228,38** | **2.556.910.271.392,16** | **-3,74** |
| Tanah | 1.281.651.012.843,00 | 1.287.177.420.488,00 | 1.298.731.595.034,00 | 832.215.833.323,00 | **-11,53** |
| Peralatan dan Mesin | 716.935.744.066,98 | 752.440.542.842,99 | 694.227.255.074,98 | 781.817.876.877,00 | **3,28** |
| Gedung dan Bangunan | 701.477.235.200,18 | 837.035.387.730,18 | 959.821.457.641,18 | 955.733.620.648,00 | **11,19** |
| Jalan, Jaringan dan Instalasi | 1.019.259.420.540,00 | 1.233.401.897.099,00 | 1.371.375.922.895,00 | 1.563.883.565.527,06 | **15,41** |
| Aset Tetap Lainnya | 339.502.207.078,21 | 371.547.796.694,22 | 266.094.477.791,22 | 268.305.695.189,98 | **-6,04** |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 100.702.381.485,00 | 83.388.457.979,00 | 31.192.682.048,00 | 57.293.192.856,00 | **1,30** |
| Akumulasi Penyusutan | -1.200.942.445.711,00 | -1.317.875.713.172,00 | -1,333,241,120,256,00 | -1.902.339.513.028,89 | **17,86** |
| **DANA CADANGAN** | **8.422.000.455,00** | **17.296.766.858,00** | **29.234.792.846,00** | **0,00** | **24,80** |
| **ASET LAINNYA** | **71.821.862.345,00** | **40.300.602.657,00** | **132.682.270.442,00** | **163.889.719.155,51** | **69,62** |
| **JUMLAH ASET** | **3.726.733.115.067,25** | **4.001.324.130.418,45** | **4.157.398.988.909,00** | **3.566.777.871.038,34** | **-0,98** |
| **KEWAJIBAN** | | | | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **12.014.878.813,00** | **14.184.935.215,78** | **14.356.397.757,00** | **20.876.092.289,00** | **21,56** |

| URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata2 Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 12.786.400,00 | 1.058.161.255,78 | 117.985.335,00 | 29.775.000,00 | **2.670,69** |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 765.686.875,00 | 1.601.231.506,00 | 1.533.052.459,00 | 1.036.228.404,00 | **24,15** |
| Utang Beban | 4.896.212.678,00 | 5.285.668.839,00 | 6.227.103.632,00 | 13.502.079.212,00 | **47,53** |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 6.340.192.860,00 | 6.239.873.615,00 | 6.478.256.331,00 | 6.308.009.673,00 | **-0,13** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **12.014.878.813,00** | **14.184.935.215,78** | **14.356.397.757,00** | **20.876.092.289,00** | **21,56** |
| **EKUITAS** | **3.714.718.236.254,25** | **3.987.139.195.202,67** | **4.143.042.591.152,00** | **3.545.901.778.749,34** | **-1,06** |
| EKUITAS | 3.714.718.236.254,25 | 3.987.139.195.202,67 | 4.143.042.591.152,00 | 3.545.901.778.749,34 | **-1,06** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **3.726.733.115.067,25** | **4.001.324.130.418,45** | **4.157.398.988.909,00** | **3.566.777.871.038,34** | **-0,98** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021*

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 tersaji pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5.**
**Analisis Rasio Keuangan**
**Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020**

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio lancar *(current ratio)* | 46,13 | 37,79 | 36,92 | 31,95 |
| 2. | Rasio quick *(quick ratio)* | 43,57 | 34,04 | 33,26 | 26,32 |
| 3. | Rasio total hutang terhadap total aset | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,006 |
| 4. | Rasio hutang terhadap modal | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,006 |

Berdasarkan Tabel 3.5, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar
   Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel 3.5 di atas, rasio lancar pada dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 cukup besar yaitu berkisar antara 31 sampai dengan 46. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancar Pemerintah Kabupaten Klaten cukup besar.
2. Rasio Quick (*Quick Ratio*)
   Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel 3.5 di atas, Rasio Quick pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cukup besar berkisar antara 26 sampai dengan 43. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar (likuid) cukup baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset
   Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya akan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0.003 sampi dengan 0.006. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal
   Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0.003 sampai dengan 0.006. Hal ini menunjukkan bahwa

nilai total hutang berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Klaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Klaten tidak tergantung pada hutang.

### 3.2.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada kebijakan Pendapatan, Pembelanjaan serta Pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah. Efisiensi serta efektifitas Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

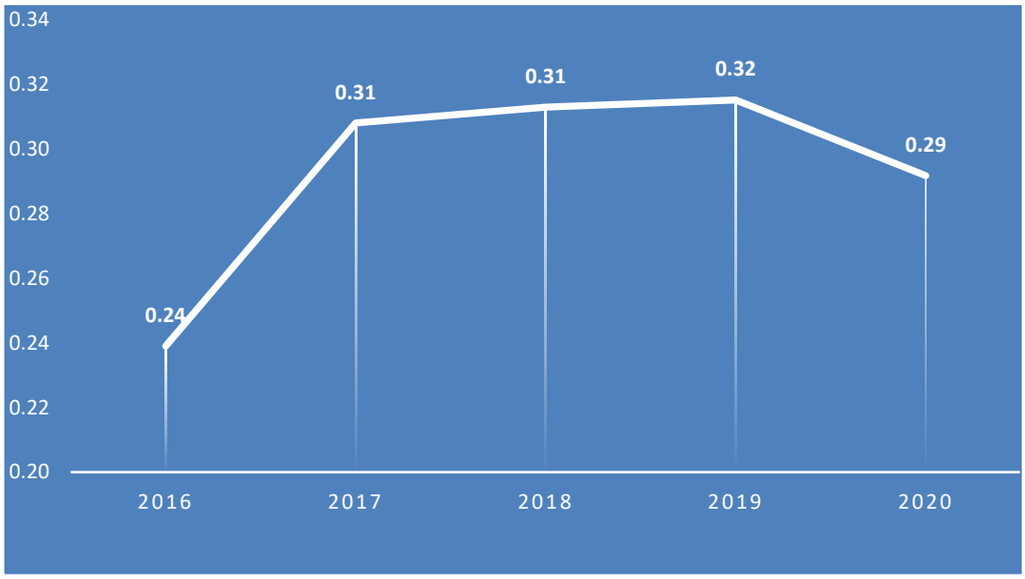
## 3.3. Analisis Pendapatan Daerah

### 3.3.1. Rasio Pajak

Rasio pajak (*tax ratio*) di tingkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. PDRB sangat erat kaitannya dengan potensi pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut.

PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan patokan harga pada setiap tahun. Nilai PDRB ini pada umumnya digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Perhitungan rasio pajak memberikan gambaran hubungan antara penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut dengan PDRB-nya.

Rasio pajak Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, menjadi 0,32 persen, namun tahun 2020 turun menjadi sebesar 0,29 persen. Rata-rata pajak yang bisa dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Klaten selama tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 0,29 persen dari PDRB. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



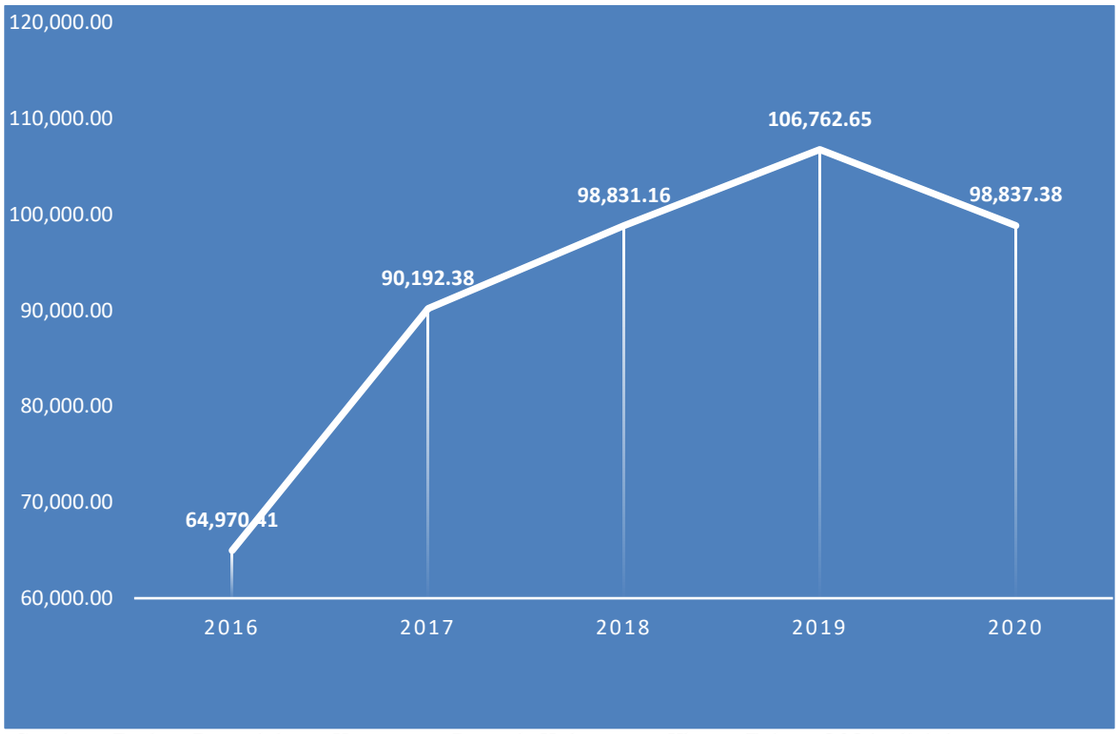

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.13.**
**Grafik Rasio Pajak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

### 3.3.2. Pajak Per Kapita

Pajak per kapita memang belum banyak digunakan dalam menghitung tingkat keberhasilan pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Namun pajak per kapita dapat digunakan sebagai alternatif alat hitung efektifitas pemungutan pajak daerah. Pajak per kapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak per kapita menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pajak daerah.

Pajak per kapita Kabupaten Klaten pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2016 sebesar Rp.64.970,41, dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.98.837,00, meskipun tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.106.762,65. Rata-rata rasio pajak per kapita Kabupaten Klaten tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah Rp.91.918,80, berarti secara rata-rata setiap penduduk yang ada di Kabupaten Klaten memberikan kontribusi lebih dari Rp.90.000,00 per tahun untuk pendapatan daerah melalui pajak daerah, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

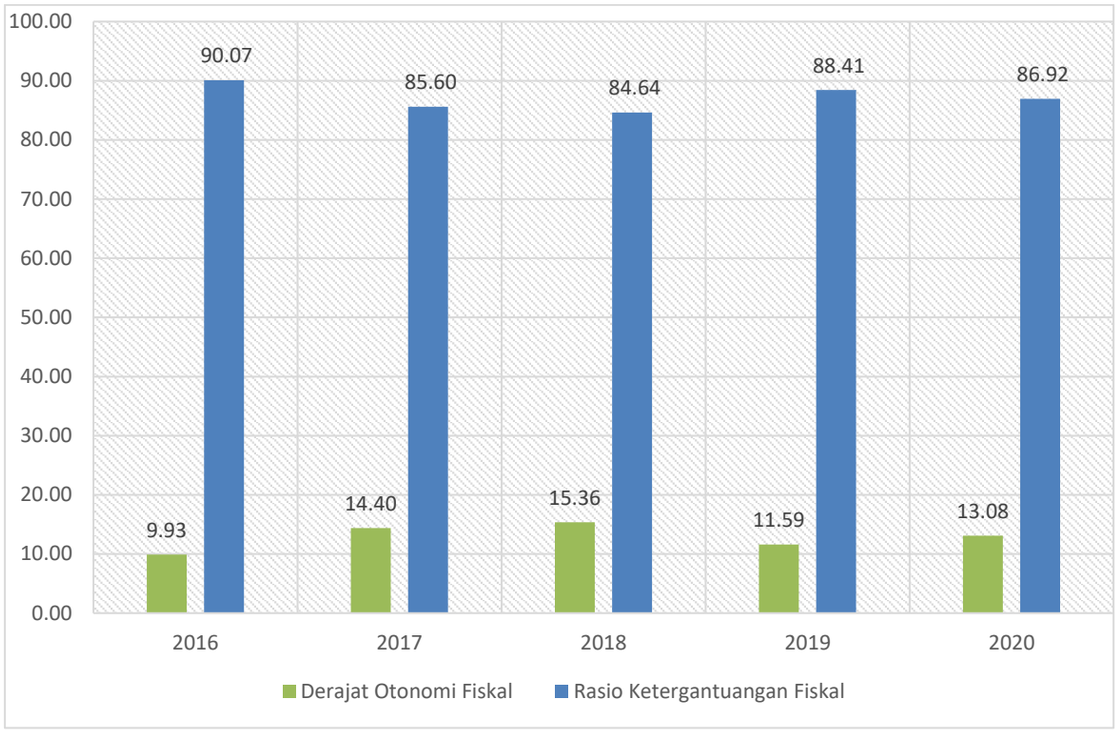
**Gambar 3.14.**
**Grafik Pajak Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

### 3.3.3. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan (derajat desentralisasi fiskal) dan rasio Dana Transfer terhadap total Pendapatan (rasio ketergantungan fiskal).

Derajat desentralisasi fiskal memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio ketergantungan fiskal. Semakin besar angka derajat desentralisasi fiskal maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio ketergantungan fiskal, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi sekaligus rasio ketergantungan fiskal yang rendah.

Potret derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan fiskal Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu setiap tahun derajat desentralisasi fiskal terjadi fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, namun masih lebih rendah dibandingkan rasio ketergantungan fiskal. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Klaten memiliki ketergantungan daerah yang tinggi, disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang bersumber dari PAD, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

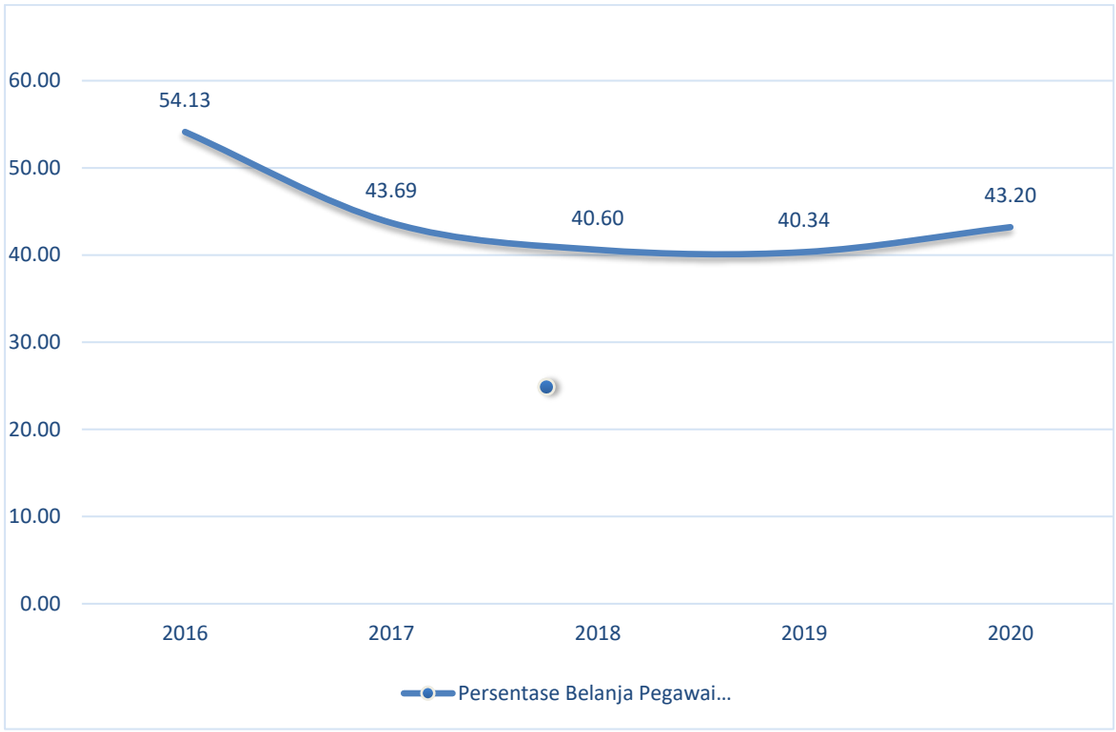
**Gambar 3.15.**
**Grafik Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

### 3.3.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

#### 3.3.4.1. Rasio Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tujuan penghitungan rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Pengeluaran (Belanja ditambahkan Pembiayaan Pengeluaran). Data rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

Perkembangan rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari 54,13% menjadi sebesar 43,20% dari total pengeluaran. Dilihat dari kondisi 2 tahun terakhir, rasio tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 (40,34%). Kinerja rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan rata-rata menurun sebesar 5,29% per tahun, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

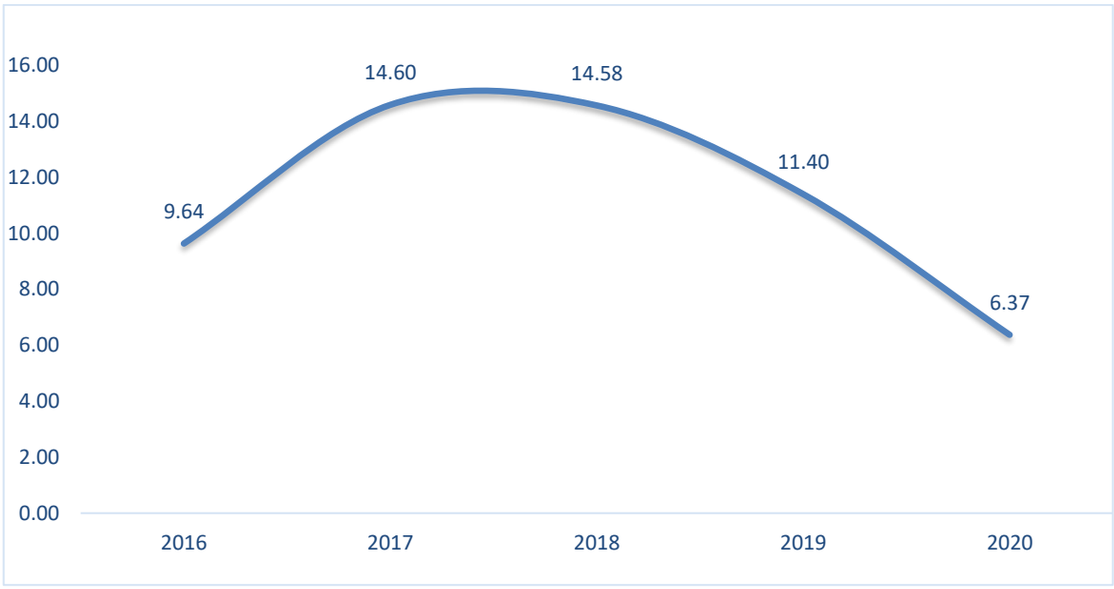
**Gambar 3.16.**
**Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

### 3.3.4.2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran

Rasio Belanja Modal terhadap total Pengeluaran mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung menurun, yaitu penurunan terjadi sejak tahun 2017 sebesar 14,60% dan tahun 2020 menjadi sebesar 6,37%. Belanja Modal pada tahun 2020 turun drastis karena ada kebijakan *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yang membutuhkan anggaran sangat besar.

Secara rinci rasio Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



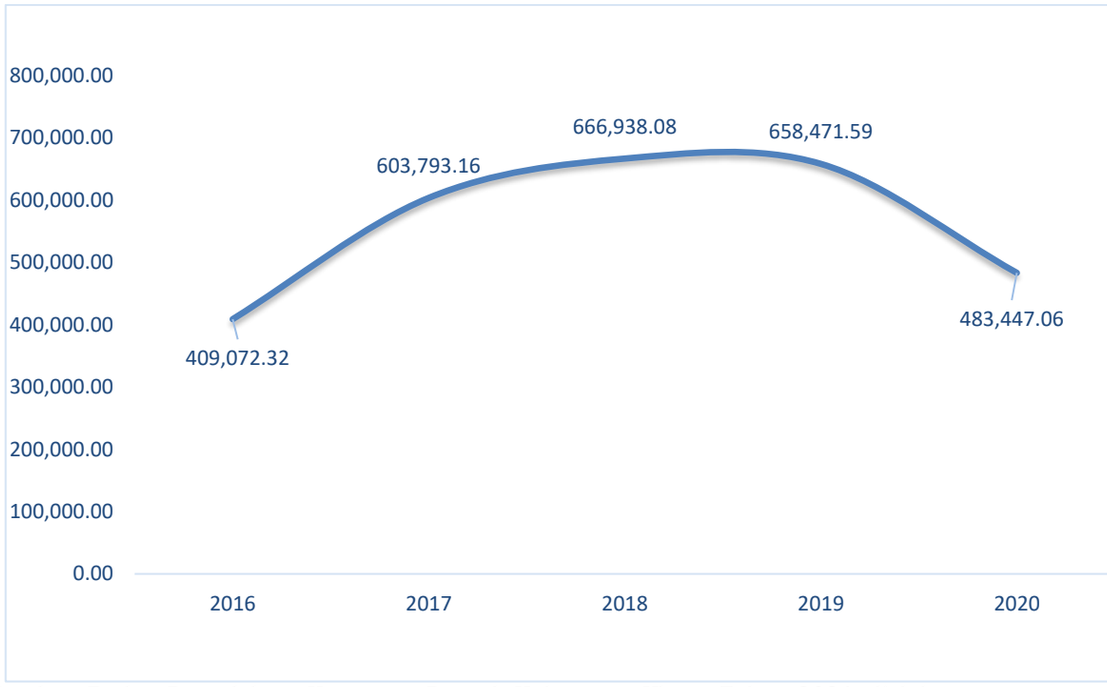

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.17.**
**Rasio Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

### 3.3.4.3. Rasio Belanja Modal Per Kapita

Rasio belanja modal per kapita menunjukkan seberapa besar total pengeluaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal per kapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

Rasio belanja modal per kapita Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Sementara itu jika dibandingkan kondisi 2 tahun terakhir, rasio tahun 2020 sebesar Rp.483.447,06 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.658.471,59. Hal ini menandakan anggaran belanja modal dalam perbaikan kondisi perekonomian penduduk melalui pembangunan infrastruktur terjadi penurunan. Penurunan ini akibat adanya *refocusing* penanganan Pandemi Covid-19, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.18.**
**Rasio Belanja Modal Per Kapita Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

### 3.3.5. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Analisis Pembiayaan didapatkan dengan menghitung defisit riil, komposisi penutup defisit riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebagai berikut.

#### 3.3.5.1. Sumber Penutup Defisit Riil

Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan langkah kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.6.**
**Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020*) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 2.258.604.630.605,19 | 2.581.515.295.917,04 | 2.577.961.130.135,42 | 2.689.353.252.985,44 | 2.578.135.836.354,00 |
| | Dikurangi | | | | | |
| 2 | Realisasi Belanja Daerah | 2.282.330.771.499,03 | 2.481.861.743.842,22 | 2.611.007.499.825,88 | 2.682.356.733.813,68 | 2.419.670.345.690,00 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 8.304.000.000,00 | 18.200.000.000,00 | 27.249.000.000,00 | 19.500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| **A** | **Defisit riil** | **-32.030.140.893,84** | **81.453.552.074,82** | **-60.295.369.690,46** | **-12.503.480.828,24** | **36.314.991.363,00** |
| | Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: | | | | | |
| 4 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 406.198.863.893,00 | 374.231.954.686,16 | 455.690.054.002,98 | 395.265.877.623,52 | 382.728.125.477,28 |

| No | Uraian | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020*) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000.000,00 |
| 6 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan | 63.231.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penerimaan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **406.262.095.580,00** | **374.231.954.686,16** | **455.690.054.002,98** | **395.265.877.623,52** | **408.728.125.477,28** |
| **A-B** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** | **374.231.954.686,16** | **455.685.506.760,98** | **395.394.684.312,52** | **382.762.396.795,28** | **445.043.116.840,28** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*
*Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

Berdasarkan tabel tersebut, gambaran komposisi penutup defisit riil adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7.**
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten**
**Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian | Proporsi dari Total Defisit Riil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020**) (%) |
| | **Defisit Riil** | **-32.030.140.893,84** | **81.453.552.074,82** | **-60.295.369.690,46** | **-12.503.480.828,24** | **36.314.991.363,00** |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 406.198.863.893,00 | 374.231.954.686,16 | 455.690.054.002,98 | 395.265.877.623,52 | 382.728.125.477,28 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000.000,00 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | 63.231.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*
*Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

### 3.3.5.2. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran diperlukan untuk mengetahui kinerja APBD Kabupaten Klaten tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur sebagai berikut.

**Tabel 3.8.**
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020*) | | Rata-Rata Pertumbuhan*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | |
| | **Jumlah SiLPA** | **406.198.863.893,00** | | **374.231.954.686,16** | | **455.690.054.002,98** | | **395.265.877.623,52** | | **382.728.125.477,28** | | |
| 1 | Pelampauan penerimaan PAD | 20.497.700.481,19 | 5,05 | 36.205.998.306,04 | 9,67 | 22.113.810.635,42 | 4,85 | 18.996.924.174,44 | 4,81 | 74.728.093.198,00 | 19,53 | 8,78 |
| 2 | Pelampauan penerimaan dana transfer | 68.556.374.304,00 | 16,88 | -66.000.238.182,00 | -17,64 | 7.773.239.171,00 | 1,71 | -45.169.353.588,00 | -11,43 | -126.390.755.932,00 | -33,02 | -8,70 |
| 3 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | -5.000.000.000,00 | -1,23 | -1.867.280.109,00 | -0,50 | 2.641.901.112,00 | 0,58 | -515.142.487,00 | -0,13 | -885.202.900,00 | -0,23 | -0,30 |
| 4 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 285.118.648.213,97 | 70,19 | 487.347.026.745,78 | 130,23 | 362.111.186.152,10 | 79,46 | 409.578.775.384,84 | 103,62 | -231.560.306.873,76 | -60,50 | 64,60 |
| 5 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kegiatan lanjutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*
*Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

## 3.4. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Penghitungan kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan. Penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penyusunan asumsi, kemudian ditetapkan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dan pengalokasian untuk belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

### 3.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah yang belum begitu stabil pada tahun 2021 dan 2022 karena masih terpengaruh pandemi Covid-19, kemudian tahun 2023 hingga tahun 2026 diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan tranfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Proyeksi Pendapatan PAD di tahun 2023 sampai dengan 2026 ada peningkatan target dengan asumsi Pandemi Covid-19 sudah terkendali dan roda perekonomian dapat berjalan baik secara normal biasa maupun normal baru. Peningkatan PAD yang signifikan tersebut ditunjang dengan adanya upaya percepatan di berbagai sektor diantaranya:

1. Sektor Pajak Daerah
    a. Penguatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan (zona ekonomi perkotaan) dengan menarik investor untuk pembangunan hotel bintang 3 ke atas, pusat perbelanjaan modern, dan pusat kuliner;
    b. Pembangunan kawasan-kawasan perumahan non subsidi;
    c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di tahun 2023 dan 2026;
    d. Penyelenggaraan event-event hiburan tingkat nasional dan internasional (pariwisata);
    e. Menarik Investasi dalam rangka pembukaan lapangan kerja baru sehingga masyarakat memperoleh penghasilan lebih.
2. Sektor Retribusi Daerah
    a. Pembangunan spot-spot pariwisata baru terkait retribusi jasa pariwisata;
    b. Keterdukungan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait retribusi bangunan gedung (IMB);
3. Sektor Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    a. Penempatan/peningkatan investasi jangka pendek sesuai ketentuan Permendagri 77 Tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
4. Sektor Lain-lain PAD yang sah
    a. Penguatan pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM;
    b. Pendirian BLUD kesehatan baru di tahun 2026;
    c. Pendorongan pendirian BLUD non kesehatan.

Beberapa asmsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami peningkatan secara gradual dari sebesar 2,52% pada tahun 2022 menjadi 5,47% pada tahun 2026. Pengaruh pandemi Covid-19 diperkirakan mulai berkurang pada tahun 2022 setelah pelaksanaan vaksin Covid-19 yang ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2022. Di samping itu kebijakan pemerintah sudah diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi, yang akan berdampak pada semakin menggeliatnya aktivitas perekonomian. Diharapkan dengan semakin pulihnya perekonomian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin baik.
2. Potensi perekonomian Kabupaten Klaten diperkirakan akan semakin berkembang dengan adanya pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja dan rencana adanya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yang merupakan program super prioritas nasional, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan investasi di bidang pariwisata, perdagangan, dan industri yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Pendapatan Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Transfer dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.
4. Potensi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari sektor pajak dan retribusi daerah akan mengalami peningkatan dengan penyesuaian tarif pajak/retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah menggunakan teknologi informasi dan melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan mengalami peningkatan melalui optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.9.**
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **2.520.987.884.551** | **2.508.342.505.200** | **2.536.777.602.200** | **2.567.152.606.200** | **2.599.068.166.200** | **2.687.852.118.200** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **249.063.886.351** | **274.449.465.000** | **302.884.562.000** | **333.259.566.000** | **365.175.126.000** | **453.959.078.000** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 103.372.962.000 | 113.710.259.000 | 126.281.284.000 | 138.909.413.000 | 153.800.355.000 | 170.180.390.000 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 13.967.805.000 | 15.673.215.000 | 17.325.109.000 | 18.566.543.000 | 19.862.311.000 | 22.291.856.000 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.197.839.911 | 13.273.183.000 | 14.586.842.000 | 16.916.184.000 | 19.261.993.000 | 23.625.093.000 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 119.525.279.440 | 131.792.808.000 | 144.691.327.000 | 158.867.426.000 | 172.250.467.000 | 237.861.739.000 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.148.491.398.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** |
| 4.2.1 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.968.844.129.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 |
| 4.2.1.1 | Dana Perimbangan | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 |
| 4.2.1.1.1 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 |
| 4.2.1.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 |
| 4.2.1.1.3 | Dana Transfer Khusus | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 |
| 4.2.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 |
| 4.2.1.5 | Dana Desa | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 |
| 4.2.2 | TRANSFER ANTAR DAERAH | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** |

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 |
| 4.3.3 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

### 3.4.2. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 dengan perkembangan fluktuatif, kondisi sangat dipengaruhi oleh prioritas pembangunan daerah. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10.**
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020**

| No | Uraian | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 *) (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Belanja Operasi** | **1.239.843.399.717** | **1.092.314.834.122** | **1.071.242.466.613** | **1.089.951.573.950** | **1.045.730.394.418** | **0,90** |
| 1. | Belanja Pegawai | 1.239.843.399.717 | 1.092.314.834.122 | 1.071.242.466.613 | 1.089.951.573.950 | 1.045.730.394.418 | 0,90 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | |
| 3. | Belanja Bunga | | | | | | |
| 4. | Belanja Subsidi | | | | | | |
| 5. | Belanja Hibah | | | | | | |
| 6. | Belanja Bantuan Sosial | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **3.000.000.000** | **5.000.000.000** | **8.000.000.000** | **10.000.000.000** | **-** | **8,18** |
| 1. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | - | - | - | - | - | 0,00 |

| No | Uraian | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 *) (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Penyertaan modal daerah | | | | | | |
| 3. | Pembentukan dana cadangan | 3.000.000.000 | 5.000.000.000 | 8.000.000.000 | 10.000.000.000 | - | 30,33 |
| 4. | Pemberian pinjaman daerah | | | | | | |
| 5. | Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| | **TOTAL (1+2)** | **1.242.843.399.717** | **1.097.314.834.122** | **1.079.242.466.613** | **1.099.951.573.950** | **1.045.730.394.418** | **4,54** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*
*Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

### 3.4.3. Analisis Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

**Tabel 3.11.**
**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten**

| No | Uraian | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| **1** | **Belanja Operasi** | **1.217.830.195.949** | **1.229.477.323.200** | **1.235.924.037.200** | **1.242.281.304.200** | **1.248.669.299.200** | **1.255.077.897.200** |
| 1. | Belanja Pegawai | 1.217.830.195.949 | 1.229.477.323.200 | 1.235.924.037.200 | 1.242.281.304.200 | 1.248.669.299.200 | 1.255.077.897.200 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | |
| 3. | Belanja Bunga | | | | | | |
| 4. | Belanja Subsidi | | | | | | |
| 5. | Belanja Hibah | | | | | | |
| 6. | Belanja Bantuan Sosial | | | | | | |
| **2** | **Belanja Modal** | 75.000.000.000 | 75.000.000.000 | 75.000.000.000 | 75.000.000.000 | 75.000.000.000 | 75.000.000.000 |
| **3** | **Belanja Tidak Terduga** | | | | | | |
| | Belanja Tidak Terduga | | | | | | |
| **4** | **Belanja Transfer** | 598.542.381.800 | 572.561.654.000 | 573.983.946.000 | 575.370.902.000 | 576.989.573.000 | 578.870.531.000 |
| 1. | Belanja Bagi Hasil | 11.734.076.700 | 12.938.348.000 | 14.360.640.000 | 15.747.596.000 | 17.366.267.000 | 19.247.225.000 |
| 2. | Belanja Bantuan Keuangan | 586.808.305.100 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 |
| | | | | | | | |
| **2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | | | | | | |
| 1. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | | | | | |
| 2. | Penyertaan modal daerah | | | | | | |
| 3. | Pembentukan dana cadangan | | | | | | |
| 4. | Pemberian pinjaman daerah | | | | | | |
| 5. | Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |

| No | Uraian | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| | **Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama** | **1.891.372.577.749** | **1.877.038.977.200** | **1.884.907.983.200** | **1.892.652.206.200** | **1.900.658.872.200** | **1.908.948.428.200** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*
*Keterangan: *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data*

Dari beberapa analisis diatas maka Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten untuk mendanai pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12.**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten**

| No | Uraian | Proyeksi Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 2.520.987.884.551 | 2.508.342.505.200 | 2.536.777.602.200 | 2.567.152.606.200 | 2.599.068.166.200 | 2.687.852.118.200 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | - | - | - | 45.000.000.000 | - | - |
| 3 | Sisa lebih riil perhitungan anggaran | 208.865.375.343 | 183.484.446.000 | 176.748.699.000 | 201.977.557.000 | 174.574.599.000 | 169.737.359.000 |
| | Total penerimaan | 2.729.853.259.894 | 2.691.826.951.200 | 2.713.526.301.200 | 2.814.130.163.200 | 2.773.642.765.200 | 2.857.589.477.200 |
| | Dikurangi: | | | | | | |
| 4 | Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama | 1.891.372.577.749 | 1.877.038.977.200 | 1.884.907.983.200 | 1.892.652.206.200 | 1.900.658.872.200 | 1.908.948.428.200 |
| | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 838.480.682.145 | 814.787.974.000 | 828.618.318.000 | 921.477.957.000 | 872.983.893.000 | 948.641.049.000 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

Kebijakan jangka menengah Tahun 2022-2026 masing-masing komponen belanja daerah sebagai berikut.

**1. Belanja Operasi**

a. Belanja Pegawai
   Belanja pegawai akan menampung kebutuhan: Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13; Gaji anggota DPRD; Tambahan Penghasilan PNS; dan Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa
   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Bunga
   Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi
   Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah
   Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f. Belanja Bantuan Sosial
   Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

**2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

**3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak/retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat.

Kebijakan jangka menengah penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022-2026 diarahkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); dan Pencairan Dana Cadangan.

Kebijakan jangka menengah pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022-2026 diarahkan pada Penyertaan modal daerah, dan Pembentukan dana cadangan.

Secara keseluruhan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.13.**
**Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten**

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **2.520.987.884.551** | **2.508.342.505.200** | **2.536.777.602.200** | **2.567.152.606.200** | **2.599.068.166.200** | **2.687.852.118.200** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **249.063.886.351** | **274.449.465.000** | **302.884.562.000** | **333.259.566.000** | **365.175.126.000** | **453.959.078.000** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 103.372.962.000 | 113.710.259.000 | 126.281.284.000 | 138.909.413.000 | 153.800.355.000 | 170.180.390.000 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 13.967.805.000 | 15.673.215.000 | 17.325.109.000 | 18.566.543.000 | 19.862.311.000 | 22.291.856.000 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.197.839.911 | 13.273.183.000 | 14.586.842.000 | 16.916.184.000 | 19.261.993.000 | 23.625.093.000 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 119.525.279.440 | 131.792.808.000 | 144.691.327.000 | 158.867.426.000 | 172.250.467.000 | 237.861.739.000 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.148.491.398.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** |
| 4.2.1 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.968.844.129.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 |
| 4.2.1.1 | Dana Perimbangan | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 |
| | Dana Bagi Hasil (DBH) | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 |
| | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 |
| | Dana Transfer Khusus | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 |
| 4.2.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 |
| 4.2.1.5 | Dana Desa | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 |
| 4.2.2 | TRANSFER ANTAR DAERAH | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 |

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.3 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 |
| | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA** | **2.672.822.301.894** | **2.671.826.951.200** | **2.693.526.301.200** | **2.809.130.163.200** | **2.753.642.765.200** | **2.837.589.477.200** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.856.311.721.298** | **1.859.147.517.200** | **1.806.764.904.200** | **1.952.392.760.200** | **1.887.921.646.200** | **1.928.478.084.200** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.217.830.195.949 | 1.229.477.323.200 | 1.235.924.037.200 | 1.242.281.304.200 | 1.248.669.299.200 | 1.255.077.897.200 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 591.166.498.849 | 578.636.597.000 | 519.331.950.000 | 613.602.539.000 | 587.743.430.000 | 621.891.270.000 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | 2.000.000.000 | 2.024.680.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 37.920.026.500 | 39.422.057.000 | 39.422.057.000 | 84.422.057.000 | 39.422.057.000 | 39.422.057.000 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 7.395.000.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **202.968.198.796** | **229.117.780.000** | **304.777.451.000** | **273.366.501.000** | **280.731.546.000** | **322.240.862.000** |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **15.000.000.000** | **11.000.000.000** | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **598.542.381.800** | **572.561.654.000** | **573.983.946.000** | **575.370.902.000** | **576.989.573.000** | **578.870.531.000** |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 11.734.076.700 | 12.938.348.000 | 14.360.640.000 | 15.747.596.000 | 17.366.267.000 | 19.247.225.000 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 586.808.305.100 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (189.865.375.343) | (163.484.446.000) | (156.748.699.000) | (241.977.557.000) | (154.574.599.000) | (149.737.359.000) |
| | | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **208.865.375.343** | **183.484.446.000** | **176.748.699.000** | **246.977.557.000** | **174.574.599.000** | **169.737.359.000** |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 208.865.375.343 | 183.484.446.000 | 176.748.699.000 | 201.977.557.000 | 174.574.599.000 | 169.737.359.000 |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | 45.000.000.000 | - | - |

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **19.000.000.000** | **20.000.000.000** | **20.000.000.000** | **5.000.000.000** | **20.000.000.000** | **20.000.000.000** |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | - | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 189.865.375.343 | 163.484.446.000 | 156.748.699.000 | 241.977.557.000 | 154.574.599.000 | 149.737.359.000 |
| | Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | - | - | - | - | - | - |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

# BAB IV
# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

## 4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan dalam perencanaan daerah. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Klaten diidentifikasi berdasarkan pada kondisi yang tergambar pada Bab II, sehingga dapat diketahui permasalahan pembangunan pada setiap urusan yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2026.

### 4.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**1. Pendidikan**

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya capaian APK PAUD usia 5-6 tahun, pada tahun 2020 tercatat sebesar 80,60% hal ini menunjukkan masih terdapat 19,40% anak usia 5-6 yang belum sekolah PAUD, dan sebagian PAUD tidak membuka pendaftaran karena adanya Pandemi Covid-19, serta tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak usia 5-6 tahun masih kurang;
b. Masih rendahnya APM SD/MI/Paket A hal ini terlihat pada data APM SD/MI/Paket A masih sebesar 88,54% dan data APM SMP/MTs/Paket B sebesar 71,14%;
c. Masih terdapat angka putus sekolah jenjang APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/ Paket B masing-masing sebesar 0,01% dan 0,08%;
d. Masih cukup tingginya capaian indikator penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, di mana pada tahun 2020 sebesar 5,79%; dan
e. Belum semua gedung sekolah SD dan SMP dalam kondisi baik, pada tahun 2020 Kondisi sekolah SD dalam kondisi baik sebesar 68,87% dan SMP sebesar 74,35%.

**2. Kesehatan**

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya angka kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 9,34 per 1.000 kelahiran hidup, masih adanya angka kematian balita sebesar 1,52 per 1.000 kelahiran hidup, dan masih adanya angka kematian neonatal sebesar 6,36 per 1.000 kelahiran hidup;
b. Masih adanya kasus kematian ibu, pada tahun 2020 kasus kematian ibu meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu menjadi 17 kasus dari 12 kasus pada tahun 2019;
c. Menurunnya cakupan penanganan penyakit menular, hal ini ditunjukkan dengan data cakupan balita pneumonia yang ditangani menurun dari sebesar 47,0% pada tahun 2019 menjadi 29,33% pada tahun 2020;

d. Belum optimalnya pemenuhan tenaga dokter dan medis yang tersedia pada pelayanan kesehatan, yaitu rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,026 dan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,050;
e. Belum terpenuhinya capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, dengan capaian di bawah 100%;
f. Rendahnya indeks keluarga sehat yang baru mencapai 0,252 sehingga Kabupaten Klaten termasuk kategori kabupaten belum mencapai strata kabupaten sehat;
g. Masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular;
h. Rendahnya indikator preventif dan promotif (belum mencapai 100%), terlihat dari cakupan STBM masih sebesar 24,9% dan Rumah tangga ber PHBS sebesar 96,26%; dan
i. Kondisi Pandemi Covid-19 mengakibatkan cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan pelayanan nifas, cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi dan cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan. Data yang ada menunjukkan cakupan pelayanan nifas sebesar 96,92% pada tahun 2020 dan sebesar 97,55% pada tahun 2019. Cakupan neonatus turun menjadi 55,63% pada tahun 2020 dan sebesar 56,03% pada tahun 2019, cakupan pelayanan anak balita turun dari 95,77% pada tahun 2019 menjadi sebesar 92,71%.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penyelenggaran jalan di Kabupaten Klaten, dilihat dari tingkat kerusakan jalan, pada tahun 2020 jalan rusak dan rusak berat yang perlu ditangani sebesar 9,92% serta 23,83% jalan dalam kondisi sedang yang perlu ditingkatkan kualitasnya;
b. Belum optimalnya kualitas drainase, dilihat dari capaian drainase dalam kondisi baik yang baru mencapai 61,44% pada tahun 2020;
c. Masih terdapat penduduk yang belum mendapatkan akses terhadap air minum sebesar 8,23%;
d. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung dilihat dari rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan baru 11%;
e. Perda RTRW sedang dalam proses revisi sehingga perencanaan belum ada bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota; dan
f. Kurangnya pemenuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, terlihat dari persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sebesar 3% pada tahun 2020.

**4. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai dengan SK Bupati Nomor 050/373/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebesar 0,14% (41,65 Ha);

b. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten sebesar 1,43%;
c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum kawasan permukiman; dan
d. Backlog perumahan yang masih cukup tinggi, sebesar 77.419 unit di tahun 2020.

**5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penyediaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat (SDM Linmas) yang terlatih dan dikukuhkan, pada tahun 2020 tercatat sebesar 41,5%;
b. Belum optimalnya cakupan pelayanan kebakaran, dilihat dari cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2020 sebesar 1,1%;
c. Masih rendahnya warga yang mencapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu 5,05%; dan
d. Belum optimalnya dukungan kelompok peduli bencana terlihat dari Kelompok relawan bencana aktif sebesar 40,00%.

**6. Sosial**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sosial diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%;
a. Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;
b. Belum optimalnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosisal, data yang ada menunjukkan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 73,67%; dan
c. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, di mana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi targetnya.

### 4.2.2. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**1. Tenaga Kerja**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut:

a. Semakin meningkatnya TPT di Kabupaten Klaten, pada tahun 2016 sebesar 2,51%, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,46%;
b. Meningkatnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja, di mana pada tahun 2019 sebesar 10,06%, meningkat menjadi sebesar 11,98% pada tahun 2020;
c. Penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui perjanjian bersama belum optimal, yakni baru mencapai 55,56%;

d. Pemenuhan hak pekerja/buruh dalam hal kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, pada tahun 2020 baru mencapai 25,01%;
e. Masih sangat rendahnya kompetensi tenaga kerja, dilihat dari tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi yang hanya 3,51%; dan
f. Belum optimalnya upaya penempatan tenaga kerja terdaftar, tahun 2020 hanya mampu menempatkan 21,11% pencari kerja terdaftar.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut:

a. Menurunnya capaian IPG yaitu tahun 2017 sebesar 96,54 tahun 2020 sebesar 96,17 berada di ranking 6 di Jawa Tengah;
b. Persentase perempuan di parlemen berhasil ditingkatkan dari 6% menjadi 18%, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
c. Belum semua OPD memiliki data pilah gender dan anak, data menujukkan OPD yang memiliki data pilah gender dan anak baru 28,8%;
d. Belum semua desa/kelurahan layak anak, data menunjukkan pada tahun 2020 desa/kelurahan layak anak tercatat sebesar 65,1%; dan
e. Rasio KDRT meningkat dari 0,68 pada tahun 2016 menjadi 3,36 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 0,0048%.

**3. Pangan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pangan diuraikan sebagai berikut:

a. Menurunnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2019 skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,75%, menurun 7,95% di tahun 2020 menjadi 84,80%;
b. Menurunnya ketersediaan pangan utama untuk beras sebesar 11.563,21 ton. Pada tahun 2019 ketersediaan pangan utama untuk beras sebesar 279.174,31 ton dan pada tahun 2020 sebesar 267.611,10 ton; dan
c. Standar pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan tahun 2020 masih lemah, yaitu sebesar 78% sedangkan Standar Mutu Nasional sebesar 100%.

**4. Pertanahan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanahan diuraikan sebagai berikut:

a. Menurunnya Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan tahun 2019 sebanyak 41.007 sertifikat sedangkan pada tahun 2020 hanya menerbitkan 25.611 sertifikat; dan
b. Masih terdapat tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

**5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya capaian IKLH, tahun 2020 sebesar 52,85%, dengan status lingkungan kurang baik;
b. Belum optimalnya rehabilitasi terhadap lahan kritis, tahun 2020 baru 5,04%;
c. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, capaian 2020 sebesar 66,66%; dan
d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, di mana capaian pada tahun 2020 menurun menjadi 0% apabila dibandingkan tahun 2019 sebesar 50%;
e. Belum optimalnya penanganan sampah yang ditangani di TPA, capaian tahun 2020 sebesar 50,66%.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diuraikan sebagai berikut:

a. Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP, tahun 2020 penerbitan KTP sebesar 94,93%;
b. Belum optimalnya pelaporan peristiwa penting (kematian dan perkawinan) dari masyarakat ke Dinas Dukcapil yang berpengaruh terhadap jumlah penerbitan akta kematian dan perkawinan. Tahun 2020 penerbitan akte kematian sebanyak 10.072, dan penerbitan akte perkawinan sebanyak 2.698; dan
c. Belum semua OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Data yang ada menunjukan 7 OPD (13,73%) yang melaksanakan Kerjasama dan mendapatkan hak akses dengan persetujuan Dirjen Dukcapil.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pemenuhan kriteria BUMDes maju. Pada tahun 2020 jumlah BUMDesa maju sebesar 10 BUMDes;
b. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan, dari 10 kawasan perdesaan yang ada baru 1 kawasan perdesaan yang telah menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yaitu kawasan perdesaan di Kecamatan Wedi;
c. Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah desa (baru 25% dari jumlah desa yang sudah optimal);
d. Belum optimalnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa (rata-rata 30% tidak tepat waktu); dan
e. Masih ada 105 balai/kantor kepala desa yang belum disertifikatkan (dari 391 desa di Kabupaten Klaten yang ada).

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut:

a. Angka *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2020 sebesar 2,1%;

b. Belum optimalnya capaian CPR. Data yang ada menunjukkan capaian CPR masih diangka 70,90%; dan
c. Masih tingginya *unmet need*. Data yang ada menunjukkan bahwa *unmet need* di tahun 2020 masih sebesar 16,95%.

**9. Perhubungan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perhubungan diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C. Persentase terminal yang dikelola dengan baik pada tahun 2020 sebesar 42,86%;
b. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, APIL dan PJU) baru mencapai 0,25% pada tahun 2020. Persentase pemenuhan guardil dan marka jalan baru mencapai 15,65% pada tahun 2020;
c. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan, dilihat dari jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terus bertambah selama lima tahun terakhir, data tahun 2019 angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 986 kejadian, meningkat menjadi 1.003 pada tahun 2020; dan
d. Belum optimalnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dilihat dari jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2020 baru mencapai 85,53%.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika diuraikan sebagai berikut:

a. Perlu Optimalisasi Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan *website* Kabupaten Klaten, sehingga ketersediaan data lebih lengkap dan terupdate secara berkala;
b. Masih Rendahnya utilisasi jaringan mobile *broadband*, dilihat dari cakupan telekomunikasi pada tahun 2020 masih sebesar 56,5%;
c. Belum optimalnya pemberian informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat, di mana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 65,00%;
d. Masih rendahnya layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi, di mana pada tahun 2020 baru tercapai 40,74%; dan
e. Perlu peningkatan dalam akses internet di ruang publik, di mana pada tahun 2020 tercapai sebesar 70% (ruang publik kewenangan pemerintah daerah).

**11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diuraikan sebagai berikut:

a. Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan dan pelayanan koperasi, ditunjukkan dengan persentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas hanya sebesar 14,45%;
b. Belum seluruh Koperasi yang berkinerja baik dalam kelembagaan, keuangan, serta kemanfaatan bagi anggota koperasi sebagai badan hukum aktif, ditunjukkan dengan persentase koperasi yang berkualitas atau masih aktif hanya sebesar 42,80%;

c. Belum optimalnya pengawasan kepatuhan kepada seluruh koperasi untuk menjalankan peraturan yang berlaku, ditunjukkan dengan persentase koperasi patuh hanya sebesar 23,10%;
d. Rendahnya penilaian kesehatan koperasi pada KSP/USP, ditunjukkan dengan persentase KSP/USP yang ternilai kesehatannya hanya sebesar 9,34%;
e. Rendahnya pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2020 sebesar 0,111%;
f. Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro, di mana pada tahun 2020 persentase usaha mikro yang dibina masih sebesar 3,86%;
g. Masih rendahnya fasilitasi akses bantuan permodalan bagi usaha mikro, hal ini ditunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro yang mengajukan bantuan modal usaha dari program bantuan presiden sebanyak 54.176 pelaku usaha mikro pada tahun 2020; dan
h. Jumlah pelaku usaha mikro yang melakukan pola kemitraan masih rendah, yaitu sebesar 0,257%.

**12. Penanaman Modal**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal diuraikan sebagai berikut:

a. Menurunnya jumlah investor berskala nasional (PMA), sehingga perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dari 15 investor di tahun 2015 menjadi 5 investor di tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya;
b. Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA dan PMDN), terlihat dari nilai realisasi investasi sebesar Rp.698,90 milyar rupiah (menurun sebesar -64%) pada tahun 2020 dan nilai realisasi investasi PMA sebesar US$ 4.721.000 (menurun sebesar -59%).

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga diuraikan sebagai berikut:

a. Belum semua organisasi kepemudaan aktif, terlihat pada tahun 2020 baru sebesar 76% yang aktif;
b. Masih ada pelatih yang belum bersertifikat, tahun 2020 baru sebesar 80 orang pelatih yang bersertifikat;
c. Menurunnya pembinaan atlet muda terlihat dari penurunan jumlah atlet muda yang dibina pada tahun 2020 sebanyak 330 orang, sementara tahun 2019 sebanyak 500 orang;
d. Belum optimalnya peningkatan wirausaha muda pemula, terlihat dari persentase wirausaha muda pemula dari 17,45% di tahun 2019 menjadi sebesar 19,76 % di tahun 2020.

**14. Statistik**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Statistik diuraikan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya ketersediaan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, yang baru mencapai 25%.
b. Penerapan *single data* melalui aplikasi satu data Kabupaten Kabupaten Klaten belum optimal.

**15. Persandian**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Persandian diuraikan sebagai berikut:

a. Sertifikasi keamanan informasi standar nasional belum terlaksana;
b. Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elekronik di perangkat daerah belum berjalan; dan
*c.* Sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik pada tahun 2020 baru sebesar 38%, sehingga perlu untuk ditingkatkan mengingat semakin marak dan rawannya kejahatan dunia maya *(cyber crime).*

**16. Kebudayaan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kebudayaan diuraikan sebagai berikut:

a. Menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya selama Pandemi Covid-19, dari 40 event di tahun 2019 menjadi 7 event di tahun 2020;
b. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi baru 1 cagar budaya; dan
c. Belum semua cagar budaya dikelola secara terpadu, sampai dengan tahun 2020 baru sebanyak 3 cagar budaya.

**17. Perpustakaan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

a. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19, pada tahun 2019 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 83.511, akan tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 70.878 orang;
b. Menurunnya budaya membaca masyarakat, pada tahun 2019 minat baca tercatat sebesar 6,29%, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 5,34%;
c. Masih rendahnya cakupan pembinaan perpustakaan, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 21,99%; dan
d. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan, pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan sebesar 77,92.

**18. Kearsipan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kearsipan diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya capaian persentase arsip yang dialihmediakan, di mana pada tahun 2020 baru 25,85% arsip yang dilakukan alih media;
b. Belum optimalnya pengawasan arsip internal. Data menunjukkan pengawasan internal kearsipan sebesar 9,8%; dan
c. Belum optimalnya pelayanan kearsipan, pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 77,92.

### 4.2.3. Urusan Pilihan

**1. Pariwisata**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pariwisata diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik, terlihat dari jumlah obyek wisata dari tahun 2016-2020 stagnan, yaitu sebanyak 82 obyek dengan kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal (Klaten, Solo Raya dan DIY), salah satunya dipengaruhi oleh belum adanya pola atau paket perjalanan wisata *(travel pattern)* antar destinasi.
b. Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) hanya 1 (satu) hari, sehingga perlu dipikirkan untuk menarik wisatawan agar lebih lama tinggal di Kabupaten Klaten;
c. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp.4.117.796.612,00, pada tahun 2019 sebesar Rp.12.648.036.829,00 dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 8.530.240.217,00, hal ini sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19; dan
d. Belum terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif, rencana induk pembangunan ekonomi kreatif, pendataan ekonomi kreatif serta fasilitas sarana prasarana pendukung ekonomi kreatif.

**2. Pertanian**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanian diuraikan sebagai berikut:

a. Luas lahan pertanian yang semakin menurun setiap tahunnya, akibat lahan sawah yang banyak beralih fungsi menjadi lahan terbangun/lahan bukan pertanian;
b. Menurunnya produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal sebesar 0,1%, dari 67,32 Kw/Ha menjadi 67,22 Kw/Ha di tahun 2020, hal ini akibat jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten semakin menurun setiap tahunnya, lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan terbangun/lahan bukan pertanian, serta tidak optimalnya pengembangan usaha-usaha pertanian;
c. Belum optimalnya cakupan bina kelompok tani, pada tahun 2020 tercatat 32,50% dari total kelompok tani sebanyak 1.068 kelompok. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kuantitas SDM penyuluh pertanian serta adanya dampak Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan pertemuan dengan kelompok tani.
d. Belum terpenuhinya standar minimal berupa sarana prasarana dan sumber daya manusia pendukung di UBBT Humo sebagai pusat atau *pilot project* pengembangan konsep pertanian terpadu, agrowisata dan agropolitan, sehingga konsep tersebut belum dapat diaplikasikan dan dilaksanakan di lapangan atau di kawasan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

**3. Perdagangan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perdagangan diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,26%;

b. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif, terlihat dari indikator persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi, sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 30%;
c. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL, persentase PKL yang terbina hingga tahun 2020 baru 25,7%;
d. Menurunnya pendapatan retribusi pasar, pada tahun 2019 sebesar Rp.5.034.789.532,00 menjadi Rp.4.616.866.333,00 pada tahun 2020;
e. Menurunnya persentase kinerja pupuk tahun 2020 menjadi 95,89% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 97,07%;
f. Menurunnya *event* promosi produk dalam negeri yang diselenggarakan pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 sebanyak 3 *event* dibanding tahun 2019 sebanyak 7 *event*; dan
g. Menurunnya pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan pada tahun 2020 (mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19 menjadi sebesar -4,79%).

**4. Perindustrian**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perindustrian diuraikan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya unit usaha mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu syarat ekspor mebel ke eropa; dan
b. Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing IKM;
c. Menurunnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2020 (tercatat sebesar -1,21% karena mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19);
d. Cakupan bina kelompok industri mengalami penurun menjadi sebesar 0,12% dikarenakan refocusing anggaran dampak adanya Pandemi Covid-19.

**5. Transmigrasi**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Semakin menurunnya pemenuhan kuota yang diberikan untuk pemberangkatan calon transmigran, di mana tahun 2019 hanya 70% dari kuota yang terpenuhi, dan di tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigran karena Pandemi Covid-19;

**6. Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan diuraikan sebagai berikut:

a. Menurunnya produksi benih ikan pada tahun 2020 sebesar 109.000.000 ekor dibandingkan tahun 2019 sebesar 137.635.312 ekor;
b. Menurunnya produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 27.603,83 ton dibandingkan tahun 2019 sebesar 28.276,03 ton. Dan untuk

produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2020 sebesar 184 ton dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 516,5 ton;
c. Rendahnya cakupan bina kelompok nelayan stagnan pada 299 Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan); dan
d. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di kalangan masyarakat, di mana tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten baru mencapai 20,28%.

### 4.2.4. Unsur Penunjang Pemerintahan

**1. Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan diuraikan sebagai berikut:

a. Perubahan regulasi/kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020;
b. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana pada urusan perencanaan pembangunan;
c. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan
d. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai dalam mendukung perencanaan pembangunan yang ideal.

**2. Keuangan**

Permasalahan dalam urusan Penunjang Keuangan Daerah adalah:

a. Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total APBD, pada tahun 2020 proporsi PAD terhadap APBD sebesar 13,37% terutama optimalisasi peningkatan pajak daerah; dan
b. Masih rendahnya proporsi tanah milik pemda yang bersertifikat, pada tahun 2020 baru mencapai sebesar 54,31%.

**3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan dalam urusan penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah:

a. Rendahnya manajemen pengelolaan ASN, terlihat dari Indeks Sistem Merit sebesar 160,5 dan Persentase Pengembangan Aparatur sebesar 70%; dan
b. Masih rendahnya Profesionalitas ASN terlihat dari Indeks Profesionalitas ASN sebesar 78,06;
c. Persentase ASN yang mengikuti diklat baru 11,26% dan persentase informasi kepegawaian yang akurat tahun 2020 sebesar 54%, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sudah mencapai 80%.

**4. Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan diuraikan sebagai berikut:

a. Belum semua hasil inovasi dapat diterapkan, baru 85% di tahun 2020;

b. Kurangnya partisipipasi dan kreativitas masyarakat dalam mendukung inovasi daerah, tahun 2020 hanya 5 orang yang mengikuti lomba krenova dari 30 target yang ditetapkan; dan
c. Terbatasnya kapasitas perangkat daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerja sama inovasi daerah, sebanyak 34 inovasi kebijakan inovasi yang diterapkan daerah dari total perangkat daerah.

**4.2.5. Unsur Pengawasan Pemerintahan**

Permasalahan dalam urusan penunjang Pengawasan adalah:

a. Profesionalitas dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 83,61% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 95,30%.

**4.2.6. Unsur Pemerintahan Umum**

**1. Sekretariat Daerah**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
b. Masih rendahnya nilai kematangan/maturitas organisasi; dan
c. Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan, dilihat dari Peringkat nilai SAKIP sebesar 61,32; nilai kematangan/maturitas organisasi sebesar 31,2; dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,5; dan
d. Belum optimalnya pencapaian peringkat nilai SAKIP masih sebesar 61,32 (B), kondisi ini dipengaruhi komponen pembentuk SAKIP di mana pencapaian terbesar pada perencanaan kinerja, sehingga perlu ditingkatkan komponen pembentuk SAKIP lainnya.

**2. Sekretariat DPRD**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD

**3. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya sosialisasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ditunjukkan pada tahun 2020 persentase penurunan kasus penyalahgunaan narkoba masih sebesar 50%; dan
b. Masih rendahnya Persentase partisipasi masyarakat pemilu/pemilukada yaitu sebesar 81% pada tahun 2020.

## 4.2. Isu-Isu Strategis

### 4.2.1 Lingkungan Strategis

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi kondisi lingkungan

strategis pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 sebagai berikut.

**1. Isu dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.




*Sumber: https://www.sdg2030indonesia.org/*

**Gambar 4.1.**
**Tujuan SDGs**

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar

pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola.

- Pilar sosial mencakup jenis urusan yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, pangan, ketenagakerjaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pilar ekonomi mencakup jenis urusan energi dan sumber daya mineral, keuangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik dan sosial (terkait rasio gini).
- Pilar lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan kehutanan.
- Pilar hukum dan tata kelola mencakup jenis urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat terutama dalam memberikan keadilan dan penguatan masyarakat yang inklusif, statistik, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika. Tata kelola kelembagaan berkenaan dengan penyelenggaraan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Permasalahan capaian TPB/SDGs berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten yang dikelompokkan menjadi empat pilar yaitu:

**Tabel 4.1**
**Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
| **Pilar Sosial** | | |
|  | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | • 1.2.1*/SBT: Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 12,28%.<br>• 1.3.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, kondisi saat ini masih sebesar 90,71%.<br>• 1.3.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan capaian proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, kondisi saat ini masih sebesar 62%.<br>• 1.3.1.(d)/TTC: Belum memiliki indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan dalam target daerah.<br>• 1.4.1.(a)/SST: Masih adanya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan sebesar 0,07%.<br>• 1.4.1.(b)/SST: Masih adanya anak umur 12-23 bulan yang tidak menerima imunisasi dasar lengkap sebesar 11,73%.<br>• 1.4.1.(d)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 8,86%.<br>• 1.4.1.(e)/SST: Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak sebesar 0,21%. |

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
| | | • 1.4.1.(g)/SBT: Belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat masih 88,3%.<br>• 1.4.1.(h)/SBT: Belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat masih sebesar 73,05%.<br>• 1.5.1*/SBT: Masih adanya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.<br>• 1.5.1.(b)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial berada di atas target nasional.<br>• 1.5.1.(b)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial berada di atas target nasional.<br>• 1.5.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan pendampingan psikososial korban bencana sosial berada di atas target nasional.<br>• 1.5.1.(d)/SBT: Masih perlunya peningkatan jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus, kondisi saat ini masih sebanyak 26 sekolah.<br>• 1.5.1.(e)/SBT: Masih tingginya nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 120.<br>• 1.5.2.(a)/SST: Masih adanya kerugian ekonomi langsung akibat bencana sebesar Rp.2.123.314.343,00.<br>• 1.5.3*/SST: Masih perlunya mempertahankan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan melakukan pembaharuan secara berkala.<br>• 1.a.1*/TBC: Menurunnya proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan menjadi 41,51%. |
|  | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | • 2.1.1*/TTC: Belum adanya data pravelensi ketidakcukupan pangan.<br>• 2.1.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.<br>• 2.1.2*/TAD 1: Belum adanya data prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.<br>• 2.1.2.(a)/TAD 2: Belum adanya data penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.<br>• 2.2.1*/SBT: Masih perlunya penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, kondisi saat ini masih sebesar 7,1%.<br>• 2.2.1.(a)/TAD 1: Belum adanya data prevelensi stunting pada anak di bawah dua tahun/baduta.<br>• 2.2.2*/SST: Masih adanya prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun sebesar 7,3%.<br>• 2.2.2.(a)/SST: Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 9,28%.<br>• 2.2.2.(b)/SST: Masih adanya bayi usia kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar |

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
| | | 17,85%.<br>• 2.2.2.(c)/SST: Masih perlunya mempertahankan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).<br>• 2.3.1*/TTC: Belum adanya data Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). |
|  | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | • 3.2.2*/ SBT: Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN) yaitu sebesar 56,03 per 1000 kelahiran hidup.<br>• 3.3.5*/SBT: Masih tingginya jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 28 jiwa.<br>• 3.4.1.(a)/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.<br>• 3.4.1.(b)/TBC: Masih tingginya prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 49%.<br>• 3.4.1.(c)/TBC: Masih tingginya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun sebesar 51%.<br>• 3.4.2*/TAD: Belum adanya data angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.<br>• 3.5.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.<br>• 3.5.2*/TAD: Belum adanya data terkait konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.<br>• 3.7.1.(b)/SBT: Masih terbatasnya angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara *modern* masih sebesar 22,22%.<br>• 3.8.1.(a)/SBT: Masih tingginya kondisi *unmet need* pelayanan kesehatan yaitu sebesar 15,91%.<br>• 3.8.2*/SST: Belum sepenuhnya jumlah penduduk dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.<br>• 3.8.2.(a)/SST: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 90,71%.<br>• 3.9.3.(a)/TAD: Belum adanya data terkait proporsi kematian akibat keracunan.<br>• 3.a.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.<br>• 3.b.1.(a)/SST: Perlu peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.<br>• 3.c.1*/TTC: Belum memiliki indikator kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan pada target daerah. |
|  | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | • 4.1.1*/TTC: Belum adanya data proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika pada target daerah<br>• 4.1.1.(d)/SBT: Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat, kondisi saat ini masih 98,54%.<br>• 4.1.1.(e)/SBT: Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat, kondisi saat ini masih 98,31%.<br>• 4.1.1.(g)/SST: Perlu mempertahankan dan meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun berada di atas target nasional. |

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
| | | • 4.4.1*/TAD: Belum adanya data terkait proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).<br>• 4.6.1.(a)/SST: Masih adanya penduduk umur ≥15 tahun yang tidak melek aksara sebesar 0,34%.<br>• 4.6.1.(b)/TTC: Belum adanya data persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.<br>• 4.a.1*/TTC: Belum adanya data proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (*WASH*)).<br>• 4.c.1*/SST: Masih adanya guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang belum bersertifikat pendidik sebesar 12,93%. |
|  | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | • 5.1.1*/SBT: Masih terbatasnya jumlah kebijakan yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan yaitu saat ini masih berjumlah 1 dokumen.<br>• 5.2.2*/TBC: Perlu penurunan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.<br>• 5.3.1*/TAD: Belum adanya data proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.<br>• 5.3.1.(a)/TBC: Perlu peningkatan median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.<br>• 5.5.1*/SBT: Masih terbatasnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.<br>• 5.b.1*/TAD: Belum adanya data proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam. |
| **Pilar Ekonomi** | | |
|  | Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua | - |
|  | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | • 8.3.1.(c)/SST: Masih perlu mempertahankan persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan berada di atas target nasional, masih sekitar 30% koperasi dalam kondisi tidak aktif.<br>• 8.5.1*/SST: Masih perlu mempertahankan upah rata-rata per jam pekerja berada di atas target nasional.<br>• 8.5.2*/SBT: Masih perlunya penurunan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, Tingkat pengangguran terbuka masih 3,55%.<br>• 8.5.2.(a)/TAD: Belum adanya data terkait jumlah |

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
| | | tingkat setengah pengangguran.<br>• 8.6.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (*NEET*).<br>• 8.9.1*/SST: Masih perlu mempertahankan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di atas target nasional.<br>• 8.9.1.(b)/SST: Masih perlu mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan nusantara berada di atas target nasional.<br>• 8.9.1.(c)/SST: Masih perlu mempertahankan jumlah devisa sektor pariwisata berada di atas target nasional. |
|  | Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | • 9.2.2*/TTC: Belum adanya data proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.<br>• 9.3.1*/TTC: Belum memiliki indikator terkait proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri dalam target daerah.<br>• 9.3.2*/TTC: Belum memiliki indikator terkait proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit dalam target daerah.<br>• 9.c.1*/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* berada di atas target nasional, proporsi penduduk yang tidak terlayani *mobile broadband* sebesar 46,1%.<br>• 9.c.1.(a)/SST: Masih perlu mempertahankan proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam berada di atas target nasional, individu yang tidak menguasai/ memiliki telepon genggam saat ini sebesar 30,94%.<br>• 9.c.1.(b)/SST: Masih perlu meningkatkan proporsi individu yang menggunakan Internet berada di atas target nasional, individu yang tidak menggunakan Internet masih sebesar 47,21%. |
|  | Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara | • 10.1.1*/TAD 1: Belum memiliki sistem informasi data terkait koefisien gini.<br>• 10.1.1.(a)/SBT: Masih perlunya penurunan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur menjadi 7-8%, kondisi saat ini sebesar 12,28%.<br>• 10.1.1.(b)/TTC: Belum adanya data jumlah daerah tertinggal yang terentaskan pada target daerah.<br>• 10.1.1.(c)/SBT: Masih adanya desa tertinggal sebanyak 59 desa.<br>• 10.1.1.(d)/SBT: Masih perlunya peningkatan jumlah Desa Mandiri, kondisi saat ini masih sebesar 7 desa.<br>• 10.1.1.(e)/TAD 2: Belum adanya data rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada target daerah<br>• 10.1.1.(f)/TBC: Masih adanya angka persentase penduduk miskin di daerah tertinggal masih sebesar 54%.<br>• 10.2.1*/TAD 2: Belum adanya data proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas pada target daerah.<br>• 10.3.1.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan Indeks Kebebasan Sipil, indeks kebebasaan saat ini masih sebesar 76,21%. |

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
| | | • 10.3.1.(d)/TAD: Belum adanya data jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.<br>• 10.4.1.(b)/TBC: Masih perlunya peningkatan proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, kondisi saat ini sebesar 62%. |
|  | Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | • 17.6.2.(b)/TAD: Belum adanya data tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan.<br>• 17.8.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet, akses telekomunikasi universal dan internet masih sebesar masih sebesar 53,6%.<br>• 17.17.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).<br>• 17.17.1.(b)/TAD: Belum adanya data jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).<br>• 17.19.2.(b)/TAD: Perlunya peningkatan upaya-upaya dalam peningkatan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*). |
| **Pilar Lingkungan** | | |
|  | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | • 6.1.1.(a)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 8,86%.<br>• 6.1.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, kondisi saat ini masih 2,025 m3/detik.<br>• 6.1.1.(c)/SBT: Masih adanya penduduk yang belum memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, kondisi saat ini masih 91,14%.<br>• 6.2.1.(a)/TAD 2: Belum adanya data proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.<br>• 6.2.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100%, kondisi saat ini 99,79%.<br>• 6.2.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).<br>• 6.2.1.(d)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).<br>• 6.2.1.(e)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.<br>• 6.2.1.(f)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, kondisi saat ini 414 SR.<br>• 6.3.1.(b)/TTC: Masih perlunya upaya mempertahankan dan meningkatkan rumah tangga |

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
| | | yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, kondisi saat inisebesar 0,12%.<br>• 6.3.2.(b)/TTC: Masih perlunya mempertahankan dan meningkatkan kualitas air sungai, kondisi saat ini sebesar 28,46.<br>• 6.4.1.(b)/TAD: belum adanya data Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri. |
|  | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | • 11.1.1.(a)/TBC: Belum adanya data proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.<br>• 11.3.2.(b)/TTC: Belum adanya data jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.<br>• 11.4.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil berada di atas target nasional.<br>• 11.5.1*/SST: Perlu penurunan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, kondisi saat ini masih adanya korban yang terkena dampak bencana sebanyak 0,53 per 100.000 orang.<br>• 11.5.1.(a)/SBT: Masih tingginya nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 80,24.<br>• 11.5.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan dan meningkatkan jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, kondisi saat ini memiliki 2 sistem.<br>• 11.5.2.(a)/SST: Masih adanya kerugian ekonomi langsung akibat bencana sebesar Rp.2.123.314.343,00.<br>• 11.6.1.(a)/SBT: Masih perlunya upaya meningkatkan persentase sampah perkotaan yang tertangani, kondisi saat ini masih sebesar 17,19%.<br>• 11.b.2*/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah, dan dan melakukan pembaharuan secara berkala. |
|  | Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | • 12.4.2.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri), kondisi saat ini masih sebesar 31,04%.<br>• 12.5.1.(a)/TTC: Belum adanya data jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.<br>• 12.6.1.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, kondisi saat ini masih sebanyak 2 perusahaan.<br>• 12.7.1.(a)/TAD 2: Belum adanya data terkait jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.<br>• 12.8.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. |
|  | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | • 13.1.1*/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan dokumen strategi Pengurangan Risiko BBencana (PRB) tingkat daerah dan melakukan pembaharuan secara berkala.<br>• 13.1.2*/SST: Masih adanya korban yang terkena dampak bencana sebanyak 0,53 per 100.000 orang. |

| Goals | Tujuan TPB | Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD |
|---|---|---|
|  | Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan | |
|  | Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | • 15.1.1.(a)/TBC: Perlunya peningkatan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, kondisi saat ini masih 3701,4 Ha.<br>• 15.3.1.(a)/SST: Masih adanya luas lahan kritis yang belum direhabilitasi.<br>• 15.6.1*/TAD: Belum memiliki sistem informasi pendataan terkait kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.<br>• 15.9.1.(a)/TTC: Belum adanya data dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam target daerah. |
| **Pilar Hukum dan Tata Kelola** | | |
|  | Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | • 16.1.1.(a)/SBT: Masih perlunya penurunan jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.<br>• 16.1.4*/TAD: Belum memiliki sistem informasi pendataan terkait proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.<br>• 16.2.1.(a)/TAD: Belum adanya data proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.<br>• 16.2.3.(a)/TBC: Belum adanya data proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.<br>• 16.6.1*/SBT: Masih perlunya peningkatan proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.<br>• 16.6.1.(c)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan.<br>• 16.6.2.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).<br>• 16.10.2.(c)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<br>• 16.b.1.(a)/TAD: Belum memiliki sistem informasi pendataan terkait jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional. |

*Keterangan :*

*SST : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional*
*SBT : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional*
*TTC : Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai*
*TBC : Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai*
*TAD : Indikator TPB belum ada data*

Dari hasil KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, diperoleh hasil analisis untuk isu prioritas dari capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sebanyak 7 isu prioritas sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**
**Isu Prioritas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**
**Kabupaten Klaten**

| Goals | Tujuan TPB | Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup dan Kondisi Keuangan Daerah |
|---|---|---|
| **Pilar Sosial** | | |
|  | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun | Adanya kerawanan terhadap bencana alam berupa rawan bencana letusan gunung api, tanah longsor, banjir dan angin topan di Kabupaten Klaten. |
|  | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | • Belum terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang dan aman disebabkan pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan.<br>• Sekitar 48% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang sangat tinggi terhadap penyediaan bahan pangan. |
|  | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | Pemulihan ekonomi daerah akibat adanya Pandemi Covid-19. |
|  | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | Perlunya pendidikan dasar untuk penanggulangan dan mitigasi bencana. |
|  | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | - |
| **Pilar Ekonomi** | | |
|  | Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua | Terdapat kegiatan pertambangan kaki gunung Merapi. |
|  | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | • PDRB Perkapita Kabupaten Klaten menurun di tahun 2020.<br>• Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun 6,60%.<br>• Peningkatan ekonomi daerah dengan pengembangan sektor pariwisata melalui KSPN Prambanan. |
|  | Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | • Terdapat beberapa titik lokasi di Kabupaten Klaten yang memiliki kandungan NO2 dan CO tinggi<br>• Terdapat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo. |

| Goals | Tujuan TPB | Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup dan Kondisi Keuangan Daerah |
|---|---|---|
|   | Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara | - |
|   | Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | • Kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kab Klaten pada tahun 2018 sebesar Rp.855.982.298.429,42 dan pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.816.131.902.974,44.<br>• Kemandirian APBD Kab Klaten mengalami penurunan di tahun 2019 dengan kemandirian sebesar 16,81% yang sebelumnya 21,66% di tahun 2018. |
| **Pilar Lingkungan** | | |
|   | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | • Kebutuhan air pada tahun 2019 sebesar 391.926.128,25 $m^3$/th.<br>• Persentase penduduk memiliki air minum layak masih 91,14%.<br>• Sekitar 52% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang tinggi terhadap penyediaan air.<br>• Cakupan pelayanan akses dasar sanitasi 100%.<br>• Persentase layanan air limbah 97,82%.<br>• Indeks kualitas air masih 28,46.<br>• Masih adanya kegiatan pengeboran air tanah yang dilakukan tanpa ijin. |
|   | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | • Masih adanya kawasan permukiman kumuh.<br>• Perlunya peningkatan sarana persampahan.<br>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.<br>• Kondisi RTH eksisting seluas 222 Ha dan RTH rencana seluas 8.556 Ha. |
|   | Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | Perlu peningkatan dalam pengolahan sampah. |
|   | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | • Terdapat daerah rawan bencana alam tanah longsor, meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Wedi.<br>• Terdapat daerah rawan bencana alam banjir, meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi dan Wonosari.<br>• Terdapat daerah rawan bencana angin topan yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten. |
|   | Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan | - |

| Goals | Tujuan TPB | Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup dan Kondisi Keuangan Daerah |
|---|---|---|
|  | Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | Kondisi biodiversitas berbasis jasa ekosistem, sekitar 50% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem sedang. |
| **Pilar Hukum dan Tata Kelola** | | |
|  | Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | - |

*Sumber: KLHS RPJMD Kab Klaten Tahun 2021-2026*

**2. Revolusi Industri 4.0**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustion chamber).* Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll, yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Pada revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Berbagai penelitian menggambarkan bagaimana Industri 4.0 mewakili pendekatan revolusi industri keempat, di mana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membentuk fondasi infrastruktur untuk teknologi industri inovatif besok.

Industri 4.0 awalnya diperkenalkan pada Pameran Hannover pada 2011 dan diumumkan secara resmi pada 2013 sebagai inisiatif strategis Jerman untuk mengambil peran perintis dalam industri yang saat ini sedang merevolusi sektor manufaktur. Industri 4.0 mewakili trend teknologi otomasi saat ini di industri manufaktur, dan itu terutama mencakup teknologi yang memungkinkan seperti sistem fisik siber *(Cyber Physical System - CPS), Internet of Things (IoT)* dan komputasi Cloud (Hermann, Pentek, dan Otto 2016). Industri 4.0 merepresentasikan evolusi teknologi dari *embedded system ke cyber physical systems.* Dalam Industri 4.0, sistem tertanam, komunikasi mesin-ke-mesin semantik, teknologi IoT dan CPS

mengintegrasikan ruang virtual dengan dunia fisik. Generasi baru dari sistem industri ini hadir, seperti pabrik pintar muncul untuk menghadapi kompleksitas produksi di lingkungan siber (GTAI 2014). Integrasi Industri dan Integrasi Informasi Industri memainkan peran penting. Hari ini, kita berada di puncak Revolusi Industri Keempat di mana dunia produksi dan konektivitas jaringan diintegrasikan melalui IoT dan CPS untuk menjadikan Industri 4.0 kenyataan (GTAI 2014). Industri 4.0 memiliki dampak strategis jangka panjang yang penting pada pengembangan industri global.

Bagi dunia birokrasi, isu Industri 4.0 ini juga harus mendapatkan respon secara baik jika birokrasi tidak mau menjadi artefak di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Cara kerja yang tidak efisien sudah saatnya untuk diakhiri.

Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Itu setidaknya yang tercermin dari peluncuran program Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo awal April 2018. Revolusi Industri 4.0 tak hanya menawarkan sisi positif *("the promises")* tapi juga negatif *("the perils").* Revolusi yang ditopang oleh teknologi-teknologi abad 21 seperti *machine learning, artificial intelligence, internet of things*, hingga 3D printing. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri, merencanakan, dan menyusun strategi di tingkat pusat dan daerah untuk menghadapinya. Untuk bisa mengelola Revolusi Industri 4.0 diperlukan gaya pemerintahan yang kreatif, adaptif, cepat, dan mumpuni dalam mengelola perubahan eksponensial yang dihasilkan oleh Revolusi Industri 4.0. Teknologi pintar sebagai produk revolusi Industri 4.0 harus dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih baik. Desain program sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat baik sosial maupun ekonomi mau tidak mau harus mempertimbangkan produk revolusi industri sebab masyarakat berkembang sejalan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 perlu adanya kolaborasi secara intens dengan seluruh elemen stakeholders (bisnis, akademis, komunitas, masyarakat) dalam menuntun proses transformasi digital di level pemerintah, industri, dan masyarakat secara luas.

### 3. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.




*Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024*

**Gambar 4.2**
**Visi dan Misi Presiden 2020-2024**

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



*Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.*

**1 | Pembangunan SDM**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

**2 | Pembangunan Infrastruktur**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

**3 | Penyederhanaan Regulasi**

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

**4 | Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

**5 | Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024*

**Gambar 4.3**
**Strategi Pencapaian Visi 2045**

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.




*Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024*

**Gambar 4.4**
**7 Agenda Pembangunan Nasional**

Pada sasaran makro pembangunan 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, tentunya dalam pencapaian Nasional tersebut membutuhkan sinergitas dan komitmen antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.




*Keterangan: Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024*
*Sumber : Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024*

**Gambar 4.5**
**Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020-2024**

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Kabupaten Klaten ke depan harusnya selaras dengan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan program dan kegiatan hendaknya mengacu pada isu-isu strategis pembangunan nasional pada periode yang sama. Isu-isu strategis pembangunan dalam RPJMN yang harus dijadikan salah satu acuan pembangunan Kabupaten Klaten 5 tahun ke depan yaitu:

a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai berikut:
   1). Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   2). Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
   3). Pemenuhan layanan dasar;
   4). Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   5). Pengentasan kemiskinan; dan
   6). Peningkatan produktivitas dan daya saing.
b. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa sebagai berikut:
   1). Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
   2). Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia;
   3). Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
   4). Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan;
   5). Belum optimalnya peran keluarga; dan
   6). Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
c. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas sebagai berikut:
   1). Keberlanjutan sumber daya alam;
   2). Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi;
   3). Transformasi struktural berjalan lambat; dan
   4). Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital

d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai berikut:
   1). Infrastruktur Pelayanan Dasar;
   2). Infrastruktur Ekonomi;
   3). Infrastruktur Perkotaan; dan
   4). Energi dan Ketenagalistrikan
e. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
   Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah.
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebagai berikut:
   1). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   2). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
   3). Pembangunan Rendah Karbon
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai berikut:
   1). Konsolidasi Demokrasi;
   2). Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
   3). Penegakan Hukum Nasional;
   4). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
   5). Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kabupaten Klaten termasuk pada wilayah pengembangan Jawa-Bali dan koridor pemeratan Provinsi Jawa Tengah bersama 4 (empat) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Magelang. Kabupaten Klaten akan menerima manfaat dari beberapa program/proyek prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan strategis, meliputi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas;
2. Pengembangan sektor unggulan meliputi kawasan tanaman substitusi impor (tebu), peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya.
3. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, meliputi pengembangan desa terpadu.

Berdasarkan arahan presiden dan agenda pembangunan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**
**Hasil Telaahan Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024**

| Arahan Presiden | Agenda Pembangunan | Implikasi |
|---|---|---|
| • Pembangunan SDM<br>• Pembangunan infrastruktur<br>• Penyederhanaan regulasi<br>• Penyederhanaan birokrasi<br>• Transformasi | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | • Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi<br>• Meningkatkan kesejaheraan masyarakat |
| | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | • Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah |
| | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan | • Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing |

| Arahan Presiden | Agenda Pembangunan | Implikasi |
|---|---|---|
| ekonomi | berdaya saing | • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat<br>• Meningkatkan kesejaheraan masyarakat<br>• Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak |
| | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | • Mengoptimalkan perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat<br>• Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing |
| | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | • Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah<br>• Meningkatkan capaian universal access (100-0-100) |
| | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan<br>• Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana |
| | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | • Mengoptimalkan perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat<br>• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah<br>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik |

*Sumber: Tim Penyusun, 2021*

**4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang**

Arah pengembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Rencana Induk dimaksud menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, Kawasan Bregasmalang, dengan didukung pengembangan Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di dalamnya memuat 270 proyek yang ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2030. Daftar proyek di Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Banjir S. Dengkeng, S. Bengawan Solo
2. Revitalisasi Rowojombor

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dalam rangka mempercepat peningkatan

investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang diharapkan akan berdampak pada perekonomian regional dan nasional.

**5. Penelahaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu:

**"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"**
**Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah:

a. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
b. Penanggulangan Kemiskinan;
c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
d. Kedaulatan pangan dan energi;
e. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
f. Kesenjangan wilayah; dan
g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

**Tabel 4.4**
**Hasil Telaahan Terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| Isu Strategis | Misi | Implikasi |
|---|---|---|
| • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia | • Mengoptimalkan perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat<br>• Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing |
| • Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah | Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota | • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah<br>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik |
| • Penanggulangan | Memperkuat kapasitas | • Mengoptimalkan sektor unggulan dalam |

| Isu Strategis | Misi | Implikasi |
|---|---|---|
| Kemiskinan<br>• Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha<br>• Kesenjangan wilayah | ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran | pertumbuhan ekonomi<br>• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat |
| • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia<br>• Kedaulatan pangan dan energi<br>• Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya<br>• Alam | Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan | • Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing<br>• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat<br>• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat<br>• Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak<br>• Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi<br>• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan<br>• Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana |

*Sumber: Tim Penyusun, 2021*

**6. Isu Pandemi Covid-19**

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19*) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut *World Health Organization (WHO)*, Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2)* yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat Covid-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat.

Pandemi Covid-19 yang telah memicu serangkaian tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara untuk menanggulangi penyebaran Pandemi Covid-19 dan mengurangi kondisi terburuk akibat Pandemi Covid-19, yaitu Kasus Kematian. Pada awal Maret 2020, corona virus telah dikonfirmasi penyebarannya di Indonesia. Pada 11 Maret 2020, ketika jumlah kasus di seluruh dunia mencapai lebih dari 127.000 dan angka kematian telah melewati 4.700 orang, WHO menyatakan wabah global corona virus sebagai Pandemi dan pada bulan April 2020, Pandemi telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia.

Pandemi virus corona (Covid-19) tak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*. Covid-19 berdampak besar bagi ekonomi nasional maupun daerah, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan

penghasilan. Selain itu minat investasi juga akan menurun dengan signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk menyediakan berbagai paket kebijakan, baik untuk mengobati pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif).

Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19. Berbagai himbauan termasuk menganjurkan dan bahkan melarang masyarakat untuk tidak melakukan pulang kampung termasuk dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah telah dilakukan. Anjuran untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga terus digencarkan. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan dengan dasar bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Dampak dari Covid-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Covid-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan *(demand)* maupun sisi penawaran *(supply),* yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disrupsi ekonomi akibat Covid-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, *refocusing* dan realokasi APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *Social Safety Net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibiltas APBN yang memastikan ketersedian anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara.

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat

tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya sangat tergantung dari skenario efektivitas penanganan Covid-19, proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan tergantung pada unsur ketidakpastian atas gangguan di sisi penawaran, pengetatan di pasar keuangan, perubahan pola belanja masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut Pemerintah menyusun dua skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020, yaitu skenario berat dan skenario sangat berat. Dalam skenario-skenario tersebut, Pemerintah berusaha keras agar krisis saat ini tidak menjadi krisis keuangan. Pemerintah menggunakan skenario-skenario tersebut karena perkembangan situasi penyebaran Covid-19 yang sangat cepat serta potensi dampak yang menimbulkan ketidakpastian tinggi dalam perekonomian menyulitkan penentuan *outlook* perekonomian.

Tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian dunia dan domestik saat ini juga tercermin dari beragamnya proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ketidakpastian tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian atas tingkat efektivitas kebijakan pencegahan Covid-19 dan kebijakan ekonomi yang tercermin dari perbedaan skenario yang dipergunakan. Hal ini menyebabkan angka proyeksi menjadi sangat dinamis dan sangat beragam tidak konvergen ke suatu angka tertentu, namun semuanya mengarah kepada pemburukan perekonomian.

Pemerintah mulai menempatkan rencana untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung mata pencaharian masyarakat, Pemerintah Indonesia telah membuat dan memberikan beberapa kebijakan melalui stimulus ekonomi dan program kompensasi untuk menanggulangi dampak-dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Pandemi Covid-19. Meskipun Pemerintah telah memiliki skema perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk, namun data menunjukkan bahwa program yang ada dan jumlah peserta iuran belum mencakup seluruh penduduk dan belum optimalnya nilai manfaat program bansos yang diberikan.

Meskipun Covid-19 diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi, pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban masalah sosial-ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus guna mengantisipasi Pandemi Covid-19 dengan meningkatkan dan memperluas jaring pengaman sosial dinilai tepat. Program bantuan dan perlindungan sosial yang menjadi jangkar dapat menjadi instrumen awal dalam meningkatkan manfaat program, dengan pemerintah secara paralel memperluas cakupan penerima manfaat.

Terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa, disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu *(refocusing),* penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19. Selanjutnya berbagai regulasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 juga diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya:

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
(7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
(8) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
(9) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
(10) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetepan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
(11) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetepan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
(12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
(13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
(14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

(15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
(16) Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
(17) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
(18) Surat Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
(19) Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020;
(20) Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19;
(21) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
(22) Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
(23) Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Berdasarkan hasil survei demografi BPS diikuti sebanyak 87.379 responden, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat Pandemi Covid-19 terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, dan pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun.

(1) Penurunan Pendapatan Masyarakat

Adapun masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 1,8 juta per bulan sebanyak 70,53% masyarakat atau responden mengalami penurunan pendapatan, penghasilan Rp 1,8 juta sampai Rp 3 juta 46,77% pendapatannya mengalami penurunan. Adapula masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta 37,19% pendapatannya mengalami penurunan.

Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 4,8 juta sampai Rp 7,2 juta sebanyak 31,67% mengalami penurunan pendapatan. Dan masyarakat dengan pendapatan yang di atas Rp 7,2 juta, 30,34% nya mengalami penurunan pendapatan.

Survei demografi yang dipaparkan tersebut diikuti sebanyak 87.379 responden, di mana secara rata-rata 35,78% yang masih bekerja mengalami penurunan pendapatan. Dari responden itu pula diketahui sebanyak 56,4% bekerja, 18,34% dirumahkan sementara, 2,52% terkena PHK, dan 22,74% tidak bekerja.

(2) Konsumsi Rumah Tangga Melambat

Hal lain yang membuat angka kemiskinan naik yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB (Produk Domestik

Bruto) melambat. Di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%.

(3) Pariwisata Terpuruk

Pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa Indonesia terbesar terbilang terpuruk. Jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11% dibandingkan Maret 2019.

(4) Harga Bahan Pokok Naik

BPS juga mencatat, faktor lain yang membuat angka kemiskinan meningkat, karena adanya kenaikan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok. Pada periode September 2019-Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami kenaikan. Selama periode September 2019-Maret 2020, beras naik 1,78%, daging ayam ras naik 5,53%, minyak goreng naik 7,06%, telur ayam ras naik 11,1%, dan gula pasir naik 13,35%.

Dampak terbesar dari Pandemi Covid-19 adalah di sektor kesehatan dan perekonomian. Beberapa aspek perekonomian di Jawa Tengah, termasuk kabupaten/kota di wilayahnya, yang terdampak langsung dengan adanya Pandemi Covid-19 antara lain:

a. Dampak ekonomi makro antara lain:
   1). Penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang kehilangan pekerjaan/PHK;
   2). Tingkat pengangguran terbuka meningkat;
   3). Inflasi cenderung meningkat;
   4). Angka kemiskinan meningkat; dan
   5). Kontraksi ekonomi (pertumbuhan melambat, bahkan bisa negatif).
b. Dampak ekonomi mikro antara lain:
   1). Jasa retail kehilangan pasar;
   2). Industri pariwisata, hotel dan rumah makan mengalami penurunan; dan
   3). Jasa transportasi mengalami penurunan.

Adanya Eskalasi Covid-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam di Jawa Tengah maupun kabupaten/kota di wilayahnya harus dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan luar biasa atau *extraordinary*, di antaranya melalui pemberian stimulus dan/atau hibah bagi sektor/pelaku ekonomi yang perlu mendapat prioritas dalam jangka pendek antara lain:

a. Pertanian, peternakan dan perikanan serta rangkaian rantai pasoknya meliputi kredit usaha (kemudahan memperoleh kredit usaha, keringanan bunga, kelonggaran cicilan), ketersediaan input dan jaminan harga produk;
b. Produsen/industri pengolahan bahan makanan dan rantai pasoknya meliputi kredit usaha, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan baku, jaminan harga produk;
c. Menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan atau yang kehilangan pekerjaan/PHK melalui penciptaan kesempatan kerja yang bersifat padat karya dari proyek-proyek pembangunan fisik.

Seiring dengan adanya mitigasi dampak Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, guna memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah, yang didukung dengan meningkatnya produksi dan produktivitas serta kualitas produk di semua sektor. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut perlu adanya arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat.

Dukungan partisipasi desa dalam mencegah Covid-19 dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari dana desa perlu ditingkatkan. Demikian juga ragam model kegiatannya, baik kegiatan preventif maupun kegiatan kekaryaan. Beberapa kegiatan yang direkomendasikan dalam upaya pencegahan di antaranya: (1) Mendukung kegiatan sosialisasi/promotif; (2) Membuat data penduduk yang datang/kembali ke desa; (3) Memantau pergerakan masyarakat yang terindikasi sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) berkoordinasi dengan puskemas atau dinas kesehatan; (4) Mengidentifikasi fasilitas umum yang layak dan dapat dijadikan ruang isolasi (sementara), seperti balai pertemuan, masjid/mushala, ruangan kantor desa, dan sekolah; (5) Melakukan pemantauan pergerakan penduduk desa dengan mendata keluar-masuknya warga atau pendatang/tamu; (6) Mendukung peningkatan kapasitas melalui pelatihan bidan desa atau kader kesehatan desa agar mampu melakukan penanganan awal penduduk desa yang terduga terpapar Covid-19.

Prioritas kegiatan setidaknya memenuhi unsur pencegahan dan penanganan Covid-19, yang meliputi: (1) Pemberdayaan masyarakat, seperti pencegahan Covid-19 melalui disinfeksi lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan permukiman, dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita); (2) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan kewenangan desa, seperti penyediaan fasilitas umum sebagai ruang isolasi dengan mengikuti persyaratan teknis dari dinas kesehatan, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, perbaikan aliran sungai dan irigasi, serta pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa; (3) Pemanfaatan lahan untuk menjaga kebutuhan pangan, termasuk di kawasan hutan, seperti untuk pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi pada tahun 2020, serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka arah dan strategi kebijakan fiskal 2021 merupakan bagian yang tidak lepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan jangka pendek tetap dijaga konsistensinya dengan arah kebijakan jangka menengah dan panjang. Selaras dengan hal tersebut maka tahun 2021 merupakan waktu untuk melakukan upaya pemulihan *(recovery),* sekaligus menjadi momentum yang baik untuk melakukan reformasi sektoral maupun fiskal. Oleh karena itu tema

kebijakan fiskal di tahun 2021 diarahkan pada upaya "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi".

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga berdampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, aktivitas ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Indonesia sedang berjuang untuk mendorong percepatan penanganan Covid-19 dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran dan bertambahnya korban jiwa. Pada saat yang sama, Pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi dampak sosial ekonomi secara besar-besaran untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan agar dapat menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya serta memberikan dukungan terhadap dunia usaha untuk mencegah kebangkrutan dan PHK masal. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca Pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai Visi Indonesia Maju 2045, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Pemulihan Sosial Ekonomi

Pemulihan sosial ekonomi dilakukan dengan berbagai langkah stimulus ekonomi baik melalui jalur konsumsi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan maupun stimulus dukungan terhadap dunia usaha. Stimulus dunia usaha diharapkan dapat membantu aktivitas produksi untuk tidak terdampak secara permanen. Ketika Pandemi Covid-19 berakhir, aktivitas produksi diharapkan dapat kembali pulih sesuai dengan kapasitas normalnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, untuk merespon Pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan kebijakan *countercyclical* untuk percepatan penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar respon kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 dengan dukungan tambahan anggaran di bidang kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program jaring pengaman sosial.

Di samping itu, untuk memitigasi pemburukan di berbagai sektor ekonomi yang terdampak, Pemerintah juga memberikan dukungan stimulus untuk dunia usaha diberikan dalam beberapa menu baik bagi usaha ultra-mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun bagi Industri dan BUMN. Pemulihan ekonomi nasional diterapkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam.

(2) Reformasi Kesehatan

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi reformasi bidang kesehatan untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat sehingga siap menghadapi kemungkinan keadaan darurat munculnya pandemi di masa yang akan datang.

Pertama, dalam jangka pendek, Pemerintah akan fokus pada percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan melalui peningkatan secara signifikan pendanaan pengadaan dan perluasan fasilitas kesehatan (faskes), peralatan kesehatan (alkes), dan tenaga kesehatan (nakes). Selain itu, upaya pemerataan distribusi faskes dan nakes khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan juga terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini hanya dapat terlaksana dengan terbangunnya koordinasi yang kuat antara Pemerintah, Pemda, BUMN/BUMD, dan swasta.

Kedua, komitmen untuk membangun SDM yang unggul akan terus dilanjutkan. Percepatan penurunan stunting melalui konvergensi program antar K/L serta sinergi lintas sektoral terus dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting 19% di tahun 2024. Cakupan penurunan stunting diperluas menjadi 360 kabupaten/kota di tahun 2021, dari sebelumnya 260 kabupaten/kota di tahun 2020. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat antara lain melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Melalui program ini diharapkan dapat membentuk budaya dan perilaku sehat di masyarakat sehingga risiko terkena penyakit baik menular dan tidak menular dapat diminimalkan dan kualitas kesehatan masyarakat meningkat.

Ketiga, perlu penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemda. Pemda memegang peranan yang penting dalam reformasi sistem kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk, itu perlu adanya sinergi dan koordinasi yang kuat dalam perencanaan penganggaran antara Pemerintah (Bappenas dan Kemenkeu) serta Pemda untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran program dengan target pembangunan yang telah ditetapkan *(money follow program).* Koordinasi Pemerintah dan Pemda diperlukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan faskes dan nakes yang memadai, serta pembiayaan JKN, serta penguatan program-program yang bersifat preventif.

Keempat, Pemerintah perlu membangun kerangka dasar sistem *health security preparedness* (HSP) untuk menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat kesehatan di masa depan. Pemerintah menyadari bahwa HSP dapat membantu kecepatan dan ketepatan implementasi langkah-langkah tanggap darurat kesehatan di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan HSP perlu dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran terutama terkait penguatan kesiapan sektor kesehatan dalam pencegahan, deteksi dan respon atas berbagai ancaman terhadap kesehatan publik sesuai dengan standar. Upaya ini juga perlu disertai dengan penguatan Kerangka Kerja Kedaruratan Kesehatan (*health emergency framework*). Selain itu, kerangka dasar sistem HSP juga mencakup sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dari pusat hingga unit gugus tugas terkecil di daerah, untuk menjamin kejelasan dan kekuratan data dan informasi

kesehatan dalam rangka memudahkan langkah-langkah penanganan dan pengendalian keadaan darurat kesehatan di masa datang.

Kelima, reformasi program JKN menjadi kunci penting untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). Konsep UHC tidak sebatas menjadikan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta program JKN tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Reformasi JKN diarahkan untuk membangun JKN yang sehat dan berkesinambungan melalui perbaikan kondisi DJS Kesehatan, yang selama ini mengalami defisit, khususnya melalui upaya penyesuaian iuran JKN yang proporsional dan berkeadilan. Untuk itu penetapan iuran JKN dilakukan sesuai dengan standar praktik aktuaria dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar peserta, inflasi, kebutuhan jaminan kesehatan dan keseinambungan pendanaan JKN. Selain itu, penguatan sinergi PBPU kelas III perlu dilakukan, dibarengi dengan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk pembiayaan iuran PBI JKN dan subsidi iuran kelompok meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran oleh Peserta. Lebih lanjut, peningkatan ketepatan sasaran PBI JKN juga terus dilakukan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

(3) Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi

Program perlindungan sosial memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Program perlindungan sosial pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai risiko kemunduran sosial sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Program perlindungan sosial juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung melalui penguatan konsumsi masyarakat maupun secara tak langsung melelui penguatan SDM yang berdampak pada produktivitas ekonomi. Program perlindungan sosial juga merupakan bentuk kebijakan afirmatif Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial.

Konsep dasar perlindungan sosial mencakup tiga hal, yaitu bantuan sosial (Bansos) dan jaminan sosial (Jamsos) serta jaring pengaman sosial *(social safety net).* Perbedaan antara bansos dan jamsos terletak pada sumber dana dan target dari program perlindungan sosial. Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan *(Bottom 40)* dengan sumber dana dari Pemerintah *(Non-Contributory System)*. Program bansos di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah pusat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta asistensi untuk penduduk usia lanjut dan disabilitas.

Sedangkan program jamsos berfokus pada seluruh penduduk atau pekerja dengan sumber dana dari individu atau pemberi kerja *(Contributory System).* Program Jamsos di Indonesia mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan

Program Jaminan Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Pensiun) seluruh pekerja yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, Jaminan Ketenagakerjaan untuk PNS dan TNI/Polri masih dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Sementara program jaring pengaman sosial esensinya adalah program yang disiapkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kemunduran sosial akibat goncangan perekonomian atau bencana.

Reformasi kebijakan perlindungan sosial dengan mengintegrasikan dan mensinergikan program. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektif yang dilakukan secara betahap.

Pertama, integrasi program perlindungan sosial dilakukan pada program PKH dan PIP karena keduanya memiliki sasaran yang sama, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi masalah komplementaritas. Untuk itu, akan lebih efisien dengan integrasi kedua program ini.

Kedua, integrasi secara bertahap Bansos Kartu Sembako yang lebih berbasis pada target penerima *(beneficiaries)* dengan program subsidi energi (listrik dan LPG) yang berbasis komoditas untuk meningkatkan efektivitasnya baik dalam meminimalisir *inclusion error* maupun dalam pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk itu, proses integrasi dapat dilakukan dengan menambah cakupan jenis barang yang dapat dibeli dari kartu sembako.

Ketiga, meningkatkan efektivitas penurunan tingkat kemiskinan kiranya perlu mereview target atau besaran bantuan secara berkala pada PKH, Kartu Sembako, serta PIP.

Keempat, sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan juga perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan pendapatan ketika penerima bansos sudah dapat naik kelas pendapatan. Termasuk program Kartu Pra-Kerja yang merupakan program *reskilling* dan *upskilling* yang dibarengi dengan pemberian insentif kas. Saat ini, program tersebut tidak masuk dalam skema perlindungan sosial, namun ke depannya program ini perlu diintegrasikan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mulai diprioritas pada pekerja formal atau informal dari lapisan penduduk yang termiskin. Program ini juga dapat menjadi salah satu solusi ketika ada resesi ekonomi yang mengakibatkan banyaknya PHK.

Kelima, Penyempurnaan program perlindungan sosial juga dapat dilakukan dengan memisahkan program bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas dari PKH. Berdasarkan tujuan program, PKH diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas modal manusia pada anak dalam keluarga. Selain itu, adanya kesulitan penduduk lansia dan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan ketika ingin mengambil bantuan juga membuat program bantuan akan lebih baik dibuat terpisah dengan PKH. Ke depannya, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

dapat diperkuat sebagai dampak dari kondisionalitas penduduk lansia dan penyandang disabilitas yang dikeluarkan dari PKH.

Keenam, di sisi jaminan sosial kesehatan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong efektivitas program JKN antara lain melalui penyesuaian iuran JKN termasuk iuran PBI, pemberian bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP oleh Pemerintah dan Pemda. Perbaikan data kepesertaan dilakukan dengan pemutakhiran DTKS untuk penetapan PBI yang tepat saran dan pertukaran data kepesertaan antara penyelenggara/pengelola program jaminan sosial. Selain itu, perlu mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan JKN antara lain melalui kebijakan manfaat layanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar yang diterapkan secara bertahap serta mendorong pencegahan/pengendalian *fraud*. Sedangkan pada jaminan ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja miskin dan rentan, dapat diberikan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan rentan untuk program Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu, untuk antisipasi penuaan populasi, dapat diberikan tambahan kontribusi Jaminan Hari Tua (JHT) atau *Matching-Defined Contribution (MDC).* Skema ini memungkinkan pemerintah menambahkan kontribusi yang nilainya sama dengan nilai kontribusi peserta ke dalam akun peserta sebagai insentif bagi peserta.

Ketujuh, mendorong program Jaring Pengaman Sosial *(Social Safety Net)* yang dapat berfungsi sebagai komponen *automatic stabilizer* kebijakan stimulus dimana akan secara otomatis berlaku jika terjadi gejolak ekonomi yang cukup siginifikan sebagai pemicunya (*trigger).* Jaring pengaman sosial yang didesain bekerja secara otomatis memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni *timely* (tepat waktu karena implementasinya segera, tanpa ada *time lag*); *targeted* (menyasar pada targetnya, kelompok miskin dan rentan, sehingga berdampak langsung pada konsumsi, *hand to mouth*); dan *temporary* (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan pulihnya ekonomi).

(4) Reformasi Pendidikan

Dalam menjalankan pembelajaran holistik dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul, Pemerintah menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam *platform* teknologi yang holistik. Diharapkan ke depannya pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh, yaitu:

Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Pemerintah akan mengembangkan *marketplace* Bantuan Operasional Sekolah (BOS) online. Marketplace BOS online tersebut bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)

untuk menghasilkan generasi guru baru. Pemerintah juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.

Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.

Keempat, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*, dan *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)*. Pemerintah juga akan menggunakan Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik.

Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk urusan pendidikan di daerah. Pemerintah juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis *mobile* dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan *(education technology)* kelas dunia, serta menggerakan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.

(5) Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen utama dalam implementasi desentralisasi fiskal, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta untuk mendukung capaian prioritas nasional.

Dalam rangka memperkuat *quality control* atas pelaksanaan TKDD pada masa mendatang, maka perlu dilakukan reformasi TKDD yang secara konsisten juga diikuti dengan reformasi APBD. Secara umum, reformasi TKDD akan diarahkan untuk:

(i) Mendorong upaya peningkatan *quality control* atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari TKDD;

(ii) Mendorong Pemda dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, antara lain melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja, dan pemberian dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi;

*(iii)* Sinergi pendanaan TKDD dengan pendanaan yang bersumber dari K/L dalam mendukung pembangunan *human capital* (Pendidikan dan Kesehatan), antara lain melalui penguatan *mandatory spending* DTU untuk Pendidikan dan Kesehatan, dukungan untuk program merdeka belajar, peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan penanganan *stunting;*

(iv) Percepatan penyediaan infrastruktur di daerah, antara lain melalui pembiayaan kreatif dan *integrated funding* dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan; serta
(v) Mendorong *redesain* pengelolaan Dana Otonomi Khusus dengan memperhatikan perbaikan di sisi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan akuntabilitas, serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, reformasi pengelolaan APBD dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah, akan dilakukan dengan:
(i) Mengimplementasikan secara konsisten Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima) komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honarorium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pengaturan ini diharapkan akan menghasilkan efisiensi sekitar 20-30%;
(ii) Perbaikan dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah atau tunjangan kinerja daerah. Hal ini selain guna meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antardaerah yang dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antardaerah;
(iii) Perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah melalui penyusunan Bagan Akun Standar. Hal ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran APBD, juga untuk memudahkan sinergi perencanaan antara belanja pusat dan daerah karena akan menggunakan nomenklatur yang relatif sama, termasuk mempermudah penyusunan laporan keuangan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(6) Reformasi Penganggaran *(Zero Based Budgeting)*

Secara nominal, belanja negara terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan *fiscal buffer* untuk upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pasca berakhirnya era *commodity boom*, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendanaan program-progam prioritas yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran *(budgeting).*

Tren menurunnya kinerja penerimaan negara yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah untuk

melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil *(result based)* serta penguatan kapasitas kebijakan *countercyclical* baik melalui penguatan *automatic stabilizer* maupun pencadangan belanja *anticipatory*.

Reformasi pengelolaan belanja negara perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Pada sisi hulu, pemerintah harus melakukan efisiensi pada belanja kebutuhan dasar, memfokuskan belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pada sisi hilir, pemantauan dan evaluasi harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil *(result based execution)*. Ke depannya, belanja *anticipatory* juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi dan mitigasi dampak yang timbul apabila terjadi gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar ketika adanya risiko perekonomian (krisis global, bencana alam atau wabah penyakit) dapat lebih cepat ditangani.

Reformasi pengelolaan belanja negara dapat dilakukan melalui kerangka *zero-based budgeting*, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus memulai dari awal *(zero basis)* tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya *(incremental basis).*

Pengalokasian anggaran melalui konsep *zero-based budgeting* dapat diusulkan menjadi tiga kelompok jenis belanja, yaitu *basic spending, intervention (priority) spending dan anticipatory spending.*

(i) *Basic spending* pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap K/L dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada *basic spending*, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/L yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran basic spending.

(ii) *Intervention spending* merupakan belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada BA BUN dan pengalokasikan ke masing-masing K/L serta evaluasinya akan dilakukan oleh Komite Penilai *(reviewer committee)* yang beranggotakan Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta Bappenas. Alokasi belanja internvensi berdasarkan proposal dari K/L yang berisikan rincian anggaran, target *output* dan *outcome*, rencana aksi, indikator baku, serta manajemen risiko. Proses penganggaran menggunakan *Performance Based Budgeting*, yaitu Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara K/L dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Sedangkan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan *Result Based Execution*, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.

(iii) *Anticipatory Spending,* yakni belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi,

bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan *Anticipatory Spending* harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi *Anticipatory Spending* dapat berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat.

## 7. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Klaten, tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2025) di berbagai bidang/aspek/sektor pembangunan.

### a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas dan mobilitas penduduk. Paradigma pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia difokuskan dalam rangka pemberdayaan penduduk guna peningkatan, kemajuan, kebebasan dan kapabilitas, pemberdayaan masyarakat melalui investasi di bidang pendidikan.

Di bidang ketenagakerjaan, tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. Bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara maksimal.

Pembangunan di bidang kebudayaan, tantangan yang dihadapi antara lain menipisnya nilai moral, budaya dan agama, sebagai dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta ekses dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi. Mengenai jumlah penduduk miskin yang masih relatif banyak, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan pemenuhan hak-hak dasarnya dan jiwa kewirausahaan yang masih perlu ditingkatkan terus.

### b. Ekonomi

Sumber daya alam daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai *core competence* daerah Kabupaten Klaten adalah kegiatan pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk itu pemerintah Kabupaten perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha swasta dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah kabupaten perlu menyusun strategi pengembangan investasi daerah dengan menyiapkan sarana promosi, penyiapan gelar potensi sumber daya alam unggulan dalam rangka meningkatkan daya tarik daerah bagi investor. Perlu juga

dilakukan perencanaan yang berkesinambungan tentang reklamasi lahan galian tambang golongan C.

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak di antara dua kota besar, yaitu Yogyakarta dan Surakarta yang menjadikan wilayah ini sebagai jalur utama Surakarta-Yogyakarta. Selain itu batas-batas wilayah Kabupaten ini, seperti Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman merupakan wilayah-wilayah yang memiliki obyek wisata andalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada minat wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Klaten, yang didukung oleh kemudahan sarana transportasi yang cukup memadai. Bahkan untuk sampai ke wilayah obyek wisata pun saat ini sangat mudah pencapaiannya karena sudah ditunjang dengan keberadaan sarana transportasi umum hingga ke lokasi yang dikehendaki.

Pembangunan ekonomi di Klaten sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja secara memadai. Oleh karena itu, tantangan kedepan (20 tahun kedepan) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita serta pemerataan sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional atau internasional. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun standar mutu internasional.

c. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Tantangan yang dihadapi dalam bidang IPTEK adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan serta tuntutan penyediaan pemerintahan yang baik.

Untuk itu, tantangan ke depan diperlukan aparatur pemerintah daerah yang maju, mandiri, cerdas, sejahtera dan lestari, dengan melibatkan secara intensif para pelaku penelitian baik dari perguruan tinggi dan organisasi profesi lainya.

**d. Sarana dan Prasarana**

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana dan prasarana saat ini untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat pada masa mendatang.

Perkembangan daerah Klaten ditunjang ketersediaan infrastruktur, yaitu jalan dan jembatan, tersedianya jenis transportasi yang menghubungkan antar Kota Kecamatan, tempat wisata dan tempat-tempat yang strategis. Di samping itu, dengan ditunjang angkutan antar Kota Kecamatan dan antar kota yang lain serta angkutan pedesaan yang cukup banyak, maka tantangan ke depan yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi daerah ke depan yang lebih dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan.

Tantangan dalam bidang perumahan dan permukiman yaitu ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di daerah pedesaan, yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal.

Tantangan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat. Untuk itu 20 tahun kedepan perlu dibangun sistem irigasi yang baik untuk mendukung struktur pertanian menuju kemandirian pangan di Kabupaten Klaten.

**e. Politik dan Tata Pemerintahan**

Perkembangan dalam bidang politik dan tata Pemerintahan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ke depan bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah meningkatkan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.

Tantangan dalam pembangunan perdesaaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga memberikan akses dan saran-usul bagi masyarakat pedesaan dalam proses Musrenbangda dalam rangka penyusunan berbagai program pembangunan daerah.

**f. Keamanan dan Ketertiban**

Dengan adanya Globalisasi dan kemajuan Teknologi Informasi yang semakin canggih akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif dalam rangka mewujudkan kemandirian di bidang keamanan dan SISKAMLING bersama.

**g. Hukum dan Aparatur**

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM.

Tantangan di bidang aparatur adalah bagaimana menciptakan aparatur Pemerintah Daerah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel dan profesional untuk memenuhi kinerja pelayanan publik yang prima.

**h. Wilayah dan Tata ruang**

Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas dan penurunan kualitas sumber daya air. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stakeholder. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan di bidang pertanahan bagaimana meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

**i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang menunjang kehidupan manusia adalah lingkungan yang terbebas dari pencemaran, baik air, udara maupun zat padat. Pencemaran–pencemaran tersebut telah melebihi ambang batas, terutama yang sudah tidak diperbolehkan akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainya. Pada tahun 2004 dan 2005 kasus pencemaran air masih terjadi, di mana pada tahun 2004 ada 3 kasus pencemaran dan pada tahun 2005 turun menjadi 2 kasus saja. Untuk tahun 2005 ada 1 kasus pencemaran air, tahun 2006 meningkat menjadi 2 kasus, dan tahun 2007 terjadi 3 kasus. Untuk kasus pencemaran zat padat selama tiga tahun tidak pernah ditemukan.

Untuk mengendalikan pencemaran harus terjalin kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi kebersihan dan kerapian lingkungan. Kedua, masyarakat harus lebih waspada terhadap gejala potensi pencemaran di lingkunganya. Ketiga, pemerintah harus pro aktif memberikan penyuluhan tentang bahaya pencemaran dan cara-cara mengendalikanya, di samping perlu memberikan sanksi bagi perorangan yang membuat sumber pencemaran.

## 8. Isu Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten

Sistem perkotaan wilayah merupakan sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota-kota dan hierarki fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah. Penetapan rencana pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Klaten harus mengacu pada produk tata ruang di atasnya, dalam hal ini RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Dalam Lampiran II (Sistem Perkotaan Nasional) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Klaten ditetapkan sebagai PKW (II/C/1). Artinya bahwa wilayah Klaten berada dalam tahapan pengembangan dengan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional melalui pengembangan atau peningkatan fungsi.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Klaten termasuk dalam RTRW Kawasan Strategis Subosukowonostraten sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala regional atau provinsi. Suatu PKW harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal meliputi lebih dari satu kabupaten, seperti misalnya pusat pendidikan berskala provinsi atau nasional, baik negeri ataupun swasta, atau juga, atau juga kegiatan industri manufaktur dan perdagangan yang aktivitasnya mencakup skala Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Klaten termasuk ke dalam pengembangan kerja sama strategis daerah kabupaten yang tergabung dalam regional Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Secara geografis, ketujuh wilayah kabupaten tersebut memiliki keterkaitan erat dalam hal jenis kondisi dan struktur geologis.

Kabupaten Klaten merupakan lumbung padi Jawa Tengah serta termasuk dalam penyokong ketahanan pangan nasional. Berdasar keterkaitan antar ruang, Kawasan Andalan Subosukawonosraten dengan PKN Surakarta, PKW Boyolali, dan PKW Klaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Bandar Udara Adi Sumarmo di Surakarta. Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai *hinterland* dari Kota Surakarta serta Yogyakarta memberikan pengaruh dalam penyediaan pangan termasuk pendistribusian hasil pertanian, perdagangan dan jasa sepanjang koridor DI Yogyakarta – Surakarta serta pariwisata Kawasan Strategis Nasional (KSN) Candi Prambanan.

Dari segi posisi dalam sistem pergerakan provinsi maupun nasional, Kabupaten Klaten dilewati jalur strategis penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Surakarta, namun Kabupaten Klaten saat ini bukan sebagai simpul (hanya dilewati saja oleh jalur antar provinsi) serta hirarki pelayanan Kabupaten Klaten yang lebih rendah jika dibandingkan Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan pengembangan potensi kawasan kurang optimal. Sebagai kabupaten yang dalam tahap berkembang serta masih memiliki potensi lahan yang cukup luas, Kabupaten Klaten menjadi tujuan baru untuk pengembangan permukiman, industri pengolahan dan pariwisata yang sekaligus menangkap

peluang *demand* dari kabupaten sekitar. Dampak dari pengembangan ini adalah munculnya simpul–simpul aktivitas baru yang mendorong perkembangan pemanfaatan ruang ke depannya.

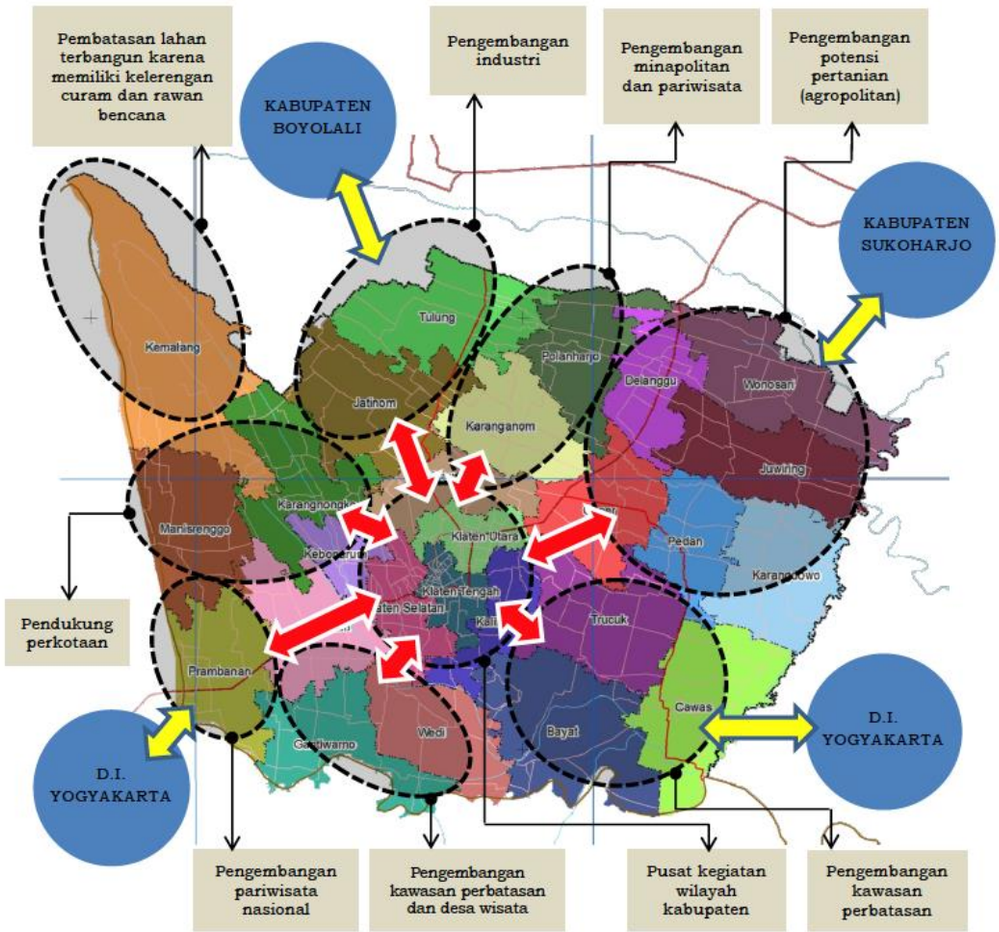
Wilayah Pertumbuhan Strategis (WPS) 10 berada di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang di dalamnya mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten berperan sebagai simpul pertanian dengan konsep mewujudkan Wilayah Pengembangan Strategis Yogyakarta - Solo - Semarang (WPS 10) sebagai pusat industri dan pariwisata, serta kawasan pertanian yang unggul, berkarakter, dan resilient. Berdasar konsep Kawasan Pertumbuhan Strategis, Kabupaten Klaten termasuk dalam KPS 3 (Surakarta - Klaten - Boyolali) dengan pengembangan kegiatan pertanian, pariwisata, industri pengolahan, dan perkotaan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten berdasarkan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata”

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, serta penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten.

Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten disusun dengan memadukan: (1) Konsep pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) Konsep pengembangan wilayah terpadu; (3) Konsep pengembangan ekonomi lokal; (4) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya; dan (5) Konsep pengembangan wilayah berbasis klaster.

Pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis potensi sumber daya lokal yang teraglomerasi dengan wilayah sekitarnya, sehingga antara satu kecamatan dengan kecamatan lain saling mendorong pertumbuhan wilayah, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut.




**Gambar 4.6**
**Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten**

## 9. Isu Strategis RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.




**Gambar 4.7**
**Penentuan Isu Strategis Kabupaten Klaten**

Isu strategis pembangunan dapat dipengaruhi oleh isu strategis di tingkat internasional, nasional dan daerah. Beberapa isu strategis di tingkat internasional dan nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**
**Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Internasional dan Nasional**

| No | Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| 1 | Internasional | a. Pemulihan perekonomian global<br>b. Krisis kesehatan<br>c. Stabilitas politik global yang dinamis<br>d. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara (globalisasi)<br>e. Pencapaian SDGs di tahun 2030<br>f. Industri 4.0<br>g. Perubahan iklim | • Potensi ekonomi Kemajuan teknologi<br>• SDM |
| 2 | Nasional | a. kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama.<br>b. kebijakan pembangunan nasional di Jawa Tengah (proyek strategis nasional) antara lain Jalan tol Solo-Yogyakarta, KSN Prambanan, KSN Taman Nasional Gunung Merapi, Rawa Jombor<br>c. Pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan akibat Pandemi Covid-19<br>d. Ketahanan pangan<br>e. Perubahan iklim dan mitigasi bencana | • skenario penanganan Pandemi Covid-19,<br>• produktivitas daya saing dan iklim investasi.<br>• SDM<br>• SDA dan LH |

*Sumber: Penyusun, 2021*

Isu strategis pembangunan di tingkat daerah yang teridentifikasi dari berbagai dokumen kajian di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.6**
**Perumusan Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Klaten**

| RPJMN Tahun 2020-2024 | RPJM Prov Jateng Tahun 2018-2023 | Pandemi Covid-19 | RPJPD Kab. Klaten Tahun 2005-2025 | Revisi RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 | SDGs (KLHS RPJMD) Tahun 2021-2026 | RPJMD Kab. Klaten Tahun 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.<br>2. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa<br>3. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas<br>4. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar<br>5. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan<br>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim<br>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM<br>2. Penanggulangan Kemiskinan<br>3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha<br>4. Kedaulatan pangan dan energi<br>5. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA<br>6. Kesenjangan wilayah<br>7. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA<br>8. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. | 1. Pemulihan Sosial Ekonomi<br>2. Reformasi Kesehatan<br>3. Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi<br>4. Reformasi Pendidikan<br>5. Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)<br>6. Reformasi Penganggaran (*Zero Based Budgeting*) | 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama<br>2. Ekonomi<br>3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>4. Sarana dan Prasarana<br>5. Politik dan Tata Pemerintahan<br>6. Keamanan dan Ketertiban<br>7. Hukum dan Aparatur<br>8. Wilayah dan Tata ruang<br>9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 1. Perkembangan Koridor Jalan Surakarta-Yogyakarta<br>2. Perkembangan Kawasan Prambanan<br>3. Perkembangan Kawasan Pedan<br>4. Perkembangan Kawasan Industri<br>5. Pengembangan Kawasan Permukiman<br>6. Konversi Lahan Produktif Dan Urban Sprawl<br>7. Pembangunan jalan tol Solo-Jogja | 1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat.<br>2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana<br>3. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).<br>4. Persentase sampah perkotaan yang tertangani<br>5. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | 1. Kesejahteraan dan kualitas hidup<br>2. Infrastruktur Pengembangan wilayah, dan Antisipasi Dampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta<br>3. Kondusivitas wilayah<br>4. Tata kelola pemerintahan, Klaten *Smart City*, dan Inovasi Daerah<br>5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan<br>6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana |

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup**

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup adalah pengurangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang semakin menambah jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Oleh sebab itu pada tahun awal RPJMD akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk pemulihan kasus penyakit menular maupun tidak menular akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan sarana/fasilitas kesehatan, penyediaan obat dan sarana pendukung medis, ketersediaan tenaga medis, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, hingga pengelolaan terhadap limbah medis yang semakin meningkat akibat Pandemi Covid-19.

Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatif siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan. Harapannya, akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, sehingga memiliki jiwa kemandiriaan yang tinggi.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

**2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP), dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta dan**

Infrastruktur dan konektivitas wilayah adalah pengelompokan isu permasalahan yang berasal dari permasalahan terkait pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

Infrastruktur antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan pelayanan air minum aman dan berkelanjutan, sanitasi sehat, pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan limbah industri dan limbah B3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, konektifitas antar wilayah, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan peningkatan ketersediaan dan kualitas air minum,

sanitasi, sampah dan limbah akan meningkatkan kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan energi baru terbarukan juga menjadi tujuan penyediaan jaringan energi.

Permasalahan infrastruktur dan konektivitas juga terkait dengan penyediaan sarana hunian dan pendukungnya, bagaimana menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman. Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah yang sudah disusun juga menjadi salah satu permasalahan terkait dengan perwujudan infrastruktur dan rencana pola ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan.

Isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah dan selatan. Diharapkan dengan adanya rencana struktur ruang kabupaten dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan memeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Sedangkan dengan adanya rencana pola ruang akan dapat mengarahkan lokasi pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) merupakan program super prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke 2 (dua), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur dan sekitarnya (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat), dan telah disusun perencanaan secara terpadu berupa Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) dan telah dibuatnya rencana *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) atau Program Pembangunan Pengembangan Pariwisata yang Berintegrasi dan Berkelanjutan (BP3B) dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya rencana pengembangan program tersebut perlu adanya kerjasama yang terpadu dari berbagai sektor baik infrastruktur, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, sosial, budaya, jasa, Bumdes dan lain-lain, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki dan melibatkan masyarakat. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara dan menjadi daerah tujuan wisata yang bukan hanya sebagai daerah ampiran, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal serta dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya sehingga investasi dapat meningkat dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Sebagai daerah penyangga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yaitu wilayah kecamatan Prambanan meliputi Desa Bugisan, Kebondalem Kidul, Kebondalem Lor, Pereng, Kokosan, Sengon, Taji, Kemudo dan Desa Tlogo dengan potensi utama obyek wisata Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Candi Sojiwan.

Sebagai tarikan atau kawasan strategi pendukung untuk menghidupkan kawasan strategi Solo-Sangiran, untuk Wilayah Tengah yaitu Jogonalan dan Kebonarum dan Ngawen dengan potensi wisata Heritage PG. Gondang Baru dan Agrowisata. Untuk Wilayah Timur yaitu Kecamatan Wedi, Gantiwarno, Bayat, Cawas dan Juwiring dengan potensi wisata Wisata Kerajinan (Keramik), Wisata Budaya (Lurik dan Batik) dan Wisata Agro (Tembakau). Wilayah Utara meliputi Kecamatan Karanganom, Jatinom, Polanharjo, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang, sebagai tarikan/kawasan pendukung untuk menghidupkan kawasan strategis Merapi - Merbabu dengan potensi wisata Wisata Air dan Agrowisata (Agropolitan dan Minapolitan).

Posisi KSPN Prambanan dan sekitarnya yang terletak dalam kawasan Joglosemarkerto sehingga diperlukan adanya aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas yang mampu mendukung pengembangan kawasan wisata Joglosemarkerto. Aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas menjadi kunci di dalam pengembangan KSPN di Jawa Tengah.

Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten selain pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya, antara lain KSN Merapi dan sekitarnya, *Geo Heritage* Bayat dan Rawa Jombor, agropolitan dan minapolitan. Kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dunia oleh *UNESCO* yang termuat dalam dokumen *Nomination File World Heritage List* No.C-642 tahun 1991. Melihat urgensi kawasan tersebut, PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya.

Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten menetapkan Kecamatan Prambanan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional. Dengan penetapan Kecamatan Prambanan menjadi PKL tentunya dimaksudkan agar Kecamatan Prambanan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten yang melayani aktivitas skala regional terutama wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya. Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Prambanan sebenarnya sudah sesuai dengan rumusan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Saat ini Kecamatan Prambanan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten. Berbagai fasilitas dengan skala pelayanan regional juga telah berkembang. Selain itu, banyaknya investasi yang akan masuk di Kecamatan Prambanan juga akan dapat memicu pertumbuhan kawasan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW.

Sesuai arahan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Solo (II/6) yang melalui wilayah Kecamatan Polanharjo, Karanganom, Ngawen, Kebonarum, dan Prambanan.

Jalan tol Solo-Yogyakarta membentang dari wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman, DIY di sebelah barat hingga ke Kecamatan Banyudono Boyolali di sebelah timur. Di bagian timur, jalan tol akan tersambung di Simpang Susun Colomadu dan akan tersambung ke Jalan Tol

Semarang–Solo dan Jalan Tol Solo-Ngawi. Sedangkan di barat, jalan tol akan terhubung ke Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi bagian Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Tol ini dibangun melayang *(elevated)* di sepanjang Ring Road Utara Yogyakarta, kemudian berlanjut sepanjang Selokan Mataram hingga sampai ke simpang susun di daerah Maguwoharjo.

Dari simpang susun Purwomartani, jalan ini berbelok ke utara lalu timur laut menuju wilayah Kabupaten Klaten di sekitar perbatasan Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Manisrenggo. Dari sana jalan tol melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Jogonalan, Karangnongko, Kebonarum, Ngawen, Karanganom, Klaten Utara, Ceper, Polanharjo dan Delanggu. Kemudian jalan tol melewati wilayah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit. *Exit tol* yang melalui Kabupaten Klaten berada di Desa Kuncen Kecamatan Ceper; Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen; Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.

Dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta akan berdampak pada perubahan pola ruang pada lokasi yang akan dijadikan jalur jalan tol dan di sekitar exit tol. Di mana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377,5 hektare. Inlet-outlet jalan tol di Kabupaten Klaten melalui:

- Desa Kuncen, Kecamatan Ceper;
- Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen;
- Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan
- Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.




*Sumber: Revisi RTRW Kab Klaten, 2020*

**Gambar 4.8**
**Rencana Jalan Tol Solo-Yogya**

**3. Kondusivitas Wilayah**

Permasalahan terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan, di samping perlu adanya personil untuk pelaksanaan penertiban, pengawasan dan penegakan perda.

Kondusivitas wilayah juga terkait dengan permasalahan nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama yang juga mempengaruhi kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya dan kehidupan beragama menjadi bagian penting dalam pembangunan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten dengan meningkatkan komunikasi antar masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor perwujudan kondusivitas wilayah, sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

**4. Tata Kelola Pemerintahan, Klaten *Smart City*, dan Inovasi Daerah**

Isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja, penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi. Klaten *Smart City* berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan informatika, persandian, kearsipan dan pelayanan umum. Perwujudan Klaten *Smart City* bertujuan untuk membangun keterbukaan data dan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membangun masyarakat yang cerdas dan tanggap terhadap globalisasi.

Kelitbangan dan inovasi adalah pengelompokan permasalahan terkait dengan pelaksanaan riset, penelitian, inovasi dan kreativitas masyarakat. Pada saat ini inovasi dan kreativitas menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan Klaten *Smart City* dan Inovasi Daerah perlu adanya dukungan dan komitmen, serta kemitraan dengan lembaga kelitbangan, lembaga penunjang inovasi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.

**5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan**

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan.

Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten.

Di samping itu potensi lokal lain yang juga perlu dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah produk unggulan daerah yang mana produk unggulan ini telah dilaksanakan pengembangannya melalui sistem atau pola

klaster UMKM. Klaster UMKM yang ada di Kabupaten Klaten ada 11 (sebelas) klaster dan yang termasuk dalam produk unggulan ada 7 (tujuh) klaster yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 sebanyak 7 Produk Unggulan Daerah antara lain Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Logam, Tembakau (Asepan dan Rajangan), dan mebel.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini sebagian besar klaster unggulan dimaksud mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, permodalan, produksi serta penyediaan bahan baku. Untuk itu guna meningkatkan kontinuitas produksi produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten yang akan mendukung daya saing daerah diperlukan upaya strategis pengembangan produk-produk unggulan dimaksud, di samping itu dalam peningkatan daya saing UMKM juga diperlukan adanya fasilitasi untuk Hak Paten dan Merk Dagang, sehingga harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri, sehingga dapat meningkatkan produk eksport.

Selanjutnya untuk kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan penduduk sudah baik, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalan pertanian baik pertanian tanaman pangan, holtikultura, buah-buhan maupun tanaman perkebunan. Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang dikembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa di kembangkan vaietas unggulan lokal seperti jagung, kedelai. Dan bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll.

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah baik untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.

Dulu Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Klaten yaitu berupa varietas padi Rojolele. Namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan

sentuhan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012.

Uji multi lokasi dilakukan melalui pengembangan demplot di desa Gempol Kecamatan Karanganom, Desa Sekaran Kecamatan Wonosari, Desa Glagah Wangi Kecamatan Polanharjo dan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, serta saat ini telah dilaksanakan berbagai uji lainnya, seperti uji hama penyakit, uji kualitas hasil, uji aroma dan uji rasa sehingga memunculkan varietas baru yang diberi nama Srinar dan Srinuk, dan saat ini masih dalam proses pengurusan Hak Paten sedang dalam tahap uji substansi serta proses pengembangan dan budidaya oleh masyarakat. Untuk menjaga kemurnian kualitas benih, produksi benih Rojolele saat ini hanya dilaksanakan oleh UPT ATP Klaten, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk proses penanaman dan menjamin ketersedian stok produksi beras di laksanakan oleh kelompok-kelompok tani tertentu yang ditunjuk dan dalam pengawasan langsung Dinas Pertanian.

Selanjutnya untuk pemasaran, dalam rangka menjamin pemasaran hasil produksi padi Rojolele ini, pemerintah Kabupaten Klaten membantu penyalurannya melalui Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, agar para ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Klaten diminta untuk memasyarakatkan beras rojolele Srinar dan Srinuk milik petani, dimana mekanisme pembelian melalui Perusda Aneka Usaha Klaten.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk dapat mempercepat pengembangan komoditas padi Rojolele menjadi produk unggulan daerah, selain diperlukan komitmen dan membangun kesadaran para petani agar mau menanam dan mengembangkan varietas tersebut, juga diperlukan pola pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara lebih intensif.

Sedangkan untuk sektor perikanan, di Kabupaten Klaten telah dibentuk Klaster Minapolitan Jilid I yang terkenal dengan sebutan Kalungharjo, yang meliputi Kecamatan Karanganom, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk Minapolitan Jilid II meliputi kecamatan Klaten Selatan, Ngawen dan Kebonarum.

Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten mempunyai produk unggulan berupa Tembakau Rajangan dan Tembakau Asepan. Produksi tanaman untuk tembakau tersebut di wilayah Klaten banyak dibudidayakan di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Trucuk, Manisrenggo dan sebagian wilayah Jogonalan.

Namun demikian di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain: rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya

sentra agribisnis, rendahnya produktivitas, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

**6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana**

Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya, secara tidak langsung akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten ditetapkan untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Klaten merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hirologi atau tata air pada lereng. Selain itu, adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam. Sedangkan menurut Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2016, Kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya rawan bencana tersebut perlu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk dapat mengurangi resiko dampaknya.

Upaya mitigasi bencana dalam rangka penanganan banjir, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten yang meliput Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabiltasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Penguatan talud/tebing sungai juga dilakukan sesuai dengan kewenangan kabupaten.

# BAB V
# VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

## 5.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu:

**"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

**Kabupaten Klaten,** suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Maju,** merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

**Mandiri,** perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

**Sejahtera,** perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

## 5.2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## 5.3. Program Unggulan

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 didukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2021-2026, yaitu:

**1. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi**

Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata dan tujuan investasi daerah. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan.

**2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran**

Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran ditetapkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja.

**3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ditetapkan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas, dan

meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya diprioritaskan pada peningkatan kerukunan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

**4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengurangan Resiko Bencana**

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana ditetapkan dalam rangka peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana.

**5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel beroritasi pada *clean and good governance*.

**6. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur**

Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

## 5.4. Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi 6 tujuan dan 14 sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Misi 1: Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian**

   Misi ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, yang didukung dengan sasaran yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dengan indikator sasarannya: 1) Persentase Potensi Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan; dan 2) Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan.

2. **Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi**

   Misi ini memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(Good and Clean Governance),* yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator sasarannya: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI); 2) peringkat/nilai SAKIP; 3) Opini laporan keuangan; 4) Indeks SPBE; 5) indeks penerapan sistem merit ASN; dan 6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. **Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan**

   Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi; dan 2) Meningkatnya investasi daerah. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan 6 indikator sasarannya: 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan; 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan; 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan; 4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata; dan 5) Persentase peningkatan investasi PMDN; dan 6) Persentase peningkatan investasi PMA.

4. **Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah**

   Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, yang didukung 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah; 2) Meningkatnya capaian *universal access* (100-0-100); 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukkan tata ruang; dan 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator: 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik; dan 2) Rasio konektivitas, dengan indikator sasarannya: 1) Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2) Persentase drainase dalam kondisi baik; 3) Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik; 4) Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi); 5) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan 6) Kinerja lalu lintas *(Level Of Service).*

5. **Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender**

   Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, yang didukung dengan 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender, dengan indikator sasarannya: 1) Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); 3) Persentase pemajuan kebudayaan; 4) Usia Harapan Hidup (UHH); 5) Persentase PMKS yang tertangani; 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 7) Indeks Desa Membangun; 8) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan 9) Skor Kabupaten Layak Anak.

6. **Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

   Misi ini memiliki tujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, yang didukung dengan 3 sasaran yaitu:1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3); dan 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Tujuan pada misi ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan indikator sasarannya: 1) Indeks kualitas air; 2) Indeks kualitas udara; 3) Indeks kualitas tutupan lahan; 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan 5) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

**Tabel 5.1**

**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **Misi 1 : mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian** | **Tujuan 1.1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.** | | **Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)** | **Indeks** | **NA** | **0,63** | **0,65** | **0,68** | **0,70** | **0,73** | **0,75** | **0,75** | **8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | Sasaran 1.1.1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. | Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Persentase perda dan perkada yang ditegakkan | % | 91,60 | 92,00 | 92,40 | 92,80 | 93,20 | 93,60 | 94,00 | 94,00 | 1.05. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat |
| **Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.** | **Tujuan 2.1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*)** | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **57,74** | **57,74*** | **60,01** | **60,62** | **64** | **66** | **70** | **70** | **Seluruh Urusan** |
| | | Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah | Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) | Indeks | NA | NA | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 6.01. Pengawasan |
| | | | Peringkat/ Nilai SAKIP | Nilai | 62,07 | 62,07 | 62 | 62,5 | 63 | 64 | 65 | 65 | 4.01 Sekretariat Daerah<br>5.01 Perencanaan<br>5.05 Penelitian dan Pengembangan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | Opini Laporan Keuangan | Opin | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 5.02. Keuangan Daerah<br>6.01 Pengawasan |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2.16. Komunikasi dan Informatika<br>2.21 Persandian<br>2.20 Statistik |
| | | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | Indeks | NA | NA | 180 | 200 | 225 | 250 | 260 | 260 | 5.03 Kepegawaian<br>5.04 Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 81,88 | NA | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 2.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>2.23 Perpustakaan<br>2.24. Kearsipan<br>7.01 Kecamatan<br>4.02 Sekretariat DPRD |
| **Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan** | **Tujuan 3.1: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan** | | **Pertumbuhan Ekonomi** | % | **-1,18** | **1,03** | **2,52** | **3,51** | **4,45** | **5,13** | **5,47** | **5,47** | **Seluruh Urusan** |
| | | Sasaran 3.1.1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | (1,21) | 0,05 | 1,47 | 2,24 | 3,38 | 3,84 | 4,09 | 4,09 | 3.31. Perindustrian<br>2.17. Koperasi dan UMKM |
| | | | Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan | % | (4,79) | (0,85) | 1,24 | 1,79 | 2,29 | 3,43 | 3,96 | 3,96 | 3.30 Perdagangan |
| | | | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan | % | 2,12 | 2,52 | 2,63 | 2,68 | 2,88 | 3,04 | 3,14 | 3,14 | 3.27 Pertanian<br>3.25 Kelautan dan Perikanan |
| | | | Pertumbuhan PAD sektor pariwisata | % | 2,59 | 2,84 | 3,13 | 3,44 | 3,79 | 4,16 | 4,58 | 4,58 | 3.26 Pariwisata |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | Sasaran 3.1.2: Meningkatnya investasi daerah | Persentase peningkatan investasi PMDN | % | -64 | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2.18 Penanaman Modal |
| | | | Persentase peningkatan investasi PMA | % | -59 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.18 Penanaman Modal |
| **Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah** | **Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah** | | **Infrastruktur wilayah kondisi baik** | % | **74,58** | **75,45** | **76,11** | **76,72** | **77,18** | **77,51** | **77,72** | **77,72** | **1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman** |
| | | | **Rasio konektivitas** | **Rasio** | **0,09** | **0,09** | **0,12** | **0,12** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **2.15. Perhubungan** |
| | | Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah | Persentase jalan dalam kondisi mantap | % | 90,08 | 90,86 | 91,06 | 91,26 | 91,46 | 91,66 | 91,86 | 91,86 | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 61,44 | 61,45 | 61,47 | 61,48 | 61,50 | 61,51 | 61,52 | 61,52 | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 36,17 | 39,2 | 41,5 | 43,6 | 44,9 | 45,6 | 46,2 | 46,2 | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Sasaran 4.1.2: Meningkatnya capaian universal access (100-0-100) | Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi) | % | 97,21 | 97,76 | 98,32 | 98,87 | 99,43 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Sasaran 4.1.3: Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; | Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang | % | 88 | 88,2 | 88,4 | 88,6 | 88,8 | 89,0 | 89,2 | 89,2 | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.10 Pertanahan |
| | | Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan; | Kinerja Lalu Lintas *(Level Of Service)* | Nilai | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 2.15. Perhubungan |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender** | **Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran** | | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Indeks** | **75,56** | **75,56*** | **76,46** | **76,88** | **77,30** | **77,73** | **78,15** | **78,15** | **1.01. Pendidikan 1.02. Kesehatan** |
| | | | **Persentase Penduduk Miskin** | **%** | **12,89** | **12,89*** | **12,49** | **11,69** | **11,09** | **10,49** | **9,89** | **9,89** | **Semua Urusan** |
| | | | **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** | **Indeks** | **96,17** | **96,42*** | **96,66** | **96,90** | **97,14** | **97,38** | **97,62** | **97,62** | **2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |
| | | Sasaran 5.1.1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,25 | 13,25* | 13,52 | 13,62 | 13,73 | 13,84 | 13,94 | 13,94 | 1.01. Pendidikan |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,58 | 8,58* | 8,64 | 8,72 | 8,80 | 8,88 | 8,96 | 8,96 | 1.01. Pendidikan |
| | | | Persentase pemajuan kebudayaan | % | 10,9 | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2.22 Kebudayaan |
| | | Sasaran 5.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 76,78 | 76,78* | 76,84 | 76,89 | 76,93 | 76,98 | 77,02 | 77,02 | 1.02. Kesehatan 2.09 Pangan 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.19. Pemuda dan Olahraga |
| | | Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kesejaheraan masyarakat | Persentase PMKS yang tertangani | % | 90,32 | 65 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 69,5 | 1.06. Sosial |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,46 | 5,31 | 5,16 | 4,97 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 2.07. Tenaga Kerja |
| | | | Indeks Desa Membangun | Indeks | 0,6854 | 0,6874 | 0,6894 | 0,6934 | 0,6934 | 0,6956 | 0,6974 | 0,6974 | 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Sasaran 5.1.4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indek | 72,35 | 72,68 | 73,34 | 73,67 | 74,00 | 74,33 | 74,66 | 74,66 | 2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Skor Kabupaten Layak Anak | Nilai | NA | 710 | 725 | 740 | 755 | 770 | 785 | 785 | 2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan** | **Tujuan 6.1: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan** | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | **Indeks** | **52,85** | **54,35** | **54,68** | **55,01** | **55,34** | **55,67** | **55,99** | **55,99** | **2.11. Lingkungan Hidup** |
| | | Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan | Indeks kualitas air | Indeks | 36,15 | 36,39 | 36,63 | 36,87 | 37,11 | 37,35 | 37,59 | 37,59 | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | | Indeks kualitas udara | Indeks | 76,82 | 77,31 | 77,80 | 78,29 | 78,78 | 79,27 | 79,76 | 79,76 | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 42,54 | 42,72 | 42,90 | 43,08 | 43,26 | 43,44 | 43,62 | 43,62 | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | Sasaran 6.1.2: Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | Indeks | 56,95 | 58,95 | 59,95 | 61,95 | 63,95 | 65,95 | 66,95 | 66,95 | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Indeks | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat |

*Keterangan: *) realisasi tahun sebelumnya*

# BAB VI
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan ke depan.

## 6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

**1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian**

Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).

Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat;
b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas;
c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi**

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu: 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah;
b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru;
c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko;
e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;
g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang *Smart City*;
h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi.
i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten;

j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian;
k. Meningkatkan ASN yang berkualitas;
l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah;
m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah;
q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

**3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan**

Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi; dan 2) Meningkatnya investasi daerah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan;
c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui *e-commerce* untuk menunjang *Smart City*;
e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian;
f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan;
g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

**4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah**

Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah; 2) Meningkatnya capaian *universal access* (100-0-100); 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan

tata ruang; dan 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumber daya air untuk menunjang irigasi pertanian;
c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

**5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender**

Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu: 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya kesejaheraan masyarakat; dan 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan;
c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat;
d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olah raga di kalangan masyarakat;
g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana;
h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes;
j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah;
l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

**6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu: 1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan 2) meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3); 3) meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 6.1**
**Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misi 1 : mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian. | Tujuan 1.1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan. | Sasaran 1.1.1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. | • Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat | • Peningkatan sinergitas pencegahan dan pengendalian konflik sosial; penguatan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Pembinaan revolusi mental berlandaskan ideologi Pancasila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pelajar, kelompok pemuda dan tokoh agama | | | ✓ | | |
| | | | | • Peningkatan sinergitas kerjasama dalam penyelenggara pemilihan umum yang aman dan damai | | | ✓ | | |
| | | | • Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas | • Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan pemberdayaan petugas linmas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran | • Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran. | ✓ | ✓ | | ✓ | |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi. | Tujuan 2.1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). | Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah. | • Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah | • Penguatan perangkat daerah terkait sistem perencanaan pembangunan; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah; pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; penjaminan mutu layanan; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru. | • Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah; dan perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah; | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | • Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD; pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah; penertiban ijin usaha. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah | • Pengamanan administrasi (dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko | • Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; pengembangan zona integritas, dan peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | • Perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah | • Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Optimalisasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan | | | | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang *Smart City*. | • Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang *smart city* | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi | • Pelayanan persandian dalam pengamanan informasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan implementasi pengembangan *single data* Kabupaten Klaten. | • Pengembangan sistem informasi dan meta data terintegrasi | ✓ | | | | |
| | | | | • Peningkatan penyediaan data dan informasi *single data* Kab. Klaten | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian | • Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan ASN yang berkualitas | • Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah | • Peningkatan forum *Corporate Social Responsibility* (CSR). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik. | • Meningkatkan kualitas pelayanan publik | • Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | • Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan | • Penambahan dan peningkatkan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan; | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Pengembangan layanan buku digital | ✓ | ✓ | | | |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah | • Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. | • Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD. | • Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan. | Tujuan 3.1: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan. | • Sasaran 3.1.1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi. | • Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif | • Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata *(single destination tourism) dan* peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata. | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | • Penerapan CHSE (*Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment* (Ramah lingkungan)); penyelenggaraan event budaya dan MICE; promosi digital dan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat nasional dan internasional. | | | | | |
| | | | | • Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan didukung basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan | • Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah; mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Peningkatan kualitas pasar tradisional; | ✓ | ✓ | | | |
| | | | • Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing | • Penambahan *display* khas produk klaten; Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah; dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang; | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Penguatan sentra industri dan 11 klaster industri; fasilitasi pemberdayaan IKM, mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui *e-commerce* untuk menunjang *Smart City*; fasilitasi sertifikasi pekerja industri, serta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pengembangan pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar | | | | | |
| | | | • Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui *e-commerce* untuk menunjang *Smart City*, | • Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan "Aku Cinta Produk Klaten" dan pengembangan basis data koperasi dan UKM | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian. | • Penetapan sawah lestari dan penyediaan basis data pertanian dan | ✓ | | | | |
| | | | | • Pengembangan dan branding padi Rojolele varietas Srinar dan Srinuk; pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal; peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan; | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Pengembangan pertanian organik; intensifikasi pengolahan; pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi; intensifikasi usaha tani; penggunaan benih bermutu dan bersertifikat; pengawasan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | penyaluran pupuk bersubsidi; pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian; pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca panen serta promosi pemasaran; | | | | | |
| | | | | • Pengembangan infrastruktur pertanian; | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Pemantauan Organisme Penganggu Tanaman (OPT); | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan; dan penguatan kelembagaan pangan; | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap | • Penyediaan basis data sektor perikanan | ✓ | | | | |
| | | | | • Pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; peningkatan fasilitasi usaha; pengembangan produk olahan ikan; dan meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Penyediaan dan pendistribusian benih unggul; *restocking* di perairan umum; penguatan teknologi pemasaran produksi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | perikanan | | | | | |
| | | Sasaran 3.1.2: Meningkatnya investasi daerah. | • Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol | • Kemudahan perizinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi. | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerja sama investasi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah. | Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah. | Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah. | • Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah. | • Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta sistem drainase termasuk dukungan dalam pengendalian banjir khususnya Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembidayaan perikanan | • Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasaran sumberdaya air irigasi sumberdaya air secara merata termasuk di Rowojombor untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembidayaan perikanan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna | • Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah daerah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mendukung pelayanan publik bagi masyarakat. | | | | | | |
| | | Sasaran 4.1.2: Meningkatnya capaian *universal accees* (100-0-100). | • Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih | • Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis | • Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh | • Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Sasaran 4.1.3: Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang. | • Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya | • Penyusunan rencana tata ruang | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). | | | ✓ | ✓ | |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan. | • Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi | • Peningkatan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; perencanaan dan penataan jaringan trayek; | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Pengelelolaan terminal tipe C; penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan; penyediaan angkutan orang dan barang; penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender. | Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran. | Sasaran 5.1.1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing. | • Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs | • Pencanangan Gerakan ayo sekolah untuk PAUD; dan Pendataan ulang penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tidak sekolah | ✓ | | | | |
| | | | | • Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD; | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan | • Identifikasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dan sudah tidak sekolah; | ✓ | | | | |
| | | | | • Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan. | | ✓ | | ✓ | |
| | | | • Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat | • Pembangunan taman budaya dan museum daerah | ✓ | | | | |
| | | | | • Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kebudayaan dan cagar budaya | | | | | |
| | | Sasaran 5.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga | • Pengendalian Covid-19 melalui pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat | ✓ | | | | |
| | | | | • Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan, | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat | • Penyediaan pangan yang merata di seluruh wilayah, terjangkau dan terjamin keamanannya serta didukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berbasis sumber daya lokal. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga di kalangan masyarakat | • Penyediaan sarana dan prasarana olah raga; meningkatkan pembinaan olah raga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olah raga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga | • Peningkatan penggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Berencana | PIK-R). | | | | | |
| | | Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. | • Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | • Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk di dalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | • Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes | • Memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa; | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Pembentukan dan penguatan tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja | • Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri melalui Balai Latihan Kerja; Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan Balai Latihan Kerja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Komunitas; pelatihan wirausaha; perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya; tenaga kerja mandiri (TKM); terapan teknologi tepat guna (TTG); tenaga kerja sukarela (TKS); | | | | | |
| | | | • Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah. | • Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui *Job fair* dan Bursa Kerja *online*; fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri; peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Sasaran 5.1.4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak | Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan | Peningkatan pemberdayaan perempuan; implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. | Tujuan 6.1: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. | Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. | • Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup | • Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | • Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau | • Pembangunan taman; pengelolaan hutan kota; taman kota dan ruang publik lainnya. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sasaran 6.1.2 Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) | • Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui | • Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah; optimalisasi kinerja TPA; pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah; serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah dan bahan bercun berbahaya (B3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | • Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan hingga tingkat desa | ✓ | ✓ | | | |
| | | Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. | Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana | Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan; | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; penanganan pasca bencana; peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*Sumber: Hasil Analsis dan olah data, 2021*

## 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

**1. Arah Kebijakan Tahun 2022**

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **"Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal"**

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

a. Pengembangan ekonomi lokal;
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur;
c. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
e. Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; dan
f. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

**2. Arah Kebijakan Tahun 2023**

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan"**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

a. Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal;
b. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran;
c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia;
d. Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
e. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

**3. Arah Kebijakan Tahun 2024**

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **"Peningkatan kemajuan daerah didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan"**

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

a. Penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi;
b. Pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan;
c. Penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas;
d. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas wilayah;dan
e. Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

**4. Arah Kebijakan Tahun 2025**

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **"Peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik"**

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

a. Penguatan investasi dan daya saing potensi ekonomi daerah;
b. Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;

d. Penguatan keunggulan dan daya saing sumber daya manusia; dan
e. Pemantapan infrastruktur yang berkualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

**5. Arah Kebijakan Tahun 2026**

Pembangunan tahun 2026 diarahkan pada: **"Peningkatan kualitas hidup masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

a. Perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak dan berkepribadian;
b. Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
c. Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi; dan
e. Perwujudan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.

## 6.3. Penjabaran Implementasi Program Unggulan Daerah

Program unggulan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dijabarkan dalam strategi rencana tindak lanjut sebagai berikut:

**1. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi**

Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata dan tujuan investasi daerah. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten. Bentuk implementasi peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten adalah program Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris dan Klaten Santer.

**Klaten Mapan,** Mapan singkatan dari Mandiri Pangan. Mandiri Pangan yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Mandiri Pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan.

**Klaten Keren,** Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Katen.

**Klaten Laris,** Laris berarti sebuah ajakan untuk membeli dan mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

**Klaten Santer,** Santer singkatan dari Sahabat Investor, di mana Kabupaten Klaten merupakan wilayah strategis yang berada di antara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintergrasi dan Kabupaten Klaten merupakan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

**2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran**

Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran ditetapkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan adalah program Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.

**Klaten Subur,** Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM dengan cara memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 80% dari bunga bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

**Klaten Cetar,** Cetar singkatan dari Cerdas dan Terampil, berarti meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha.

**Klaten Tangkis,** Tangkis singkatan dari Tangani Kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah, didukung peran serta dunia usaha dan masyarakat. Penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin.

**3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ditetapkan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas kesehatan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya diprioritaskan pada peningkatan kerukunan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Bentuk implementasi meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah program Klaten Toleran, Klaten Waras, dan Klaten Tuntas.

**Klaten Toleran,** Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat "Gotong Royong" masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan.

**Klaten Waras,** Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain.

**Klaten Tuntas,** Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

**4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengurangan Resiko Bencana**

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana ditetapkan dalam rangka peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana.

Bentuk implementasi peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten adalah Program Klaten Tangguh dan Klaten Lestari.

**Klaten Tangguh,** Tangguh berarti masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami.

**Klaten Lestari,** Lestari berarti mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

**5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel beroritasi pada *good and clean*

*governance*. Bentuk implementasi peningkatan kualitas pelayanan publik adalah program Klaten Cerdas dan Klaten Cekatan.

**Klaten Cerdas,** Cerdas adalah Klaten *Smart City*, merupakan Kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Klaten *Smart City* mencakup *Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living* dan *Smart Environment,* salah satu upayanya dalam mendorong Klaten Cerdas dengan mengupayakan internet masuk desa.

**Klaten Cekatan.** Cekatan singkatan dari Cepat, Kreatif, Akuntabel dan Transparan, merupakan program unggulan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Sipon Keduten, Matur Dokter, Titip Bandaku, dan lain-lain. Peningkatan pelayanan publik didorong agar berkualitas melalui digitalisasi pelayanan.

**6. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur**

Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk implementasi peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat adalah program Klaten Mantap.

**Klaten Mantap,** Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap.

Penjabaran rencana Implementasi Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ke dalam nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.2**
**Rencana Implementasi Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| **1.** | **Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi** | | | | | | |
| 1.1 | KLATEN MAPAN | Mapan singkatan dari Mandiri Pangan. Mandiri Pangan yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Mandiri pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan. | Pertanian | 1. Pengembangan Padi Rojolele Varietas Srinar dan Srinuk | 3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.27.02.2.02.01. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman |
| | | | | 2. Pengembangan ternak unggul Sapi dan/Kambing | 3.27.03. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 3.27.03.2.03. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3.27.03.2.03.01. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak |
| | | | | 3. Diseminasi pengembangan Pupuk Organik<br>4. Demplot budidaya pertanian organik | 3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.27.02.2.02.03. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman |
| | | | | Pengembangan Pertanian Terpadu Berbasis Teknologi | 3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.27.02.2.02.01. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman |
| | | | | 1. Diseminasi Perda LP2B<br>2. Fasilitasi penyiapan insentif dan disinsentif sesuai | 3.27.03. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 3.27.03.2.01. Pengembangan Prasarana Pertanian | 3.27.03.2.01. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | | | Perda LP2B<br>3. Penegakkan Perda LP2B | | | Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B |
| | | | Penelitian dan Pengembangan | Perbaikan varietas durian khas klaten | 5.05.02 Program penelitian dan pengembangan | 5.05.02.2.03 Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 5.05.02.2.03.04 Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan |
| | | | Kelautan dan perikanan | Peningkatan dan pengembangan budidaya ikan berbasis minapolitan | 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil |
| | | | Pangan | Pengembangan Lumbung Pangan | 2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan |
| | | | | Pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) | 3.27.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pertanian | 3.27.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 3.27.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| 1.2 | KLATEN KEREN | Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya tarik wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan | Pariwisata | 1. Menuju 100 Desa Wisata<br>2. Fasilitasi dan pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata (KSP) | 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 3.26.02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | jumlah dan lama kunjungan wisatawan sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya di Klaten dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. | | | | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota |
| | | | | | | | 3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 3.26.02.2.02.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | | | | 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |
| | | | | | | | 3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata |
| | | | Pariwisata | Desiminasi dan branding “Aku Cinta Produk Klaten” | 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | | |
| | | | Perdagangan | | 2.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 2.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 2.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | Kebudayaan | Museum Daerah Taman Budaya | 2.22.04 Program pembinaan sejarah | 2.22.4.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.22.4.2.01.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah |
| | | | | | 2.22.05 Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat | 2.22.05.2.01.1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya |
| | | | | | | | 2.22.05.2.01.2 Penetapan Cagar Budaya |
| | | | | | | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota | 2.22.05.2.02.1 Pelindungan Cagar Budaya |
| | | | | | | | 2.22.05.2.02.2 Pengembangan Cagar Budaya |
| | | | | | 2.22.6 Program pengelolaan permuseuman | 2.22.6.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota | 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum |
| | | | | | | | 2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum |
| 1.3 | KLATEN LARIS | Laris berarti sebuah ajakan untuk membeli dan | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Optimalisasi Show room produksi UMKM Kab. | 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui | 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. | | Klaten<br>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Klaster UKM<br>3. Digitalisasi produk UKM, Asistensi Usaha mikro berbasis Kluster | Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) | Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro |
| | | | | | 2.17.08 Program Pengembangan UMKM | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi |
| | | | Sekretariat Daerah | 4. Subsidi bunga bagi UMKM dan Petani yang disalurkan melalui Bank yang ditunjuk | 4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |
| | | | Perdagangan, | 5. Revitalisasi Pasar Pemkab | 2.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 2.30.03.2.01 Pembangunaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 2.30.03.2.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | 6. Peningkatan daya saing produk industri daerah | 2.30.05 Program Pengembangan Ekspor | 2.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 2.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor |
| 1.4 | KLATEN SANTER | Santer singkatan dari Sahabat Investor, dimana Kabupaten | Penanaman Modal | 1. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja | 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu | 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | Klaten merupakan wilayah strategis yang berada diantara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintergrasi dan Kabupaten Klaten merupakan daerah penyangga Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN). | | | | Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| | | | | | | | 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal |
| | | | | 2. Penyediaan database informasi investasi | 2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| | | | | 3. Peningkatan investasi daerah | 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal |
| **2.** | **Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran** | | | | | | |
| 2.1 | KLATEN SUBUR | Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi pelaku usaha mikro dengan cara memberikan subsidi | Sekretariat Daerah | Subsidi Bunga Bagi Pelaku Usaha Mikro yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk | 4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | bunga sebesar 80% dari suku bunga kredit bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. | | | | | |
| 2.2 | KLATEN CETAR | Cetar singkatan dari Cerdas dan Terampil, berarti meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha. | Tenaga Kerja | Peningkatan Kompetensi SDM (pencari kerja) | 2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivutas Tenaga Kerja | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi | 2.07.03.2.01.01 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi |
| | | | | Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja | 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja | 2.07.04.2.01 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja |
| | | | | | | | 2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja |
| | | | Sosial | Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berprestasi | 1.06.02 Pogram Pemberdayaan Sosial | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota |
| | | | Perpustakaan | Ulat Kupu (Pelatihan Komputer untuk Masyarakat Kurang Mampu) | 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan | 2.23.02.2.02 Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota | 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial |
| 2.3 | KLATEN TANGKIS | Tangkis singkatan dari Tangani Kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah, didukung peran serta dunia | Perencanaan | Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | 5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | usaha dan masyarakat. Penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin. | | Fasilitasi dan Penguatan Partisipasi Dunia Usaha Dalam Pembangunan Klaten "Dunia Usaha mBangun Klaten" | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | 2.13.04 Program administrasi pemerintahan desa | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan pemberdayaan Bum desa dan lembaga kerja sama antar desa |
| | | | Sosial | Pusat layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PLKSAI) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| | | | | Rumah Singgah (Rusi) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya bukan HIV AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial | 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan |
| | | | | Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) | 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.06.04.2.01.11 Pemberian Layanan Rujukan |
| | | | | | 1.06.04 Program | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi | 1.06.04.2.02.13 Pemberian |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program** | **Kegiatan** | **Sub Kegiatan** |
| | | | | | Rehabilitasi Sosial | Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya bukan HIV AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial | Layanan Rujukan |
| | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) | 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| **3.** | **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** | | | | | | |
| 3.1 | KLATEN TOLERAN | Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat “Gotong Royong” masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai | Ketentraman dan Ketertiban Umum | Satuan anti Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (SANGGAR PEDATI) | 1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
| | | | | | | | 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
| | | | | | | | 1.05.02.2.02.03 Penanganan atasPelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan. | | | | | Bupati/Wali Kota |
| 3.2 | KLATEN WARAS | Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi Dan Balita) dan | Kesehatan | Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi Dan Balita) | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif |
| | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | e-Kartu Kembang Anak/el-Karana | 2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga | 2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain. | | | | | |
| 3.3 | KLATEN TUNTAS | Tuntas singkatan dari Turunkan Angka Anak Tidak Sekolah sebagai wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, dimana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta didukung peningkatan budaya membaca dan pengembangan kerjasama inovasi daerah. | Pendidikan | Sekolah Penggerak | 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| | | | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
| | | | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan |
| | | | | | | | 1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan |
| | | | | | | | 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan |
| | | | | | | | 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| | | | Perpustakaan | Bejanaku (Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku) | 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat |
| | | | | | | | 2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| **4.** | **Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana** | | | | | | |
| 4.1 | KLATEN TANGGUH | Tangguh berarti masyarakat Kabupaten Klaten | Ketentraman dan Ketertiban Umum | Satpol PP dan Damkar *Go To School* | 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan | 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. | | | Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Ayo Siaga Brasta Dahana | | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |
| | | | | | | | 1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran |
| | | | | PRB Inklusif | 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 1.05.03.2.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |
| | | | | Desa Tangguh Bencana (Destana) | | | 1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
| 4.2 | KLATEN LESTARI | Lestari berarti mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta | Lingkungan Hidup | Penyediaan ruang terbuka hijau hingga tingkat RW | 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan |
| | | | | | | | 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
| | | | | | | | 2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. | | 1. Pengelolaan persampahan (TPS) dengan budidaya maggot | 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan | 2.11.11.2.01 Pengelolaan sampah | 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali |
| | | | | | | | 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
| | | | | 2. Pengembangan TPS Desa/ Kelurahan | 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan | 2.11.11.2.01 Pengelolaan sampah | 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |
| | | | | 3. Reboisasi lahan kritis | 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
| | | | Pertanahan | Perencanaan penatagunaan tanah | 2.10.10 Program Penatagunaan Tanah | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota | 2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah |
| | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemanfaatan ruang terkait zona tambang | 1.03.12 Program penyelenggaraan penataan Ruang | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| **5.** | **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** | | | | | | |
| 5.1 | KLATEN CERDAS | Cerdas adalah Klaten *Smart City*, merupakan Kota yang memanfaatkan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Klaten Smart City mencakup Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living dan Smart Environment. | Komunikasi dan Informatika | Implementasi Materplan Klaten *Smart City* | 2.16.03.2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.16.03.2.02 Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| | | | | | | | 2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas |
| | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pelayanan Adminduk yang Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi | 2.12.03 Program Pencatatan Sipil | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting |
| | | | | | 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan |
| | | | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 2.12.04.2.03.05 Fasilitasi terkait pengelolaan infromasi administrasi kependudukan |
| | | | | | 2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan | 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota |
| | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Elekronik Rumah Dataku (ELDATAKU) | 2.14.02 Pogram pengendalian penduduk | 2.14.02.2.02 Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan derah kabupaten/kota | 2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | | Lain |
| | | | | | | | 2.14.02.2.02.1 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga |
| 5.2 | KLATEN CEKATAN | Cekatan singkatan dari Cepat, Kreatif, Akuntabel, Transparan), merupakan program unggulan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), sipon keduten, matur dokter, titip bandaku, dan lain-lain. | Penanaman Modal | Mall Pelayanan Publik (MPP) | 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| | | | Kesehatan | Matur Dokter | 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Distribusi Alokon melalui Ojek Online (DISKON OJOL) | 2.14.03 Pembinaan keluarga Berencana | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontraspsi serta pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota | 2.14.03.2.03.01 Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi sarana penunjang pelayanan KB ke sasilitas kesehatan termaasuk jejaring dan jejaringnya |
| | | | Pengawasan | 1. Sekolah Pengelolaan Administrasi Desa | 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | 2. Cafe Integritas | 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pemberantasan |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | | | | dan Asistensi | | Korupsi |
| | | | Kearsipan | Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) | 2.24.03 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota | 2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip |
| **6.** | **Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur** | | | | | | |
| 6.1 | KLATEN MANTAP | Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penataan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah | 1.03.10 Program Penyelenggaran Jalan | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standart |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program** | **Kegiatan** | **Sub Kegiatan** |
| | | | | | 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota | 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |
| | | | | | 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Hektar dalam 1 (satu) daerah | 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi |
| | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | 1.04.03 Program Kawasan Permukiman | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) |
| | | | | | | | 1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh |
| | | | | | | | 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh |

| No. | Program Unggulan | Deskripsi Program Unggulan | Urusan | Rincian | Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program** | **Kegiatan** | **Sub Kegiatan** |
| | | | | | 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukima Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha |
| | | | Perhubungan | | 2.15.02 Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengakapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.15.02.2.0201 Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/ Kota |
| | | | | | | | 2.15.02.2.0202 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.15.02.2.0203 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan |
| | | | | | | | 2.15.02.2.0204 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |

*Sumber: Hasil Analsis dan olah data, 2021*

Pagu indikatif untuk program prioritas pembangunan daerah yang menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui tujuan, sasaram, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.3**
**Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatof Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Misi 1 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.** | | | **Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)** | **Indeks** | **NA** | **0.63** | **0.65** | | **0.68** | | **0.7** | | **0.73** | | **0.75** | | **0.75** | | 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Sasaran 1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. | | Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Persentase perda dan perkada yang ditegakkan | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.05. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat |
| | | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | **1,053,352,000** | | **1,211,224,000** | | **1,976,191,000** | | **1,823,387,000** | | **1,598,869,000** | | **7,663,023,000** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** |
| | | | Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | % | 41.50 | 42.00 | 42.00 | - | 43.00 | - | 44.00 | - | 45.00 | - | 47.00 | - | 47.00 | | |
| | | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 91.60 | 92.00 | 92.00 | - | 92.40 | - | 92.80 | - | 93.20 | - | 93.60 | - | 93.60 | - | |
| | | | Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik** | | | | | | **326,780,000** | | **411,479,000** | | **725,263,000** | | **422,829,000** | | **481,177,000** | | **2,367,528,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | | Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan | % | 100.0 | NA | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | |
| | | | Persentase deteksi dini potensi konflik sosial | % | - | - | | - | 80.0 | - | 80.0 | - | 85.0 | - | 85.0 | - | 85.0 | - | |
| **Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*)** | | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **57.55** | **57,55*** | **60.01** | | **60.62** | | **64** | | **66** | | **70** | | **70** | | Seluruh Urusan |
| | Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah | | Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) | Indeks | NA | NA | 81 | | 81 | | 82 | | 83 | | 83 | | 83 | | 6.01. Pengawasan |
| | | | Peringkat/ Nilai SAKIP | Nilai | NA | NA | 62 | | 62.5 | | 63 | | 64 | | 65 | | 65 | | 4.01 Sekretariat Daerah<br>5.01 Perencanaan<br>5.05 Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Opini Laporan Keuangan | Opin | WTP | WTP | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | 5.02. Keuangan Daerah |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3.0 | 3.0 | 3.2 | | 3.4 | | 3.6 | | 3.8 | | 4 | | 4 | | 2.16. Komunikasi dan Informatika<br>2.21 Persandian<br>2.20 Statistik |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | Indeks | NA | NA | 180 | | 200 | | 225 | | 250 | | 260 | | 260 | | 5.03 Kepegawaian<br>5.04 Pendidikan dan Pelatihan |
| | | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | | | | | | **1,256,843,000** | | **1,287,977,000** | | **1,432,184,000** | | **1,414,386,000** | | **1,555,636,000** | | **6,947,026,000** | **Inspektorat** |
| | | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 | % | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 | % | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4 | % | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 500.00 | - | |
| | | | Persentase pelaksanaan pengawasan khusus | % | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Administrasi Umum** | | | | | | **39,805,879,000** | | **39,920,057,000** | | **40,393,230,000** | | **40,681,484,000** | | **40,663,745,000** | | **201,464,395,000** | **Sekretariat Daerah** |
| | | | Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Pesentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik | % | 94.60 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | | | | | | **2,228,751,000** | | **2,197,807,000** | | **2,190,230,000** | | **2,186,020,000** | | **2,742,709,000** | | **11,545,517,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| | | | Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD | % | 53.69 | NA | 77.00 | - | 78.00 | - | 79.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | **603,137,876,000** | | **602,495,713,000** | | **624,735,446,000** | | **611,662,689,000** | | **618,869,429,000** | | **3,060,901,153,000** | **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah** |
| | | | Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah | % | 83.36 | 83.00 | 84.00 | - | 84.50 | - | 85.00 | - | 85.50 | - | 86.00 | - | 86.00 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** | | | | | | **4,243,101,000** | | **4,468,563,000** | | **7,702,172,000** | | **8,770,994,000** | | **9,057,296,000** | | **34,242,126,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | | Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo | % | 55.00 | 54.90 | 58.82 | - | 62.75 | - | 66.67 | - | 70.59 | - | 74.51 | - | 74.51 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | Persentase penambahan akses internet di ruang publik | % | 70.00 | 80.00 | 67.50 | - | 75.00 | - | 82.50 | - | 90.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 40.74 | 53.70 | 62.96 | - | 72.22 | - | 81.48 | - | 90.74 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Kepegawaian Daerah** | | | | | | **2,106,368,000** | | **2,271,856,000** | | **2,312,144,000** | | **2,269,309,000** | | **2,251,909,000** | | **11,211,586,000** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia** |
| | | | Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi | % | 82.80 | 83.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | | Persentase Kinerja ASN bernilai baik | % | 100.00 | 100.00 | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | | Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan | % | 100.00 | 100.00 | 90.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | | Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah | % | 100.00 | 100.00 | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | |
| | Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 81.88 | NA | 82 | | 82.5 | | 83 | | 83.5 | | 84 | | 84 | | 2.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>2.23 Perpustakaan<br>2.24. Kearsipan<br>7.01 Kecamatan<br>4.02 Sekretariat DPRD |
| | | **Program Pendaftaran Penduduk** | | | | | | **643,259,000** | | **669,030,000** | | **654,177,000** | | **634,787,000** | | **700,995,000** | | **3,302,248,000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| | | | Persentase perekaman KTP elektronik | % | 97.87 | 97.87 | 99.02 | - | 99.03 | - | 99.04 | - | 99.05 | - | 99.06 | - | 99.06 | - | |
| | | | Cakupan kepemilkan KK | % | 97.80 | 97.80 | 97.90 | - | 98.00 | - | 98.02 | - | 98.04 | - | 98.06 | - | 98.06 | - | |
| | | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 46.84 | 46.84 | 50.00 | - | 60.00 | - | 70.00 | - | 80.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | **Program Pembinaan Perpustakaan** | | | | | | **215,125,000** | | **233,951,000** | | **338,917,000** | | **620,675,000** | | **695,782,000** | | **2,104,450,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| | | | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | eksemplar | 49,786 | | 49,962 | - | 51,962 | - | 52,062 | - | 52,162 | - | 52,262 | - | 52262 | - | |
| | | | Persentase perpustakaan yang dibina | % | 21.99 | 24.55 | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | - | 25 | - | |
| | | **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | | | | | | **46,619,000** | | **61,544,000** | | **89,344,000** | | **192,019,000** | | **201,132,000** | | **590,658,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| | | | Arsip usul musnah | Meter lari | 0.00 | 0.00 | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | |
| | | | Persentase arsip yang dialihmediakan | % | 25.85 | 19.96 | 20.00 | - | 20.91 | - | 21.82 | - | 22.73 | - | 24.55 | - | 24.55 | - | |
| | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | **80,140,901,200** | | **80,264,210,200** | | **82,155,000,200** | | **80,599,428,200** | | **86,458,994,200** | | **409,618,534,000** | **Semua Kecamatan** |
| | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | | | | | **184,744,000** | | **204,984,000** | | **229,474,000** | | **233,066,000** | | **298,619,000** | | **1,150,887,000** | **Semua Kecamatan** |
| | | | Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | | | | **9,374,610,000** | | **9,279,691,000** | | **9,974,391,000** | | **9,532,778,000** | | **12,330,297,000** | | **50,491,767,000** | **Semua Kecamatan** |
| | | | Persentase lembaga masyarakat aktif | % | 100.00 | 100.00 | 93.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum** | | | | | | **3,137,048,000** | | **3,097,676,000** | | **3,435,108,000** | | **3,308,058,000** | | **4,093,460,000** | | **17,071,350,000** | **Semua Kecamatan** |
| | | | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 96.00 | - | 96.00 | - | 96.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | |
| | | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | | | | | | **479,527,000** | | **618,699,000** | | **742,959,000** | | **724,361,000** | | **1,012,438,000** | | **3,577,984,000** | **Semua Kecamatan** |
| | | | Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani | % | 80.00 | 80.00 | 96.00 | - | 96.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | |
| | | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | **2,642,906,000** | | **3,009,960,000** | | **3,544,828,000** | | **3,584,989,000** | | **4,808,327,000** | | **17,591,010,000** | **Semua Kecamatan** |
| | | | Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu | % | 100.00 | 100.00 | 95.00 | - | 97.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | |
| | | | Persentase desa tertib administrasi | % | 100.00 | 100.00 | 94.00 | - | 95.00 | - | 96.00 | - | 96.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** | | | | | | **814,434,000** | | **909,219,000** | | **988,096,000** | | **911,603,000** | | **1,058,590,000** | | **4,681,942,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| | | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | % | 63.00 | 63.00 | 54.80 | - | 59.40 | - | 64.00 | - | 68.60 | - | 73.20 | - | 73.20 | - | |
| | | | Pertumbuhan inovasi perangkat daerah | % | 11.12 | 13.34 | 14.68 | - | 15.00 | - | 15.50 | - | 16.00 | - | 16.50 | - | 16.50 | - | |
| | | **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | | | | | | **18,395,698,000** | | **19,760,051,000** | | **21,996,330,000** | | **21,563,534,000** | | **22,672,994,000** | | **104,388,607,000** | **Sekretariat DPRD** |
| | | | Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda | % | 66.67 | 75.00 | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | |
| | | | Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran | % | 100.00 | NA | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan | % | 100.00 | NA | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan** | | | **Pertumbuhan Ekonomi** | % | **-1,18** | **1.03** | **2.52** | | **3.51** | | **4.45** | | **5.13** | | **5.47** | | **5.47** | | Seluruh Urusan |
| | Sasaran 1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi | | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | -1.21 | 0.05 | 1.47 | | 2.24 | | 3.38 | | 3.84 | | 4.09 | | 4.09 | | 3.31. Perindustrian 2.17. Koperasi dan UMKM |
| | | | Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan | % | -4.79 | -0.85 | 1.24 | | 1.79 | | 2.29 | | 3.43 | | 3.96 | | 3.96 | | 3.30 Perdagangan |
| | | | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan | % | 2.12 | 2.52 | 2.63 | | 2.68 | | 2.88 | | 3.04 | | 3.14 | | 3.14 | | 3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan |
| | | | Pertumbuhan PAD sektor | % | 2,59 | 2,84 | 3,13 | | 3,44 | | 3,79 | | 4,16 | | 4,58 | | 4,58 | | 3.26 Pariwisata |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | | | | | | **2,292,481,000** | | **1,199,732,000** | | **1,501,905,000** | | **1,774,716,000** | | **2,059,438,000** | | **8,828,272,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | | Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina | % | 11.40 | 13.20 | 17.31 | - | 21.44 | - | 25.50 | - | 29.48 | - | 33.46 | - | 33.46 | - | |
| | | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | **4,021,897,000** | | **4,511,388,000** | | **6,373,216,000** | | **6,255,145,000** | | **6,365,972,000** | | **27,527,618,000** | **Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan** |
| | | | Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi | % | 34.00 | 38.00 | 42.00 | - | 46.00 | - | 50.00 | - | 54.00 | - | 58.00 | - | 58.00 | - | |
| | | | Persentase PKL yang terbina | % | 25.70 | 34.20 | 43.80 | - | 51.40 | - | 60.00 | - | 68.50 | - | 77.00 | - | 77.00 | - | |
| | | | Jumlah pendapatan retribusi pasar | Rp | 4,616,866,333 | 4,616,866,333 | 4,650,000,000 | - | 4,700,000,000 | - | 4,750,000,000 | - | 4,800,000,000 | - | 4,850,000,000 | - | 23,750,000,000 | - | |
| | | **Program Pengembangan Ekspor** | | | | | | **251,369,000** | | **287,540,000** | | **681,786,000** | | **669,155,000** | | **664,025,000** | | **2,553,875,000** | **Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan** |
| | | | Jumlah komoditas yang mampu ekspor | jenis | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | | |
| | | **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | | | | **1,985,812,000** | | **2,835,730,000** | | **4,540,299,000** | | **3,660,957,000** | | **3,502,969,000** | | **16,525,767,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Kw/Ha | 67.22 | 66.98 | 66.99 | - | 67.01 | - | 67.03 | - | 67.07 | - | 67.13 | - | 67.13 | - | |
| | | | Produktivitas cabe | Kw/Ha | 8.92 | 8.90 | 8.98 | - | 9.06 | - | 9.15 | - | 9.25 | - | 9.34 | - | 9.34 | - | |
| | | | Produktivitas tembakau rajang | Kw/Ha | 12 | 12.10 | 12.2 | - | 12.21 | - | 12.22 | - | 12.25 | - | 12.28 | - | 12.28 | - | |
| | | | Produktivitas tembakau asepan | Kw/Ha | 9.81 | 9.81 | 9.83 | - | 9.86 | - | 9.88 | - | 9.9 | - | 9.91 | - | 9.91 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | | | | | | **30,165,000** | | **49,576,000** | | **49,405,000** | | **72,735,000** | | **115,483,000** | | **317,364,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | | Produksi perikanan tangkap | ton | 184 | 537 | 543 | - | 547 | - | 552 | - | 557 | - | 562 | - | 562 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | | | | | | **975,310,000** | | **1,274,096,000** | | **1,432,739,000** | | **1,561,362,000** | | **1,342,484,000** | | **6,585,991,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | | Produksi perikanan budidaya | ton | 27,604 | 28,315 | 29,165 | - | 30,039 | - | 30,940 | - | 31,500 | - | 32,000 | - | 32,000 | - | |
| | | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | | | | | | **1,913,443,390** | | **2,150,000,000** | | **6,050,000,000** | | **5,810,000,000** | | **5,850,000,000** | | **21,773,443,390** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata** |
| | | | Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola | % | 72.00 | | 73.00 | | 74.00 | | 75.00 | | 78.00 | | 80.00 | | 80.00 | | |
| | | **Program Pemasaran Pariwisata** | | | | | | **155,849,000** | | **173,515,000** | | **1,012,798,000** | | **1,076,467,000** | | **1,183,696,000** | | **3,602,325,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata** |
| | | | Tingkat intensitas promosi pariwisata | % | 68.00 | NA | 68.00 | - | 70.00 | - | 72.00 | - | 73.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah | | Persentase peningkatan investasi PMDN | % | -64 | NA | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | 2.18 Penanaman Modal |
| | | | Persentase peningkatan investasi PMA | % | -59 | NA | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 2.18 Penanaman Modal |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | | | **301,643,000** | | **133,855,000** | | **424,882,000** | | **417,010,000** | | **413,813,000** | | **1,691,203,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | | Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi | % | 80 | N/A | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | **Program Promosi Penanaman Modal** | | | | | | **703,832,000** | | **208,218,000** | | **1,086,905,000** | | **1,042,525,000** | | **1,058,590,000** | | **4,100,070,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | | Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan | % | 0 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | | | | | | **351,916,000** | | **173,515,000** | | **172,917,000** | | **189,110,000** | | **173,224,000** | | **1,060,682,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | | Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal | % | 80.00 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | | | | | | **326,780,000** | | **49,576,000** | | **74,108,000** | | **72,735,000** | | **48,118,000** | | **571,317,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | | Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | % | N/A | N/A | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 4: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah** | | | **Infrastruktur wilayah kondisi baik** | % | **74,58** | **75.45** | **76.11** | | **76,72** | | **77,18** | | **77,51** | | **77,72** | | **77,72** | | Seluruh Urusan |
| | | | **Rasio konektivitas** | **Rasio** | **0.09** | **0.09** | **0.12** | | **0.12** | | **0.15** | | **0.15** | | **0.15** | | **0.15** | | 2.15. Perhubungan |
| | Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah | | Persentase jalan dalam kondisi mantap | % | 90,08 | 90,86 | 91,06 | | 91,26 | | 91,46 | | 91,66 | | 91,86 | | 91,86 | | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 61,44 | 61,45 | 61,47 | | 61,48 | | 61,50 | | 61,51 | | 61,52 | | 61,52 | | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 36,17 | 39,2 | 41,5 | | 43,6 | | 44,9 | | 45,6 | | 46,2 | | 46,2 | | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | **Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | | | **97,344,238,000** | | **111,739,675,000** | | **122,815,452,000** | | **124,493,449,000** | | **196,577,057,000** | | **652,969,871,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | | Persentase jalan kondisi baik | % | 66.25 | 67.62 | 67.72 | - | 67.82 | - | 67.93 | - | 68.05 | - | 68.22 | - | 68.22 | - | |
| | | | Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik | % | 63.90 | 63.90 | 64.22 | - | 65.81 | - | 66.77 | - | 68.05 | - | 70.61 | - | 70.61 | - | |
| | | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | | | **251,369,000** | | **3,470,299,000** | | **3,952,382,000** | | **3,879,160,000** | | **3,849,416,000** | | **15,402,626,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | | Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik | % | 61.44 | 61.45 | 61.47 | - | 61.46 | - | 61.50 | - | 61.51 | - | 61.52 | - | 61.52 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | | | **12,065,689,000** | | **24,926,658,000** | | **16,367,801,000** | | **23,895,622,000** | | **17,384,925,000** | | **94,640,695,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 0.21 | 0.33 | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Sasaran 2: Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100) | | Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi) | % | 97.21 | 97.76 | 98.32 | | 98.87 | | 99.43 | | 99.99 | | 100 | | 100,00 | | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | **Program Kawasan Permukiman** | | | | | | **1,457,938,000** | | **1,983,028,000** | | **2,124,406,000** | | **2,085,049,000** | | **2,069,062,000** | | **9,719,483,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | % | 100.00 | 100.00 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | |
| | | **Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh** | | | | | | **2,337,728,000** | | **2,456,074,000** | | **3,544,032,000** | | **3,279,636,000** | | **3,187,536,000** | | **14,805,006,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani | % | 94.03 | 94.03 | 95.23 | - | 96.43 | - | 97.63 | - | 98.83 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | **1,357,390,000** | | **4,957,570,000** | | **4,446,430,000** | | **4,848,950,000** | | **4,330,593,000** | | **19,940,933,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | | Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak | % | 18.16 | 92.45 | 94.02 | - | 95.59 | - | 97.16 | - | 98.73 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | | | **5,127,918,000** | | **4,957,570,000** | | **4,446,430,000** | | **5,382,334,000** | | **4,715,535,000** | | **24,629,787,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | % | 0.85 | 1.06 | 1.27 | - | 1.48 | - | 1.69 | - | 1.90 | - | 2.21 | - | 2.21 | - | |
| | Sasaran 3: Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; | | Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang | % | 88 | 88.2 | 88.4 | | 88,6 | | 88,8 | | 89,0 | | 89,2 | | 89,2 | | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** | | | | | | **2,212,043,000** | | **2,116,882,000** | | **2,371,429,000** | | **2,497,209,000** | | **3,320,122,000** | | **12,517,685,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | | Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun | % | 29.00 | 29.00 | 70.50 | - | 70.50 | - | 70.50 | - | 70.50 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pelayanan ketataruangan | % | 50.00 | 50.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pengendalian pemanfaatan ruang | % | 25.00 | 25.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Penatagunaan Tanah** | | | | | | **251,369,000** | | **198,303,000** | | **247,024,000** | | **242,448,000** | | **240,589,000** | | **1,179,733,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | | Persentase dokumen penataangunaan tanah yang tersusun | % | 0.00 | NA | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | Sasaran 4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan; | | Kinerja Lalu Lintas *(Level Of Service)* | Nilai | 0,65 | 0,64 | 0,62 | | 0,61 | | 0,58 | | 0,56 | | 0,54 | | 0,54 | | 2.15. Perhubungan |
| | | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | | | **-** | | **8,590,417,000** | | **9,874,967,000** | | **8,489,483,000** | | **9,286,716,000** | | **36,241,583,000** | **Dinas Perhubungan** |
| | | | Persentase kecelakaan lalu lintas | % | 0.90 | 0.90 | 0.80 | - | 0.70 | - | 0.60 | - | 0.50 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 5: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran** | | | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Indeks** | **75,56** | **75,56*** | **76.46** | | **76.88** | | **77.3** | | **77.73** | | **78.15** | | **78.15** | | 1.01. Pendidikan<br>1.02. Kesehatan |
| | | | **Persentase Penduduk Miskin** | **%** | **12,89** | **12,89*** | **12.49** | | **11.69** | | **11.09** | | **10.49** | | **9.89** | | **9.89** | | 1.06. Sosial |
| | | | **Indeks Pembangunan Gender** | **Indeks** | **96,17** | **96,17*** | **96.46** | | **96.75** | | **97.04** | | **97.33** | | **97.62** | | **97.62** | | 2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing | | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,25 | 13,25* | 13.52 | | 13.62 | | 13.73 | | 13.84 | | 13.94 | | 13.94 | | 1.01. Pendidikan |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,58 | 8,58* | 8.64 | | 8.72 | | 8.8 | | 8.88 | | 8.96 | | 8.96 | | 1.01. Pendidikan |
| | | | Persentase pemajuan kebudayaan | % | 10.9 | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | | 2.22 Kebudayaan |
| | | **Program Pengelolaan Pendidikan** | | | | | | **154,069,667,000** | | **157,198,245,000** | | **161,631,992,000** | | **156,126,865,000** | | **157,373,144,000** | | **786,399,913,000** | **- Dinas Pendidikan<br>- SD Negeri<br>- SMP Negeri<br>- SKB Cawas** |
| | | | APM SD/MI/Paket A | % | 88.54 | 88.54 | 88.70 | - | 88.95 | - | 89.20 | - | 89.45 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | | APM SMP/MTs/Paket B | % | 71.14 | 71.14 | 71.35 | - | 71.60 | - | 71.80 | - | 72.00 | - | 72.35 | - | 72.35 | - | |
| | | | APK PAUD | % | 80.60 | 80.60 | 80.90 | - | 89.15 | - | 89.45 | - | 89.70 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | | Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | % | 99.59 | 99.59 | 99.65 | - | 99.75 | - | 99.80 | - | 99.90 | - | 99.95 | - | 99.95 | - | |
| | | | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV | % | 87.97 | 87.97 | 88.10 | - | 88.70 | - | 89.20 | - | 89.85 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | | Persentase SD berakreditasi minimal B | % | 97.81 | 97.81 | 97.90 | - | 98.00 | - | 98.25 | - | 98.60 | - | 98.90 | - | 98.90 | - | |
| | | | Persentase SMP berakreditasi minimal B | % | 86.13 | 86.13 | 86.50 | - | 86.90 | - | 87.10 | - | 87.55 | - | 88.00 | - | 88.00 | - | |
| | | | Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B | % | 36.70 | 36.70 | 36.75 | - | 36.95 | - | 37.10 | - | 37.55 | - | 37.85 | - | 37.85 | - | |
| | | | APK SD/MI/Paket A | % | 88.54 | 88.54 | 96.45 | - | 96.90 | - | 97.10 | - | 97.87 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | |
| | | | APK SMP/MTs /Paket B | % | 100.48 | 100.48 | 98.00 | - | 98.45 | - | 98.60 | - | 98.70 | - | 98.90 | - | 98.90 | - | |
| | | | APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun | % | 0.00 | 0.00 | 1.50 | - | 1.85 | - | 1.95 | - | 2.10 | - | 2.50 | - | 2.50 | - | |
| | | **Program Pengembangan Kebudayaan** | | | | | | **1,156,296,000** | | **1,165,029,000** | | **3,058,156,000** | | **2,796,317,000** | | **2,911,121,000** | | **11,086,919,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata** |
| | | | Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan | % | 0 | 25 | 20 | - | 25 | - | 25 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | |
| | | **Program Pelestarian dan Pengelolaaan Cagar Budaya** | | | | | | **418,780,000** | | **356,945,000** | | **523,691,000** | | **545,992,000** | | **543,730,000** | | **2,389,138,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata** |
| | | | Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan | % | 9.8 | 13.6 | 14 | - | 17 | - | 21 | - | 25 | - | 28 | - | 28 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Permuseuman** | | | | | | **-** | | **-** | | **464,405,000** | | **455,802,000** | | **384,942,000** | | **1,305,149,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata** |
| | | | Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan | % | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | |
| | Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 76,78 | 76,78* | 76.84 | | 76.89 | | 76.93 | | 76.98 | | 77.02 | | 77.02 | | 1.02. Kesehatan<br>2.19. Pemuda dan Olahraga |
| | | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | | | **86,465,858,000** | | **104,205,633,000** | | **108,668,574,000** | | **101,591,433,000** | | **94,170,760,000** | | **495,102,258,000** | **- Dinas Kesehatan<br>- RSD Bagas Waras<br>- 34 Puskesmas** |
| | | | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil | % | 93.44 | 93.27 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 99.99 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 96.70 | 97.80 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 92.71 | 95.77 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 31.13 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 73.26 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 73.14 | 74.50 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 32.28 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 90.76 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 88.32 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 29.28 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 86.08 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | % | 10.61 | 14.08 | 11.30 | - | 11.00 | - | 10.70 | - | 10.50 | - | 10.30 | - | 10.30 | - | |
| | | | Cakupan STBM | % | 24.90 | 50.00 | 70.00 | - | 90.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 24.90 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 29.30 | 12.00 | 12.00 | - | 15.00 | - | 20.00 | - | 25.00 | - | 30.00 | - | 30.00 | - | |
| | | | Penderita diare yang ditangani | % | 4.40 | 5.00 | 6.00 | - | 7.00 | - | 8.00 | - | 9.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | |
| | | | Angka Kejadian HIV | /1000 penduduk | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | |
| | | | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | /100.000 penduduk | 24,26 | 30.00 | 35,00 | - | 40,00 | - | 45,00 | - | 50,00 | - | 55,00 | - | 55,00 | - | |
| | | | Angka kejadian Malaria | /100.000 | 0,003 | < 1 | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | |
| | | | Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan | % | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | |
| | | | Angka Kejadian DBD | /100.000 | 33.45 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | |
| | | | Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC *(Universal Health Coverage)* | % | 89.00 | 91.00 | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | |
| | | | Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya | % | 100.00 | 97.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase pelayanan lab klinis dan lab air | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase Sistem Informasi Kesehatan | % | 60.00 | 60.00 | 60.00 | - | 70.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** | | | | | | **8,782,305,000** | | **8,871,602,000** | | **9,524,923,000** | | **9,436,318,000** | | **9,372,627,000** | | **45,987,775,000** | **Dinas Sosial PPPA serta Dalduk dan KB** |
| | | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR | % | 70.9 | NA | 71.5 | - | 72 | - | 72.5 | - | 73 | - | 73.5 | - | 73.5 | - | |
| | | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) | % | 16.95 | NA | 15.95 | - | 15.45 | - | 14.95 | - | 14.45 | - | 13.95 | - | 13.95 | - | |
| | | **Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** | | | | | | **928,355,000** | | **915,465,000** | | **953,315,000** | | **945,352,000** | | **947,727,000** | | **4,690,214,000** | **Dinas Sosial PPPA serta Dalduk dan KB** |
| | | | Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB | % | 79 | NA | 82 | - | 83 | - | 84 | - | 85 | - | 86 | - | 86 | - | |
| | | | Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB | % | 70.71 | NA | 75.42 | - | 75.92 | - | 76.42 | - | 76.92 | - | 77.42 | - | 77.42 | - | |
| | | | Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB | % | 73.89 | NA | 64.88 | - | 65.38 | - | 65.88 | - | 66.38 | - | 66.88 | - | 66.88 | - | |
| | | | Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB | % | 69.24 | NA | 63.29 | - | 63.79 | - | 64.29 | - | 64.79 | - | 65.29 | - | 65.29 | - | |
| | | | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | | NA | NA | 0.00 | - | 0.00 | - | 54.00 | - | 55.00 | - | 56.00 | - | 56.00 | - | |
| | Sasaran 3: Meningkatnya kesejaheraan masyarakat | | Persentase PMKS yang tertangani | % | 90,32 | 65 | 67,5 | | 68 | | 68,5 | | 69 | | 69,5 | | 69,5 | | 1.06. Sosial |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,46 | 5,31 | 5,16 | | 4,97 | | 4,50 | | 4,25 | | 4,25 | | 4,25 | | 2.07. Tenaga Kerja |
| | | | Indeks Desa Membangun | Indeks | 0,6854 | 0,6874 | 0,6894 | | 0,6914 | | 0,6934 | | 0.6954 | | 0,6974 | | 0,6974 | | 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | **Program Pemberdayaan Sosial** | | | | | | **1,578,595,000** | | **1,591,777,000** | | **1,693,224,000** | | **1,773,810,000** | | **1,878,756,000** | | **8,516,162,000** | **Dinas Sosial PPPA serta Dalduk dan KB** |
| | | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 96.00 | NA | 97.00 | - | 97.50 | - | 98.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | **Program Rehabilitasi Sosial** | | | | | | **3,038,191,000** | | **3,257,931,000** | | **3,565,440,000** | | **3,838,172,000** | | **4,173,257,000** | | **17,872,991,000** | **Dinas Sosial PPPA serta Dalduk dan KB** |
| | | | Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti | % | 80.00 | NA | 65.50 | - | 66.00 | - | 66.50 | - | 67.00 | - | 67.50 | - | 67.50 | - | |
| | | **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | | | **744,051,000** | | **872,533,000** | | **2,984,049,000** | | **3,660,957,000** | | **3,632,887,000** | | **11,894,477,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | 3.51 | 3.6 | 3.75 | - | 4.12 | - | 4.61 | - | 5.22 | - | 5.95 | - | 5.95 | - | |
| | | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | | | | | | **1,251,816,000** | | **3,048,905,000** | | **5,721,073,000** | | **3,782,181,000** | | **4,359,464,000** | | **18,163,439,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota | % | 21.11 | 21.50 | 21.00 | - | 22.50 | - | 23.00 | - | 24.00 | - | 24.50 | - | 24.50 | - | |
| | | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | | | | | | **4,097,353,000** | | **4,836,892,000** | | **5,345,597,000** | | **6,497,592,000** | | **5,726,007,000** | | **26,503,441,000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| | | | Persentase BUMDes berkembang dan Maju | % | 8.68 | 12.20 | 12.79 | - | 15.86 | - | 19.18 | - | 21.23 | - | 24.3 | - | 24.3 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | Persentasei desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan | % | 66.67 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indek | 72,35 | 72,68 | 73,34 | | 73,67 | | 74,00 | | 74,33 | | 74,66 | | 74,66 | | 2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Skor Kabupaten Layak Anak | Nilai | NA | 710 | 725 | | 740 | | 755 | | 770 | | 785 | | 785 | | 2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | | | | | | **200,894,000** | | **237,964,000** | | **268,762,000** | | **373,370,000** | | **322,389,000** | | **1,403,379,000** | **Dinas Sosial PPPA serta Dalduk dan KB** |
| | | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD | % | 0.2 | NA | 0.4 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 0.9 | - | |
| | | **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | | | | | | **300,838,000** | | **323,234,000** | | **311,251,000** | | **368,521,000** | | **384,942,000** | | **1,688,786,000** | **Dinas Sosial PPPA serta Dalduk dan KB** |
| | | | Persentase desa/kelurahan layak anak | % | 65.10 | NA | 70.10 | - | 76.30 | - | 82.50 | - | 86.30 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 6: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan** | | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | **Indeks** | **52,85** | **54,35** | **54,68** | | **55,01** | | **55,34** | | **55,67** | | **55,99** | | **55,99** | | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan | | Indeks kualitas air | Indeks | 36,15 | 36,39 | 36,63 | | 36,87 | | 37,11 | | 37,35 | | 37,59 | | 37,59 | | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | | Indeks kualitas udara | Indeks | 76,82 | 77,31 | 77,80 | | 78,29 | | 78,78 | | 79,27 | | 79,76 | | 79,76 | | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 42,54 | 42,72 | 42,9 | | 43,08 | | 43,26 | | 43,44 | | 43,62 | | 43,62 | | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | | | **1,829,963,000** | | **1,779,768,000** | | **2,324,495,000** | | **2,220,819,000** | | **1,737,049,000** | | **9,892,094,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | | Cakupan pemantauan kualitas air | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Cakupan pemantauan kualitas udara | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Presentase kampung iklim yang terbentuk | % | 10 | 10 | 30 | - | 40 | - | 60 | - | 80 | - | 100 | - | 100 | - | |
| | | **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** | | | | | | **5,716,120,000** | | **5,902,395,000** | | **8,716,975,000** | | **8,775,350,000** | | **11,779,807,000** | | **40,890,647,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | | Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik | % | 66.66 | 66.66 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 2: Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | Indeks | 56.95 | 58.95 | 59.95 | | 61.95 | | 63.95 | | 65.95 | | 66.95 | | 66.95 | | 2.11. Lingkungan Hidup |
| | | **Program Pengelolaan Persampahan** | | | | | | **12,359,860,000** | | **12,188,253,000** | | **12,146,232,000** | | **11,921,210,000** | | **11,829,804,000** | | **60,445,359,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | | Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani | % | 98.09 | 71.94 | 74.09 | - | 76.32 | - | 78.61 | - | 80.96 | - | 83.39 | - | 83.39 | - | |
| | | | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | % | 52.73 | 24.00 | 26.00 | - | 28.00 | - | 30.00 | - | 32.00 | - | 34.00 | - | 34.00 | - | |

| Misi/ Tujuan Pembangunan Daetah | Sasaran | Program Pembangunan Daerah | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Akhir | | |
| | | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Indeks | 0,92 | 0,92 | 0,92 | | 0,92 | | 0,92 | | 0,92 | | 0,92 | | 0,92 | | 1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat |
| | | **Program Penanggulangan Bencana** | | | | | | **5,047,480,000** | | **4,959,673,000** | | **5,224,566,000** | | **5,016,152,000** | | **5,056,876,000** | | **25,304,747,000** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| | | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 70.12 | 72.78 | 72.78 | - | 73.00 | - | 74.00 | - | 75.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | | Persentase kelompok relawan bencana yang aktif | % | 40.00 | 40.00 | 50.00 | - | 51.00 | - | 52.00 | - | 53.00 | - | 55.00 | - | 55.00 | - | |
| | | | Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi | % | 100.00 | 60.00 | 61.00 | - | 62.00 | - | 63.00 | - | 65.00 | - | 70.00 | - | 70.00 | - | |

# BAB VII
# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi:

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan perkembangan capaian pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2016-2019, pendapatan daerah Kabupaten Klatenn mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat Pandemi Covid-19 yang melanda tahun 2020, pendapatan daerah mengalami penurunan.

   Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada kebijakan Pendapatan, Pembelanjaan serta Pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah. Efisiensi serta efektifitas Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

   Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat, antara lain:

   a. Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
   b. Perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah;
   c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD;
   d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah;
   e. Penertiban ijin usaha.

2. Belanja Daerah

   Belanja Daerah merupakan belanja yang menjadi kewenangan daerah, berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun kerangka pendanaan belanja daerah diantaranya diarahkan untuk :

   a. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
   b. Melaksanakan pemenuhan belanja daerah yang sifatnya wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum)
   c. Melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah;

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu di bayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diperlukan dalam rangka penyiapan dana cadangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ataupun untuk penyertaan (investasi) daerah. Untuk penyertaan modal tersebut diantaranya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara keseluruhan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.1.**
**Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten**

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **2.520.987.884.551** | **2.508.342.505.200** | **2.536.777.602.200** | **2.567.152.606.200** | **2.599.068.166.200** | **2.687.852.118.200** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **249.063.886.351** | **274.449.465.000** | **302.884.562.000** | **333.259.566.000** | **365.175.126.000** | **453.959.078.000** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 103.372.962.000 | 113.710.259.000 | 126.281.284.000 | 138.909.413.000 | 153.800.355.000 | 170.180.390.000 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 13.967.805.000 | 15.673.215.000 | 17.325.109.000 | 18.566.543.000 | 19.862.311.000 | 22.291.856.000 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.197.839.911 | 13.273.183.000 | 14.586.842.000 | 16.916.184.000 | 19.261.993.000 | 23.625.093.000 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 119.525.279.440 | 131.792.808.000 | 144.691.327.000 | 158.867.426.000 | 172.250.467.000 | 237.861.739.000 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.148.491.398.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** | **2.110.460.440.200** |
| 4.2.1 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.968.844.129.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 | 1.930.813.171.000 |
| 4.2.1.1 | Dana Perimbangan | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 | 1.539.236.676.000 |
| | Dana Bagi Hasil (DBH) | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 | 38.345.857.000 |
| | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 | 1.149.421.184.000 |
| | Dana Transfer Khusus | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 | 351.469.635.000 |
| 4.2.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 | 10.729.894.000 |
| 4.2.1.5 | Dana Desa | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 | 380.846.601.000 |
| 4.2.2 | TRANSFER ANTAR DAERAH | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 | 179.647.269.200 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** | **123.432.600.000** |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 | 13.040.000.000 |
| 4.3.3 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 | 110.392.600.000 |

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perundang-Undangan | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA** | **2.672.822.301.894** | **2.671.826.951.200** | **2.693.526.301.200** | **2.809.130.163.200** | **2.753.642.765.200** | **2.837.589.477.200** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.856.311.721.298** | **1.859.147.517.200** | **1.806.764.904.200** | **1.952.392.760.200** | **1.887.921.646.200** | **1.928.478.084.200** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.217.830.195.949 | 1.229.477.323.200 | 1.235.924.037.200 | 1.242.281.304.200 | 1.248.669.299.200 | 1.255.077.897.200 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 591.166.498.849 | 578.636.597.000 | 519.331.950.000 | 613.602.539.000 | 587.743.430.000 | 621.891.270.000 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | 2.000.000.000 | 2.024.680.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 37.920.026.500 | 39.422.057.000 | 39.422.057.000 | 84.422.057.000 | 39.422.057.000 | 39.422.057.000 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 7.395.000.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 | 9.586.860.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **202.968.198.796** | **229.117.780.000** | **304.777.451.000** | **273.366.501.000** | **280.731.546.000** | **322.240.862.000** |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **15.000.000.000** | **11.000.000.000** | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **598.542.381.800** | **572.561.654.000** | **573.983.946.000** | **575.370.902.000** | **576.989.573.000** | **578.870.531.000** |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 11.734.076.700 | 12.938.348.000 | 14.360.640.000 | 15.747.596.000 | 17.366.267.000 | 19.247.225.000 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 586.808.305.100 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 | 559.623.306.000 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (189.865.375.343) | (163.484.446.000) | (156.748.699.000) | (241.977.557.000) | (154.574.599.000) | (149.737.359.000) |
| | | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **208.865.375.343** | **183.484.446.000** | **176.748.699.000** | **246.977.557.000** | **174.574.599.000** | **169.737.359.000** |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 208.865.375.343 | 183.484.446.000 | 176.748.699.000 | 201.977.557.000 | 174.574.599.000 | 169.737.359.000 |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | 45.000.000.000 | - | - |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **19.000.000.000** | **20.000.000.000** | **20.000.000.000** | **5.000.000.000** | **20.000.000.000** | **20.000.000.000** |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | - | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |

| KODE | URAIAN | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cadangan | | | | | | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 189.865.375.343 | 163.484.446.000 | 156.748.699.000 | 241.977.557.000 | 154.574.599.000 | 149.737.359.000 |
| | Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | - | - | - | - | - | - |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah*

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

## 7.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur program yang akan digunakan di urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

**1. Pendidikan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pendidikan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini untuk mendukung ketercapaian misi ke-5 yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsif gender, yang juga merupakan program unggulan Bupati Klaten dengan KLATEN TUNTAS yang diarahkan pada menurunkan angka anak tidak sekolah sebagai wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, di mana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta didukung peningkatan budaya membaca dan pengembangan kerjasama inovasi daerah.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu: 1) APM SD/MI/ Paket A; 2) APM SMP/MTs/ Paket B; 3) APK PAUD; 4) Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara); 5) Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV; 6) Persentase SD berakreditasi minimal B; 7) Persentase SMP berakreditasi minimal B; 8) Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B; 9) APK SD/MI/Paket A; 10) APK SMP/MTs/Paket B; dan 11) APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun.

**b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan muatan lokal dalam kegiatan belajar mengajar baik di tingkat PAUD, SD maupun SMP. Muatan lokal diajarkan ke siswa agar mengetahui dan memahami kearifan lokal yang ada di daerah, sehingga budaya dan kearifan lokal dapat dilestarikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Program untuk mendukung capaian indikator kinerja: 1) Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal SD; 2) Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal SMP; dan 3) Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD.

**c. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada pemenuhan dan ketersediaan guru secara ideal serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: 1) Rasio guru/murid SD/MI; 2) Rasio guru/murid SMP/MTs; dan 3) Rasio guru/murid PAUD.

**d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**

Program ini diarahkan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa dan satra, utamanya bahasa dan sastra daerah. Program ini digunakan

untuk mencapai indikator: 1) Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan.

**2. Kesehatan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten, yaitu KLATEN WARAS yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: 1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil; 2) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; 3) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar; 5) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 6) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; 7) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; 8) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 9) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; 10) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; 11) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar; 12) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar; 13) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; 14) Cakupan STBM; 15) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 16) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam; 17) Cakupan balita pneumonia yang ditangani; 18) Penderita diare yang ditangani; 19) Angka Kejadian HIV; 20) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk; 20) Angka kejadian Malaria; 21) Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta); 22) Angka Kejadian DBD; 23) Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage); 24) Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya; 25) Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya; 26) Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin; 27) Persentase pelayanan laboratorium klinis dan laboratorium air; dan 28) Persentase Sistem Informasi Kesehatan

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan untuk pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian agar sesuai dengan standart (ketentuan). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan usaha mikro obat tradisional yang memenuhi ketentuan dan persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.**

Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja cakupan desa siaga aktif..

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten, yaitu KLATEN MANTAP, dengan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. Program ini lebih pada manajemen pengelolaan sumber daya air sehingga dalam pemanfaatannya akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung capaian indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman untuk masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak.

**c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten dalam KLATEN LESTARI, salah satunya adalah dengan penyediaan sistem pengelolaan persampahan secara terpadu berupa TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang sesuai standart dan berwawasan lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik.

**d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak dan aman untuk masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung capaian indikator: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.

**e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten, yaitu KLATEN MANTAP, dengan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik.

**f. Program Pengembangan Permukiman**

Program ini diarahkan pada pembangunan di wilayah strategiss dan cepat tumbuh, untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja: Persentase infrastruktur yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh kabupaten/kota

**g. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini digunakan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan bangunan gedung milik daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja: Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun dan persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi.

**h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase dokumen RTBL yang tersusun dan Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya.

**i. Program Penyelenggaraan Jalan;**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten yang dalam pelaksanaannya mendapatkan perhatian, diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten. Diharapkan dengan infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase jalan kondisi baik dan Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik.

**j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Pelaksanaan program ini dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang jasa konstruksi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sesuai kewenangan daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

**k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini ditujukan untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku. Capaian keberhasilan progran ini diukur dengan indikator kinerja Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun; Persentase pelayanan ketataruangan dan Persentase pengendalian pemanfaatan ruang.

**4. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Perumahan**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pemenuhan indikator SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan indikator kinerja: Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

**b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten yang diarahkan pada peningkatan dan penanganan kawasan kumuh, utamanya pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani.

**c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Pelaksanaan program ini untuk rehabilitasi dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang berada di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha. Program ini juga merupakan program unggulan Bupati Klaten dalam rangka pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Indikator kinerja program ini adalah Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani.

**d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini digunakan untuk memfasilitasi penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan mendorong pengembang agar segera menyerahkan PSU Perumahan yang dibangun kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik dan Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan.

**e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan pada pembinaan pengembang perumahan dan kawasan permukiman. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan.

**5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dengan SANGGAR PEDATI (Satuan Anti Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang ditujukan untuk pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, indikator program ini adalah: Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan; Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Presentase jumlah penduduk yang

memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada.

**b. Program Penanggulangan Bencana**

Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten, yaitu KLATEN TANGGUH, dengan harapan masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. Program ini dimaksudkan untuk PRB inklusif dan pembentukan desa tangguh bencana (destana). Selain itu, program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana, dengan indikator: Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase kelompok relawan bencana yang aktif dan Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi.

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan untuk mendukung program unggulan Bupati Klaten dengan Satpol PP Damkar Go to School dan Ayo Siaga Brasta Dahana serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebakaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran dan Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

**6. Sosial**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan sosial tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

**b. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Pusat Layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PLKSAI); Rumah Singgah (Rusi) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti.

**c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar, indikator keberhasilan program ini adalah proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.

**d. Program Penanganan Bencana**

Program ini ditujukan pada pemenuhan sandang dan pangan untuk korban bencana, dengan indikator kinerja Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

**e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pengelolaan taman makam pahlawan sesuai standart. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase taman makam pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan taman makam pahlawan.

## 7.2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

**1. Tenaga Kerja**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan tenaga kerja tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dukumen perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

**b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/berwirausaha. Ukuran keberhasilan pada program adalah Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.

**d. Program Hubungan Industrial**

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara tenaga kerja (buruh) dan perusahaan, program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di Perangkat Daerah. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempun yang menjadi korban kekerasan. Imdikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga, dengan indikator kinerja Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan data pilah gender dan anak yang ada di setiap Perangkat Daerah, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak di tingkat kecamatan yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah Persentase desa/kelurahan layak anak.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, indikator keberhasilan program ini adalah Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar.

**3. Pangan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Program ini diarahkan pada penyediaan bahan pangan pada lumbung pangan yang menjadi cadangan pangan. Selain itu juga merupakan program unggulan Bupati Klaten dengan pengembangan lumbung pangan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja ketersediaan pangan utama/beras.

**b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada penyedian sumber protein dan energi yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yang juga merupakan program prioritas Bupati Klaten dengan pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Ketersediaan energi dan ketersedian protein.

**c. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Pelaksanaan program ini diarahkan pada penanganan desa rawan pangan baik yang disebabkan karena akses memperoleh pangan yang sulit maupun karena bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase penanganan daerah rawan pangan.

**d. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini ditujukan untuk pengawasan pangan, terutama pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman.

**4. Pertanahan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan di masyarakat, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Klaten yang hidup dari hasil bercocok tanam (petani) dengan indikator kinerja: Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan

**b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian ganti rugi tanah untuk pembangunan guna memberikan jaminan kepastian bagi mayarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu.

**c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

Program ini diarahkan untuk menfasilitasi pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah, dengan indikator keberhasilan: Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya.

**d. Program Penatagunaan Tanah.**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen penatagunaan tanah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pertanahan dengan indikator keberhasilan: Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun.

**5. Lingkungan Hidup**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penyedian dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas

**b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan melakukan pemantauan kualitas air dan udara. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program ini adalah: Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan pemantauan kualitas udara dan persentase kampung iklim yang terbentuk.

**c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini ditujukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan RTH, yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten di bidang lingkungan hidup dengan penyediaan ruang terbuka hijau hingga tingkat RW. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Presentase RTH publik yang terkelola dengan baik.

**d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah B3, agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3.

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan lingkungan dan izin PPLH. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan Persentase saka kalpataru yang dibina.

**g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada tokoh/lembaga masyarakat/sekolah/dunia usaha yang peduli dan *concern* terhadap pelestarian lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Jumlah tokoh/lembaga masyarakat/sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten dan Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten.

**h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan untuk memastikan setiap aduan masyarakat terkait perusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti dan ditangani. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani.

**i. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dengan fokus pada Pengelolaan persampahan (TPS) dengan budidaya maggot dan Pengembangan TPS Desa/Kelurahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase timbulan sampah di perkotaan yang tertangani dan Persentase jumlah sampah yang terkurangi.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Pelaksanaan program ini ditujukan pada pelayanan pendaftaran penduduk, dengan indikator kinerja Persentase Perekaman KTP Elektronik; Cakupan kepemilikan KK dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.

**b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil, dengan indikator kinerja Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran; Cakupan penerbitan akta kematian; Cakupan penerbitan akta perkawinan; Cakupan penerbitan akta perceraian; Cakupan penerbitan akta pengesahan anak dan Cakupan penerbitan pengangkatan anak.

**c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan database kependudukan dan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

**d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan, dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kerja sama antar desa, indikator keberhasilan pada program ini adalah Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.

**b. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan untuk mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten, yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase BUMDes berkembang dan Maju serta Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu.

**c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Pelaksanaan program ini mengarah pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dengan indikator kinerja: Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif; dan Persentase Posyantek aktif.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pengendalian penduduk, dengan indikator kinerja keberhasilan: Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan serta Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan pada penurunan masyarakat yang tidak terlayani dalam pemenuhan alat kontrasepsi, program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Angka pemakaian kontrasepsi/CPR; dan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmetneed).*

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan untuk mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten, yaitu e-Kartu Kembang Anak/el-Karana dan peningkatan pembinaan keluarga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB; Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB; Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

**9. Perhubungan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perhubungan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan dan pemenuhan pelayanan lalu lintas angkutan jalan, guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Klaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase kecelakaan lalu lintas.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan komunikasi dan informatika tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi publik terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikemas secara menarik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dan Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat.

**b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mendukung ketercapaian Klaten *Smart City* dengan menyediakan pelayanan publik secara *online* dan menyiapkan akses internet di setiap Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo; Persentase penambahan akses internet di ruang publik dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program ini diarahkan pada pemberian layanan perizinan terkait dengan usaha simpan pinjam, indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi dan Persentase permohonan izin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi.

**b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan koperasi di Kabupaten Klaten, indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase koperasi aktif dan Persentase koperasi yang patuh.

**c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Program ini diarahkan pada pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP, sehingga akan memberikan rasa aman pada masyarakat yang memiliki simpanan di koperasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya.

**d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Pelaksanaan program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

**e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam mengelola usahanya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan.

**f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan untuk mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten yang mengarah pada Optimalisasi *Showroom* produksi UMKM, peningkatan kapasitas kelembagaan Klaster UKM serta digitalisasi produk UKM, Asistensi Usaha mikro berbasis Klaster. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Pertumbuhan usaha mikro dan Persentase UMKM yang melakukan kemitraan.

**g. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro, dengan indikator keberhasilan: Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan.

**12. Penanaman Modal**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penanaman modal tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada pengembangan iklim investasi untuk menarik investor menanamkam modalnya di Kabupaten Klaten. Program

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi.

**b. Program Promosi Penanaman Modal**
Program ini diarahkan pada promosi investasi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten, dengan indikator kinerja persentase potensi investasi yang siap ditawarkan.

**c. Program Pelayanan Penanaman Modal**
Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten guna memberikan pelayanan yang prima dalam perizinan penanaman modal, diarahkan pada pemenuhan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). Program ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal.

**d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;**
Program ini diarahkan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan laporan penanaman modal yang telah dilakukan. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan program nini adalah Persentase pengendalian penanaman modal.

**e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
Pelaksanaan program ini adalah untuk menyediakan dan mengelola data perizinan dan non perizinan serta sistem informasi penanaman modal, indikator program ini adalah Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**
Program ini diarahkan untuk mengembangkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pelatihan dan pembinaan pemuda dalam organisasi kepemudaaan dan sosial kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

**b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**
Program ini ditujukan untuk pembinaan terhadap atlet yang dilakukan secara kontinu, indikator keberhasilan program ini adalah persentase atlet berprestasi.

**14. Statistik**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan statistik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
Pelaksanaan program ini fokus pada penyediaan data statistik sektoral dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

**15. Persandian**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan persandian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program ini ditujukan untuk pengamanan Informasi dan komunikasi Perangkat Daerah, program ini diukur dengan indikator Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik dan Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (*e-sign*/ tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah.

**16. Kebudayaan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kebudayaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini diarahkan untuk mengembangkan kebudayaan daerah agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan.

**b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kesenian tradisional di Kabupaten Klaten melalui pembinaan terhadap pelaku kesenian. Indikator yang ingin dicapai pada indikator ini adalah Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten.

**c. Program Pembinaan Sejarah**

Program ini dilaksanakan guna mendukung program unggulan Bupati Klaten untuk museum daerah dan taman budaya dengan fokus pada pelestarian dan pembinaan sejarah lokal. Program ini diukur dengan indikator persentase pembinaan sejarah.

**d. Program Pelestarian dan Pengelolaaan Cagar Budaya**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk melestarikan dan mengelola benda peninggalan, situs dan kawasan cagar budaya yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu program ini juga mendukung ketercapaian program unggulan bupati dalam pemenuhan museum daerah dan taman budaya. Indikator kinerja program ini adalah Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan.

**e. Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini merupakan salah satu program prioritas Bupati Klaten dalam pembangunan museum dan taman budaya, juga untuk mewadahi pengelolaan dan perlindungan terhadap koleksi benda sejarah/warisan budaya. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase koleksi museum yang dilestarikan.

**17. Perpustakaan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perpustakaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Program Pembinaan Perpustakaan**

Pelaksanaan program ini dilakukan guna mendukung salah satu program unggulan Bupati Klaten melalui KLATEN CETAR yang ditujukan untuk pelatihan komputer untuk masyarakat kurang mampu (Ulat Kupu) dan KLATEN TUNTAS melalui program Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku (Bejanaku). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan Persentase perpustakaan yang dibina.

**18. Kearsipan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kearsipan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini dilakukan dalam rangka pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku. Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase arsip yang diakuisisi dan Persentase pengawasan kearsipan internal.

**b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Program ini digunakan untuk mendukung program unggulan Bupati Klaten dengan Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku), guna meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip-arsip penting. Indikator kinerja program ini adalah arsip usul musnah dan persentase arsip yang dialihmediakan.

## 7.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

**1. Kelautan dan Perikanan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program dilaksanakan dalam rangka meningkatkan potensi dan pembinaan nelayan perikanan tangkap utamanya nelayan kecil/tradisional. Indikator keberhasilan program ini adalah produksi perikanan tangkap.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten untuk meningkatkan dan mengembangkan budidaya ikan berbasis minapolitan. Indikator kinerja program ini adalah produksi perikanan budidaya.

**c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Program dilaksanakan untuk pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air. Indikator keberhasilan program ini adalah cakupan tabur benih ikan *(restocking)* perairan umum.

**d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Klaten, dengan indikator kinerja jumlah produk olahan ikan.

**2. Pariwisata**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pariwisata tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten untuk mendukung KLATEN KEREN yang fokus pada peningkatan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya di Klaten dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase daya

tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten untuk mendukung KLATEN KEREN yang fokus pada promosi dan pemasaran destinasi wisata baik di dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kunjungaan wisatawan. Indikator program ini adalah tingkat intensitas promosi pariwisata.

**c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini ditujukan untuk pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indikator program ini adalah jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI.

**d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif. Indikator program ini adalah Persentase SDM pariwisata yang berkompeten.

**3. Pertanian**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini merupakan salah satu pendukung program unggulan Bupati Klaten dalam mengembangkan padi rojolele varietas srinar dan srinuk, peningkatan tanaman perkebunan dan hortikultura dengan bibit unggul serta budidaya pengembangan pertanian organik di Kabupaten Klaten. Indikator kinerja program ini adalah: Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; Produktivitas cabe; Produktivitas tembakau rajang dan Produktivitas tembakau asepan.

**b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini merupakan salah satu pendukung program unggulan Bupati Klaten dalam mengembangkan ternak unggul sapi dan/kambing serta diarahkan pada diseminasi dan penegakan Perda LP2B. Selain itu dalam program ini juga diarahkan untuk pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan. Indikator pada program ini adalah: Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional; Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian dan Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil).

**c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini dilaksanakan untuk pengendalian, pencegahan dan penanganan hama penyakit ternak ruminansia. Indikator yang digunakan dalam program ini adalah Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

**d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana pertanian yang dinilai akan memberi dampak pada usaha pertanian. Indikator kinerja pada program ini adalah: Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya.

**e. Program Penyuluhan Pertanian**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan pertanian. Indikator keberhasilan pada program ini adalah: Persentase kelompok tani madya dan utama.

**4. Perdagangan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perdagangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk mengembangkan dan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha untuk memperoleh rekomendasi izin sesuai dengan peraturan perundangan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan), dengan indikator kinerja persentase rekomendasi ijin usaha perdagangan yang diterbitkan.

**b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten, menjadi bagian dari KLATEN LARIS yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat/tradisional dengan melakukan revitalisasi pasar dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Indikator kinerja pada program ini adalah: Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi dan Persentase PKL yang terbina dan Jumlah pendapatan retribusi pasar.

**c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) di masyarakat serta menjaga ketersediaan dan pemenuhan pupuk bagi petani. Indikator kinerja pada program ini adalah: Persentase pasar yang diawasi; Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) dan Persentase kinerja pupuk.

**d. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini mendukung salah satu program unggulan Bupati Klaten dalam meningkatkan daya saing produk industri daerah, yang diarahkan pada jenis produk daerah yang mampu diekspor untuk meningkatkan nilai ekspor daerah dengan indikator kinerja jumlah komoditas yang mampu ekspor.

**e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

Pelaksanaan program ini untuk memberikan pelayanan pengukuran dan perlindungan konsumen, dengan indikator kinerja Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang.

**f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**

Program ini digunakan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Klaten, dengan indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri.

**5. Perindustrian**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perindustrian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah dengan indikator kinerja: Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina.

**b. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional**

Pelaksanaan pada program ini mengarah pada fasilitasi *database* IKM pada Sistem Industri Nasional (SIINas) dengan indikator kinerja Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

**6. Transmigrasi**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan transmigrasi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Program ini dimaksudkan untuk memberangkatkan dan membekali keterampilan bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan menuju wilayah transmigrasi. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi.

### 7.4. Urusan Penunjang Pemerintah

Nomenklatur program yang akan digunakan di urusan penunjang pemerintahan adalah sebagai berikut:

**1. Sekretariat Daerah**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Administrasi Umum**

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Sekretariat Daerah, guna mencapai indikator kinerja: Persentase dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusun; Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi; Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik; Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik; Persentase pelayanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terlaksana dengan baik dan Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP.

**b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan pemberian bantuan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada masyarakat, pemberian bantuan hukum kepada OPD dan desa yang ditimpa kasus hukum serta pembinaan tertib administrasi bagi kecamatan dan kelurahan. Indikator kinerja pada program ini adalah: Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerja sama yang terlaksana; Persentase Kecamatan

mencapai kategori Wasana; Persentase fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan; Persentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum.

**c. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi untuk kegiatan perekonomian dan pembangunan yang menjadi kewenangan sekretariat daerah. Selain itu juga mendukung program prioritas bupati untuk memberikan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui bank yang telah ditunjuk. Indikator kinerja pada program ini antara lain: Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan; Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan *e-procurement*; Persentase BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis; Pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah; Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan; Persentase rekomendasi tim pengendalian inflasi daerah yang ditindaklanjuti dan Persentase kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan.

**2. Sekretariat DPRD**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memberikan dukungan pelayanan kepada anggota DPRD dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya. Indikator kinerja yang digunakan adalah: Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal fasilitasi pembentukan perda; Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal fasilitasi penganggaran dan Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal fasilitasi pengawasan.

**3. Perencanaan Pembangunan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perencanaan pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan program ini, nantinya mendukung ketercapaian indikator: Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD.

**b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pelaksanaan program ini diarahkan guna mendukung keterpaduan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembanguann daerah agar semua target kinerja pembangunan dapat tercapai. Indikator yang digunakan dalam melakukan pengukuran adalah: Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan

Kewilayahan dan Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

**4. Keuangan Daerah**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan keuangan daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pelaksanaan program ini ditujukan dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal, dengan indikator kinerja: Persentase OPD menyusun Laporan Keuangan tepat waktu (2 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir); Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati) dan Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini ditujukan untuk pengelolaan aset daerah yang optimal, dengan indikator kinerja mencapai persentase barang milik daerah yang teregistrasi.

**c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target pajak daerah, dengan indikator kinerja: Rasio Pendapatan Asli Daerah.

**5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Kepegawaian Daerah**

Program ini ditujukan agar pengelolaan manajemen kepegawaian daerah semakin baik dan profesional guna mendukung pencapaian sistem merit. Program ini digunakan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi; Persentase kinerja ASN bernilai baik; Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan dan Persentase mutasi pegawai sesuai kebutuhan perangkat daerah.

**b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan program ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhlak) dengan indikator kinerja: Persentase ASN yang meningkat kompetensinya.

**6. Penelitian dan Pengembangan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penelitian dan pengembangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program ini ditujukan untuk mendorong kegiatan riset dan inovasi di bidang pemerintahan; sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, juga untuk mendukung program prioritas bupati dalam perbaikan varietas durian khas klaten. Program ini dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator: Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase pertumbuhan inovasi perangkat daerah.

**7. Pengawasan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengawasan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah secara efektif. Indikator program ini adalah: persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1; persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2; persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3; persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4; dan persentase pelaksanaan pengawasan khusus.

**b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator: Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3; dan Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus.

**8. Kewilayahan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kewilayahan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan, dengan indikator kinerja: Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN).

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat dengan indikator kinerja: Persentase lembaga masyarakat aktif.

**c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, dengan indikator kinerja: Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.

**d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

Pelaksanaan dari program ini adalah untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani.

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur pemeritah desa, dengan indikator kinerja: Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu dan Persentase desa tertib administrasi.

**9. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase kelompok

masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dan Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan.

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Pelaksanaan program ini lebih pada pendidikan politik masyarakat dan peningkatan peran partai politik melalui pembinaan yang dilakukan setiap tahun. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik dan Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu.

**c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kabupaten Klaten, dengan indikator kinerja Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan.

**d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya**

Pelaksanaan program ini diarahkan pada pembinaan kerukunan umat beragama dan pelaksanaan P4GN, dengan indikator persentase pembentukan paguyuban kerukunan umat beragama tingkat desa yang terbentuk dan cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik**

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik dengan melakukan deteksi dini potensi konflik. Indikator keberhasilan indikator program ini adalah Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan dan Persentase deteksi dini potensi konflik sosial.

Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2.

**Tabel 7.2**
**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**
**Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten 2021-2026**

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1,575,481,825,000** | | **1,583,751,761,000** | | **1,623,390,871,000** | | **1,591,893,708,000** | | **1,651,033,444,000** | | **8,025,551,609,000** | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **932,219,554,000** | | **925,878,335,000** | | **929,409,544,000** | | **909,801,217,000** | | **905,062,306,000** | | **4,602,370,956,000** | **- Dinas Pendidikan<br>- TK Negeri<br>- SD Negeri<br>- SMP Negeri<br>- SKB Cawas** |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **764,648,280,000** | | **758,763,503,000** | | **756,761,759,000** | | **742,268,047,000** | | **737,701,601,000** | | **3,760,143,190,000** | **- Dinas Pendidikan<br>- TK Negeri<br>- SKB Cawas** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | **154,069,667,000** | | **157,198,245,000** | | **161,631,992,000** | | **156,126,865,000** | | **157,373,144,000** | | **786,399,913,000** | **- Dinas Pendidikan<br>- SD Negeri<br>- SMP Negeri<br>- SKB Cawas** |
| | | APM SD/MI/Paket A | % | 88.54 | 88.54 | 88.70 | - | 88.95 | - | 89.20 | - | 89.45 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | APM SMP/MTs/Paket B | % | 71.14 | 71.14 | 71.35 | - | 71.60 | - | 71.80 | - | 72.00 | - | 72.35 | - | 72.35 | - | |
| | | APK PAUD | % | 80.60 | 80.60 | 80.90 | - | 89.15 | - | 89.45 | - | 89.70 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | % | 99.59 | 99.59 | 99.65 | - | 99.75 | - | 99.80 | - | 99.90 | - | 99.95 | - | 99.95 | - | |
| | | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV | % | 87.97 | 87.97 | 88.10 | - | 88.70 | - | 89.20 | - | 89.85 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | Persentase SD berakreditasi minimal B | % | 97.81 | 97.81 | 97.90 | - | 98.00 | - | 98.25 | - | 98.60 | - | 98.90 | - | 98.90 | - | |
| | | Persentase SMP berakreditasi minimal B | % | 86.13 | 86.13 | 86.50 | - | 86.90 | - | 87.10 | - | 87.55 | - | 88.00 | - | 88.00 | - | |
| | | Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B | % | 36.70 | 36.70 | 36.75 | - | 36.95 | - | 37.10 | - | 37.55 | - | 37.85 | - | 37.85 | - | |
| | | APK SD/MI/Paket A | % | 88.54 | 88.54 | 96.45 | - | 96.90 | - | 97.10 | - | 97.87 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | |
| | | APK SMP/MTs /Paket B | % | 100.48 | 100.48 | 98.00 | - | 98.45 | - | 98.60 | - | 98.70 | - | 98.90 | - | 98.90 | - | |
| | | APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun | % | 0.00 | 0.00 | 1.50 | - | 1.85 | - | 1.95 | - | 2.10 | - | 2.50 | - | 2.50 | - | |
| **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | **633,449,000** | | **639,527,000** | | **686,727,000** | | **834,020,000** | | **827,625,000** | | **3,621,348,000** | **Dinas Pendidikan** |
| | | Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | **12,775,654,000** | | **9,177,908,000** | | **10,215,435,000** | | **10,402,571,000** | | **8,991,524,000** | | **51,563,092,000** | **Dinas Pendidikan** |
| | | Rasio guru/murid SD/MI | rasio | 1:14 | 1:15 | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | |
| | | Rasio guru/murid SMP/MTs | rasio | 1:15 | 1:15 | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | 1:15 | - | |
| | | Rasio guru/murid PAUD | rasio | 1:9 | 1:9 | 1:10 | - | 1:10 | - | 1:10 | - | 1:10 | - | 1:10 | - | 1:10 | - | |
| **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | **92,504,000** | | **99,152,000** | | **113,631,000** | | **169,714,000** | | **168,412,000** | | **643,413,000** | **Dinas Pendidikan** |
| | | Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **392,011,717,000** | | **401,834,740,000** | | **410,971,672,000** | | **397,528,885,000** | | **387,324,661,000** | | **1,989,671,675,000** | **- Dinas Kesehatan<br>- RSD Bagas Waras<br>- 34 Puskesmas** |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **301,768,090,000** | | **294,320,104,000** | | **299,041,572,000** | | **292,977,977,000** | | **290,186,366,000** | | **1,478,294,109,000** | **- Dinas Kesehatan<br>- RSD Bagas Waras<br>- 34 Puskesmas** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **86,465,858,000** | | **104,205,633,000** | | **108,668,574,000** | | **101,591,433,000** | | **94,170,760,000** | | **495,102,258,000** | **- Dinas Kesehatan<br>- RSD Bagas Waras<br>- 34 Puskesmas** |
| | | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil | % | 93.44 | 93.27 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 99.99 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 96.70 | 97.80 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 92.71 | 95.77 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 31.13 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 73.26 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 73.14 | 74.50 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 32.28 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 90.76 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 88.32 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 29.28 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 86.08 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | % | 10.61 | 14.08 | 11.30 | - | 11.00 | - | 10.70 | - | 10.50 | - | 10.30 | - | 10.30 | - | |
| | | Cakupan STBM | % | 24.90 | 50.00 | 70.00 | - | 90.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 24.90 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 29.30 | 12.00 | 12.00 | - | 15.00 | - | 20.00 | - | 25.00 | - | 30.00 | - | 30.00 | - | |
| | | Penderita diare yang ditangani | % | 4.40 | 5.00 | 6.00 | - | 7.00 | - | 8.00 | - | 9.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | |
| | | Angka Kejadian HIV | /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | |
| | | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | /100.000 penduduk | 24,26 | 30.00 | 35,00 | - | 40,00 | - | 45,00 | - | 50,00 | - | 55,00 | - | 55,00 | - | |
| | | Angka kejadian Malaria | /100.000 | 0,003 | < 1 | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | < 1 | - | |
| | | Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) | % | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | |
| | | Angka Kejadian DBD | /100.000 | 33.45 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | |
| | | Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage) | % | 89.00 | 91.00 | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya | % | 100.00 | 97.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelayanan lab klinis dan lab air | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase Sistem Informasi Kesehatan | % | 60.00 | 60.00 | 60.00 | - | 70.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | **2,765,054,000** | | **2,149,602,000** | | **2,127,172,000** | | **1,830,964,000** | | **1,865,042,000** | | **10,737,834,000** | **- Dinas Kesehatan<br>- RSD Bagas Waras<br>- 34 Puskesmas** |
| | | Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar | % | 100.00 | 56.03 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar | % | 87.00 | 87.00 | 90.00 | - | 92.00 | - | 95.00 | - | 97.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | **326,780,000** | | **355,283,000** | | **384,518,000** | | **392,731,000** | | **393,470,000** | | **1,852,782,000** | **Dinas Kesehatan** |
| | | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | |
| | | Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan | % | 25.00 | 25.00 | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **685,935,000** | | **804,118,000** | | **749,836,000** | | **735,780,000** | | **709,023,000** | | **3,684,692,000** | **Dinas Kesehatan** |
| | | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 57.60 | 57.60 | 62.00 | - | 62.00 | - | 64.00 | - | 64.00 | - | 66.00 | - | 66.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **203,270,931,000** | | **206,580,943,000** | | **226,304,515,000** | | **229,404,419,000** | | **302,388,116,000** | | **1,167,948,924,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **34,387,212,000** | | **33,389,228,000** | | **33,279,053,000** | | **32,667,371,000** | | **32,421,706,000** | | **166,144,570,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | **12,065,689,000** | | **24,926,658,000** | | **16,367,801,000** | | **23,895,622,000** | | **17,384,925,000** | | **94,640,695,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 0.21 | 0.33 | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | **1,357,390,000** | | **4,957,570,000** | | **4,446,430,000** | | **4,848,950,000** | | **4,330,593,000** | | **19,940,933,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak | % | 18.16 | 92.45 | 94.02 | - | 95.59 | - | 97.16 | - | 98.73 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | | **1,307,117,000** | | **1,288,968,000** | | **1,284,525,000** | | **1,260,727,000** | | **1,251,061,000** | | **6,392,398,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | **5,127,918,000** | | **4,957,570,000** | | **4,446,430,000** | | **5,382,334,000** | | **4,715,535,000** | | **24,629,787,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan** |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | % | 0.85 | 1.06 | 1.27 | - | 1.48 | - | 1.69 | - | 1.90 | - | 2.21 | - | 2.21 | - | |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | **251,369,000** | | **3,470,299,000** | | **3,952,382,000** | | **3,879,160,000** | | **3,849,416,000** | | **15,402,626,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan** |
| | | Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik | % | 61.44 | 61.45 | 61.47 | - | 61.46 | - | 61.50 | - | 61.51 | - | 61.52 | - | 61.52 | - | |
| **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | | - | | **991,514,000** | | **1,037,501,000** | | **1,066,769,000** | | **1,106,708,000** | | **4,202,492,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase infrastruktur yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh kabupaten/ kota | % | N/A | 0 | 20.00 | - | 40.00 | - | 60.00 | - | 80.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | **48,866,038,000** | | **17,701,489,000** | | **35,266,011,000** | | **28,394,548,000** | | **36,420,521,000** | | **166,648,607,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun | % | 40.00 | 48.00 | 58.00 | - | 60.00 | - | 79.00 | - | 90.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi | % | N/A | N/A | 10.42 | - | 20.83 | - | 31.25 | - | 41.67 | - | 52.08 | - | 52.08 | - | |
| **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | **100,548,000** | | **495,757,000** | | **494,048,000** | | **484,895,000** | | **481,177,000** | | **2,056,425,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase dokumen RTBL yang tersusun | % | 0.00 | 0.00 | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | |
| | | Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya | % | 0.00 | 0.00 | 20.00 | - | 25.00 | - | 35.00 | - | 40.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | **97,344,238,000** | | **111,739,675,000** | | **122,815,452,000** | | **124,493,449,000** | | **196,577,057,000** | | **652,969,871,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase jalan kondisi baik | % | 66.25 | 67.62 | 67.72 | - | 67.82 | - | 67.93 | - | 68.05 | - | 68.22 | - | 68.22 | - | |
| | | Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik | % | 63.90 | 63.90 | 64.22 | - | 65.81 | - | 66.77 | - | 68.05 | - | 70.61 | - | 70.61 | - | |
| **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | **251,369,000** | | **545,333,000** | | **543,453,000** | | **533,385,000** | | **529,295,000** | | **2,402,835,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | N/A | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **2,212,043,000** | | **2,116,882,000** | | **2,371,429,000** | | **2,497,209,000** | | **3,320,122,000** | | **12,517,685,000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |
| | | Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun | % | 29.00 | 29.00 | 70.50 | - | 70.50 | - | 70.50 | - | 70.50 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelayanan ketataruangan | % | 50.00 | 50.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pengendalian pemanfaatan ruang | % | 25.00 | 25.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **14,961,993,000** | | **15,949,588,000** | | **18,399,061,000** | | **18,004,927,000** | | **18,281,098,000** | | **85,596,667,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **8,726,510,000** | | **8,565,688,000** | | **8,511,454,000** | | **8,353,770,000** | | **8,337,835,000** | | **42,495,257,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | **2,138,174,000** | | **2,449,040,000** | | **3,379,287,000** | | **3,462,150,000** | | **3,868,663,000** | | **15,297,314,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **1,457,938,000** | | **1,983,028,000** | | **2,124,406,000** | | **2,085,049,000** | | **2,069,062,000** | | **9,719,483,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | % | 0.14 | 0.14 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | |
| **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | **2,337,728,000** | | **2,456,074,000** | | **3,544,032,000** | | **3,279,636,000** | | **3,187,536,000** | | **14,805,006,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani | % | 94.03 | 94.03 | 95.23 | - | 96.43 | - | 97.63 | - | 98.83 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | **301,643,000** | | **446,182,000** | | **790,477,000** | | **775,832,000** | | **769,884,000** | | **3,084,018,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik | % | 45.00 | 45.00 | 49.65 | - | 62.24 | - | 74.13 | - | 86.01 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan | % | 0.70 | 7.43 | 23.53 | - | 38.61 | - | 52.76 | - | 66.07 | - | 78.61 | - | 78.61 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1.04.06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | - | | 49,576,000 | | 49,405,000 | | 48,490,000 | | 48,118,000 | | 195,589,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 19,560,934,000 | | 19,848,402,000 | | 23,433,299,000 | | 21,276,262,000 | | 21,627,161,000 | | 105,746,058,000 | - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran<br>- Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 12,948,315,000 | | 13,082,596,000 | | 15,170,339,000 | | 13,646,344,000 | | 13,960,944,000 | | 68,808,538,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | 1,053,352,000 | | 1,211,224,000 | | 1,976,191,000 | | 1,823,387,000 | | 1,598,869,000 | | 7,663,023,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | | Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | % | 41.50 | 42.00 | 42.00 | - | 43.00 | - | 44.00 | - | 45.00 | - | 47.00 | - | 47.00 | - | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 91.60 | 92.00 | 92.00 | - | 92.40 | - | 92.80 | - | 93.20 | - | 93.60 | - | 93.60 | - | |
| | | Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | 5,047,480,000 | | 4,959,673,000 | | 5,224,566,000 | | 5,016,152,000 | | 5,056,876,000 | | 25,304,747,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 70.12 | 72.78 | 72.78 | - | 73.00 | - | 74.00 | - | 75.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | Persentase kelompok relawan bencana yang aktif | % | 40.00 | 40.00 | 50.00 | - | 51.00 | - | 52.00 | - | 53.00 | - | 55.00 | - | 55.00 | - | |
| | | Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi | % | 100.00 | 60.00 | 61.00 | - | 62.00 | - | 63.00 | - | 65.00 | - | 70.00 | - | 70.00 | - | |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | 511,787,000 | | 594,909,000 | | 1,062,203,000 | | 790,379,000 | | 1,010,472,000 | | 3,969,750,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 70.00 | 65.00 | 65.00 | - | 70.00 | - | 75.00 | - | 80.00 | - | 85.00 | - | 85.00 | - | |
| | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Menit | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | - | 15.10 | - | 15.20 | - | 15.30 | - | 15.30 | - | |
| | | Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 13,456,696,000 | | 13,659,753,000 | | 14,872,780,000 | | 15,877,998,000 | | 16,350,102,000 | | 74,217,329,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 6,975,508,000 | | 6,714,946,000 | | 7,257,675,000 | | 7,509,109,000 | | 7,442,721,000 | | 35,899,959,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | **1,578,595,000** | | **1,591,777,000** | | **1,693,224,000** | | **1,773,810,000** | | **1,878,756,000** | | **8,516,162,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 96.00 | 96.50 | 97.00 | - | 97.50 | - | 98.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | **3,038,191,000** | | **3,257,931,000** | | **3,565,440,000** | | **3,838,172,000** | | **4,173,257,000** | | **17,872,991,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti | % | 80.00 | 65.00 | 65.50 | - | 66.00 | - | 66.50 | - | 67.00 | - | 67.50 | - | 67.50 | - | |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | **402,190,000** | | **515,938,000** | | **634,741,000** | | **856,422,000** | | **886,723,000** | | **3,296,014,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah | % | 143.08 | 88.00 | 88.50 | - | 89.00 | - | 89.50 | - | 90.00 | - | 90.50 | - | 90.50 | - | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | **1,291,281,000** | | **1,395,730,000** | | **1,524,080,000** | | **1,687,131,000** | | **1,732,868,000** | | **7,631,090,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | **170,931,000** | | **183,431,000** | | **197,620,000** | | **213,354,000** | | **235,777,000** | | **1,001,113,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **142,490,044,000** | | **150,531,780,000** | | **178,539,987,000** | | **176,522,118,000** | | **177,263,716,000** | | **825,347,645,000** | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **2,538,823,000** | | **4,397,535,000** | | **9,189,527,000** | | **7,923,789,000** | | **8,469,470,000** | | **32,519,144,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | | **135,739,000** | | **20,000,000** | | **20,000,000** | | **20,000,000** | | **20,000,000** | | **215,739,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah | % | 0.00 | 0.00 | 85.00 | - | 87.00 | - | 89.00 | - | 90.00 | - | 92.00 | - | 92.00 | - | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | **744,051,000** | | **872,533,000** | | **2,984,049,000** | | **3,660,957,000** | | **3,632,887,000** | | **11,894,477,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | 3.51 | 3.6 | 3.75 | - | 4.12 | - | 4.61 | - | 5.22 | - | 5.95 | - | 5.95 | - | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | **1,251,816,000** | | **3,048,905,000** | | **5,721,073,000** | | **3,782,181,000** | | **4,359,464,000** | | **18,163,439,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota | % | 21.11 | 21.50 | 21.00 | - | 22.50 | - | 23.00 | - | 24.00 | - | 24.50 | - | 24.50 | - | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | **407,217,000** | | **456,097,000** | | **464,405,000** | | **460,651,000** | | **457,119,000** | | **2,245,489,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **1,429,583,000** | | **1,467,243,000** | | **1,520,481,000** | | **1,771,614,000** | | **1,707,987,000** | | **7,896,908,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | **200,894,000** | | **237,964,000** | | **268,762,000** | | **373,370,000** | | **322,389,000** | | **1,403,379,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD | % | 0.2 | 0.3 | 0.4 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 0.9 | - | |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | **234,677,000** | | **238,359,000** | | **223,704,000** | | **252,533,000** | | **251,559,000** | | **1,200,832,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | **175,958,000** | | **148,728,000** | | **182,798,000** | | **242,448,000** | | **211,718,000** | | **961,650,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | | **30,165,000** | | **34,703,000** | | **49,405,000** | | **53,339,000** | | **57,742,000** | | **225,354,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak | % | 28.80 | 34.60 | 40.40 | - | 46.20 | - | 51.90 | - | 57.70 | - | 67.30 | - | 67.30 | - | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | **300,838,000** | | **323,234,000** | | **311,251,000** | | **368,521,000** | | **384,942,000** | | **1,688,786,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase desa/kelurahan layak anak | % | 65.10 | 67.60 | 70.10 | - | 76.30 | - | 82.50 | - | 86.30 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | **487,051,000** | | **484,255,000** | | **484,561,000** | | **481,403,000** | | **479,637,000** | | **2,416,907,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **2,026,033,000** | | **2,325,102,000** | | **2,924,764,000** | | **2,856,034,000** | | **2,478,064,000** | | **12,609,997,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | | **774,216,000** | | **817,999,000** | | **1,136,310,000** | | **1,042,525,000** | | **842,060,000** | | **4,613,110,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Ketersediaan pangan utama / beras | Ton | 267,611 | 270,287 | 272.990 | - | 275.720 | - | 278.477 | - | 281.262 | - | 284.075 | - | 284,075 | - | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | **1,050,721,000** | | **1,284,011,000** | | **1,506,846,000** | | **1,522,571,000** | | **1,337,673,000** | | **6,701,822,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Ketersediaan energi | kkal/ kapita/ hari | 3.003 | 3,015 | 3,030 | - | 3,045 | - | 3,060 | - | 3,075 | - | 3,090 | - | 3,090 | - | |
| | | Ketersediaan protein | gram/ kapita/ hari | 80.87 | 84.50 | 85.2 | - | 85.5 | - | 85.8 | - | 86.1 | - | 86.4 | - | 86.4 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | **145,794,000** | | **158,643,000** | | **212,441,000** | | **218,203,000** | | **221,342,000** | | **956,423,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Persentase penanganan daerah rawan pangan | % | 8.00 | 8.00 | 10.00 | - | 12.00 | - | 14.00 | - | 16.00 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | **55,302,000** | | **64,449,000** | | **69,167,000** | | **72,735,000** | | **76,989,000** | | **338,642,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman | % | 79.00 | 79.00 | 80.00 | - | 81.00 | - | 82.00 | - | 83.00 | - | 84.00 | - | 84.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **553,012,000** | | **793,214,000** | | **839,883,000** | | **824,323,000** | | **818,004,000** | | **3,828,436,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | | **201,095,000** | | **148,728,000** | | **148,215,000** | | **145,469,000** | | **144,354,000** | | **787,861,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | | **100,548,000** | | **148,728,000** | | **148,215,000** | | **145,469,000** | | **144,354,000** | | **687,314,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | | | | | | - | | **297,455,000** | | **296,429,000** | | **290,937,000** | | **288,707,000** | | **1,173,528,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya | % | 28.75 | 35.00 | 42.50 | - | 50.00 | - | 57.50 | - | 65.00 | - | 72.50 | - | 72.5 | - | |
| **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | | | | **251,369,000** | | **198,303,000** | | **247,024,000** | | **242,448,000** | | **240,589,000** | | **1,179,733,000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** |
| | | Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **26,275,152,000** | | **26,441,621,000** | | **32,020,317,000** | | **31,347,202,000** | | **31,728,183,000** | | **147,812,475,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5,263,185,000** | | **5,202,913,000** | | **7,226,957,000** | | **6,756,932,000** | | **5,659,753,000** | | **30,109,740,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **452,464,000** | | **624,654,000** | | **395,239,000** | | **533,385,000** | | **144,354,000** | | **2,150,096,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **1,829,963,000** | | **1,779,768,000** | | **2,324,495,000** | | **2,220,819,000** | | **1,737,049,000** | | **9,892,094,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Cakupan pemantauan kualitas air | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan pemantauan kualitas udara | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Presentase kampung iklim yang terbentuk | % | 10 | 10 | 30 | - | 40 | - | 60 | - | 80 | - | 100 | - | 100 | - | |
| **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | **5,716,120,000** | | **5,902,395,000** | | **8,716,975,000** | | **8,775,350,000** | | **11,779,807,000** | | **40,890,647,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik | % | 66.66 | 66.66 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | | **100,548,000** | | **79,322,000** | | **187,739,000** | | **184,261,000** | | **81,801,000** | | **633,671,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3 | % | 83 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | | **100,548,000** | | **99,152,000** | | **222,322,000** | | **218,203,000** | | **72,177,000** | | **712,402,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | % | 0.00 | 0.00 | 60.00 | - | 65.00 | - | 70.00 | - | 75.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | **100,548,000** | | **128,897,000** | | **247,024,000** | | **242,448,000** | | **96,236,000** | | **815,153,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase saka kalpataru yang dibina | % | N/A | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | **351,916,000** | | **396,606,000** | | **494,048,000** | | **436,406,000** | | **288,707,000** | | **1,967,683,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten | orang | N/A | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
| | | Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **-** | | **39,661,000** | | **59,286,000** | | **58,188,000** | | **38,495,000** | | **195,630,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | **12,359,860,000** | | **12,188,253,000** | | **12,146,232,000** | | **11,921,210,000** | | **11,829,804,000** | | **60,445,359,000** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| | | Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani | % | 98.09 | 71.94 | 74.09 | - | 76.32 | - | 78.61 | - | 80.96 | - | 83.39 | - | 83.39 | - | |
| | | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | % | 52.73 | 24.00 | 26.00 | - | 28.00 | - | 30.00 | - | 32.00 | - | 34.00 | - | 34.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **6,267,109,000** | | **6,262,304,000** | | **8,282,784,000** | | **7,826,142,000** | | **6,844,814,000** | | **35,483,153,000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5,263,185,000** | | **5,202,913,000** | | **7,226,957,000** | | **6,756,932,000** | | **5,659,753,000** | | **30,109,740,000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | **643,259,000** | | **669,030,000** | | **654,177,000** | | **634,787,000** | | **700,995,000** | | **3,302,248,000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| | | Persentase Perekaman KTP Elektronik | % | 97.87 | 97.87 | 99.02 | - | 99.03 | - | 99.04 | - | 99.05 | - | 99.06 | - | 99.06 | - | |
| | | Cakupan kepemilikan KK | % | 97.80 | 97.80 | 97.90 | - | 98.00 | - | 98.02 | - | 98.04 | - | 98.06 | - | 98.06 | - | |
| | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 46.84 | 46.84 | 50.00 | - | 60.00 | - | 70.00 | - | 80.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **326,478,000** | | **331,860,000** | | **341,751,000** | | **326,954,000** | | **351,260,000** | | **1,678,303,000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| | | Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran. | % | 91.87 | 91.87 | 97 | - | 98 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan penerbitan akta kematian | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan penerbitan akta perkawinan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan penerbitan akta perceraian | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan penerbitan akta pengesahan anak | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan penerbitan pengangkatan anak | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | **20,110,000** | | **44,619,000** | | **46,016,000** | | **84,093,000** | | **103,935,000** | | **298,773,000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| | | Persentase ketersediaan database kependudukan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama | % | 0 | 13.73 | 17.65 | - | 22.00 | - | 25.00 | - | 29.00 | - | 33.00 | - | 33.00 | - | |
| **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | **14,077,000** | | **13,882,000** | | **13,883,000** | | **23,376,000** | | **28,871,000** | | **94,089,000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| | | Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **9,720,328,000** | | **12,038,032,000** | | **13,877,019,000** | | **13,586,636,000** | | **13,741,360,000** | | **62,963,375,000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4,949,214,000** | | **5,361,881,000** | | **5,962,373,000** | | **5,144,615,000** | | **5,556,537,000** | | **26,974,620,000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | | | | | | **57,924,000** | | **99,152,000** | | **98,810,000** | | **96,979,000** | | **144,354,000** | | **497,219,000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| | | Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 % | - | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **4,097,353,000** | | **4,836,892,000** | | **5,345,597,000** | | **6,497,592,000** | | **5,726,007,000** | | **26,503,441,000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| | | Persentase BUMDes berkembang dan Maju | % | 8.68 | 12.20 | 12.79 | - | 15.86 | - | 19.18 | - | 21.23 | - | 24.3 | - | 24.30 % | - | |
| | | Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu | % | 66.67 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 % | - | |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | **615,837,000** | | **1,740,107,000** | | **2,470,239,000** | | **1,847,450,000** | | **2,314,462,000** | | **8,988,095,000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| | | Persentase PKK aktif | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 % | - | |
| | | Persentase Posyandu aktif | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 % | - | |
| | | Persentase Posyantek aktif | % | 18.18 | 23.08 | 26.67 | - | 29.41 | - | 31.58 | - | 33.33 | - | 34.78 | - | 34.78 % | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **10,175,994,000** | | **10,308,405,000** | | **11,029,398,000** | | **10,914,861,000** | | **10,827,804,000** | | **53,256,462,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | **465,334,000** | | **521,338,000** | | **551,160,000** | | **533,191,000** | | **507,450,000** | | **2,578,473,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan | % | 33.33 | 66.67 | 83.33 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |
| | | Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan | % | 71.43 | 85.71 | 85.71 | - | 85.71 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | **8,782,305,000** | | **8,871,602,000** | | **9,524,923,000** | | **9,436,318,000** | | **9,372,627,000** | | **45,987,775,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR | % | 70.9 | 71.00 | 71.5 | - | 72 | - | 72.5 | - | 73 | - | 73.5 | - | 73.5 | - | |
| | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) | % | 16.95 | 16.45 | 15.95 | - | 15.45 | - | 14.95 | - | 14.45 | - | 13.95 | - | 13.95 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | **928,355,000** | | **915,465,000** | | **953,315,000** | | **945,352,000** | | **947,727,000** | | **4,690,214,000** | **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| | | Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB | % | 79.00 | 81.00 | 82.00 | - | 83.00 | - | 84.00 | - | 85.00 | - | 86.00 | - | 86.00 | - | |
| | | Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB | % | 70.71 | 74.92 | 75.42 | - | 75.92 | - | 76.42 | - | 76.92 | - | 77.42 | - | 77.42 | - | |
| | | Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB | % | 73.89 | 64.38 | 64.88 | - | 65.38 | - | 65.88 | - | 66.38 | - | 66.88 | - | 66.88 | - | |
| | | Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB | % | 69.24 | 62.79 | 63.29 | - | 63.79 | - | 64.29 | - | 64.79 | - | 65.29 | - | 65.29 | - | |
| | | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 54.00 | - | 55.00 | - | 56.00 | - | 56.00 | - | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **28,575,178,000** | | **36,649,113,000** | | **38,023,023,000** | | **37,227,380,000** | | **37,651,297,000** | | **178,125,991,000** | **Dinas Perhubungan** |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **20,761,238,000** | | **28,058,696,000** | | **28,148,056,000** | | **28,737,897,000** | | **28,364,581,000** | | **134,070,468,000** | **Dinas Perhubungan** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 98.86 | - | 99.14 | - | 99.43 | - | 99.71 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | **7,813,940,000** | | **8,590,417,000** | | **9,874,967,000** | | **8,489,483,000** | | **9,286,716,000** | | **44,055,523,000** | **Dinas Perhubungan** |
| | | Persentase kecelakaan lalu lintas | % | 0.90 | 0.90 | 0.80 | - | 0.70 | - | 0.60 | - | 0.50 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **13,709,108,000** | | **13,858,200,000** | | **17,496,668,000** | | **18,958,638,000** | | **19,166,826,000** | | **83,189,440,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7,711,128,000** | | **7,654,487,000** | | **7,892,412,000** | | **8,102,595,000** | | **8,040,468,000** | | **39,401,090,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | **1,754,879,000** | | **1,735,150,000** | | **1,902,084,000** | | **2,085,049,000** | | **2,069,062,000** | | **9,546,224,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | % | 0.00 | 0.00 | 18.18 | - | 36.36 | - | 54.55 | - | 72.73 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | | **4,243,101,000** | | **4,468,563,000** | | **7,702,172,000** | | **8,770,994,000** | | **9,057,296,000** | | **34,242,126,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo | % | 55.00 | 54.90 | 58.82 | - | 62.75 | - | 66.67 | - | 70.59 | - | 74.51 | - | 74.51 | - | |
| | | Persentase penambahan akses internet di ruang publik | % | 70.00 | 80.00 | 67.50 | - | 75.00 | - | 82.50 | - | 90.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 40.74 | 53.70 | 62.96 | - | 72.22 | - | 81.48 | - | 90.74 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **20,355,850,000** | | **21,149,127,000** | | **23,192,257,000** | | **23,084,359,000** | | **23,254,918,000** | | **111,036,511,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **19,385,564,000** | | **19,468,508,000** | | **21,186,420,000** | | **21,018,704,000** | | **21,060,748,000** | | **102,119,944,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | | | **50,274,000** | | **39,661,000** | | **59,286,000** | | **58,188,000** | | **67,365,000** | | **274,774,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi | % | 16.70 | 20.51 | 23.93 | - | 26.82 | - | 29.52 | - | 33.62 | - | 35.00 | - | 35.00 | - | |
| | | Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi | % | 6.30 | 7.40 | 8.80 | - | 9.30 | - | 10.20 | - | 11.00 | - | 12.20 | - | 12.20 | - | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | **150,822,000** | | **69,406,000** | | **197,620,000** | | **193,958,000** | | **202,095,000** | | **813,901,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase koperasi aktif | % | 66.94 | 67.54 | 69.5 | - | 71.2 | - | 72.65 | - | 73.85 | - | 75 | - | 75 | - | |
| | | Persentase koperasi yang patuh | % | 23.1 | 23.9 | 24.83 | - | 25.9 | - | 26.94 | - | 27.95 | - | 30 | - | 30 | - | |
| **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | **75,411,000** | | **69,406,000** | | **88,929,000** | | **126,073,000** | | **129,918,000** | | **489,737,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya | % | 9.34 | 7.6 | 14.75 | - | 17 | - | 17.65 | - | 18.05 | - | 18.5 | - | 18.5 | - | |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | **140,000,000** | | **99,152,000** | | **247,024,000** | | **242,448,000** | | **288,707,000** | | **1,017,331,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan | % | 25.84 | 27.85 | 30.2 | - | 31.6 | - | 31.9 | - | 32.2 | - | 32.5 | - | 32.5 | - | |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | **10,822,000** | | **19,831,000** | | **29,643,000** | | **38,792,000** | | **48,118,000** | | **147,206,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan | % | 17.8 | 18.2 | 18.2 | - | 18.9 | - | 19.45 | - | 20.2 | - | 20.95 | - | 20.95 | - | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | **492,683,000** | | **1,085,708,000** | | **1,037,501,000** | | **1,066,769,000** | | **1,097,084,000** | | **4,779,745,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Pertumbuhan usaha mikro | % | 0.11 | 0.12 | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | |
| | | Persentase UMKM yang melakukan kemitraan | % | 0.25 | 0.27 | 0.3 | - | 0.32 | - | 0.35 | - | 0.38 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | **50,274,000** | | **297,455,000** | | **345,834,000** | | **339,427,000** | | **360,883,000** | | **1,393,873,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan | % | 3.86 | 3.1 | 3.3 | - | 3.5 | - | 3.7 | - | 4 | - | 4.2 | - | 4.2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **11,060,218,000** | | **4,815,214,000** | | **5,983,824,000** | | **5,860,982,000** | | **5,909,241,000** | | **33,629,479,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **8,747,625,000** | | **3,630,353,000** | | **3,607,452,000** | | **3,536,392,000** | | **3,732,394,000** | | **23,254,216,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | | **301,643,000** | | **133,855,000** | | **424,882,000** | | **417,010,000** | | **413,813,000** | | **1,691,203,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi | % | 80 | 80 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **703,832,000** | | **208,218,000** | | **1,086,905,000** | | **1,042,525,000** | | **1,058,590,000** | | **4,100,070,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan | % | 0 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **351,916,000** | | **173,515,000** | | **172,917,000** | | **189,110,000** | | **173,224,000** | | **1,060,682,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal | % | 80.00 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **628,422,000** | | **619,697,000** | | **617,560,000** | | **603,210,000** | | **483,102,000** | | **2,951,991,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | Persentase pengendalian penanaman modal | % | 80.00 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **326,780,000** | | **49,576,000** | | **74,108,000** | | **72,735,000** | | **48,118,000** | | **571,317,000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| | | Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | % | 0.00 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **2,607,580,000** | | **2,682,046,000** | | **3,883,216,000** | | **2,632,981,000** | | **2,814,887,000** | | **14,620,710,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | **648,531,000** | | **629,612,000** | | **721,310,000** | | **659,458,000** | | **683,272,000** | | **3,342,183,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 1.02 | 0.00 | 1.04 | - | 1.08 | - | 1.12 | - | 1.17 | - | 1.3 | - | 1.3 | - | |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 4.15 | 0.00 | 4.2 | - | 4.45 | - | 4.65 | - | 4.88 | - | 5.1 | - | 5.1 | - | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | **1,959,049,000** | | **2,052,434,000** | | **3,161,906,000** | | **1,973,523,000** | | **2,131,615,000** | | **11,278,527,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase atlet berprestasi | % | 9 | 0.00 | 2.85 | - | 4.29 | - | 5.71 | - | 7.4 | - | 7.14 | - | 7.14 | - | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **201,095,000** | | **247,879,000** | | **296,429,000** | | **315,182,000** | | **322,389,000** | | **1,382,974,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | | **201,095,000** | | **247,879,000** | | **296,429,000** | | **315,182,000** | | **322,389,000** | | **1,382,974,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia | % | 25.00 | 25.00 | 30.00 | - | 40.00 | - | 50.00 | - | 60.00 | - | 70.00 | - | 70.00 | - | |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **150,822,000** | | **178,473,000** | | **247,024,000** | | **290,937,000** | | **298,330,000** | | **1,165,586,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | **150,822,000** | | **178,473,000** | | **247,024,000** | | **290,937,000** | | **298,330,000** | | **1,165,586,000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik | % | 38 | 35 | 35 | - | 38 | - | 39 | - | 40 | - | 41 | - | 41 | - | |
| | | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 0 | 19.61 | 29.41 | - | 39.22 | - | 49.02 | - | 58.82 | - | 68.63 | - | 68.63 | - | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **1,846,555,000** | | **1,893,793,000** | | **4,520,538,000** | | **4,307,737,000** | | **4,359,465,000** | | **16,928,088,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **1,156,296,000** | | **1,165,029,000** | | **3,058,156,000** | | **2,796,317,000** | | **2,911,121,000** | | **11,086,919,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan | % | 0 | 25 | 20 | - | 25 | - | 25 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | |
| **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | **150,822,000** | | **188,388,000** | | **237,143,000** | | **256,025,000** | | **259,836,000** | | **1,092,214,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten | % | 0 | 0 | 30 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | - | 70 | - | 70 | - | |
| **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | | **120,657,000** | | **183,431,000** | | **237,143,000** | | **253,601,000** | | **259,836,000** | | **1,054,668,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase Pembinaan Sejarah | % | 0 | 0 | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 45 | - | 50 | - | 50 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | **418,780,000** | | **356,945,000** | | **523,691,000** | | **545,992,000** | | **543,730,000** | | **2,389,138,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan | % | 9.8 | 13.6 | 14 | - | 17 | - | 21 | - | 25 | - | 28 | - | 28 | - | |
| **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | | **-** | | **-** | | **464,405,000** | | **455,802,000** | | **384,942,000** | | **1,305,149,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan | % | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **215,125,000** | | **233,951,000** | | **338,917,000** | | **620,675,000** | | **695,782,000** | | **2,104,450,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **215,125,000** | | **233,951,000** | | **338,917,000** | | **620,675,000** | | **695,782,000** | | **2,104,450,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| | | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | eksemplar | 49,786 | 0 | 49,962 | - | 51,962 | - | 52,062 | - | 52,162 | - | 52,262 | - | 52262 | - | |
| | | Persentase perpustakaan yang dibina | % | 21.99 | 24.55 | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | - | 25 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **4,782,479,000** | | **4,790,528,000** | | **4,873,918,000** | | **6,172,646,000** | | **6,174,895,000** | | **26,794,466,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| **2.24.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4,504,015,000** | | **4,481,531,000** | | **4,508,826,000** | | **5,524,825,000** | | **5,492,586,000** | | **24,511,783,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | **231,845,000** | | **247,453,000** | | **275,748,000** | | **455,802,000** | | **481,177,000** | | **1,692,025,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| | | Persentase arsip yang diakuisisi | % | 100.00 | 0.00 | 77.00 | - | 78.00 | - | 79.00 | - | 80.00 | - | 81.00 | - | 81.00 | - | |
| | | Persentase pengawasan kearsipan internal | % | 9.80 | 49.02 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | | **46,619,000** | | **61,544,000** | | **89,344,000** | | **192,019,000** | | **201,132,000** | | **590,658,000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| | | Arsip usul musnah | Meter lari | 0.00 | 0.00 | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | |
| | | Persentase arsip yang dialihmediakan | **%** | 25.85 | 19.96 | 20.00 | - | 20.91 | - | 21.82 | - | 22.73 | - | 24.55 | - | 24.55 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **73,823,230,000** | | **78,412,677,000** | | **91,390,816,000** | | **90,233,662,000** | | **91,144,686,000** | | **425,005,071,000** | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **1,156,297,000** | | **1,507,103,000** | | **1,674,824,000** | | **1,876,545,000** | | **1,712,992,000** | | **7,927,761,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | **30,165,000** | | **49,576,000** | | **49,405,000** | | **72,735,000** | | **115,483,000** | | **317,364,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Produksi perikanan tangkap | ton | 184 | 537 | 543 | - | 547 | - | 552 | - | 557 | - | 562 | - | 562 | - | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | **975,310,000** | | **1,274,096,000** | | **1,432,739,000** | | **1,561,362,000** | | **1,342,484,000** | | **6,585,991,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Produksi perikanan budidaya | ton | 27,604 | 28,315 | 29,165 | - | 30,039 | - | 30,940 | - | 31,500 | - | 32,000 | - | 32,000 | - | |
| **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **50,274,000** | | **74,364,000** | | **74,108,000** | | **121,224,000** | | **120,295,000** | | **440,265,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Cakupan tabur benih ikan (Restocking) perairan umum | % | 8 | 8.00 | 15.00 | - | 23.00 | - | 30.00 | - | 38.00 | - | 46.00 | - | 46.00 | - | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | **100,548,000** | | **109,067,000** | | **118,572,000** | | **121,224,000** | | **134,730,000** | | **584,141,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Jumlah produk olahan ikan | kg | 682,000 | 1,050,400 | 1,168,588 | - | 1,191,958 | - | 1,214,860 | - | 1,237,240 | - | 1,266,100 | - | 1,266,100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **10,024,039,000** | | **9,980,188,000** | | **15,681,225,000** | | **15,282,800,000** | | **15,292,989,000** | | **66,261,241,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7,790,032,000** | | **7,526,190,000** | | **8,053,126,000** | | **7,509,933,000** | | **7,319,884,000** | | **38,199,165,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | **1,923,918,000** | | **2,131,755,000** | | **5,977,978,000** | | **5,634,479,000** | | **5,629,771,000** | | **21,297,901,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola | % | 72.00 | 0.00 | 73.00 | - | 74.00 | - | 75.00 | - | 78.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | **155,849,000** | | **173,515,000** | | **1,012,798,000** | | **1,076,467,000** | | **1,183,696,000** | | **3,602,325,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Tingkat intensitas promosi pariwisata | % | 68.00 | 0.00 | 68.00 | - | 70.00 | - | 72.00 | - | 73.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | |
| **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | **40,219,000** | | **29,746,000** | | **158,096,000** | | **227,901,000** | | **221,342,000** | | **677,304,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI | Orang | 5 | 0 | 10 | - | 15 | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | 100 | - | |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | **114,021,000** | | **118,982,000** | | **479,227,000** | | **834,020,000** | | **938,296,000** | | **2,484,546,000** | **Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata** |
| | | Persentase SDM pariwisata yang berkompeten | % | 21.29 | 0 | 25.00 | - | 30.00 | - | 35.00 | - | 40.00 | - | 45.00 | - | 45.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **49,843,615,000** | | **52,345,273,000** | | **56,459,286,000** | | **55,048,620,000** | | **56,270,887,000** | | **269,967,681,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **37,707,530,000** | | **38,432,844,000** | | **39,393,393,000** | | **39,055,520,000** | | **39,433,058,000** | | **194,022,345,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 80.00 | 80.00 | 82 | - | 82 | - | 83 | - | 83 | - | 84 | - | 84 | - | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | **1,985,812,000** | | **2,835,730,000** | | **4,540,299,000** | | **3,660,957,000** | | **3,502,969,000** | | **16,525,767,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Kw/Ha | 67.22 | 66.98 | 66.99 | - | 67.01 | - | 67.03 | - | 67.07 | - | 67.13 | - | 67.13 | - | |
| | | Produktivitas cabe | Kw/Ha | 8.92 | 8.90 | 8.98 | - | 9.06 | - | 9.15 | - | 9.25 | - | 9.34 | - | 9.34 | - | |
| | | Produktivitas tembakau rajang | Kw/Ha | 12 | 12.10 | 12.2 | - | 12.21 | - | 12.22 | - | 12.25 | - | 12.28 | - | 12.28 | - | |
| | | Produktivitas tembakau asepan | Kw/Ha | 9.81 | 9.81 | 9.83 | - | 9.86 | - | 9.88 | - | 9.9 | - | 9.91 | - | 9.91 | - | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | **8,147,870,000** | | **8,437,783,000** | | **9,149,764,000** | | **9,091,780,000** | | **9,604,293,000** | | **44,431,490,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional | % | 34 | 36 | 37 | - | 38 | - | 39 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | |
| | | Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian | % | 26 | 26 | 35 | - | 42 | - | 50 | - | 58 | - | 60 | - | 60 | - | |
| | | Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) | ekor | 265,000 | 277,500 | 286000 | - | 288384 | - | 297039 | - | 305947 | - | 315125 | - | 315125 | - | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | **673,668,000** | | **961,769,000** | | **1,185,715,000** | | **1,255,878,000** | | **1,419,473,000** | | **5,496,503,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | 22 | 22 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | **553,011,000** | | **867,575,000** | | **1,309,227,000** | | **1,042,525,000** | | **1,371,355,000** | | **5,143,693,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya | % | 55 | 55.3 | 58 | - | 60 | - | 62 | - | 64 | - | 66 | - | 66 | - | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | **775,724,000** | | **809,572,000** | | **880,888,000** | | **941,960,000** | | **939,739,000** | | **4,347,883,000** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |
| | | Persentase kelompok tani madya dan utama | % | 0 | 8.33 | 8.63 | - | 9.13 | - | 9.63 | - | 10.13 | - | 10.63 | - | 10.63 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **5,062,564,000** | | **5,602,056,000** | | **8,724,885,000** | | **8,286,857,000** | | **8,473,530,000** | | **36,149,892,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | **21,897,000** | | **34,703,000** | | **69,167,000** | | **82,433,000** | | **110,671,000** | | **318,871,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan | % | 98.00 | 80.00 | 83.00 | - | 90.00 | - | 91.00 | - | 92.00 | - | 93.00 | - | 93.00 | - | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | **4,000,000,000** | | **4,511,388,000** | | **6,373,216,000** | | **6,255,145,000** | | **6,365,972,000** | | **27,527,618,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi | % | 34.00 | 38.00 | 42.00 | - | 46.00 | - | 50.00 | - | 54.00 | - | 58.00 | - | 58.00 | - | |
| | | Persentase PKL yang terbina | % | 25.70 | 34.20 | 43.80 | - | 51.40 | - | 60.00 | - | 68.50 | - | 77.00 | - | 77.00 | - | |
| | | Jumlah pendapatan retribusi pasar | Rp | 4,616,866,333 | 4,616,866,333 | 4,650,000,000 | - | 4,700,000,000 | - | 4,750,000,000 | - | 4,800,000,000 | - | 4,850,000,000 | - | 23,750,000,000 | - | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | **186,013,000** | | **158,643,000** | | **335,953,000** | | **329,729,000** | | **336,824,000** | | **1,347,162,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase pasar yang diawasi | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting ( 18 bapokting ) | % | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | |
| | | Persentase Kinerja Pupuk | % | 95.89 | 16.67 | 96.00 | - | 96.00 | - | 97.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | |
| **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | **251,369,000** | | **287,540,000** | | **681,786,000** | | **669,155,000** | | **664,025,000** | | **2,553,875,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Jumlah komoditas yang mampu ekspor | jenis | 0 | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | **361,971,000** | | **114,025,000** | | **276,667,000** | | **223,052,000** | | **226,154,000** | | **1,201,869,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang | % | 5.00 | 60.00 | 65.00 | - | 70.00 | - | 72.00 | - | 75.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | **241,314,000** | | **495,757,000** | | **988,096,000** | | **727,343,000** | | **769,884,000** | | **3,222,394,000** | **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan** |
| | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri | orang | 3 | 3 | 5 | - | 14 | - | 30 | - | 24 | - | 25 | - | 98 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **7,404,908,000** | | **8,616,154,000** | | **8,489,941,000** | | **9,384,866,000** | | **9,043,028,000** | | **42,938,897,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5,011,879,000** | | **7,317,270,000** | | **6,889,226,000** | | **7,513,171,000** | | **6,887,354,000** | | **33,618,900,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | **2,292,481,000** | | **1,199,732,000** | | **1,501,905,000** | | **1,774,716,000** | | **2,059,438,000** | | **8,828,272,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina | % | 11.40 | 13.20 | 17.31 | - | 21.44 | - | 25.50 | - | 29.48 | - | 33.46 | - | 33.46 | - | |
| **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | **100,548,000** | | **99,152,000** | | **98,810,000** | | **96,979,000** | | **96,236,000** | | **491,725,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | % | 6.38 | 14.56 | 14.56 | - | 18.13 | - | 21.42 | - | 24.45 | - | 27.45 | - | 27.45 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | **331,807,000** | | **361,903,000** | | **360,655,000** | | **353,974,000** | | **351,260,000** | | **1,759,599,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | **331,807,000** | | **361,903,000** | | **360,655,000** | | **353,974,000** | | **351,260,000** | | **1,759,599,000** | **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** |
| | | Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi | % | 0.00 | 0.00 | 75.00 | - | 80.00 | - | 85.00 | - | 90.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **105,975,924,000** | | **106,420,030,000** | | **109,601,932,000** | | **108,378,978,000** | | **110,842,130,000** | | **541,218,994,000** | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **47,235,019,000** | | **47,363,254,000** | | **48,331,223,000** | | **48,390,374,000** | | **49,895,596,000** | | **241,215,466,000** | **Sekretariat Daerah** |
| **4.01.01** | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | | | | | **39,805,879,000** | | **39,920,057,000** | | **40,393,230,000** | | **40,681,484,000** | | **40,663,745,000** | | **201,464,395,000** | **Sekretariat Daerah** |
| | | Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Pesentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik | % | 94.60 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **3,348,885,000** | | **3,250,165,000** | | **3,487,672,000** | | **3,362,997,000** | | **4,182,352,000** | | **17,632,071,000** | **Sekretariat Daerah** |
| | | Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana | % | 0.00 | 0.00 | 19.23 | - | 30.77 | - | 42.31 | - | 53.85 | - | 65.38 | - | 65.38 | - | |
| | | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan | % | 95.00 | 0.00 | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum | % | 100.00 | 100.00 | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **4,080,255,000** | | **4,193,032,000** | | **4,450,321,000** | | **4,345,893,000** | | **5,049,499,000** | | **22,119,000,000** | **Sekretariat Daerah** |
| | | Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan | % | 97.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis | % | 0.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah | % | 9.82 | -16.42 | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | |
| | | Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan | % | 40.00 | -8.16 | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 | - | |
| | | Persentase Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti | % | 75.00 | 75.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **58,740,905,000** | | **59,056,776,000** | | **61,270,709,000** | | **59,988,604,000** | | **60,946,534,000** | | **300,003,528,000** | **Sekretariat DPRD** |
| **4.02.01** | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **40,345,207,000** | | **39,296,725,000** | | **39,274,379,000** | | **38,425,070,000** | | **38,273,540,000** | | **195,614,921,000** | **Sekretariat DPRD** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | **18,395,698,000** | | **19,760,051,000** | | **21,996,330,000** | | **21,563,534,000** | | **22,672,994,000** | | **104,388,607,000** | **Sekretariat DPRD** |
| | | Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda | % | 66.67 | 75.00 | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | |
| | | Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **654,665,455,000** | | **654,378,101,000** | | **678,909,563,000** | | **664,703,198,000** | | **673,552,815,000** | | **3,326,209,132,000** | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **9,942,336,000** | | **9,905,395,000** | | **10,231,939,000** | | **10,073,648,000** | | **10,758,973,000** | | **50,912,291,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **6,139,666,000** | | **6,155,521,000** | | **6,494,993,000** | | **6,369,567,000** | | **6,077,120,000** | | **31,236,867,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 90.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **2,228,751,000** | | **2,197,807,000** | | **2,190,230,000** | | **2,186,020,000** | | **2,742,709,000** | | **11,545,517,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| | | Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD | % | 53.69 | 0.00 | 77.00 | - | 78.00 | - | 79.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **1,573,919,000** | | **1,552,067,000** | | **1,546,716,000** | | **1,518,061,000** | | **1,939,144,000** | | **8,129,907,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| | | Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 54.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 57.80 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **629,077,602,000** | | **628,652,651,000** | | **652,219,712,000** | | **638,571,841,000** | | **646,118,231,000** | | **3,194,640,037,000** | **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah** |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **20,286,904,000** | | **20,510,135,000** | | **21,629,023,000** | | **21,176,430,000** | | **21,448,538,000** | | **105,051,030,000** | **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | **603,137,876,000** | | **602,495,713,000** | | **624,735,446,000** | | **611,662,689,000** | | **618,869,429,000** | | **3,060,901,153,000** | **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah** |
| | | Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah | % | 83.36 | 83.00 | 84.00 | - | 84.50 | - | 85.00 | - | 85.50 | - | 86.00 | - | 86.00 | - | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | **2,873,931,000** | | **2,870,870,000** | | **2,976,843,000** | | **2,914,553,000** | | **2,948,891,000** | | **14,585,088,000** | **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah** |
| | | Persentase barang milik daerah yang teregistrasi | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | **2,778,891,000** | | **2,775,933,000** | | **2,878,400,000** | | **2,818,169,000** | | **2,851,373,000** | | **14,102,766,000** | **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah** |
| | | Rasio PAD | % | 13.37 | 9.88 | 10.00 | - | 10.50 | - | 11.00 | - | 11.50 | - | 12.00 | - | 12.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **14,831,083,000** | | **14,910,836,000** | | **15,469,816,000** | | **15,146,106,000** | | **15,617,021,000** | | **75,974,862,000** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **6,018,874,000** | | **6,044,269,000** | | **6,072,835,000** | | **5,960,329,000** | | **5,866,510,000** | | **29,962,817,000** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 0 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | **2,106,368,000** | | **2,271,856,000** | | **2,312,144,000** | | **2,269,309,000** | | **2,251,909,000** | | **11,211,586,000** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| | | Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi | % | 82.80 | 83.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | Persentase Kinerja ASN bernilai baik | % | 100.00 | 100.00 | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | |
| | | Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan | % | 100.00 | 100.00 | 90.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah | % | 100.00 | 100.00 | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | |
| **5.03.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **6,705,841,000** | | **6,594,711,000** | | **7,084,837,000** | | **6,916,468,000** | | **7,498,602,000** | | **34,800,459,000** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| | | Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya | % | 100.00 | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **814,434,000** | | **909,219,000** | | **988,096,000** | | **911,603,000** | | **1,058,590,000** | | **4,681,942,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | **814,434,000** | | **909,219,000** | | **988,096,000** | | **911,603,000** | | **1,058,590,000** | | **4,681,942,000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | % | 63.00 | 63.00 | 54.80 | - | 59.40 | - | 64.00 | - | 68.60 | - | 73.20 | - | 73.20 | - | |
| | | Pertumbuhan inovasi perangkat daerah | % | 11.12 | 13.34 | 14.68 | - | 15.00 | - | 15.50 | - | 16.00 | - | 16.50 | - | 16.50 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **18,272,978,000** | | **18,371,238,000** | | **19,059,943,000** | | **18,661,108,000** | | **19,148,432,000** | | **93,513,699,000** | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **18,272,978,000** | | **18,371,238,000** | | **19,059,943,000** | | **18,661,108,000** | | **19,148,432,000** | | **93,513,699,000** | **Inspektorat** |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **12,700,640,000** | | **12,812,811,000** | | **12,868,399,000** | | **12,504,077,000** | | **12,665,816,000** | | **63,551,743,000** | **Inspektorat** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | **1,256,843,000** | | **1,287,977,000** | | **1,432,184,000** | | **1,414,386,000** | | **1,555,636,000** | | **6,947,026,000** | **Inspektorat** |
| | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4 | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 500.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pengawasan khusus | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | **4,315,495,000** | | **4,270,450,000** | | **4,759,360,000** | | **4,742,645,000** | | **4,926,980,000** | | **23,014,930,000** | **Inspektorat** |
| | | Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2 | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3 | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4 | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus | % | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **95,959,736,200** | | **96,475,220,200** | | **100,081,760,200** | | **97,982,680,200** | | **109,002,135,200** | | **499,501,532,000** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **95,959,736,200** | | **96,475,220,200** | | **100,081,760,200** | | **97,982,680,200** | | **109,002,135,200** | | **499,501,532,000** | **- Kecamatan<br>- Kelurahan** |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **80,140,901,200** | | **80,264,210,200** | | **82,155,000,200** | | **80,599,428,200** | | **86,458,994,200** | | **409,618,534,000** | **- Kecamatan<br>- Kelurahan** |
| | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 99.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **184,744,000** | | **204,984,000** | | **229,474,000** | | **233,066,000** | | **298,619,000** | | **1,150,887,000** | **Kecamatan** |
| | | Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) | % | 97.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **9,374,610,000** | | **9,279,691,000** | | **9,974,391,000** | | **9,532,778,000** | | **12,330,297,000** | | **50,491,767,000** | **- Kecamatan<br>- Kelurahan** |
| | | Persentase lembaga masyarakat aktif | % | 93.00 | 95.00 | 93.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | 95.00 | - | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **3,137,048,000** | | **3,097,676,000** | | **3,435,108,000** | | **3,308,058,000** | | **4,093,460,000** | | **17,071,350,000** | **Kecamatan** |
| | | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | % | 95.00 | 97.00 | 96.00 | - | 96.00 | - | 96.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **479,527,000** | | **618,699,000** | | **742,959,000** | | **724,361,000** | | **1,012,438,000** | | **3,577,984,000** | **Kecamatan** |
| | | Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani | % | 92.00 | 96.00 | 96.00 | - | 96.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | **2,642,906,000** | | **3,009,960,000** | | **3,544,828,000** | | **3,584,989,000** | | **4,808,327,000** | | **17,591,010,000** | **Kecamatan** |
| | | Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu | % | 88.00 | 92.00 | 95.00 | - | 97.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | 98.00 | - | |
| | | Persentase desa tertib administrasi | % | 84.00 | 86.00 | 94.00 | - | 95.00 | - | 96.00 | - | 96.00 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | 2020 | 2021*) | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **5,157,759,000** | | **5,185,494,000** | | **8,155,291,000** | | **5,267,313,000** | | **5,602,119,000** | | **29,367,976,000** | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **5,157,759,000** | | **5,185,494,000** | | **8,155,291,000** | | **5,267,313,000** | | **5,602,119,000** | | **29,367,976,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3,212,356,000** | | **3,073,756,000** | | **3,691,262,000** | | **3,138,807,000** | | **3,140,599,000** | | **16,256,780,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | **22,121,000** | | **56,517,000** | | **438,715,000** | | **59,158,000** | | **69,290,000** | | **645,801,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan | % | 60.00 | 0.00 | 1.00 | - | 4.00 | - | 7.00 | - | 10.00 | - | 13.00 | - | 13.00 | - | |
| | | Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan | % | 12.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4.00 | - | 7.00 | - | 11.00 | - | 15.00 | - | 15.00 | - | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | **1,142,027,000** | | **1,121,213,000** | | **2,226,979,000** | | **1,143,197,000** | | **1,134,432,000** | | **6,767,848,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik | % | 0.00 | 0.00 | 2.00 | - | 4.00 | - | 6.00 | - | 8.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | |
| | | Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu | % | 100.00 | 0.00 | 60.00 | - | 65.00 | - | 70.00 | - | 75.00 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | **402,190,000** | | **431,309,000** | | **680,798,000** | | **421,859,000** | | **668,837,000** | | **2,604,993,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | **52,285,000** | | **91,220,000** | | **392,274,000** | | **81,463,000** | | **107,784,000** | | **725,026,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Terbentuk | % | 0.00 | 0.00 | 34.00 | - | 67.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | |
| | | Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar | % | 20.00 | 26.00 | 6.00 | - | 12.00 | - | 18.00 | - | 25.00 | - | 31.00 | - | 31.00 | - | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | **326,780,000** | | **411,479,000** | | **725,263,000** | | **422,829,000** | | **481,177,000** | | **2,367,528,000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| | | Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan | % | 100.0 | 0.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | |
| | | Persentase deteksi dini potensi konflik sosial | % | 0.0 | 0.0 | | - | 80.0 | - | 80.0 | - | 85.0 | - | 85.0 | - | 85.0 | - | |
| ***Keterangan : *) Proyeksi Capaian 2021*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | **2,671,826,951,200** | | **2,693,526,301,200** | | **2,809,130,163,200** | | **2,753,642,765,200** | | **2,837,589,477,200** | | **13,765,715,658,000** | |

# BAB VIII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Klaten dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan target indikator kinerja utama dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan persoalan pembangunan daerah dalam waktu 5 tahun ke depan, utamanya kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19*) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat saat ini. Covid-19 berdampak besar bagi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi secara nasional maupun daerah, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Selain itu minat investasi juga akan menurun dengan signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Penanganan Pademi Covid-19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk menyediakan berbagai paket kebijakan, baik untuk mengobati pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif). Kondisi ini sangat mempengaruhi keuangan daerah, sehingga dalam hal penganggaran pada RPJPD belum bisa dipedomani, karena keuangan daerah selama kurun waktu 15 tahun yang lalu tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Dampak dari Pandemu Covid-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Pandemi Covid-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan *(demand)* maupun sisi penawaran *(supply),* yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor

informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disrupsi ekonomi akibat Covid-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten mempengaruhi penetapan target indikator kinerja utama Kabupaten Klaten. Namun dalam pencapaian target dalam pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Klaten telah dijabarkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, kemudian dalam arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam Program Prioritas Daerah yang dijabarkan sesuai dengan tema tahunan daerah. Implementasi program prioritas tersebut berupa Program Unggulan di mana Pemerintah Kabupaten Klaten mulai menempatkan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa rencana untuk menstabilkan perekonomian dan mendukung mata pencaharian masyarakat, *refocusing* dan realokasi APBD dalam penanganan Pandemi Covid-19. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan fokus utama kebijakan dalam mendukung anggaran kesehatan, skema perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri melalui kebijakan luar biasa atau *extraordinary*, diantaranya melalui pemberian stimulus dan/atau hibah bagi sektor/pelaku ekonomi yang perlu mendapat prioritas dalam jangka pendek.

Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi akibat kondisi pandemi Covid-19, serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka ditetapkan indikator kinerja utama Kabupaten Klaten sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.1.

**Tabel 8.1**
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Kinerja | | | | | Target Akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1. | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | Skor hasil survei yang mencakup dimensi gotong royong, dimensi toleransi dan dimensi rasa aman | Indeks | NA | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |
| 2. | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi | Indeks | 57,55 | 57,55* | 60,01 | 60,62 | 64 | 66 | 70 | 70 |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi | (PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100 | % | -1,18 | 1,03 | 2,52 | 3,51 | 4,45 | 5,13 | 5,47 | 5,47 |
| 4. | Infrastruktur wilayah kondisi baik | Rata-rata dari 7 indikator infrastruktur (Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi kondisi baik; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; persentase drainase kondisi baik) | % | 74,58 | 75,45 | 76,11 | 76,72 | 77,18 | 77,51 | 77,72 | 77,72 |
| 5. | Rasio konektivitas | Perhitungan ratio konektivitas sesuai permendagri 18/2020 | Rasio | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ | Indeks | 75,56 | 75,56* | 76,46 | 76,88 | 77,30 | 77,73 | 78,15 | 78,15 |
| 7. | Persentase Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin dibagi | % | 12,89 | 12,89* | 12,49 | 11,69 | 11,09 | 10,49 | 9,89 | 9,89 |

| No | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | | Target Kinerja | | | | | Target Akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| | Miskin | Jumlah Penduduk dikali 100 | | | | | | | | | |
| 8. | Indeks Pembangunan Gender | IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100 | Indeks | 96,17 | 96,17* | 96,46 | 96,75 | 97,04 | 97,33 | 97,62 | 97,62 |
| 9. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | (30% dikali IKA) ditambah (30% dikali IKU) ditambah (40% dikali IKTL) | Indeks | 52,85 | 54,35 | 54,68 | 55,01 | 55,34 | 55,67 | 55,99 | 55,99 |

*Keterangan: *) realisasi tahun sebelumnya*

## 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten tertuang pada Tabel 8.2.

**Tabel 8.2**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke | | Target Kinerja Tahun Ke- | | | | | Target Akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **A** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | | |
| 1) | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | Indeks | NA | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 2) | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 57,55 | 57,55* | 60,01 | 60,62 | 64 | 66 | 70 | 70 | |
| 3) | Pertumbuhan Ekonomi | % | -1,18 | 1,03 | 2,52 | 3,51 | 4,45 | 5,13 | 5,47 | 5,47 | |
| 4) | Infrastruktur wilayah kondisi baik | % | 74,58 | 75,45 | 76,11 | 76,72 | 77,18 | 77,51 | 77,72 | 77,72 | |
| 5) | Rasio konektivitas | Rasio | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| 6) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 75,56 | 75,56* | 76,46 | 76,88 | 77,30 | 77,73 | 78,15 | 78,15 | |
| 7) | Persentase Penduduk Miskin | % | 12,89 | 12,89* | 12,49 | 11,69 | 11,09 | 10,49 | 9,89 | 9,89 | |
| 8) | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 96,17 | 96,17* | 96,46 | 96,75 | 97,04 | 97,33 | 97,62 | 97,62 | |
| 9) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 52,85 | 54,35 | 54,68 | 55,01 | 55,34 | 55,67 | 55,99 | 55,99 | |
| **B** | **Aspek Pelayanan umum** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Urusan Pendidikan** | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| 10) | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,25 | 13,25* | 13,52 | 13,62 | 13,73 | 13,84 | 13,94 | 13,94 | |
| 11) | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,58 | 8,58* | 8,64 | 8,72 | 8,80 | 8,88 | 8,96 | 8,96 | |
| **2.** | **Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| 12) | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 76,78 | 76,78* | 76,84 | 76,89 | 76,93 | 76,98 | 77,02 | 77,02 | |
| **3.** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 13) | Persentase jalan dalam kondisi mantap | % | 90,08 | 90,86 | 91,06 | 91,26 | 91,46 | 91,66 | 91,86 | 91,86 | |
| 14) | Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 61,44 | 61,45 | 61,47 | 61,48 | 61,50 | 61,51 | 61,52 | 61,52 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke | | Target Kinerja Tahun Ke- | | | | | Target Akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 15) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 36,17 | 39,2 | 41,5 | 43,6 | 44,9 | 45,6 | 46,2 | 46,2 | |
| 16) | Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi) | % | 97,21 | 97,76 | 98,32 | 98,87 | 99,43 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | |
| 17) | Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang | % | 88 | 88,2 | 88,4 | 88,6 | 88,8 | 89 | 89,2 | 89,2 | |
| **4.** | **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 18) | Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi) | % | 97,21 | 97,76 | 98,32 | 98,87 | 99,43 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | |
| **5.** | **Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;** | | | | | | | | | | |
| 19) | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Indeks | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 20) | Persentase perda dan perkada yang ditegakkan | % | 91,6 | 92,00 | 92,40 | 92,80 | 93,20 | 93,60 | 94,00 | 94,00 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| **6.** | **Urusan Sosial** | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 21) | Persentase PMKS yang tertangani | % | 90,32 | 65 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 69,5 | |
| **7.** | **Urusan Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
| 22) | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,46 | 5,31 | 5,16 | 4,97 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke | | Target Kinerja Tahun Ke- | | | | | Target Akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **8.** | **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak** | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 23) | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indek | 72,35 | 72,68 | 73,34 | 73,67 | 74,00 | 74,33 | 74,66 | 74,66 | |
| 24) | Skor Kabupaten Layak Anak | Nilai | NA | 710 | 725 | 740 | 755 | 770 | 785 | 785 | |
| **9.** | **Urusan Pangan** | | | | | | | | | | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 25) | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 84,80 | 90,25 | 90,50 | 90,75 | 91 | 91,25 | 91,5 | 91,5 | |
| **10.** | **Urusan Pertanahan** | | | | | | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 26) | Persentase lahan milik pemerintah yang bersertifikat | % | 55,66 | 56,15 | 56,63 | 57,12 | 57,60 | 58,08 | 58,57 | 58,57 | |
| **11.** | **Urusan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 27) | Indeks kualitas air | Indeks | 36,15 | 36,39 | 36,63 | 36,87 | 37,11 | 37,35 | 37,59 | 37,59 | |
| 28) | Indeks kualitas udara | Indeks | 76,82 | 77,31 | 77,80 | 78,29 | 78,78 | 79,27 | 79,76 | 79,76 | |
| 29) | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 42,54 | 42,72 | 42,9 | 43,08 | 43,26 | 43,44 | 43,62 | 43,62 | |
| 30) | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | Indeks | 56,95 | 58,95 | 59,95 | 61,95 | 63,95 | 65,95 | 66,95 | 66,95 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **12.** | **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 31) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | 82,92 | 83,1 | 83,28 | 83,46 | 83,64 | 83,82 | 84,00 | 84,00 | |
| **13.** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 32) | Indeks Desa Membangun | Indeks | 0,6854 | 0,6874 | 0,6894 | 0,6914 | 0,6934 | 0,6954 | 0,6974 | 0,6974 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke | | Target Kinerja Tahun Ke- | | | | | Target Akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **14.** | **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 33) | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | |
| **15.** | **Urusan Perhubungan** | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| 34) | Kinerja Lalu Lintas *(Level Of Service)* | Nilai | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | |
| **16.** | **Urusan Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 35) | Indeks SPBE | Indeks | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | |
| **17.** | **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 36) | Pertumbuhan Usaha Mikro | % | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | |
| **18.** | **Urusan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 37) | Persentase peningkatan investasi PMDN | % | -64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 38) | Persentase peningkatan investasi PMA | % | -59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| **19.** | **Urusan Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata |
| 39) | Tingkat prestasi pemuda dan olahraga | % | 0 | 0 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | |
| **20.** | **Urusan Statistik** | | | | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 40) | Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah | % | 25 | NA | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | |
| **21.** | **Urusan Persandian** | | | | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 41) | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Indeks | 0 | NA | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 92 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke | | Target Kinerja Tahun Ke- | | | | | Target Akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **22.** | **Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata |
| 42) | Persentase Pemajuan Kebudayaan | % | 10,9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| **23.** | **Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 43) | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan | Indeks | 77,92 | 77,92* | 77,95 | 78,01 | 78,25 | 78,26 | 79 | 79 | |
| **24.** | **Urusan Kearsipan** | | | | | | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 44) | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan | Indeks | 77,92 | 77,92* | 77,95 | 78,01 | 78,25 | 78,26 | 79 | 79 | |
| **25.** | **Urusan Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 45) | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap | ton | 27.788 | 28.852 | 29.708 | 30.586 | 31.492 | 32.057 | 32.562 | 32.562 | |
| **26.** | **Urusan Pariwisata** | | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata |
| 46) | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata | % | 2,59 | 2,84 | 3,13 | 3,44 | 3,79 | 4,16 | 4,58 | 4,58 | |
| **27.** | **Urusan Pertanian** | | | | | | | | | | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 47) | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan | % | 2,12 | 2,52 | 2,63 | 2,68 | 2,88 | 3,04 | 3,14 | 3,14 | |
| **28.** | **Urusan Perdagangan** | | | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 48) | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | % | (4,79) | (0,85) | 1,24 | 1,79 | 2,29 | 3,43 | 3,96 | 3,96 | |
| **29.** | **Urusan Perindustrian** | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 49) | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | % | (1,21) | 0,05 | 1,47 | 2,24 | 3,38 | 3,84 | 4,09 | 4,09 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke | | Target Kinerja Tahun Ke- | | | | | Target Akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **30.** | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| 50) | Peringkat/ Nilai SAKIP | Skor | NA | NA | 62 | 62,5 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
| 51) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 81,88 | NA | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | |
| **31.** | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| 52) | Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Indeks | 77,25 | 77,28 | 77,98 | 81,56 | 81,98 | 82,23 | 83,75 | 83,75 | |
| **32.** | **Unsur Penunjang Perencanaan** | | | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 53) | Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah | Skor | 20,79 | 22,50* | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | |
| **33.** | **Unsur Penunjang Keuangan** | | | | | | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| 54) | Opini Laporan Keuangan | Opin | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| **34.** | **Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 55) | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | Indeks | NA | NA | 180 | 200 | 225 | 250 | 260 | 260 | |
| **35.** | **Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 56) | Indeks Inovasi Daerah | Skor | 1.888 | NA | 2.001 | 2.051 | 2.101 | 2.151 | 2.201 | 2.201 | |
| **36.** | **Unsur Penunjang Pengawasan** | | | | | | | | | | Inspektorat |
| 57) | Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) | Indeks | NA | NA | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | |

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke | | Target Kinerja Tahun Ke- | | | | | Target Akhir RPJMD | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| **37.** | **Unsur Penunjang Kewilayahan** | | | | | | | | | | Kecamatan |
| 58) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan | Indeks | 79,49 | 79,99 | 80,49 | 80,99 | 81,49 | 81,99 | 82,49 | 82,49 | |
| **38.** | **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 59) | Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **C** | **Aspek Daya Saing Daerah** | | | | | | | | | | |
| 60) | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 2,9675 | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,30 | Seluruh Perangkat Daerah |

*Keterangan: *) realisasi tahun sebelumnya*

# BAB IX
# PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klaten serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

## 9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027.

## 9.2. Kaidah Pelaksanaan

a. Bupati Klaten berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga Visi jangka menengah Kabupaten Klaten yaitu: "**Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**" dapat terwujud.

**BUPATI KLATEN,**

**SRI MULYANI**





